



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 62 TAHUN 2018**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 129 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jls Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
30. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;

31. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
32. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1.

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu (1) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Kebijakan Umum APBD adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan RKPD Tahun 2019 dimaksudkan sebagai pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2019.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, secara umum bertujuan untuk meningkatkan sistem perencanaan pembangunan daerah, sekaligus untuk mengefektifkan dan mengefisienkan penggunaan anggaran tahun 2019.
- (2) Tujuan dari RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, lebih spesifik adalah:
 - a. Sebagai salah satu instrumen dalam melaksanakan RPJMD;
 - b. Sebagai pedoman bagi PD dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2019; dan
 - c. Untuk menciptakan kepastian kebijakan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan Rancangan APBD Tahun 2019 Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2019 sebagai salah satu bahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2019 bersama DPRD.

Pasal 5

PD menggunakan RKPD Tahun 2019 sebagai pedoman untuk menyusun program/kegiatan pembangunan Tahun 2019, yang ditetapkan dalam Rencana Kerja PD Tahun 2019.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 6

- (1) RKPD Tahun 2019 memuat:
 - a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - b. program prioritas pembangunan daerah; dan
 - c. rencana kerja, pendanaan, dan prakiraan maju.
- (2) Rancangan kerangka ekonomi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah paling sedikit 2 (dua) tahun sebelumnya, dan perkiraan untuk tahun yang direncanakan
- (3) Program prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan
- (4) Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (5) Rencana kerja dan pendanaan serta perkiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

BAB IV PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 7

RKPD Tahun 2019 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2016–2021 yang memuat 10 (sepuluh) Prioritas Tahun 2019, yaitu:

- a. Pengamalan Agama, Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal Dalam Kehidupan Bermasyarakat;
- b. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan;
- c. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Pesisir Selatan;
- d. Peningkatan Ekonomi Pangan Berbasis Komoditi Lokal yang Berdaya Saing;
- e. Peningkatan Daya Tarik, Pemasaran, Industri dan Kelembagaan Pariwisata;
- f. Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Kawasan Ekonomi Strategis;
- g. Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Rakyat Berbasis Lingkungan Hidup dan Kebencanaan;
- h. Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengurangan Angka Pengangguran;
- i. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Pelayanan Prima; dan
- j. Pencegahan Tingkat Kejahatan, Kriminalitas dan Peredaran Obat Terlarang.

BAB V

PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 8

- (1) PD dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran agar mencantumkan uraian tentang indikator kinerja masing-masing program/kegiatan secara terukur.
- (2) PD agar membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati c.q. Bagian Pembangunan dan Infrastruktur pada Sekretariat Daerah dan Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan.
- (4) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran yang diajukan oleh PD yang bersangkutan pada tahun berikutnya.

Pasal 9

PD agar menilai kesesuaian antara Rencana Kerja Tahun 2019 dengan Kebijakan Umum APBD Tahun 2019 yang akan diajukan.

BAB VI SISTEMATIKA

Pasal 10

Sistematika RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 disusun dalam 6 (enam) Bab yang terdiri dari:

- BAB I : Merupakan BAB pendahuluan yang meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan RKPD, Hubungan antar dokumen, Sistematika Dokumen RKPD, maksud dan tujuan penyusunan RKPD.
- BAB II : Merupakan BAB yang menggambarkan potret dari hasil evaluasi kondisi pembangunan daerah selama Tahun 2016 sampai dengan tahun berjalan.
- BAB III : Merupakan BAB yang menggambarkan rancangan ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan Tahun 2019 yang berisikan proyeksi pertumbuhan ekonomi Pesisir Selatan Tahun 2019 dan perkiraan Tahun 2019 serta *Product Domestic Regional Bruto* Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 dan Perkiraan Tahun 2019.
- BAB IV : Merupakan BAB yang menampilkan prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2019 yang berisikan prioritas kelanjutan pembangunan Tahun 2019 yang mencakup: Pengamalan agama, pelestarian budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat; Peningkatan akses dan kualitas pendidikan; Peningkatan derajat kesehatan masyarakat Pesisir Selatan; Peningkatan ekonomi pangan berbasis komoditi lokal yang berdaya saing; Peningkatan daya tarik, pemasaran, industri dan kelembagaan pariwisata; Pengembangan kawasan perdesaan dan kawasan ekonomi strategis; Pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat berbasis lingkungan hidup dan kebencanaan; Penurunan Tingkat kemiskinan dan pengurangan angka pengangguran; Pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan pelayanan prima; Pencegahan tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat terlarang.
- BAB V : Merupakan BAB yang menguraikan tentang rencana program dan kegiatan prioritas daerah Tahun 2019 berdasarkan bidang urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan dan disusun dalam bentuk matriks.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2018**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019**

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah mengamanatkan bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (untuk jangka 20 tahun), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (untuk jangka 5 tahun), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (untuk jangka 1 tahun).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD, adalah suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKPD selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Sebagai suatu dokumen resmi rencana daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Dengan demikian Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan atas dokumen RKPD.

KUA dan PPAS yang telah disepakati selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD.

Fungsi RKPD mencakup sebagai berikut:

- a. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
- b. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
- c. Mengarahkan proses penyusunan RENJA dan RKA OPD;
- d. Menjadi dasar pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS, RAPBD dan APBD;
- e. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah;
- f. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur capaian target kinerja program pembangunan jangka menengah;
- g. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur capaian target standar pelayanan minimal dan mengukur kinerja pelayanan OPD;
- h. Instrumen bagi pemerintah daerah sebagai acuan LPPD kepada pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan ILPPD kepada masyarakat.
- i. Menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang perlu disampaikan kepada Pemerintah Pusat.

Substansi RKPD memuat program dan kegiatan PD dan dokumen RKPD merupakan acuan bagi PD dalam menyempurnakan Rencana Kerja PD (Renja PD) untuk tahun yang sama. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Renja PD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Penyusunan APBD diawali dengan penyampaian kebijakan umum APBD sejalan dengan RKPD, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap PD.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Rancangan kerangka ekonomi daerah, mengemukakan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup: a) Indikator Pertumbuhan Ekonomi Daerah; b) Sumber-sumber Pendapatan dengan perincian, sumber pendapatan tahun lalu dan satu tahun sebelumnya, tahun berjalan, tahun rencana dan satu tahun setelah tahun rencana sebagai prakiraan maju pendapatan; dan c) Kebijakan Pemerintah Daerah yang diperlukan dalam Pembangunan Perekonomian Daerah meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah, yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Huruf b

Program prioritas pembangunan daerah, merupakan mengemukakan secara eksplisit prioritas pembangunan daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, serta aspirasi masyarakat yang disepakati dalam hasil Musrenbang Tahunan Daerah.

Huruf c

Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, merupakan rincian program dan kegiatan pokok RKPD tahun rencana, instansi pelaksana (PD), indikator capaian masing-masing program dan kegiatan serta pagu indikatifnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Dokumen penyusunan anggaran yang disampaikan oleh masing-masing PD yang disusun dalam format Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD harus betul-betul dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta korelasi antara besaran anggaran (beban kerja dan harga satuan) dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai atau diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Oleh karena itu penerapan anggaran berbasis kinerja mengandung makna bahwa setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk bertanggungjawab atas hasil proses dan penggunaan sumber dayanya.

RKA PD ini kemudian disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. Hasil pembahasan ini disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018
NOMOR.....

BAB VI : Merupakan BAB penutup yang berisikan kesimpulan dari penyusunan RKPD Tahun 2019 dan saran-saran yang bermanfaat untuk kelanjutan pembangunan di masa yang akan datang.

Pasal 11

RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

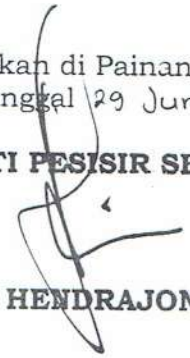
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 29 Juni 2018

BUPATI PESISIR SELATAN,


HENDRAJONI

Diundangkan di Painan
pada tanggal 29 Juni 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**


ERIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 ini disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021. Penyusunan RKPD ini telah mempedomani Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai suatu dokumen resmi Pemerintah Daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjadi jembatan antara Perencanaan Strategis Jangka Menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu proses penyusunan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan yang penyusunannya dilaksanakan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta mewujudkan efisiensi dan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.

Proses penyusunan RKPD dilaksanakan melalui mekanisme /tahapan yang diawali dari Musrenbang tingkat Nagari, Kecamatan, Forum Perangkat Daerah / Antar Perangkat Daerah dan Musrenbang tingkat Kabupaten dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan yang memenuhi tiga prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip Partisipatif (*participative*)

Prinsip partisipatif menunjukkan bahwa masyarakat yang akan diuntungkan oleh (atau memperoleh manfaat dari) perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. Dengan kata lain masyarakat menikmati faedah perencanaan bukan semata-mata dari hasil perencanaan, tetapi dari keikutsertaan dalam prosesnya.

2. Prinsip Kestinambungan (*sustainable*)

Prinsip ini menunjukkan bahwa perencanaan tidak hanya terdiri atas satu tahap akan tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan dan jangan sampai terjadi kemunduran. Juga diartikan perlunya evaluasi dan pengawasan dalam pelaksanaannya sehingga secara terus-menerus dapat diadakan koreksi dan perbaikan selama perencanaan dilaksanakan.

3. Prinsip Keseluruhan (*holistic*)

Prinsip ini menunjukkan bahwa masalah dalam perencanaan, pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi atau unsur tetapi harus dilihat dari berbagai aspek dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan. Dalam konsep tersebut unsur yang dikehendaki selain harus mencakup hal-hal di atas juga mengandung unsur yang dapat berkembang serta terbuka dan demokratis.

Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah;
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD);
3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan menentukan Prioritas dan Plafond Anggaran

Sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 disusun dengan menggunakan pendekatan perencanaan sebagai berikut:

1. Pendekatan Teknokratis yaitu pendekatan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang dilandasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terstruktur dan berkelanjutan. Pendekatan ini dilaksanakan pemerintah daerah melalui kewenangan tugas pokok dan fungsi SKPD, yang implementasinya tercermin dari:
 - a) Evaluasi menyeluruh tentang kinerja pembangunan tahun lalu;
 - b) Rumusan status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah masa kini;
 - c) Rumusan peluang dan tantangan kedepan yang mempengaruhi penyusunan RKPD;
 - d) Rumusan tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan;
 - e) Pertimbangan atas kendala ketersediaan sumberdaya dan dana (kendala fiskal daerah);
 - f) Rumusan dan prioritas program dan kegiatan Perangkat Daerah berbasis kinerja;
 - g) Tolok ukur dan target kinerja capaian program dan kegiatan;
 - h) Prakiraan maju pendanaan program dan kegiatan untuk satu tahun berikutnya;
 - i) Kejelasan siapa bertanggungjawab untuk mencapai tujuan, sasaran dan hasil, serta waktu penyelesaian, termasuk review kemajuan pencapaian sasaran.

Melalui pendekatan ini rencana yang disusun mencerminkan adanya kerangka pikir komprehensif dan terpadu, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis;

2. Pendekatan Demokratis dan Partisipatif; Pendekatan ini mengakomodasi secara langsung berbagai kepentingan stakeholders dalam pembangunan. Pendekatan demokratis dan partisipatif diwujudkan dalam RKPD berupa :
 - a) Identifikasi pemangku kepentingan yang relevan untuk dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di setiap tahapan penyusunan RKPD;
 - b) Kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintah dan non pemerintah dalam pengambilan keputusan;
 - c) Transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan;
 - d) Keterwakilan yang memadai dari seluruh segmen masyarakat, terutama kaum perempuan dan kelompok marginal;
 - e) Rasa memiliki masyarakat terhadap RKPD;
 - f) Pelibatan media;
 - g) Pelaksanaan Musrenbang RKPD yang berkualitas dari segi penerapan perencanaan partisipatif;
 - h) Konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti: perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, dan kebijakan serta prioritas program;
3. Pendekatan Politis; Pendekatan ini mengakomodasi kepentingan politik dari para pejabat dan pelaku politik baik melalui DPRD maupun partai politik dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Dalam pelaksanaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari aspek perencanaan hal-hal yang bersifat politik strategis dirumuskan dalam bentuk dokumen perencanaan baku sebagai pedoman bersama dalam perencanaan pembangunan dari waktu ke waktu, mulai dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan. Dalam konteks penyusunan RKPD Tahun 2019 disusun berdasarkan amanat RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 dan juga arahan umum RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 yang merupakan bentuk

konsekuensi politik yang harus dilakukan oleh Kepala Daerah terpilih. Pendekatan politis tercermin pada RKPD berupa :

- a) Rapat Koordinasi Kepala Daerah dengan kepala Perangkat Daerah membahas hal-hal strategis yang berkembang baik dari aspek politik, ekonomi dan sosial budaya masyarakat yang dapat berpengaruh pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Tahun 2019;
 - b) Keterlibatan aktif DPRD dalam Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten/RKPD termasuk sinergitas hasil jaring aspirasi masyarakat oleh DPRD dan pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan langsung pada Musrenbang Kabupaten dalam rangka menyepakati rumusan rancangan RKPD Tahun 2019;
 - c) Kedudukan RKPD sebagai Peraturan Bupati mengikat semua pihak untuk menjadikan RKPD sebagai acuan dalam penyusunan seluruh dokumen perencanaan termasuk RAPBD;
4. Pendekatan Top Down; Pendekatan ini memadukan antara arahan yang bersifat mandatory dari pemerintahan yang lebih tinggi (Pemerintah dan Pemerintah Provinsi) dengan kepentingan Pemerintah Daerah bersama masyarakat. Dalam prakteknya perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan yang kemudian diselaraskan melalui penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan dan rapat koordinasi/rapat kerja, mulai dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten. Pendekatan perencanaan ini tercermin pada RKPD berupa adanya :
- a) Sinergi dengan RKPD dan RENJA SKPD Provinsi Sumatera Barat, RKP dan RENJA Kementerian/Lembaga;
 - b) Konsisten dengan RPJMD maupun RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan;
 - c) Konsisten dengan RTRW Daerah;
 - d) Penanganan masalah dengan pendekatan holistik dan pendekatan sistem;
 - e) Sinergi dengan komitmen pemerintah terhadap tujuan-tujuan pembangunan global seperti Millenium Development Goals (MDGs), sustainable development, pemenuhan Hak Asasi Manusia, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan sebagainya;

5. Pendekatan Bottom Up; Pendekatan ini mengakomodasi secara optimal masukan dari masyarakat luas melalui jenjang pemerintahan dan struktur kemasyarakatan dari bawah. Perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan yang diselaraskan melalui penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan, mulai dari tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten. Pendekatan perencanaan ini tercermin dari adanya :

- a) Penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui komunikasi masyarakat sekaligus untuk melihat konsistensi dengan visi, misi, dan program Kabupaten Pesisir Selatan;
- b) Memperhatikan hasil proses musrenbang dan kesepakatan dengan masyarakat tentang prioritas pembangunan daerah;
- c) Mempertimbangkan hasil Forum SKPD.

RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan permasalahan pembangunan daerah serta indikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode satu tahun kedepan secara terencana melalui sumber pembiayaan baik APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sebagai penjabaran dari RPJMD, RKPD mempunyai kedudukan dan fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RKPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Dengan demikian, RKPD berperan menjembatani sinkronisasi harmonisasi rencana tahunan dengan perencanaan strategis atau mengoperasionalkan rencana strategis kedalam langkah-langkah yang lebih konkrit dan terukur untuk tercapainya rencana strategis jangka menengah.

RKPD sebagaimana dimaksud diatas, disusun dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan RKPD
2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD
3. Penyusunan Rancangan RKPD

4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD
5. Penetapan RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 dalam penyusunannya harus selaras dengan Dokumen Perencanaan Tingkat Nasional dan Dokumen Perencanaan Tingkat Provinsi, sehingga terjadi sinergitas perencanaan antara Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten.

RKPD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019 merupakan tahun ketiga perencanaan dan pelaksanaan RPJMD dan akan mendasari pelaksanaan pembangunan di periode berikutnya. Tema Perencanaan Tahun 2019 adalah :

Pemerataan Pembangunan dan Peningkatan Pelayanan Publik untuk Pertumbuhan lebih Berkualitas dan Menurunkan Kemiskinan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan Perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

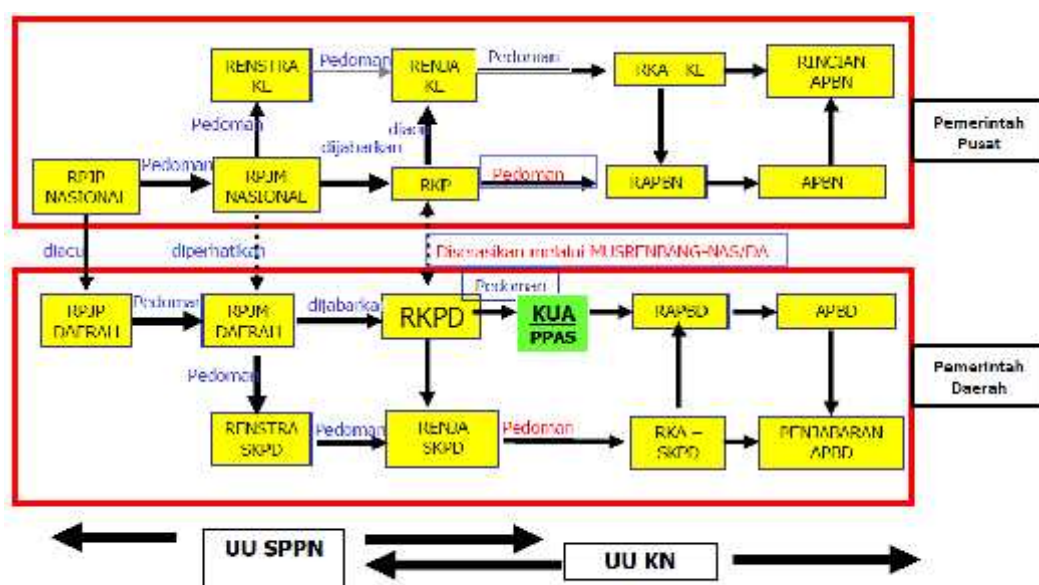
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

RKPD Kabupaten Pesisir Selatan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan dokumen perencanaan di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten Pesisir Selatan. Di tingkat Kabupaten, RKPD Kabupaten Pesisir Selatan merupakan penjabaran RPJMD dan pedoman dalam penyusunan RAPBD. Sedangkan keterkaitan dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi, RKPD Kabupaten Pesisir Selatan berpedoman pada RKP Nasional dan RKPD Provinsi Sumatera Barat. Lebih lanjut, RKPD akan diuraikan lebih spesifik dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang pada akhirnya menjadi acuan penyusunan APBD Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Secara diagramatis keterkaitan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat pada bagan berikut :



Sumber : Undang-undang No. 25 tahun 2004

Mengacu pada bagan di atas dapat diketahui bahwa secara rinci hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut :

1. RKPD disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RKP Nasional melalui mekanisme Musrenbang;
2. RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah yang didalamnya memuat mengenai visi, misi dan arah pembangunan daerah;
3. RKPD ini menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari tiap Perangkat Daerah;
4. RKPD ini nantinya dijabarkan ke dalam RAPBD dengan berpedoman juga kepada Renja Perangkat Daerah.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 adalah untuk menjamin sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RKPD Tahun 2019 tersebut merupakan pedoman dalam penyusunan RAPBD dan merupakan acuan dalam perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) maupun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019. Selanjutnya RKPD tersebut juga dijadikan dasar untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi semua pelaku pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan, dalam rangka mewujudkan pencapaian indikator dan target kinerja prioritas/agenda/program pembangunan daerah yang ditetapkan

dalam RPJMD 2016-2021 yang akhirnya ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

Oleh karena itu, RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. **Secara substansial**, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. **Secara normatif**, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. **Secara operasional**, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja SKPD; dan
4. **Secara faktual**, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

1.5. Sistematika Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019

Sistematika RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 disusun dalam 7 (tujuh) BAB yang terdiri dari :

BAB I : Pendahuluan; yang meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan RKPD, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen RKPD.

BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah; meliputi Kondisi Umum Kondisi Daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan

aspek daya saing daerah; Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD; Permasalahan pembangunan daerah yang meliputi permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dan identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

- BAB III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;** menggambarkan arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah, menguraikan kebijakan pembangunan nasional yang diselaraskan dengan kebijakan pembangunan daerah, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah selama 2 (dua) tahun sebelumnya (2017-2018), dan perkiraan untuk tahun 2019.
- BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;** meliputi tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2019 sesuai yang tercantum di dalam RPJMD.
- BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;** menguraikan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat dengan menyusunnya dalam bentuk matrik berdasarkan bidang urusan pemerintahan.
- BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;** berisi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah pada akhir tahun perencanaan .
- BAB VII : Penutup;** Berisi penegasan bahwa RKPD adalah pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam menjabarkan rencana kerja melalui program/kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2019

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah

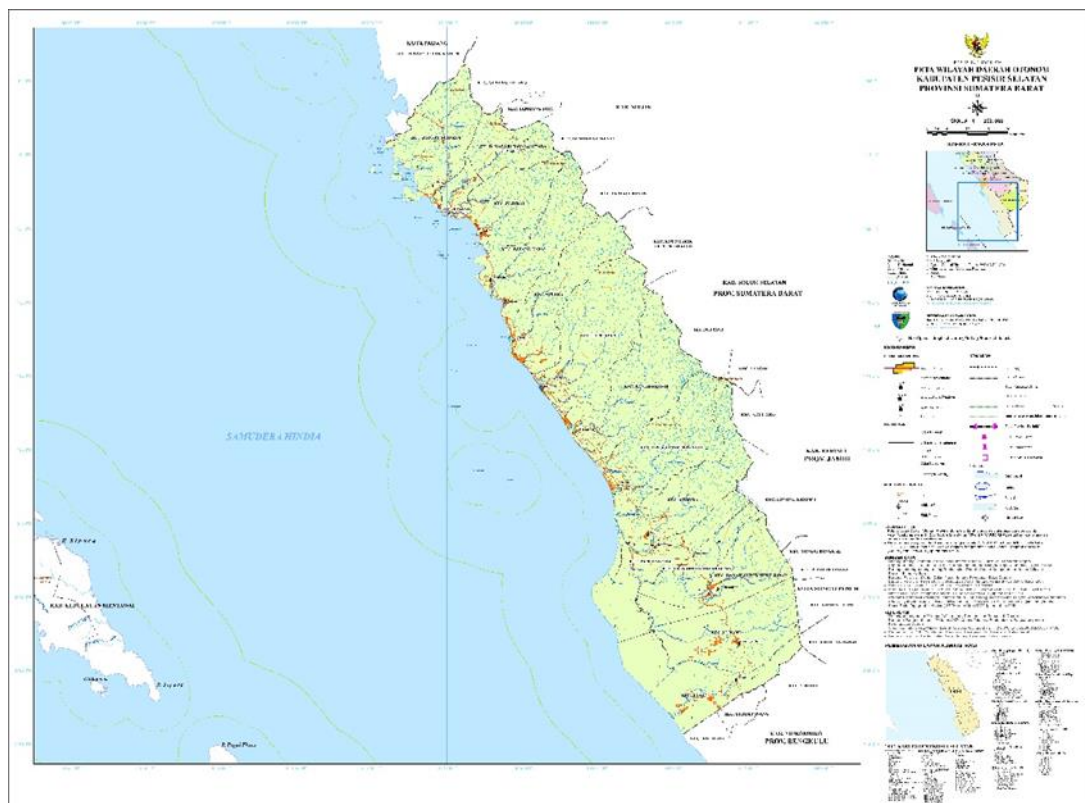
2.1.1. Kondisi Geografis dan Demografis

2.1.1.1. Letak Geografis dan Batas Administrasi Wilayah

Kabupaten Pesisir Selatan jika dilihat secara geografis Kabupaten Pesisir Selatan terletak pada garis $0^{\circ}59' - 2^{\circ}28,6'$ Lintang Selatan dan $100^{\circ}19' - 101^{\circ}18'$ Bujur Timur. Luas daratan $\pm 5.749,89 \text{ km}^2$, panjang garis pantai $\pm 234 \text{ km}$. Pesisir Selatan secara administratif yaitu :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Padang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu
- Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia dan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan dan (Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh) Provinsi Jambi.

Gambar 2.1
Wilayah Administrasi Kabupaten Pesisir Selatan



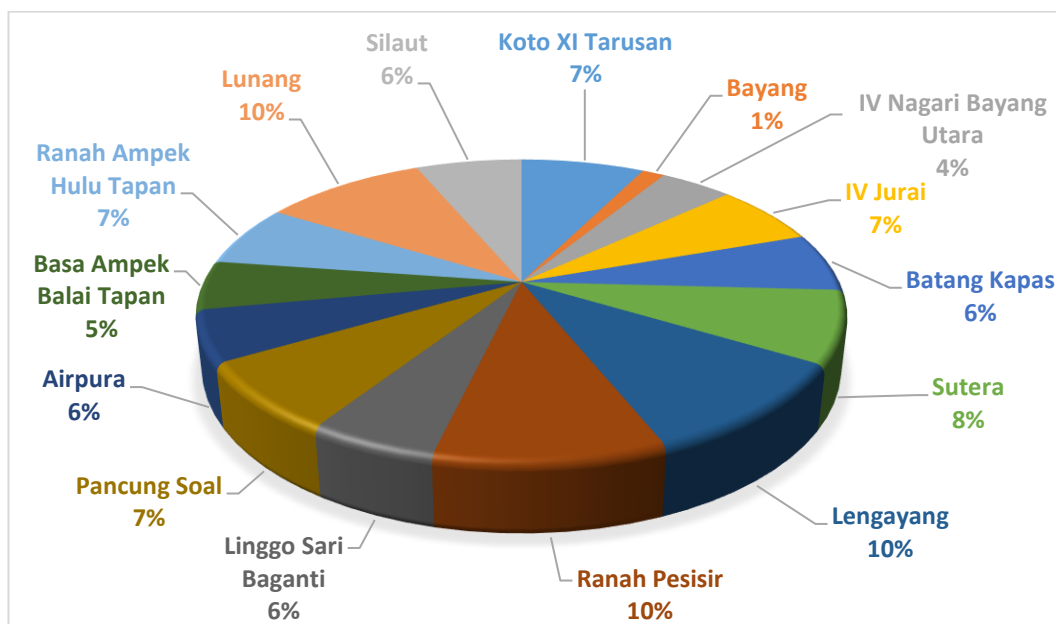
Berdasarkan wilayah administratif, Kabupaten Pesisir Selatan memiliki 15 wilayah Kecamatan, 182 Nagari dan 480 kampung. Secara rinci jumlah dan luas nagari serta kampung per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Luas Wilayah Administrasi Kabupaten Pesisir Selatan

No	Kecamatan	Luas (Km ²) 2010	Luas (Km ²) 2012	Jumlah Nagari 2010	Jumlah Nagari 2011	Jumlah Nagari 2012
A.	Wilayah Darat	5.749,89	5.749,89	76	182	182
1.	Koto XI Tarusan	425,63	425,63	12	23	23
2.	Bayang	77,50	77,50	4	17	17
3.	IV Nagari Bayang Utara	250,74	250,74	4	6	6
4.	IV Jurai	373,8	373,8	6	20	20
5.	Batang Kapas	359,07	359,07	5	9	9
6.	Sutera	445,65	445,65	4	12	12
7.	Lengayang	590,60	590,60	9	9	9
8.	Ranah Pesisir	564,39	564,39	4	10	10
9.	Linggo Sari Baganti	315,41	315,41	7	16	16
10.	Pancung Soal	471,10	426,1	8	10	10
11.	Airpura		314		10	10
12.	Basa Ampek Balai Tapan	677,50	300,93	8	10	10
13.	Ranah Ampek Hulu Tapan		376,57		10	10
14.	Lunang Silaut	929,50	564	5	28	28
15.	Silaut		365,5		10	10
B.	Wilayah Laut	84,312	84,312	-	-	-

Sumber : Pesisir Selatan Dalam Angka, 2017

Gambar 2.2
Luas Wilayah Administrasi Kabupaten Pesisir Selatan



Sumber : Pesisir Selatan Dalam Angka, 2017

Berdasarkan kondisi topografi, Kabupaten Pesisir Selatan berada pada dataran rendah dan perbukitan yang merupakan perpanjangan Bukit Barisan dengan ketinggian antara 0-1.000 meter di atas permukaan laut. Kota Painan yang merupakan ibukota kabupaten berada pada ketinggian 3 meter dari permukaan laut dan untuk kota kecil lain pada umumnya terletak pada lokasi yang rendah kecuali daerah Asam Kumbang, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara berada pada ketinggian 60 meter di atas permukaan laut. Secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
Ketinggian Beberapa Tempat dari Permukaan Laut
di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017

No.	Nama Tempat	Tinggi
1	Silaut	14 meter
2	Lunang	30 meter
3	Tapan	25 meter
4	Inderapura	15 meter
5	Air Haji	7 meter
6	Balai Selasa	4 meter
7	Kambang	2 meter
8	Surantih	3 meter
9	Pasar Kuok	5 meter
10	Painan	3 meter
11	Salido	2 meter
12	Pasar Baru	4 meter
13	Asam Kumbang	60 meter
14	Tarusan	3 meter

Sumber : Pesisir Selatan Dalam Angka 2017

2.1.1.2. Potensi Pengembangan Ekonomi Wilayah

A. Analisis Potensi Ekonomi Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan

Dalam pengembangan ekonomi di Kabupaten pesisir Selatan dilakukan berdasarkan potensi unggulan yang dimiliki oleh setiap wilayah. Untuk mengukur potensi ekonomi di suatu wilayah dapat dilakukan dengan tiga metode yaitu :

1. *Regional Account (Income – Expenditure) Approach* yang mengukur nilai ekonomi dari suatu wilayah berdasarkan produk atau kegiatan ekonomi pada setiap sektor di suatu wilayah.
2. *Input – Output Approach*: yang mengukur kegiatan ekonomi di suatu wilayah dari nilai pemanfaatan faktor produksi atau input baik yang tersedia di

wilayah tersebut maupun yang berasal dari wilayah lain untuk menghasilkan output tertentu.

3. *Economic Base Approach* yaitu dengan mengukur nilai produksi, aktivitas ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor ekonomi sehingga menghasilkan kelompok struktur perekonomian daerah menjadi sector unggulan dan bukan unggulan

Dalam penyusunan RKPD ini, analisa terhadap sector-sektor unggulan daerah dilakukan dengan pendekatan *economic base*. Konsep dasar *economic base* terletak pada asumsi bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi dari suatu wilayah ditentukan oleh pertumbuhan ekspor dari wilayah yang mampu mendatangkan pendapatan dari luar wilayah. Sektor-sektor yang kinerja ekspornya baik dan tumbuh pesat dikategorikan sebagai *base activities/sectors* (sektor unggulan). Sebaliknya, kategori lapangan usaha yang tidak memiliki performa ekspor yang tinggi dapat dikategorikan sebagai *non-base sectors* (sektor bukan unggulan). Analisis dari sektor unggulan dan bukan unggulan didasarkan pada nilai tambah atau lapangan pekerjaan yang diciptakan (jumlah tenaga kerja yang terserap).

Untuk mendapatkan sektor/kategori unggulan di suatu wilayah menggunakan pendekatan *economic base* terdapat beberapa metode pengukuran yang umum digunakan, antara lain : *Location Quotient* (LQ), Analisis *Shift- Share*, Analisis Growth, dan Tipologi Klassen

1. Analisis Location Quotient (LQ)

Dalam melakukan analisis terhadap kondisi umum daerah dan perumusan strategi pembangunan yang tepat dan terarah, maka penting untuk diketahui potensi pembangunan utama yang dimiliki oleh daerah. Analisis kondisi umum daerah harus memunculkan analisis potensi utama ekonomi daerah secara sektoral bahkan sampai ke tingkat komoditi.

Potensi utama daerah dapat dilihat dari sudut pandang Keuntungan Komparatif (*Comparative Advantage*) dari sektor/lapangan usaha secara relatif terhadap daerah regional dengan menggunakan Koefisien Lokasi (*Location Quotient*) atau dapat disingkat dengan LQ. Berikut disajikan tabel hasil perhitungan LQ Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016.

Tabel 2.3
Perhitungan Koefisien (LQ) Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Harga
Konstan Tahun 2010 Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016

NO	LAPANGAN USAHA	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010		LQ
		Kab. Pesisir Selatan	Prop. Sumatera Barat	
A	Pertanian , Kehutanan dan Perikanan	3.185.518,28	34.210.361,67	1,68
B	Pertambangan dan Penggalian	313.606,68	6.267.606,76	0,90
C	Industri Pengolahan	726.922,47	16.174.096,85	0,81
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.799,18	161.628,93	0,31
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.953,65	150.771,11	0,71
F	Konstruksi	802.541,38	13.126.836,91	1,10
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.006.268,42	22.760.290,40	0,80
H	Transportasi dan Pergudangan	319.568,07	17.493.490,83	0,33
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	84.164,00	1.578.746,19	0,96
J	Informasi dan Komunikasi	565.213,72	9.882.963,81	1,03
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	185.015,85	4.524.388,29	0,74
L	Real Estate	117.146,74	2.895.556,33	0,73
M, N	Jasa Perusahaan	4.446,97	657.039,71	0,12
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan Sosial Wajib	486.309,52	8.286.949,05	1,06
P	Jasa Pendidikan	235.976,92	5.498.575,43	0,77
Q	Jasa Kesehatan dan kegiatan Sosial	104.660,31	1.947.648,06	0,97
R, S, T, U	Jasa Lainnya	84.377,56	2.493.800,12	0,61
TOTAL		8.230.489,72	148.110.750,45	

Sumber : Dihitung dan diolah dari Data BPS, Pesisir Selatan Dalam Angka, 2017

Tabel 2.4
Urutan Hasil Perhitungan Koefisien (LQ) Menurut Lapangan Usaha
di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016

NO	LAPANGAN USAHA	LQ
A	Pertanian , Kehutanan dan Perikanan	1,68
F	Konstruksi	1,10
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan Sosial Wajib	1,06
J	Informasi dan Komunikasi	1,03

NO	LAPANGAN USAHA	LQ
Q	Jasa Kesehatan dan kegiatan Sosial	0,97
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,96
B	Pertambangan dan Penggalian	0,90
C	Industri Pengolahan	0,81
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,80
P	Jasa Pendidikan	0,77
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,74
L	Real Estate	0,73
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,71
R, S, T, U	Jasa Lainnya	0,61
H	Transportasi dan Pergudangan	0,33
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,31
M, N	Jasa Perusahaan	0,12

Sumber : Dihitung dan diolah dari Data BPS, Pesisir Selatan Dalam Angka, 2017

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien Lokasi (LQ) di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2016, Kabupaten Pesisir Selatan memiliki 4 (empat) sektor/lapangan usaha yang memiliki keunggulan komparatif di Provinsi Sumatera Barat. Keempat sektor/lapangan tersebut merupakan sektor yang berpotensi untuk dikembangkan di Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun Keempat sektor tersebut adalah :

- Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan nilai LQ = 1,68
- Konstruksi dengan nilai LQ = 1,10
- Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan nilai LQ = 1,06
- Informasi dan Komunikasi dengan nilai LQ = 1,03

2. Analisis Shift Share

Analisis Shift Share bertujuan untuk mengetahui faktor – faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dalam hal ini faktor yang mempengaruhi tersebut dapat berasal dari luar daerah maupun dari dalam daerah. Faktor luar daerah dapat berasal dari perkembangan kegiatan ekonomi daerah lain karena terdapatnya hubungan ekonomi yang cukup erat antar daerah/wilayah. Sedangkan faktor yang berasal dari dalam daerah biasanya timbul dari struktur perekonomian daerah serta potensi khusus yang dimiliki oleh daerah yang

bersangkutan. Berikut disajikan tabel hasil perhitungan nilai shift share Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2016.

Tabel 2.5
Hasil Perhitungan Nilai Shift Share Kabupaten Pesisir Selatan
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015 – 2016 (dalam juta)

No	LAPANGAN USAHA	Pertumbuhan Nasional	Proportionally Shift	Differential Shift	Δ Nilai Tambah
A	Pertanian , Kehutanan dan Perikanan	164.038,08	-102.882,02	7.787,96	68.944,02
B	Pertambangan dan Penggalian	15.613,07	-9.673,74	11.033,27	16.972,60
C	Industri Pengolahan	35.860,00	-2.473,81	12.228,95	45.615,14
D	Pengadaan Listrik dan Gas	133,79	144,37	-20,84	257,32
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	294,96	63,46	-8,68	349,73
F	Konstruksi	39.202,52	9.894,85	8.631,73	57.729,10
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	49.558,30	503,83	14.643,66	64.705,79
H	Transportasi dan Pergudangan	15.475,10	7.010,70	3.069,36	25.555,17
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.992,70	4.463,30	-149,72	8.306,29
J	Informasi dan Komunikasi	27.152,17	20.155,20	2.039,74	49.347,12
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	9.133,19	4.794,10	-2.433,69	11.493,59
L	Real Estate	5.826,77	113,48	503,10	6.443,35
M, N	Jasa Perusahaan	222,67	15,41	-21,55	216,52
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan Sosial Wajib	24.332,88	-1.403,12	1.077,19	24.006,95
P	Jasa Pendidikan	11.377,34	6.980,61	1.459,96	19.817,90
Q	Jasa Kesehatan dan kegiatan Sosial	5.220,01	-678,04	942,88	5.484,85
R, S, T, U	Jasa Lainnya	3.965,84	3.533,97	1.530,42	9.030,23
TOTAL		411.399,39	-59.437,45	62.313,73	414.275,67
Persentase		99,31	-14,35	15,04	100,00

Sumber : Dihitung dan diolah dari Data BPS, Pesisir Selatan Dalam Angka, 2017

Hasil analisis Shift-share menunjukkan bahwa selama tahun 2015-2016, nilai PDRB sektoral Kabupaten Pesisir Selatan mengalami pertumbuhan (positif growth). Nilai PDRB tersebut tumbuh sebesar 414.275,67 juta rupiah atau sebesar 5,30 persen. Sedangkan perekonomian Propinsi Sumatera Barat tumbuh sebesar 7.405.874,40 juta rupiah atau sebesar 5,26 persen. Perkembangan tersebut

dipengaruhi oleh komponen Pertumbuhan Nasional, *Proportionally Shift (Mixed Shift)*, *Differential shift (Competitive Shift)*.

Menurut perhitungan komponen Pertumbuhan Nasional, pertumbuhan ekonomi Propinsi Sumatera Barat telah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 411.399,39 juta rupiah atau 99,31 persen. Namun, sebenarnya perkembangan PDRB Kabupaten Pesisir Selatan hanyalah sebesar 414.275,67 juta rupiah. Hal ini dikarenakan masih ada dua komponen lain yang memberikan pengaruh yaitu *Proportionally Shift (Mixed Shift)*, *Differential shift (Competitive Shift)*.

Komponen *Proportionally Shift (Mixed Shift)* menyatakan besar perubahan perekonomian wilayah akibat adanya *Proportionally Shift (Mixed Shift)*. Hasil analisis menunjukkan bahwa *Proportionally Shift (Mixed Shift)* memberikan pengaruh yang negatif bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan yaitu sebesar -59.437,45 juta rupiah atau -14,35 persen. Nilai negatif mengindikasikan bahwa komposisi sektor pada PDRB Kabupaten Pesisir Selatan cenderung mengarah pada perekonomian yang akan tumbuh relatif lambat. Sektor-sektor yang mendapat pengaruh *Proportionally Shift (Mixed Shift)*, yaitu Sektor Pengadaan Listrik dan Gas, Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Sektor Konstruksi, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Sektor Transportasi dan Pergudangan, Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Sektor Informasi dan Komunikasi, Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, Sektor Real Estate, Sektor Jasa Perusahaan, Sektor Jasa Pendidikan dan Sektor Jasa Lainnya.

Perhitungan komponen *Differential shift (Competitive Shift)* menghasilkan nilai keunggulan *Differential shift (Competitive Shift)* sebesar 62.313,73 juta rupiah atau 15,04 persen. Nilai ini mengindikasikan bahwa keunggulan kompetitif yang dihasilkan akan menambah perkembangan perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan. Sehingga dapat dilihat bahwa perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan cukup kompetitif. Hal ini disebabkan karena agregat nilainya positif pada banyak sektor, adapun sektor yang nilainya negatif yaitu Sektor Pengadaan Listrik dan Gas, Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Sektor

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi dan Sektor Jasa Perusahaan.

3. Analisis Growth

Analisis *Growth* digunakan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan dari sektor ekonomi di Kabupaten Pesisir Selatan setiap tahunnya. Berikut disajikan table Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014-2016.

Tabel 2.6
Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha
Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2014 – 2016

NO	LAPANGAN USAHA	2014	2015	2016	Growth (%)	
					2014-2015	2015-2016
A	Pertanian , Kehutanan dan Perikanan	2.952.748,20	3.116.574,26	3.185.518,28	5,55	2,21
B	Pertambangan dan Penggalan	283.480,60	296.634,08	313.606,68	4,64	5,72
C	Industri Pengolahan	652.490,92	681.307,33	726.922,47	4,42	6,70
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.437,18	2.541,86	2.799,18	4,30	10,12
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.379,00	5.603,92	5.953,65	4,18	6,24
F	Konstruksi	701.764,15	744.812,28	802.541,38	6,13	7,75
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	888.870,62	941.562,63	1.006.268,42	5,93	6,87
H	Transportasi dan Pergudangan	272.286,63	294.012,90	319.568,07	7,98	8,69
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	70.823,89	75.857,71	84.164,00	7,11	10,95
J	Informasi dan Komunikasi	475.114,70	515.866,60	565.213,72	8,58	9,57
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	167.161,73	173.522,26	185.015,85	3,81	6,62
L	Real Estate	104.642,28	110.703,39	117.146,74	5,79	5,82
M, N	Jasa Perusahaan	4.013,55	4.230,45	4.446,97	5,40	5,12
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan Sosial Wajib	447.415,88	462.302,57	486.309,52	3,33	5,19
P	Jasa Pendidikan	199.842,26	216.159,02	235.976,92	8,16	9,17
Q	Jasa Kesehatan dan kegiatan Sosial	92.456,62	99.175,46	104.660,31	7,27	5,53
R, S, T, U	Jasa Lainnya	71.608,24	75.347,33	84.377,56	5,22	11,98
PDRB		7.392.536,45	7.816.214,05	8.230.489,72	5,73	5,30

Sumber : Dihitung dan diolah dari Data BPS, Pesisir Selatan Dalam Angka, 2017

Berdasarkan perhitungan analisis growth di atas dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan sektor lapangan usaha pada tahun 2016 mengalami pertumbuhan atau *positive growth*.

4. Analisis Tipologi Klassen

Tipologi Klassen mendasarkan pengelompokan suatu sektor, subsektor, usaha atau komoditi daerah dengan cara membandingkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang menjadi acuan dan membandingkan pangsa sektor, subsektor, usaha atau komoditi suatu daerah dengan nilai rata-ratanya daerah acuannya. Hasil analisis Tipologi Klassen akan menunjukkan posisi pertumbuhan dan pangsa sektor, subsektor, usaha atau komoditi pembentuk variabel regional suatu daerah.

Tabel 2.7
Hasil Perhitungan dan Pengelompokan Sektor
Berdasarkan Tipologi Klassen
Tahun 2015 – 2016

No	LAPANGAN USAHA	Kabupaten Pesisir Selatan (%)		Propinsi Sumatera Barat (%)		Kuadran
		Pertumbuhan	Kontribusi	Pertumbuhan	Kontribusi	
A	Pertanian , Kehutanan dan Perikanan	2,21	38,70	1,96	23,10	1
B	Pertambangan dan Penggalian	5,72	3,81	2,00	4,23	3
C	Industri Pengolahan	6,70	8,83	4,90	10,92	3
D	Pengadaan Listrik dan Gas	10,12	0,03	10,94	0,11	4
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,24	0,07	6,40	0,10	4
F	Konstruksi	7,75	9,75	6,59	8,86	1
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,87	12,23	5,32	15,37	3
H	Transportasi dan Pergudangan	8,69	3,88	7,65	11,81	3
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,95	1,02	11,15	1,07	4
J	Informasi dan Komunikasi	9,57	6,87	9,17	6,67	1
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,62	2,25	8,03	3,05	4
L	Real Estate	5,82	1,42	5,37	1,95	3
M, N	Jasa Perusahaan	5,12	0,05	5,63	0,44	4

No	LAPANGAN USAHA	Kabupaten Pesisir Selatan (%)		Propinsi Sumatera Barat (%)		Kuadran
		Pertumbuhan	Kontribusi	Pertumbuhan	Kontribusi	
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan Sosial Wajib	5,19	5,91	4,96	5,60	1
P	Jasa Pendidikan	9,17	2,87	8,49	3,71	3
Q	Jasa Kesehatan dan kegiatan Sosial	5,53	1,27	4,58	1,31	3
R, S, T, U	Jasa Lainnya	11,98	1,03	9,95	1,68	3

Sumber : Dihitung dan diolah dari Data BPS, Pesisir Selatan Dalam Angka, 2017

Berdasarkan hasil perhitungan tipologi Klassen di atas, dapat disimpulkan bahwa:

- Sektor Maju dan tumbuh pesat* di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2016 adalah sektor : Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Konstruksi; Informasi dan Komunikasi; dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan Sosial Wajib.
- Sektor maju tapi tertekan* di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2016 adalah sektor : tidak ada
- Sektor Potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat* di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2016 adalah sektor : Pertambangan & Penggalian; Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Real Estate; Jasa Pendidikan ; Jasa Kesehatan dan kegiatan Sosial; dan Jasa Lainnya.
- Sektor relatif tertinggal* di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2016 adalah sektor : Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Jasa Keuangan dan Asuransi; dan Jasa Perusahaan.

Pengelompokan sektor berdasarkan tipologi Klassen di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 dapat digambarkan dalam matrik berikut :

Matrik 2.1
Hasil Perhitungan dan Pengelompokan Sektor
Berdasarkan Tipologi Klassen

Kontribusi Sektoral	Pertumbuhan Sektoral	
	$gi \geq Gi$	$gi < Gi$
$si \geq Si$	– Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan – Konstruksi – Informasi dan Komunikasi – Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan Sosial Wajib	
$si < Si$	– Pertambangan & Penggalian – Industri Pengolahan – Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor – Transportasi dan Pergudangan – Real Estate – Jasa Pendidikan – Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial – Jasa Lainnya	– Pengadaan Listrik dan Gas – Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang – Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum – Jasa Keuangan dan Asuransi – Jasa Perusahaan

Sumber : Dihitung dan diolah dari Data BPS, Pesisir Selatan Dalam Angka, 2017

B. Potensi Sektor Unggulan di Kabupaten Pesisir Selatan

Potensi pengembangan wilayah untuk Kabupaten Pesisir Selatan dilihat dari beberapa sektor yaitu :

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Sebagai penyumbang terbesar dalam pembentukan PDRB daerah maka sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan potensi daerah dalam pengembangan perekonomian daerah, dapat dilihat dari beberapa sub sector pendukung sebagai berikut :

a. Padi dan Palawija

Komoditi Padi dan Palawija yang dihasilkan meliputi padi, jagung, kedelai, dan umbi-umbian. Statistik daerah menunjukkan jenis komoditi padi dan jagung mengalami penurunan luas panen pada tahun 2016, diiringi penurunan produktifitasnya, hal ini disebabkan terdapatnya alih fungsi lahan pertanian dan terdapat beberapa jaringan irigasi mengalami rusak berat dan ringan di beberapa lokasi dan masih mengandalkan hujan untuk pengairan sawah. Analisis

pertumbuhan luas panen, produksi dan produktivitas dari komoditas padi dan palawija di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel 2.8 dibawah ini.

Tabel 2.8
Pertumbuhan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi dan Palawija

No	Jenis Tanaman	Luas Panen (Ha)					Produksi (Ton)					Produktifitas Rata-rata
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
1	Padi	54.868,00	61.061,00	62.327,00	53.095,90	67.567,20	269.363,00	313.705,00	317.383,00	270.230,80	376.971,20	5,16
2	Jagung	13.248,00	14.208,00	12.916,00	19.845,70	20.828,60	105.036,00	107.695,00	108.894,00	158.159,50	169.101,60	8,01
3	Ubi	384,00	420,00	433,00	253,00	285,00	9.682,00	13.386,00	15.263,00	9.892,64	11.204,06	34,15
4	Ubi jalar	67,00	58,00	24,00	12,00	5,00	1.166,00	1.141,00	1.657,00	410,01	81,00	31,30
5	Kacang Kedelai	85,00	163,00	-	-	-	128,00	247,00	-	-	-	0,60
6	Kacang Tanah	459,00	330,00	275,00	182,60	150,40	1.102,00	516,00	495,00	335,98	267,79	1,88
7	Kacang Hijau	112,00	61,00	44,00	30,40	30,10	131,00	71,00	51,22	35,38	34,01	1,16

Sumber : Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Perkebunan Kab. Pesisir Selatan Tahun 2018

Tabel 2.8 di atas menunjukkan bahwa dari beberapa komoditas yang dianalisis terlihat bahwa jagung mengalami peningkatan produktivitas, untuk komoditas padi, ubi, ubi jalar, kacang tanah dan kacang hijau mengalami penurunan produktivitas, sedangkan kacang kedelai untuk Kabupaten Pesisir Selatan tidak ada produktivitas.

b. Sayuran dan Buah-Buahan

Komoditas sayuran dan buah-buahan di Kabupaten Pesisir Selatan cukup beragam, beberapa komoditas unggulan dapat terlihat pada tabel 2.9 berikut ini :

Tabel 2.9
Pertumbuhan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Sayuran dan Buah-buahan

No	Komoditi	Luas Panen					Produksi (Ton)					Produktifitas Rata- rata
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
	Sayuran											
1	Cabe	312,00	302,00	338,00	350,00	271,00	2.522,00	2.276,00	2.583,80	4.473,00	3.768,00	9,99
2	Terong	196,00	164,00	175,00	156,00	136,00	2.329,00	1.692,00	1.707,00	2.596,00	2.149,50	12,88
3	Mentimun	235,00	195,00	186,00	153,00	148,00	3.222,00	3.245,00	3.009,50	2.265,00	2.442,00	15,57
4	Bawang Merah	34,00	66,00	31,00	155,00	78,00	271,00	501,50	242,70	968,00	584,00	7,43
5	Bayam	82,00	133,00	123,00	117,00	102,00	411,00	665,00	636,00	592,00	510,00	5,05
6	Kangkung	106,00	160,00	144,00	139,00	131,00	550,00	800,00	735,00	695,00	655,00	5,06
	Buah-buahan											
1	Semangka	461,00	306,00	559,00	543,00	326,00	9.110,00	7.020,00	10.857,00	10.900,00	6.520,00	20,44
2	Rambutan	15.178,00	24.927,00	30.736,00	16.387,00	11.794,00	12.143,00	19.941,00	27.804,00	30.706,00	29.034,00	1,37
3	Mangga	22.736,00	22.601,00	15.633,00	18.724,00	22.907,00	18.190,00	18.161,00	27.509,00	37.858,00	24.515,00	1,29
4	Durian	30.689,00	40.049,00	33.896,00	40.377,00	35.970,00	41.924,30	48.059,00	48.763,00	55.387,00	72.695,00	1,48
5	Pisang	213.466,00	217.613,00	170.789,00	155.925,00	154.280,00	64.039,80	65.285,00	172.818,00	146.279,00	155.847,00	0,71
6	Jeruk	14.770,00	15.162,00	13.634,00	21.762,00	36.871,00	11.807,00	15.162,00	51.865,00	2.177,00	11.451,20	1,20
7	Duku	928,00	913,00	7.074,00	1.049,00	2.898,00	742,00	730,00	6.141,00	1.612,00	3.648,00	1,05
8	Belimbing	585,00	589,00	451,00	415,00	528,00	263,25	299,00	323,00	210,00	895,00	0,77
9	Salak	10.240,00	14.453,00	13.078,00	3.375,00	4.832,00	1.331,20	1.879,00	2.508,00	487,00	1.622,00	0,19
10	Manggis	4.832,00	7.007,00	14.299,00	6.880,00	5.734,00	4.349,00	6.307,00	14.961,00	6.192,00	6.497,00	0,98
11	Pepaya	7.387,00	7.892,00	6.162,00	5.409,00	5.850,00	2.773,50	3.161,00	7.319,00	6.495,00	5.796,00	0,83
12	Alpukat	1.138,00	1.108,00	947,00	1.388,00	1.272,00	455,20	444,00	551,00	555,00	1.768,00	0,63

Sumber : Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Perkebunan Kab. Pesisir Selatan Tahun 2018

Dari komoditi sayuran terdapat penurunan produktivitas diseluruh komoditi. Sedangkan untuk komoditi buah-buahan, terdapat beberapa komoditi yang menjadi andalan adalah durian, pisang, jeruk dan manggis.

c. Perkebunan

Beberapa komoditi perkebunan yang dihasilkan merupakan komoditi unggulan daerah seperti karet, kelapa, kelapa sawit, gambir, dan kakao. Di samping itu, juga masih terdapat beberapa komoditi lainnya: seperti kulit manis, cengkeh, kopi, pala dan pinang. Sebagian besar komoditi perkebunan ini belum dikembangkan dengan baik karena sifatnya masih bersifat perkebunan rakyat dengan kemampuan pengembangan pengelolaan yang masih terbatas.

Tabel 2.10
Pertumbuhan Luas Tanam dan Produksi Perkebunan Rakyat

No	Jenis Komoditi	Luas Tanam (Ha)					Produksi Perkebunan (Ton)					Produktifitas Rata-rata
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
1	Karet	14.080	14.100	12.253	10.567	11.406	10.745,92	11.733,10	10.641,15	10.110,00	10.828,20	0,87
2	Kelapa	4.842	4.800	4.460	4.399	4.574	5.254,48	3.861,00	3.861,00	3.861,00	4.203,00	0,91
3	Kelapa Sawit	30.176	31.641	33.374	36.717	38.286	59.817,48	66.873,00	126.222,00	137.802,00	195.416,40	3,35
4	Gambir	15.277	15.277	14.314	14.303	8.648	6.005,72	5.422,80	5.422,60	6.794,00	4.383,10	0,42
5	Kakao	3.140	2.877	2.569	2.489	2.348	2.543,65	2.033,00	1.419,00	1.133,00	1.065,30	0,60
6	Kulit Manis	1.452	1.244	1.138	1.134	1.083	1.839,68	1.434,60	1.102,00	1.092,00	1.134,20	1,08
7	Cengkeh	677	708	716	735	807	93,19	360,60	317,00	323,00	399,40	0,40
8	Kopi	1.248	1.156	1.156	1.156	1.177	1.335,39	695,25	816,00	816,00	1.173,50	0,82
9	Pala	890	956	1.056	1.092	1.198	222,11	271,28	171,00	182,00	314,90	0,22
10	Pinang	1.121	1.148	1.186	1.179	1.159	946,91	551,70	542,90	239,00	332,80	0,45

Sumber: Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Perkebunan Kab. Pesisir Selatan Tahun 2018

Jika dilihat dari luas tanamnya, komoditi kelapa sawit menunjukkan perkembangan yang signifikan, yaitu dari 30.176 Ha pada tahun 2014 menjadi 38.286 Ha di tahun 2017. Hal ini dapat diartikan adanya potensi yang besar dan minat yang tinggi dari masyarakat untuk mengembangkan komoditi ini.

d. Peternakan

Sumbangan subsektor peternakan terhadap pertumbuhan perekonomian Pesisir Selatan dapat dilihat dari beberapa jenis ternak yang umum dikembangkan masyarakat antara lain sapi, kambing, kerbau, dan unggas.

Sapi lokal pesisir dan ayam ras pedaging memberikan kontribusi besar dalam memenuhi kebutuhan daging di Pesisir Selatan dan Kabupaten tetangga seperti Bengkulu dan Jambi. Untuk tahun 2017 ini, jumlah populasi sapi sudah tercatat 81.786 ekor dengan produksi daging sapi sebesar 1.354.022 kg, sedang

populasi ayam ras pedaging sebanyak 1.734.200 ekor dengan produksi daging ayam sebesar 1.886.261 kg, seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.11
Populasi dan Produksi Daging Ternak

No	Jenis	Populasi Ternak (Ekor)					Produksi Daging (kg)s				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	Sapi	79.196	79.705	80.146	80.976	81.786	1.095.601	1.171.021	1.173.571	1.340.616	1.354.022
2	Kuda	35	36	21	19	15	-	-	-	-	-
3	Kambing	44.355	44.362	41.669	40.451	40.856	37.944	39.878	40.073	44.513	44.958
4	Kerbau	8.118	8.204	8.271	8.430	8.506	45.120	47.289	46.204	40.158	40.520
5	Ayam Buras	778.167	779.112	779.819	780.056	787.857	834.585	835.598	836.356	955.743	965.301
6	Ayam Ras Pedaging	208.100	261.600	552.500	1.671.600	1.734.200	166.531	209.345	442.138	1.818.172	1.886.261
7	Ayam Ras Petelur	74.938	94.540	85.300	90.400	97.500	30.912	38.998	35.186	70.578	71.162
8	Itik/Itik Manila	144.570	147.499	147.921	154.050	157.266	59.634	60.843	61.017	90.586	92.477

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Pesisir Selatan, 2018

e. Kehutanan

Pesisir Selatan merupakan daerah yang di satu sisinya ditutupi oleh hutan dan sisi lainnya berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Lebih kurang 70% dari luas wilayahnya merupakan hutan, yang terdiri dari hutan produksi, hutan lindung, Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) dan Hutan Suaka Alam Wisata (HSAW). Hutan TNKS merupakan bagian terbesar, yaitu sebesar 51,41%, sedangkan sisanya adalah hutan produksi, hutan lindung, dan hutan suaka alam wisata dengan luas yang hampir sama seperti terlihat pada tabel 2.12 dibawah ini :

Tabel 2.12
Luas Hutan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2017

No	Jenis Hutan	Luas Area (km ²)	%
A.	Hutan Lindung		
1.	Hutan Suaka Alam Wisata (HSAW)	295,58	51,41
2.	Hutan Lindung (HL)	19,57	3,40
B.	Kawasan Budidaya		
1.	Hutan Produksi (HP)	4,38	0,76
2.	Hutan Produksi Konversi (HPK)	28,63	4,98
3.	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	53,78	9,35
C.	Area Penggunaan Lain		
	Jumlah/ Total	574,99	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Pesisir Selatan Tahun 2017

f. Perikanan Darat dan Laut

Secara geografis, di sebelah barat Kabupaten Pesisir Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia. Dengan panjang pantai ± 234 Km. Terdapat beberapa pembangunan sentra penangkapan yaitu Kecamatan Koto XI Tarusan yang telah dilengkapi dengan infrastruktur Pelabuhan Pendaratan Ikan Carocok Tarusan, Kecamatan Sutura yang telah memiliki Pelabuhan Perikanan Sutura, Kecamatan Lengayang yang telah dilengkapi dengan Pelabuhan Perikanan Kambang dan Kecamatan Linggo Sari Baganti.

Tabel 2.13
Produksi Perikanan Budidaya dan Tangkap (Ton)

No	Jenis	Produksi Perikanan (ton)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Perikanan Tangkap	35.179,36	37.208,06	36.385,44	34.439,09	37.069,00
2	Perikanan Budidaya	8.518,61	11.852,00	10.327,41	12.210,00	12.714,00
	Jumlah	43.697,97	49.060,06	46.712,85	46.649,09	49.783,00

Sumber: Dinas Perikanan Kab. Pesisir Selatan, 2018

Produksi perikanan budidaya mengalami peningkatan yaitu 8.518,61 ton pada tahun 2013 menjadi 12.714 ton pada tahun 2017. Hal ini disebabkan oleh bergairahnya kembali minat masyarakat dalam pengembangan budidaya perikanan yang tentu saja tidak terlepas dari dukungan pemerintah pusat maupun daerah dalam bentuk penyediaan sarana prasarana penunjang seperti pembuatan kolam dan keramba jaring apung serta pelatihan dan pemberian benih ikan unggul bagi pelaku perikanan.

Tetapi produksi perikanan tangkap mengalami penurunan pada tahun 2016, hal ini disebabkan banyaknya alat tangkap perikanan nelayan yang tidak ramah lingkungan dan dilarang pemakaian sehingga terjadi penurunan hasil tangkap, tetapi pada tahun 2017 terdapat peningkatan produksi perikanan tangkap, hal ini disebabkan telah dilakukan penggantian alat tangkap perikanan nelayan yang tidak ramah lingkungan oleh Pemerintah Daerah.

Di samping memproduksi ikan segar, masyarakat juga memproduksi ikan kering, antara lain ikan teri dan ikan asin. Khusus untuk ikan teri, terutama ikan teri super merupakan salah satu produk olahan ikan andalan karena selain rasanya yang gurih, teri yang dihasilkan juga tergolong berkualitas baik.

2. Pariwisata

Pariwisata merupakan sektor andalan Kabupaten Pesisir Selatan yang akhir-akhir ini mendapat perhatian lebih oleh pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini guna mendukung amanat Nawacita RPJMN 2015-2019, yaitu membangun dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan dengan dimensi pembangunan sektor unggulan pariwisata.

Sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2025, bahwa secara perwilayahan, destinasi pariwisata dibagi menjadi 4 (empat) destinasi utama pariwisata kabupaten (DUPK), seperti terlihat pada Tabel 2.14 dibawah ini.

Tabel 2.14
Perwilayahan Destinasi Pariwisata di Kabupaten Pesisir Selatan

WILAYAH DESTINASI	Kawasan Utama Pariwisata Kabupaten (KUPK)	Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK)	Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK)
DUPK Carocok dan Sekitarnya	Carocok Painan, Kecamatan IV Jurai	Kecamatan Batang Kapas, Kecamatan Sutera	
DUPK Mandeh dan Sekitarnya	Mandeh, Kecamatan Koto XI Tarusan	Kecamatan Bayang, Kecamatan Bayang Utara	
DUPK Pasir Putih dan Sekitarnya	Pasir Putih, Kecamatan Lembang	Kecamatan Ranah Pesisir	Kecamatan Linggosari Baganti
DUPK Rumah Gadang Mandeh Rubiah dan sekitarnya	Rumah Gadang Mandeh Rubiah, Kecamatan Lunang	Kecamatan Airpura, Kecamatan Silaut, Kecamatan Pancung Soal, Kecamatan Basa IV Balai Tapan	Kecamatan Ranah IV Hulu Tapan

Sumber : Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2025

Beragam potensi pariwisata yang dimiliki Kabupaten Pesisir Selatan, seperti wisata alam, budaya, lingkungan dan hasil buatan manusia (*event*) perlu dikembangkan guna menunjang dan meningkatkan perekonomian daerah. Sebaran daya tarik wisata dapat dilihat pada Tabel 2.15 berikut:

Tabel 2.15
Jumlah Daya Tarik Wisata Pada Setiap DUPK Kabupaten Pesisir Selatan

No	Wilayah Destinasi	Daya Tarik Wisata			
		Wisata Alam	Wisata Budaya	Wisata Hasil Buatan Manusia	Wisata Lingkungan
1	DUPK Carocok dan Sekitarnya	21	1	2	-
2	DUPK Mandeh dan Sekitarnya	15	4	2	-
3	DUPK Pasir Putih dan Sekitarnya	6	2	-	-
4	DUPK Rumah Gadang Mandeh Rubiah dan sekitarnya	2	3	-	1

Sumber : Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2025

Dengan gencarnya promosi dan penyebaran informasi tentang pengembangan kepariwisataan di Pesisir Selatan, maka timbul minat kunjungan wisatawan ke daerah ini. Terbukti dengan meningkatnya kunjungan wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun mancanegara.

Tabel 2.16
Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara

No	Jenis	Kunjungan Wisatawan (orang)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Wisatawan Nusantara	587.056	1.544.684	2.000.000	1.980.000	2.400.000
2	Wisatawan Mancanegara	578	1.551	1.600	1.500	1.700
	Jumlah	587.634	1.546.235	2.001.600	1.981.500	2.401.700

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab. Pesisir Selatan, 2018

3. Perdagangan, Koperasi dan UMKM

Pasar sebagai sarana kegiatan ekonomi di 15 Kecamatan di wilayah kabupaten Pesisir Selatan sangat dibutuhkan. Hal ini menyangkut kegiatan ekonomi disetiap kecamatan tidak sebanding dengan sarana pasar yang dimiliki. Oleh karena itu pada tahun yang akan datang pemerintah daerah berkewajiban untuk merencanakan dan menganggarkan program peningkatan pembangunan pasar di wilayah Pesisir Selatan guna memenuhi kebutuhan sarana pasar tersebut. Capaian pembangunan yang telah dicapai selama 5 tahun terakhir dapat digambarkan pada tabel 2.17 berikut ini :

Tabel 2.17
Perkembangan sektor Perdagangan, Koperasi dan UMKM

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Pasar	Unit	46	46	49	49	49
2	Jumlah Koperasi	Koperasi	286	295	297	333	275
3	Jumlah UMKM	Unit	4.440	4.440	4.440	4.444	5.778

Sumber : Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian, tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa indikator yang mendukung kegiatan perdagangan antara lain :

- indikator pertama, pasar merupakan sarana penunjang terjadinya kegiatan ekonomi. Pasar adalah tempat terjadi transaksi jual beli terhadap barang dan jasa yang diperdagangkan, dari data tabel diatas menunjukkan bahwa tidak terdapat pembangunan pasar yang dilakukan, tetapi yang dilaksanakan adalah revitalisasi pasar yang telah ada untuk menampung kenaikan jumlah pedagang.

- b. Indikator perdagangan kedua, koperasi pada tahun 2015 yang berjumlah 299 unit berkurang menjadi 275 unit pada tahun 2017. Penurunan jumlah disebabkan koperasi tersebut belum mampu bersaing, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: Sumber daya manusia rendah, kelembagaan, modal dan jenis kegiatan usaha koperasi.
- c. Indikator perdagangan yang ketiga yaitu usaha mikro kecil menengah (UMKM) di kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2015 berjumlah 4.440 buah bertambah menjadi 5.778 buah pada tahun 2017.

4. Industri Kreatif

Industri kreatif merupakan kegiatan usaha yang fokus pada kreasi dan inovasi. Industri kreatif masih potensial untuk digarap, dengan menjadikan budaya serta tradisi yang bisa menjadi sumber kreativitas dan didukung oleh kemajuan teknologi. Untuk kabupaten Pesisir Selatan yang mempunyai seni dan budaya yang beragam menjadikan sumber potensi perekonomian. Hal ini bisa dilihat dari table dibawah :

Tabel 2.18
Perkembangan sektor Industri Kreatif
Tahun 2015-2017

No	Uraian	Satuan	Tahun		
			2015	2016	2017
1.	Cakupan bina kelompok perajin	Persen	-	0,02	0,02
2	Cakupan bina kelompok seni & budaya	Persen			

Sumber : Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian dan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, tahun 2018

2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Ditinjau dari kondisi Geografis, Geologis dan Hidrometeorologis, Kabupaten Pesisir Selatan termasuk wilayah yang berpotensi mengalami bencana. Adapun tingkat resiko bencana dan potensi bencana yang dimaksud adalah :

Tabel 2.19
Tingkat Resiko Bencana Kabupaten Pesisir Selatan

No	Jenis Bahaya	Bahaya		Kerentanan		Kapasitas		Resiko	
		Indeks	Tingkat	Indeks	Tingkat	Indeks	Tingkat	Tingkat	tingkat
1.	Banjir	0,782	Tinggi	0,686	Tinggi	0,249	Rendah	Rendah	Tinggi
2.	Gelombang ekstrim dan abrasi	0,756	Tinggi	0,549	Sedang	0,255	Rendah	Rendah	Tinggi
3.	Gempa bumi	0,531	Sedang	0,748	Tinggi	0,262	Rendah	Rendah	Sedang
4.	Kekeringan	0,659	Sedang	0,903	Tinggi	0,225	Rendah	Rendah	Tinggi
5.	Cuaca ekstrim	0,817	Tinggi	0,746	Tinggi	0,229	Rendah	Rendah	Tinggi
6.	Tanah longsor	0,561	Sedang	0,617	Sedang	0,237	Rendah	Rendah	Sedang
7.	Kebakaran hutan	0,615	Sedang	0,77	Tinggi	0,225	Rendah	Rendah	Tinggi
8.	Tsunami	0,893	Tinggi	0,683	Tinggi	0,284	Rendah	Rendah	Tinggi
9.	Epidemi wabah penyakit	0,333	Rendah	0,726	Tinggi	0,21	Rendah	Rendah	Sedang
10.	Gagal teknologi	0,333	Rendah	0,761	Tinggi	0,21	Rendah	Rendah	Sedang

Sumber data : Kajian Resiko Bencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014-2018

Tabel 2.20
Jenis dan Penyebaran Resiko Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan

No	Kecamatan	Gempa	Tsunami	Banjir	Longsor	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	Cuaca Ekstrem	Gunung Api
1.	Koto XI Tarusan							
2.	Bayang							
3.	IV Nagari Bayang Utara							
4.	IV Jurai							
5.	Batang Kapas							
6.	Sutera							
7.	Lengayang							
8.	Ranah Pesisir							
9.	Linggo Sari Baganti							
10.	Pancung Soal							
11.	Airpura							
12.	Basa Ampek Balai Tapan							
13.	Ranah Ampek Hulu Tapan							
14.	Lunang							
15.	Silaut							

Sumber data: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2017

1. Gempa Bumi dan Tsunami

Secara umum wilayah Kabupaten Pesisir Selatan terletak di wilayah seismik aktif yaitu pertemuan antara dua lempeng tektonik aktif euroasia dan indo-australia. Berdasarkan catatan sejarah dan pendapat kalangan ahli gempa menyatakan bahwa periode ulang gempa besar dikawasan zona subduksi Mentawai berada pada kisaran 170 hingga 200 tahun sekali. Selain terletak di antara dua lempeng tektonik aktif, wilayah Kabupaten Pesisir Selatan juga terimbas efek dari adanya jalur patahan aktif di Sumatera yaitu patahan semangka. Sebagai konsekuensi dari letak geografis tersebut, Kabupaten Pesisir Selatan merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap bahaya gempa bumi dan tsunami. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, gempa bumi yang menimbulkan efek masif kerusakan terjadi pada tahun 2007 dan 2009. Berdasarkan riset terakhir para ahli

terhadap kondisi zona subduksi Mentawai diketahui bahwa tumbukan lempeng euroasia dan indo-australia telah terkunci (tidak bergerak lagi), sehingga potensi gempa berskala besar yang berimbas pada daerah di sekitarnya sangat mungkin terjadi dalam waktu dekat. Selain kerusakan akibat gempa, hal lain yang menjadi ancaman adalah terjadinya tsunami yang diprediksi akan menyapu kawasan pantai hingga radius 5 (lima) kilometer dari bibir pantai.

2. Banjir

Kerentanan bencana lain yang mengancam wilayah Kabupaten Pesisir Selatan adalah potensi terjadinya banjir, baik banjir biasa maupun banjir bandang. Khusus untuk banjir bandang, Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan daerah yang banyak dialiri sungai-sungai besar. Secara historis tipikal daerah dataran rendah Pesisir Selatan yang terletak di sepanjang pantai dan pada umumnya merupakan lembah, diyakini oleh para ahli merupakan endapan aluvial akibat adanya banjir purba pada masa lalu. Hal ini ditandai dengan bentuk dataran yang menyerupai kipas (kipas aluvial).

3. Tanah Longsor

Kabupaten Pesisir Selatan berada pada daerah perbukitan dengan kemiringan yang cukup curam $\pm 50\%$ dari luas wilayah, dengan struktur tanah yang sangat rawan terhadap longsor. Beberapa hal yang dapat menyebabkan tanah longsor antara lain :

- a. Tingginya curah hujan
- b. Penebangan pohon yang sembarangan
- c. Peladangan yang sembarangan dan berpindah – pindah
- d. Pembabatan hutan yang tidak semestinya
- e. Tidak ditanaminya kembali hutan yang telah gundul (reboisasi)

4. Abrasi Pantai Dan Sungai

Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan berada disepanjang pantai Sumatera ± 234 Km dan kemiringan pinggir pantai sangat curam dengan gelombang pasang yang cukup tinggi sehingga sangat berpotensi terhadap abrasi pantai. Akibat dari terjadinya abrasi pantai tersebut telah banyak menimbulkan kerusakan terhadap pemukiman masyarakat yang berada disepanjang pantai, dengan perbedaan

ketinggian antara permukaan laut dengan pemukiman masyarakat sangat kecil yaitu ± 3 m. Abrasi pantai adalah bencana alam yang terjadi di wilayah sekitar pantai yang diakibatkan oleh :

- a. Adanya perubahan musim
- b. Tingginya gelombang pasang
- c. Berkurangnya kawasan hijau disepanjang garis pantai (hutan bakau)
- d. Permukiman penduduk yang semakin dekat dengan pinggir pantai

5. Kebakaran

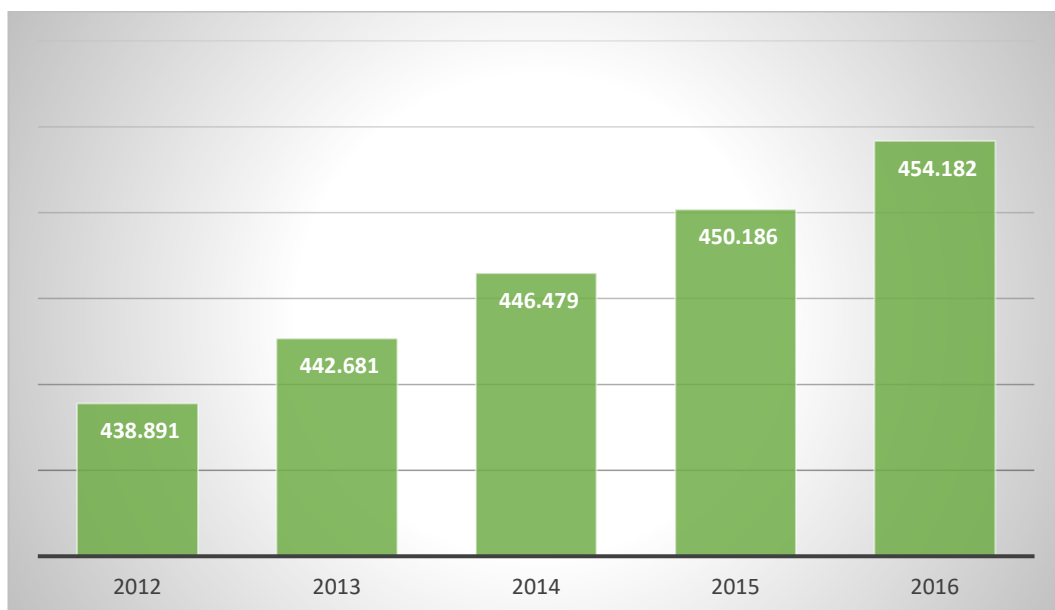
Pemukiman penduduk dan lahan perkebunan Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan sering terjadinya kebakaran. Faktor utama tingginya tingkat kebakaran antara lain :

- a. Padatnya rumah penduduk dengan akses jalan yang tidak memadai dalam melakukan pemadaman api pada beberapa titik-titik lokasi dikecamatan.
- b. Rata-rata rumah dan pertokoan tidak melakukan pemeriksaan ulang atau penggantian instalasi listrik baru rumah atau pertokoan yang pemakaiannya lebih dari 15 Tahun,.
- c. Kebakaran hutan disebabkan masih tradisionalnya masyarakat kita dalam pembukaan lahan baru dengan cara pembakaran dan beberapa wilayah yang mempunyai lahan - lahan gambut.

2.1.1.4. Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2012 sebanyak 438.891 jiwa dan pada tahun 2016, jumlah penduduk menjadi 454.182 jiwa. Berikut disajikan grafik perkembangan penduduk Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012-2016.

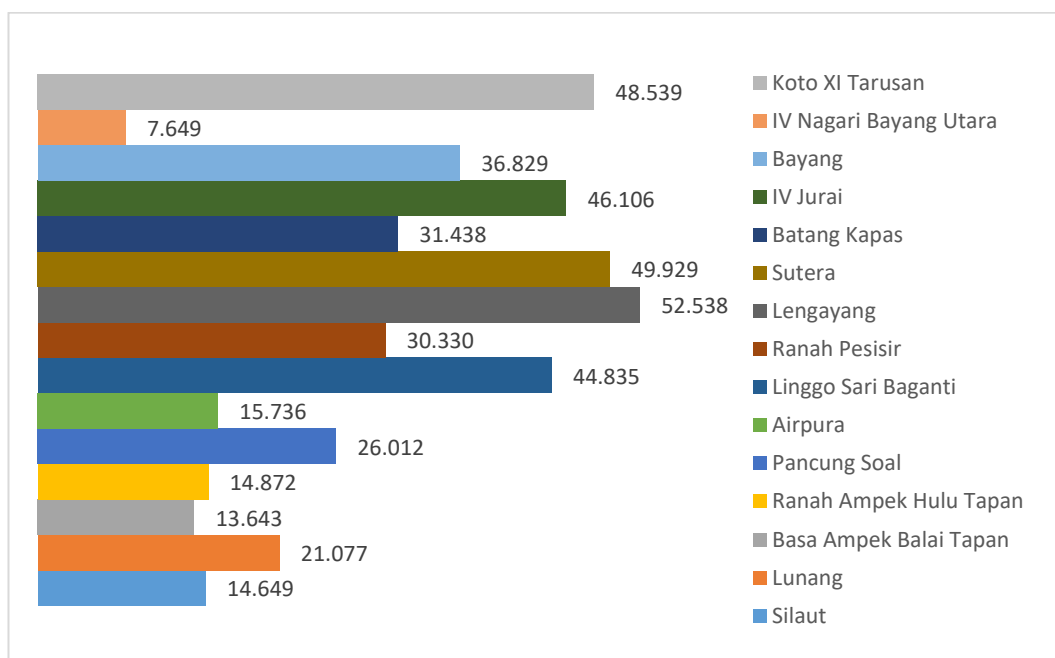
Gambar 2.3
Grafik Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012 – 2016



Sumber: BPS, Pesisir Selatan Dalam Angka, 2017

Dari gambaran pertumbuhan penduduk Kabupaten Pesisir dapat dilihat sebaran penduduk Kabupaten Pesisir per Kecamatan dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 2.4
Sebaran Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016



Sumber: BPS, Pesisir Selatan Dalam Angka, 2017

Tabel 2.21
Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2016

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Silaut	7.655	6.994	14.649
2	Lunang	10.743	10.334	21.077
3	Basa Ampek Balai Tapan	6.775	6.868	13.643
4	Ranah Ampek Hulu Tapan	7.440	7.432	14.872
5	Pancung Soal	13.192	12.820	26.012
6	Airpura	7.930	7.806	15.736
7	Linggo Sari Baganti	22.407	22.428	44.835
8	Ranah Pesisir	14.754	15.576	30.330
9	Lengayang	25.696	26.842	52.538
10	Sutera	24.912	25.017	49.929
11	Batang Kapas	15.451	15.987	31.438
12	IV Jurai	22.826	23.280	46.106
13	Bayang	17.707	19.122	36.829
14	IV Nagari Bayang Utara	3.841	3.808	7.649
15	Koto XI Tarusan	24.071	24.468	48.539
	Jumlah	225.400	228.782	454.182

Sumber: Pesisir Selatan Dalam Angka, 2017

Berdasarkan jumlah penduduk dari data BPS sampai dengan tahun 2016 dilihat pertumbuhan penduduk Kabupaten sebesar 0,8% per tahun. Laju pertumbuhan penduduk secara tahun 2012 – 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.22
Laju Pertumbuhan dan Jumlah Penduduk Tahun 2012 – 2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Penduduk (jiwa)	438.891	442.681	446.479	450.186	454.182
2	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,04	0,86	0,85	0,83	0,88

Sumber: Pesisir Selatan Dalam Angka, 2017

Laju pertumbuhan penduduk sangat dipengaruhi oleh struktur umur penduduk. Struktur umur penduduk pada suatu daerah sangat ditentukan oleh perkembangan tingkat kelahiran, kematian dan migrasi. Oleh karena itu, jika angka kelahiran pada suatu daerah cukup tinggi, maka dapat mengakibatkan daerah tersebut tergolong sebagai daerah yang berpenduduk usia muda dan kecenderungan laju pertumbuhan penduduknya tinggi.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan dalam kurun waktu 2012 - 2013 mengalami peningkatan rata-rata 1,56 %, hal ini dapat dilihat pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan meningkat sebesar 1,37 % dari 5,82 menjadi 5,90 pada tahun 2013. Tetapi dalam kurun waktu tahun 2014 dan 2016 terjadi penurunan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pesisir Selatan. Penurunan yang signifikan terjadi pada tahun 2016 dimana penurunannya mencapai 7,50% dengan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan hanya 5,30. Hal ini menunjukkan bahwa adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pesisir Selatan. Akan tetapi permasalahan ini tidak hanya dialami oleh Kabupaten Pesisir Selatan tetapi justru terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi di beberapa daerah dan bahkan secara nasional. Faktor penyebab perlambatan tersebut antara lain; menurunnya belanja pemerintah secara umum, rendahnya laju investasi dan menurunnya konsumsi rumah tangga. Tingginya inflasi bahan makanan tentu menyedot dan menghabiskan porsi pendapatan masyarakat untuk dapat menyisihkan porsi belanja barang-barang non-makanan. Berikut tabel Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2012 - 2017.

Tabel 2.23
Pertumbuhan Ekonomi
Kab. Pesisir Selatan Tahun 2012-2017

No	Tahun	Pertumbuhan (%)
1	Tahun 2012	5.82
2	Tahun 2013	5.90
3	Tahun 2014	5,80
4	Tahun 2015	5,73
5	Tahun 2016	5,30
6	Tahun 2017	5,42

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Lapangan Usaha 2013-2017

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (kabupaten) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Penyusunan PDRB dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan lapangan usaha, pengeluaran yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan.

Ditinjau dari laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan menurut lapangan usaha, tampak bahwa selama kurun waktu 5 (lima) tahun cenderung mengalami perlambatan, yaitu dari sebesar 6,31% tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 sebesar 5,30%, seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.24
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2017 (Persen)

Lapangan Usaha	Pertumbuhan Ekonomi					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	4,84	3,71	5,55	5,55	2,21	3,16
2. Pertambangan dan Penggalian	3,55	5,50	3,88	4,64	5,72	2,97
3. Industri Pengolahan	7,33	4,83	6,32	4,42	6,70	1,83
4. Pengadaan Listrik & Gas	0,03	(2,85)	11,57	4,29	10,12	5,41
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	7,16	4,25	4,23	4,18	6,24	4,23
6. Konstruksi	7,01	12,73	6,03	6,13	7,75	9,48
7. Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,48	7,48	8,76	5,93	6,98	8,02
8. Transportasi dan Pergudangan	7,92	9,07	8,65	7,98	8,69	8,67
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,79	2,34	3,63	7,11	10,95	10,78
10. Informasi dan Komunikasi	11,09	9,98	5,96	8,58	9,76	10,91
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	7,75	6,73	2,78	3,81	6,62	2,00
12. Real Estate	5,63	5,93	5,95	5,79	5,82	5,21
13. Jasa Perusahaan	5,47	5,52	5,38	5,40	5,12	5,23
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,58	2,96	1,23	3,33	5,19	5,14
15. Jasa Pendidikan	0,39	8,31	6,36	8,16	9,17	6,97
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,86	7,18	7,73	7,27	5,53	7,90
17. Jasa Lainnya	4,52	5,18	5,18	5,22	11,98	8,81
PDRB PESISIR SELATAN	5,82	5,90	5,80	5,73	5,30	5,42

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Lapangan Usaha 2013-2017

Jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi Pesisir Selatan dengan Kabupaten/Kota lain di provinsi Sumatera Barat pada tahun 2016, tampak bahwa pertumbuhan ekonomi Pesisir Selatan termasuk 10 terendah di Sumatera Barat walaupun jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Pesisir Selatan diatas pertumbuhan ekonomi Provinsi, seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.25
Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2012-2017 (Persen)

KABUPATEN/KOTA	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1. Kepulauan Mentawai	5,37	5,77	15,57	5,20	5,02	5,13
2. Pesisir Selatan	5,82	5,90	5,80	5,73	5,33	5,42
3. Solok	6,43	5,63	5,79	5,44	5,31	5,33
4. Sijunjung	6,15	6,14	6,02	5,69	5,26	5,27
5. Tanah Datar	5,61	5,85	5,79	5,33	5,03	5,12
6. Padang Pariaman	5,94	6,20	6,05	6,14	5,52	5,59
7. Agam	6,18	6,15	5,92	5,52	5,41	5,43
8. Lima Puluh Kota	6,15	6,23	5,98	5,61	5,32	5,34
9. Pasaman	6,01	5,82	5,87	5,34	5,07	5,09
10. Solok Selatan	6,04	6,13	5,90	5,35	5,12	5,15
11. Dharmasraya	6,19	6,51	6,34	5,75	5,42	5,45
12. Pasaman Barat	6,33	6,40	6,04	5,70	5,33	5,35
13. Kota Padang	6,16	6,66	6,46	6,41	6,22	6,23
14. Kota Solok	6,76	6,44	6,01	5,97	5,76	5,78
15. Kota Sawahlunto	5,53	6,11	6,08	6,03	5,73	5,75
16. Kota Padang Panjang	5,97	6,29	6,08	5,91	5,80	5,81
17. Kota Bukittinggi	6,55	6,28	6,20	6,14	6,05	6,08
18. Kota Payakumbuh	6,62	6,56	6,47	6,19	6,09	6,12
19. Kota Pariaman	6,13	6,06	5,99	5,79	5,59	5,62
PROVINSI	6,31	6,08	5,88	5,52	5,26	5,29

Sumber: Sumatera Barat Dalam Angka, 2018

Seperti halnya dengan tahun sebelumnya, struktur perekonomian Sumatera Barat berdasarkan lapangan usaha tahun 2016 masih didominasi oleh 3 (tiga) lapangan usaha utama, yaitu : Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 40,55%, Perdagangan Besar & Eceran: Reparasi Mobil-Sepeda Motor 11,57%, serta Konstruksi sebesar 9,51%, seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.26
Struktur Ekonomi Menurut Lapangan Usaha
Di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012-2017

Kategori	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	41,43	41,27	41,67	42,19	41,17	40,45
2. Pertambangan dan Penggalan	3,91	4,04	4,02	4,02	3,80	3,60
3. Industri Pengolahan	8,69	8,29	8,17	7,99	8,07	7,69
4. Pengadaan Listrik & Gas	0,03	0,03	0,04	0,05	0,05	0,05
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06

Kategori	2012	2013	2014	2015	2016	2017
6. Konstruksi	8,81	9,34	9,38	9,60	9,90	10,22
7. Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,10	10,88	10,93	11,20	11,67	12,16
8. Transportasi dan Pergudangan	3,49	3,57	3,68	3,68	3,63	3,64
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,03	1,00	1,02	1,07	1,17	1,22
10. Informasi dan Komunikasi	6,01	5,90	5,78	5,40	5,44	5,74
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,32	2,31	2,29	2,28	2,28	2,18
12. Real Estate	1,35	1,34	1,39	1,38	1,38	1,36
13. Jasa Perusahaan	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,86	6,80	6,35	5,86	5,94	5,99
15. Jasa Pendidikan	2,63	2,79	2,84	2,93	3,05	3,19
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,24	1,27	1,28	1,22	1,21	1,23
17. Jasa Lainnya	0,59	1,05	1,05	1,03	1,11	1,16
PDRB PESISIR SELATAN	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Lapangan Usaha 2013-2017

2.1.2.2. Indeks Pembangunan Manusia

Menurut hasil survey yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan menggunakan metode baru yang dirilis tahun 2015, IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Dalam hal ini IPM bisa menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*) serta standar hidup layak (*decent standard of living*).

IPM di Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan metode baru pada tahun 2017 adalah 68,74. Jika dilihat dari masing-masing komponen tampak Angka Harapan Hidup saat lahir adalah sebesar 70,23 tahun, Harapan Lama Sekolah 13,06 tahun, Rata-rata Lama sekolah 8,13 tahun dan Pengeluaran per Kapita Rp. 8.819.000,- seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.27
Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2012-2017

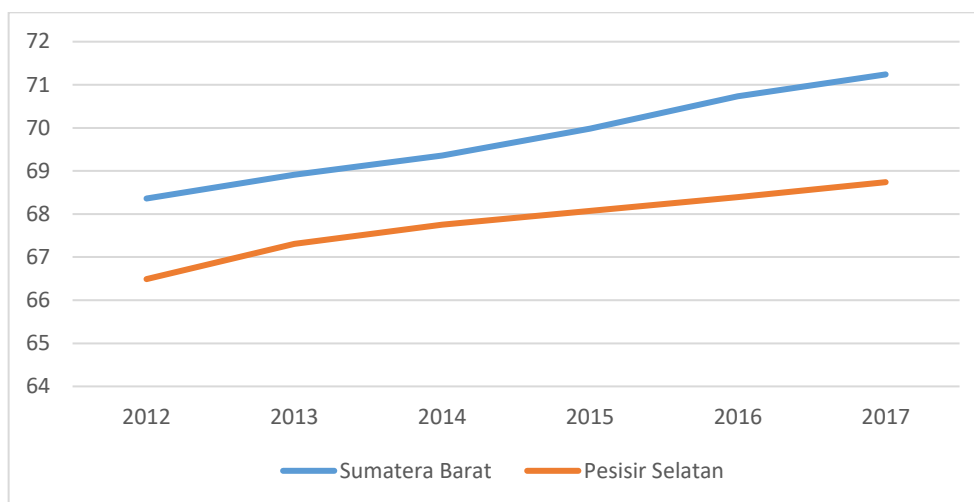
NO	KOMPONEN IPM	SATUAN	TAHUN					
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Angka Harapan Hidup Saat Lahir	Tahun	69,36	69,43	69,46	69,96	70,11	70,23
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,49	12,83	13,02	13,04	13,05	13,06
3	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,79	8,05	8,10	8,11	8,12	8,13
4.	Pengeluaran per Kapita	(Rp.000)	8.131	8.232	8.367	8.411	8.605	8.819
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN PESISIR SELATAN			66,49	67,31	67,75	68,07	68,39	68,74
PERTUMBUHAN IPM		%	1,05	1,23	0,65	0,47	0,47	0,51

Sumber: Berita Resmi Statistik, 2018

Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian. Secara umum, pembangunan manusia Pesisir Selatan terus mengalami kemajuan selama periode 2012 hingga 2017. IPM Pesisir Selatan meningkat dari 66,49 pada tahun 2012 menjadi 68,74 pada tahun 2017. Selama periode tersebut, IPM Pesisir Selatan rata-rata tumbuh sebesar 0,73 persen per tahun. Pada periode 2015-2017, IPM Sumatera Barat tumbuh 0,90 persen. Pertumbuhan pada periode tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan kenaikan pada periode 2012-2015.

Kondisi IPM Pesisir Selatan dilihat di tingkat provinsi Sumatera Barat termasuk 10 terendah dan jauh dibawah IPM Provinsi Sumatera Barat, seperti terlihat pada grafik berikut ini.

Gambar 2.5
Grafik Perbandingan IPM Kabupaten Pesisir Selatan dengan Provinsi
Tahun 2012-2017

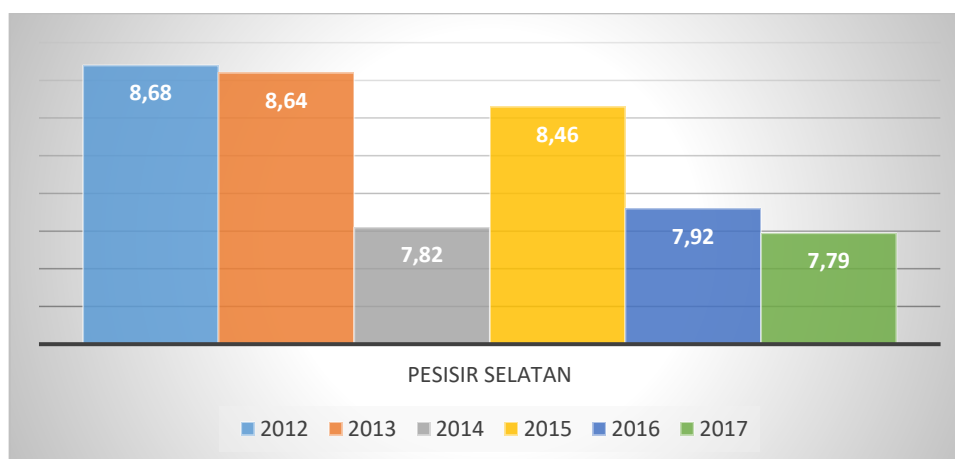


Sumber: Berita Resmi Statistik, 2018

2.1.2.3. Tingkat Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Berdasarkan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan, dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dalam hal ini penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Pesisir Selatan berfluktuatif, seperti terlihat pada Grafik berikut :

Gambar 2.6
Grafik Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Pesisir Selatan



Sumber: Berita Resmi Statistik, 2018

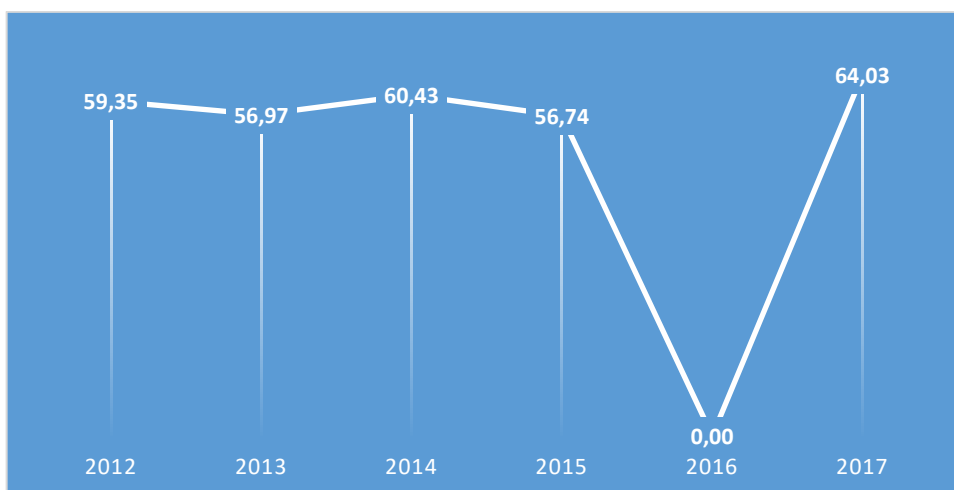
2.1.2.4. Tingkat Pengangguran

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Pesisir Selatan adalah 56,74% pada tahun 2015, sedangkan kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2017 mencapai 5,95%

Selanjutnya Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Persentase Tingkat Pengangguran di Kabupaten Pesisir Selatan terlihat pada grafik berikut ini:

Gambar 2.7

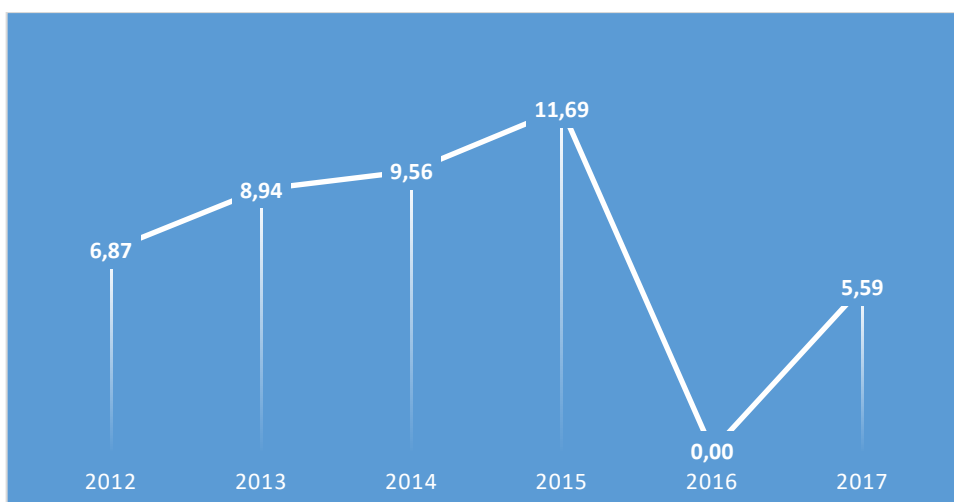
Grafik Perkembangan Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012-2017



Sumber: Berita Resmi Statistik, 2018

Gambar 2.8

Grafik Perkembangan Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012-2017



Sumber: Pesisir Selatan Dalam Angka, 2017

Selanjutnya struktur lapangan pekerjaan tahun 2017 tidak mengalami perubahan dapat dilihat penduduk Kabupaten Pesisir Selatan yang berumur 15 tahun ke atas, pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani 48,50% dan sektor jasa 18,44%, untuk melihat penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 2.28
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja

No	Lapangan Usaha	Jumlah Penduduk	Persentase
1	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	75.603	48,50
2	Industri Pengolahan	8.342	5,35
3	Perdagangan, Hotel dan Restoran	24.079	15,45
4	Jasa-jasa	28.750	18,44
5	Lainnya	19.120	12,26
Total		155.894	100,00

Sumber: BPS, Pesisir Selatan Dalam Angka, 2017

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Berdasarkan undang-undang layanan urusan pemerintahan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar ada 6 (enam) urusan dan urusan pemerintahan wajib daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari 18 (delapan belas) urusan, sedangkan untuk layanan urusan pemerintahan pilihan daerah meliputi 8 (delapan) urusan.

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Hasil pelaksanaan pembangunan berdasarkan fokus layanan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan dasar selama kurun waktu 2015 – 2017 secara umum memperlihatkan perkembangan kemajuan dan peningkatan yang cukup berarti.

A. Urusan Wajib Pendidikan

1. Pendidikan Dasar

Perkembangan indikator pendidikan dasar dari tahun 2015-2017 di Kabupaten Pesisir Selatan dapat diukur berdasarkan indikator angka partisipasi sekolah, rasio ketersediaan sekolah dengan penduduk usia sekolah, rasio guru dengan murid serta rasio guru/murid per kelas rata-rata. Angka partisipasi sekolah dasar merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dasar, Angka tersebut

memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda, Angka partisipasi sekolah dasar adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Sedangkan rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar, rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar, kondisi perkembangan pendidikan dasar di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015-2017 dapat terlihat seperti tabel berikut ini :

Tabel 2.29
Perkembangan Pendidikan Dasar
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2017

NO	INDIKATOR	TAHUN		
		2015	2016	2017
1	Angka Melek Huruf	98,12	98,15	98,89
2	Angka Partisipasi Kasar			
	- APK SD/MI/Paket A	124,22	124,21	124,24
	- APK SMP/MTs/Paket B	101,61	102,99	103,11
	- APK SMA/SMK/MA/Paket C	92,52	95,52	-
3	Angka Pendidikan yang ditamatkan			
	- APT SD/MI/Paket A	-	9,944	9,9944
	- APT SMP/MTs/Paket B	-	9,304	9,304
	- APT SMA/SMK/MA/Paket C	-	7,026	-
4	Angka Partisipasi Murni			
	- APM SD/MI/Paket A	99,12	99,22	99,38
	- APM SMP/MTs/Paket B	89,90	90,29	90,38
	- APM SMA/SMK/MA/Paket C	77,82	77,84	-
5	Angka Partisipasi Sekolah			
	- APS 7 – 12 Tahun	99,1	99,37	99,37
	- APS 13 – 15 Tahun	87,27	87,89	90,18
6	Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah			
	- Rasio Guru Terhadap Murid	26,276	26,676	26,676
	- Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas Rata-rata	0,03	0,87	0,87
7	Pendidikan Menengah			
	- APS 16 – 18 Tahun	73,38	78,14	-
	- Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah	22,75	22	-
	- Rasio Guru Terhadap Murid	18,45	18,39	-

NO	INDIKATOR	TAHUN		
		2015	2016	2017
	- Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas Rata-rata	0,72	0,90	-
	- Penduduk yang berusia > 15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)	98,08	98,85	-
8	Fasilitas Pendidikan			
	- Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	94,52	95,32	95,32
	- Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	87,50	90,07	90,07
9	Angka Putus Sekolah			
	- Angka Putus Sekolah SD/MI	0,07	0,02	0,04
	- Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,11	0,05	0,02
	- Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA	0,16	0,04	-
10	Angka Kelulusan			
	- Angka Kelulusan SD/MI	99,99	99,65	99,77
	- Angka kelulusan SMP/MTs	99,05	99,41	99,91
	- Angka kelulusan SMA/SMK/MA	100	98,65	-
	- Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	96,45	97,23	97,53
	- Angka melanjutkan dari SMP/Mts ke SMA/SMK/MA	91,82	92,68	97,53
	- Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	-	-	87,82
11	Kualifikasi pendidikan Strata 1 / DIV ($\geq$ S1)*			
	- SD	81,40	83,50	-
	- SMP	90,07	92,5	-
	- SMA	99,27	100	-

*) Indikator dihitung sampai dengan tahun 2016

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan

2. Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan 6 (enam) perkembangan: agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan sesuai kelompok usia yang

dilalui oleh anak usia dini seperti yang tercantum dalam Permendikbud 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD (menggantikan Permendiknas 58 tahun 2009).

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2015 – 2017 memperlihatkan trend yang meningkat, pada tahun 2015 sebesar 45,20% menjadi 45,83% pada tahun 2017, kondisi perkembangan PAUD di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015-2017 dapat terlihat seperti tabel berikut ini :

Tabel 2.30
Perkembangan Pendidikan Usia Dini
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2017

NO	INDIKATOR	TAHUN		
		2015	2016	2017
1	Pendidikan Anak Usia Dini	45,20	45,36	45,83

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan

B. Urusan Wajib Kesehatan

Perkembangan urusan kesehatan dilihat dari tahun 2015-2017 dengan indikator antara lain rasio pos pelayanan terpadu (posyandu) per satuan balita, rasio puskesmas, poliklinik dan puskesmas pembantu per satuan penduduk, rasio rumah sakit per satuan penduduk, rasio dokter per satuan penduduk, rasio tenaga medis per satuan penduduk dan beberapa indikator cakupan.

Kondisi perkembangan indikator untuk kesehatan dapat terlihat seperti tabel berikut ini :

Tabel 2.31
Perkembangan Indikator Kesehatan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2017

NO	INDIKATOR	TAHUN		
		2015	2016	2017
1	Angka kematian bayi	4,6	5	5
2	Persentase Balita Gizi Buruk	8,90	3,3	3,3
3	Rasio posyandu per satuan balita	1:80	1:75	1:75
4	Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	1:10.000	1:25.000	1:25.000
5	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	2:100.000	1:450.186	1:450.186
6	Rasio dokter per satuan penduduk	1:2.500	1:10.718	1:10.718
7	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	1:1.300	1:684	1:684
8	Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani (%)	74,39	77,2	80,58

NO	INDIKATOR	TAHUN		
		2015	2016	2017
9	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan (%)	93,19	92,5	83,92
10	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) %	86,01	97	91,20
11	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (%)	100	100	100
12	Cakupan penemuan dan penamangan penderita penyakit TBC BTA (%)	82,70	94	109,62
13	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	99,6	100
14	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	65	6,14	67,38
15	Cakupan kunjungan bayi	87,12	97,6	94,87
16	Cakupan puskesmas	2,50	2,34	
17	Cakupan pembantu puskesmas	50	88,56	
18	Persentase Balita Gizi Buruk (yang mendapat perawatan)	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dan RSUD M.Zein Painan

C. Urusan Wajib Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Perkembangan indikator di urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat dari beberapa indikator dengan beberapa perubahan satuan indikator pada proporsi jalan dalam kondisi baik, penambahan indikator rasio jaringan irigasi, rasio rumah tidak layak huni, luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik dan pengurangan indikator rasio rumah layak huni dan persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik. Kondisi perkembangan indikator untuk pekerjaan umum dan penataan ruang dapat terlihat seperti tabel berikut ini :

Tabel 2.32

Perkembangan Indikator Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2017

NO	INDIKATOR	TAHUN		
		2015	2016	2017
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	828 (km)	848,27 (km)	37,64 (%)
2	Rasio Jaringan Irigasi	-	-	49,13
3	Rasio tempat pembuangan sampah persatuan penduduk	0,08	0,07	62,95
4	Rasio Rumah Tidak layak Huni	-	-	93,98
5	Rasio rumah layak huni *	0,23	0,23	-
6	Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	-	-	49,13
7	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik *	48,66	47,14	-

NO	INDIKATOR	TAHUN		
		2015	2016	2017
8	Panjang Jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air *	0,35	0,38	-

*) Indikator dihitung sampai dengan tahun 2016

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan

D. Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perkembangan indikator di urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dilihat dari beberapa peningkatan capaian kinerja pada indikator Rumah tangga pengguna air bersih, Rumah tangga bersanitasi, Lingkungan permukiman kumuh, terdapat perubahan indikator Rumah Layak Huni menjadi Rumah Tidak layak Huni. Kondisi perkembangan indikator untuk Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat terlihat seperti tabel berikut ini :

Tabel 2.33

Perkembangan Indikator Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2017

NO	INDIKATOR	TAHUN		
		2015	2016	2017
1	Rumah tangga pengguna air bersih	85	85,37	87,86
2	Rumah tangga bersanitasi	62,7	63,76	62,95
3	Lingkungan permukiman kumuh	12,88	12,88	14,65
4	Rumah Tidak layak Huni	-	-	93,98
5	Rumah Layak Huni *	75,56	-	-

*) Indikator dihitung sampai dengan tahun 2016

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan

E. Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Perkembangan dari urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dalam periode 2015-2017 dengan beberapa perubahan indikator dari tahun 2015 sampai tahun 2017, hal ini disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan perubahan struktur organisasi yang telah dilakukan pada tahun 2016 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Kondisi perkembangan indikator untuk ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dapat terlihat seperti tabel berikut ini :

Tabel 2.34
Perkembangan Indikator Ketentraman, Ketertiban Umum, dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2017

NO	INDIKATOR	TAHUN		
		2015	2016	2017
1	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	-	-	0,49
2	Cakupan Patroli Petugas Satpol PP	-	-	2 kali sehari
3	Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	-	-	97%
4	Pelanggar Perda Nomor 01 Tahun 2016 *	-	22	-
5	Pelanggar Perda Nomor 04 Tahun 2016 *	68	-	-
6	Penertiban IMB *	6	3	-
7	Penertiban anak sekolah yang keluar pada jam sekolah *	80	70	-
8	Penertiban ternak lepas *	55	25	-
9	Petugas perlindungan Masyarakat (linmas) di Kabupaten	-	-	0,022%
10	Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten	-	-	5
11	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	-	-	79

*) Indikator dihitung sampai dengan tahun 2016

Sumber : Satuan Pol. PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan

F. Urusan Wajib Sosial

Perkembangan indikator di urusan Sosial dapat dilihat dari capaian kinerja pada indikator Sarana dan prasarana panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi di Kabupaten Pesisir Selatan, pemberian bantuan terhadap PMKS dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial/penanganan PMKS. Kondisi perkembangan indikator untuk urusan sosial dapat terlihat seperti tabel berikut ini :

Tabel 2.35
Perkembangan Indikator Sosial
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2017

NO	INDIKATOR	TAHUN		
		2015	2016	2017
1	Sarana sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo, Panti Rehabilitasi	9	9	7
2	PMKS yang memperoleh bantuan	12.271	38.225	27.104
3	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial/penanganan PMKS	-	-	27.104
4	Anak terlantar yang memperoleh bantuan *	350	235	-

NO	INDIKATOR	TAHUN		
		2015	2016	2017
5	Pemberian jaminan sosial kepada penderita cacat fisik dan mental *	74	74	-

*) Indikator dihitung sampai dengan tahun 2016

Sumber : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

A. Urusan Wajib Tenaga Kerja

Perkembangan indikator di urusan tenaga kerja dapat dilihat dari capaian kinerja pada indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, penyelesaian kasus sengketa pengusaha dengan pekerja serta keselamatan dan perlindungan bagi pekerja. Kondisi perkembangan indikator untuk urusan tenaga kerja dapat terlihat seperti tabel berikut ini :

Tabel 2.36
Perkembangan Indikator Tenaga Kerja
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2017

NO	INDIKATOR	TAHUN		
		2015	2016	2017
1	Angka Partisipasi angkatan kerja	56,74	74,55	61,41
2	Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun	0	2	0
3	Tingkat partisipasi angkatan kerja	56,74	60,12	59,12
4	Pencari kerja yang ditempatkan	123	155	350
5	Keselamatan dan Perlindungan	30	40	86

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan

B. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Perkembangan indikator di urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat dari capaian kinerja pada indikator peningkatan persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, sedangkan beberapa indikator lainnya belum bisa di hitung oleh dinas teknis terkait. Kondisi perkembangan indikator untuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat terlihat seperti tabel berikut ini :

Tabel 2.37
Perkembangan Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2017

NO	INDIKATOR	TAHUN		
		2015	2016	2017
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	8,77	13,29	76,66

NO	INDIKATOR	TAHUN		
		2015	2016	2017
2	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	71,68	-	-
3	Rasio KDRT	0,0092	-	-
4	Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur	0,26	-	-
5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	91,23	71,60	35,22
6	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan

C. Urusan Wajib Pangan

Perkembangan indikator di urusan pangan dapat dilihat dari capaian kinerja pada indikator ketersediaan pangan utama, ketersediaan energi dan protein yang dikonsumsi. Kondisi perkembangan indikator untuk urusan pangan dapat terlihat seperti tabel berikut ini :

Tabel 2.38
Perkembangan Indikator Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2017

NO	INDIKATOR	TAHUN		
		2015	2016	2017
1	Regulasi Ketahanan Pangan	-	-	2
2	Ketersediaan Pangan Utama	132,12	112,93	101,28
3	Ketersediaan Energi	3.754	3.698	3.698
4	Ketersediaan Protein	83,73	84,27	84,27
5	Skor Pola Pangan Harapan	77,20	72,90	72,90
6	Tingkat Kecukupan konsumsi pangan			
	- Konsumsi energi	2.320	2.319,5	2.377
	- Konsumsi protein	59,2	59,1	63
7	Stabilitas harga pangan pokok ditingkat produsen			
	- Harga gabah	4.054	4.309	4.309
	- Harga beras	7.848	9.109	9.109
8	Stabilitas harga pangan pokok di tingkat konsumen	12,90	5,38	5,38
9	Persentase bahan pangan yang aman dikonsumsi masyarakat	74,60	81,83	81,83

Sumber : Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

D. Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Perkembangan indikator di urusan lingkungan hidup dapat dilihat dari capaian kinerja pada indikator cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dan penegakkan hukum lingkungan. Kondisi perkembangan indikator untuk urusan lingkungan hidup dapat terlihat seperti tabel berikut ini :

Tabel 2.39
Perkembangan Indikator Lingkungan Hidup
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2017

NO	INDIKATOR	TAHUN		
		2015	2016	2017
1	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	100	100	100
2	Penegakan hukum lingkungan	5	8	8
3	Pembahasan dokumen lingkungan *	24	63	-

*) Indikator dihitung sampai dengan tahun 2016

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan

E. Urusan Wajib Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Perkembangan indikator di urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dapat dilihat dari capaian kinerja pada indikator rasio penduduk ber KTP, kepemilikan akte kelahiran dan penerpan KTP Nasional berbasis NIK. Kondisi perkembangan indikator untuk urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dapat terlihat seperti tabel berikut ini :

Tabel 2.40
Perkembangan Indikator Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2017

NO	INDIKATOR	TAHUN		
		2015	2016	2017
1	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	0,66	0,79	0,79
2	Rasio bayi ber akte kelahiran	0,81	0,85	0,85
3	Kepemilikan KTP	257.739	292.590	304.792
4	Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	224,46	229,51	200,157
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK			
	- NIK pemutakhiran data penduduk	545.712	-	501.197
	- Penerbitan	257.739	-	304.792
	- Penerapan e-KTP	289.340	-	Seumur hidup

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan

F. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Perkembangan indikator di urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat dilihat dari capaian kinerja pada indikator pemberdayaan masyarakat baik terhadap kelompok LPM dan PKK di tingkat Nagari/Desa. Kondisi perkembangan indikator untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat terlihat seperti tabel berikut ini :

Tabel 2.41
Perkembangan Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2017

NO	INDIKATOR	TAHUN		
		2015	2016	2017
1	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	4,00	-	60,60
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	680	544	100
3	PKK Aktif	85	85	6,956
4	Swadaya masyarakat terhadap Program Pemberdayaan masyarakat	40,00	-	-
5	Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	-	-	-

Sumber : Dinas PMD, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Pesisir Selatan

G. Urusan Wajib Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Perkembangan indikator di urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat dilihat dari capaian kinerja pada indikator rasio akseptor KB, Cakupan KB Aktif serta indikator penunjang lainnya. Kondisi perkembangan indikator untuk urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat terlihat seperti tabel berikut ini :

Tabel 2.42
Perkembangan Indikator Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2017

NO	INDIKATOR	TAHUN		
		2015	2016	2017
1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	1,68	3,4	1,18
2	Ratio akseptor KB	60,87	70,79	17,26
3	Cakupan peserta KB aktif	61,05	68,28	0,75
4	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	68,89	-	-

Sumber : Dinas PMD, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Pesisir Selatan

H. Urusan Wajib Perhubungan

Perkembangan indikator di urusan perhubungan dapat dilihat dari capaian kinerja pada indikator pelayanan terhadap masyarakat baik pada transportasi darat dan laut, maupun aspek keselamatan transportasinya. Kondisi perkembangan indikator untuk urusan perhubungan dapat terlihat seperti tabel berikut ini :

Tabel 2.43
Perkembangan Indikator Perhubungan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2017

NO	INDIKATOR	TAHUN		
		2015	2016	2017
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	3.409.976	3.875.977	994.743
2	Jumlah uji KIR angkutan Umum	9.954	8.895	7.370
3	Jumlah pelabuhan Laut/udara/terminal bis	3	3	2
4	Angkutan darat	0,1	42	0,25
5	Kepemilikan KIR angkutan umum	2,33	32	15,71
6	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	30 menit	30 menit	30 menit
7	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	61.000	61.000	-
8	Pemasangan rambu-rambu	-	-	0
9	Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan	-	-	2,69
10	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	2.188.805	2.486.453	994.743
11	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal pertahun	3.921.472	4.112.567	90.512

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan

I. Urusan Wajib Komunikasi Dan Informatika

Perkembangan indikator di urusan komunikasi dan informasi dapat dilihat dari capaian kinerja pada indikator jumlah jaringan komunikasi maupun media komunikasi dan informasi Kabupaten Pesisir Selatan. Kondisi perkembangan indikator untuk urusan komunikasi dan informasi dapat terlihat seperti tabel berikut ini :

Tabel 2.44
Perkembangan Indikator Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2017

NO	INDIKATOR	TAHUN		
		2015	2016	2017
1	Jumlah Jaringan Komunikasi	5	4	4
2	Jumlah surat kabar nasional/lokal	5	86	86
3	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	3	13	3
4	Website milik Pemerintah Daerah	1	2	2
5	Pameran/Expo	1	1	4

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan

J. Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

Perkembangan indikator di urusan koperasi, usaha kecil dan menengah dapat dilihat dari capaian kinerja pada indikator jumlah koperasi dan UMKM yang

aktif dan dibina. Kondisi perkembangan indikator untuk urusan koperasi, usaha kecil dan menengah dapat terlihat seperti tabel berikut ini :

Tabel 2.45
Perkembangan Indikator Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2017

NO	INDIKATOR	TAHUN		
		2015	2016	2017
1	Jumlah Koperasi	299	333	275
2	Persentase koperasi aktif	61,87	66,37	62,55
3	Jumlah Koperasi Aktif	185	221	172
4	Persentase koperasi aktif yang melakukan RAT (%)	19,46	31,67	43
5	Jumlah UMKM yang dibina	30	150	120
6	Usaha mikro dan kecil	4.440	4.442	5.787

Sumber : Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan

K. Urusan Wajib Penanaman Modal

Perkembangan indikator di urusan penanaman modal dapat dilihat dari capaian kinerja pada indikator jumlah investor dan jumlah investasi yang masuk ke Kabupaten Pesisir Selatan. Kondisi perkembangan indikator untuk urusan penanaman modal dapat terlihat seperti tabel berikut ini :

Tabel 2.46
Perkembangan Indikator Penanaman Modal
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2017

NO	INDIKATOR	TAHUN		
		2015	2016	2017
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	24	26	15
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	229,8 M	626,2 M	132 M
3	Rasio daya serap tenaga kerja	97,20	97,40	-
4	Kerjasama Investasi	1 MoU	1 MoU	2 MoU

Sumber : Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan

L. Urusan Wajib Kepemudaan Dan Olah Raga

Untuk urusan Kepemudaan dan Olahraga indikator kinerjanya hanya bisa dilihat pada tahun 2017 karena pada tahun sebelumnya tidak pernah menghitung capaian kinerja urusan Kepemudaan dan Olahraga. Indikator untuk urusan Kepemudaan dan Olahraga dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.47
Perkembangan Indikator Kepemudaan Dan Olah Raga
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2017

NO	INDIKATOR	TAHUN		
		2015	2016	2017
1	Jumlah organisasi pemuda	-	-	42
2	Jumlah organisasi olahraga	-	-	29
3	Jumlah kegiatan kepemudaan	-	-	15
4	Jumlah kegiatan olahraga	-	-	2
5	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	-	-	1 gelanggang/18 balai pemuda
6	Lapangan olahraga	-	-	89
7	Jumlah Klub Olahraga	-	-	33
8	Jumlah Gedung Olahraga	-	-	5

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan

M. Urusan Wajib Statistik

Untuk urusan Statistik indikator kinerjanya hanya bisa dilihat pada tahun 2017 karena pada tahun sebelumnya tidak pernah menghitung capaian kinerja urusan Statistik. Indikator untuk urusan Statistik dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.48
Perkembangan Indikator Statistik
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2017

NO	INDIKATOR	TAHUN		
		2015	2016	2017
1	Data Statistik Pembangunan Daerah	-	-	ada

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan

N. Urusan Wajib Kebudayaan

Perkembangan indikator di urusan kebudayaan dapat dilihat dari capaian kinerja pada indikator jumlah grup kesenian dan jumlah gedung kesenian yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Kondisi perkembangan indikator untuk urusan kebudayaan dapat terlihat seperti tabel berikut ini :

Tabel 2.49
Perkembangan Indikator Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2017

NO	INDIKATOR	TAHUN		
		2015	2016	2017
1	Jumlah Grup Kesenian	66	67	67
2	Jumlah Gedung Kesenian	1	1	1

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan

O. Urusan Wajib Perpustakaan

Perkembangan indikator di urusan perpustakaan dapat dilihat dari capaian kinerja pada indikator jumlah kunjungan dan jumlah koleksi buku yang ada di Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan. Kondisi perkembangan indikator untuk urusan perpustakaan dapat terlihat seperti tabel berikut ini :

Tabel 2.50
Perkembangan Indikator Perpustakaan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2017

NO	INDIKATOR	TAHUN		
		2015	2016	2017
1	Jumlah Perpustakaan	6	6	1
2	jumlah pengunjung perpustakaan daerah pertahun	4.274	5.250	22.423
3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	1.000	2.300	17.158

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan

P. Urusan Wajib Kearsipan

Perkembangan indikator di urusan kearsipan dapat dilihat dari capaian kinerja pada indikator persentase pengelolaan arsip secara baku dan peningkatan SDM pengelola kearsipan. Kondisi perkembangan indikator untuk urusan kearsipan dapat terlihat seperti tabel berikut ini :

Tabel 2.51
Perkembangan Indikator Kearsipan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2017

NO	INDIKATOR	TAHUN		
		2015	2016	2017
1	Pengelolaan Arsip secara baku	2	6	2,22
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	-	42	2

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan

2.1.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

A. Urusan Kelautan Dan Perikanan

Indikator di urusan kelautan dan perikanan untuk Kabupaten Pesisir Selatan hanya menyangkut bidang perikanan karena bidang kelautan sudah berpindah kewenangan ke Propinsi sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perkembangan indikatornya dilihat dari produksi perikanan, konsumsi ikan dan pembinaan terhadap kelompok

nelayan. Kondisi perkembangan indikator untuk urusan Kelautan dan Perikanan dapat terlihat seperti tabel berikut ini :

Tabel 2.52
Perkembangan Indikator Kelautan Dan Perikanan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2017

NO	INDIKATOR	TAHUN		
		2015	2016	2017
1	Produksi perikanan	44.324	46.650	49.783
2	Konsumsi Ikan (kg/org/kapita)	33,98	34,50	37,35
3	Cakupan bina kelompok nelayan	185	170	166
4	Produksi perikanan kelompok nelayan	23.356	23.660	25.250

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan

B. Urusan Pariwisata

Perkembangan indikator di urusan kepariwisataan dapat dilihat dari capaian kinerja pada indikator kunjungan wisatawan mancanegara maupun nusantara. Kondisi perkembangan indikator untuk urusan kepariwisataan dapat terlihat seperti tabel berikut ini :

Tabel 2.53
Perkembangan Indikator Pariwisata
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2017

NO	INDIKATOR	TAHUN		
		2015	2016	2017
1	Kunjungan wisata (orang)			
	- kunjungan wisatawan mancanegara (orang)	1.600	1.500	1.700
	- Kunjungan wisatawan nusantara (orang)	2.000.000	1.980.000	2.400.000

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan

C. Urusan Pertanian

Perkembangan indikator di urusan pertanian dapat dilihat dari capaian kinerja pada indikator produktifitas padi dan kontribusi sektor pertanian/perkebunan didalam PDRB Kabupaten Pesisir Selatan. Kondisi perkembangan indikator untuk urusan pertanian dapat terlihat seperti tabel berikut ini :

Tabel 2.54
Perkembangan Indikator Pertanian
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2017

NO	INDIKATOR	TAHUN		
		2015	2016	2017
1	Produktifitas padi per hektar (kw/ha)	50,92	51,63	55,9

NO	INDIKATOR	TAHUN		
		2015	2016	2017
2	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%)	33,43	42,06	40,55

Sumber : Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan

D. Urusan Kehutanan

Untuk urusan kehutanan bukan lagi kewenangan Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perkembangan indikatornya hanya bisa dilihat sampai dengan tahun 2016. Kondisi perkembangan indikator untuk urusan kehutanan dapat terlihat seperti tabel berikut ini :

Tabel 2.55
Perkembangan Indikator Kehutanan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2017

NO	INDIKATOR	TAHUN		
		2015	2016	2017
1	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	805,00	200	-
2	Kerusakan Kawasan Hutan	0,03	-	-
3	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	-	-	-

Sumber : LKPJ Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017

E. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Untuk urusan energi dan sumber daya mineral bukan lagi kewenangan Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perkembangan indikatornya hanya bisa dilihat sampai dengan tahun 2016. Kondisi perkembangan indikator untuk urusan energi dan sumber daya mineral dapat terlihat seperti tabel berikut ini :

Tabel 2.56
Perkembangan Indikator Energi dan Sumber Daya Mineral
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2017

NO	INDIKATOR	TAHUN		
		2015	2016	2017
1	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	-	-	-

Sumber : LKPJ Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017

F. Urusan Perdagangan

Perkembangan indikator di urusan perdagangan dapat dilihat dari capaian kinerja pada indikator kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

Kabupaten Pesisir Selatan disertai dengan indikator-indikator penunjang lainnya. Terdapat perubahan-perubahan indikator disesuaikan dengan kondisi daerah. Kondisi perkembangan indikator untuk urusan perdagangan dapat terlihat seperti tabel berikut ini :

Tabel 2.57
Perkembangan Indikator Perdagangan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2017

NO	INDIKATOR	TAHUN		
		2015	2016	2017
1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	-	-	12,23
2	Jumlah kecamatan yang diawasi barang beredarnya	-	-	7
3	Pasar semi modern	-	-	0
4	Jumlah Pasar *			
	- Nagari	36	40	-
	- Serikat	2	3	-
	- Kabupaten	10	11	-
5	Pembangunan Pasar nagari *	6	6	-
6	Pembangunan Pasar Painan yang memadai *	1	1	-
7	Penataan Pasar dan Penempatan Pedagang *	1	1	-
8	Sistem Informasi Harga (Sentra) 60 *	3	3	-
9	UTTP *	5	5	-
10	Pengawasan barang beredar *	50	-	-

*) Indikator dihitung sampai dengan tahun 2016

Sumber : Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan

G. Urusan Perindustrian

Perkembangan indikator di urusan perindustrian dapat dilihat dari capaian kinerja pada indikator kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Pesisir Selatan disertai dengan indikator-indikator penunjang lainnya. Terdapat perubahan-perubahan indikator disesuaikan dengan kondisi daerah. Kondisi perkembangan indikator untuk urusan perindustrian dapat terlihat seperti tabel berikut ini :

Tabel 2.58
Perkembangan Indikator Perindustrian
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2017

NO	INDIKATOR	TAHUN		
		2015	2016	2017
1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	-	-	8,14
2	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	-	-	-

NO	INDIKATOR	TAHUN		
		2015	2016	2017
3	Pertumbuhan Industri	-	-	1,901
4	Cakupan bina kelompok perajin	-	-	162
5	Persentase tenaga kerja sektor industri	-	-	7,62
6	Jumlah sentra IKM	13	13	20
7	Jumlah Industri *	1.360	1.901	-
8	Jumlah Tenaga Kerja Industri Kecil *	5.514	7.531	-
9	Nilai Produksi Industri Kecil *	8,039 M	20,519 M	-
10	Pengembangan IKM yang bermuatan Lokal *	260	260	-

*) Indikator dihitung sampai dengan tahun 2016

Sumber : Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan

H. Urusan Transmigrasi

Untuk urusan Transmigrasi indikator kinerjanya belum bisa dihitung sampai dengan tahun 2017. Kondisi perkembangan indikator untuk urusan perindustrian dapat terlihat seperti tabel berikut ini :

Tabel 2.59
Perkembangan Indikator Transmigrasi
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2017

NO	INDIKATOR	TAHUN		
		2015	2016	2017
1	Transmigran swakarsa	-	-	-

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah “Kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai tingkat pertumbuhan kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional”. Dan untuk meningkatkan daya saing daerah ada dua strategi untuk mengembangkan daya saing yaitu:

1. Dengan memproduksi barang dan jasa (*goods and services*) yang dibutuhkan oleh manusia dengan tingkat permintaan yang tinggi (*high demand*), dimana barang dan jasa tersebut sudah diproduksi oleh bangsa-bangsa lain, tetapi dengan sentuhan teknologi dan etos kerja yang lebih baik, maka suatu daerah akan mampu memproduksi barang dan jasa tersebut lebih kompetitif dibandingkan dengan yang telah dihasilkan oleh produsen terdahulu. Barang dan jasa yang kompetitif adalah yang kualitasnya unggul, harganya relatif

- murah dan pasokan (*delivery*)nya dapat memenuhi kebutuhan serta selera (*preference*) konsumen baik di pasar domestik maupun global (Porter, 2009).
2. Dengan memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dunia, tetapi karena kondisi alam atau faktor lainnya, bangsa-bangsa lain tidak bisa menghasilkannya atau hanya sedikit bangsa yang dapat memproduksinya (*blue ocean strategy*).

Aspek-aspek Penting Dalam Peningkatan Daya Saing

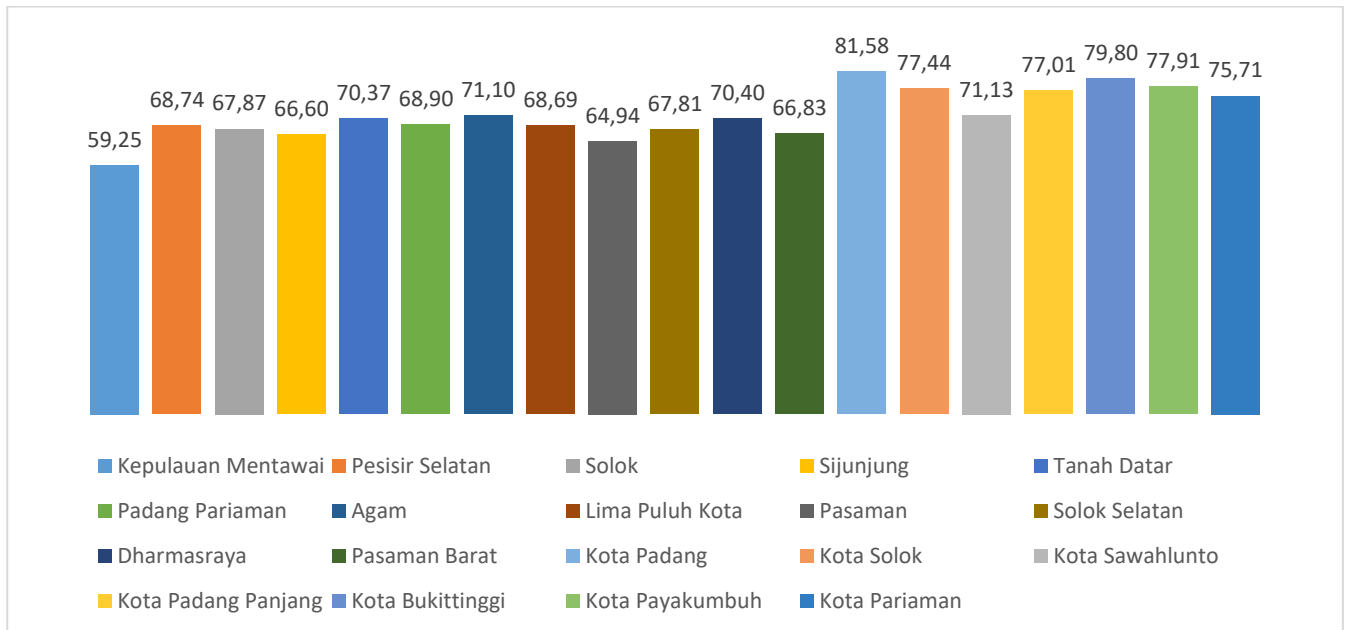
1. Indeks Pembangunan Manusia

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Dalam hal ini IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*) serta standar hidup layak (*decent standard of living*).

IPM di Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan metode baru pada tahun 2017 adalah 68,74. Jika dilihat dari masing-masing komponen tampak Angka Harapan Hidup saat lahir adalah sebesar 70,23 tahun, Harapan Lama Sekolah 13,06 tahun, Rata-rata Lama sekolah 8,13 tahun dan Pengeluaran per Kapita Rp. 8.819.000,- , dengan pertumbuhan IPM 0,51%

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Barat maka pertumbuhan IPM Kabupaten Sumatera Barat tahun 2016-2017 berada pada nomor 11, sedangkan untuk capaian IPM Kabupaten Pesisir Selatan berada di nomor 12 secara keseluruhan, hal ini dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Gambar 2.9
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Sumatera Barat



Sumber: Berita Resmi Statistik, 2018

2. Kemampuan Ekonomi Daerah

Sesuai dengan penjelasan PP No. 78 Tahun 2007, kemampuan ekonomi daerah diukur dengan menggunakan tiga indikator, yakni Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) non migas perkapita, pertumbuhan ekonomi, dan kontribusi PDRB non migas. Indikator PDRB diukur dengan menggunakan dua sub indikator, yakni PDRB perkapita, dan laju pertumbuhan ekonomi.

Indikator PDRB digunakan untuk melihat sejauhmana kemampuan daerah (baik pemerintah maupun masyarakatnya) dalam menggali dan memanfaatkan seluruh sumber daya atau faktor produksi (input) yang ada di daerah menjadi output (produk-produk barang dan jasa). Besaran PDRB suatu daerah juga menggambarkan daya saing suatu daerah dibandingkan dengan daerah lainnya.

PDRB perkapita penduduk Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan atas harga berlaku dalam kurun 2013-2016 cenderung naik. Tahun 2012 PDRB per Kapita Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp. 7.359.217,62 juta rupiah naik menjadi Rp. 10.685.349,85 juta rupiah pada tahun 2016.

Tabel 2.60
Struktur PDRB Perkapita Kabupaten Pesisir Selatan
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013-2016
(Juta Rupiah)

No	Tahun	PDRB per Kapita ADHB
1	Tahun 2012	7.359.217,62
2	Tahun 2013	8.208.517,25
3	Tahun 2014	9.113.793,03
4	Tahun 2015	9.864.677,23
5	Tahun 2016	10.685.349,85

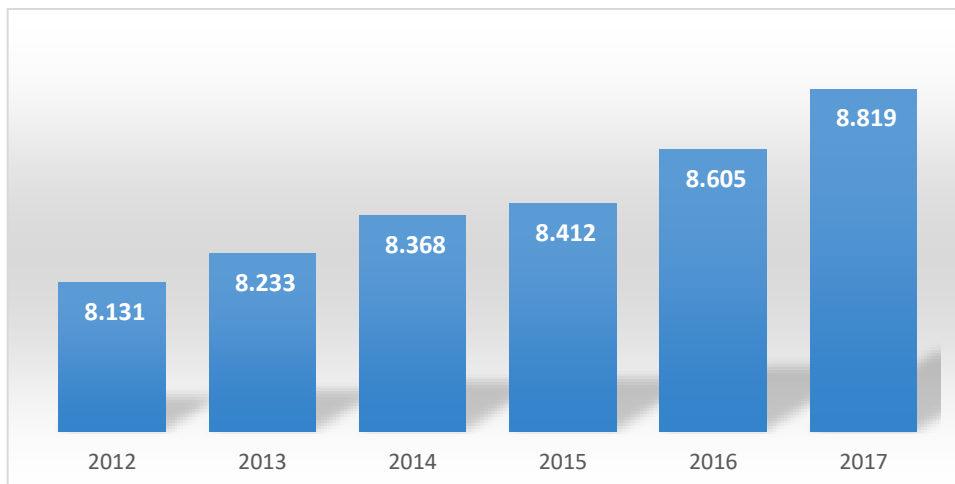
Sumber: BPS, Pesisir Selatan Dalam Angka, 2017

3. *Pengeluaran Konsumsi Makanan dan Non Makanan per Kapita*

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga, data ini digunakan untuk mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan.

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan. Pengeluaran per Kapita Kabupaten Pesisir Selatan bisa dilihat pada grafik dibawah ini :

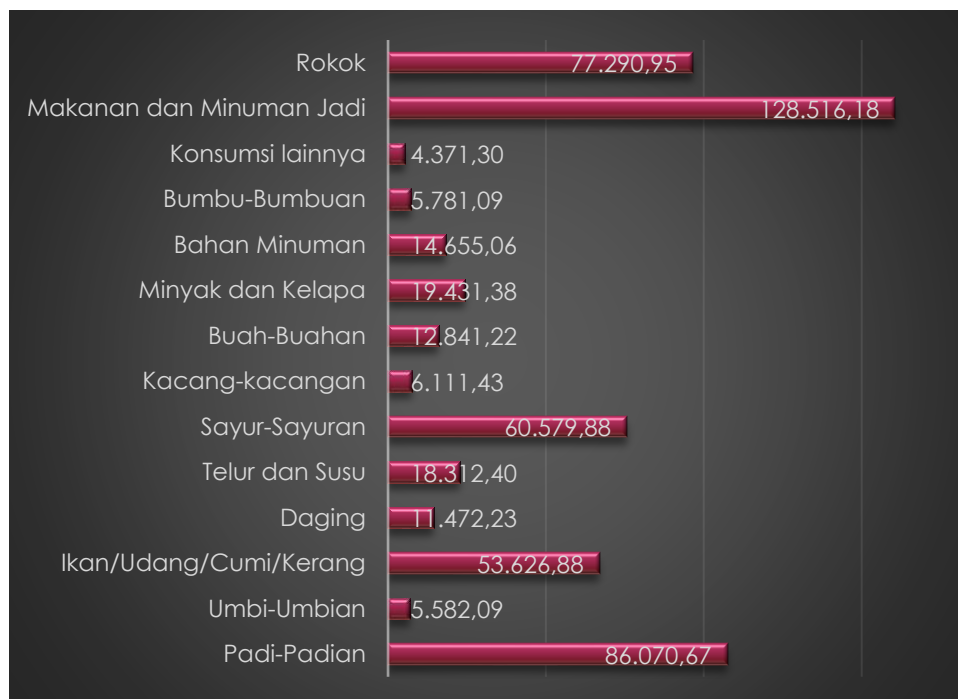
Gambar 2.10
Pengeluaran per Kapita Kabupaten Pesisir Selatan



Sumber: Berita Resmi Statistik, 2018

Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan menurut kelompok barang Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2016 adalah Rp. 812.268,74 yang terdiri dari sektor makanan Rp. 504.642,76 (62,13%) dan sektor non makanan Rp. 307.625,98 (37,87%). Rincian pengeluaran rata-rata dapat dilihat pada grafik dibawah :

Gambar 2.11
Pengeluaran per Kapita Kabupaten Pesisir Selatan Sektor Makanan



Sumber: Berita Resmi Statistik, 2018

Gambar 2.12
Pengeluaran per Kapita Kabupaten Pesisir Selatan Sektor Non Makanan



Sumber: Berita Resmi Statistik, 2018

4. Fasilitas wilayah/infrastruktur

Infrastruktur adalah fasilitas-fasilitas dalam bentuk fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh pihak-pihak publik untuk menunjang fungsi pembentukan wilayah dan kota, yaitu pemenuhan tenaga listrik, transportasi, penyediaan air, serta pembuangan limbah dalam rangka memfasilitasi kepentingan sosial dan ekonomi. Jadi infrastruktur merupakan konsep fisik yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat umum dalam ranah sosial dan ekonomi. Apabila dilihat dari segi mikro, infrastruktur berperan dalam penyediaan aset fisik yang direncanakan dan dirancang dalam suatu proses dan sistem yang relevan, sehingga dapat memenuhi pelayanan publik. Sedangkan fasilitas adalah tempat untuk menampung kepentingan masyarakat berupa fisik dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat publik. Fasilitas harus dirancang dengan baik sehingga dapat memenuhi kebutuhan dalam penyediaan produk dan jasa berkualitas tinggi dengan biaya dan sumber daya yang minimal.

Pada tabel dibawah dapat dilihat perkembangan infrastruktur Kabupaten Pesisir Selatan didalam PDRB Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 2.61
Perkembangan Infrastruktur Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2014-2016

No	Lapangan Usaha	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010		
		2014	2015	2016
1	Pengadaan Listrik dan Gas	2.437,18	2.541,86	2.799,18
2	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.379,00	5.603,92	5.953,65
3	Konstruksi	701.764,15	744.812,28	802.541,38
4	Transportasi dan Pergudangan	272.286,63	294.012,90	319.568,07
5	Real Estate	104.642,28	110.703,39	117.146,74

Sumber : BPS, Pesisir Selatan Dalam Angka, 2017

5. Iklim berinvestasi

Iklim investasi adalah semua kebijakan, kelembagaan, dan lingkungan, baik yang sedang berlangsung maupun yang diharapkan terjadi di masa datang, yang bisa mempengaruhi tingkat pengembalian dan resiko suatu investasi (Stern 2002). Tiga faktor utama dalam iklim investasi mencakup :

1. Kondisi ekonomi makro-termasuk stabilitas ekonomi makro, keterbukaan ekonomi, persaingan pasar, dan stabilitas sosial dan politik.
2. Kepemerintahan dan kelembagaan, termasuk kejelasan dan efektifitas peraturan, perpajakan, sistim hukum, sektor keuangan, fleksibilitas pasar tenaga kerja dan keberadaan tenaga kerja yang terdidik dan trampil.
3. Infrastruktur mencakup antara lain sarana transportasi, telekomunikasi, listrik, dan air.

Pada tabel dibawah dapat dilihat perkembangan investasi Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 2.62
Perkembangan Investasi Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2014-2016

Kategori	2014	2015	2016	2017
Nilai Investasi	1.876.023.570.000	80.477.190.000	109.665.536.145	168.936.538.824

Sumber : Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan, 2018

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan daerah sampai dengan tahun berjalan (kondisi triwulan I tahun 2018) tertuang pada Tabel 2.63.

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2017 dan realisasi capaian target RPJMD Tahun 2016 – 2021 sampai dengan tahun 2017 dapat diuraikan sebagai berikut :

2.2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun 2017

Dalam rangka mencapai sasaran strategis RPJMD, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2017 telah mengalokasikan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 752.819.672.011,50 dengan realisasi sebesar Rp. 612.640.074.838,60 atau 81,38% untuk membiayai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari 6 urusan wajib pelayanan dasar, 17 urusan wajib non pelayanan dasar, 6 urusan pilihan, 6 penunjang urusan, 2 urusan pendukung, urusan kewilayahan di 15 kecamatan serta urusan kesatuan bangsa dan politik. Seluruh urusan tersebut tersebar secara proporsional pada 30 Perangkat Daerah dan 15 Kecamatan.

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

Urusan Pendidikan terdiri dari 10 program dan 106 kegiatan, dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kecamatan dengan anggaran tahun 2017 sebesar Rp.105.802.346,- dan realisasi sebesar Rp.103.711.901.622,- atau 98,25%. Hasil dari pelaksanaan urusan ini sampai tahun 2017 telah dicapai Angka melek huruf 98,89%, APK SD 124,24%, APK SMP 103,11%, APM SD 99,38%, APM SMP 90,38. Angka kelulusan tingkat SD telah mencapai 99,77% dan SMP sebesar 99,91%. Selain itu angka putus sekolah telah berhasil ditekan menjadi SD 0,04% dan SMP 0,02%.

2. Urusan Kesehatan

Urusan Kesehatan terdiri dari 16 program dan 81 kegiatan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. M.Zein Painan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan anggaran tahun 2017 sebesar Rp.214.063.154.837,- dan realisasi sebesar Rp.121.557.316.224,- atau 56,79%. Capaian dari pelaksanaan urusan ini pada tahun 2017 antara lain: angka kematian bayi berkurang menjadi 5

(per 1.000 KH), persentase balita gisi buruk telah berhasil ditekan menjadi 3.3% dan cakupan pemberian imunisasi telah mencapai 91.2%.

3. *Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari 20 program dan 169 kegiatan, dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan anggaran tahun 2017 sebesar Rp.193.586.275.648,- dan realisasi sebesar Rp.177.585.428.653,- atau 91,73%. Capaian dari pelaksanaan urusan ini pada tahun 2017 antara lain: proporsi jalan dalam kondisi baik mencapai 37.64%, rasio jaringan irigasi kondisi baik 49.13% dan rasio pembangunan tempat pembuangan sampah persatuan penduduk sebesar 62.95%.

4. *Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman*

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman terdiri dari 10 program dan 50 kegiatan, dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan anggaran tahun 2017 sebesar Rp.16.167.860.750,- dan realisasi sebesar Rp.14.883.529.025,- atau 92,06%. Capaian dari pelaksanaan urusan ini pada tahun 2017 antara lain: rumah tangga pengguna air bersih sebesar 87.86%, rumah tangga bersanitasi sebesar 62.95%, lingkungan pemukiman kumuh ditekan menjadi 14.65% dan rumah layak huni telah mencapai 93.98%.

5. *Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat*

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari 18 Program dan 61 kegiatan, dilaksanakan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Sekretariat Daerah dan seluruh kecamatan se-Kabupaten Pesisir Selatan dengan anggaran tahun 2017 sebesar Rp.20.363.061.151,- dan realisasi sebesar Rp.16.013.963.346,- atau 78,64%. Capaian dari pelaksanaan urusan ini pada tahun 2017 antara lain:

tingkat penyelesaian pelanggaran K3 mencapai 97%, cakupan pelayanan bencana kebakaran 5 dan Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) 79.

6. *Urusan Sosial*

Urusan Sosial terdiri dari 9 program dan 39 kegiatan, dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sekretariat Daerah dan seluruh kecamatan se-Kabupaten Pesisir Selatan dengan anggaran tahun 2017 sebesar Rp.5.029.426.264,- dan realisasi sebesar Rp.4.647.080.327,- atau 92,40%. Capaian dari pelaksanaan urusan ini pada tahun 2017 yaitu jumlah PMKS yang memperoleh bantuan mencapai 27,104 jiwa dari 15.540 jiwa yang ditargetkan.

B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. *Urusan Tenaga Kerja*

Urusan Tenaga Kerja terdiri dari 6 program dan 24 kegiatan, dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan anggaran tahun 2017 sebesar Rp.1.716.675.750,- dan realisasi sebesar Rp.1.614.401.093,- atau 94,04 persen. Capaian dari pelaksanaan urusan ini pada tahun 2017 antara lain: angka partisipasi angkatan kerja sebesar 61.41%, sengketa pengusaha dengan pekerja turun menjadi 0 kasus, dan jumlah pekerja yang ditempatkan sebanyak 350 orang.

2. *Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari 3 program dan 8 kegiatan, dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan anggaran tahun 2017 sebesar Rp.940.325.620,- dan realisasi sebesar Rp.817.206.767,- atau 86,91%. Capaian dari pelaksanaan urusan ini pada tahun 2017 antara lain: Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah mencapai 76,66%, partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 35.22% dan penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan berhasil dituntaskan 100% dari jumlah pengaduan yang masuk.

3. *Urusan Pangan*

Urusan Pangan dilaksanakan oleh Dinas Pangan terdiri dari 5 program dan 49 kegiatan, dengan anggaran tahun 2017 sebesar Rp.2.707.564.503,- dan realisasi sebesar Rp.2.593.700.707,- atau 95,79%. Capaian dari pelaksanaan urusan ini pada tahun 2017 antara lain: skor pola pangan harapan sebesar 72,90%, tingkat kecukupan konsumsi pangan telah melebihi target dimana konsumsi energi mencapai 2.377 kkal/kap/hari dari 2.150 kkal/kap/hari yang ditargetkan serta konsumsi protein mencapai 63 kkal/kap/hari yang melewati target 2017 sebesar 53 kkal/kap/hari. Selain itu juga telah dihasilkan 1 (satu) Peraturan Daerah tentang ketahanan pangan.

4. *Urusan Pertanahan*

Urusan pertanahan terdiri dari 3 program dan 9 kegiatan, dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan Badan Pengelola Keuangan Daerah dengan anggaran tahun 2017 sebesar Rp.12.045.693.880,- dan realisasi sebesar Rp.3.411.887.065,- atau 28,32%. realisasi urusan ini relative rendah karena terdapatnya target pembebasan (ganti rugi) tanah untuk keperluan KEK Mandeh yang belum dapat dituntaskan pada tahun 2017.

5. *Urusan Lingkungan Hidup*

Urusan Lingkungan Hidup terdiri dari 8 program dan 45 kegiatan, dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan anggaran tahun 2017 sebesar Rp.7.755.383.306,- dan realisasi sebesar Rp.7.286.113.794,- atau 93,95%. Capaian dari pelaksanaan urusan ini pada tahun 2017 antara lain: Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal mencapai 100% dan Penegakan hukum lingkungan mencapai 8 kasus.

6. *Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil*

Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, terdiri dari 4 program dan 31 kegiatan, dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kecamatan Koto XI Tarusan dengan anggaran tahun 2017 sebesar Rp.4.802.537.442,- dan realisasi sebesar Rp.4.723.945.457,-

atau 98,36%. Capaian dari pelaksanaan urusan ini pada tahun 2017 antara lain: rasio penduduk ber-KTP persatuan penduduk mencapai 0.79, Rasio Bayi berakte kelahiran 0.85% dan kepemilikan KTP oleh penduduk telah mencapai 304.792 orang.

7. *Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari 7 program dan 31 kegiatan, dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan anggaran tahun 2017 sebesar Rp.3.030.923.069,- dengan realisasi sebesar Rp.2.930.744.327,- atau 96,69%. Capaian dari pelaksanaan urusan ini pada tahun 2017 antara lain: Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) sebanyak 60,60 dan jumlah PKK aktif sebanyak 6.956 kelompok.

8. *Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari 4 program dan 8 kegiatan, dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan anggaran tahun 2017 sebesar Rp.2.799.245.550,- dengan realisasi sebesar Rp.2.612.135.352,- atau 93,32%. Capaian dari pelaksanaan urusan ini pada tahun 2017 antara lain: cakupan peserta KB aktif sebesar 0.75, rasio akseptor KB sebesar 17.26 dan rata-rata jumlah anak perkeluarga dapat dikendalikan pada angka 1.18.

9. *Urusan Perhubungan*

Urusan Perhubungan terdiri dari 11 program dan 38 kegiatan, dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan anggaran tahun 2017 sebesar Rp.6.637.566.950,- dan realisasi sebesar Rp.6.468.359.341,- atau 97,45%. Capaian dari pelaksanaan urusan ini pada tahun 2017 antara lain: jumlah angkutan umum yang dilayani uji KIR sebanyak 7.370 unit, rasio panjang jalan perjumlah kendaraan mencapai 2.69% dan jumlah orang yang terangkut angkutan umum mencapai 994.743 jiwa

10. *Urusan Komunikasi dan Informatika*

Urusan Komunikasi dan Informatika terdiri dari 10 program dan 34 kegiatan, dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika serta Sekretariat Daerah dengan anggaran tahun 2017 sebesar Rp.7.127.185.843,- dengan realisasi sebesar Rp.6.308.297.884,- atau 88,51%. Capaian dari pelaksanaan urusan ini pada tahun 2017 antara lain: jumlah jaringan komunikasi 4, jumlah surat kabar yang bekerjasama sebanyak 86 media, jumlah penyiaran radio lokal sebanyak 3 radio dan website pemerintah telah mencakup seluruh perangkat daerah.

11. *Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah*

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari 7 program dan 26 kegiatan, dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian dengan anggaran tahun 2017 sebesar Rp.1.711.524.500,- dan realisasi sebesar Rp.1.632.136.491,- atau 95,36%. Capaian dari pelaksanaan urusan ini pada tahun 2017 antara lain: jumlah koperasi aktif 172 unit dari total 275 unit koperasi (62,55%), jumlah koperasi yang aktif melaksanakan RAT mencapai 43% dan jumlah UMKM yang dibina sebanyak 120 unit dari 5787 UMKM yang ada pada tahun 2017.

12. *Urusan Penanaman Modal*

Urusan Penanaman Modal terdiri dari 6 program dan 29 kegiatan, dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan anggaran tahun 2017 sebesar Rp.2.098.899.191,- dan realisasi sebesar Rp.2.013.726.467,- atau 95,94%. Capaian dari pelaksanaan urusan ini pada tahun 2017 antara lain: jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) yang berinvestasi sebanyak 15 investor dengan nilai investasi sebesar Rp. 132.000.000.000,-.

13. *Urusan Kepemudaan dan Olah Raga*

Urusan Kepemudaan dan Olahraga terdiri dari 7 program dan 37 kegiatan, dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Sekretariat Daerah dan Kecamatan Batang Kapas dengan anggaran tahun 2017 sebesar Rp.4.440.060.186,- dengan realisasi sebesar Rp.4.160.097.224,-

atau 93,69%. Capaian dari pelaksanaan urusan ini pada tahun 2017 antara lain: jumlah organisasi pemuda sebanyak 42 organisasi, jumlah organisasi olahraga 29 organisasi, jumlah klub olahraga sebanyak 33 klub, jumlah lapangan olahraga sebanyak 89 unit dan jumlah gedung olahraga sebanyak 5 unit.

14. Urusan Statistik dan urusan Persandian

Pelaksanaan Urusan Statistik dan Urusan Persandian tidak didukung oleh anggaran yang bersifat khusus, namun ditampung melalui belanja rutin operasional perangkat daerah terkait yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika.

15. Urusan Kebudayaan

Urusan Kebudayaan terdiri dari 2 program dan 27 kegiatan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan anggaran tahun 2017 sebesar Rp.3.282.883.600,- dan realisasi sebesar Rp.3.220.888.059,- atau 98,11%. Capaian dari pelaksanaan urusan ini pada tahun 2017 antara lain: berkembangnya sebanyak 67 grup kesenian daerah dan termemanfaatkannya 1 unit gedung kesenian untuk mendukung aktifitas seni dan budaya masyarakat.

16. Urusan Perpustakaan

Urusan Perpustakaan terdiri dari 1 program dan 7 kegiatan, dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan anggaran tahun 2017 sebesar Rp.870.484.940,- dan realisasi sebesar Rp.765.206.750,- atau 87,91%. Capaian dari pelaksanaan urusan ini pada tahun 2017 antara lain: jumlah pengunjung perpustakaan daerah yang dilayani sebanyak 22.423 orang yang dapat mengakses 17.158 koleksi buku.

17. Urusan Kearsipan

Urusan Kearsipan terdiri dari 6 program dan 22 kegiatan, dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan anggaran tahun 2017 sebesar Rp.1.492.888.840,- dan realisasi sebesar Rp.1.367.092.984,- atau 91,57%. Capaian dari pelaksanaan urusan ini pada tahun 2017 antara lain:

pengelolaan Arsip secara baku dengan indeks 2.22 dan telah terlaksana peningkatan SDM kearsipan di seluruh perangkat daerah.

C. Urusan Pilihan

1. *Urusan Perikanan*

Urusan Kelautan dan Perikanan terdiri 7 program dan 47 dari dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dengan anggaran tahun 2017 sebesar Rp.7.460.138.150,- dan realisasi sebesar Rp.6.187.733.846,- atau 82,94%. Capaian dari pelaksanaan urusan ini pada tahun 2017 antara lain: produksi perikanan mencapai 49.783 ton, produksi perikanan kelompok nelayan sebesar 25.250 dan konsumsi ikan masyarakat mencapai 37,35 kg/org/thn.

2. *Urusan Pariwisata*

Urusan Pariwisata terdiri dari 8 program dan 53 kegiatan, dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, BPBD, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Koperasi. UMKM. Perindustrian. Perdagangan dan Pasar, BKPSDM, BPKD, serta seluruh kecamatan dengan anggaran tahun 2017 sebesar Rp.9.670.799.680,- dan realisasi sebesar Rp.7.477.267,340,- atau 77,32%. Capaian dari pelaksanaan urusan ini pada tahun 2017 antara lain: angka kunjungan wisata nusantara sejumlah 2.400.000,- orang dan wisatawan manca negara sebanyak 1.700 orang.

3. *Urusan Pertanian*

Urusan Pertanian terdiri dari 17 program dan 86 kegiatan, dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan anggaran tahun 2017 sebesar Rp.16.129.092.073,- dengan realisasi sebesar Rp.14.703.318.626,- atau 91,16%. Capaian dari pelaksanaan urusan ini pada tahun 2017 antara lain: produktivitas padi yang ditargetkan 51.28 kw/ha tercapai melebihi target yaitu 55.90 kw/ha. Selain itu kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB mencapai 40.55%.

4. *Urusan Perdagangan*

Urusan Perdagangan terdiri dari 2 program dan 10 kegiatan, dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian dengan anggaran tahun 2017 sebesar Rp.12.010.040.950,- dengan realisasi sebesar Rp.11.809.838.733,- atau 98,33%. Capaian dari pelaksanaan urusan ini pada tahun 2017 yaitu kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB sebesar 12.23% dan telah dilakukannya revitalisasi terhadap 5 pasar kabupaten.

5. *Urusan Perindustrian*

Urusan Perindustrian terdiri dari 3 program dan 6 kegiatan, dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian dengan anggaran tahun 2017 sebesar Rp.1.353.890.200,- dan realisasi sebesar Rp.711.512.005,- atau 52,55%. Capaian dari pelaksanaan urusan ini pada tahun 2017 yaitu: kontribusi sektor industri terhadap PDRB sebesar 8.14%, persentase tenaga kerja sector industry sebesar 7.62% dan total jumlah sentra IKM yang terbentuk sebanyak 20 sentra.

6. *Urusan Transmigrasi*

Urusan Transmigrasi terdiri dari 1 program dan 5 kegiatan, dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan anggaran tahun 2017 sebesar Rp.863.063.400,- dan realisasi sebesar Rp.802.346.005,- atau 92,96%. Capaian dari pelaksanaan urusan ini pada tahun 2017 yaitu terbinanya dan tersediaanya fasilitas umum bagi warga transmigran di kawasan KTM Lunang Silaut.

D. Fungsi Penunjang Urusan

1. *Fungsi Inspektorat*

Fungsi inspektorat terdiri dari 8 program dan 37 kegiatan, dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah, BPKD dan Sekretariat Daerah dengan anggaran tahun 2017 sebesar Rp.4.882.846.913,- dan realisasi sebesar Rp.4.561.537.212,- atau 93,41%.

2. *Fungsi Perencanaan serta Fungsi Penelitian dan Pengembangan*

Fungsi Perencanaan serta Fungsi Penelitian dan Pengembangan terdiri dari 12 program dan 54 kegiatan, dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) dan Sekretariat Daerah dengan anggaran tahun 2017 sebesar Rp.6.189.173.389,- dan realisasi sebesar Rp.5.744.290.177,- atau 92.81%.

3. *Fungsi Keuangan*

Fungsi Keuangan terdiri dari 8 program dan 107 kegiatan, dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, BPKD, Badan Pendapatan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan seluruh kecamatan dengan anggaran tahun 2017 sebesar Rp.15.125.184.759,- dan realisasi sebesar Rp.13.648.349.090,- atau 90,23%.

4. *Kepegawaian*

Fungsi Kepegawaian serta Fungsi Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari 6 program dan 47 kegiatan, dilaksanakan oleh BKPSDM dan Sekretariat Daerah dengan anggaran tahun 2017 sebesar Rp.5.278.046.471,- dan realisasi sebesar Rp.5.004.818.897,- atau 94,82%.

Dengan pelaksanaan Urusan Penunjang, pada tahun 2017 Kabupaten Pesisir Selatan berhasil meningkatkan Nilai SAKIP menjadi B dan kembali memperoleh opini WTP yang ke-5 dari BPK secara berturut-turut menjelang akhir bulan Mei tahun 2018.

E. Urusan Pendukung

Urusan Pendukung, terdiri dari 14 program dan 93 kegiatan, dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dengan anggaran tahun 2017 sebesar Rp.47.951.005.372,- dan realisasi sebesar Rp.44.211.509.771,- atau 92,20%..

F. Urusan Kewilayahan

Fungsi Kewilayahan dilaksanakan oleh seluruh kecamatan dimana setiap kecamatan melaksanakan 6 program dan 25 kegiatan. Untuk melaksanakan program dan kegiatan setiap kecamatan diberikan alokasi anggaran yang besarnya ditetapkan menurut variabel jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah Pemerintahan Nagari, jumlah fasilitas pelayanan dasar dan jarak tempuh ke

Ibukota Kabupaten. Pada tahun 2017 jumlah anggaran kecamatan sebesar Rp.7.423.947.548,- dan realisasi sebesar Rp.7.226.375.325,- atau 97,33%.

G. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak dianggarkan secara khusus tetapi melekat pada penganggaran Bagian Kesatuan bangsa dan Politik pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

2.2.2. Realiasi Capaian RPJMD Sampai dengan Tahun 2017

Hasil analisis pengukuran tingkat capaian Indikator Kinerja Utama RPJMD tahun 2016- 2021 terhadap 5 misi dan 9 sasaran strategis daerah disajikan sebagai berikut :

MISI I : Melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan Aparatur yang Bersih dan Responsif Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat

Misi I RPJMD tahun 2016-2021 memuat 2 sasaran strategis dan 9 indikator kinerja utama, terdiri dari :

Sasaran 1 : Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 1 terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini :

Tabel 2.64
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Penilaian Laporan Keuangan Daerah (opini BPK)	opini	WTP	WTP	100
2.	Kualifikasi penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	skala	B	B	100
3.	Skor nilai LPPD	skor	3030	3020	96.49
4.	Level maturitas SPIP	level	2	3	150
Rata-Rata Capaian					111,62

Dari dapat dilihat rata-rata capaian 4 (empat) indikator kinerja sasaran strategis 1 sebesar 111,62%. Pencapaian sasaran strategis 1 termasuk Sangat Berhasil dengan kategori Sangat Baik.

1. Penilaian LKD (opini BPK)

Beberapa faktor yang mendorong keberhasilan pencapaian target WTP tahun 2017 oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan antara lain :

- a. Penyempurnaan proses penyusunan dan konsolidasi laporan Keuangan Pemerintah Daerah, diantaranya meliputi :
 - Seluruh instansi dan unit lingkup pemerintah daerah termasuk analisa realisasi BOS kedalam komponen operasional yang tidak melalui mekanisme APBD
 - Penyempurnaan Penjelasan akun-akun Laporan Keuangan secara lebih terinci dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)
- b. Melakukan Revisi Kebijakan Akuntansi
- c. Intensifikasi Pengendalian Interen dari Inspektorat (SPIP)

2. Kualifikasi penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Capaian kinerja hasil evaluasi AKIP Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2015 dan 2016 nilai AKIP Kabupaten Pesisir Selatan adalah 50,89 dan 50,94 dengan kategori CC. Pada tahun 2017 nilai capaian ini naik menjadi 60,52 dengan kategori B. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengefektifkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja antara lain :

- a. Melakukan penyempurnaan keselarasan penjabaran (*cascade*) kinerja, mulai dari level kepala Perangkat Daerah sampai dengan indikator kinerja eselon III, IV dan individu pegawai.
- b. Melakukan review terhadap program, kegiatan dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran, untuk memastikan bahwa anggaran memang dialokasikan hanya untuk pencapaian sasaran strategis pembangunan dan pemilihan program/kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran.
- c. Meningkatkan kualitas pengukuran terhadap output dan outcome secara berkala untuk memastikan tercapainya kinerja sasaran organisasi.
- d. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi agar mampu meningkatkan penerapan manajemen kinerja sebagai sarana monitoring dan evaluasi secara berkala oleh pimpinan.

- e. Memerintahkan inspektorat untuk terus meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap Perangkat Daerah sehingga tercipta pemahaman yang merata antar Perangkat daerah, Bappeda dan para penanggungjawab program guna meningkatkan kualitas evaluasi program untuk mendorong efektivitas dan efisiensi
- f. Memanfaatkan informasi kinerja dan capaian kinerja dari organisasi sebagai ukuran pemberian *reward and punishment*.

Untuk memperbaiki Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018, maka akan dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Melakukan review terhadap dokumen RPJMD dan Renstra perangkat daerah, yang mencakup review tujuan dan sasaran, indikator kinerja utama yang relevan spesifik dan terukur.
- b. Melakukan pendampingan dalam penyusunan cascading untuk seluruh perangkat daerah.
- c. Menerapkan anggaran berbasis kinerja dengan membuat perjanjian kinerja secara berjenjang dari eselon II, III dan IV.
- d. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian kinerja.

3. Skor nilai LPPD

Skor LPPD tahun 2017 mencapai nilai 3020 yang lebih rendah dari target sebesar 3030. Kedepannya, perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

- a. Memperkuat komitmen kepala daerah beserta seluruh jajaran perangkat daerah selaku penyelenggara urusan pemerintahan konkuren.
- b. Menyediakan sumberdaya manusia (aparatur) dan dukungan anggaran yang memadai pada setiap perangkat daerah untuk menyusun dan menyajikan seluruh dokumen laporan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara baik dengan basis data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Memberikan apresiasi kepada perangkat daerah yang capaian IKK urusan pemerintahan sangat tinggi dan melakukan pembinaan kepada perangkat daerah dengan capaian IKK rendah

4. Level Maturitas SPIP

Implementasi dari penilaian level maturitas SPIP yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

- a. Menerapkan perilaku dan penegakkan disiplin bagi ASN.
- b. Menetapkan standar kompetensi maupun uraian tugas untuk seluruh jabatan.
- c. Implementasi kepemimpinan yang kondusif.
- d. Prosedur pendelegasian wewenang dan tanggung jawab.
- e. Menetapkan kebijakan/aturan mengenai pembinaan SDM.
- f. Hasil kinerja pengawasan Inspektorat secara internal dan eksternal.
- g. Reviu atas capaian kinerja dan membuat analisa pencapaian target kinerja.
- h. Rekonsiliasi antar Perangkat Daerah.
- i. Meningkatkan kinerja ASN di seluruh Perangkat Daerah.
- j. Pengendalian umum dan pengendalian kinerja yang signifikan
- k. Pengamanan barang milik daerah.
- l. Otorisasi dan pencatatan transaksi kejadian penting.

Sasaran 2 : Terwujudnya Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Dasar

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 2 terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 2.65
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	skala	B	B	100
2	Umur Harapan Hidup	tahun	70	70.11	100.16
3	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	8,40	8.12	96.67
4	Harapan Lama Sekolah	tahun	13,40	13.05	97.39
5	Persentase sekolah yang berakreditasi B	akreditasi		64.43	85.91
Rata-rata Capaian					96.02

Dari tabel di atas terlihat rata-rata capaian 5 (lima) indikator kinerja sasaran strategis 2 sebesar 96,02%. Dengan demikian Pencapaian sasaran strategis 2 termasuk Sangat Berhasil dengan kategori Sangat Baik

1. Indeks Kepuasan Masyarakat

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan hasil survey terhadap 16 (enam belas) unsur pelayanan diperoleh skor indeks kepuasan sebesar 77.60 yang bila dikonversikan akan memiliki mutu pelayanan B dan kinerja pelayanan BAIK.

2. Umur Harapan Hidup (UHH)

Umur Harapan Hidup merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam menghitung *Human Development Index* (HDI). Angka ini adalah angka pendekatan yang menunjukkan kemampuan untuk bertahan hidup lebih lama. Indikator kinerja angka Harapan Hidup merupakan suatu perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh penduduk di suatu wilayah. Pada tahun 2017 Umur Harapan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan yang ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah 70 tahun sementaraaaAngka realisasi UHH tahun 2017 belum dipulis oleh BPS. Namun bila kita bercermin pada capaian tahun 2016 dimana UHH Kabupaten Pesisir Selatan mencapai 70,11 tahun, maka target RPJMD tersebut pada tahun 2017 diyakini akan terlewati. Selanjutnya apabila disandingkan dengan UHH Provinsi Sumatera Barat, maka UHH Pesisir Selatan lebih baik dimana pada tahun 2016, UHH Provinsi hanya sebesar 68.73 tahun

3. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan penduduk untuk menempuh semua jenjang pendidikan formal yang ditempuh. Indikator Rata-rata Lama Sekolah ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan. Target indikator Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2017

adalah 8.40 tahun dan terealisasi 8,12 tahun, dengan capaian kinerja sebesar 96,67%.

4. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Pada tahun 2017, target indikator Harapan Lama Sekolah Kabupaten Pesisir Selatan adalah 13,40 tahun dan terealisasi sebesar 13,05 tahun dengan capaian kinerja sebesar 97,39 %.

5. Persentase Sekolah yang berakreditasi B

Indikator Presentase Sekolah Yang Berakreditasi B merupakan indikator baru yang ditetapkan menjadi target indikator sasaran RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Pada tahun 2017, target indikator presentase sekolah yang berakreditasi B adalah 75 % dan terealisasi sebesar 64,43 % dengan capaian kinerja sebesar 85,91 %. Perangkat Daerah yang menjadi penanggung jawab utama terhadap capaian target indikator ini adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan.

MISI II : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Perekonomian dan Infrastruktur Sosial yang Terkait dengan Sektor Unggulan Daerah

Misi II RPJMD tahun 2016-2021 memuat 2 sasaran strategis dan 9 indikator kinerja utama, terdiri dari :

Sasaran 3 : Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Ekonomi secara Berkelanjutan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 3 terdiri dari 6 (enam) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.66
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase jalan Kabupaten dengan kondisi baik	%	25,9	27,08	104,56
2.	Persentase jembatan kabupaten kondisi baik	%	71,23	66,07	92,76
3.	Persentase Irigasi kondisi baik	%	49,02	49,13	100,22
4.	Persentase Pasar Rakyat yang menuju Kriteria SNI	%	10	10	100
5.	Persentase Peningkatan cakupan layanan telekomunikasi	%	30	43	143,33
6.	Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	angka	265	-	-
Rata-rata Capaian					90,14

Dari Tabel 2.67 dapat dilihat, rata-rata capaian 6 (enam) indikator kinerja sasaran strategis 3 sebesar 90,14%. Pencapaian sasaran strategis 3 termasuk Sangat Berhasil dengan kategori Sangat Baik.

1. Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik

Pada tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah melaksanakan kegiatan pembangunan, peningkatan kualitas, dan rehabilitasi serta pemeliharaan jalan kabupaten. Berikut tabel realisasi persentase jalan kabupaten berdasarkan jenis dan kondisi jalan tahun 2016-2017 :

Tabel 2.67
Panjang Jalan Kabupaten berdasarkan Jenis dan Kondisi Jalan Tahun 2016-2017

No	Jenis dan Kondisi Jalan	Realisasi			
		2016		2017	
		(Km)	(%)	(Km)	(%)
1	Baik	580,87	24,90	608,97	26,1
2	Sedang	262,61	11,26	269,19	11,54
3	Rusak	641,46	27,49	626,30	26,84
4	Rusak Berat	848,25	36,36	828,73	35,52
Jumlah		2.333,18	100	2333,18	100

2. Persentase Jembatan Kabupaten Kondisi Baik

Berdasarkan hasil pemuktahiran data kondisi jembatan dan jembatan diketahui bahwa dari 71.23% jembatan kondisi baik yang ditargetkan, baru dapat

teralisasi sebesar 66.07% atau dengan capaian kinerja 92.76%. hal ini disebabkan karena banyaknya jembatan dengan bentang yang cukup panjang, yang mesti ditingkatkan dan dipelihara sementara kemampuan keuangan daerah sangat terbatas.

3. Persentase Irigasi Kondisi Baik

Terjadi peningkatan kondisi irigasi dan luas jaringan irigasi dimana pada tahun 2016, jaringan irigasi kondisi baik sebesar 47,14%, meningkat menjadi 49,13% pada tahun 2017. Begitu juga halnya dengan luas areal terdampak jaringan irigasi, pada tahun 2016, luasannya sebesar 9.856 Ha yang meningkat menjadi 10.272 Ha pada tahun 2017.

4. Persentase Pasar Rakyat yang Menuju Kriteria SNI

Perhatian Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat terlihat dari fokus pengalokasian anggaran untuk pembangunan pasar pada tahun 2017 dan 2018. Beberapa Pasar Rakyat telah dibenahi dan telah dilengkapi fasilitas ruang dagang dan struktur pengelola. Namun saat ini, baru pasar Inpres Painan yang dapat dikategorikan sebagai pasar rakyat yang telah menuju kriteria SNI, sedangkan Pasar lainnya secara bertahap akan dilakukan pembenahan sesuai kriteria yang ditetapkan.

5. Persentase Peningkatan Cakupan Layanan Telekomunikasi

Dalam meningkatkan cakupan layanan telekomunikasi, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika telah melakukan beberapa upaya. Salah satu bentuk upaya tersebut yaitu melakukan pembenahan terhadap infrastruktur telekomunikasi, pengadaan alat penunjang telekomunikasi dan komunikasi seperti membangun jaringan *smartcity* sampai ke seluruh kecamatan, penambahan kapasitas *bandwide*, serta pembangunan jaringan data antar perangkat daerah.

Dari upaya tersebut yang juga didukung oleh peningkatan layanan komunikasi oleh penyedia swasta, maka pada tahun 2017 berhasil dicapai cakupan layanan telekomunikasi sebesar 43% dari 30% yang ditargetkan.

6. Menurunnya Angka Kecelakaan Lalu Lintas

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah sebesar 265. Namun pada tahun ini, realisasi untuk target tersebut belum bisa diukur sebab belum tersedianya data realisasi dan data dukung lainnya.

Sasaran 4 : Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Sosial

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 4 terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini :

Tabel 2.68
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas bencana	%	71	95	133,80
2.	Akses Sanitasi Layak	%	63,80	64,01	100,33
3.	Persentase penduduk berakses air minum/bersih	%	89,29	87,86	98,40
Rata-rata Capaian					110,49

Dari tabel di atas terlihat bahwa rata-rata capaian 3 (tiga) indikator kinerja sasaran strategis 4 sebesar 110,49%. Pencapaian dari sasaran strategis 4 termasuk Sangat Berhasil dengan kategori Sangat Baik.

1. Persentase Kejadian Bencana yang Bisa Ditangani Sesuai Standar Kapasitas Bencana

Pada tahun 2016, realisasi kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas bencana sebesar 98,02%, sedangkan tingkat capaiannya sebesar 140,03 %. Pada tahun 2017, realisasi kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas bencana sebesar 95,00% dengan tingkat capaian sebesar 133,80%.

Meskipun realisasi indikator bencana pada tahun 2016 dengan 2017 terlihat ada penurunan, namun dari sisi capaiannya masih termasuk kategori sangat baik.

2. Persentase Akses Sanitasi Layak

Sanitasi yang layak didefinisikan sebagai sarana yang aman, higienis, dan nyaman, yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari

kontak dengan kotoran manusia. Fasilitas sanitasi yang layak mencakup kloset dengan leher angsa, toilet guyur (flush toilet) yang terhubung dengan sistem pipa saluran pembuangan atau tanki septik, termasuk jamban cemplung (pit latrine) terlindung dengan segel slab

Rumah tangga yang memiliki jamban sehat pada tahun 2017 sebanyak 66.949 rumah tangga atau sebesar 64.01%, sedangkan Jumlah Rumah tangga yang tidak memiliki jamban sehat sebanyak 37.647 rumah tangga atau sebesar 35,99%.

3. Persentase Penduduk Berakses Air Minum/ Bersih

Jumlah akses penyediaan air minum yang telah dilayani oleh PDAM pada tahun 2017 mencapai 22.06 rumah tangga (ruta) atau sebesar 21,06 % dari jumlah rumah tangga di Kabupaten Pesisir Selatan. Sedangkan akses penyediaan air minum yang Non PDAM berjumlah 12,936 ruta atau sebesar 12,37 %. Sementara itu jumlah akses air minum non perpipaan (SGL, PMA dan PAH) berjumlah 56.933 ruta atau 54,43% dari total jumlah rumah tangga. Namun demikian, masih terdapat pekerjaan berat bagi pemerintah daerah karena sampai saat ini masih terdapat sebanyak 12,701 ruta atau 12,14 % merupakan rumah tangga yang mengakses air minum tidak aman.

MISI III : Meningkatkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya ABS-SBK

Misi III RPJMD tahun 2016-2021 memuat 2 sasaran strategis dan 5 indikator kinerja utama, terdiri dari :

Sasaran 5 : Terwujudnya Pelaksanaan Revolusi Mental, Sesuai dengan Nilai-Nilai Agama, Adat Budaya dan Kearifan Lokal

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 5 terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 2.69
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase mesjid yang memiliki TPQ aktif	%	65,62	100	152,39

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
2.	Persentase potensi zakat yang dikelola oleh BAZ	%	75	68	90,67
Rata-rata Capaian					121,53

Dari tabel di atas terlihat bahwa rata-rata capaian 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis 5 sebesar 121.53%. Pencapaian dari sasaran strategis 5 termasuk Sangat Berhasil dengan kategori Sangat Baik.

1. Persentase Mesjid yang Memiliki TPQ Aktif

Di Kabupaten Pesisir Selatan mesjid yang aktif dalam mengelola lembaga pendidikan Al Qur'an sebanyak 509 mesjid yang tersebar di 15 Kecamatan. Bentuk aktivitas yang dilaksanakan berupa :

- Memberikan wadah pendidikan yang berbasis Islam, khususnya pendidikan Al Qur'an untuk warga setempat.
- Berusaha untuk meningkatkan dan memberikan pendidikan kepada masyarakat umum untuk dapat memperoleh pendidikan agama yang layak. Mengajarkan cara membaca Al Qur'an yang benar sesuai dengan tajwid kepada para santri.
- Diharapkan santri dapat menghafal dan mengamalkan sejumlah ayat-ayat pilihan, surat- surat pendek dan do'a harian.
- Para santri diajarkan gerakan- gerakan wudhu serta sholat, sehingga anak-anak dapat melaksanakan wudhu dan sholat dengan baik dan benar.
- Menanamkan nilai- nilai budi pekerti yang baik dengan meneladani Rasulullah dan para sahabatnya.

Dampak positif berdirinya TPQ pada mesjid-mesjid di Kabupaten Pesisir Selatan yaitu diraihnya berbagai prestasi pada tahun 2017 antara lain juara pada lomba MTQ Tingkat Propinsi dalam bidang :

- Peringkat 1 Cabang tilawah dewasa putra
- Peringkat 1 Cabang tilawah tuna netra putra
- Peringkat 1 Cabang tilawah kaligrafi
- Peringkat 1 Cabang syarhil putra
- Peringkat 1 Cabang syarhil putri
- Peringkat 1 Cabang tafiz 5 juz non tilawah putri

2. Persentase Potensi Zakat yang Dikelola oleh BAZ

Tahun 2017, indikator ini menjadi target dengan capaian sebesar 90,67%. Nilai ini diperoleh dari 75 % target potensi zakat yang dikelola BAZ terealisasi sebesar 68%. Perhitungan dari potensi zakat pada tahun 2017 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan baru terealisasi sebesar Rp. 6.858.550.276,- (enam milyar delapan ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah). Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian zakat yang dikelola BAZ sudah menunjukkan hasil yang menggembirakan dan perlu terus ditingkatkan di masa mendatang.

Sasaran 6 : Terwujudnya penguatan kelembagaan agama, adat dan budaya

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 6 terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja. Berikut capaian kinerja masing masing indikator sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 2.70
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase KAN yang aktif	%	73	100	136,99
2.	Persentase sanggar seni yang aktif	%	72,97	80	109,63
3.	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	22,11	18	81,41
Rata-rata Capaian					109,34

Dari tabel di atas dapat dilihat, rata-rata capaian 3 (tiga) indikator kinerja sasaran strategis 6 adalah sebesar 109,34%. Rata-rata capaian sasaran strategis 6 termasuk Sangat Berhasil dengan kategori Sangat Baik.

1. Persentase KAN Yang Aktif

Pencapaian tujuan persentase Kerapatan adat Nagari (KAN) yang aktif, baik dalam melaksanakan fungsinya maupun aktivitas ditengah tengah masyarakat nagari selama periode RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021, ditargetkan pada tahun 2017 sebesar 73%, dan terealisasi sebesar 100% dengan tingkat pencapaian sebesar 136,99%. Artinya, realisasi indikator kinerja persentase KAN yang aktif sangat baik. Hal ini perlu terus ditingkatkan dimasa yang akan datang.

2. Persentase sanggar seni yang aktif

Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan tahun 2017 telah memiliki 1 unit gedung kesenian dan 67 group kesenian yang aktif. Setiap tahunnya, dalam rangka melestarikan dan mempromosikan nilai-nilai seni dan budaya Pesisir Selatan, Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan festival Sumarak Pasisia Selatan sebagai salah satu rangkaian acara dalam peringatan hari lahir daerah.

3. Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan

Di Kabupaten Pesisir Selatan terdapat sebanyak 143 buah cagar budaya yang terdiri dari 1 unit bangunan museum, dan 33 situs budaya cagar-cagar budaya tersebut merupakan bagian dari sejarah lahirnya minangkabau. Peninggalan ini akan menjadi bukti sejarah bagi generasi muda bahwa Kabupaten Pesisir Selatan dahulu kala merupakan bahagian dari lahirnya minangkabau. Bukti bukti sejarah ini sangat perlu dilestarikan agar tidak punah dan habis ditelan masa.

MISI IV : Meningkatkan Produksi dan Nilai Tambah dengan Tetap Mengedepankan Pembangunan Berkelanjutan

Misi IV RPJMD tahun 2016-2021 memuat 3 sasaran strategis dan 6 indikator kinerja utama, terdiri dari :

Sasaran 7 : Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian/Perkebunan/Peternakan serta Kelautan dan Perikanan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 7 terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 2.71
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 7

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Peningkatan produksi utama				127.70
	a. Padi	ton	291,703	376,971	129.23
	b. Jagung	ton	117,398	169,102	144.04
	c. Daging	kg	2.887.174	4,596,386	159.75
	d. Telor	kg	1,618,384	1,680,940	103.87
	e. Ikan	ton	49,000	49,783	101.60
2.	Skor pola pangan harapan	%	79	76.50	96.84
Rata-Rata Capaian					112,27

Dari tabel dapat dilihat, rata-rata capaian 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis 7 sebesar 112,27%,. Pencapaian dari sasaran strategis 7 termasuk Sangat Berhasil dengan kategori Sangat Baik.

1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan serta Kelautan dan Perikanan

Sasaran strategis meningkatkan produksi dan produktivitas komoditi pangan utama dari sub sektor tanaman pangan, perkebunan, peternakan serta kelautan dan perikanan salah satu tujuannya adalah untuk mendorong terwujudnya swasembada pangan lokal serta meningkatkan kesejahteraan petani. Beberapa komoditi pangan utama yang dianggap strategis yaitu: padi, jagung, daging, telur dan ikan.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan komoditi strategis tersebut antara lain :

- a. Penyediaan benih yang bermutu dan bersertifikat
- b. Menekan tingkat serangan hama tanaman dan penyakit ternak
- c. Perbaikan jaringan irigasi
- d. Penerapan teknologi pertanian dalam peningkatan nilai tambah produk
- e. Perlindungan bagi petani, peternak dan nelayan dengan program asuransi

2. Skor Pola Pangan Harapan

Pola Pangan Harapan adalah susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang didasarkan atas sumbangan energinya baik secara absolut maupun relative terhadap total energi baik dalam hal ketersediaan maupun konsumsi pangan, yang mencakup kebutuhan dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, aroma dan cita rasa. Secara umum kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Pesisir Selatan 2016 s.d. 2017 cenderung semakin baik dan kondusif, dan kualitas konsumsi pangan masyarakat berdasarkan Pola Pangan Harapan (PPH) juga mengalami kenaikan menjadi 96,84%.

Sasaran 8 : Meningkatnya Peran Pengolahan dan Pemasaran terhadap Ekonomi Daerah

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 8 terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja. Berikut capaian kinerja masing masing indikator sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 2.72
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 8

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (berdasarkan harga konstan)	%	8,93	8,83	98,88
2.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (berdasarkan harga konstan)	%	12,41	12,23	98,55
Rata-Rata Capaian					98,71

Dari tabel terlihat rata-rata capaian 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis 8 adalah sebesar 98,71%. Rata-rata capaian sasaran strategis 8 termasuk Sangat Berhasil dengan kategori Sangat Baik.

1. Kontribusi sektor Industri Terhadap PDRB

Pada tahun 2017, kontribusi sektor industri terhadap PDRB mencapai nilai 8.83%. nilai ini memang belum terlalu besar karena memang sebagai daerah agraris, perekonomian Pesisir Selatan saat ini masih didominasi oleh sektor tradisional yaitu pertanian dan perikanan. Perlu inovasi dan usaha yang serius di masa depan untuk membuat lompatan menuju kabupaten maju.

2. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

Pertumbuhan sektor perdagangan di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2017 mengalami sedikit peningkatan. Hal ini terlihat dari kontribusi sektor perdagangan pada tahun 2017 adalah 8,83% yang lebih tinggi dibanding tahun 2016 yaitu 5,50%. Peningkatan ini diduga merupakan imbas dari kebijakan Bupati Pesisir Selatan yang fokus pada penataan dan revitalisasi pasar rakyat. Dengan dilakukannya revitalisasi terhadap pasar pasar rakyat maka transaksi perdagangan diharapkan semakin meningkat sehingga dapat memicu peningkatan perputaran roda perekonomian di daerah.

Sasaran 9 : Terwujudnya Pesisir Selatan Menjadi Destinasi Utama Wisata Bahari di Sumatera Barat

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 9 terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja. Berikut capaian kinerja masing masing indikator sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 2.73
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 9

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara (Wisnu)	Orang	2.400.000	2,350, 000	97,92
2.	Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan Mancanegara (Wisman□)	Orang	1.750	1,700	97,14
Rata-Rata Capaian					97,53

Dari tabel di atas dapat dilihat, rata-rata capaian 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis 9 adalah sebesar 97,53%. Rata-rata capaian sasaran strategis 6 termasuk Sangat Berhasil dengan kategori Sangat Baik.

1. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara (Wisnu)

Pesisir Selatan merupakan daerah yang memiliki potensi wisata yang yang besar. Objek objek wisata yang ada dapat mengundang daya tarik wisatawan untuk mengunjunginya. Selaian dikenal dengan wisata bahari yang menarik, Pesisir Selatan juga memiliki destinasi wisata alam lain yang tidak kalah dan unik seperti jembatan akar, negeri di atas awan, beberapa air terjun eksotik dan lokasi arung jeram.

Pada tahun 2016 realisasi untuk Jumlah Wisatawan Nusantara (Wisnu) yang datang ke Kabupaten Pesisir Selatan sekitar 1.980.000 yang semula di targetkan 2.200.000 wisatawan. Pada tahun 2017 target target kunjungan wisata nusantara berjumlah 2.400.000 orang dan terealisasi sekitar 2.350.000 wisatawan.

2. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman)

Realisai jumlah wisatawan mancanegara (Wisman) yang datang pada tahun 2016 sekitar 1.680 dengan capaian 89,29%, sedangkan pada tahun 2017 realisasi jumlah wisatawan mancanegara (Wisman) yang datang sekitar 1.700 dengan capaian sekita 77,29 %. Peningkatan jumlah kunjungan wisata mancanegara dari tahun ke tahun tidak begitu signifikan. Hal ini disebabkan karena masih belum optimalnya promosi objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan ke luar negeri. Selain itu juga perlu diupayakan pembenahan terhadap objek obejk wisata baik dari sisi keamanan, kenyamanan maupun kebersihan.

MISI V : Meningkatkan Peran Struktur Sosial dalam Rangka Mengurangi Tingkat Kejahatan, Kriminalitas dan Peredaran Obat-obatan Terlarang

Misi V RPJMD tahun 2016-2021 memuat 2 sasaran strategis dan 3 indikator kinerja utama, terdiri dari :

Sasaran 10 : Terwujudnya Peran Pemerintah dan Struktur Sosial dalam Pengurangan Penyakit Masyarakat

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 10 terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja. Berikut capaian kinerja masing masing indikator sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini :

Tabel 2.74
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 10

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase kasus pemakai narkoba tingkat siswa dan aparat	%	70	62,5	89,29
2.	Persentase kasus PERDA yang diselesaikan	%	80	100	125
Rata-rata Capaian					107,14

Dari tabel di atas dapat dilihat, rata-rata capaian 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis 10 adalah sebesar 107,14%. Rata-rata capaian sasaran strategis 10 termasuk Sangat Berhasil dengan kategori Sangat Baik.

1. Persentase Pemakai Narkoba Tingkat Siswa dan Aparatur

Indikator persentase pemakai narkoba tingkat siswa dan aparat merupakan indikator baru yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Sehubungan dengan maraknya kasus narkoba di Indonesia dan penyebaran pengedaran narkoba dan obat obat terlarang lainnya, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan bekerja sama dengan Polres dan instansi vertikal lainnya untuk membrantas pengedar dan pemakai narkoba dan obat terlarang lainnya.

2. Persentase Kasus PERDA yang Diselesaikan

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pada sasaran ini, sebagaimana table di atas, memperlihatkan capaian indikator kinerja Persentase kasus PERDA

yang diselesaikan pada Tahun 2017 tercapai sebesar 125%. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari peran aktif anggota linmas dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya kepada masyarakat. Selain itu, keberhasilan lainnya pada indikator kinerja ini mengandung pengertian bahwa Satpol PP telah berhasil menangani 1255% dari jumlah kasus pelanggaran ketertiban di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, berhasil dapat ditangani dan diselesaikan.

Sasaran 11 : Meningkatnya Keberdayaan Organisasi dan Kelembagaan Masyarakat

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 11 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja. Berikut capaian kinerja masing masing indikator sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini :

Tabel 2.76
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 11

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) yang aktif membina kelompok	%	65,05	74,74	114,90
Rata-rata Capaian					114,90

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang menjadi sasaran dalam capaian indikator kinerja sasaran strategis pada tahun 2017 antara lain :

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) 53 unit dari 182 LPMN di Nagari.
- b. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Nagari sebanyak 160 unit dari 182 PKK Nagari, dan
- c. Badan Kerja sama Antar Nagari (BKAN) sebanyak 15 unit dari 15 unit yang ada Kabupaten Pesisir Selatan.

2.2.3. Prestasi Daerah

Berikut penghargaan yang diterima Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2017, antara lain :

1. Penghargaan Adipura Kota Kecil dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.



2. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia



3. Penghargaan Wahana Tata Nugraha dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.



4. Penghargaan Anugerah Pesona Indonesia Kategori Surga Tersembunyi Terpopuler dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia



5. Penghargaan 7 Bupati Terbaik Indonesia dari Seven Media



6. Penghargaan Cakupan Akta Kelahiran Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.



7. Penghargaan GNS Science New Zealand Bidang Pengurangan Resiko Bencana Alam.



8. Penghargaan Menyusun dan Menyajikan Laporan Keuangan Dengan Capaian Tertinggi dari KPPN Painan



9. Penghargaan Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) atas Simfoni Rabab oleh Pemain Terbanyak tanggal 6 Mei 2017.



10. Penghargaan Upsus Siwab Sebagai Pembina Terbaik I dari Gubernur Sumatera Barat di Kab. Solok Selatan Pada Tanggal 20 september 2017.



11. Penghargaan Kabupaten Sehat Swasti Saba Wiwerda Dari Kementerian Kesehatan RI Dan Kemendagri di Jakarta.



12. Juara 1 lomba Putra Praja Wisata tingkat Nasional Tahun 2017 perwakilan Sumatera Barat yang diwakili oleh Dimas Maulana (Uda Wakil 2 Kab. Pesisir Selatan) pada bulan Mei 2017 di Bandung.
13. Penghargaan terhadap Pusekesmas pelayanan KB terbaik tingkat Nasional oleh Presiden RI pada tanggal 17 Agustus 2017 di Istana Negara.
14. Penghargaan Peringkat III Atas Kinerja Pelaksanaan DAK Fisik Triwulan II Tahun 2017 oleh Ditjen Perbendaharaan Prov. Wisata Oleh KPPN Painan 20 Oktober 2017.
15. Penghargaan Peduli HAM dari Kementerian Hukum dan HAM di Surakarta Solo, 10 Des 2017.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Hasil evaluasi terhadap capaian kinerja dari indikator kinerja RPJMD tahun 2016-2021, baik Indikator Kinerja Utama dari sasaran strategis daerah maupun Indikator Kinerja Daerah urusan penyelenggaraan pemerintah

menunjukkan bahwa sampai dengan akhir tahun 2017 masih terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dimasa yang akan datang. Permasalahan tersebut dapat dijelaskan sebagai mana penjelasan berikut.

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

A. Permasalahan Daerah Terkait Prioritas Pembangunan Daerah

Terhadap pelaksanaan 10 prioritas pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tertuang dalam RPJMD tahun 2016-2021 masih terdapat beberapa tantangan sebagai berikut:

1. Pengamalan Agama, Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal Dalam Kehidupan Bermasyarakat

- a. Masih belum optimalnya implementasi Adat Basandi Syarak – Syarak Basandi Kitabullah dalam kehidupan bermasyarakat yang disebabkan oleh semakin kuatnya arus globalisasi dan pergeseran tata nilai dalam kehidupan.
- b. Masih belum maksimalnya upaya penanaman nilai budaya dan kearifan lokal pada generasi muda sebagai bagian dari pendidikan karakter.

2. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan

- a. Masih rendahnya akses terhadap Pendidikan Anak Usia Dini
- b. Sarana dan prasarana pendidikan yang masih terbatas sehingga belum sepenuhnya dapat memenuhi standar pelayanan minimal
- c. Masih rendahnya daya saing siswa yang disebabkan karena sistem pendidikan yang belum dikelola secara optimalnya.
- d. Masih terbatasnya tenaga pendidik baik dari segi jumlah maupun kompetensi.

3. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Pesisir Selatan

- a. Masih terdapatnya balita gizi buruk
- b. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan kesehatan terutama di daerah-daerah perdesaan
- c. Masih kurangnya tenaga medis terutama dokter dan dokter ahli

4. Peningkatan Ekonomi Pangan Berbasis Komoditi Lokal yang Berdaya Saing

- a. Masih rendahnya produktivitas hasil komoditi lokal yang disebabkan oleh kurangnya kreativitas dan lemahnya jiwa entrepreneurship masyarakat.
- b. Masih rendahnya daya saing produk yang dihasilkan terutama disebabkan oleh lemahnya penguasaan terhadap teknologi produksi dan manajemen pemasaran.

5. Peningkatan Daya Tarik, Pemasaran, Industri dan Kelembagaan Pariwisata

- a. Ketergantungan sektor pariwisata terhadap campur tangan pemerintah masih sangat tinggi yang disebabkan karena masih rendahnya minat swasta untuk berinvestasi disektor pariwisata.
- b. Pariwisata belum menjadi industri sehingga *gain from tourism* yang diharapkan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat belum terwujud secara optimal.

6. Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Kawasan Ekonomi Strategis

- a. Pengembangan kawasan perdesaan dan kawasan strategis lainnya masih belum perpadu yang disebabkan oleh lemahnya koordinasi dan sinergi antar stakeholder dalam pengembangan kawasan perdesaan dan kawasan ekonomi strategis

7. Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Rakyat Berbasis Lingkungan Hidup dan Kebencanaan

- a. Penyediaan infrastruktur sebagai salah satu layanan dasar bagi masyarakat belum dapat dipenuhi secara optimal yang disebabkan karena terbatasnya kemampuan keuangan daerah. Untuk itu perlu diciptakan iklim yang mendukung partisipasi swasta baik dalam pola investasi maupun pola kerja sama.

8. Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengurangan Angka Pengangguran

- a. Masih tingginya jumlah penduduk miskin
- b. Masih sulitnya akses masyarakat miskin terhadap pelayanan sosial dasar.

- c. Penggunaan basis data terpadu yang belum optimal dalam penanggulangan kemiskinan

9. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Pelayanan Prima

- a. Masih perlunya penguatan terhadap pengimplementasian reformasi birokrasi terutama dalam penyiapan aparatur yang profesional, kompeten dan berdedikasi terhadap pelayanan prima.
- b. Belum optimalnya penerapan e-government sebagai arus utama dalam sistem manajemen pemerintahan.

10. Pencegahan Tingkat Kejahatan, Kriminalitas dan Peredaran Obat Terlarang

- a. Mulai melemahnya kontrol sosial masyarakat terhadap kondisi keamanan dan ketertiban serta pencegahan penyakit masyarakat.
- b. Masih tingginya penyalahgunaan narkoba dan zat aditif lainnya terutama pada generasi muda dan pelajar.

B. Permasalahan Daerah Terkait Pencapaian Sasaran Strategis Daerah

Masih terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang perlu disikapi dalam pencapaian target kinerja dari sasaran strategis daerah antara lain:

1. Permasalahan pada Sasaran 2 : Terwujudnya Peningkatan Akses Kualitas Pelayanan Dasar.
 - a. Target rata-rata lama sekolah 8.4 tahun baru tercapai sebesar 8.12 tahun. Untuk itu stakeholder terkait diharapkan dapat memfokuskan program yang dapat mendorong peningkatan rata-rata lama sekolah. Selain itu juga perlu koordinasi dan sinergi yang intensif dengan provinsi terutama dalam peningkatan angka partisipasi ditingkat SLTA.
 - b. Presentase Sekolah yang Berakreditasi B
Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) PP No 19 Tahun 2005 yang memuat kriteria minimal komponen pendidikan. Inilah yang menjadi rujukan sebagai Standar Nasional Pendidikan atau SNP. SNP memuat 8 (delapan) standar mutu. Instrumen akreditasi sekolah disusun mengacu kepada 8 standar mutu tersebut yang meliputi (1) Standar Isi, (2) Standar Proses, (3) Standar

Kompetensi Lulusan, (4) Standar Pendidik & Tenaga Pendidikan, (5) Standar Sarana & Prasarana, (6) Standar Pengelolaan, (7) Standar Pembiayaan, dan (8) Standar Penilaian.

Pada tahun 2017, target indikator presentase sekolah yang berakreditasi B adalah 75 % dan terealisasi sebesar 64,43 % dengan capaian kinerja sebesar 85,91 %. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah melalui jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus bekerja lebih keras lagi dalam meningkatkan standard mutu di setiap sekolah pada jenjang SD dan SMP

2. Permasalahan pada Sasaran 3 : Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Ekonomi Secara Berkelanjutan

a. Persentase jalan dan jembatan kabupaten kondisi baik

Hasil evaluasi terhadap pencapaiana target sasaran 3, diketahui bahwa permasalahan yang perlu menjadi perhatian adalah konektivitas khususnya terkait infrastruktur jalan dan jembatan. Berdasarkan hasil pemutakhiran data kondisi jalan dari dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, pada tahun 2017, dari total 2.333,18 km panjang jalan kabupaten, 60 persen diantaranya atau sepanjang 1.455 km diantara dalam kondisi rusak dan rusak berat. Hal ini menjadi tantangan berat bagi pemerintah daerah yang dihadapkan dengan keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Sementara itu, topografi wilayah yang banyak dialiri sungai, menjadikan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan sangat membutuhkan infrastrur jembatan dalam melakukan mobiltas. Berdasarkan data tahun 2017, jembatan kondisi baik di Kabupaten Pesisir Selatan hanya 66.67 persen. itupun sebagian besar diantaranya berupa jembatan gantung yang hanya dapat dilalui oleh kendaraan roda dua saja.

b. Persentase irigasi kondisi baik

Jaringan irigasi di Kabupaten Pesisir Selatan melayani areal terdampak seluas 10.272 Ha. Namun amat disayangkan karena kondisi daerah yang rawan terhadap banjir dan menyebabkan jaringan irigasi di Pesisir Selatan banyak mengalami kerusakan, dimana saat ini hanya 49,13 persen saja yang dalam kondisi baik. Masalah irigasi sangat mempengaruhi tingkat

produksi komoditas pertanian. karena itu perlu terbosan dan perbaikan tatakelola irigasi dimasa depan.

c. Persentase Pasar Rakyat yang Menuju Kriteria SNI

Pasar sebagai pusat aktifitas perekonomian masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Sekaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah memfokuskan perhatian pada pembangunan dan atau revitalisasi Pasar Rakyat yang terlihat dari fokus pengalokasian anggaran untuk pembangunan pasar pada tahun 2017. Dalam beberapa tahun terakhir beberapa Pasar Rakyat telah dibenahi dan telah dilengkapi fasilitas Ruang Dagang dan Struktur Pengelola. Akan tetapi baru Pasar Rakyat Painan yang dapat dikategorikan sebagai Pasar Rakyat yang telah menuju kriteria SNI, sedangkan Pasar Rakyat yang lainnya secara bertahap akan dilakukan pembenahan sesuai kriteria SNI. Hal ini tak terlepas dari besarnya investasi yang dibutuhkan untuk merevitalisasi 48 pasar yang ada di Pesisir Selatan.

3. Permasalahan pada Sasaran 4 : Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Sosial

Permasalahan utama terkait pencapaian kinerja Sasaran 4 adalah masih rendahnya cakupan masyarakat yang telah memiliki akses pada sanitasi layak dan air bersih yaitu hanya sebesar 64.01 persen dan 87.86%. hal ini menjadi tantangan tersendiri karena secara nasional telah ditetapkan target universal akses pada tahun 2019 dengan slogan 100:0:100 yaitu 100% masyarakat telah mengakses sanitasi layak, 0% kawasan kumuh dan 100% masyarakat menikmati air bersih.

4. Permasalahan Sasaran 8 : Meningkatnya Peran Pengolahan dan Pemasaran terhadap Ekonomi Daerah

Terdapat dua target kinerja untuk sasaran 8 ini yaitu kontribusi sektor industri dan sector perdagangan terhadap PDRB. Kedua indikator kinerja ini masih memperlihatkan kinerja yang belum memuaskan karena hanya berada pada angka 8.83% dan 12.23%. Bila disandingkan dengan target Kabupaten Pesisir Selatan yang ingin menjadi daerah maju maka pengembananagn sektor indistri

dan perdagangan ini mau atau tidak mau harus menjadi salah satu fokus pemerintah daerah. Untuk itu dalam rencana pembangunan tahun 2019 pemerintah daerah akan memfokuskan upaya pada peningkatan nilai tambah perekonomian dengan memacu sector industri, perdagangan dan jasa sebagai lokomotif baru dalam perekonomian daerah. beberapa strategi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan alih teknologi, meningkatkan kreatifitas dan jiwa wirausaha pada pelaku ekonomi.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Penyelenggaraan urusan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan secara umum berjalan dengan baik. Namun berdasarkan evaluasi yang dilakukan baik dalam LKPj dan LPPD Pemerintah Daerah masih terdapat beberapa kendala dan tantangan pembangunan yang perlu menjadi fokus penanganan ditahun 2019. Beberapa permasalahan yang sifatnya strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Penyelenggaraan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

Untuk urusan pendidikan, saat ini masih menghadapi tantangan berupa belum tuntasnya program Wajib Belajar (Wajar) 9 tahun yang terindikasi dari rata- rata lama sekolah masih 8,13 tahun. Selain itu, akses terhadap layanan pendidikan masih belum terwujud secara maksimal yang terindikasi dari Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun masih 90,18%. Dengan demikian masih 10% usia sekolah yang belum memperoleh layanan pendidikan pada tingkat pendidikan dasar. Dan hal yang tak kalah pentingnya adalah masih kurangnya jumlah dan kualitas SDM tenaga pendidik sehingga berimbas pada rendahnya daya saing siswa.

2. Urusan Kesehatan

Ketersediaan sarana dan prasarana serta tenaga medis yang terbatas masih menjadi kendala yang utama dalam penyelenggaraan urusan kesehatan di

Kabupaten Pesisir Selatan. Rasio rumah sakit persatuan penduduk (1:450.186) serta rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu persatuan penduduk (1:25.000) mencerminkan masih kurangnya sarana layanan kesehatan tersebut. Keterbatasan Sumber Daya Kesehatan (SDK) menjadi faktor penghambat lainnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jumlah alat kesehatan yang terbatas, masih kurangnya tenaga penunjang medis serta jumlah tenaga medis dan jumlah dokter spesialis menyebabkan kurang optimalnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

3. Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Kondisi infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan dan irigasi yang saat ini banyak mengalami kerusakan sangat mempengaruhi aktifitas ekonomi masyarakat. Perlu intervensi dari Pemerintah Pusat untuk percepatan pembangunan infrastruktur di Pesisir Selatan yang membutuhkan investasi yang sangat besar.

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Saat ini masih terdapat rumah tangga yang mendiami rumah tidak layak huni. Selain itu masih diperlukan perhatian khusus terhadap pemenuhan akses air bersih dan sanitasi layak bagi masyarakat yang saat ini masih belum optimal.

5. Sosial

Masih terbatasnya akses pelayanan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta belum optimalnya pemanfaatan data terpadu dalam pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan. Partisipasi masyarakat yang masih rendah dalam penanganan masalah sosial serta kinerja Dinas Sosial sebagai pelaksana teknis menyelenggarakan urusan sosial belum mampu menumbuhkan nilai-nilai kesetiakawanan secara signifikan.

B. Penyelenggaraan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja

Tingkat partisipasi tenaga kerja yang rendah mencerminkan rendahnya daya saing tenaga kerja yang tersedia di Kabupaten Pesisir Selatan.

Dengan masih rendahnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi ini maka berarti terbatas pula jumlah kesempatan kerja yang ada.

2. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Adanya kecendrungan penurunan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Masalah ini terindikasi dari swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat yang semakin rendah. Hal ini diduga salah satunya disebabkan fungsi lembaga pemberdayaan masyarakat belum berjalan sebagaimana seharusnya.

3. Urusan Perhubungan

Saat ini ketersediaan moda transportasi public yang layak dan nyaman di Pesisir Selatan masih belum sesuai dengan harapan masyarakat. Hal ini terlihat dengan masih maraknya transportasi tanpa izin seperti travel liar, ojek dan becak motor

4. Urusan Penanaman Modal

Daya tarik investor untuk melakukan investasi masih rendah, hal ini terkait dengan masih minimnya ketersediaan infrastruktur dan sarana dan prasarana pendukung bagi berinvestasi.

5. Urusan Perpustakaan

Budaya baca dan literasi masyarakat yang masih belum baik. Hal ini ditandai dengan rendahnya daya baca masyarakat. Karena itu perlu gerakan terpadu untuk menggalakan budaya literasi dan budaya baca masyarakat semenjak usia dini.

C. Penyelenggaraan Urusan Pilihan

1. Urusan Perikanan

Sebagian besar masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan adalah masyarakat miskin dan tidak masuk dalam kelompok. Sementara paket bantuan yang diberikan biasanya diserahkan kepada kelompok. Maka tentu saja nelayan miskin tersebut jarang mendapatkan bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupannya. Kesulitan benih pada pembudidaya serta harga pakan yang relatif mahal. Selain itu, nilai tambah

dari komoditi perikanan juga masih rendah karena sebagian besar masih dipasarkan dalam bentuk barang mentah.

2. Urusan Pariwisata

Secara umum pada urusan pariwisata menghadapi tantangan berupa terbatasnya sarana dan prasarana pendukung wisata, belum adanya sinergitas antara sector-sektor produktif dengan sektor pariwisata, disamping masih belum berkembangnya ekonomi kreatif. Untuk mengembangkan industri pariwisata di Kabupaten Pesisir Selatan membutuhkan peran serta aktif masyarakat dan pihak swasta karena terbatasnya kemampuan Pemerintah Daerah baik secara finansial maupun SDM.

3. Urusan Pertanian

Terbatasnya penguasaan teknologi budidaya dan pasca panen oleh petani menyebabkan nilai produksi dan produktifitas komoditi hasil pertanian masih relatif rendah. Untuk mempercepat desiminasi teknologi ke petani masih terkendala oleh keterbatasan jumlah tenaga penyuluh pertanian.

4. Urusan Perdagangan

Keberadaan sebagian pasar rakyat yang kondisinya memprihatinkan dan jauh dari kenyamanan menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Daerah. karena itu, program revitalisasi pasar rakyat tetap menjadi prioritas Pemerintah daerah di tahun 2019.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi makro dan kondisi perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2017 dan proyeksi kondisi ekonomi dan keuangan daerah tahun 2019, serta sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2019.

Dalam perekonomian terbuka, kondisi perekonomian daerah tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas perekonomian di wilayah tersebut namun juga dipengaruhi oleh perekonomian global. Demikian halnya dengan perekonomian di Kabupaten Pesisir Selatan, tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi di Kabupaten Pesisir Selatan namun juga dipengaruhi oleh faktor-faktor luar seperti kondisi perekonomian regional Sumatera Barat, perekonomian Nasional dan bahkan ekonomi global..

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1. Kondisi Perekonomian Secara Nasional

Stabilitas makroekonomi Indonesia pada tahun 2017 semakin kokoh, diiringi dengan pemulihan ekonomi yang berlangsung secara bertahap (gradual). Pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 5,07% pada tahun 2017, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun 2016 sebesar 5,03%. Stabilitas makroekonomi juga terkendali terlihat pada inflasi yang berada dalam rentang sasaran, defisit transaksi berjalan yang terjaga pada level sehat, serta nilai tukar yang cukup stabil. Stabilitas sistem keuangan juga terpelihara, meskipun menyisakan tantangan terkait intermediasi perbankan yang masih terbatas.

Arah pemulihan ekonomi ini cukup positif, meskipun kenaikan pertumbuhan ekonomi belum tinggi dan belum cukup merata. Stimulus pemerintah masih menjadi sumber pertumbuhan yang penting pada tahun 2017. Sementara itu,

konsumsi swasta masih terbatas dan peran sektor komoditas juga masih besar dalam menopang perbaikan ekonomi.

Pemulihan ekonomi Nasional pada tahun 2017 tidak terlepas dari dukungan berbagai momentum positif di tengah berbagai tantangan perekonomian yang harus dihadapi. Adapun momentum positif tersebut adalah :

1. Membaiknya pertumbuhan ekonomi dunia yang selanjutnya mendorong kenaikan volume perdagangan dunia dan harga komoditas, serta berlanjutnya aliran modal ke negara berkembang.

PDB dunia pada tahun 2017 tumbuh sebesar 3,7%, lebih tinggi dari tahun 2016 sebesar 3,2% dan dari prakiraan pada awal tahun. Pertumbuhan ekonomi beberapa negara mitra dagang utama Indonesia dari negara maju seperti Amerika Serikat, Eropa (EU) dan Jepang semakin kuat. Begitu pula dengan mitra dagang terbesar Indonesia dari negara berkembang, yakni Tiongkok. Perbaikan ekonomi global berimbas pada kenaikan permintaan, sehingga mendorong volume perdagangan global untuk tumbuh tinggi. Permintaan dunia yang meningkat menjadi momentum untuk mengakselerasi perekonomian domestik melalui peningkatan ekspor.

Peluang untuk mengakselerasi perekonomian domestik semakin kuat karena harga komoditas juga meningkat signifikan pada tahun 2017. Selain kenaikan permintaan, tingginya harga komoditas turut dipicu oleh permasalahan sisi pasokan di beberapa negara produsen komoditas. Kedua faktor tersebut mendorong harga komoditas energi dan non-energi meningkat pada 2017. Harga beberapa komoditas andalan ekspor Indonesia seperti batu bara, crude palm oil (CPO) dan beberapa jenis logam meningkat signifikan dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya. Komposit harga ekspor nonmigas Indonesia pada tahun 2017 tumbuh 21,7%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2016 sebesar 5,4%. Perkembangan ini pada gilirannya meningkatkan *terms of trade* Indonesia sehingga meningkatkan pendapatan domestik.

2. Stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan yang dalam beberapa tahun terakhir terus terjaga.

Stabilitas makroekonomi yang semakin kuat pada tahun 2017 tercermin pada inflasi yang berada dalam rentang sasaran serta defisit transaksi berjalan yang berhasil dijaga pada level sehat di bawah 3% terhadap PDB. Kedua pencapaian tersebut terlihat dalam tiga tahun berturut-turut. Perkembangan ini cukup positif mengingat stabilitas ekonomi sempat tertekan pada tahun 2013-2014 ketika defisit transaksi berjalan melebihi 3% terhadap PDB serta realisasi inflasi meningkat hingga di atas 8%, jauh melampaui sasarannya. Stabilitas makroekonomi juga tercermin pada pergerakan nilai tukar rupiah yang sejalan dengan nilai fundamentalnya.

3. Keyakinan pelaku ekonomi terhadap perekonomian nasional yang membaik. Pada tahun 2017, pengakuan dari berbagai lembaga internasional mendukung perbaikan tingkat keyakinan pelaku ekonomi. Lembaga pemeringkat internasional terkemuka memberikan peringkat layak investasi untuk Indonesia. *Standard and Poor's (S&P)* pada Mei 2017 meningkatkan peringkat kredit Indonesia menjadi Investment Grade (BBB -), menyusul *Fitch dan Moody's* yang sebelumnya telah memberikan predikat ini. Pada penghujung tahun 2017, Fitch kembali menaikkan peringkat utang Indonesia dari BBB- menjadi BBB dengan outlook stabil. Selain itu, peringkat daya saing (*Global Competitiveness Index*) Indonesia pada tahun 2017 juga membaik menjadi peringkat 36 dari sebelumnya di peringkat 41. Iklim usaha di Indonesia juga terus membaik sebagaimana terlihat dari peningkatan peringkat ease of doing business (EODB) pada 2018 menjadi 72 dari sebelumnya di posisi 91. Kendati demikian, peran momentum positif dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi menjadi tidak maksimal karena masih terdapat beberapa tantangan dari global dan domestik. Tantangan global bersumber dari arah normalisasi kebijakan moneter beberapa negara maju yang berpotensi memicu pembalikan modal dan menghambat pemulihan ekonomi negara berkembang. Sementara itu, tantangan domestik antara lain adalah proses konsolidasi korporasi dan perbankan yang belum sepenuhnya berakhir serta dampak penyesuaian perilaku rumah tangga dalam jangka pendek terhadap upaya Pemerintah meningkatkan kualitas belanja fiskal.

Ke depan, pemulihan perekonomian Indonesia diperkirakan masih berlanjut. Arah perbaikan ekonomi Indonesia terindikasi pada struktur pertumbuhan ekonomi 2017 yang mulai didukung investasi swasta, khususnya investasi nonbangunan serta komponen impor bahan baku dan barang modal yang meningkat. Selain itu, perbaikan struktur ekonomi juga didukung oleh mulai meningkatnya ekspor beberapa produk manufaktur. Optimisme prospek ekonomi ke depan sejalan dengan kebijakan reformasi struktural yang secara konsisten terus dijalankan.

Berdasarkan kondisi perekonomian di atas, sesuai dengan Tema RKP 2019 “**Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas**” dengan 5 (lima) Prioritas yaitu :

1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar
2. Pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata dan jasa produktif lainnya
4. Pemantapan ketahanan energy, pangan dan sumber daya air
5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu

Maka arahan nasional dan sekaligus menjadi target dibidang ekonomi adalah :

1. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional yang ditetapkan pada adalah 5-4 – 5,8 %
2. Persentase kemiskinan nasional sebesar 8,8 – 9,5 %
3. Tingkat pengangguran terbuka 4,8 – 5,2 %
4. Gini Ratio sebesar 0,38 – 0,39

3.1.2. Kondisi Perekonomian Provinsi Sumatera Barat

Perekonomian Propinsi Sumatera Barat pada tahun 2017 tumbuh sebesar 5,29% (yoy) atau sedikit meningkat dibandingkan tahun 2016 sebesar 5,27% (yoy). Sumber penopang pertumbuhan tahun 2017 berasal dari meningkatnya konsumsi rumah tangga, dan ekspor luar negeri. Aktivitas konsumsi rumah tangga dipengaruhi oleh kenaikan daya beli dan tingkat penghasilan masyarakat.

Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :

1. Rebound (kenaikan setelah terjadi penurunan) harga internasional CPO dan kelapa sawit mempengaruhi kenaikan pendapatan mengingat sebagian besar mata pencaharian masyarakat bergantung kepada kedua jenis komoditas tersebut;
2. Kenaikan upah minimum provinsi sebesar 8,25 % ;
3. Terkendalinya tingkat inflasi.

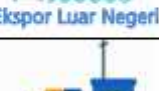
Di sisi lain, kinerja ekspor luar negeri meningkat sejalan dengan perbaikan harga komoditas internasional serta membaiknya permintaan mitra dagang. Selain faktor eksternal, pelaku usaha eksportir juga turut andil dalam meningkatkan penjualan ekspor yakni melalui upaya sertifikasi produk agar sesuai dengan standardisasi yang dibutuhkan dunia.

Secara lapangan usaha, membaiknya pertumbuhan lapangan usaha pertanian dan perdagangan menopang pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada tahun 2017. Meningkatnya produksi tanaman perkebunan khususnya kelapa sawit dan karet karena iklim dan cuaca kondusif mendorong perbaikan kinerja pertanian.

Sementara itu, membaiknya tingkat konsumsi masyarakat dan semakin banyaknya event besar skala nasional dan internasional berdampak pada peningkatan aktivitas perdagangan di Sumatera Barat.

Berikut ini adalah indikator makro ekonomi Propinsi Sumatera Barat tahun 2016 dan 2017 :

Gambar 3.1
Indikator Makro Ekonomi Propinsi Sumatera Barat
Tahun 2016-2017

Tahun 2016	Indikator Makro	Tahun 2017
5,26 (% yoy)	 Pertumbuhan Ekonomi	5,29 ↑ (% yoy)
76.237 (miliar Rp)	 Konsumsi Rumah Tangga	79.822 ↑ (miliar Rp) 4,70%
1.635 (miliar Rp)	 Konsumsi LNPR	1.706 ↑ (miliar Rp) 4,36%
17.768 (miliar Rp)	 Konsumsi Pemerintah	17.626 ↓ (miliar Rp) -0,80%
44.236 (miliar Rp)	 Investasi	46.163 ↑ (miliar Rp) 4,31%
18.178 (miliar Rp)	 Ekspor Luar Negeri	21.175 ↑ (miliar Rp) 16,49%
6.055 (miliar Rp)	 Impor Luar Negeri	6.803 ↑ (miliar Rp) 12,36%

Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Sumatera Barat, BI ; 2018

Pertumbuhan ekonomi Propinsi Sumatera Barat di tahun 2018 diperkirakan berada pada kisaran 5,1% - 5,5% (yoy). Seperti halnya tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dominan bersumber dari konsumsi rumah tangga, investasi dan ekspor. Konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh moderat sejalan dengan peningkatan pertumbuhan kelas menengah dan pelaksanaan Pilkada serentak pada pertengahan tahun 2018 yang diperkirakan mampu meningkatkan geliat LNPR (Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga). Sementara itu, peningkatan harga komoditas internasional juga diperkirakan dapat mengangkat kinerja ekspor.

Laju inflasi di Propinsi Sumatera Barat tahun 2018 diproyeksikan pada kisaran $3,5\% \pm 1\%$ (yoy) atau meningkat dibandingkan tahun 2017. Dari sisi eksternal, inflasi inti relatif terjaga dengan terkendalinya nilai tukar dan harga komoditas internasional. Dari sisi internal Sumatera Barat, meningkatnya permintaan domestik diperkirakan masih dapat diimbangi oleh sisi penawaran. Tekanan inflasi di tahun 2018 diperkirakan dominan bersumber dari kelompok volatile foods (inflasi dari kelompok pangan dengan harga bergejolak). Sementara pada kelompok *administered price* (Inflasi Komponen Harga yang diatur Pemerintah), adanya jaminan dari pemerintah pusat untuk tidak menaikkan harga barang/jasa yang diatur pemerintah seperti BBM subsidi dan LPG 3 kg menjadi faktor penting penahan inflasi di tahun 2018. Mencermati risiko inflasi yang lebih tinggi, upaya pengendalian inflasi di 2018 akan dititikberatkan pada percepatan implementasi kerja sama antar daerah yang telah dijajaki pada tahun 2017.

Berdasarkan kondisi perekonomian di atas, maka perekonomian Propinsi Sumatera Barat tahun 2019 diarahkan untuk pencapaian target sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi : 6,35 %
2. Inflasi : 5- 6
3. Gini Ratio : 0,329
4. Persentase penduduk miskin : 5,59 %
5. Tingkat pengangguran terbuka : 6,03 %

3.1.3. Kondisi Ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan dan Arah Kebijakan Ekonomi 2019

Berdasarkan kondisi perekonomian Nasional, Regional dan Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun sebelumnya serta perkiraan tahun 2019, maka indikator makro ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi tahun 2019 ditargetkan sebesar 5,50 %
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Tahun 2019 ditargetkan sebesar 70,07
3. Laju Inflasi pada tahun 2019 diperkirakan sebesar 4,10 %
4. PDRB tahun 2019 sebesar Rp. 14.051.554,64 (juta) ADHB
5. Persentase Angka Kemiskinan sebesar 6,85 %
6. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,50

Berdasarkan target indikator makro ekonomi di atas, maka Kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2019 diarahkan kepada :

1. Pengembangan pariwisata dengan bersinergi dengan sektor pendukung pariwisata (pertanian, perdagangan dan industri kreatif) melalui beberapa objek wisata unggulan
2. Memfokuskan pada peningkatan produksi dan nilai tambah pertanian, perkebunan, perikanan melalui pusat produksi pertanian, perkebunan dan perikanan yang telah ditetapkan
3. Pengembangan sistem pertanian yang lebih modern dan berbasis agrobisnis melalui peningkatan kualitas SDM pelaku usaha UMKM dan menciptakan keterlibatan setiap sektor dalam pembangunan kawasan strategis
4. Pengembangan produk unggulan setiap Nagari melalui optimalisasi peran Badan Usaha Milik Nagari/Bersama

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah Kebijakan Keuangan Daerah merupakan aspek yang sangat penting dalam manajemen pembangunan daerah dan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah. Melalui perbaikan terhadap beberapa peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pesisir Selatan menciptakan perbaikan pada sistem pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang lebih efektif, efisien, transparan, partisipatif dan akuntabel.

Kebijakan Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah diimplementasikan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya.

Kebijakan Keuangan Daerah merupakan sasaran dan kebijakan daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang

disepakati oleh Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 diarahkan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang telah diatur dalam rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Terkait misi dan agenda pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, pada tahun 2019 merupakan masa periode ketiga dari RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021.

Kerangka pendanaan, adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.

Tujuan menganalisa kerangka pendanaan adalah untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan pembangunan yang akan dilaksanakan. Perhitungan kerangka pendanaan dengan mempertimbangkan tingkat pertumbuhan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang telah dicapai Kabupaten Pesisir Selatan pada kurun waktu tertentu. Untuk menganalisa proyeksi keuangan daerah dan pendanaannya dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Perkembangan Realisasi PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2017

TAHUN	ANGGARAN	PENDAPATAN ASLI DAERAH	DANA PERIMBANGAN	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
	REALISASI			
2015	Target	93.945.361.435	937.464.570.625	332.716.723.800
	Realisasi	107.992.010.495	931.058.539.525	337.753.339.852
	%	114,95	99,32	101,51
2016	Target	110.964.945.746	1.154.699.165.920	203.601.816.902
	Realisasi	108.915.294.628	1.135.914.934.283	213.110.628.522
	%	98,15	98,37	104,67
2017	Target	186.253.728.401	1.130.054.483.211	223.233.896.894
	Realisasi	178.145.381.104	1.109.254.189.839	227.658.855.928
	%	95,65	98,16	101,98

Sumber : BPKD Kabupaten Pesisir Selatan, 2018

Berdasarkan evaluasi dan proyeksi sementara dari realisasi pendapatan asli daerah tahun sebelumnya, oleh karena itu pada tahun 2017 diproyeksikan pendapatan asli daerah mengalami kenaikan rata-rata sebesar 6,59%. Kenaikan pendapatan ini diperoleh dari sektor Pariwisata dimana Kabupaten Pesisir Selatan memiliki potensi wisata di beberapa tempat kunjungan diantaranya *kawasan Wisata Mandeh, Pantai Carocok, Langkisau dan tempat wisata lain*, yang merupakan produk andalan bagi pemerintah daerah.

Untuk dana transfer dari Pemerintah Pusat yang dianggarkan dalam Dana Perimbangan terjadi penurunan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh adanya pengurangan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU), dan rendahnya jumlah penerimaan negara sehingga bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam juga mengalami penurunan setiap tahunnya.

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah meliputi 2 (dua) komponen besar, yakni Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Belanja Daerah. Melalui kebijakan pengelolaan keuangan yang tepat, dapat meningkatkan pendapatan daerah dan pembangunan dilaksanakan dapat dirasakan manfaatnya bagi seluruh lapisan masyarakat. Implementasi dari penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat kesediaan pagu indikatif dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah daerah setiap tahunnya.

Ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

1. Hak daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan membayar daerah dan tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan daerah;
4. Pengeluaran daerah;
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan/atau kepentingan umum.

A. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah untuk tahun 2019 lebih difokuskan untuk mencari potensi pendapatan baru dengan target perolehannya serta meminimal kebocoran dalam pemungutan dengan berpedoman pada aturan perundangan serta evaluasi perolehan pendapatan tahun lalu. Untuk mendukung dari kebijakan tersebut, maka dilakukan melalui kegiatan intensifikasi objek penerimaan serta ekstensifikasi penerimaan baru antara lain:

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

a. Intensifikasi

Intensifikasi dilakukan melalui beberapa kegiatan antara lain:

- 1) Melakukan sosialisasi/penyuluhan kepada wajib pajak dan masyarakat.
 - a) Melakukan tatap muka, pertemuan dengan wajib pajak dan masyarakat
 - b) Membuat selebaran, spanduk dan billboard dan sarana lainnya
 - c) Membuat edaran ke media masa baik cetak maupun elektronik
- 2) Meningkatkan Pelayanan
 - a) Meningkatkan keterampilan dan kemampuan sumber daya aparatur.
 - b) Berpenampilan yang simpatik dan ramah kepada wajib pajak
 - c) Melaksanakan pelayanan yang tertib, cepat dan lancar
 - d) Menumbuhkan dan membina kejujuran petugas untuk menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur
 - e) Penyediaan sarana dan prasarana operasional di kantor maupun sarana transportasi bagi petugas yang beroperasi di lapangan.

b. Ekstensifikasi

Ekstensifikasi pendapatan daerah dilakukan melalui kegiatan antara lain:

- 1) Melakukan pendataan dan penyaringan wajib pajak baru.
- 2) Melakukan kajian potensi pajak daerah dan retribusi daerah dengan bekerjasama dengan pihak ketiga.

- 3) Melakukan penggalian wajib pajak/wajib retribusi daerah baru, sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 4) Melakukan penggalian wajib pajak/wajib retribusi daerah baru yang tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha.
- 5) Melakukan pendataan terhadap potensi riil penerimaan dari objek pajak/retribusi sehingga terdapat data base yang akurat.
- 6) Mendata administrasi dan sistem pengelolaan pendapatan daerah.
- 7) Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan Unsur lainnya yang terkait.
- 8) Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Berikut ditampilkan tabel realisasi dan proyeksi pendapatan daerah kabupaten Pesisir Selatan dari tahun 2014-2019 :

Tabel 3.3
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2019

URAIAN	REALISASI			PROYEKSI		PERKURHAN KENAIKIAN (Rp)
	APBD TA 2015 (Rp)	APBD TA 2016 (Rp)	APBD TA 2017 (Rp)	APBD TA 2018 (Rp)	APBD TA 2019 (Rp)	
PENDAPATAN DAERAH						
Pendapatan Asli Daerah	107.932.020,496	108.815.294,628	178.145.381,104	125.080.485,698	125.080.485,698	-
Pajak daerah	11.420.455,234	13.712.844,614	9.754.773,402	20.593.585,693	20.593.585,693	-
Retribusi Daerah	3.061.633,272	5.315.601,100	3.736.347,501	11.310.000,000	11.310.000,000	-
Retribusi Usaha/Perdagangan	4.137.553,570	5.075.236,387	5.410.363,463	5.500.000,000	5.500.000,000	-
Pengelolaan Kawasan Daerah						-
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Tetap	63.402.155,022	84.311.416,317	115.300.366,708	83.673.500,000	83.673.900,000	-
Pendapatan Dana						
Penimbangan	931.058.539,525	1.135.814.934,283	1.109.254.189,839	1.139.128.433,342	860.856.486,342	(278.271.947,000)
Egasi Hasil Pajak & Ekuivalen Pajak	21.475.637,525	15.306.350,382	22.703.709,368	22.753.552,542	22.753.552,342	-
Dana Alokasi Umum	734.625.492,000	653.083.114,000	633.100.154,000	336.100.134,000	836.100.154,000	-
Dana Alokasi Khusus	124.757.150,000	236.889.239,937	246.450.346,463	278.271.547,000		(673.271.947,000)
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah						
	337.753.339,852	213.110.628,522	227.658.855,928	210.285.430,060	62.000.000,000	(148.285.430,060)
Pendapatan Hibah	1.118.633,670	15.000.000,000	10.225.736,157	8.219,000,000		(3.219,000,000)
Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
Dana Egasi Hasil Pajak	43.636.204,532	54.814.306,322	55.613.216,731	47.600.673,060	62.000.000,000	14.399,321,940
Dana Penyesuaian						-
Dana Khusus	273.233.493,000	116.366.390,000	154.027.357,000	154.465.752,000		(154.465.752,000)
Tunjangan Pensiun Guru/Pendidik	305.163.210,000					-
Dana Hibah (D.C)	22.695.655,000	5.000.000,000	-	3.753,000,000		(6.730,000,000)
Dana Desa	50.659.651,000	116.366.390,000	154.027.357,000	115.715.752,000		(145.715.752,000)
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	-	2.300.000,000	6.300.000,000			-
JUMLAH PENDAPATAN	1.376.803.899,873	1.457.940.857,433	1.515.058.426,871	1.474.494.349,100	1.047.936.972,040	(426.557.377,060)

Sumber : BPKD Kabupaten Pesisir Selatan, 2018

B. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah tahun 2019 di Kabupaten Pesisir Selatan lebih diarahkan untuk mendorong percepatan dan perluasan pembangunan dengan menekankan keunggulan dan potensi daerah melalui pengembangan industri berbasis komoditas unggulan, pengembangan kawasan strategis dibidang ekonomi, percepatan pembangunan ekonomi wilayah berbasis maritim (kelautan), penyediaan infrastruktur, selain itu komitmen untuk mengembangkan wilayah dan memajukan daerah dipertegas dalam agenda prioritas (NAWACITA) yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019.

Untuk menyelaraskan program dan kegiatan yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 dan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan menggunakan pendekatan:

1. Teknokratis;
2. Partisipatif;
3. Politis;
4. Top-down dan bottom-up;
5. Holistik – tematik.

Maka didapati arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019 yang diadopsi ke dalam program dan kegiatan sesuai pagu indikatif APBD sebagai berikut:

1. Mengalokasikan belanja tidak langsung yang meliputi gaji dan tunjangan PNS, gaji dan tunjangan DPRD, belanja subsidi, belanja hibah, belanja sosial, belanja bagi hasil kab/kota, belanja bantuan dengan prinsip proporsional, pemerataan, dan penyeimbang, serta belanja tidak terduga
2. Mengalokasikan kebutuhan belanja tetap, belanja biasa dan variable cost secara terukur dan terarah, yaitu:
 - a. Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor (biaya listrik, telepon, air bersih, BBM, internet, dan servis mobil);

- b. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin, yang meliputi kegiatan koor dinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, pengendalian & evaluasi, perencanaan, dan pengawasan;
3. Dalam rangka mengoptimalkan pencapaian program prioritas pembangunan, Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan akan merintis skema pelaksanaan program/kegiatan pembangunan melalui tugas pembantuan. Tugas pembantuan ini adalah merupakan penugasan dari Pemerintah Pusat ke daerah (kabupaten/kota dan desa) untuk melaksanakan tugas tertentu terutama dalam melaksanakan pembangunan di perdesaan.
4. Mengalokasikan pagu indikatif berdasarkan Renja Perangkat Daerah dan usulan Musrenbang RKPD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019 dibagi atas 3 bidang:
 - a. Bidang Ekonomi

Penyediaan anggaran dibidang ekonomi dengan program prioritas antara lain dibidang pertanian, peternakan, kemaritiman, pariwisata dan pemberdayaan ekonomi lokal yang bertujuan mempercepat pembangunan dan meningkat taraf hidup masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019.
 - b. Bidang Sosial Budaya

Penyediaan anggaran dibidang Sosial Budaya dengan program prioritas antara lain dibidang pendidikan, kesehatan. permukiman dan perumahan, penguatan SDM, energi, informasi dan telekomunikasi, reformasi birokrasi tata kelola pemerintahan serta percepatan pembangunan nagari/desa (UU No.6 tahun 2014).
 - c. Bidang Infrastruktur

Penyediaan anggaran dibidang fisik dengan program prioritas antara lain: pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan. Dan mengalokasikan anggaran rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Peningkatan efektivitas belanja bantuan keuangan dan bagi hasil kepada kabupaten/kota baik yang bersifat block grant ataupun bersifat specific grant.

Variabel-variabel yang digunakan untuk menghitung indeks kabupaten/kota adalah: indeks pendidikan, indeks kesehatan, indeks daya beli, luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, PDRB/kapita, pendapatan asli daerah, proporsi pengangguran, dan proporsi kawasan lindung. Adapun kriteria kegiatan yang mendapatkan alokasi bantuan keuangan Kabupaten/Kota adalah mendukung secara signifikan upaya peningkatan IPM Kabupaten Pesisir Selatan; menanggulangi masalah kemiskinan; menanggulangi masalah pengangguran dan meningkatkan upaya pelestarian lingkungan khususnya kawasan lindung.

Prinsip penyusunan APBD disusun secara efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat.

1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Belanja pada APBD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2017-2021 disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya. Belanja daerah berdasarkan kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung

1.1. Kebijakan Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung (BTL) dianggarkan untuk membiayai gaji dan tunjangan pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tak terduga.

1.2. Kebijakan Belanja Langsung

Belanja langsung (BL) merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung dianggarkan untuk belanja pegawai dalam bentuk honorarium/upah kerja, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

2. Target dan Realisasi Belanja Daerah

Tabel berikut memperlihatkan penambahan realisasi dan proyeksi belanja daerah tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 :

Tabel 3.4
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah
Tahun 2015-2019

URAIAN	REALISASI			PROYEKSI		PERKIRAAN
	APEL TA 2015 (Rp)	APEL TA 2016 (Rp)	APEL TA 2017 (Rp)	APEL TA 2018 (Rp)	APEL TA 2019 (Rp)	KEHATI HAN (Rp)
BELANJA DAERAH						
BELANJA TIDAK LANGSUNG	838,003,339,869	920,421,272,724	917,660,521,348	953,841,833,021	684,292,950,861	(269,548,882,160)
- Belanja Pegawai	670,687,052,428	695,518,820,355	662,325,434,071	693,228,353,731	577,234,699,731	(115,993,659,000)
- Belanja Bunga	326,798,952	2,810,487,752	3,103,489,064	6,560,399,826	9,000,000,000	2,139,600,174
- Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
- Belanja Hibah	71,513,060,527	13,461,518,000	12,795,261,600	10,458,500,000	3,742,500,000	(6,715,300,000)
- Belanja Bantuan Sosial	57,500,000	113,395,000	105,830,500	200,000,000	200,000,000	-
- Belanja Bagi Hasil Kepada Prop/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	91,638,777,826	2,036,077,534	3,547,336,617	4,723,309,959	4,723,309,989	-
- Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prop/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	714,807,136	205,043,594,583	233,802,724,862	235,571,454,475	86,892,441,141	(148,979,023,334)
- Belanja Tidak Terduga	1,065,343,000	1,437,379,500	1,977,445,634	2,500,000,000	2,500,000,000	-
BELANJA LANGSUNG	521,850,295,352	580,227,875,621	589,805,241,275	607,689,901,079	350,563,214,337	(257,126,586,742)
- Belanja Pegawai	51,100,385,845	57,284,282,531	41,735,161,832	77,115,502,456	10,000,000,000	(67,115,502,456)
- Belanja Barang dan Jasa	193,631,622,491	235,947,261,455	293,060,826,100	244,599,516,372	24,549,604,910	(220,049,911,462)
- Belanja Modal	277,118,287,016	286,996,331,635	255,009,253,343	285,974,752,241	316,013,609,427	30,038,327,186
JUMLAH BELANJA	1,359,853,635,221	1,500,649,148,345	1,507,465,766,623	1,561,531,734,100	1,034,856,165,198	(526,675,568,902)

Sumber : BPKD Kabupaten Pesisir Selatan, 2018

Sedangkan untuk target dan realisasi belanja daerah kabupaten Pesisir Selatan tahun 2014-2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.5
Target dan Realisasi Belanja Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2015 – 2017

No	TAHUN	TARGET	REALISASI	%
1	2015	1,587,388,623,893	1,359,853,635,221	85.67
2	2016	1,799,424,409,819	1,500,649,148,345	83.40
3	2017	1,683,578,202,920	1,507,465,766,623	89.54

Sumber : BPKD Kabupaten Pesisir Selatan, 2018

Berdasarkan tabel 3.4 diatas dapat dijelaskan bahwa belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung diperuntukan bagi belanja Pegawai Negeri Sipil dan Anggota DPRD Kabupaten

Pesisir Selatan termasuk gaji dan tunjangan daerah, belanja hibah, belanja bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan belanja tidak terduga.

Anggaran yang diproyeksi mengalami peningkatan terlihat pada belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota. Diperkirakan adanya penurunan belanja bunga pada tahun 2019 untuk pembayaran bunga pinjaman PIP (Pusat Investasi Pemerintah). Untuk belanja pegawai, hibah dan bantuan sosial juga mengalami penurunan. Sedangkan untuk belanja langsung adalah belanja yang digunakan untuk membiayai urusan wajib dan pilihan, diperkirakan anggaran untuk membiayai belanja langsung ini akan mengalami penurunan sebesar 41,62% dan ini terjadi pada belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal.

Pada urusan belanja daerah ini diperkirakan pada tahun 2019 proporsi antara belanja tidak langsung dengan belanja langsung adalah 66,12% dan 33,88%. Hal ini sangat jauh dari kondisi yang ideal yaitu 50%-50%.

Berikut ini dapat dilihat perkembangan anggaran dan realisasi belanja langsung dan belanja tidak langsung kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2017.

Tabel 3.6
Perkembangan Anggaran dan Realisasi
Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2017

TAHUN	ANGGARAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG
	REALISASI		
2015	Target	922,200,625,462	665,187,998,431
	Realisasi	838,003,339,869	521,850,295,352
	%	90.87	78.45
2016	Target	1,127,730,237,386	671,694,172,433
	Realisasi	920,421,272,724	580,227,875,621
	%	81.62	86.38
2017	Target	957,717,534,015	725,860,668,904
	Realisasi	917,660,523,348	589,805,243,275
	%	95.82	81.26

Sumber : BPKD Kabupaten Pesisir Selatan, 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat jika anggaran untuk Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Tahun 2015 anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 922.200.625.462,00, pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp. 1.127.730.237.386,00, dan kembali turun sebesar Rp.957.717.534.015. Sementara dari Belanja Langsung anggarannya meningkat dari Rp. 665.187.998.431,00 pada tahun 2015 naik menjadi Rp.671.694.172.433,00 pada tahun 2016 dan Rp.725.860.668.904 pada tahun 2017. Akan tetapi dilihat dari persentase realisasi Belanja Tidak Langsung setiap tahun, pada tahun 2015, realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar 90,87% dan turun menjadi 81,62% di tahun 2016, dan kembali naik sebesar 95,82% pada tahun 2017. Realisasi Belanja Langsung tahun 2015 terealisasi sebesar 78,45% mengalami peningkatan tahun 2016 menjadi 86,38%, akan tetapi pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 81,26%.

C. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan umum pembiayaan daerah, memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan yang disertai kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah.

1. Kebijakan Umum Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran sebagai akibat dari besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan. Pembiayaan dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu penerimaan pembiayaan yang dapat diperoleh dari sisa lebih perhitungan (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan yang terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah dan pembayaran hutang pokok berupa utang pada pihak ketiga. Selisih antara penerimaan pembiayaan dibanding pengeluaran pembiayaan disebut sebagai pembiayaan netto. Jumlah pembiayaan netto sejogjanya sama dengan defisit APBD agar anggaran berimbang. Sebagai upaya mengefisienkan pengeluaran pembiayaan, kebijakan pembiayaan daerah tahun 2018 adalah :

- a. Mengalokasikan pembiayaan penerimaan dari SiLPA tahun yang lalu untuk menutupi defisit dan pengeluaran pembiayaan.
- b. Merevitalisasi dan merestrukturisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD.
- c. Penyertaan modal jika terjadi surplus anggaran.

Pinjaman daerah dan obligasi daerah, dapat dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, apabila anggaran yang tersedia dalam APBD/Perubahan APBD tidak mencukupi. Sesuai Permendagri No. 13 Tahun 2006 pasal 1 ayat 56 dinyatakan bahwa Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

2. Target dan Realisasi Pengeluaran dan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Berikut akan ditampilkan realisasi dan proyeksi pembiayaan daerah tahun 2015-2019 :

Tabel 3.7
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2019

URAIAN	REALISASI			PROYEKSI		PERKURAH KENAIKAN (Rp)
	APBD TA 2015 (Rp)	APBD TA 2016 (Rp)	APBD TA 2017 (Rp)	APBD TA 2018 (Rp)	APBD TA 2019 (Rp)	
PEMBIAYAAN DAERAH						
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	154,933,358,570	177,880,000,325	114,480,305,614	131,537,385,000	50,000,000,000	(81,537,385,000)
SiLPA	125,434,353,873	156,339,306,222	114,386,709,414	63,500,000,000	50,000,000,000	(18,000,000,000)
Penerimaan Pinjaman Daerah	14,126,855,000	18,835,780,000	93,597,200	63,037,385,000		(53,037,385,000)
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	49,044,090	1,954,297,500	-			-
Penerimaan Piutang Daerah	11,323,165,607	690,114,601				-
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	154,933,358,570	177,880,000,325	114,480,305,614	131,537,385,000	50,000,000,000	(81,537,385,000)
Pengeluaran Pembiayaan	15,489,000,000	20,735,000,000	30,751,340,000	44,500,000,000	63,080,806,842	18,380,806,842
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	15,480,000,000	20,735,000,000	21,333,550,000	15,500,000,000	15,000,000,000	(1,500,000,000)
Pembayaran Pokok Utang	-	-	9,417,790,000	29,000,000,000	48,080,806,842	20,080,806,842
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	15,489,000,000	20,735,000,000	30,751,340,000	44,500,000,000	63,080,806,842	18,380,806,842
PEMBIAYAAN NETTO	139,444,358,570	157,095,000,325	83,728,765,614	87,037,385,000	(13,080,806,842)	(100,118,191,842)

Sumber :BPKD Kabupaten Pesisir Selatan, 2018

Pada tabel dapat dilihat, realisasi penerimaan pembiayaan meningkat dalam rentang tahun 2015-2017. Jika jumlah realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp.154.933.398.570,00 pada tahun 2015, jumlahnya meningkat menjadi Rp.177.880.000.326,00, pada tahun 2016, sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi Rp. 83.728.766.614,00. Untuk tahun 2019, penerimaan pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp. 50.000.000.000,00. Sementara untuk pengeluaran pembiayaan terjadi kenaikan realisasi dari Rp 15.489.000.000,00 pada tahun 2015 menjadi Rp. 20.785.000.000,00 di tahun 2016, dan pada tahun 2017 meningkat menjadi Rp.30.751.540.000,00. Untuk tahun 2018, pengeluaran pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp. 63.080.806.842,00.

Sedangkan untuk target dan realisasi pembiayaan dari tahun 2015-2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.8
Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2017

TAHUN	ANGGARAN	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	PENGELUARAN PEMBIAYAAN
	REALISASI		
2015	Target	239,197,968,033	15,936,000,000
	Realisasi	154,229,104,552	15,489,000,000
	%	64.48	97.20
2016	Target	243,167,828,222	20,785,000,000
	Realisasi	177,880,000,326	20,785,000,000
	%	73.15	100.00
2017	Target	144,036,094,414	33,388,000,000
	Realisasi	83,728,766,614	30,751,540,000
	%	58.13	92.10

Sumber : BPKD Kabupaten Pesisir Selatan, 2017

Secara umum arah kebijakan keuangan daerah kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2019 disajikan pada tabel berikut ini :

Kemudian proyeksi belanja daerah dalam kurun tahun 2017-2018 untuk belanja tidak langsung antara lain; untuk pos belanja pegawai diproyeksikan adanya Tunjangan Hari Raya (THR) bagi seluruh PNS (kebijakan dari Pemerintah Pusat), belanja hibah, belanja sosial dan belanja tidak terduga diproyeksikan tetap dikarenakan hasil target dan realisasi tahun 2017 hanya mencapai 56.50%

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 merupakan pelaksanaan tahun keempat RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah pada RKPD tahun 2019 dirumuskan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan Visi dan Misi pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 – 2021 yang dipadu-selaraskan dengan RKPD Provinsi Sumatera Barat dan RKP Pemerintah tahun 2019 serta berdasarkan penjarangan aspirasi masyarakat secara berjenjang melalui musrenbang tingkat Nagari, musrenbang tingkat Kecamatan dan musrenbang Kabupaten.

Dengan demikian, RKPD tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang komprehensif yang telah disusun melalui pendekatan Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial semenjak proses musrenbang di tingkat nagari dilaksanakan. Holistik-Tematik artinya bahwa RKPD tahun 2019 disusun dengan pendekatan yang menyeluruh, melihat permasalahan secara utuh untuk mencapai tujuan utama yang ditetapkan secara fokus. Integratif artinya bahwa perencanaan pembangunan yang disusun memperhatikan penyatuan berbagai aspek ke dalam satu keutuhan terpadu. Dengan pendekatan ini, maka program/kegiatan prioritas dari suatu perangkat daerah akan saling bersinergi dengan program/kegiatan prioritas di perangkat daerah lainnya dalam mendukung pencapaian sasaran strategis daerah. Sedangkan pendekatan spasial maksudnya bahwa rencana pembangunan yang disusun dengan memperhatikan unsur kewilayahan, lokasi prioritas yang diketahui detailnya (koordinat) serta mempedomani Rencana Tata Ruang Wilayah dalam pemanfaatan ruangnya.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019

4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2019

Tujuan pembangunan nasional secara eksplisit telah digariskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu untuk: “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan

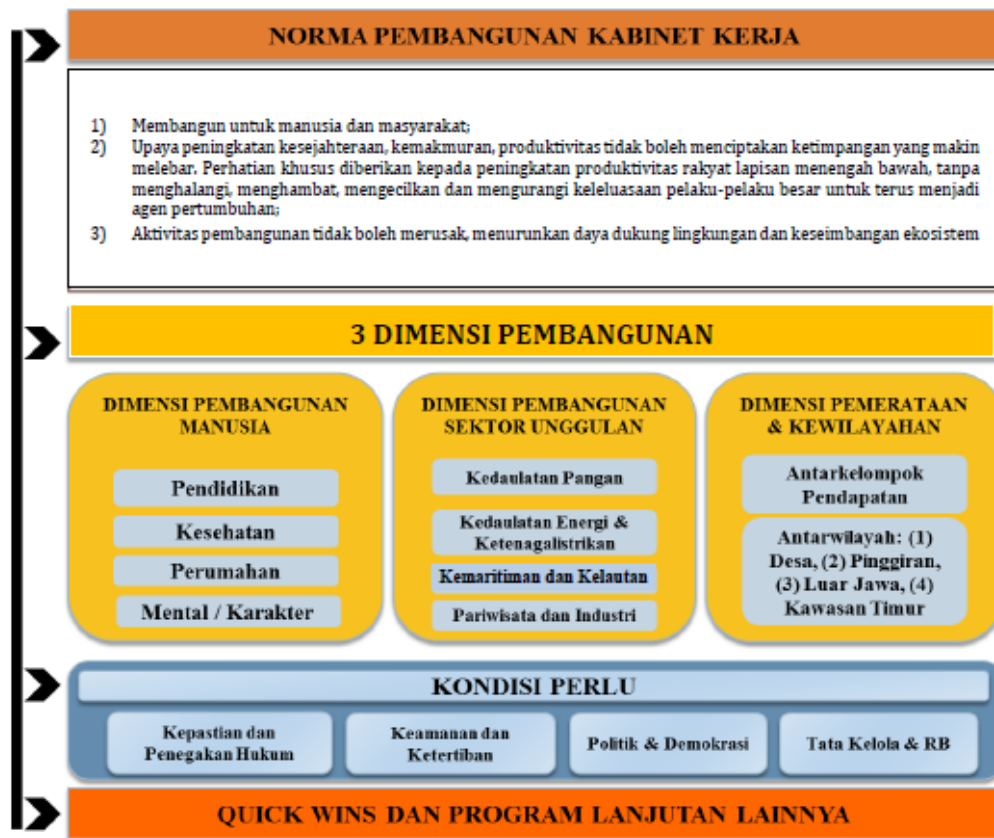
umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Kemudian sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional, telah ditetapkan visi pembangunan nasional tahun 2015-2019 yaitu: **“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**.

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 8 (delapan) Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Selanjutnya ditataran operasional, rencana pembangunan nasional dijalankan dengan Strategi Pembangunan Nasional sebagaimana tergambar dalam gambar 4.1 di bawah ini.

Gambar 4.1
STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL



Sumber: Buku I RPJMN 2015-2019

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan prioritas tersebut dinamakan NAWA CITA yaitu:

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi system dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Sesuai dengan visi pembangunan nasional “Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”, maka pembangunan nasional 2015-2019 akan diarahkan untuk mencapai sasaran utama sebagaimana tabel 4.1 dibawah ini :

Tabel 4.1
Sasaran Pokok Pembangunan Nasional
RPJMN Tahun 2015 - 2019

NO	PEMBANGUNAN	BASELINE 2014	SASARAN 2019
1. SASARAN MAKRO			
Pembangunan Manusia dan Masyarakat			
a.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,8	76,3
b.	Indeks Pembangunan Masyarakat*)	0,55	Meningkat
c.	Indeks Gini	0,41	0,36
d.	Meningkatnya presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	51,8% (Oktober 2014)	Min. 95%
e.	Kepesertaan Program SJSN Ketenagakerjaan Pekerja formal Pekerja informal	29,5 juta 1,3 juta	62,4 juta 3,5 juta
Ekonomi Makro			
a.	Pertumbuhan ekonomi	5,1 % (perkiraan)	8,0%
b.	PDB per Kapita (Rp ribu) Tahun Dasar 2010 PDB per Kapita (Rp ribu) Tahun Dasar 2000	43.403 41.163	72.217
c.	Inflasi	8,4%	3,5%
d.	Rasio Pajak Tahun Dasar 2010 ***)	11,5%	16,0%
e.	Tingkat Kemiskinan	10,96 % **)	7,0-8,0%
d.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,94%	4,0-5,0%
Keterangan: *)Indeks pembangunan masyarakat merupakan indeks komposit yang mengukur sifat kegotongroyongan, toleransi, dan rasa aman masyarakat **)Tingkat kemiskinan Bulan September 2014, sebelum adanya kebijakan pengurangan subsidi BBM pada Bulan November 2014 ***) Termasuk pajak daerah sebesar satu persen PDB			

NO	PEMBANGUNAN	BASELINE 2014	SASARAN 2019
2. SASARAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT			
Kependudukan dan Keluarga Berencana			
a.	Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk	1,49%/tahun (2000-2010)	1,19%/tahun (2010-2020)
b.	Angka kelahiran total (<i>Total Fertility Rate/TFR</i>)	2,6 (2012)	2,3
c.	Angka prevalensi Pemakaian kontrasepsi (CPR) suatu cara (<i>all methods</i>)	62% (2012)	66%
Pendidikan			
a.	Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun	8,1 (tahun) (2013)	8,8 (tahun)
b.	Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun	94,1% (2013)	96,1%
c.	Prodi Perguruan Tinggi Minimal Terakreditasi B	50,4% (2013)	68,4%
d.	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	68,7%	84,2%
e.	Persentase SMP/MT berakreditasi minimal B	62,5%	81,0%
f.	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B	73,5%	84,6%
g.	Persentase Kompetensi Keahlian SMK berakreditasi minimal B	48,2%	65,0%
h.	Rasio APK SMP/MTs antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	0,85 (2012)	0,90
i.	Rasio APK SMA/SMK/MA antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	0,53 (2012)	0,60
Kesehatan			
1. Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat			
a.	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	346 (SP 2010)	306
b.	Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	32 (2012)	24
c.	Prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita (persen)	19,6 (2013)	17
d.	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (dibawah 2 tahun) (persen)	32,9 (2013)	28
2. Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular			
a.	Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk (persen)	297 (2013)	245
b.	Prevalensi HIV (persen)	0,46 (2014)	<0,5
c.	Prevalensi tekanan darah tinggi (persen)	25,8 (2013)	23,4
d.	Prevalensi obesitas penduduk usia 18+ tahun (persen)	15,4 (2013)	15,4
e.	Persentase merokok penduduk usia ≤18 tahun	7,2 (2013)	5,4
3. Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan			
a.	Jumlah kecamatan yang memiliki minimal satu puskesmas terakreditasi	-	5.600
b.	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi	-	95
c.	Jumlah puskesmas yang minimal memiliki lima jenis tenaga kesehatan	1.015	5.600
Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan			
a.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	69,6 (2013)	Meningkat
b.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70,5 (2013)	Meningkat
Perlindungan Anak			
a.	Prevalensi Kekerasan terhadap Anak	Anak laki-laki: 38,62 persen; Anak perempuan: 20,48 persen (2013)	Menurun

NO	PEMBANGUNAN	BASELINE 2014	SASARAN 2019
Pembangunan Masyarakat			
a.	Indeks gotong royong (mengukur kepercayaan kepada lingkungan tempat tinggal, kemudahan mendapatkan pertolongan, aksi kolektif masyarakat dalam membantu masyarakat yang membutuhkan dan kegiatan bakti sosial, serta jejaring sosial)	0,55 (2012)	Meningkat
b.	Indeks toleransi (mengukur nilai toleransi masyarakat dalam menerima kegiatan agama dan suku lain di lingkungan tempat tinggal)	0,49 (2012)	Meningkat
c.	Indeks rasa aman (mengukur rasa aman yang dirasakan masyarakat di lingkungan tempat tinggal)	0,61 (2012)	Meningkat
d.	Jumlah konflik sosial (per tahun)	164 (2013)	Menurun
3. SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN			
Kedaulatan Pangan			
1.	Produksi Dalam Negeri		
a.	Padi (Juta Ton)	70,6	82,0
b.	Jagung (Juta Ton)	19,13	24,1
c.	Kedelai (Juta Ton)	0,92	2,6
d.	Gula (Juta Ton)	2,6	3,8
e.	Daging Sapi (Ribuan Ton)	452,7	755,1
f.	Produksi Ikan (juta ton)	12,4	18,8
2.	Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Irigasi		
a.	Pembangunan dan Peningkatan Jaringan irigasi air permukaan, air tanah dan rawa (juta ha)	8,9	9,89
b.	Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, air tanah dan rawa (juta ha)	2,71	3,01
c.	Pembangunan dan Peningkatan irigasi tambak (ribu ha)	189,75	304,75
d.	Pembangunan waduk	21	49
<i>Catatan:</i>			
Untuk 3 tahun pertama: fokus pada swasembada padi. Untuk kedele fokus pada konsumsi DN utamanya untuk tahu dan tempe; Gula, daging sapi dan garam fokus pada pemenuhan konsumsi rumah tangga.			
Kedaulatan Energi			
1.	Peningkatan Produksi Sumber Daya Energi		
a.	Minyak Bumi (ribu SBM/hari)	818	700
b.	Gas Bumi (ribu SBM/hari)	1.224	1.295
c.	Batubara (juta ton)	421	400
2.	Penggunaan Dalam Negeri (DMO)		
a.	Gas Bumi DN	53%	64%
b.	Batubara	24%	60%
3	Pembangunan FSRU (unit)	2	7
4	Jaringan pipa gas (km)	11.960	18.322
5	Pembangunan SPBG (unit)	40	118
6	Jaringan gas kota (sambungan rumah)	200 ribu	1,1 juta
7	Pembangunan kilang bumi (unit)	-	1
Maritim dan Kelautan			
1	Memperkuat Jatidiri Sebagai Negara Maritim		
a.	Penyelesaian pencatatan/deposit pulau-pulau kecil ke PBB	13.466	17.466 (Selesai th 2017)
b.	Penyelesaian batas maritim antar negara	1 negara	9 negara

NO	PEMBANGUNAN	BASELINE 2014	SASARAN 2019
2	Pemberantasan Tindakan Perikanan Liar		
a.	Meningkatnya ketaatan pelaku perikanan	52%	87%
3	Membangun konektivitas Nasional		
a.	Pembangunan pelabuhan untuk menunjang tol laut	---	24
b.	Pengembangan pelabuhan penyeberangan	210	270
c.	Pembangunan kapal perintis	50 unit	104 unit
4	Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan		
a.	Produksi hasil perikanan (juta ton)	22,4	40-50
b.	Pengembangan pelabuhan perikanan	21 unit	24 unit
c.	Peningkatan luas kawasan konservasi laut	15,7 juta ha	20 juta ha
Pariwisata dan Industri Manufaktur			
1.	Pariwisata		
a.	Kontribusi terhadap PDB Nasional	4,2%	8 %
b.	Wisatawan manca negara (orang)	9 juta	20 juta
c.	Wisatawan Nusantara (kunjungan)	250 juta	275 juta
d.	Devisa (triliun rupiah)	120	260
2.	Industri Manufaktur		
a.	Pertumbuhan sektor industri	4,7%	8,6%
b.	Kontribusi terhadap PDB	20,7%	21,6%
c.	Penambahan jumlah industri berskala menengah dan besar	--	9.000 unit (2015-2019)
Ketahanan Air, Infrastruktur Dasar dan Konektivitas			
1.	Ketahanan Air		
a.	Kapasitas air baku nasional	51,44 m3/det	118,6 m3/det
b.	Pembangunan Waduk (kumulatif 5 tahun)	21 waduk	49 waduk
c.	Ketersediaan air irigasi yang bersumber dari waduk	11%	20%
d.	Terselesaikannya status DAS lintas negara	0	19 DAS (kumulatif)
e.	Berkurangnya luasan lahan kritis melalui rehabilitasi dalam KPH	500.000 ha	5,5 juta ha (kumulatif)
c.	Pulihnya kesehatan 5 DAS Prioritas (DAS Ciliwung, DAS Citarum, DAS Serayu, DAS Bengawan Solo, dan DAS Brantas) dan 10 DAS prioritas lainnya sampai dengan tahun 2019	0	15 DAS
d.	Terjaganya / meningkatnya jumlah mata air di 5 DAS prioritas dan 10 DAS prioritas lainnya sampai dengan 2019 melalui konservasi sumber daya air	0	15 DAS
h.	Kapasitas/Daya tampung	15,8 miliar m3	19 miliar m3
i.	Pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi (permukaan, air tanah, pompa, rawa, dan tambak)	9,136 Juta Ha	10 Juta Ha
j.	Rata-rata kapasitas Desain Pengendalian Struktural dan Non Struktural Banjir	5-25 tahun	10-100 tahun
2.	Infrastruktur Dasar dan Konektivitas		
a.	Kapasitas pembangkit (GW)	50,7	86,6
b.	Rasio elektrifikasi (%)	81,5	96,6
c.	Konsumsi Listrik Perkapita	843KWh	1.200 kWh
d.	Kawasan permukiman kumuh perkotaan	38.431 Ha	0 ha
e.	Kekurangan tempat tinggal (backlog) berdasarkan perspektif menghuni	7,6 juta	5 juta
f.	Akses Air Minum Layak	70 %	100%
g.	Akses Sanitasi Layak	60,9 %	100%
h.	Kondisi mantap jalan nasional	94 %	98%
i.	Pengembangan jalan nasional	38.570 km	45.592 km

NO	PEMBANGUNAN	BASELINE 2014	SASARAN 2019
j.	Pembangunan jalan baru (kumulatif 5 tahun)	1.202 km	2.650 km
k.	Pengembangan jalan tol (kumulatif 5 tahun)	807 km	1.000 km
l.	panjang jalur kereta api	5.434 km	8.692 km
m.	Pengembangan pelabuhan	278	450
n.	Dwelling Time Pelabuhan	6-7 hari	3-4 hari
o.	Jumlah bandara	237	252
p.	On-time Performance penerbangan	75%	95 %
q.	Kab/Kota yang dijangkau Broadband	82%	100%
r.	Jumlah Dermaga Penyeberangan	210	275
s.	Pangsa Pasar Angkutan Umum Perkotaan	23%	32%
3.	Lingkungan		
a.	Emisi Gas Rumah Kaca	15,5%	~ 26%
b.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63,0-64,0	66,5-68,5
c.	Tambahan Rehabilitasi Hutan	2 juta ha (dalam dan luar kawasan)	750 ribu ha (dalam kawasan)
4. SASARAN PEMBANGUNAN DIMENSI PEMERATAAN			
Menurunkan kesenjangan antar kelompok ekonomi			
1.	Tingkat Kemiskinan (%)	10,96%*)	7,0% - 8,0%
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,94%	4,0 % - 5,0 %
Keterangan: *) Tingkat Kemiskinan Bulan September 2014, sebelum adanya kebijakan pengurangan subsidi BBM pada bulan November 2014			
Meningkatkan cakupan pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi produktif masyarakat kurang mampu			
1.	Perlindungan Sosial bagi Penduduk Rentan dan Kurang Mampu (40% penduduk berpendapatan terendah)		
a.	Kepesertaan Jaminan Kesehatan	86%	100%
b.	Akses Pangan Bernutrisi	60%	100%
c.	Akses Terhadap Layanan Keuangan	4,12% *)	25%
Keterangan: *) RT 40% termiskin yang saat ini memperoleh bantuan tunai melalui layanan keuangan digital			
2.	Pelayanan Dasar Bagi Penduduk Rentan dan Kurang Mampu (40% penduduk berpendapatan terendah)		
a.	Kepemilikan akte lahir (2013)	64,6%	77,4%
b.	Akses air minum	55,7%	100%
c.	Akses sanitasi layak	20,24%	100%
d.	Akses penerangan	52,3%	100%
3.	Peningkatan daya saing tenaga kerja		
a.	Penyediaan lapangan kerja (2015-2019)	---	10 juta (rata-rata 2 juta per tahun)
b.	Persentase tenaga kerja formal	40,5%	51,0%
4.	Kepesertaan Program SJSN Ketenagakerjaan		
a.	Pekerja formal	29,5 juta	62,4 juta
b.	Pekerja Informal	1,3 juta	3,5 juta
5.	Meningkatkan kualitas dan keterampilan pekerja		
a.	Jumlah pelatihan Jumlah sertifikasi	1.921.283*) 576.887*)	2.170.377**) 863.819**)
b.	Jumlah tenaga kerja keahlian menengah yang kompeten	30,0%	42,0%

NO	PEMBANGUNAN	BASELINE 2014	SASARAN 2019
c.	Kinerja lembaga pelatihan milik negara menjadi berbasis kompetensi	5,0%	25,0%
Keterangan: *) Tahun 2011-2014 **) Tahun 2015-2019			
5. SASARAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH			
Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah			
1.	Peran Wilayah dalam Pembentukan PDB Nasional		
a.	Sumatera	23,8 *)	24,6
b.	Jawa	58,0 *)	55,1
c.	Bali – Nusa Tenggara	2,5 *)	2,6
d.	Kalimantan	8,7 *)	9,6
e.	Sulawesi	4,8 *)	5,2
f.	Maluku – Papua	2,2 *)	2,9
Keterangan: *) Tahun 2013			
2.	Pembangunan Perdesaan		
a.	Penurunan desa tertinggal	--	s.d. 5.000 desa tertinggal
b.	Peningkatan desa	--	Paling sedikit 2.000 desa mandiri
3.	Pengembangan Kawasan Perbatasan		
a.	Pengembangan Pusat Ekonomi Perbatasan (Pusat Kegiatan Strategis Nasional/PKSN)	3 (111 lokasi prioritas)	10 (187 lokasi prioritas)
b.	Peningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan	12 pulau-pulau kecil terluar berpenduduk	92 pulau kecil terluar/terdepan
4.	Pembangunan Daerah Tertinggal		
a.	Jumlah Daerah Tertinggal	122 (termasuk 9 DOB)	42
b.	Kabupaten terentaskan	70	80
c.	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal	7,1% *)	7,35%
d.	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	16,64%	12,5%
e.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal	68,46	71,5
Keterangan: *) rata-rata 2010-2014			
5.	Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Luar Jawa		
a.	Kawasan Ekonomi Khusus di Luar Jawa	7	14
b.	Kawasan Industri	n.a.	14
c.	Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)	4	4
6.	Pembangunan Kawasan Perkotaan		
a.	Pembangunan Metropolitan di Luar Jawa sebagai PKN dan Pusat Investasi	2	2+ 5(usulan baru)
b.	Optimalisasi 20 kota otonomi berukuran sedang di Luar Jawa sebagai PKN/PKW dan penyangga urbanisasi di Luar Jawa	43 kota belum optimal perannya	20 dioptimalkan perannya

NO	PEMBANGUNAN	BASELINE 2014	SASARAN 2019
c.	Penguatan 39 pusat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atau Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	--	39 pusat pertumbuhan yang diperkuat
d.	Pembangunan 10 Kota Baru Publik	--	10 Kota Baru
6. SASARAN PEMBANGUNAN POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN			
Politik dan Demokrasi			
1.	Tingkat Partisipasi Politik Pemilu	73,2 %	77,5 %
2.	Indeks Demokrasi Indonesia	63,7	75,0
Penegakan Hukum			
1.	Indeks Pembangunan Hukum	n.a.	75%
2.	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	3,6	4,0
3.	Indeks Penegakan Hukum Tipikor	n.a	Naik 20% (skala 5)
Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi			
1.	Kualitas Pelayanan Publik		
a.	Integritas Pelayanan Publik (Pusat)	7,4	9,0
b.	Integritas Pelayanan Publik (Daerah)	6,8	8,5
2.	Persentase Instansi Pemerintah dengan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik (Kategori B)		
a.	Kementerian/Lembaga	47%	75%
b.	Provinsi	NA	60%
c.	Kabupaten/Kota	NA	45%
3.	Opini WTP atas Laporan Keuangan K/L	74 %	95 %
4.	Persentase Instansi Pemerintah yang Akuntabilitas Kinerja Baik (Skor B)		
a.	Kementerian/Lembaga	60,2%	85,0%
b.	Provinsi	30,3%	75,0%
c.	Kabupaten/Kota	2,38%	50%
Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah			
1.	Kinerja Keuangan Daerah		
a.	Rata-rata presentase belanja pegawai Kab/Kota	42 %	35 %
b.	Rata-rata pajak retribusi Kab/Kota terhadap total pendapatan	5,9 %	11,0 %
c.	Rata-rata pajak retribusi Provinsi terhadap total pendapatan	33,6 %	40,0 %
d.	Rata-rata belanja modal Kab/Kota	19,9 %	30,0 %
e.	Rata-rata belanja modal Provinsi	16,2 %	30,0 %
f.	Rata-rata presentase belanja pegawai Kab/Kota	42 %	35 %
g.	Rata-rata presentase belanja pegawai Provinsi	15 %	13 %
h.	Rata-rata ketergantungan dana transfer Kab/Kota	72,2 %	70,0 %
i.	Rata-rata ketergantungan dana transfer Provinsi	53,9 %	50,0 %
j.	Rata-rata nasional WTP Pemda Provinsi	52 %	85 %
k.	Rata-rata nasional WTP Pemda Kabupaten	30 %	60 %
l.	Rata-rata nasional WTP Pemda Kota	41 %	65 %
2.	Kinerja Kelembagaan		
a.	PTSP Kondisi Mantap	35,5 %	55,0 %
b.	Perda bermasalah	350 perda	50 perda
c.	Rata-rata kinerja Daerah Otonomi Baru - Rata-rata kinerja maksimal - Rata-rata kinerja minimal	52,9 % 23,8 %	70,0 % 48,0 %
d.	Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah yg ideal (sesuai PP 41) sampel 299 daerah	45 %	70 %
e.	Penerapan SPM di daerah (Prov/Kab/Kota)	75 %	90 %

NO	PEMBANGUNAN	BASELINE 2014	SASARAN 2019
3.	Kinerja Aparatur		
a.	Tingkat pendidikan aparatur Pemda S1, S2 dan S3	43,3 %	50,0 %
Pertahanan dan Keamanan			
1.	Tingkat Pemenuhan MEF (Tiga Tahap)	Tahap I	Tahap II
2.	Kontribusi industri pertahanan DN terhadap MEF	10%	20%
3.	Laju Peningkatan Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba	0,08%	0,05%

Sumber: Buku I, RPJMN 2015-2019

4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Tahun 2019

Sesuai dengan visi gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 adalah, **“Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera”**.

Misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah” Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”.
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional.
3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah;
5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan tersebut secara fokus dan terukur maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran pembangunan Sumatera barat Tahun 2016-2021 sebagaimana Tabel 4.2 dibawah ini.

Tabel 4.2
Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan
RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

VISI Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera		
MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi 1: Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah"	Meningkatkan pelaksanaan pembangunan mental dan kehidupan masyarakat madani yang aman, damai, tentram, harmonis, beriman dan bertaqwa dengan mengamalkan nilai universal keagamaan dalam kehidupan.	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat
		Meningkatnya kualitas kehidupan beragama, dan kerukunan antar-umat beragama
		Berkurangnya penyakit masyarakat (Pekati)
	Penguatan kelembagaan agama dan adat.	Menguatnya lembaga agama dan adat dalam tata kehidupan masyarakat
Misi 2: Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional	Meningkatkan profesionalitas aparatur pemerintah dan bebas korupsi, kolusi serta nepotisme.	Meningkatnya kapasitas dan manajemen aparatur
		Meningkatnya integritas dan kinerja aparatur
	Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan
		Meningkatnya sinergitas antara pelaku pembangunan dalam pencapaian sasaran pembangunan
Misi 3: Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi	Meningkatkan pelayanan publik yang prima, transparan, aspiratif, dan partisipatif	Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
	Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas dan berkarakter serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan karakter	Meningkatnya tingkat pendidikan
		Meningkatnya integritas peserta didik
	Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan yang dilandasi nilai-nilai agama dan adat	Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan
	Meningkatkan kompetensi dan daya saing peserta didik serta meningkatkan pengetahuan masyarakat	Meningkatnya daya saing lulusan pendidikan menengah untuk masuk perguruan tinggi atau pasar kerja
		Meningkatnya minat baca dan budaya membaca

MISI	TUJUAN	SASARAN
	Meningkatkan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju dan tepat guna	Meningkatnya fungsi penelitian dan pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, kualitas kependudukan dan kesetaraan gender serta pemenuhan hak anak	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara merata
		Meningkatnya kualitas kependudukan, pembangunan keluarga dan keluarga berencana
		Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berolahraga
		Meningkatnya kapasitas pemuda dan kepemimpinan pemuda dalam pembangunan
		Meningkatnya pembangunan gender dan pemberdayaan gender serta pemenuhan hak anak
Misi 4: Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah	Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkualitas dan lebih merata berbasis ekonomi kerakyatan	Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah
	Meningkatkan produksi dan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis dan meningkatkan kesejahteraan petani	Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan
		Meningkatnya usaha pertanian dengan sistem agribisnis
		Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan
	Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan kemaritiman secara berkelanjutan	Meningkatnya pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan dan kemaritiman
	Menjadikan Sumatera Barat sebagai destinasi utama pariwisata berbasis agama dan budaya	Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara
	Menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal	Menurunnya jumlah penduduk miskin
		Menurunnya tingkat pengangguran terbuka
		Menuntaskan penanganan daerah tertinggal
		Menurunnya tingkat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Misi 5: Meningkatkan Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah
		Meningkatnya pelayanan perhubungan/ transportasi
		Meningkatnya keselamatan lalu lintas

MISI	TUJUAN	SASARAN
		Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya air
		Meningkatnya ketersediaan prasarana umum pada kawasan pemukiman/ perumahan, bangunan dan lingkungan
		Meningkatnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT)
	Meningkatkan Pelaksanaan Tata Ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dengan tata ruang
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
		Terpeliharanya fungsi ekosistem dan kualitas lahan
	Meningkatkan budaya dan perilaku masyarakat yang tanggap bencana	Berkurangnya resiko bencana
		Meningkatnya penanganan tanggap darurat dan pemulihan wilayah/daerah pasca bencana
	Meningkatkan kualitas kawasan konservasi dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan	Terpeliharanya debit sungai
		Meningkatnya kualitas ekosistem pesisir dan laut

Sumber: RPJMD Sumatera Barat tahun 2016-2019

Rencana pembangunan Sumatera Barat tahun 2016-2021 dijabarkan ke dalam sepuluh prioritas pembangunan, sebagai berikut :

1. Pembangunan mental dan pengamalan agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat dengan 5 kegiatan prioritas : 1) Pengembangan sekolah/lembaga formal dan non formal di bidang keagamaan dan adat, 2) Peningkatan koordinasi keagamaan dan perlindungan kegiatan keagamaan, 3) Peningkatan, pencegahan, penanganan dan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba, 4) Peningkatan penghimpunan, penyaluran serta pemanfaatan dana zakat, infaq, wakaf dan sedekah, 5) Peningkatan kapasitas dan kualitas lembaga agama dan adat.
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan dengan 3 kegiatan prioritas : 1) Peningkatan kapasitas aparatur, 2) Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, 3) Peningkatan efektifitas pelayanan publik melalui pelayanan terpadu satu pintu.
3. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan dengan 4 kegiatan prioritas : 1) Pelaksanaan wajib belajar 9 tahun dan rintisan 12 tahun, 2) Peningkatan

- mutu pembelajaran yang berorientasi pendidikan karakter, 3) Penyediaan dan pemerataan layanan pendidikan, 4) Peningkatan kualitas lulusan SMA/SMK/MA yang siap bersaing di pasar kerja.
4. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan 4 kegiatan prioritas : 1) Penyediaan pelayanan kesehatan ibu dan anak, 2) Peningkatan akses, keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan, 3) Pencegahan dan pengendalian penyakit menular, 4) Peningkatan kualitas layanan kesehatan dasar.
 5. Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis dengan 2 kegiatan prioritas : 1) Peningkatan cadangan pangan, 2) Peningkatan produktivitas komoditi utama pertanian.
 6. Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Peningkatan Investasi dengan 4 kegiatan prioritas : 1) Pembangunan infrastruktur dasar, kawasan industri, wisata, pertanian dan perdagangan, 2) Peningkatan kualitas SDM pariwisata, industri, perdagangan dan koperasi, 3) Peningkatan kualitas perizinan, 4) Percepatan pembangunan destinasi pariwisata.
 7. Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan dengan 1 kegiatan prioritas yaitu peningkatan produksi perikanan tangkap, budidaya, dan budidaya laut..
 8. Penurunan Tingkat Kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal dengan 4 kegiatan prioritas : 1) Pemenuhan kebutuhan dasar (antara lain pendidikan, kesehatan, air minum, sanitasi), 2) Peningkatan keterampilan, dukungan modal usaha dan pemasaran, 3) Perluasan aksesibilitas (antara lain jalan, telekomunikasi), 4) Sarana produksi pertanian.
 9. Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur dengan 5 kegiatan prioritas : 1) Pembangunan dan peningkatan jalan mendukung kawasan pertanian, industri pariwisata dan perdagangan, 2) Pembangunan infrastruktur moda transportasi, 3) Pembangunan/peningkatan jalan mendukung kawasan tertinggal, 4) Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana kawasan permukiman, 5) Pembangunan Pembangkit listrik untuk daerah perbatasan dan pulau terluar.

10. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam dengan 3 kegiatan prioritas : 1) Pembangunan infrastruktur mitigasi kebencanaan, 2) Pengendalian dan penurunan beban pencemaran, 3) Pengendalian kesesuaian rencana pembangunan dan tata ruang.

4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Tahun 2019

A. Visi dan Misi Pembangunan Tahun 2016-2021

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 telah menetapkan visi pembangunan daerah tahun 2016-2021 yaitu, **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang Mandiri, Unggul, Agamis Dan Sejahtera”**. Visi tersebut dapat diterjemahkan sebagai berikut:

- Mandiri** : berdiri sendiri yaitu kondisi dimana daerah dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki daerah secara optimal
- Unggul** : masyarakat yang memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi dan memiliki kapasitas inovatif dan kreatif sehingga menjadi masyarakat yang unggul
- Agamis** : suatu kondisi masyarakat yang dapat mempelajari, memahami, melaksanakan dan mengamalkan ajaran agamanya dalam tatanan kehidupan sehari-hari serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat.
- Sejahtera** : perlu sejumlah program akselerasi untuk bisa mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pesisir Selatan terutama dibidang Pendidikan, Kesehatan, dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut, maka dirumuskan 5 (lima) misi pembangunan daerah tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah.
3. Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya ABS-SBK
4. Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan.
5. Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obatan terlarang.

B. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2016-2021

Memperhatikan visi dan misi jangka menengah sebagaimana dijabarkan di atas, maka tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan dalam periode 2016-2021 ditetapkan sebagai berikut :

Misi Satu : Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat

Tujuan yang hendak dicapai dalam misi 1 adalah :

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari KKN, akuntabel dan berkinerja, serta pelayanan publik yang prima

Sasaran :

- a. Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
- b. Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar

Misi Dua : Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah

Tujuan yang hendak dicapai dalam misi 2 adalah :

Mewujudkan pembangunan infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial dalam mendukung sektor unggulan daerah

Sasaran :

- a. Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur ekonomi secara berkelanjutan.
- b. Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur social

Misi Tiga : Meningkatkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya ABS-SBK

Tujuan yang hendak dicapai dalam misi 3 adalah :

Terwujudnya perubahan sikap mental masyarakat dalam kehidupan beragama, sosial dan budaya

Sasaran :

- a. Terwujudnya pelaksanaan revolusi mental, sesuai dengan nilai - nilai agama, adat, budaya dan kearifan lokal
- b. Berkembangnya kelembagaan seni, adat dan budaya daerah

Misi Empat : Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan

Tujuan yang hendak dicapai dalam misi 4 adalah :

Mewujudkan produk pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan jasa pariwisata yang berdaya saing.

Sasaran :

- a. Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan serta kelautan dan perikanan
- b. Meningkatnya peran pengolahan dan pemasaran terhadap ekonomi daerah
- c. Terwujudnya Pesisir Selatan menjadi Destinasi Utama Wisata Bahari di Sumatera Barat

Misi Lima : Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obatan terlarang

Tujuan yang hendak dicapai dalam misi 5 adalah :

Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang aman, damai, tertib, dan taat hukum.

Sasaran :

- a. Terwujudnya peran pemerintah dan struktur sosial dalam pengurangan penyakit masyarakat
- b. Meningkatkan kapasitas organisasi dan kelembagaan masyarakat.

C. Prioritas Pembangunan Tahun 2016-2021

Rumusan visi dan misi pembangunan tahun 2016-2021 dijabarkan dan diimplementasikan secara operasional ke dalam 10 prioritas pembangunan yang telah disinkronkan dengan Nawacita yang tertuang dalam RPJMN serta RPJMD Propinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

1. **Pengamalan Agama, Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal Dalam Kehidupan Bermasyarakat;**

Prioritas Pengamalan agama, pelestarian budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat diarahkan untuk mewujudkan kerukunan hidup beragama serta menanamkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan prioritas ini diharapkan akan terwujud: 1) harmonisasi dan toleransi hidup beragama, 2) sikap mental dan perilaku yang memiliki iman dan taqwa, 3) rasa cinta dan rasa memiliki terhadap budaya dan kearifan lokal, 4) penguatan peran lembaga adat dan lembaga agama, 5) pengamalan dan pemahaman terhadap ajaran agama.

2. **Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan;**

Pembangunan pendidikan merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas hidup manusia. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan, salah satunya yaitu dengan menjadikan pendidikan sebagai prioritas pembangunan untuk 5 tahun kedepan. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan diarahkan pada peningkatan pelayanan pendidikan, infrastruktur dan mutu pendidikan. Melalui prioritas tersebut diharapkan akan terwujud: 1) peningkatan angka partisipasi pendidikan diantaranya, Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Sekolah, 2) menerapkan wajib belajar 9 tahun dan 12 tahun, 3) peningkatan kapasitas tenaga pendidik, 4) meningkatnya kualitas layanan pendidikan, 5) meningkatnya angka keberlanjutan pendidikan, 6) meningkatnya dan meratanya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, 7) terwujudnya pendidikan berkarakter.

3. **Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Pesisir Selatan;**

Prioritas peningkatan derajat kesehatan masyarakat diarahkan untuk mewujudkan tatanan hidup masyarakat yang sehat dengan gizi seimbang, hal ini dapat terlaksana melalui upaya-upaya diantaranya peningkatan pelayanan, infrastruktur dan kualitas SDM kesehatan. Dengan prioritas ini diharapkan akan terwujud: 1) kesadaran masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat, 2) peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan 3) perbaikan status gizi masyarakat, 4) menurunnya tingkat kematian ibu dan bayi, 5) meningkatnya angka harapan hidup, 6) meningkatnya pengendalian terhadap penyakit menular, 7) meningkatnya upaya penyehatan lingkungan.

4. Peningkatan Ekonomi Pangan Berbasis Komoditi Lokal yang Berdaya Saing;

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia sehingga pemenuhannya menjadi kewajiban bersama antara pemerintah dan masyarakat. Kebutuhan dan ketergantungan masyarakat akan pangan seperti beras masih sangat tinggi. Pemerintah berupaya agar ketergantungan tersebut dapat berkurang dengan melakukan kebijakan meningkatkan keanekaragaman konsumsi pangan. Kebijakan ini tidak hanya ditujukan untuk mengurangi ketergantungan pada beras, tetapi juga dimaksudkan untuk mengubah pola konsumsi masyarakat agar mengkonsumsi bahan pangan yang beranekaragam dan lebih bergizi. Untuk itu, dalam 5 tahun mendatang prioritas peningkatan ekonomi pangan berbasis komoditi lokal diarahkan untuk mewujudkan: 1) meningkatnya daya saing produk industri pangan, 2) berkembangnya panganekaragaman konsumsi pangan dengan komoditi lokal, 3) penerapan teknologi tepat guna dalam proses produksi, 4) meningkatkan kesempatan kerja pada sektor industri pangan.

5. Peningkatan Daya Tarik, Pemasaran, Industri dan Kelembagaan Pariwisata;

Prioritas Peningkatan daya tarik, pemasaran, industri dan kelembagaan pariwisata diarahkan untuk mengembangkan objek-objek wisata potensial seperti Mandeh, Carocok Tarusan, Jembatan Akar dan Kawasan Mandeh Rubiah menjadi objek wisata yang menarik. Dengan pengembangan pariwisata ini diharapkan: 1) peningkatan perekonomian masyarakat, 2)

tumbuh dan berkembangnya objek-objek wisata yang potensial, 3) terbukanya lapangan kerja di sektor pariwisata, 4) mewujudkan Pesisir Selatan sebagai tujuan wisata utama di Sumatera Barat, 5) pemasaran objek-objek wisata baik didalam maupun diluar negeri.

6. Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Kawasan Ekonomi Strategis;

Prioritas Pengembangan kawasan perdesaan dan kawasan ekonomi strategis diarahkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang berada di kawasan pedesaan dan kawasan-kawasan potensial, yang memberikan nilai tambah kepada daerah baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Melalui prioritas ini diharapkan akan terwujud: 1) terbangunnya infrastruktur publik, 2) adanya akses air bersih dan sanitasi, 3) munculnya kawasan strategis yang bernilai ekonomi, 4) meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

7. Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Rakyat Berbasis Lingkungan Hidup dan Kebencanaan;

Prioritas Pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat berbasis lingkungan hidup dan kebencanaan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menjaga kelestarian dan daya dukung sumberdaya alam untuk pembangunan berkelanjutan sehingga potensi sumberdaya yang sudah ada dapat dipertahankan untuk usaha ekonomi masyarakat. Dengan prioritas ini diharapkan : 1) terbangunnya sarana prasarana penunjang perekonomian masyarakat, 2) terwujud konservasi sumberdaya alam, 3) pengendalian kerusakan lingkungan, 4) penurunan pencemaran lingkungan, dan 5) terpeliharanya kearifan lingkungan.

8. Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengurangan Angka Pengangguran;

Prioritas Penurunan Tingkat kemiskinan dan pengurangan angka pengangguran diarahkan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin secara intensif. Melalui prioritas ini diharapkan akan terwujud: 1) mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran 2) terlaksananya program perlindungan sosial, 3) pemberian beasiswa bagi keluarga miskin, 4) meningkatnya akses dan produktivitas usaha mikro, 5) meningkatkan partisipasi angkatan kerja.

9. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Pelayanan Prima;

Prioritas reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan pelayanan prima didalam pemerintahan diarahkan pada penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance) sehingga profesionalitas pemerintahan dan pelayanan publik yang prima dapat dicapai. Melalui reformasi birokrasi ini akan terwujud: 1) tata pemerintahan yang baik, bersih, profesional dan bebas KKN, 2) terlaksananya pemerintahan yang transparan dan akuntabel, 3) terwujudnya tata pemerintahan yang aspiratif dan partisipatif, 4) terhimpunnya data statistik yang handal dan berdayaguna tinggi, dan 5) terwujudnya sinergi antara pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten/kota.

10. Pencegahan Tingkat Kejahatan, Kriminalitas dan Peredaran Obat Terlarang.

Prioritas Pencegahan tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat terlarang diarahkan untuk memperkuat struktur sosial dalam mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas serta peredaran obat-obat terlarang dilingkungan masyarakat. Diharapkan melalui prioritas ini akan terwujud : 1) kuatnya kelembagaan dan jaringan serta kebijakan daerah terhadap gender dan HAM, 2) pemberdayaan perempuan dalam berwirausaha, 3) meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan, 4) terciptanya keamanan dan kenyamanan dilingkungan masyarakat, 5) munculnya generasi muda yang mandiri dan berprestasi.

4.1.4. Keselarasan RPJMN 2015-2019 dan RPJMD Provinsi 2016-2021 dengan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021

Pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Pesisir Selatan merupakan satu kesatuan dengan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Pusat. Sehubungan dengan hal tersebut maka untuk mencapai keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara Pemerintah Pusat, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Pesisir Selatan, maka dokumen RPJMD harus mengacu dan selaras dengan RPJMN Tahun 2015-2021 dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat. Penyelarasan

dokumen RPJMD Pesisir Selatan ini dilakukan terhadap 3 Dimensi prioritas pembangunan Nasional dan 10 Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat.

Sinkronisasi prioritas pembangunan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Pesisir Selatan, secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3.

Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Pesisir Selatan

No	Prioritas Pembangunan Nasional Berdasarkan 3 Dimensi Pembangunan	Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat	Prioritas Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan
1.	Dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat a. Pendidikan b. Kesehatan c. Perumahan d. Mental dan Karakter	a. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan b. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat c. Pembangunan mental dan pengamalan agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat d. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan	a. Pengamalan agama, pelestarian budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat b. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan c. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat d. Pencegahan tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obat terlarang e. Pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan pelayanan prima
2.	Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan a. Kedaulatan Pangan b. Kedaulatan Energi & Ketenagalistrikan c. Kemaritiman dan Kelautan d. Pariwisata dan Industri	a. Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis b. Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur c. Pengembangan kemaritiman dan kelautan d. Pengembangan pariwisata industri, perdagangan, koperasi dan investasi e. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam	a. Peningkatan ekonomi pangan berbasis ekonomi lokal yang berdaya saing b. Peningkatan daya tarik, pemasaran, industri dan kelembagaan c. Pengembangan kawasan perdesaan dan kawasan ekonomi strategis d. Pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat berbasis lingkungan hidup dan kebencanaan
3	Dimensi pemerataan dan kewilayahan a. Antar kelompok Pendapatan b. Antar wilayah: (Desa, Pinggiran, Luar Jawa, Kawasan Timur)	Penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran, daerah tertinggal	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengurangan angka pengangguran

Sumber : RPJMN, RPJMD Prov. Sumbar 2016-2021 dan RPJMD kab. Pesisir Selatan 2016-2021

4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2019

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2019 dilakukan berdasarkan pada analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam RKPD Provinsi Sumatera Barat dan RKP Nasional tahun 2019.

4.2.1. Arah Kebijakan dan Prioritas Nasional Tahun 2019

A. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2019

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2019 (RPJMN 2015-2019) **“Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”**, maka sasaran dan target yang harus dicapai pada akhir tahun 2019, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,4-5,8 persen
2. Inflasi secara nasional berkisar antara 2,5 – 4,5 persen.
3. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5-9,5 persen.
4. IPM menjadi 71,98;
5. gini rasio pada kisaran 0,38-0,39;
6. tingkat pengangguran terbuka 4,8-5,2 persen.
7. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional; Sumatera 21,87 persen, Jawa 58,15 persen, Kalimantan 8,09 persen, Sulawesi 6,15 persen, Bali-Nusa Tenggara 3,22 persen, Maluku 0,52 persen Papua 2,01 persen.

B. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2019

Dalam mewujudkan pembangunan yang terarah dan focus maka prioritas pembangunan nasional tahun 2019 sesuai RKP adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar;
2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman;
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif;
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air melalui pelestarian lingkungan; dan
5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

Selanjutnya 5 (lima) prioritas pembangunan nasional dijabarkan ke dalam Program Prioritas yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Kegiatan Prioritas sebagai berikut :

Prioritas Nasional 1 : Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Dalam rangka mendukung prioritas nasional tersebut maka arah kebijakan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Mempercepat pengurangan kemiskinan
 - 1) memperkuat pelaksanaan bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran;
 - 2) memperkuat sistem jaminan sosial;
 - 3) memperkuat literasi untuk kesejahteraan;
 - 4) memperkuat reforma agraria; dan
 - 5) pemberian akses kelola sumber daya alam melalui perhutanan sosial.
- b. Meningkatkan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat
 - 1) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan;
 - 2) meningkatkan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana;
 - 3) mencegah dan pengendalian penyakit
 - 4) mempercepat penurunan stunting; dan
 - 5) meningkatkan “gerakan masyarakat hidup sehat”.
- c. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas
 - 1) menyediakan pendidik yang berkualitas dan merata;

- 2) menyediakan afirmasi pendidikan;
 - 3) memperkuat kelembagaan satuan pendidikan; dan
 - 4) meningkatkan kualitas pembelajaran dan akademik.
- d. Peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak
- 1) menyediakan akses hunian layak dan terjangkau;
 - 2) menyediakan akses infrastruktur dasar permukiman layak; dan
 - 3) meningkatkan kualitas lingkungan di permukiman.
- e. Meningkatkan tata kelola layanan dasar
- 1) memperkuat layanan dan rujukan satu pintu;
 - 2) memperkuat integrasi sistem administrasi kependudukan dan catatan sipil; dan
 - 3) mempercepat pencapaian SPM di daerah.

Prioritas Nasional 2 : Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Melalui Penguatan Konektivitas Dan Kemaritiman

Dalam rangka mendukung prioritas nasional tersebut maka arah kebijakan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan konektivitas
- 1) pembangunan konektivitas dan jaringan logistik nasional yang mendukung sektor unggulan; dan
 - 2) pengembangan transportasi perkotaan.
- b. Mengembangkan telekomunikasi dan informatika
- 1) pemerataan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informatika khususnya di daerah perbatasan dan tertinggal.
- c. Mengembangkan pusat kegiatan ekonomi di wilayah timur dan pengembangan pembangunan desa
- 1) Peningkatan aksesibilitas desa dan kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi.
- d. Melaksanakan pembangunan daerah afirmasi
- 1) Pengembangan aksesibilitas pada kawasan perbatasan dan tertinggal melalui penyediaan infrastruktur dan layanan transportasi.

- e. Melaksanakan pembangunan konektivitas untuk mendukung pembangunan sektor unggulan hulu-hilir perikanan
 - 1) Peningkatan produksi perikanan melalui pembangunan konektivitas logistik perikanan dan tata kelola kawasan perikanan.

Prioritas Nasional 3 : Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Melalui Pertanian, Industri Dan Jasa Produktif

Dalam rangka mendukung prioritas nasional tersebut maka arah kebijakan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan ekspor dan nilai tambah pertanian melalui peningkatan produktifitas, kualitas, serta dukungan kelembagaan dan sarana prasarana;
- b. Mendorong percepatan peningkatan nilai tambah industri pengolahan melalui perbaikan iklim usaha, peningkatan investasi, penguatan rantai/nilai dan pemanfaatan inovasi;
- c. Meningkatkan nilai tambah jasa produktif antara lain melalui pengembangan destinasi wisata, ekonomi kreatif dan digital, peningkatan ekspor terutama produk hilirisasi dan penguatan kemitraan;
- d. Mendorong percepatan peningkatan keahlian tenaga kerja melalui penguatan vokasi dan kompetensi, pengembangan kerjasama dunia usaha dan kewirausahaan;
- e. Mengembangkan IPTEK dan Inovasi untuk meningkatkan produktivitas antara lain melalui peningkatan SDM dan IPTEK, pengembangan litbang keilmuan.

Prioritas Nasional 4 : Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumberdaya air melalui pelestarian lingkungan

Prioritas nasional ini mengarahkan peningkatan kuantitas dan kualitas sumber-sumber energi, pangan dan air yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat untuk melakukan segala aktivitasnya. Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumberdaya air ini dilakukan melalui pelestarian lingkungan dengan beberapa arah kebijakan yang harus diperhatikan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan produksi energi primer;
- b. Meningkatkan penerapan energi baru terbarukan dalam bauran energi;
- c. Meningkatkan aksesibilitas air;
- d. Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi dan listrik;

- e. Mempertahankan dan memantapkan penyediaan pangan utama dalam negeri;
- f. Meningkatkan layanan pertanian antara lain melalui penyediaan sarpras, pembiayaan, penyuluhan dan pendampingan;
- g. Memperkuat distribusi dan stabilitas harga pangan dalam rangka meningkatkan akses pangan masyarakat;
- h. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat terutama untuk menurunkan kasus malnutrisi;
- i. Memantapkan pembangunan infrastruktur sumber daya air;
- j. Meningkatkan perlindungan sumber daya air dan ekosistemnya;
- k. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan air yang adil dan merata;
- l. Mempercepat regulasi dan pembangunan wilayah berbasis DAS; dan
- m. Meningkatkan kesadaran sumberdaya air.

Prioritas Nasional 5 : Stabilitas Keamanan Nasional Dan Kesuksesan Pemilu

Dalam rangka mendukung prioritas nasional tersebut maka arah kebijakan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kamtibmas dan keamanan siber
 - 1) meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan kepolisian;
 - 2) menyelesaikan konflik sosial;
 - 3) meningkatkan upaya pencehagan dan pemberantasan narkoba;
 - 4) meningkatkan pengamanan aktivitas siber; dan
 - 5) meningkatkan penanganan terorisme.
- b. Menjamin kesuksesan pemilu
 - 1) meningkatkan kualitas lembaga demokrasi;
 - 2) menjamin terlaksananya hak memilih dan dipilih;
 - 3) mewujudkan birokrasi yang netral dalam Pemilu 2019; dan
 - 4) melaksanakan tahapan pemilu yang berkualitas.
- c. Memperkuat pertahanan wilayah nasional
 - 1) mengamankan wilayah yuridikasi nasional;
 - 2) pengamanan kawasan perbatasan dan kedaulatan negara; dan
 - 3) penguatan pertahanan berdaya gentar tinggi.
- d. Meningkatkan Kepastian hukum dan reformasi birokrasi
 - 1) meningkatkan kualitas penegakan hukum;

- 2) meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi;
 - 3) meningkatkan pelaksanaan e-Government;
 - 4) mengoptimalkan Talent Management Nasional;
 - 5) meningkatkan pengawasan program prioritas nasional.
- e. Memperkuat efektivitas diplomasi
- 1) memperkuat perlindungan dan pelayanan WNI di luar negeri;
 - 2) memperkuat diplomasi maritim, politik, dan keamanan;
 - 3) memperkuat diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan internasional; dan
 - 4) pemantapan peran Indonesia di ASEAN.

4.2.2. Arah Kebijakan dan Prioritas Provinsi Tahun 2019

Tema pembangunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 yaitu, **”Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Dasar, Peningkatan Investasi, Infrastruktur untuk Menurunkan Kemiskinan dan Daerah Tertinggal”**. Berdasarkan tema tersebut, maka arah kebijakan pembangunan tahun 2019 difokuskan kepada peningkatan kualitas pelayanan dan mempercepat pengembangan investasi dengan tetap meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan. Prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 merupakan tindak lanjut atau dalam rangka mendukung program pembangunan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Setelah memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional tahun 2019, maka prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 dirumuskan sebagaimana tertuang dalam tabel 4.4 berikut:

Tabel. 4.4
Persandingan Prioritas Pembangunan Nasional dan
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

No.	Prioritas Pembangunan RKP	Prioritas Pembangunan RKPD Sumatera Barat	Ket
1.	Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar	Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan	Prioritas 3
		Pembangunan mental dan pengamalan agama dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi kitabullah (ABS-SBK)	Prioritas 1

No.	Prioritas Pembangunan RKP	Prioritas Pembangunan RKPD Sumatera Barat	Ket
		dalam kehidupan masyarakat	
		Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Prioritas 4
		Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal	Prioritas 8
		Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan	Prioritas 2
2.	Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman	Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur	Prioritas 9
		Peningkatan Pemanfaatan Potensi Kemaritiman dan Kelautan	Prioritas 7
		Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal	Prioritas 8
3	Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industry dan jasa produktif	Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Peningkatan Investasi	Prioritas 6
4	Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumberdaya air melalui pelestarian lingkungan	Peningkatan Produksi Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis.	Prioritas 5
		Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur	Prioritas 9
		Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana	Prioritas 10
5	Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.	Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan	Prioritas 2 (Kesbangpol, Satpol PP)

Sumber: RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

Selanjutnya, agar masing-masing prioritas pembangunan daerah tersebut me, sebagai berikut:

1. Pembangunan mental dan pengamalan agama dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat

Pembangunan mental dan pengamalan agama dan adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) diarahkan untuk pencapaian: 1) Masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya serta punya etos kerja tinggi dan produktif, 2) Kehidupan masyarakat yang harmonis, toleran, dan cinta damai, 3) Pengamalan nilai-nilai adat dan agama dalam kehidupan sosial ekonomi, 4) Penurunan tingkat konflik dan kekerasan dalam masyarakat, 5) Pewarisan nilai-nilai kearifan adat Minangkabau, 6)

Optimalisasi peran lembaga-lembaga keagamaan dan lembaga adat, dan 7) Penurunan perbuatan maksiat.

Sasaran yang ingin dicapai adalah:

- 1) Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat
- 2) Meningkatnya kualitas kehidupan beragama, dan kerukunan antar umat beragama
- 3) Berkurangnya penyakit masyarakat (Pekat)
- 4) Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat dalam penanganan masalah sosial
- 5) Penguatan lembaga agama dan adat dalam tata kehidupan masyarakat
- 6) Meningkatnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai adat dan budaya dalam masyarakat

2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan

Prioritas ini diarahkan pada penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga profesionalitas pemerintahan dan pelayanan publik yang prima dapat dicapai. Dengan reformasi birokrasi akan dicapai : 1) Tata pemerintahan yang baik melalui pelayanan prima, 2) Pemerintahan yang bersih dan profesional, 3) Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan bebas KKN, 4) Tata pemerintahan yang aspiratif dan partisipatif, 5) Penyediaan data statistik yang handal dan berdayaguna tinggi, 6) Perencanaan yang partisipatif dan akuntabel, 7) Sinergi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, dan pembangunan lintas sektor.

Sasaran yang hendak dicapai Prioritas ini adalah:

- 1) Meningkatnya kapasitas dan manajemen aparatur
- 2) Meningkatnya integritas dan kinerja aparatur
- 3) Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
- 4) Meningkatnya sinergitas antara pelaku pembangunan dalam pencapaian sasaran pembangunan
- 5) Meningkatnya kualitas pelayanan publik

3. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan

Prioritas ini diarahkan pada penuntasan wajib belajar 9 tahun, perintisan wajib belajar 12 tahun, dan peningkatan standar pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi tuntutan persyaratan lapangan kerja dan atau dapat menciptakan lapangan kerja. Dengan prioritas tersebut diharapkan akan dicapai: 1) Penuntasan wajib belajar 9 tahun, 2) Perintisan wajib belajar 12 tahun, 3) Peningkatan angka partisipasi pendidikan, 4) Pelaksanaan pola pendidikan berkarakter dan berkualitas, 5) Lahirnya sentra pendidikan unggul di Sumatera Barat, 6) Pendidikan spesifik sesuai dengan bakat sumberdaya manusia, 7) Lembaga pendidikan penghasil sumberdaya manusia yang profesional, 8) Wirausahawan baru yang berkapasitas nasional dan global, 9) Pengembangan penelitian dan penerapan IPTEK, 10) Peningkatan partisipasi perempuan dan kesejahteraan keluarga, 11) Peningkatan kualitas pemuda dan pembangunan olah raga, 12) Sumatera Barat sebagai daerah tujuan pendidikan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah:

- 1) Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat
- 2) Meningkatnya integritas peserta didik
- 3) Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan
- 4) Meningkatnya daya saing lulusan pendidikan menengah untuk masuk perguruan tinggi atau pasar bekerja
- 5) Meningkatnya minat baca dan budaya membaca
- 6) Meningkatnya fungsi penelitian dan pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
- 7) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara merata
- 8) Meningkatnya kualitas kependudukan, pem-bangunan keluarga dan Keluarga Berencana
- 9) Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berolah raga
- 10) Meningkatnya kapasitas pemuda dan kepemimpinan pemuda dalam pembangunan
- 11) Meningkatnya pembangunan gender dan pemberdayaan gender serta pemenuhan hak anak

4. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

Prioritas ini diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan berkecukupan gizi. Dengan prioritas ini diharapkan akan dicapai: 1) Penurunan angka kesakitan dan kematian, 2) Peningkatan angka harapan hidup, 3) Penurunan tingkat kematian ibu melahirkan, 4) Menurunnya tingkat kematian bayi, 5) Penurunan persentase masyarakat gizi kurang, 6) Peningkatan pola hidup bersih dan sehat, 7) Peningkatan layanan rumah sakit dengan standar pelayanan yang terakreditasi paripurna.

Sasaran yang hendak dicapai:

- 1) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara merata
- 2) Meningkatnya kualitas kependudukan, pem-bangunan keluarga dan Keluarga Berencana
- 3) Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berolah raga
- 4) Meningkatnya kapasitas pemuda dan kepemimpinan pemuda dalam pembangunan
- 5) Meningkatnya pembangunan gender dan pemberdayaan gender serta pemenuhan hak anak

5. Peningkatan Produksi Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis

Prioritas ini diarahkan pada pengembangan dan peningkatan produksi pangan untuk menunjang kebijakan nasional dibidang kedaulatan pangan serta mengembangkan sistem agribisnis dalam pembangunan pertanian dalam arti luas (tanaman pangan, peternakan dan perkebunan) yang dapat memberikan nilai tambah (*value added*) tinggi, sehingga masyarakat dapat menikmati tingkat keuntungan yang tinggi dari gabungan hasil usaha pertaniannya melalui berbagai komoditi unggulan. Dengan prioritas tersebut diharapkan dapat dicapai: 1) Peningkatan ketahanan dan keragaman konsumsi pangan, 2) Pengembangan kawasan sentra produksi pertanian, 3) Pengembangan agroindustri dan agribisnis sesuai potensi daerah, 4) Sumatera Barat sebagai salah satu provinsi penghasil pangan nasional, 5) Penerapan teknologi pertanian tepat guna, 6) Peningkatan pemasaran hasil produksi

pertanian, 7) Pola pembangunan pertanian berbasis kawasan dan berbasis komoditi unggulan.

Sasaran yang hendak dicapai:

- 1) Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan
- 2) Meningkatnya usaha pertanian dengan sistem agribisnis
- 3) Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan

6. Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Peningkatan Investasi.

Prioritas ini diarahkan untuk mengembangkan pariwisata, industri skala kecil dan menengah dan pengembangan Koperasi dan UMKM serta peningkatan investasi. Dengan pelaksanaan prioritas ini diharapkan dicapai:

- 1) Pengembangan objek dan kawasan wisata yang potensial, 2) Peningkatan sarana dan prasarana serta pelayanan kepariwisataan, 3) Sumatera Barat sebagai destinasi utama pariwisata berbasis agama dan budaya, 4) Pengembangan sentra industri dan peningkatan penerapan teknologi tepat guna dalam proses produksi, 5) Peningkatan daya saing produk industri dan jasa, 6) Peningkatan jenis, volume dan nilai ekspor serta ekspor produk industri, 7) Peningkatan kesempatan kerja pada sektor industri dan jasa, 8) Peningkatan peran Koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah, 8) Peningkatan Investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyediaan kesempatan kerja.

Sasaran yang hendak dicapai :

- 1) Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah; dan
- 2) Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara.

7. Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan

Prioritas ini diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan untuk peningkatan pembangunan daerah. Dengan pelaksanaan prioritas ini diharapkan dicapai: 1) Peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan, 2) Peningkatan produksi perikanan laut baik tangkap maupun budidaya, 3) Pengembangan wisata bahari, 4) Optimalisasi

pengelolaan ruang laut dan pulau-pulau kecil, 5) Peningkatan kerjasama regional lintas pesisir wilayah laut.

Sasaran yang hendak dicapai yaitu Meningkatnya pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan dan kemaritiman

8. Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal

Prioritas ini diarahkan untuk mengurangi tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan dan ketimpangan pembangunan daerah. Dengan prioritas ini diharapkan akan dicapai: 1) Penurunan jumlah penduduk yang menganggur, 2) Penurunan jumlah penduduk miskin, 3) Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin 4) Penurunan tingkat penyandang masalah kesejahteraan sosial, 5) Peningkatan aksesibilitas daerah tertinggal untuk bisa lepas dari ketertinggalan.

Sasaran yang hendak dicapai:

- 1) Menurunnya jumlah penduduk miskin
- 2) Menurunnya tingkat pengangguran terbuka
- 3) Menuntaskan penanganan daerah tertinggal
- 4) Menurunnya tingkat penyandang masalah kesejahteraan sosial

9. Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur

Prioritas ini diarahkan untuk memenuhi kebutuhan energi dan infrastruktur dalam rangka percepatan pembangunan dan daya saing daerah. Dengan pelaksanaan prioritas ini diharapkan akan dicapai: 1) Peningkatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan dengan mendorong investasi di bidang energi baru dan terbarukan serta pembangunan sarana dan prasarana pemanfaatan energi baru dan terbarukan untuk pembangkit listrik, 2) Peningkatan penyediaan listrik di daerah terpencil, terisolir dan perbatasan, 3) Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas wilayah, 4) Peningkatan pelayanan transportasi dan keselamatan lalu lintas, 5) Peningkatan kuantitas dan kualitas pengelolaan sumber daya air, 6) Peningkatan prasarana umum pada kawasan pemukiman

Sasaran yang hendak dicapai:

- 1) Meningkatnya Kualitas Jalan Provinsi

- 2) Meningkatnya pelayanan perhubungan/transportasi
- 3) Meningkatnya keselamatan lalu lintas,
- 4) Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya air
- 5) Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana umum pada kawasan pemukiman/ perumahan, lingkungan dan bangunan gedung
- 6) Meningkatnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT)

10. Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Alam

Prioritas ini diarahkan untuk mengurangi kerusakan lingkungan dan menekan kerugian akibat bencana. Dengan pelaksanaan prioritas ini diharapkan akan dicapai: 1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, 2) Peningkatan kesesuaian rencana pembangunan dengan tata ruang, 3) Peningkatan kualitas lahan dan fungsi ekosistem, 4) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana, 5) Peningkatan penanganan tanggap darurat dan pemulihan wilayah atau daerah pasca bencana, 6) Peningkatan kearifan lokal dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan.

Sasaran yang hendak dicapai:

- 1) Meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dengan tata ruang
- 2) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
- 3) Terpeliharanya fungsi ekosistem dan kualitas lahan
- 4) Berkurangnya resiko bencana
- 5) Meningkatnya penanganan tanggap darurat dan pemulihan wilayah/daerah pasca bencana
- 6) Terpeliharanya debit sungai
- 7) Meningkatnya kualitas ekosistem pesisir dan laut

4.2.3. Arah Kebijakan dan Prioritas Kabupaten Tahun 2019

A. Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019

Beberapa permasalahan yang dihadapi dan menjadi tantangan Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang disebabkan oleh:
 - a. belum optimalnya peran penyelenggara pemerintahan dan kualitas aparatur pemerintahan dalam memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat;
 - b. belum meratanya akses layanan pendidikan yang bermutu disebabkan oleh kurangnya prasarana dan sarana, terbatasnya jumlah dan mutu tenaga pengajar, serta belum meratanya persebaran tenaga pengajar;
 - c. belum meratanya akses layanan kesehatan yang bermutu sebagai akibat terbatasnya prasarana dan sarana pelayanan kesehatan, belum meratanya jumlah dan persebaran tenaga kesehatan, serta kurangnya penerapan budaya hidup bersih dan perilaku hidup sehat.
2. Belum optimalnya pengembangan ekonomi daerah yang disebabkan oleh:
 - a. terbatasnya produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari pertanian yang disebabkan oleh belum optimalnya pengelolaan produk hasil pertanian.
 - b. belum optimalnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan akibat terbatasnya akses permodalan, kurangnya penyuluhan, tingginya fluktuasi harga pasar, terbatasnya prasarana pelabuhan dan terbatasnya industri pengolahan hasil perikanan;
 - c. belum optimalnya pengelolaan sektor pariwisata .
3. Belum tertatanya infrastruktur daerah yang disebabkan oleh:
 - a. terbatasnya keterkaitan spasial dan fungsional antara pusat-pusat permukiman dan pusat-pusat pertumbuhan wilayah Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. belum meratanya pembangunan jalan arteri primer (jalan utama), jalan lingkungan dan arteri sekunder yang menghubungkan antarnagari dan antarkecamatan;
 - c. terbatasnya transportasi laut terutama dalam menghubungkan antar pulau;
 - d. belum adanya keterpaduan sistem transportasi yang menghubungkan

- seluruh wilayah nagari dan kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan;
- e. terbatasnya jumlah dan mutu sarana prasarana ketenagalistrikan dan telekomunikasi.
 - f. masih belum meratanya jaringan irigasi kondisi baik.
 - g. belum optimalnya penataan rumah tidak layak huni.
4. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran pemangku kepentingan terhadap kelestarian lingkungan sehingga menyebabkan timbulnya konflik pemanfaatan lahan dan menimbulkan kecenderungan penurunan daya dukung lingkungan.
 5. Belum optimalnya pelaksanaan revitalisasi nilai-nilai kearifan lokal dan implementasi prinsip ABS-SBK.

Berdasarkan analisis permasalahan dan tinjauan lingkungan strategis, maka dirumuskan isu-isu strategis daerah tahun 2019 sebagai berikut:

1. Meningkatnya peran teknologi informasi dalam peningkatan kualitas layanan publik dan pemantapan implementasi e-government sampai ke tingkat nagari.
2. Pengarusutamaan pendidikan karakter dalam upaya peningkatan mutu dan daya saing pendidikan dasar.
3. Peningkatan cakupan, mutu dan kemudahan layanan kesehatan.
4. Peningkatan konektivitas antar wilayah, peningkatan keterpaduan transportasi perdesaaan, perkotaan dan keselamatan transportasi.
5. Peningkatan kualitas, kompetensi dan budaya kerja aparatur di semua bidang, di tingkat kabupaten, kecamatan dan nagari.
6. Peningkatan nilai tambah produk dan jasa dari hasil pertanian, perikanan, industri dan ekonomi kreatif.
7. Memanfaatkan bonus demografi dengan penciptaan kesempatan kerja dan penyiapan generasi muda terampil, kreatif dan kompetitif serta memiliki semangat wirausaha.
8. Penguatan peran keluarga dan pemangku adat dalam mencegah dalam mencegah tindak kriminal, penyakit masyarakat dan penyalahgunaan narkoba.

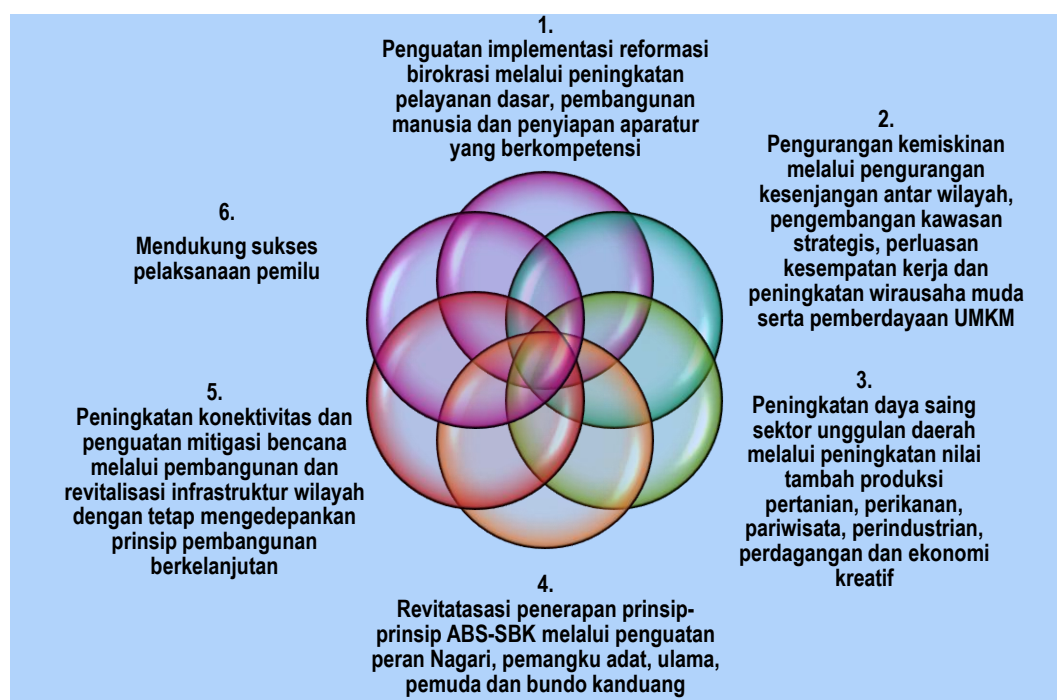
9. Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam upaya membangun iklim investasi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah.
10. Penyelenggaraan pesta demokrasi tahun 2019

B. Tema, Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Tahun 2019

Dengan memperhatikan analisis terhadap permasalahan utama dan isu strategis pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019, maka masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan menyepakati tema pembangunan tahun 2019 yaitu, **”Pemerataan Pembangunan dan Peningkatan Pelayanan Publik untuk Pertumbuhan Lebih Berkualitas dan Penurunan Kemiskinan”**.

Tema pembangunan tersebut akan dilaksanakan secara fokus dan terarah dengan berpedoman kepada 6 (enam) prioritas pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019 yang diformulasikan seperti pada Gambar 4.2 berikut:

Gambar 4.2
Prioritas Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019



Prioritas 1 : Penguatan implementasi reformasi birokrasi melalui peningkatan pelayanan dasar, pembangunan manusia dan penyiapan aparatur yang berkompetensi

Dalam rangka mendukung pencapaian prioritas tersebut, maka arah kebijakan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mempertahankan opini BPK.

2. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.
3. Mewujudkan perencanaan yang partisipatif, aplikatif dan terintegrasi.
4. Meningkatkan pelaksanaan dan pengawasan fungsi perangkat daerah.
5. Meningkatkan standar kualitas pelayanan di seluruh bidang.
6. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar serta rujukan.
7. Meningkatkan upaya pencegahan penularan penyakit melalui promosi budaya hidup sehat.
8. Memperluas akses dan pemenuhan sarana prasarana pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah.
9. Mengembangkan pendidikan karakter.
10. Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

Program prioritas yang akan dilaksanakan tahun 2019 untuk mendukung arah kebijakan tersebut antara lain:

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
3. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan;
4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;
6. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur ;
7. Program Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
8. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan;
9. Program Penataan Administrasi Kependudukan;
10. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
11. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
12. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;
13. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana Puskesmas/ Pustu/Rumah Sakit dan Jaringannya;
14. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak;
15. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan;
16. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD;

17. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;
18. Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan.

Prioritas 2 : Pengurangan kemiskinan melalui pengurangan kesenjangan antar wilayah, pengembangan kawasan strategis, perluasan kesempatan kerja dan peningkatan wirausaha muda serta pemberdayaan UMKM

Dalam rangka mendukung pencapaian prioritas tersebut, maka arah kebijakan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan sarana dan prasarana dasar perhubungan.
2. Menyediakan fasilitas terminal yang layak.
3. Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan.
4. Pengembangan jaringan transportasi.
5. Meningkatkan pembangunan perumahan dan pemukiman.
6. Meningkatkan akses layanan air limbah domestik dan non domestik.
7. Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan limbah.
8. Mendorong peningkatan layanan dan akses masyarakat terhadap air minum.
9. Mempercepat pemerataan sarana dan prasarana di Pesisir Selatan.
10. Pembinaan Kelembagaan koperasi dan UMKM.
11. Pengembangan kerjasama dan kemitraan koperasi dan UMKM dengan lembaga ekonomi lainnya.

Program prioritas yang akan dilaksanakan tahun 2019 untuk mendukung arah kebijakan tersebut antara lain:

1. Program Pengembangan Perumahan;
2. Program Peningkatan Akses Informasi, Komunikasi dan Telekomunikasi;
3. Program pengembangan Kawasan Pedesaan;
4. Program Lingkungan Sehat Perumahan;
5. Program Pengembangan Lingkungan Sehat;
6. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah;
7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;
8. Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT); dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya;
9. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
10. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM

11. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
12. Program Peningkatan Kesempatan Kerja.

Prioritas 3 : Peningkatan daya saing sektor unggulan daerah melalui peningkatan nilai tambah produksi pertanian, perikanan, pariwisata, perindustrian, perdagangan dan ekonomi kreatif

Dalam rangka mendukung pencapaian prioritas tersebut, maka arah kebijakan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan agribisnis hulu (up stream agribusiness) yang mencakup: mesin, peralatan pertanian, pupuk, bibit dan lain-lain.
2. Pengembangan usaha tani/pertanian primer (on farm agribusiness) yang mencakup usaha: tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan.
3. Penguatan agribisnis hilir (down stream agribusiness) yang meliputi: industri-industri pengolahan dan pemasarannya, termasuk perdagangan untuk kegiatan ekspor.
4. Penguatan jasa-jasa penunjang (kegiatan yang menyediakan jasa bagi agribisnis) dalam bentuk perkreditan, asuransi, transportasi, penelitian dan pengembangan, pendidikan, penyuluhan, infrastruktur, dan kebijakan pemerintah.
5. Peningkatan ketersediaan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan.
6. Peningkatan diversifikasi konsumsi dan keamanan pangan.
7. Peningkatan sentra IKM untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing produk.
8. Pembangunan sentra IKM.
9. Revitalisasi Pasar tradisional.
10. Peningkatan sarana penunjang pariwisata.
11. Perluasan jaringan promosi dan pemasaran wisata.
12. Pengembangan industri penunjang pariwisata.
13. Peningkatan kapasitas pelaku jasa wisata.

Program prioritas yang akan dilaksanakan tahun 2019 untuk mendukung arah kebijakan tersebut antara lain:

1. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan;
3. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan;
4. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan;
5. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian /Perkebunan;
6. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;
7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak;
8. Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap;
9. Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan;
10. Program Pengembangan Budidaya Perikanan;
11. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
12. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri;
13. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri;
14. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;
15. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif;
16. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
17. Program Pengembangan Pemasaran Wisata.

Prioritas 4 : Revitalisasi penerapan prinsip-prinsip ABS-SBK melalui penguatan peran Nagari, pemangku adat, ulama, pemuda dan bundo kanduang

Dalam rangka mendukung pencapaian prioritas tersebut, maka arah kebijakan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Revitalisasi penerapan nilai-nilai ABS-SBK di masyarakat.
2. Peningkatan implementasi budaya pendidikan karakter sebagai muatan lokal.
3. Peningkatan kapasitas dan kualitas lembaga agama, lembaga sosial keagamaan dan lembaga adat dalam melakukan bimbingan kepada masyarakat.
4. Peningkatan pelaksanaan event keagamaan.
5. Peningkatan Event-event seni dan budaya.
6. Pelestarian cagar budaya.
7. Peningkatan dan pemberdayaan masyarakat dalam mengurangi trantibmastibum, kejahatan dan kriminalitas.

8. Peningkatan peran LKAAM, KAN, dan MUI dalam mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obat terlarang.
9. Penguatan kelembagaan dan jaringan serta pembuatan regulasi daerah yang responsif gender dan pemenuhan hak-hak dasar.
10. Peningkatan pemahaman kelembagaan masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan.
11. Peningkatan peran masyarakat sipil.
12. Peningkatan peran dan kapasitas pemuda dalam pembangunan.
13. Pemasyarakatan olahraga.
14. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga.

Program prioritas yang akan dilaksanakan tahun 2019 untuk mendukung arah kebijakan tersebut antara lain :

1. Program Pengembangan Nilai Budaya;
2. Program Peningkatan Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Desa;
3. Program Pemberdayaan Lembaga Sosial Dan Ekonomi Masyarakat/ Nagari;
4. Program Peningkatan IMTAQ;
5. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat);
6. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal;
7. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga;
8. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaaan;
9. Program penguatan dan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak (PUG).

Prioritas 5 : Peningkatan konektivitas dan penguatan mitigasi bencana melalui pembangunan dan revitalisasi infrastruktur wilayah dengan tetap mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan

Dalam rangka mendukung pencapaian prioritas tersebut, maka arah kebijakan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan dan jembatan.
2. Membangun dan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada serta ditunjang dengan meningkatkan pengelolaan sistim irigasi partisipatif

3. Memantapkan manajemen penanggulangan bencana untuk mengurangi risiko bencana.
4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana umum.
5. Meningkatkan akses layanan air limbah domestik dan non domestik.
6. Mempercepat pemerataan sarana dan prasarana di Pesisir Selatan.

Program prioritas yang akan dilaksanakan tahun 2019 untuk mendukung arah kebijakan tersebut antara lain:

1. Program Pembangunan / Peningkatan Jalan dan Jembatan;
2. Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong- Gorong;
3. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jar. Pengairan Lainnya;
4. Program Pengendalian Banjir;
5. Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana;
6. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran;
7. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
8. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
9. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
10. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;
11. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.

Prioritas 6 : Mendukung sukses pelaksanaan pemilu tahun 2019

Dalam rangka mendukung pencapaian prioritas tersebut, maka arah kebijakan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat konsolidasi aparatur dari tingkat kabupaten, kecamatan dan nagari serta dengan masyarakat.
2. Memperluas keamanan dan kenyamanan lingkungan.
3. Melakukan pemantauan berkala terhadap kamtibmas.
4. Menjalinkan koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan aparat keamanan.

Program prioritas yang akan dilaksanakan tahun 2019 untuk mendukung arah kebijakan tersebut antara lain :

1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
2. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan.

4.3. Inovasi Perencanaan Pembangunan dan Pelayanan Publik Tahun 2019

Dalam upaya mewujudkan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang maju, unggul, agamis dan sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam visi RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021, serta unyuk mencapai pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik untuk pertumbuhan lebih berkualitas dan penurunan kemiskinan, sesuai dengan tema pembangunan tahun 2019 maka Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan bersama masyarakat dan seluruh *stakeholder* terkait mencoba merumuskan beberapa terobosan dan inovasi program pembangunan dan pelayanan public untuk tahun 2019. Beberapa inovasi yang akan diimplementasikan diantaranya sebagai berikut :

A. Inovasi Dalam Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran

1. Integrasi Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Secara Online

Dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah khususnya dalam penyusunan RKPD sehingga dapat menyajikan rencana pembangunan yang berkualitas, aspiratif dan transparan maka Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mencoba memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat bantu dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Dengan teknologi informasi ini dibangunlah sistem perencanaan pembangunan secara online (e-planning).

Aplikasi ini telah mencakup penjangkauan usulan mulai dari tingkat nagari sehingga diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat antara lain:

1. Memperdekat jarak dan waktu, dimana seluruh stakeholder dapat menyampaikan usulan dari kantor dan rumah masing-masing karena aplikasi ini dapat diakses 24 jam melalui jaringan smartcity Pesisir Selatan dan Jaringan Internet serta dapat diakses menggunakan smartphone.
2. Menjaga sinkronisasi, dimana tujuan, sasaran, program, kegiatan beserta indikator kinerja dan target yang diamanahkan oleh RPJMD akan lebih mudah dikawal keselarasannya dengan Renstra dan Renja Perangkat Daerah.

3. Mengawal konsistensi, dimana dengan terintegrasinya aplikasi ini dengan aplikasi penganggaran maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Renja Perangkat daerah akan langsung mengalir datanya menjadi bahan untuk menyusun KUA/PPAS dan RKA-PD.
4. Mempermudah stakeholder dalam menyampaikan usulan karena aplikasi dilengkapi dengan fitur :
 - 1) Kamus Usulan.
Fitur bantuan bagi pemangku kepentingan yang menyampaikan usulan untuk memilih dan memilih program, kegiatan dan perangkat daerah terkait sehingga dapat meminimalkan kesalahan penyampaian usulan.
 - 2) HSPK, ASB dan Standar Harga.
Agar usulan yang disampaikan rasional maka pengusul akan mempedomani unit cost masing-masing paket pekerjaan yang telah disesuaikan di aplikasi dengan HSPK, ASB dan Standar Harga.
 - 3) Data spasial usulan
e-planning dilengkapi dengan fitur lokasi usulan dalam bentuk titik koordinat. Saat ini masih dilakukan pengembangan untuk mengintegrasikan data koordinat usulan stakeholder ke sistem peta geospasial (GIS).
 - 4) Penataan Nomenklatur Kegiatan
Pada e-planning dilakukan penataan nomenklatur kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri 13 tahun 2006.

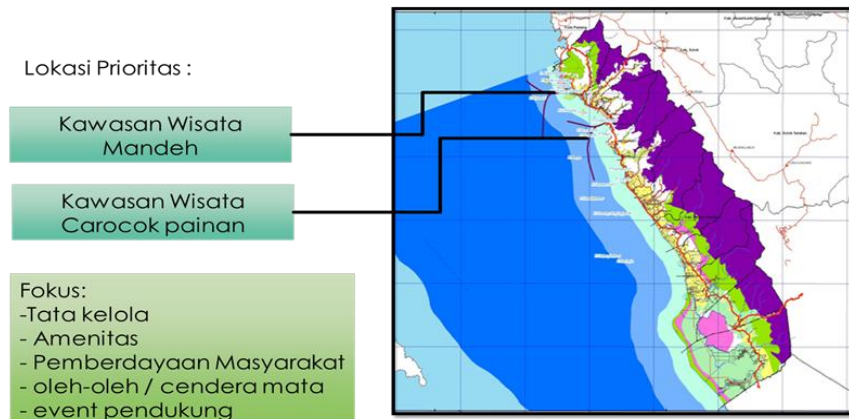
2. Program Pembangunan Terintegrasi

Dalam upaya meningkatkan daya ungkit pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah serta sebagai perwujudan dari pendekatan perencanaan yang holistik, tematik, integrative dan spasial maka pada tahun 2019 direncanakan pelaksanaan 5 (lima) Program Pembangunan terintegrasi. Terobosan ini mengangakat program pembangunan yang dengan secara tematik pada beberapa lokasi prioritas yang dosepakati bersama untuk didukung oleh seluruh Perangkat Daerah. Program Pembangunan terintegrasi Tahun 2019 yang dicanangkan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kepariwisata

Target pemerintah daerah untuk menjadikan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai destinasi wisata utama nasional membutuhkan sinergi seluruh stake holder (Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, Nagari dan masyarakat). Untuk itu perlu dilakukan perencanaan terpadu untuk menyiapkan amenities objek wisata dan kemudian dukungan event-event sebagai sarana promosi. Program ini ditujukan pada 2 (dua) kawasan prioritas yaitu: Kawasan Pantai Carocok - Bukit Langkisau dan Kawasan Mandeh. Fokus intervensi menyangkut pembenahan tata kelola objek, pemenuhan amenities, pemberdayaan masyarakat, penyediaan oleh-oleh dan kuliner serta event-event dan promosi.

Gambar 4.2
Peta Lokasi Prioritas Program Terintegrasi
Pengembangan Pariwisata

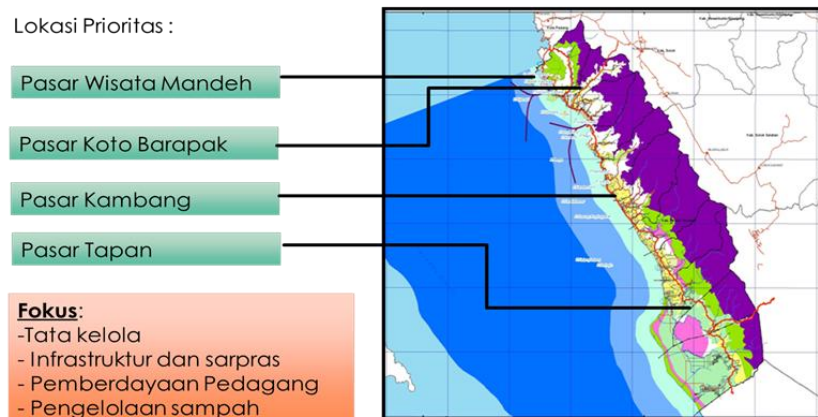


b. Program Pengembangan dan Revitalisasi Pasar Rakyat

Salah satu program unggulan daerah tahun 2016-2021 adalah pengembangan dan revitalisasi pasar dengan sasaran menjadikan pasar-pasar rakyat di Kabupaten Pesisir Selatan menuju kriteria SNI. Berbagai upaya dilakukan salah satunya dengan memperbesar porsi anggaran untuk pembangunan pasar. Namun dalam pelaksanaannya masih belum bersinergi antar perangkat daerah

yang mengakibatkan lambatnya pembangunan serta tidak tuntasnya permasalahan. Karena itu pada tahun 2019 diambil langkah strategis dengan melakukan perencanaan terpadu terhadap 4 lokasi pasar rakyat prioritas yaitu: Pasar Wisata Mandeh, Pasar Koto Barapak, Pasar Kambang dan Pasar Tapan. Sementara itu revitalisasi dan pembangunan gedung pasar juga tetap dilanjutkan pada Pasar Batang Kapas, Pasar Sungai Sirah Silaut dan Pasar Surantiah. Fokus intervensi dalam program ini adalah terkait perbaikan tata kelola, pemenuhan infrastruktur dan sarana/prasarana penunjang, pemberdayaan dan pengelolaan persampahan. Dengan program terintegrasi ini maka diharapkan pasar rakyat dapat menjadi pusat perputaran ekonomi masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan yang berkualitas.

Gambar 4.3
Peta Lokasi Prioritas Program Terintegrasi Pengembangan dan Revitalisasi Pasar Rakyat



c. Program Pengembangan Pertanian Organik

Dalam rangka meningkatkan nilai tambah produksi sektor pertanian dengan konsep pembangunan berkelanjutan, maka pada tahun 2019 digagas pengembangan pertanian organik dengan lokasi prioritas di Kecamatan Bayang Utara. Program ini dilakukan secara terintegrasi lintas stakeholder dengan dimotori oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan,

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Camat Bayang Utara, LSM IWARSI serta dukungan Dana Nagari. Produk unggulan yang akan dikembangkan pada tahun 2019 adalah padi organik, kacang dilan dan kopi. Program ini akan dipadukan dengan teknologi budidaya padi SRI.

Gambar 4.4

Peta Lokasi Prioritas Program Terintegrasi Pengembangan Pertanian Organik

Lokasi Prioritas :

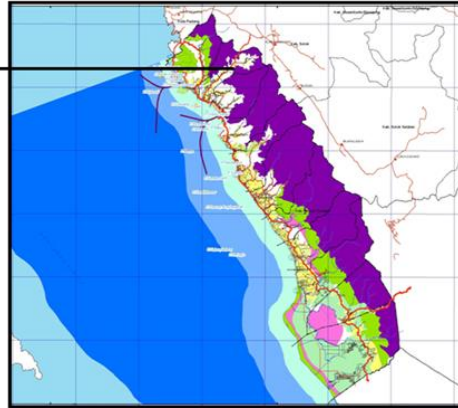
Kecamatan Bayang Utara

Produk Unggulan:

-Padi Organik
-Kacang Dilan
-Kopi

Fokus:

-Infrastruktur dan sarpras:
JUT, Jalan produksi, irigasi,
UPPO,
- Pemberdayaan masyarakat
-Hilirisasi Produk dan sertifikasi produk

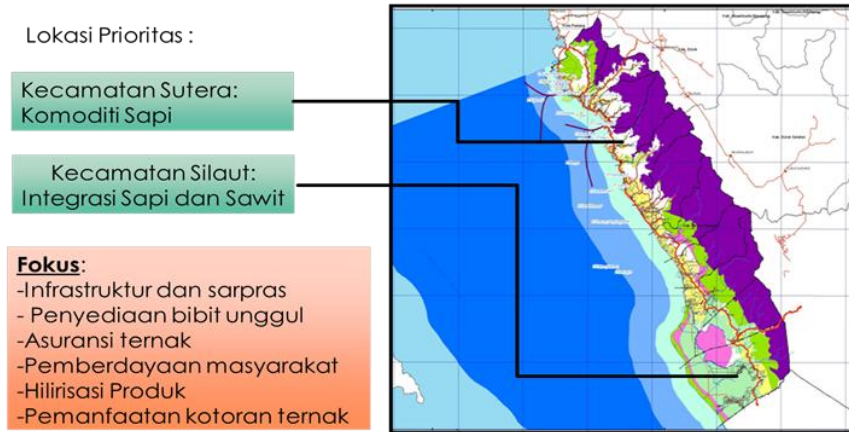


d. Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis Komoditi

Program pengembangan kawasan perdesaan berbasis komoditi difokuskan pada dua lokasi (kawasan) prioritas yaitu: Kawasan Pengembangan Peternakan Sapi di Sutera dan Kawasan Pengembangan Sapi terintegrasi Sawit di Silaut. Program yang juga mendapat dukungan dari Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Kementerian Pertanian ini fokus pada upaya peningkatan produksi sapi pesisir melalui penyediaan bibit unggul (inseminasi buatan), pencegahan penyakit ternak, asuransi ternak serta peningkatan nilai tambah kotoran ternak untuk pupuk dan biogas.

Gambar 4.5

Peta Lokasi Prioritas Program Terintegrasi Pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis Komoditi

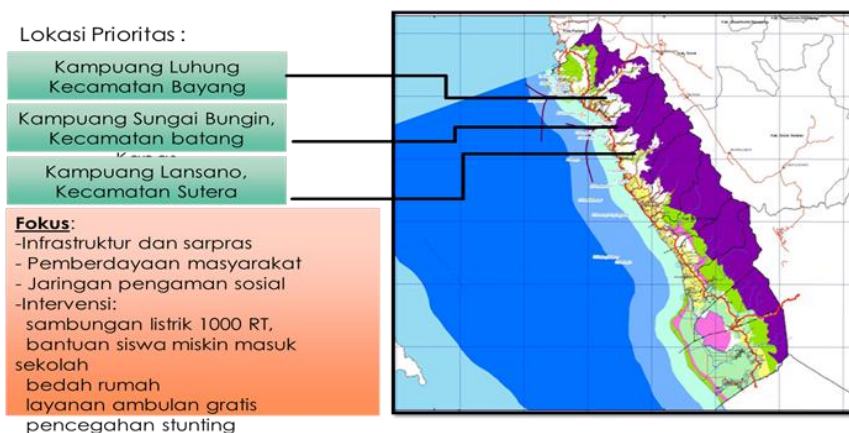


e. Program Gerakan Anti Kemiskinan (Progakin)

Progakin dilaksanakan dengan target untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk keluar dari garis kemiskinan. Beberapa target pelaksanaan program ini tahun 2019 antara lain:

- a. Pembangunan/ rehab RTLH
- b. Fasilitasi sambungan listrik bagi 1000 rumah tangga miskin
- c. Bantuan siswa miskin yang baru masuk sekolah
- d. Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita guna mencegah *stunting*
- e. Pemberian layanan kesehatan dan ambulan gratis bagi masyarakat miskin

Gambar 4.6
Peta Lokasi Prioritas Program PROGAKIN



3. Penataan Kinerja Program dan Kegiatan

Dalam rangka penajaman pencapaian target RPJMD yang akan memasuki tahun ke-4, maka dilakukan berbagai upaya salah satunya dengan mempertajam target kinerja program kegiatan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah. Penajaman indikator dan target kinerja juga diiringi dengan pengabungan kegiatan-kegiatan yang sejenis dengan tujuan untuk menekan biaya operasional penunjang kegiatan.

Sebagai contoh: Di Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian: sebelumnya: kegiatan pelatihan kewirausahaan koperasi, kegiatan pelatihan akuntansi koperasi dan pelatihan kelembagaan koperasi, digabung menjadi kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis perkoperasian. Di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sebelumnya: kegiatan peningkatan jalan Bunga Pasang-Salido, kegiatan peningkatan jalan Carocok-Simpang UHA, kegiatan peningkatan jalan Painan Timur, digabungkan menjadi Kegiatan peningkatan jalan strategis Kecamatan IV Jurai.

4. Pengembangan Data Spasial Perencanaan Berbasis GIS

Perencanaan tanpa data sangat berpotensi untuk terjadinya kegagalan. Salah satu data yang penting dalam perencanaan pembangunan adalah data spasial, yaitu data dan informasi yang komprehensif terkait lokasi pembangunan. Data spasial pembangunan dipetakan menggunakan Geographical Information Sistem (GIS) untuk memudahkan proses analisis. Pada tahun 2018, Pemerintah Daerah melalui Bapedalitbang telah membentuk Jaringan Informasi Geospasial Daerah yang terdiri dari aparatur perangkat daerah yang diberi tugas untuk menyiapkan data dan peta geospasial pelaksanaan pembangunan di instansi masing-masing. Tim tersebut diberi pembekalan terkait teknis penggunaan aplikasi ArcGIS sehingga saat ini telah dipetakan melalui GIS beberapa peta tematik antara lain: peta dan database sekolah, peta dan database jaringan jalan, peta dan database jaringan irigasi serta peta dan database

B. Inovasi Dalam Pelayanan Publik

Dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah sebagai mana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 khusus pada Misi Pertama yaitu, “Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang

bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat”, maka pada tahun 2019 Pemerintah Daerah merencanakan untuk melaksanakan beberapa inovasi dalam hal pelayanan publik. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik oleh pemerintah daerah dengan strategi menstandarkan prosedur, memperdekat jarak layanan dan mempercepat proses pelayanan. Terobosan tersebut dilaksanakan dengan kebijakan strategis sebagai berikut:

1. Membentuk Unit Kerja Layanan (UKL) Administrasi Kependudukan

Pembentukan Unit Kerja Layanan (UKL) administrasi kependudukan merupakan kebijakan daerah yang bertujuan untuk memperdekat dan mempercepat pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. UKL berada di bawah naungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Saat ini telah terbentuk satu unit kerja UKL perkecamatan. Dalam pelaksanaan tugasnya, setiap UKL dilengkapi dengan gedung kantor (memanfaatkan gedung UPTD Pendidikan yang saat ini tidak terpakai) dan sarana mobilitas berupa sepeda motor operasional. Diharapkan masyarakat menjadi lebih dimudahkan dan lebih menghemat biaya pengurusan administrasi kependudukan bila langsung ke ibukota Kabupaten karena petugas UKL akan jemput bola memberi layanan sampai ke pintu rumah masyarakat.

2. Perluasan Cakupan Smartcity menjadi Smartnagari

Pada tahun 2016, Pemerintah Daerah telah meluncurkan program smartcity sebagai inovasi untuk mendukung pengimplementasian e-government di Kabupaten Pesisir Selatan. dengan smartcity, diharapkan terjadi integrasi pelayanan publik dan sistem database kabupaten. Beberapa cakupan layanan smartcity yang telah dijalankan antara lain:

- a. e-planning dan e-bugedting
- b. PPID seluruh perangkat Daerah
- c. Rintisan e-puskesmas
- d. Layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik
- e. Radio online Langkisau
- f. Dan aplikasi lainnya terhubung dalam satu portal.

4. Pengurangan Kemiskinan melalui Bantuan Sambungan Listrik Bagi Masyarakat Miskin

Berdasarkan data ... tahun ..., di Kabupaten Pesisir Selatan masih terdapat sebanyak ... rumah tangga yang belum menikmati listrik PLN. Hampir seluruh rumah tangga yang belum dialiri listrik tersebut merupakan rumah tangga miskin sehingga mereka sangat terbebani untuk biaya penyambungan listrik serta instalasi jaringan. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah pada tahun 2019 berencana untuk melakukan intervensi dengan memberikan bantuan biaya penyambungan listrik bagi masyarakat miskin dengan target sebanyak 1.000 sambungan rumah, yang akan disesuaikan dengan Basis Data Terpadu. Untuk dukungan bagi program tersebut, direncanakan pada tahun 2018 ini akan dilakukan verifikasi dan validasi data calon penerima manfaat melalui Program SLRT di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah merupakan gambaran rencana prioritas pembangunan pemerintah kabupaten pesisir selatan yang dilaksanakan tahun 2019 untuk menjabarkan isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi pembangunan Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 (BAB IV). RKPD Tahun 2019 dilaksanakan berdasarkan evaluasi capaian pembangunan yang sudah dilaksanakan tahun 2017 dan Tahun 2018 yang sedang berjalan. Hasil evaluasi akan menjadi dasar penyempurnaan untuk perencanaan pembangunan tahun 2019, sehingga perencanaan pembangunan yang dibuat lebih efektif dan efisien untuk menyelesaikan isu prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

Rencana kerja pembangunan Daerah yang akan dilaksanakan Tahun 2019 merupakan perencanaan integrasi program dan kegiatan dari semua OPD yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan sesuai fungsi dan perannya masing-masing. Dalam merumuskan program dan kegiatan prioritas masing-masing OPD, dilakukan melalui beberapa tahap perencanaan yang melibatkan semua stakeholder dan masyarakat sebagai pemanfaat hasil dan penerima dampak dari pembangunan.

Perencanaan pembangunan yang sudah disusun bersama meskipun belum dapat menyelesaikan semua isu prioritas yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Melalui program/kegiatan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien dapat mengurangi permasalahan pembangunan secara bertahap, terutama permasalahan pembangunan yang menyangkut kebutuhan mendasar masyarakat.

Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan rinci yang menjelaskan kode rekening, nama program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target pencapaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif. Sumber biaya untuk merealisasikan Rencana Kerja Pemerintah ini berasal dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan

serta sebagian diajukan kepada Pemerintah Propinsi dan Pusat untuk dibiayai melalui APBD Propinsi dan APBN.

Klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana program dan kegiatan prioritas seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel 5.1 dibawah ini.

TABEL 5.1
Rencana Program Prioritas Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung jawab
			2019		
			Target	Rp. (000)	
1	2	3	4	5	6
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB				577,248,746.84	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR				483,997,822.79	
PENDIDIKAN				113,759,902.65	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				4,315,756.16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				3,765,659.58	
Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur				284,632.70	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur					
Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				3,726,800.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	APK PAUD (%) Jumlah lembaga	1	1		
	PAUD terakreditasi (lembaga)	-			
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				87,316,890.99	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	APK SD / SDLB / Paket A (%)	1	1		
	APM SD / SDLB (%)	1	1		
	APK SMP / SMPLB / Paket B (%)	1	1		
	APM SMP / SMPLB (%)	1	1		
Program Pendidikan Menengah					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	APK SMA / SMK / SMLB / Paket C (%)	1			
	APM SMA/SMK/SMLB (%)	1			
	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	0			
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan				9,921,380.59	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Rata-rata nilai ujian sekolah SD/SDLB	7	7		
	Rata-rata nilai ujian nasional SMP/SMPLB	7	7		
	Rata-rata nilai ujian nasional SMA dan UN SMK	7	7		
	Persentase SM yang memenuhi SPM (%)	0	1		
	Persentase Siswa SMA/SMK diterima diperguruan tinggi Negeri (%)	0	0		
	Rata-rata nilai sikap jujur dan bersahaja siswa SD/SMP/SM (> 80) minimal baik	75	79		
	Persentase SD/SDLB berakreditasi minimal B (%)	1	1		
	Persentase SD/SDLB yang memenuhi SPM (%)	0	0		
	Persentase SMP/SMPLB berakreditasi minimal B (%)	1	1		
	Persentase SMP/SMPLB yang memenuhi SPM (%)	0	1		
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga				3,178,551.90	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Jumlah PTK PAUD profesional (sertifikasi) (%)	0	0		
	Jumlah PTK Dikmas profesional (%)	0	0		
	Persentase guru profesional di SD/SDLB minimal sebanyak 95% dan SMP/ SMPLB (%)	1	1		
	Persentase guru profesional di SMA dan SMK (%)	1			
	Persentase kepala sekolah profesional di SD (%) dan SMP (%)	0	1		
	Persentase kepala sekolah profesional di SMA dan SMK minimal sebanyak (%)	-			
	Persentase pengawas profesional di SD (%), dan SMP (%)	-	1		

1	2	3	4	5	6
	Persentase pengawas profesional di SMA dan SMK minimal sebanyak (%)	-	1		
	Persentase SD memiliki rasio guru terhadap siswa sesuai SPM sebesar (%)	1	71.70%		
	Persentase SMP memiliki jumlah guru sesuai SPM sebanyak 83%	1	1		
	Persentase SMA memiliki jumlah guru sesuai SNP sebanyak 80% dan jumlah SMK memiliki jumlah guru sesuai SNP sebanyak 75%	1			
	Persentase Guru MDQ TPQ/TPSQ sesuai kriteria		1		Bag Kesra (Setda)
	jumlah dokumen laporan money UKS				Kec. Koto XI Tarusan
Program Pendidikan Luar Biasa					
	Jumlah lomba yang diikuti	3 lomba			
Program Pendidikan Non Formal				1,250,230.72	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Angka Melek Aksara penduduk usia dewasa di atas 15 tahun sekurang-kurangnya 99.1%	1	1		
	Persentase program kursus dan pelatihan yang telah menerapkan KKNl sebanyak 71,38%	-	1		
	Jumlah lembaga/satuan pendidikan masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan orang tua/keluarga sebanyak 51 lembaga	15	35		
	Persentase orang dewasa mengikuti pendidikan keluarga sebanyak 1.500 orang	93	97		
KESEHATAN				150,076,653.16	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2,601,561.46	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				99,809.38	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				52,531.25	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur					
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan				4,302,309.38	Dinkes
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Terpenuhi kebutuhan obat-obatan pelayanan kesehatan dasar		1		Dinkes
	Visite Rate		2.46		
	persentase penanganan pasien bermasalah		1		
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia				52,812.61	Dinkes
	Persentase Lansia yang mendapat pelayanan kesehatan		1		
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana Puskesmas/ Pustu/Rumah Sakit dan jaringannya				10,900,875.26	Dinkes
	Persentase Puskesmas/Pustu yang memiliki sarana prasarana sesuai standar		1		
Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan masyarakat				729,756.98	Dinkes
	Jumlah Nagari Siaga Aktif		1		
	Jumlah Rumah Tangga ber PHBS		1		
Program Peningkatan Keselamatan ibu melahirkan dan anak				782,053.28	Dinkes
	Menurunnya angka kematian Ibu Maternal		66.3		
	Menurunnya angka kematian Bayi		4.2		
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan				35,414,843.43	Dinkes
	Persentase penduduk yang memiliki JKN		1		
	Persentase rujukan dari pelayanan primer ke pelayanan sekunder		3,5%		
Program Perbaikan Gizi Masyarakat				362,386.78	Dinkes
	Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan		1		
	Menurunnya prevalensi gizi kurang		5,6%		
	Menurunnya prevalensi gizi buruk		4,6%		

1	2	3	4	5	6
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan				596,171.28	Dinkes
	Persentase puskesmas yang terakreditasi		1		
Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular				938,992.63	Dinkes
	Succes Rate TB		1		
	Succes Rate DBD		1		
	Succes Rate Malaria		1		
Program Pengembangan Lingkungan Sehat				776,330.11	Dinkes
	Persentase Nagari ODF (Open Defecation Free)		70		
	Persentase keluarga yang mempunyai akses pada air bersih		1		
	persentase puskesmas yang melakukan pengolahan limbah		1		
	Persentase kecamatan yang telah melaksanakan kawasan sehat		1		
	Persentase Sekolah yang menerapkan lingkungan sehat		90		Bag Kesra (Setda)

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit tidak Menular				423,385.49	Dinkes
	Persentase Nagari dengan Posbindu PTM		1		
	Persentase deteksi dini Kanker serviks		0		
	Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa		1		
Program Pengadaaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa /Rumah Sakit Paru -paru Rumah Sakit Mata				17,933,000.00	RSUD M. Zein
	Persentase pengadaaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit berdasarkan klasifikasi tipe C		1		
	persentase tahapan pembangunan relokasi RSUD M.Zein Painan/pip		1		Dinas PUPR
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD				62,893,985.23	RSUD M. Zein
	Persentase kemampuan Rumah Sakit dalam pemenuhan kebutuhan operasional		1		
Program Peningkatan Sarana Pelayanan Kesehatan Rumah sakit				7,052,211.57	Dinkes
	Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Rawat jalan dan Inap)		1		
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					121,736,545.07
Program Pelayanan Administarsi Perkantoran				2,547,108.96	
Program Peningkatan Sarana dan Prassarana Aparatur				29,786,047.24	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				168,572.78	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur				41,131.97	
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan				1,236,196.89	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan
	Persentase Kondisi Jalan Baik		28		
	Persentase kondisi jalan mantap (baik+sedang)		0		
	Persentase jembatan kab.dalam kondisi baik		28		
	Panjang Jalan Strategis dan Jalan Non Status Terbangun (km)		20		
	Panjang Pembangunan Jalan Lingkung (Km)		1		perkimtan
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong				7,585,835.24	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan
	Luas genangan yang dikeringkan (ha)		6		
	Saluran drainase lingkungan kondisi baik (km)		38		
			3		Perkimtan
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Km) dan Jembatan (unit)				18,862,724.40	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Panjang jalan kabupaten yang Terpelihara (km)	2,333	267		
	Persentase jembatan kabupaten Yang terpelihara (unit)	6	75		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana				6,099,832.91	Dinas PUPR dan BPBD

1	2	3	4	5	6
Kebinaamargaan	Jumlah alat berat dalam kondisi baik		1		
	Persentase Peralatan laboratorium dalam kondisi baik (unit)		71		
	Jumlah Peralatan perbengkelan dalam kondisi baik (unit)		50		
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jar. Pengairan Lainnya				27,043,979.26	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan
	Persentase Irigasi kondisi baik (%)	52	54		
	Panjang Normalisasi Sungai (km)		1		
	Panjang pipa air bersih yang terpasang (m)	59	79		
Program Pengembangan, Pengelolaan, Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air	Jumlah SPAM Perkotaan yang Terbangun (unit)	23	1		Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
				216,786.59	
	Volume air yang tertampung (m3)		35,600		
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Pembangunan Embung / Bangunan Penampung Air(unit)		1 unit		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan
				2,282,638.52	
	Panjang Pipa Air Minum Terpasang (km)	476,4	617		
	Jumlah Sambungan Rumah Air Minum Terpasang (unit)	15,563	25,863		
	Jumlah SPAM Perdesaan Non Pamsimas yang Terbangun (unit)	18	3		
	Jumlah Pamsimas Terbangun (unit)	87	25		
	Jumlah ipal Komunal	50	43		
	Jumlah ipal Komunal terbangun di kawasan permukiman (unit)				Perkimtan
	Jumlah Septitank Komunal (Unit)	89	80		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan
	Jumlah Sambungan Rumah Sanitasi Terpasang (unit)	-	-		
	Tersedianya pengelolaan limbah cair pemukiman masyarakat perkotaan (ipal komunal)		15 kec		
Program Pengendalian Banjir	Tersedianya Septik Tank dan MCK komunal masyarakat pesisir pantai dan bantaran sungai (unit)		20		
				15,502,517.57	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
	Luas genangan yang dikeringkan (ha)		72		
Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Panjang kerusakan sungai dan pantai yang tertangani (km)		9		
				52,531.25	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan
	Persentase Bangunan Pemerintah yang terbangun		0		
	Persentase bangunan Strategis yang terbangun		0		
Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Persentase bangunan rumah negara yang terbangun (unit)		1		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				26,824.66	
Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah rekomendasi izin usaha jasa konstruksi (rekomendasi)	102	85		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Bapedalitbang
				203,071.65	
	Jumlah dokumen RTRW dan RDTR yang disusun (bh)	1	1		
	Jumlah dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) yang disusun (bh)	3	2		
Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah Sosialisasi Dokumen Perencanaan (kali)	4	3		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Jumlah rekomendasi BKPRD yang dikeluarkan				
				215,000.00	
	Jumlah Rekomendasi Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan dokumen Perencanaan Tata Ruang (rekomendasi)	60	60		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Jumlah sosialisasi peraturan/pelaksanaan pemanfaatan ruang (kali)	2	3		

1	2	3	4	5	6
	Jumlah Dokumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang (bh)	2	1		
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang				476,981.69	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Persentase Kesesuaian Rekomendasi Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan dokumen Perencanaan Tata Ruang		1		
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				4,913,145.14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase penduduk terlayani pengelolaan Persampahan		50		
	Persentase RT yang terlayani pengelolaan lumpur tinja		40		
	Jumlah Sarana Prasarana Persampahan dalam kondisi baik (unit)		1		
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan				4,023,503.51	
	Pembangunan Jalan Desa (km)		20		dana nagari
	Pembangunan Sarana Air Bersih Perdesaan (unit)		2		dana nagari
Program Monitoring, evaluasi dan pelaporan				452,114.84	
	persentase kegiatan yang tidak bermasalah dalam pelaksanaannya		100		
Program pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan					
	Persentase Kondisi Jalan Baik				
	Persentase kondisi jalan mantap (baik+sedang)				
	Persentase jembatan kab.dalam kondisi baik				
	Panjang Jalan Strategis dan Jalan Non Status Terbangun (km)				
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN				66,965,881.15	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1,646,745.74	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				2,822,296.98	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				47,278,125.00	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur				3,151,875.00	
Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman				85,000.00	Perkimtan
	Jumlah dokumen perencanaan kawasan permukiman		17		Perkimtan
	Persentase Penurunan luas kawasan kumuh		30		
	Jumlah SPAM yang terbangun (unit)		2		PU dan Perkim
Program Pengembangan perumahan				3,301,945.70	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Jumlah Dokumen Urusan Pengembangan Perumahan (bh)		2		
	Persentase penurunan rumah tidak layak huni		10		(APBD+APBN+DLL)
	Persentase Bantuan rumah bagi masyarakat yang belum memiliki rumah		50		
Program Lingkungan Sehat perumahan				8,529,893	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	jumlah rumah yang memiliki air bersih dan sanitasi layak		500		
	jumlah perumahan yang memiliki PSU yang sesuai aturan		2		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
	persentase penyampaian laporan kinerja dan keuangan tepat waktu				
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan				150,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Persentase developer yang melaksanakan pembangunan PSU pada kawasan perumahan sesuai dengan aturan yang berlaku		20		
	Persentase komunitas perumahan yang aktif		20		
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				27,881,262.92	

1	2	3	4	5	6
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1,854,650.06	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				778,118.96	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur				213,927.84	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				116,450.43	
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan				1,218,930	Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran ; Setda
	Persentase kasus perda yang diselesaikan	1	1		Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, kesbang pol (setda)
	Jumlah kasus yang ditangani atau difasilitasi		4 kasus		
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal				1,211,289	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
	Jumlah kasus kriminalitas yang diimpahkan ke Kepolisian	3	3		Setda (Bagian Kesbangpol), Kec
	Jumlah rekomendasi kebijakan pencegahan gangguan keamanan Nasional di Daerah		5		
	Persentase penurunan pungli di Kabupaten Pesisir Selatan		1		
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan				155,961.79	Setda (Bagian Kesbangpol), kecamatan
	Jumlah rekomendasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan potensi konflik di masyarakat		5		
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)				328,584.75	Setda (Bagian Kesbangpol)
	Persentase penurunan kasus narkoba tingkat pelajar		1		
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran				2,310,189.49	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran , Setda
	Jumlah kasus kebakaran yang telah diselesaikan	64	55		
Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana				440,102.19	BPBD
	Persentase perangkat daerah yang memahami tupoksi dalam penanggulangan bencana (%)	0	1		BPPD
Program Kesiapsiagaan				307,409.69	
	Jumlah KSBS dibentuk (unit)	5	13		
	Jumlah kelompok perempuan yang memahami resiko bencana	10	40		
Program peningkatan kapasitas partisipasi masyarakat dan pemangku lainnya dalam				113,049.14	BPBD
	Jumlah KSBN yang dibentuk	5	25		
Program Penanganan tanggap darurat				367,946.05	Satpol PP dan BPBD
	Persentase kejadian bencana diatasi	1	1		
Program Peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana				11,052,575.00	SATpol PP & BPBD
	Jumlah pos SAR dan TRC	4	7		
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi				7,339,617.92	BPBD
	Panjang jalan dan jembatan pasca bencana yang direhabilitasi & direkonstruksi (m)	54/8	2500/104		
Program Pengelolaan dan Penanganan Dampak Bencana				72,461.19	BPBD
	Persentase kejadian bencana yang terdata	1	1		
SOSIAL				3,577,577.85	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				557,712.85	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				651,847.57	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				47,278.13	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur					
Program pemberdayaan fakir miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan pe nyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya				488,190.35	Dinsos, PP & PA
	PMKS yang dapat diberdayakan dengan memberikan bimbingan dan bantuan (%)	0	1		
Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial				440,938.30	Dinsos, PP & PA, Kecamatan, bag perekon
	Jumlah pelayanan sosial yang mendapatkan rehabilitasi dan pelatihan (kec per orang tagana)	15/51	15/51		
	persentase nagari yang menyalurkan raskin tepat sasaran	80			Kecamatan
Program pembinaan panti asuhan/panti jompo				529,387.98	Dinsos, PP & PA

1	2	3	4	5	6
	Jumlah panti yang mendapatkan pelayanan sosial (panti asuhan peranak)	9	9		
	Jumlah anak panti yang mendapat pelayanan sosial (jiwa)	235	235		
Program pembinaan lanjut usia terlanter				195,021.82	Dinsos, PP & PA
	Jumlah Lanjut usia yang mendapatkan pelayanan sosial (jiwa)	-	90		
Program pembinaan anak terlanter		-		104,682.47	Dinsos, PP & PA
	Jumlah anak terlanter yang memperoleh pelatihan dan bantuan (anak)		20		
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma				83,055.10	Dinsos, PP & PA
	Jumlah penyandang cacat yang dibina (orang)	74	115		
	Cakupan penyandang cacat berat yang memperoleh jaminan sosial (jiwa)	74	115		
Program pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK dan Penyakit Sosial lainnya).				122,212.41	Dinsos, PP & PA
	Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang mendapatkan pelayanan, pelatihan dan bimbingan (orang)		10		
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial				273,784.97	Dinsos, PP & PA
	Jumlah Lembaga Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan bimbingan dan pelatihan (LKS)	68	138		
	Persentase kepuasan terhadap pelayanan jemaah haji oleh Pemerintah Daerah				Bagian Kesra (Setda)
	Peringkat MTQ Pesisir SEeatan				kecamatan
	Persentase kunjungan mesjid Tim Silaturahmi Pemda				
	Persentase mesjid yang mendapat hibah bansos				
Program penanaman nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan				83,465.91	Dinsos, PP & PA
	Jumlah generasi muda yang mendapatkan pemahaman nilai-nilai kebangsaan (orang)	100	100		
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan					
	Jumlah organisasi perlindungan anak dan perempuan	2 Organisasi			
Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan/ Nagari					Dinas Sosial
	Jumlah organisasi wanita yang dibina	4 organisasi			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR				93,250,924.05	
TENAGA KERJA				4,038,291.60	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				712,955.18	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				505,649.32	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				47,278.13	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur					
Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja				248,459.15	
	Jumlah tenaga kerja yang terampil dan mempunyai keahlian (orang)	64	128		Dinas Nakertrans
Program peningkatan kesempatan kerja				224,464.40	
	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pekerjaan di Luar Negeri	157	200		Dinas Nakertrans
	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pekerjaan di Dalam Negeri			-	Dinas Nakertrans
Program Perlindungan dan Pengembangan lembaga ketenagakerjaan				64,776.28	Dinas Nakertrans
	Persentase perusahaan yang menerapkan aturan-aturan ketenagakerjaan	30	20		Dinas Nakertrans
Program Penempatan dan pemberdayaan tenaga		-		2,234,709.14	Dinas Nakertrans

1	2	3	4	5	6
kerja	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan bantuan sarana usaha	-	176		
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				771,724.06	
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan				154,286.50	
	persentase nagari layak anak		4		Dinas Sosial
	persentase pembentukan dan pembinaan forum anak daerah di kecamatan		47		Dinas Sosial
Program penguatan dan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak (PUG)				275,000.00	
	Pembangunan klinik pusat pembelajaran keluarga (puspaga)		1 klinik		Dinas Sosial
	persentase OPD yang menerapkan anggaran berbasis gender		33		Dinas Sosial
Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan				86,187.56	
	jumlah Penanganan kasus KDRT dan anak (kasus)		22		Dinas Sosial
Program Peningkatan Peran Serta Kesejahteraan Gender dalam Pembangunan				256,250.00	
	Jumlah organisasi perempuan yang difasilitasi		4		Dinas Sosial
PANGAN				2,844,634.96	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				496,445.05	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				359,817.10	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				39,320.48	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur					
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)				599,960	Dinas Pangan
	- Ketersediaan Pangan Utama (kg/Jiwa/Thn)	132,13	144,00		
	- Ketersediaan Energi (kkal/kap/hari)	3,754	2,400		
	- Ketersediaan protein (gram/kap/hari)	83,73	63		
	- Skor Pola Pangan Harapan (%)	77,2	76		
	- Tingkat Kecukupan Konsumsi Pangan :				
	1. Konsumsi Energi (kkal/kap/hari)	2,320	2,150		
	2. Konsumsi protein (gram/kap/hari)	59,2	57		
	- Stabilitas harga pangan pokok di tingkat produsen				
	1. Harga Gabah	4,054	≥ HPP		
	2. Harga Beras	7,848	≥ HPP		
	- Stabilitas Harga Pangan Pokok di Tingkat Konsumen	12,90	CV ≤ 5		
	- Persentase bahan pangan yang aman dikonsumsi masyarakat	74,60	79		
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat				1,349,093	Dinas Pangan
	Skor Pola Pangan Harapan (PHH) (%)	1	76		
PERTANAHAN				13,933,190.22	
Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan				114,209.66	
	Persentase Penyelesaian masalah pertanahan milik pemda		1		Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan & pemanfaatan Tanah				13,728,980.56	Dinas Perkimtan dan BPKD
	jumlah lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan		5		Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan				30,000.00	
	Jumlah sistem informasi yang ada		1		Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah				60,000.00	
	Persentase tanah yang sudah terdaftar dalam sistem		1		Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
LINGKUNGAN HIDUP				8,861,186.91	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				507,122.83	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				543,648.42	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				36,771.88	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur					
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan				1,446,728.16	Dinas LH

1	2	3	4	5	6
Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	67,5	68		
	Indeks Kualitas Udara:	85	85		
	Indeks Tutupan Lahan	(n/a)	74,83		
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam				484,600.78	Dinas LH
	Jumlah kampung pro-iklim yang aktif (unit)		2		
	Calon penerima kalpataru (orang)		1		
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Lingkungan				618,137	Dinas LH
	Persentase data lingkungan yang valid	30	50		
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau					
	Luas Taman Kota dalam kondisi baik (Ha)		20		Dinas PU
	Luas Green Belt/sabuk hijau (Ha)		1		
Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pertamanan				5,224,177.46	Dinas PUPR
	Pemeliharaan rutin/berkala taman kota (paket)		1		Dinas PUPR
	persentase penerangan jalan umum kondisi baik				
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				6,623,072.99	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				704,675.52	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				870,488.99	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				52,531.25	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur					
Program Penataan Administrasi Kependudukan				4,995,377.23	Dinas Adminduk Capil dan Kecamatan
	1. Persentase peningkatan kepemilikan KTP elektronik	1	1		Dinas Adminduk Capil
	2. Persentase peningkatan kepemilikan Kartu Keluarga	1	1		Dinas Adminduk Capil
	3. Persentase peningkatan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)		0		Dinas Adminduk Capil
	4. Persentase peningkatan kepemilikan akta kelahiran anak (usia 0-18th)		6		Dinas Adminduk Capil
	5. Persentase penurunan data ganda kependudukan	1	0		Dinas Adminduk Capil
	6. Persentase perbaikan anomali data base kependudukan	0	1		
Program Administrasi Buku Register Kependudukan Pemerintahan Desa/Nagari					Kec.LSB
	persentase Nagari yang dibina administrasi buku register pelayanan KTP, KK dsb	100			
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				5,414,448.54	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1,044,551.40	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				31,518.75	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				41,127.62	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur					
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/Nagari					BPM dan Kec
	persentase nagari yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	10			
	persentase nagari yang dibina dan di monev				Bag Nagari Setda
Program Penataan Kelembagaan dan Ketatausahaan Pemda					Bag Nagari Setda
	persentase praktek kerja lapangan yang difasilitasi	100			
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pemerintahan Nagari					
	Jumlah Ranperda dan Ranperbub tentang nagari				BAGian Nagari Setda
Program Peningkatan Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Desa				1,117,354	
	Persentase Tata Kelola Keuangan Nagari Yang Baik	10	55		DPM&DPPKB dan Kecamatan

1	2	3	4	5	6
	Jumlah Desa Yang Maju dan mandiri di Kabupaten Pesisir Selatan	1	3		DPM&DPPKB
Program Pengembanan lembaga sosial perdesaan				806,978.00	
	Persentase Lembaga Sosial Masyarakat yang aktif (PKK, dan LPMN)		1		DPM&DPPKB dan Kecamatan
	persentase KAN yang aktif	54	81		DPM&DPPKB
Program pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan				930,000.00	
	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang aktif	0	0		DPM&DPPKB
	Jumlah Kawasan Perdesaan Yang Terbentuk	1	3		DPM&DPPKB
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Nagari					
	Persentase Tenaga Pendamping Desa Yang Profesional	10			DPM&DPPKB
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Membangun Desa					
	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Nagari	40			DPM&DPPKB
Program pemberdayaan lembaga pemerintahan desa/nagari				1,266,900.00	
	persentase nagari yang dilakukan pembinaan peningkatan kapasitas aparatur		71		DPM&DPPKB
Program pemberdayaan lembaga sosial dan ekonomi masyarakat/nagari					
	persentase PKK nagari yang aktif	60			DPM&DPPKB
	persentase KAN yang aktif	54			
	persentase LPM yang aktif membina kelompok	56			
Program pengembangan kawasan pedesaan				176,018.77	
	persentase kawasan pedesaan yang dikembangkan	10	30		
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				6,058,581.23	
Program Pengadaan Sarana dan prasarana Pelayanan Keluarga Berencana				2,068,255.23	
	Persentase klinik yang terpenuhi sarprasnya	70	76		
Program Keluarga Berencana				2,500,000.00	
	Persentase yang mengikuti KB aktif	1	1		DPM DPP&KB, kecamatan
	Persentase KB Unmet Need	13	14		
Program Pelayanan Kontrasepsi				615,526.00	
	Persentase KB Pria	1	1		DPM DPP&KB,
	Persentase KB Wanita	67	68		
	Persentase yang mengikuti KB MKJP	18	18		
Program Pembinaan Peran Masyarakat Dalam Pelayanan KB/BKR yang Mandiri				76,300.00	
	Jumlah BKB yang terintegrasi dengan Posyandu dan PAUD, BKR dan BKL	71	78		DPM DPP&KB,
	Jumlah kelompok UP2KS (usaha Peningkatan Perekonomian Keluarga Sejahtera)	73	73		
Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui kelompok di masyarakat					
	Jumlah pelayanan informasi, promosi dan sosialisasi				DPM DPP&KB
Program Kesehatan Reproduksi Remaja					
	Jumlah Kelompok PIK remaja /Mahasiswa	26			DPM DPP&KB
Program penguatan kelembagaan					
	persentase kelembagaan KB yang telah ada				DPM DPP&KB
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri				450,000.00	
	Persentase lembaga KB yang aktif		80		DPM DPP&KB
Program kemitraan Keluarga Berencana				348,500.00	
	Persentase MKJP		18.88		DPM DPP&KB
Program pembinaan institusi peduli KKBPK (Kependudukan KB dan pembangunan keluarga					
	persentase kampung KB yang dibina				DPM DPP&KB
PERHUBUNGAN				19,706,294.94	
Program Pelayanan Administarsi Perkantoran				1,077,232.07	

1	2	3	4	5	6
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				942,674.86	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				44,651.56	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur				109,142.92	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				120,872.77	
	Persentase kesesuaian pelaksanaan program dengan rencana	100	100		
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan				925,000	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perhubungan		14		Dinas Perhubungan
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Fasilitas Perhubungan		3		Dinas Perhubungan
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ				600,000	
	Persentase alat keselamatan lalu lintas yang berfungsi baik		8		Dinas Perhubungan
	Persentase Prasarana Perhubungan dan Fasilitas LLAJ dalam kondisi baik		80		
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas				9,737,500.00	
	Persentase pemenuhan sarana pengamanan lalu lintas		3363 bh		Dinas Perhubungan
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan				789,221	
	Terpilihnya sopir teladan		1 Orang		Dinas Perhubungan
	Terpilihnya pelajar pelopor		1 Orang		
	Jumlah armada yang melayani transportasi pendidikan		2 Unit		
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan				4,300,000	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan Terbangun/Tersedia		5		Dinas Perhubunga
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor				470,000	
	Jumlah Kendaraan yang layak jalan		7,200		Dinas Perhubunga
Program Peningkatan Pelayanan Terminal dan Perparkiran				590,000	-
	Jumlah terminal dan parkir yang dilayani		2		Dinas Perhubunga
Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan keuangan daerah					
	persentase pajak dan retribusi yang dioungut	100			Dinas Perhubunga
KOMUNIKASI DAN INFORMASI				8,183,581.78	
Program Pelayanan Administarsi Perkantoran				813,682.59	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				656,157.34	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				35,773.78	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur					
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
	Persentase mkesesuaian pelaksaaan program dengan perencanaan				
Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa				250,000	
	Jumlah SDM ASN yang memiliki kemampuan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		120		Dinas Kominfo
	Persentase Peralatan Operrasional santel dalam kondisi baik		80		Humas (Setda)
Program Peningkatan Akses Informasi, Komunikasi dan Telekomunikasi					
	Jumlah dokumen panduan rencana teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah Kab.Pessel				Dinas Kominfo
Program Penyelenggaraan E-Government				3,500,000	
	Persentase cakupan perangkat daerah yang terintegrasi smartcity		100		
	Persentase cakupan kecaatan yang terintegrasi smarcity		100		
	Persentase cakupan puskesmas yang terintegrasi smartcity		100		
	Persentase cakupan nagari yang terintegrasi smartcity		74		
Program Pelayanan Informasi Pyblic				102,968	

1	2	3	4	5	6
	persentase OPD yang menyelenggarakan PPID		100		Dinas Kominfo
Program Kerjasama Informasi dan Media Massa				2,575,000.00	
	Jumlah kerjasama dengan media massa dalam penyebaran informasi daerah yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku		27 Media Massa		Setda (Bagian Humas)
	Jumlah publikasi		20 advetorial, 80 webtorial	250,000	Dinas Kominfo
KOPERASI & UMKM				3,027,848.45	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				669,176.37	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				535,668.51	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				47,278.13	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur					
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
	Persentase kesesuaian pelaksanaan program dengan perencanaan				
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi				216,725.45	
	Persentase koperasi aktif melaksanakan RAT		46		Dinas KUPP
	Persentase koperasi dengan jumlah modal > 5 Miliar		15		
Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan Kompetitif UKM				1,384,000.00	
	Persentase peningkatan pemodalan UMKM per tahun		> 5%		Dinas KUPP
Program Peningkatan Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif				175,000.00	
	Jumlah UMKM yang mengkases pemodalan ke lembaga keuangan		300		
PENANAMAN MODAL				2,199,133.89	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				756,518.29	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				384,061.43	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				47,278.13	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur					
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi				371,803.30	Dinas Penanaman Modal
	Jumlah Insentif yang diberikan	1 kali	1 kali		
	Jenis izin yang dipangkas	1	-		
	jumlah penanam modal yang dibina	2 unit	2 unit		
	Persentase peningkatan nilai realisasi investasi PMA/PMDN		25		
Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi				250,000	Dinas Penanaman Modal
	Jumlah investor yang menanamkan modal		1		
	Jumlah kerjasama investasi	-	1 MoU	-	Dinas Penanaman Modal
	Jumlah calon investor PMA/PMDN		5		Dinas Penanaman Modal
Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan				389,472.74	Dinas Penanaman Modal
	Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	2,500	3,000		
Program peningkatan daya Saing penanaman Modal					Dinas Penanaman Modal
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				2,672,861	
Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga				668,659.16	
	peningkatan jumlah sarana olahraga (unit)	3	13		Dinas Pariwisata, pemuda dan Olah Raga
	Jumlah event yang diikuti/dilaksanakan	3	6		
Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga				941,464.66	
	Jumlah Atlit dan pemuda berprestasi	20	40		Dinas Pariwisata, pemuda dan Olah Raga
	Jumlah Klub olah raga yang berkembang di masyarakat	2	5		Dinas Pariwisata, pemuda dan Olah Raga
	persentase PNS yang mengikuti olah raga		95		Kesra (Setda)
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan				1,062,736.96	

1	2	3	4	5	6
	Jumlah Pemuda yang mengikuti PaskibraTK. Kabupaten /Provinsi/ Nasional,Peringatan hari tertentu dan Hari besar Nasional (org)	86	86		Dinas Pariwisata, pemuda dan Olah Raga, kecamatan, dan bagian kesra
	Peringkat pemuda pelopor		5 besar		
Program Pembinaan Olah Raga Berprestasi	jumlah atlit dan pemuda berprestasi	20	40		Dinas Pariwisata, pemuda dan Olah Raga,
STATISTIK				143,338.54	
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah				143,338.54	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Jumlah data kompilasi produk administrasi yang disusun	-	1 dok		
	Jumlah data survey statistik sektoral yang disusun	-	1 dok		
PERSANDIAAN				224,413.86	
Proram Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah				224,413.86	
	Terlaksananya Pengamanan data Pemerintah Daerah	0	15 PD		Dinas Komunikasi dan Informatika
KEBUDAYAAN				5,695,600.00	
Program Pengembangan Nilai Budaya				2,395,800.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Jumlah Grub kesenian/sanggar budaya yang berkembang	66	69		
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				1,064,800.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Jumlah jenis cagar Budaya yang terinventarisir	4	7		
	Junlah adat budaya lokal yan terbina	2	8		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
	persentase pegawai yang mengikuti ceramah jumat				Bagian Kesra (Setda)
Program Peningkatan IMTAQ				2,235,000.00	Bagian Kesra (Setda)
	Persentase kepuasan terhadap pelayanan jemaah haji oleh Pemerintah Daerah		100		
	Peringkat MTQ Pesisir Selatan		5 besar		
	Persentase kunjungan mesjid Tim Silaturahmi Pemda		65		
	Persentase mesjid yang mendapat hibah bansos		70		
KEPUSTAKAAN				1,184,255	
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan				914,553.24	
	Peningkatan angka kunjungan ke perpustakaan umum daerah, puskel, OPD, Nagari, TBM dll (org/thn)	5,000	30,000		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program Peningkatan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan				269,701.74	
	Persentase Jumlah Sekolah yang memiliki perpustakaan	1	1		
	Persentase jumlah Sekolah yang memiliki perpustakaan terakreditasi minimal 50 %	0	0		
KEARSIPAN				1,668,466.34	
Program Pelayanan Administarsi Perkantoran				756,249.23	
Program Peningkatan Sarana dan Prassarana Aparatur				437,104.13	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				61,882.76	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur					
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen / arsip daerah				208,873.8	
	Jumlah dokumen /arsip daerah yang terselamatkan & terlestarikan	-	32 urusan pem -an		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Persentase arsip Sekretariat Daerah yang dikelola dengan baik		85		Setda
Program perbaikan sistem administrasi kearsipan				100,000	
	persentase OPD, Nagari telah melaksanakan sistem administrasi kearsipan (unit arsip)	-	40		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program Pemeliharaan rutin/berkala sarana &				41,318.98	Dinas Perpustakaan dan

1	2	3	4	5	6
prasarana kearsipan	Persentase peningkatan daya tahan sarana & prasarana kearsipan		1		Kearsipan
Program Peningkatan kualitas pelayanan informasi	Peningkatan angka kunjungan ke galeri Pesisir Selatan (org/thn)		500 org	63,037.44	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				61,946,022	
PERIKANAN				7,840,727.21	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				826,788.29	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				387,865.80	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				52,478.72	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur					
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
	persentase kesesuaian perencanaan				
	Program/Kegiatan dengan pelaksanaan				
Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap				3,053,216.21	
	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	37,909	41,940		Dinas Perikanan
	Jumlah Kelompok Usaha bersama (KUB) yang berkembang	70	85		
	Jumlah Koperasi nelayan yang berkembang	17	24		
Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan				618,828	
	Jumlah UPI Yang Menerapkan Cara Pengolahan Ikan Yang Baik (Orang / UPI)	3	12		Dinas Perikanan
	Jumlah kelompok pengolah dan pemasar	34	55		
Program Pengembangan Budidaya Perikanan				2,901,550.00	
	Jumlah Produksi Budidaya perikanan(ton)	10,327	15,666		Dinas Perikanan
	Jumlah Pembudidaya yang tersertifikasi CBIB (Orang)	17	92		
	Jumlah UPR yang tersertifikasi CPIB	2	6		
	Jumlah kelompok Perbudidaya Ikan (POKDAKAN)	60	80		
Program pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-pulau kecil	Jumlah kawasan konservasi laut daerah yang dikembangkan dan dimantapkan		-	-	Kewenangan pindah ke Provinsi
Program Penagawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	Jumlah pengawasan kelautan yang dilakukan		-	-	Kewenangan pindah ke Provinsi
Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya				-	
	Jumlah Produksi Perikanan budidaya (ton)	10,327			Dinas Perikanan
	Jumlah Pembudidaya yang tersertifikasi CBIB (Orang)	17	92		
	Jumlah UPR yang tersertifikasi CPIB	2	6		
	Jumlah kelompok Perbudidaya Ikan (POKDAKAN)	60	80		
PARIWISATA				11,084,197.19	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			-	701,210.48	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				388,741.76	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				42,025.00	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur					
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata				5,668,459.24	
	jumlah destinasi wisata unggulan (Kawasan)	4	8		Dinas Pariwisata, pemuda dan Olah Raga
Program Pengembangan Pemasaran Wisata				3,347,204.59	
	Angka kunjungan wisata		1,179,192		Dinas Pariwisata, pemuda dan Olah Raga
Program Pengembangan Kemitraan				187,726.36	

1	2	3	4	5	6
	Jumlah kelompok sadar wisata yang dibina	25	32		Dinas Pariwisata, pemuda dan Olah Raga
Program pengembangan ekonomi kreatif				748,829.76	
	Jumlah kelompok ekonomi kreatif yang berkembang	2	8		Dinas Pariwisata, pemuda dan Olah Raga,
Program Pengembangan SDM dan Kemitraan Pariwisata	Jumlah kelompok sadar wisata yang dibina	25			Dinas Pariwisata, pemuda dan Olah Raga,
PERTANIAN				25,929,148.48	
Program Pelayanan Administarsi Perkantoran				1,753,949.65	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				751,307.14	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				99,284.06	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur					
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan				5,641,656	
	Jumlah Produksi Padi (Ton)	317,373	300,519		Distanhortbun
	Jumlah Produksi jagung (ton)	108,894	123,268		Distanhortbun
	Jumlah Produksi Cabe	2,584	3,141		Distanhortbun
	Jumlah produksi bawang merah,	243	253		Distanhortbun
	Jumlah produksi Buah-buahan	28,840	30,012		Distanhortbun
	Jumlah Produksi Kelapa Sawit	126,222	183,414		Distanhortbun
	Jumlah Produksi Karet	10,641	11,073		Distanhortbun
	Jumlah Produksi gambir	5,423	6,866		Distanhortbun
	Jumlah Produksi Pala	171	315		Distanhortbun
	Jumlah Produksi kakao	1,419	1,425		Distanhortbun
	Jumlah Produksi Kopi	816	1,260		Distanhortbun
	Jumlah Produksi Cengkeh	317	330		Distanhortbun
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan				5,734,000	
	persentase peningkatan Luas sawah beririgasi (%) (kondisi awal /tahun 2015 21.438 Ha)		6		Distanhortbun
	persentase peningkatan pembangunan prasarana pertanian (%) (kondisi awal /tahun 2015 62.482 m)		10		
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ perkebunan Lapangan				1,476,100	
	Jumlah Rasio Penyuluh terhadap Kelompok Tani	0	0		Distanhortbun
	Jumlah Penyuluh pertanian berprestasi	2	2		Distanhortbun
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkebunan					Distanhortbun
	Jumlah Kelompok petani perkebunan yang memperoleh fasilitasi (Kelompok)	2			
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan					Distanhortbun
	Tercapainya swasembada dan Swasembada Pangan Berkelanjutan	100			
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan				2,461,212.00	Distanhortbun
	Jumlah Kelompk Tani Pemamfaat Alsintan	3	27		
	Jumlah Kelompok Tani yang menggunakan Tekhnologi Tepat Guna	120	123		Distanhortbun
Program Peningkatan Kelembagaan Petani				2,371,539.00	
	Jumlah Gapoktan berprestasi	-	1		Distanhortbun
	Jumlah Kelompok Tani berprestasi	2	1		
	Jumlah petani berprestasi	-	1		
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produk Pertanian/ Perkebunan				-	
	Jumlah asosiasi produk perkebunan yang aktif	1			Distanhortbun
Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian /Perkebunan				2,486,794.00	
	Jumlah diversifikasi hasil olahan tanaman pangan		4		Distanhortbun
	Jumlah diversifikasi hasil olahan tanaman hortikultura		5		
	Jumlah diversifikasi hasil olahan tanaman perkebunan		2		
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan				1,738,705.26	
	Jumlah Populasi ternak (ekor)				Dinas Peternakan dan

1	2	3	4	5	6
	- Sapi Potong	80,146	82,281		Kesehatan Hewan
	- Kerbau	8,271	8,466		
	- Kambing	41,669	41,794		
	- Ayam Buras	779,819	796,547		
	- Ayam Ras Petelur	85,300	98,745		
	- Ayam Ras Pedaging	552,500	1,079,102		
	- Itik	147,921	152,403		
	Jumlah Produksi Ternak (kg)				
	- Daging Sapi Potong	1,173,571	1,278,697		
	- Daging Kerbau	46,204	50,437		
	- Daging Kambing	40,072	45,076		
	- Daging Ayam Buras	836,356	854,297		
	- Daging Ayam Ras Petelur	35,186	40,732		
	- Daging Ayam Ras Pedaging	442,138	863,551		
	- Daging Itik	61,017	62,866		
	- Telur Ayam Ras	542,508	628,021		
	- Telur Ayam Buras	327,524	334,550		
	- Telur Itik	674,520	694,958		
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak				713,450.15	
	-Jumlah hewan ternak yang divaksinasi (ekor)	11,000	12,400		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	- Jumlah Kandang yang di desinfeksi (unit)	1,200	480		
	- Jumlah ternak yang divaksin SE (ekor)	5,500	6,200		
	- Jumlah hewan yang divaksin rabies (ekor)	5,500	6,200		
	- jumlah penanganan ternak yang mengalami gangguan reproduksi (ekor)		60		
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Peternakan				344,368.26	
	Jumlah Pasar ternak kondisi baik (unit)	1	1		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Jumlah Event Promosi yang diikuti (event)	3	3		
Program Peningkatan Agribisnis peternakan				82,610.05	
	Jumlah kelompok tani yang menerima bantuan ternak (kelp)	4	4		Dinas Peternakan dan Keswan
Program peningkatan sarana prasarana peternakan				93,128.59	Dinas Peternakan dan Keswan
	Persentase peningkatan Sarana prasarana Pusat Perbibitan dan Pengembangan Peternakan (P4)	25	10		
	Jumlah Sarana prasarana Puskeswan (unit)	77	2		
	Persentase peningkatan Sarana prasarana pasar ternak dalam kondisi baik	-	1		
	Jumlah Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO)	2	-		
Program Peningkatan penerapan teknologi Peternakan				181,044.32	
	Jumlah teknologi peternakan yang diterapkan pada kelompok (bh)	5	5		Dinas Peternakan dan Keswan
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menulat					
	persentase pengurangan anjing liar pembawa rabies				Dinas Peternakan dan Keswan
KEHUTANAN				-	
Program Pelayanan Administarsi Perkantoran					
Program Peningkatan Sarana dan Prassarana Aparatur					
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
Program Peningkatan Disiplin Aparatur					
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Terlaksananya rehabilitasi hutan dan lahan (Ha)	-			Keweangan pindah Pindah ke Provinsi
Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan	Berkembangnya hutan nagari dan hutan kemasyarakatan (Ha)	0 Ha			Keweangan pindah Pindah ke Provinsi

1	2	3	4	5	6
Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan	Terwujudnya tertib kelola industri hasil hutan	1			Kewenangan pindah ke Provinsi
Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Terwujudnya perlindungan kawasan hutan	1			Kewenangan pindah Pindah ke Provinsi
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					
Program Pengembangan dan Penertiban Bidang Energi Baru dan Terbarukan	persentase pemanfaatan energi baru dan terbarukan				Kewenangan pindah ke Provinsi
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrik	Persentase masyarakat yang terlayani Listrik				Kewenangan pindah ke Provinsi
Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Terciptanya penambangan yang berwawasan lingkungan (unit lokasi)	54			Kewenangan pindah ke Provinsi
PERDAGANGAN				13,779,293.07	
Program peningkatan Efisiensi perdagangan dalam negeri				12,362,293.07	
	Jumlah pasar rakyat menuju kriteria SNI nomor 8152:2015	-	5		Dinas KUPP
Program: Pembinaan Pedagangan Kaki Lima dan Asongan				22,000.00	
	cakupan bina kelompok pedagang (persen)	-	10		Dinas KUPP
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan				1,395,000.00	
	Koefisien variasi harga bahan kebutuhan pokok antar waktu		<9%		Dinas KUPP
	Koefisien variasi harga bahan kebutuhan pokok antar kecamatan	<14,2%	<13,0%		
	Jumlah pasar yang menuju pemenuhan syarat pengelolaan SNI nomor 8152:2015	-	5		
PERINDUSTRIAN				2,447,430.89	
Program pengembangan industri kecil dan menengah				671,920.97	
	Jumlah fasilitasi legalitas produk IKM		40 produk		Dinas KUPP
	Persentase peningkatan pemodalan IKM		0		Dinas KUPP
Program Peningkata Kemampuan Teknologi Industri				656,774.32	
	jumlah peningkatan IKM menerapkan teknologi tepat guna		20		Dinas KUPP
Program pengembangan sentra sentra industri potensial				1,118,735.61	
	Jumlah kelembagaan Sentra IKM		4		Dinas KUPP
TRANSMIGRASI				865,224.67	
Program Pengembangan wilayah transmigrasi				865,224.67	
	Persentase sarana dan prasarana pendukung di wilayah KTM dalam kondisi baik		1		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Persentase lembaga Masyarakat KTM yang telah mandiri	0	1	-	
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				41,343,469.11	
PERENCANAAN PEMBANGUNAN				5,914,322.96	
Program Pelayanan Administarsi Perkantoran				1,113,043.87	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				798,935.55	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				140,120.28	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur					
Program Pengembangan Data/Informasi				150,000.00	
	Persentase tingkat integrasi data pembangunan	1	1		Bapedalitbang
Program Kerjasama Pembangunan					
	jumlah dokumen kerjasama yang disusun	1 dok			Bapedalitbang

Program Pengembangan Kota Kecil dan Menengah				255,000.00	
	Persentase perencanaan pengembangan kawasan perkotaan yang selaras	0	1		Bapedalitbang
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah				150,000.00	
	Jumlah SDM perencana yang berkompetensi	50	50		Bapedalitbang

1	2	3	4	5	6
Program Perencanaan Pembangunan Daerah				2,242,583	
	Persentase perencanaan yang selaras	25	100		Bapedalitbang
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi				359,711.31	
	Persentase perencanaan pembangunan ekonomi yang selaras	25	100		Bapedalitbang
Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya				516,200.00	
	Persentase perencanaan pembangunan siosial budaya yang selaras	25	100		Bapedalitbang
Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan SDA				188,728.59	
	Persentase perencanaan pembangunan prasarana wilayah yang selaras	25	100		Bapedalitbang
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh					Dlnas PU TR
	Jumlah kawasan strategis yang dibangun				
KEUANGAN				24,932,333.02	
Program Pelayanan Administarsi Perkantoran				6,605,698.72	
Program Peningkatan Sarana dan Prassarana Aparatur				6,605,698.72	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				167,574.69	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur					
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				396,407.76	BPKD, BAPEN, seluruh PD,
	Persentase perangkat daerah yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu		1		
	Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun		4		
	Jumlah laporan AKIP yang disusun		1		15 Kec
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				1,803,249.74	
	Dokumen APBD dan P.APBD tepat waktu		4		BPKD
	KUA dan PPAS APBD/P.APBD tepat waktu		4		
	Persentase penyelesaian administrasi keuangan sesuai SOP		1		
	Persentase perangkat daerah yang tertib Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD)		1		
	Persentase aset Setda yang terkelola dengan baik		1	225,000.00	Setda (Bagian Keuangan)
	persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10		Badan Pendapatan, Kecamatan
	Jumlah dokumen kajian standarisasi tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD yang disusun				Sekwan
Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota				587,649.78	BPKD
	Persentase peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah		1		
Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari				252,110.00	BPKD dan kecamatan
	Persentase peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Nagari		1		
Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari					
	persentase nagari yang dibina dalam pengeloaan keuangan	50			Kecamatan
KEPEGAWAIAN				4,144,471.80	
Program Pelayanan Administarsi Perkantoran				731,141.76	
Program Peningkatan Sarana dan Prassarana Aparatur				550,888.39	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				337,683.47	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur					
Program Pembinaan Pengembangan Aparatur				2,524,758.18	BKPSDM
	Persentase tingkat kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian (Aspek Syarat dan Prosedur)	0	0		

1	2	3	4	5	6
	Pemeringkatan Kompetensi Camat	6 besar tk. Prop	6 besar tk. Prop		Setda (Bagian Pemerintahan)
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				3,223,181.00	
Program Pendidikan Kedinasan				1,185,000.00	BKPSDM
	Persentase Pejabat Struktural Eselon II dan III yang telah mengikuti Diklat Pim II dan III	0	0		
	Persentase Pejabat Struktural Eselon IV yang telah mengikuti Diklat Pim IV	0	0		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				2,038,181.00	BKPSDM
	Jumlah Pegawai ASN yang Mengikuti Diklat dan Bimtek Teknis/Fungsional	1	1		
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				914,100.00	
Program Pengembangan sistem inovasi daerah				226,600.00	Bapedalitbang
	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah		1		
Program Penelitian, Pengembangan dan Pemanfaatan SDM dan IPTEK daerah				412,500.00	Bapedalitbang
	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan		0		
Program Peningkatan Kelembagaan dan Sumber Daya Kelitbangan				275,000.00	Bapedalitbang
	Persentase kerjasama yang dilaksanakan antara Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi/Lembaga Penelitian		1		
PENGAWASAN				2,215,060.33	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				658,473.14	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				276,214.57	
Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur				52,531.25	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur				-	
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH				262,674.87	
	Persentase OPD yang memiliki laporan keuangan pemerintah yang baik	90	90		INSPEKTORAT DAERAH
	Persentase obrok bebas temuan material dan aset oleh BPK dan Inspektorat	1	1		
	Persentase OPD yang mendapat nilai kategori SAKIP minimal bernilai B	0	100		
	Persentase Peluang mengikuti pendidikan formal, diklat kepemimpinan dan diklat teknis lainnya	60	1		
	Persentase OPD yang mengimplementasikan SPIP	70	90		
	Persentase kasus ganti kerugian negara/daerah yang ditangani		1		BPKD
	Persentase penyampaian perkembangan fisik dan keuangan OPD sesuai target dan tepat waktu		1		Setda (Bagian Pembangunan)
	persentase fungsi staf ahli, asisten 1, 2, 3 yang dilaksanakan secara optimal				setda
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan				345,118.76	INSPEKTORAT DAERAH
	Level kapabilitas APIP	2 dengan catatan	Level 3		
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan				620,047.75	
	Persentase pelelangan yang sesuai dengan aturan yang berlaku		1		Setda (Bagian PBJ)
	Persentase pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui SPSE		0		Setda (Bagian Pembangunan)
URUSAN PENDUKUNG				49,877,363.54	
URUSAN PENDUKUNG				49,877,363.54	
SEKRETARIAT DAERAH				18,864,395.79	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				6,737,833.21	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				3,302,965.80	

1	2	3	4	5	6
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (KDH)				4,269,701.22	
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur				303,663.61	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur					
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah				150,000.00	
	persentase aset setda yang dikelola dengan baik		85		
Program Pematapan Otonomi Daerah				636,866.06	Setda (Bagian Tata Pemerintahan, Kecamatan)
	Persentase tahapan penegasan batas wilayah administratif pemerintahan		0		
	Persentase tahapan pembakuan nama Rupa Bumi		1		
	Persentase nagari binaan perantau		0		
	Persentase penyelesaian permasalahan penyelenggaraan pemerintah daerah		1		
	Jumlah kerjasama dengan Pihak Ketiga		15 MoU		
	Persentase kehadiran stakeholder pada rapat koordinasi pimpinan daerah		1		
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan				732,033.96	Setda (Bagian Hukum)
	Persentase rancangan produk hukum yang difasilitasi		1		
	Persentase produk hukum yang dipublikasi		1		
Program Advokasi Pemerintah Daerah				229,384.66	
	Persentase sengketa hukum yang difasilitasi		1		
Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan				95,000.00	Setda (Bagian Perekonomian)
	Persentase agen dan pangkalan BBM dan Gas sesuai HET		1		
	Persentase peningkatan pengawasan terhadap energi baru dan terbarukan		1		
Program Peningkatan Pengawasan Akuntabilitas Kinerja Aparatur				535,000.00	
	Peningkatan Nilai AKIP		BB		
	Skor LPPD		3.100 (sangat tinggi) Peringkat II		
	Persentase tahapan penyampaian dokumen LKPJ		1		
Program Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik				650,000.00	
	Tingkat kepuasan masyarakat		BB		
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan				650,061	Bag Kesbang & Kecamatan, hukum
	Persentase peserta yang memahami penegathuan wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara	70	85		Bag Kesbang & Kecamatan
Program Pendidikan politik masyarakat				202,234.81	Kesbang (Setda)
	Persentase ormas/LSM yang memenuhi syarat administrasi lengkap	80	85		
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan				369,651.14	
	persentase pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi yang dilakukan	80			
	Persentase pelangan yang sesuai aturan yang berlaku	92	95		
	Persentase pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui SPSE	20	35		
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH				3,261,803.42	
Program pelayanan administrasi perkantoran (KDH)				2,375,167.74	
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah				376,091.60	
	Jumlah pelaksanaan keprotokoleran pemerintah daerah	50 kali	50 kali		
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH				510,544.07	
	Persentase penyampaian perkembangan fisik dan keuangan OPD sesuai target dan tepat waktu	75	75		Bag. AP. Setda

1	2	3	4	5	6
	persentase kegiatan yang selesai tepat waktu	90			
SEKRETARIAT DPRD				31,012,967.75	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				3,379,626.02	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				2,273,258.85	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				63,037.50	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur				507,294.28	
Program Peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah Perda yang dihasilkan			24,789,751	
	Jumlah Perda yang dihasilkan	200	15		Sekretariat DPRD
KEWILAYAHAN				7,625,813.98	
KEWILAYAHAN				7,625,813.98	
KECAMATAN				7,625,813.98	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				3,584,108.59	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				2,220,552.44	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				146,015.86	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur				-	
Program Pembangunan Wilayah Kecamatan				1,675,137.09	
	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan (Kali)	1	1		
	Terlaksananya koordinasi dan pembinaan dengan muspika (kali)	4	4		
	Terlaksananya bulan bhakti gotong royong masyarakat (kali)	1	1		
KESATUAN POLITIK DAN BANGSA				1,625,000.00	
KESATUAN POLITIK DAN BANGSA				1,625,000.00	
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan				810,000.00	
	Persentase kehadiran stakeholder dalam mengikuti Sidang Paripurna DPRD		1		Setda (Bagian Pemerintahan)
	Persentase peserta yang memahasi pengetahuan wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara		1		Setda (Bagian Kesbangpol)
Program Pendidikan politik masyarakat				815,000.00	Setda (Bagian Kesbangpol)
	Persentase jumlah ormas/LSM yang memenuhi syarat administrasi yang lengkap		1		

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

6.1. Indikator Kinerja Utama

Pengukuran keberhasilan rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah periode 2016-2021 tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka dipilih Indikator Kinerja Utama dan target capaian selama lima tahun ke depan menurut tujuan dan sasaran pada setiap misi

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang pengukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah periode 2016-2021 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berikut tabel target capaian indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah untuk Tahun 2019 dan 2020

Tabel. 6.1
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2019- 2020

NO	Indikator Sasaran	Target	
		2019	2020
Misi 1 :	Melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan Aparatur yang bersih dan Responsif dalam Rangka Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat.		
1	Penilaian Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP
2	Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	BB	BB
3	Skor Nilai LPPD	3230	3300
4	Level Maturitas SPIP	3	3
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	B	B
6	Umur Harapan Hidup	70,4	70,6
7	Rata-rata Lama Sekolah	8,46	8,69

NO	Indikator Sasaran	Target	
		2019	2020
8	Harapan Lama Sekolah	13,52	13,58
9	Persentase Sekolah yang berakreditasi B	90	100
Misi 2 :	Meningkatkan pembangunan InfrastrukturPrekonomian dan Infrastruktur Sosial yang Terkait dngan Sektor Unggulan Daerah		
1	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik	27.9	28.9
2	Persentase Jembatan kabupaten kondisi baik	80.22	84.72
3	Persentase Irigasi Kondisi Baik	54.27	56.99
4	Persentase pasar rakyat yang menuju kriteria SNI	27.27	36.36
5	Persentase Cakupan layanan telekomunikasi	50	50
6	Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	200	180
7	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas bencana	73	74
8	Persentase luasan kawasan Permukiman kumuh yang tertata	30	30
9	Persentase akses Sanitasi layak	65.77	67.85
10	Persentase Penduduk berakses air minum/bersih	92,47	96,16
Misi 3 :	Meningkatkan kehidupan Beragama yang Rukun, Toleran dan Mengembangkan Nilai-Nilai Budaya ABS-SBK		
1	Persentase mesjid yang memiliki TPQ aktif	69.55	71.51
2	Persentase Potensi Zakat yang dikelola oleh BAZ	85	90
3	Persentase sekolah yang menerapkan kontrol sholat 5 waktu terhadap siswa	80	90
4	Persentase KAN yang aktif	79	82
5	Persentase Sanggar Seni yang Aktif	75,67	77,03
6	Persentase Cagar Budaya yang di Lestarikan	26,92	28,85
Misi 4 :	Meningkatkan Produksi dan Nilai Tambah dengan Tetap Mengedepankan Pembangunan Berkelanjutan		
1	Peningkatan produksi utama		
	a. Padi	300.519	306.330

NO	Indikator Sasaran	Target	
		2019	2020
	b. Jagung	129.431	135.903
	c. Daging	4.520.417	4.556.033
	d. Telur	1.698.255	1.748.637
	e. Ikan	57.606	61.203
2	Skor Pola Pangan harapan	81	82
	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (berdasar atas harga konstan)	9,13	9,23
3	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (harga konstan)	12,77	12,95
4	Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara	2.800.000	2.900.000
5	Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	1.850	1.900
Misi 5 : Meningkatkan Peran Struktur Sosial Dalam Rangka Mengurangi Tindak Kejahatan, Kriminalitas dan Peredaran Obat-Obat Terlarang			
1	Persentase KAN yang aktif menangani tindak pidana ringan	5.40	8.10
2	Persentase penyelesaian kasus pemakai narkoba tingkat siswa dan aparaturnya	85	100
3	Persentase kasus PERDA yang diselesaikan	90.00	95.00
4	Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) yang aktif membina kelompok	75.81	81.18
5	Jumlah Dasa Wisma Maju	645	720

Sumber data : OPD Kab. Pessel 2017

6.2. Indikator Kinerja Daerah

Indikator Kinerja Daerah adalah indikator kinerja yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Dalam hal ini, indikator kinerja daerah lebih menggambarkan tujuan akhir otonomi daerah yang ditunjukkan dengan parameter kualitas manusia yang secara internasional diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM digunakan untuk mengevaluasi apakah aspek-aspek yang digunakan untuk mengukur kemampuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dipertanggungjawabkan.

Aspek-aspek tersebut meliputi : (1) aspek kesejahteraan masyarakat, (2) aspek daya saing daerah, serta (3) aspek pelayanan umum, dengan fokus Layanan Urusan Wajib Dasar Urusan Wajib Non dasar dan Urusan Pilihan, serta Penunjang Urusan sebagaimana format lampiran pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Penetapan target kinerja masing-masing indikator kinerja daerah, selain mempertimbangkan ketersediaan anggaran, kemampuan SDM, dan tingkat kinerja efektif, juga memasukkan semangat nilai-nilai gotongroyong dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang mendukung berbagai program guna tercapainya target kinerja sasaran. Dengan demikian, nilai-nilai gotong-royong menjadi faktor penting yang mempengaruhi tingkat capaian kinerja sasaran daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa tidaklah cukup upaya pencapaian target kinerja sasaran hanya disandarkan pada ketersediaan anggaran yang nilainya relatif kecil jika dibandingkan dengan banyaknya kegiatan yang perlu didanai dalam setiap tahunnya. Oleh karena itu, dibutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan untuk dapat memaknai dan mengimplementasikan nilai-nilai gotong-royong dalam pencapaian target kinerja selama lima tahun mendatang.

Target Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk tahun 2019 dan 2020 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 6.2
Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Baseline 2015	TARGET	
			2019	2020
1	2	3	4	5
A. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
1	Pertumbuhan PDRB	5,73	6,46	6,64
2	PDRB Perkapita Berlaku	22,849,248.30	31,150,000	33,250,000
3	Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan	92.57	93.43	93.85
4	Tingkat pengangguran terbuka (%)	11,69	5.50	5.30
5	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	68.07	70,55	71,19
	a. Angka Rata-rata Lama Sekolah	8.11	8.46	8.69
	b. Angka Harapan Hidup	69,96 (69,9 kes)	70,4 (70,4 kes)	70,6 (70,6kes)
B. ASPEK DAYA SAING DAERAH				
a	Lama proses perijinan	5 -5	14 hari(5 hari) 14 hr(3hr)	14 hari(5 hari) 14 hr(3 hr)
b	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	2	2 buah (HO dan IMB)	2 buah (HO dan IMB)
c	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	2	1	1
d	Rasio ketersediaan daya listrik	*85	-	-
e	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	*84.82	-	-
f	Persentase Penduduk yang menggunakan HP/Telepon	65.00	85.00	90.00
C. ASPEK PELAYANAN UMUM				
I.	LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR			
1	Urusan Pendidikan			
a	Angka Melek huruf	98,12	99.01	99.30
b	Angka Partisipasi Kasar			
	- APK SD/MI/Paket A	124,22	118.00	116.00
	- APK SMP/MTs/Paket B	101,61	103.76	104.49

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Baseline 2015	TARGET	
			2019	2020
1	2	3	4	5
	- APK SMA/SMK/MA/Paket C	92,52	93,08	93,26
c	Angka Pendidikan yang di Tamatkan			
	- APT SD/MI/Paket A	-	10,468	10,573
	- APT SMP/MTs/Paket B	-	9,926	10,025
	- APT SMA/SMK/MA/Paket C	-	7,02	7,091
d	Angka Partisipasi Murni			
	- APM SD/MI/Paket A	99,12	99,64	99,81
	- APM SMP/MTs/Paket B	89,9	90,17	90,26
	- APM SMA/SMK/MA/Paket C	77,82	78,52	78,76
e	Angka Partisipasi Sekolah			
	- APS 7-12 Tahun	99,10*	100	100
	- APS 13-15 Tahun	87,27*	88,41	88,59
f	Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah (SD,SMP)	73.95*	74.57	74.72
	- Rasio Guru Terhadap Murid	452.76*	455.94	456.85
	- Rasio Guru Terhadap Murid perkelas Rata-rata	0,03	0,03	0,03
g	Pendidikan Menengah			
	- APS 16-18 Tahun	73,38*	74,05	74,2
	- Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah	22,75*	23,75	23,8
	- Rasio Guru Terhadap Murid	454.45*	457.64	458.55
	- Rasio Guru Terhadap Murid perkelas Rata-rata	0,72	0,99	0,99
	- Penduduk yang Berusia > 15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)	98,08	98,87	99,06
h	Fasilitasi Pendidikan			
	- Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	94,52	95,28	95,47
	- Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik	87,5	88,2	88,38
i	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	45,2	45,56	45,65

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Baseline 2015	TARGET	
			2019	2020
1	2	3	4	5
j	Angka Putus Sekolah			
	- Angka Putus Sekolah SD/MI	0.07	0.07	0.07
	- Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0.12	0.12	0.12
	- Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA	0.16	0.16	0.16
k	Angka Kelulusan			
	- Angka Kelulusan SD/MI	99.99	100.00	100.00
	- Angka Kelulusan SMP/MTs	99.05	99.84	100.00
	- Angka Kelulusan SMA/SMK/MA	100.00	100.00	100.00
	- Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	96.45*	97.50	97.69
	- Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	91.82*	92.88	93.07
	- Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	90.25	90.97	91.15
2	Urusan Kesehatan			
a	Angka kematian ibu (Per 100.000 KH)	66,3	44,2	44,2
b	Angka kematian bayi (Per 1.000 KH)	4,6	4,6 -4,2	4,6 -4
c	Persentase Balita Gizi Buruk	8,9 (0)	7.50 (0)	6.60 (0)
d	Prevalensi Balita Gizi Kurang (%)	4,8	4,6	4,55
e	Rasio Posyandu per satuan Balita (Kewenangan Pindah ke Nagari)	1:80-100	1:80-100	1:80-100
f	Persentase Posyandu Mandiri	50	65	70
g	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan Penduduk	1:100000 -0,13	1:100000 -0,13	1:100000 -0,13
h	Rasio Rumah Sakit persatuan Penduduk	2:100000 (0,0088)	2:100000 (0,0088)	2:100000 (0,0088)
i	Rasio Dokter persatuan Penduduk	1,777777778 (-0,088)	1,777777778 (-0,088)	1,777777778 (-0,088)
j	Rasio Tenaga Medis persatuan Penduduk	0,944444444 (-0,13)	0,944444444 (-0,13)	0,944444444 (-0,13)

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Baseline 2015	TARGET	
			2019	2020
1	2	3	4	5
k	Cakupan komplikasi Kebidanan yang ditangani	74,39	80 -90	80 -90
l	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan	93,19	90 -93	90 -95
m	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	86.01	86.00 (92)	86.00 (94)
n	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100
o	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	82.70 (70)	100.00 (70)	100.00 (70)
p	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	100	100	100
q	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	65 (65)	50 (40)	45 -30
r	Cakupan Kunjungan Bayi	87.12	89.00 (90)	90.00 (90)
s	Cakupan Puskesmas (persen)	2.50 (1,2)	2.50 (1,33)	2.50 (1,33)
t	Cakupan Puskesmas Pembantu	50 (0,37)	100 (0,37)	100 (0,37)
u	Persentase Balita Gizi Buruk (yg dpt perawatan)	100	100	100
v	Persentase peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD			
3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
3.1	Pekerjaan Umum			
a	Proporsi panjang jaringan jalan kondisi baik		0.28	0.29
b	Persentase Jalan Kabupaten dengan kondisi mantap (baik + sedang)		38.72	39.58
c	Rasio Jaringan Irigasi	47.62	54.64	56.55
d	Panjang kerusakan sungai dan pantai yang tertangani dan sungai yang dinormalkan (km)	N/A	23,01	26,53
e	Luas genangan air yang dikeringkan (ha)	N/A	1.014,50	1.092,50
f	Persentase jumlah penduduk yang terlayani pengelolaan persampahan	40	60	60

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Baseline	TARGET	
		2015	2019	2020
1	2	3	4	5
g	Panjang jalan dilalui roda 4	1,924.00	2,044.00	2,084.00
h	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air	0.35	0.64	0.72
3.2	Penataan Ruang			
a	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	0.03	0.07	0.07
b	Luas RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kaawasan perkotaan	3.00	7.00	7.00
4	Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman			
a	Rasio rumah layak huni	0.23	0.2156	0.2167
b	Persentase penduduk berakses air minum/bersih	85.37	92.47	96.16
c	Persentase Rumah tangga berakses sanitasi layak	63.76	65.77	67.85
d	Lingkungan pemukiman kumuh	12.88	12.87	12.87
e	Rumah layak huni	75.56	75.55	75.23
5	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat			
a	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk (%)	1,85 -2,24	4,086 -5,39	5,13 -6,47
b	Cakupan Patroli petugas Satpol PP	1 kali sehari	3 kali sehari (2 kali sehari)	3 kali sehari (2 kali sehari)
c	Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	95%	98%	99%
d	Petugas Perlindungan Masyarakat (linmas) di Kabupaten (%)	0,02% (-)	0,03% -0,3	0,04% -0,35
f	Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten (%)	5 (-0,39)	5 (0,52)	5 (0,52)
g	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (%)	15 menit (-60,94)	87 (71,15)	89 (-73,58)
b	Penegakan PERDA	96%	98%	99%
6	Urusan Sosial			
a	PMKS yang memperoleh bantuan	12,271	20.650 jiwa / kk	23.720 jiwa /kk

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Baseline 2015	TARGET	
			2019	2020
1	2	3	4	5
b	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial/penanganan PMKS	12,271	20.650 jiwa / kk	23.720 jiwa /kk
c	Sarana sosial seperti Panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi	9 panti	10 panti	10 panti
d	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	N/A	80	85
II	LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR			
1	Urusan Tenaga Kerja			
a	Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun	-	2 kasus	2 kasus
b	Angka partisipasi angkatan kerja	56,74	62.12	62.50
c	Tingkat partisipasi angkatan kerja	56,74	62.12 (57,06)	62.50 (57,14)
d	Pencari kerja yang ditempatkan	94	250	300
e	Keselamatan dan perlindungan		27 perusahaan	30 perusahaan
2	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
a	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	8.77	9.10	9.50
b	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	71.68	5.31	5.35
c	Rasio KDRT	0.0092	0.015	0.014
d	Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur	0,26	0.25	0.21
e	Partisipasi angkatan kerja perempuan	91.23	73.40	74.20
f	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100	89	90
g	Persentase OPD yang menerapkan Anggaran Responsif Gender (persen)			
3	Urusan Pangan			
a	Regulasi Ketahanan Pangan	- (-)	1 (-)	1 (-)
b	Ketersediaan Pangan Utama (Kg/jiwa/thn)	132.13	144.00	144.00
c	ketersediaan energi (kkal/kap/hari) minimal 2.400	3.754	2.400	2.400
d	ketersediaan protein (gram/kap/hari) minimal 63,00	83.73	63	63

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Baseline 2015	TARGET	
			2019	2020
1	2	3	4	5
e	Skor pola pangan harapan (%) Catt: disarankan dihapus karena double sm iku	77, 20 (77, 20)	81 (77, 20)	82 (77, 20)
f	Tingkat Kecukupan konsumsi pangan			
	- Konsumsi energi (kkal/kap/hari) minimal 2.150	2.320	2.150	2.150
	- Konsumsi protein (gram/kap/hari) minimal 57	59.2	57	57
h	Stabilitas harga pangan pokok di tingkat produsen			
	- Harga gabah (Rp/Kg)	4.054	≥ HPP	≥ HPP
	- Harga beras (Rp/Kg)	7.848	≥ HPP	≥ HPP
i	Stabilitas harga pangan pokok di tingkat konsumen	12, 90	CV ≤ 5	CV ≤ 5
j	Persentase bahan pangan yang aman dikonsumsi masyarakat	74,6	79	80
4	Urusan Pertanahan			
a	Persentase Penyelesaian masalah pertanahan milik pmda	100	100	100
b	Persentase luas lahan bersertifikat			
c	Penyelesaian izin lokasi			
5	Urusan Lingkungan Hidup			
a	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal (%) (Cakupan pengawasan terhadap izin lingkungan) %	100 -100	100 -100	100 -100
b	Penegakan hukum lingkungan Penegakan hukum lingkungan yang terfasilitasi (kasus)	5	5	5
c	Jumlah Penyelesaian pengaduan masyarakat dibidang perlindungan, pengelolaan lingkungan hidup	8	7	7
d	Indeks Kualitas lingkungan Hidup :			
	- Indeks kualitas air	C Dan D (Tercemar Sedang)	B (tercemar ringan)	B (tercemar ringan)
	- Indeks kualitas Udara	Diambang Kualitas Udara baik	Diambang Kualitas Udara baik	Diambang Kualitas Udara baik
	-SO2	17,38 µ/NM ³	60 µ/NM ³	60 µ/NM ³

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Baseline	TARGET	
		2015	2019	2020
1	2	3	4	5
	-NO2	16,6 µ/NM³	100 µ/NM³	100 µ/NM³
6	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
a	Rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk	0.66	4,93 -0,91	4,96 -0,93
b	Rasio Bayi berakte kelahiran	0,81 -0,267	2,24 -0,94	2,28 -0,95
c	Kepemilikan KTP Kepemilikan KTP (%)	257,739 66	318,939 91	333,939 93
d	Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	224.46 224.46	380,066 594,79	468,48 684,79
e	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK			
	- NIK pemutakhiran data penduduk	545,712 514.264	579,198 538.253	587,886 543.636
	- Penerbitan	257,739 257.739	449,478 308.626	471,951 324.057
	- Penerapan e-KTP	289,34	seumur hidup	seumur hidup
7	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
a	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (Jumlah LPM Aktif)	4.00 100	6.29 141	6.89 151
b	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (PKK Aktif)	680 101	84 149	85 159
c	PKK Aktif	85.00	9,622	10,935
d	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (%)	40.00 (4,5)	47.00 (5)	49.00 (5)
e	Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	-	11.0	12.5
8	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
a	Rata-rata jumlah anak per keluarga	1.68 1,68	1.63 1,66	1.62 1,65

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Baseline	TARGET	
		2015	2019	2020
1	2	3	4	5
b	Rasio Akseptor KB	1.63 61,5	65.0 68,7	65.5 68,8
c	Cakupan peserta KB aktif	61.05 0,61	0.65 0,68	0.65 0,68
d	Keluarga Pra sejahtera dan keluarga sejahtera I	68.89	0.66	0.65
9	Urusan Perhubungan			
a	Jumlah arus penumpang angkutan umum	3,409,976 935.796	6,432,566 1.750.000	7,505,252 2.000.000
b	Jumlah uji KIR angkutan Umum	9.954 9.954	9,5 7.700	10 8.200
c	Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis (angkutan umum)	3 2	3 4	3 5
d	Angkutan darat	0.10 0,88	0.05 0,96	0.05 0,98
e	Kepemilikan KIR angkutan umum	2.33 2.33	1.27 4,1	1.21 3,9
f	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	30 Menit	30 Menit	30 Menit
g	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	61.000	61.000	61.000
h	Pemasangan rambu-rambu per tahun	0.20 12,75	0.05 2,16	0.05 2,25
i	Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan	0.05 0,05	0.04 0,027	0.04 0,026
j	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	2,188,805 1.285.300	3,748,187 1.750.000	4,319,339 2.000.000
k	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal pertahun Jumlah orang yang melalui dermaga pertahun	3,921,472 98.577	7,075,822 145.000	8,330,829 160.000
	Jumlah halte	25	33	37
	Jumlah dermaga/tambatan kapal	2	4	5
	Jumlah terminal	2	3	3

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Baseline	TARGET	
		2015	2019	2020
1	2	3	4	5
10	Urusan Komunikasi dan Informatika			
a	Jumlah Jaringan Komunikasi	5 operator 5 operator	3 5	3 5
b	Jumlah surat kabar nasional/lokal	5 Media	62	62
c	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	3	3	3
d	Website milik Pemerintah Daerah	1 1	3 1	3 1
e	Pameran/Expo	1	6	6
f	Persentase Penduduk yang menggunakan HP/telepon	65.00	85.00	90.00
11	Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
a	Jumlah Koperasi	299	389	409
b	Persentase koperasi aktif (%)	55.00	62.00	64.00
c	Persentase koperasi aktif yang melakukan RAT (%)	36	45	50
d	Persentase Usaha mikro dan kecil (%)	99.23	97.00	96.5
12	Urusan Penanaman Modal			
a	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (per tahun)	24 -9	32 -13	34 -14
b	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	229,894,604,400 -62.500.000.000	250,000,000,000 -74.000.000.000	300,000,000,000 -76.000.000.000
c	Rasio daya serap tenaga kerja	97.00 (33.5)	97.80 (36.0)	98.00 (36.5)
d	kerjasama Investasi	- (-)	1 MoU (-)	1 MoU (1 MoU)
e	(Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN)	-92	-96	-97
13	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga			
a	Jumlah organisasi pemuda	42	48	49
b	Jumlah organisasi olahraga	29	44	48

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Baseline 2015	TARGET	
			2019	2020
1	2	3	4	5
c	Jumlah kegiatan kepemudaan	15	19	20
d	Jumlah kegiatan olahraga	21	23	23
e	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	1	1	2
f	Lapangan olahraga	40 -92	41 -95	41 -96
g	Jumlah Klub Olahraga	33	36	37
h	Jumlah Gedung Olahraga	5	8	9
14	Urusan Statistik			
a	Data Statistik Pembangunan Daerah	ada	ada	ada
b	Buku “Kabupaten Dalam Angka”	ada	ada	ada
15	Urusan Kebudayaan			
a	Jumlah Grup Kesenian	66	69	70
b	Jumlah Gedung Kesenian	1	3	3
16	Urusan Perpustakaan			
a	Jumlah Perpustakaan	6	- (179)	- -197
b	jumlah pengunjung perpustakaan daerah pertahun (jumlah kunjungan perpustakaan)	4,274	-30.000	-40.000
c	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	1000 -	-0,46	-0,46
17	Urusan Kearsipan			
a	Pengelolaan Arsip secara baku	2	10	10
	Persentase pengelola arsip di OPD secara digital	-	28,89%	26,67%
b	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	- -	40 3	40 3

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Baseline 2015	TARGET	
			2019	2020
1	2	3	4	5
III	LAYANAN URUSAN PILIHAN			
1	Urusan Pariwisata			
a	Kunjungan wisata (orang)	2.001.600	2.801.850	2.901.900
	- wisatawan mancanegara (orang)	1.600	1.850	1.900
	- wisatawan nusantara (orang)	2.000.000	2.800.000	2.900.000
b	Lama Tinggal Wisatawan (Hari)			
	- wisatawan mancanegara (Hari)	2	3	3,25
	- wisatawan nusantara (Hari)	1	2	2,25
2	Urusan Pertanian			
a	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%)	33.43	32.59	32.26
b	Produktifitas padi per hektar (kw/ha)	50.92 (50.92)	53.12 (51.52)	53.78 (51.65)
c	Cakupan Bina Kelompok Pertanian(%)	10 (30.33)	30 (52.00)	35 (60.00)
d	Penurunan Kasus Penyakit Hewan (%)	0,5	2,5	3
e	Cakupan Pengawasan bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan (%)	13,33	26,67	33,33
3	Urusan Kehutanan			
a	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	805.00	200	200
b	Kerusakan Kawasan Hutan	0.03	0.35	0.40
c	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	-	0.37	0.37
4	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral			
a	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	1,54	1.57	1.54
5	Urusan Perdagangan			
a	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	12.20	12.77	12.95

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Baseline 2015	TARGET	
			2019	2020
1	2	3	4	5
b	Pasar Rakyat yang menuju kriteria SNI 8152:2015 (unit)	0	3.00	4.00
c	Cakupan bina kelompok pedagang (%)	0.00	10	20
6	Urusan Perindustrian			
a	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	8.80	9.13	9.23
b	Pertumbuhan Industri (%)	1.90	2.39	2.59
c	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin (%)	0.46	0.54	0.56
e	Persentase tenaga kerja sektor industri (%)	7.53	8.42	8.82
f	Jumlah sentra IKM (unit)	1	4	5
g	Produk IKM yang berkualitas (bersertifikat) (unit)	43	75	80
7	Uruasan Transmigrasi			
a	Transmigran swakarsa	21	-	-
8	Urusan Kelautan dan Perikanan			
a	Produksi perikanan	46.660	57.606	61.203
b	Peningkatan Produksi perikanan (%)		6.79	6.24
	Budidaya	10.327 Ton	8 (15.666 Ton)	7 (16.763 Ton)
	Tangkap	37.909 Ton	6,34 (41.940 Ton)	5,96 (44.440 Ton)
c	Konsumsi Ikan (kg/org/kapita)	33.85	38	39
d	Cakupan bina kelompok nelayan	185	220	237
e	Produksi perikanan kelompok nelayan	23.356	27.261	28.000
IV.	PENUNJANG URUSAN			
1	Perencanaan Pembangunan			
a	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	-	-	-

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Baseline	TARGET	
		2015	2019	2020
1	2	3	4	5
b	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	-	-	-
c	Tersedianya dokumen perencanaan RPKD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	1	1	1
d	Tersedianya Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	-	-	-
2	Keuangan			
a	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP
b	Peningkatan PAD	- (116.095.536.070)	- (154.523.158.509)	- (169.975.474.360)
c	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	10	10	10
3	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan			
4	Penelitian dan Pengembangan			
b	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	0	4.44	4.44
c	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	0	66.67	100
d	Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	0	2	2
5	Pengawasan			
a	Kapabilitas APIP (level)	-	3	3
b	Persentase hasil temuan pengawasan yang telah ditindaklanjuti	80	85	90
	Jumlah Temuan BPK	18	16	15
6	Sekretariat DPRD			
a	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten	Tidak	Ada	Ada
b	Tersusun dan terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakn Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Thaunan (RPJM) maupun Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada	Ada

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Baseline 2015	TARGET	
			2019	2020
1	2	3	4	5
c	Terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada	Ada
3	Fungsi Lainnya (NF)			
a	Sistem Informasi Pelayanan Perizinan dan Administrasi Pemerintah	1 -1	2 (-)	2 (-)
d	Persentase produk hukum yang dipublikasi	95	95	95
d	Sistem Informasi Manajemen Pemda (Komimfo)	20	20	20
j	Rata-rata laju pertumbuhan penduduk (%)		0.86	0.86

Sumber data : OPD Kab. Pessel 2017

BAB VII

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 merupakan tahun ke empat dari penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. RKPD ini memuat berbagai prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah serta rencana kerja dan pendanaan pembangunan yang bersifat indikatif dengan mempedomani Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 dan RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun **2005-2025**.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 menjadi pedoman untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019.

RKPD Kabupaten Pesisir Selatan disusun berdasarkan peraturan yang berlaku serta diperlukan koordinasi dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui forum-forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang berfungsi untuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi rencana kegiatan, penyelarasan program dan kegiatan yang tercantum dalam agenda nasional maupun provinsi Sumatera Barat. Disamping itu, penyusunan program dan kegiatan dalam RKPD ini telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga diperlukan pencermatan terhadap potensi pembiayaan baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten serta swadaya masyarakat agar terjadi sinergisitas dan sinkronisasi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Rancangan program dan kegiatan dalam RKPD berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi OPD dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, serta menjadi acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya dalam pembangunan serta untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

Melalui RKPD Tahun 2019 ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi dan misi Kabupaten pesisir Selatan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021.

Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan, baik yang berupa upaya pemecahan masalah ataupun pengembangan dan penggalan potensi daerah bukan merupakan hasil kerja pemerintah semata, namun juga berkat dukungan, kerja sama juga peran serta masyarakat dalam proses pembangunan sehingga visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dapat terwujud.

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

Tabel 2.64
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2018
KABUPATEN PESIRIS SELATAN

No	Kode Rekening						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/(Output)	Target RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2021		Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Berjalan (2018) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggung Jawab
1	2						3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	k	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
							URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB																
							URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR																
I							URUSAN PENDIDIKAN																
1	01	01	01	01	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemenuhan pelayanan administrasi kantor (%)	97,01	15.672.819.000	32,34	5.600.401.000	16,17	2.573.167.000	4,04	474.602.254	25,00	18,44	36,38	6.075.003.254	37,50	38,76	Dinas Pendiidkan dan Kebudayaan
	01	01	01	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Adanya/Tersedianya Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada kantor	72	657.600.000	24	273.600.000	12	96.000.000	0	15.928.000	-	16,59	24	289.528.000	33,33	44,03	
	01	01	01	01	01	07	Penyedia Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Adminstras Keuangan	100	890.100.000	24	346.996.000	12	148.350.000	1	37.087.500	8,33	25,00	25	384.083.500	25,00	43,15	
	01	01	01	01	01	08	Penyedia Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa kebersihan kantor	100	193.224.000	24	64.598.000	12	32.204.000	2	8.051.000	16,67	25,00	26	72.649.000	26,00	37,60	
	01	01	01	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersediannya Alat tulis Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100	183.258.000	24	156.000.000	12	30.543.000	3	7.635.750	25,00	25,00	27	163.635.750	27,00	89,29	
	01	01	01	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Tesedianya Barang cetakan dan Pengadaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100	350.190.000	24	266.970.000	12	58.365.000	4	14.591.250	33,33	25,00	28	281.561.250	28,00	80,40	
	01	01	01	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100	180.000.000	24	86.000.000	12	30.000.000	5	7.500.000	41,67	25,00	29	93.500.000	29,00	51,94	
	01	01	01	01	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya fasilitas/peralatan pendukung/penunjang untuk Kelancaran pelaksanaan pekerjaan aparatur dalam rangka pelayanan administrasi perkantoran	6	494.150.000	2	314.150.000	1	30.000.000	6	-	600,00	-	8	314.150.000	133,33	63,57	

1	2						3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	k	Rp	K	Rp.	K	Rp.	
	01	01	01	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peratruan Perundang-undangan	72	83.400.000	24	30.000.000	12	13.900.000	7	3.475.000	58,33	25,00	31	33.475.000	43,06	40,14	
	01	01	01	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makan Minum Pegawai	72	483.510.000	24	230.000.000	12	80.585.000	8	20.146.250	66,67	25,00	32	250.146.250	44,44	51,74	
	01	01	01	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya rapat koordinas keluar daerah	100	1.212.300.000	33	439.100.000	16,5	202.050.000	9	50.512.504	54,55	25,00	42	489.612.504	42,00	40,39	
	01	01	01	01	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dalam daerah	100%	612.000.000	33	158.500.000	16,5	102.000.000	10	25.500.000	60,61	25,00	43	184.000.000	4300,00	30,07	
	01	01	01	01	01	22	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan	90	462.000.000	45	154.000.000	15	77.000.000	11	-	73,33	-	56	154.000.000	62,22	33,33	
	01	01	01	01	01	23	Penyediaan Biaya Operasional Unit Kerja Bawahan	Tercapainya kegiatan Penyediaan Biaya Operasiaonal Unit Kerja Bawahan	100	1.432.200.000	33	435.600.000	16,5	238.700.000	12	59.675.000	72,73	25,00	45	495.275.000	45,00	34,58	
	3	00	02	01	21	27	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS	Tersedianya tenaga guru di lingkungan sekolah tingkat SD dan SMP dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di tingkat dasar dan tenaga pegawai pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka pelayanan adminstasi perkantoran	6	8.071.387.000	2	2.547.387.000	1	1.381.000.000	13	224.500.000	1.300,00	16,26	15	2.771.887.000	250,00	34,34	
	01	01	01	01	01	33	Peringatan Hari-Hari Besar Nasional	Sebagai perwujudan nyata keikutsertaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam memperingati Hari-Hari Besar Nasional	50	187.500.000	20	37.500.000	10	22.470.000	14	-	140,00	-	34	37.500.000	68,00	20,00	
	01	01	01	01	01	37	Operasional UPTD Pendidikan dan Kebudayaan	Tersedianya Operasiaonal UPTD Pendidikan dan Kebudayaan	100	180.000.000	33	60.000.000	16,5	30.000.000	15	-	90,91	-	48	60.000.000	48,00	33,33	
2	01	01	01	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan sarpras aparatur (%)	100	1.287.624.000	33	399.418.000	16,5	214.604.000	4	44.901.000	24,24	20,92	37	444.319.000	37,00	34,51	Dinas Pendiidkan dan Kebudayaan
	01	01	01	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya bangunan yang aman dan nyaman untuk suasana kerja	100	210.000.000	33	100.000.000	16,5	35.000.000	0	-	-	-	33	100.000.000	33,00	47,62	
	01	01	01	01	02	24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya secara berkala kendaraan dinas untuk operasional	100	825.624.000	33	215.418.000	16,5	137.604.000	1	34.401.000	6,06	25,00	34	249.819.000	34,00	30,26	
	01	01	01	01	02	30	Pemeliharaan Rutin / berkala Alat - Alat Kantor	Terpeliharanya Alat-alat Kantor	100	252.000.000	33	84.000.000	16,5	42.000.000	2	10.500.000	12,12	25,00	35	94.500.000	35,00	37,50	

1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12	
	K	Rp.						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	k	Rp	K	Rp.	K	Rp.				
3	01	01	01	01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	pemenuhan aparatur yang profesional (%)	100	749.211.000	40,00	249.547.000	20,00	124.916.000	6,67	59.102.000	33,33	47,31	46,66666667	308.649.000	46,67	41,20	Dinas Pendiidkan dan Kebudayaan
							Pendidikan dan Pelatihan Formal	Menghasilkan tenaga ASN yang berkualitas	1	300.000.000	1	100.000.000	1	50.000.000	0	-	-	-	1	100.000.000	100,00	33,33	
	01	01	01	01	05	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Tleraksananya BinteK Kepegawaian	900	449.211.000	300	149.547.000	150	74.916.000	150	59.102.000	100,00	78,89	450	208.649.000	50,00	46,45	
4	1	01	01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase Kenaikan APK SD	0,78	111.287.938.000	0,26	19.692.321.000	0,13	21.893.531.000	0,0325	384.164.350	25,00	1,75	0,2925	20.076.485.350	37,50	18,04	Dinas Pendiidkan dan Kebudayaan
								Persentase Kenaikan APM SD	0,78		0,26		0,13		0,0325		25,00		0,2925		37,50		
								Persentase Kenaikan APK SMP	4,16		1,40		0,7		0,175		25,00		1,575		37,86		
								Persentase Kenaikan APM SMP	0,82		0,20		0,1		0,025		25,00		0,225		27,44		
	1	01	01	01	16	09	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	Terpenuhinya kebutuhan prasarana parkir di sekolah	1	1.000.000.000	0	-	1	75.000.000	1	-	100,00	-	1	-	100,00	0,00	
	1	01	01	01	16	100	Pembangunan / Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar (DAK Reguler 2018)	Rehabilitasi Ruang Kelas, Pembangunan RKB, Jamban, Koleksi Perpustakaan	288	37.774.200.000	22	3.767.000.000	48	6.295.700.000	1	3.266.000	2,08	0,05	23	3.770.266.000	7,99	9,98	
	1	01	01	01	16	101	Lomba Peningkatan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Lomba-lomba bagi siswa SMP yang menghasilkan utusan ke tingkat Propinsi dan Nasional	32	1.942.500.000	7	498.962.000	10	647.500.000	1	52.580.000	10,00	8,12	8	551.542.000	25,00	28,39	
	01	01	01	01	16	104	Operasional Sarana Mobilitas Daerah Terpencil	Operasional Kapal dan Pemeliharaan Kapal SMPN 6 Koto XI Tarusan	6	1.129.950.000	2	376.650.000	1	188.325.000	0,1	3.266.000	10,00	1,73	2,1	379.916.000	35,00	33,62	
	01	01	01	01	16	106	Monitoring, Evaluasi Penggunaan Dana BOS SMP	Tercapainya Monitoring Evaluasi Penggunaan Dana BOS SMP	16	160.000.000	0	-	4	40.000.000	1	1.205.000	25,00	3,01	1	1.205.000	6,25	0,75	
	1	01	01	01	16	117	Pengadaan Mobiler Sekolah SMP	Pengadaan Mobiler Sekolah SMP	102	4.500.000.000	17	1.467.355.000	17	750.000.000	0	-	-	-	17	1.467.355.000	16,67	32,61	
	1	01	01	01	16	125	Penyelenggaraan Gebyar Pendidikan Tingkat Provinsi dan Pusat	Perlombaan diBidang Seni	6	471.216.000	1	-	1	78.536.000	0	-	-	-	1	-	16,67	0,00	
	01	01	01	01	16	59	Penyelenggraan Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tersusun naskah soal Penilaian Tengah Semester, Penilaian Akhir Semester, Pra Un dan Soal USBN tingkat SMP	6	3.760.000.000	2	960.000.000	1	700.000.000	1	119.161.000	100,00	17,02	3	1.079.161.000	50,00	28,70	
	1	01	01	01	16	129	Pengadaan Komputer Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dan Ujian Kompetensi Guru (UKG)	Terpenuhinya prasarana komputer untuk ujian nasional berbasis komputer (UNBK)	1	9.000.000.000	1	532.800.000	1	1.500.000.000	1	2.100.000	100,00	0,14	2	534.900.000	200,00	5,94	
	1	01	01	01	16	131	Pembangunan / Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar (DAK Afirmasi 2018)	Pembangunan Rumah Dinas Guru	24	3.231.270.000	0	-	4	538.545.000	0	-	-	-	0	-	0,00	0,00	

1	2						3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	k	Rp	K	Rp.	K	Rp.	
	1	01	01	01	16	132	Pemb./Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarpras SMP (DAK Reguler 2018)	Terpenuhinya kebutuhan sarpras dan tersedianya bangunan yang representatif di sekolah	7	25.000.000.000	5	6.500.000.000	6	6.338.000.000	1	7.220.000	16,67	0,11	6	6.507.220.000	85,71	26,03	
	1	01	01	01	16	133	Pemb./Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarpras SMP (DAK Afirmasi 2018)	Tersedianya rumah dinas guru di sekolah	1	700.000.000	0	-	1	158.000.000	1	-	100,00	-	1	-	100,00	0,00	
	1	01	01	01	16	18	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Pengadaan Alat Drum Band	18	750.000.000	0	-	3	125.000.000	0	-	-	-	0	-	0,00	0,00	
	1	01	01	01	16	51	Rehabilitasi Sedang/Berat Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	Pembangunan Lapangan Upacara dan Pagar SD 38 Api-api	6	1.080.000.000	0	-	1	180.000.000	0	-	-	-	0	-	0,00	0,00	
	01	01	01	01	16	127	Pelatihan Penyusunan Kurikulum	terlaksana pelatihan bagi Tim Pengembang Kurikulum Kabupaten dan dokumen kurikulum SD dan SMP telah diverifikasi dan divalidasi	6	1.379.130.000	2	459.710.000	1	229.855.000	0	-	-	-	2	459.710.000	33,33	33,33	
	1	01	01	01	16	70	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Lomba O2SN dan FLS2N	6	1.954.202.800	2	630.388.000	1	315.194.000	0	-	-	-	2	630.388.000	33,33	32,26	
	1	01	01	01	16	76	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar	Penilaian Akreditasi SD dan SMP dengan Nilai B	75	390.388.000	24	149.963.000	25	130.000.000	0	-	-	-	24	149.963.000	32,00	38,41	
	1	01	01	01	16	80	Penyelenggara Pendidikan Sekolah Dasar	Persiapan Ujian di Sekolah Dasar (naskah soal)	1	1.067.059.200	1	889.216.000	1	889.216.000	0	40.460.000	-	4,55	1	929.676.000	100,00	87,13	
	1	01	01	01	16	81	Lomba Tingkat Pendidikan Sekolah Dasar	Lomba Matematika dan Sains tingkat SD	6	496.000.000	2	160.000.000	1	80.000.000	1	35.453.000	100,00	44,32	3	195.453.000	50,00	39,41	
	01	01	01	01	16	83	Monitoring, Evaluasi Penggunaan Dana BOS SD	Tercapainya Monitoring Evaluasi Penggunaan Dana BOS SD	16	329.600.000	0	-	4	82.400.000	1	14.017.000	25,00	17,01	1	14.017.000	6,25	4,25	
	01	01	01	01	16	51	Sosialisasi dan Informasi Pendidikan Dasar	Terlaksananya Sosialisasi dan Informasi Pendidikan Dasar	4720	937.010.000	944	199.978.000	944	184.258.000	465	92.811.000	49,26	50,37	1409	292.789.000	29,85	31,25	
	1	01	01	01	16	87	Penyelenggaraan Pendidikan Karakter di Pendidikan Dasar	Memberikan Pelatihan kepada guru-guru SD	6	849.400.000	2	274.000.000	1	137.000.000	0	-	-	-	2	274.000.000	33,33	32,26	
	1	01	01	01	16	88	Pembangunan Ruang Kelas Baru SD	Pembangunan Ruang Kelas Baru SD	18	3.240.000.000	2	300.000.000	3	540.000.000	1	12.600.000	33,33	2,33	3	312.600.000	16,67	9,65	
	1	01	01	01	16	93	Pengadaan Mobiler Sekolah SD	Pengadaan Mobiler Sekolah SD	138	4.500.000.000	20	1.726.299.000	23	750.000.000	0	-	-	-	20	1.726.299.000	14,49	38,36	
	1	01	01	01	16	94	Pembangunan Pagar SD	Pembangunan Pagar Sekolah	48	5.646.012.000	5	800.000.000	8	941.002.000	1	25.350	12,50	0,00	6	800.025.350	12,50	14,17	
5	01	1	01	03	15		Program pendidikan anak usia dini	Persentase Kenaikan APK PAUD	17	2.905.899.000	9	588.634.000	9	522.875.000	2,25	74.360.000	25,00	14,22	11,25	662.994.000	67,37	22,82	Dinas Pendiidkan dan Kebudayaan

1	2						3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	k	Rp	K	Rp.	K	Rp.	
	01	1	01	03	15	45	Lomba Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-kanak	Jumlah peserta didik PAUD yang berpartisipasi dalam lomba tingkat kabupaten dan provinsi	630	1.095.824.000	210	345.824.000	150	180.000.000	105	45.555.000	70,00	25,31	315	391.379.000	50,00	35,72	
	01	1	01	03	15	47	Pelatihan Verifikasi Bantuan Program PTK PAUD	Jumlah pengelola PAUD yang mengikuti pelatihan verifikasi PTK PAUD	1657	1.100.000.000	607	162.810.000	332	200.000.000	0	-	-	-	607	162.810.000	36,63	14,80	
	01	1	01	03	15	48	Pembinaan pada Lembaga PAUD Percontohan	Jumlah PAUD yang dibina	60	329.600.000	0	-	15	82.400.000	0	-	-	-	0	-	0,00	0,00	
	01	1	01	03	15	58	Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama PAUD	Jumlah PAUD yang dikoordinasikan	2090	380.475.000	418	80.000.000	418	60.475.000	375	28.805.000	89,71	47,63	793	108.805.000	37,94	28,60	
6	1	01	01	01	18		Program Pendidikan Non Formal	Persentase kenaikan angka melek aksara penduduk dewasa	0,98	20.755.617.000	0,15	9.101.282.000	0,38	1.301.076.000	0,095	215.870.000	25,00	16,59	0,245	9.317.152.000	25,00	44,89	Dinas Pendiidkan dan Kebudayaan
	1	01	01	01	18	01	Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal	Kelancaran pelaksanaan pelatihan tutor fungsional	210	300.000.000	30	45.000.000	40	66.000.000	0	-	-	-	30	45.000.000	14,29	15,00	
	1	01	01	01	18	19	Pelatihan LKP dan PKBM	Meningkatnya mutu SDM Pengelola LKP dan PKBM	336	900.000.000	56	150.000.000	40	155.000.000	40	42.805.000	100,00	27,62	96	192.805.000	28,57	21,42	
	01	1	01	03	18	23	Penyelenggaraan Paket C Setara SMA	Terlaksananya Pendidikan Non Formal	58	16.009.360.000	29	8.004.681.000	12	470.000.000	12	60.000.000	100,00	12,77	41	8.064.681.000	70,69	50,37	
	1	01	01	01	18	27	Penyelenggaraan Pendidikan keluarga	Terlaksananya sosialisasi pada guru PAUD tentang Pendidikan Keluarga	500	1.048.000.000	80	524.000.000	200	262.000.000	0	-	-	-	80	524.000.000	16,00	50,00	
	01	1	01	03	18	28	Pelaksanaan UNPK B	Berkurangnya anak-anak putus sekolah setara SMP	617	300.000.000	166	54.975.000	150	66.400.000	0	-	-	-	166	54.975.000	26,90	18,33	
	01	1	01	03	18	29	Pelaksanaan UNPK C	Berkurangnya anak-anak putus sekolah setara SMA	1097	350.000.000	507	54.975.000	800	80.000.000	0	-	-	-	507	54.975.000	46,22	15,71	
	1	01	01	01	18	12	Hari Aksara Internasional (HAI)	Bertambah wawasan dan pengembangan peserta lomba	300	510.000.000	0	0	50	71.276.000	0	-	-	-	0	-	0,00	0,00	
	01	1	01	03	18	30	Pelatihan Tutor Paket C	Meningkatnya SDM Tutor Paket C	648	1.338.257.000	108	267.651.000	108	130.400.000	108	113.065.000	100,00	86,71	216	380.716.000	33,33	28,45	
7	1	01	01	01	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah guru SD dan SMP Profesional	2.935	70.291.175.000	978	13.078.886.000	489	14.293.169.000	122	102.890.000	25,00	0,72	1100,625	1.661.673.000	37,50	2,36	Dinas Pendiidkan dan Kebudayaan
								Jumlah Kepala Sekolah Profesional	465		465		465		0		-		465		100,00		
								Jumlah Pengawas Sekolah Profesional	14		14		14		0		-		14		100,00		
	1	01	01	01	20	01	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	Terseleksiinya bahan bahan sertifikasi guru sesuai dengan petunjuk teknis aturan sertifikasi	24	991.842.000	8	232.122.000	4	189.930.000	1	14.325.000	25,00	7,54	9	246.447.000	37,50	24,85	
	1	01	01	01	20	06	Pembinaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Guru (PPPPG)	Mengaktifkan Kegiatan Komunitas guru KKG dan MGMP	12	1.913.207.000	4	725.223.000	2	267.174.000	0	-	-	-	4	725.223.000	33,33	37,91	

1	2						3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	k	Rp	K	Rp.	K	Rp.	
	1	01	01	01	20	08	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Terlaksananya Diklat Manajemen kepala sekolah untuk pelatihan Asesor Penilaian kinerja	11	1.438.678.000	3	471.438.000	1	241.810.000	1	88.565.000	100,00	36,63	4	560.003.000	36,36	38,92	
	01	01	01	01	20	09	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	Dokumen analisis kebutuhan guru SD dan SMP	6	390.000.000	2	130.000.000	1	75.000.000	0	-	-	-	2	130.000.000	33,33	33,33	
	1	01	01	01	20	10	Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Pendidik	Terdapatnya guru, kepala sekolah dan pengawas berprestasi jenjang TK, SD dan SMP	6	1.710.449.000	2	641.753.000	1	267.174.000	0	-	-	-	2	641.753.000	33,33	37,52	
	01	01	01	01	20	13	Penilaian Angka Kredit Tenaga Pendidik	Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Tenaga Pendidik	12	876.975.000	4	476.871.000	2	100.026.000	1	37.513.000	50,00	37,50	5	514.384.000	41,67	58,65	
	01	01	01	01	20	19	Sosialisasi juknis pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kredit guru	Terlaksananya Sosialisasi Juknis	360	809.919.000	120	289.919.000	60	130.000.000	0	-	-	-	120	289.919.000	33,33	35,80	
	1	01	01	01	20	14	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	Terlaksananya Bimtek guru SMP mapel UN	20	2.244.670.000	4	579.714.000	4	416.239.000	0	-	-	-	4	579.714.000	20,00	25,83	
	1	01	01	01	20	31	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	Meningkatnya kopetensi tenaga pendidik PAUD	12	758.590.000	4	235.434.000	2	130.789.000	0	-	-	-	4	235.434.000	33,33	31,04	
	01	1	01	03	20	32	Magang Tenaga Pendidik PAUD	Jumlah Tenaga Pendidik yang mengikuti magang	150	1.178.225.000	25	25.000.000	25	223.225.000	0	-	-	-	25	25.000.000	16,67	2,12	
	1	01	01	01	20	39	Bimtek Peningkatan Kompetensi Guru SD	Peningkatan mutu pendidikan dengan toresasinya guru kelas SD 1 sampai kelas VI	45	2.567.440.000	17	833.912.000	7	433.382.000	1	53.546.000	14,29	12,36	18	887.458.000	40,00	34,57	
	01	01	01	01	20	40	Pembinaan Tim Evaluasi Pembuatan Master Soal SMP	Terlaksana pembinaan bagi tim evaluasi tingkat SMP kabupaten Pesisir Selatan	4	336.880.000	0	-	1	84.220.000	1	58.120.000	100,00	69,01	1	58.120.000	25,00	17,25	
	01	01	01	01	20	42	Penilaian Hasil Belajar Tingkat Satuan Pendidikan	Tersedia aplikasi E-rapor siswa SMP	2	300.000.000	0	-	1	150.000.000	0	-	-	-	0	-	0,00	0,00	
	1	01	01	01	20	14	Penyediaan Jasa Tenaga Pendidik Non PNS	Terlaksananya Jasa Tenaga Kerja Non PNS	6382	54.774.300.000	1250	8.437.500.000	1283	11.584.200.000	0	-	-	-	1250	8.437.500.000	19,59	15,40	
8	01	01	01	01	22		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase SD Berakreditasi B	85	6.396.656.000	70	1.858.680.000	3	1.134.494.000	1	90.533.000	33,33	7,98	71	1.949.213.000	83,53	30,47	Dinas Pendiidkan dan Kebudayaan
								Persentase SMP Berakreditasi B	85		40		44				-						
	01	01	01	01	22	07	Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan	Tersedianya media informasi manajemen pendidikan	6	452.976.000	2	150.992.000	1	75.496.000	0,5	20.000.000	50,00	26,49	2,5	170.992.000	41,67	37,75	
	01	01	01	01	22	11	Sosialisasi dan updating data pokok pendidikan (Dapodik)	Jumlah sekolah yang memahami aplikasi dapodik setiap tahunnya	422	763.548.000	2	254.516.000	1	127.258.000	0	-	-	-	2	254.516.000	0,47	33,33	

1	2						3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	k	Rp	K	Rp.	K	Rp.	
	01	01	01	01	22	14	Penyelenggaraan Akademi Komunitas	Menyelenggarakan Akademi Komunitas	6	3.231.636.000	2	1.077.212.000	1	538.606.000	0	50.762.000	-	9,42	2	1.127.974.000	33,33	34,90	
	01	01	01	01	22	18	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Pelaksanaan Ujian Nasional)	Terlaksana kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian ujian di SD dan SMP	6	1.127.880.000	2	375.960.000	1	187.980.000	1	19.771.000	100,00	10,52	3	395.731.000	50,00	35,09	
	01	01	01	01	22	20	Pendataan dan Pemetaan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Jumlah sekolah yang telah terpetakan SPM	422	299.984.000	40	-	42	74.996.000	0	-	-	-	40	-	9,48	0,00	
	01	01	01	01	22	21	Pengembangan Sistem Perencanaan Data Penjaminan Mutu Pendidikan	Jumlah sekolah yang telah terpetakan 8 SNP	422	520.632.000	40	-	42	130.158.000	10	-	23,70	-	50	-	11,85	0,00	
II							URUSAN KESEHATAN																
DINAS KESEHATAN																							
1	5	01	01				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%	26.459.369.098	34%	1.988.983.765	17%	2.891.683.156	2,1%	151.521.213	12,18	5,24	36,1%	2.140.504.978	36,1	0,08	Dinas Kesehatan
	5	01	01			02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kebutuhan Air, Listrik dan jasa komunikasi (%)	100%	2.851.744.390	34%	161.029.021	17%	305.400.000	2,0%	36.829.113	11,76	12,06	36%	197.858.134	36,00	0,07	
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	Kebutuhan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan (%)	100%	6.281.600.470	34%	338.436.050	17%	509.340.384	2,0%	17.589.500	11,76	3,45	36%	356.025.550	36,00	0,06	
	5	01	01			07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kebutuhan Jasa Administrasi Keuangan (%)	100%	2.228.926.080	34%	174.972.534	17%	190.293.522	5,0%	14.447.000	29,41	7,59	39%	189.419.534	39,00	0,08	
	5	01	01			08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	kebutuhan jasa Kebersihan kantor (%)	100%	2.622.831.120	34%	398.000.000	17%	458.259.724	1,2%	46.000.000	7,06	10,04	35%	444.000.000	35,20	0,17	
							Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kebutuhan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja (%)	100%	178.057.888	34%	10.450.000	17%	18.400.000	2,3%	-	13,53	-	36%	10.450.000	36,30	0,06	
	5	01	01			10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kebutuhan Alat Tulis Kantor (%)	100%	1.427.473.435	34%	73.062.000	17%	27.631.620	1,5%	-	8,82	-	36%	73.062.000	35,50	0,05	
	5	01	01			11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (%)	100%	813.429.920	34%	50.968.650	17%	27.450.685	2,1%	-	12,35	-	36%	50.968.650	36,10	0,06	
	5	01	01			12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen Penerangan Kantor (%)	100%	1.379.884.582	34%	34.782.535	17%	28.641.250	2,1%	-	12,35	-	36%	34.782.535	36,10	0,03	
	1	01	02	01		13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	100%	898.808.037	34%	309.296.200	17%	103.227.960	1,8%	1.900.000	10,82	1,84	36%	311.196.200	35,84	0,35	
	5	01	01			15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Pembayaran langganan koran	100%	177.289.293	34%	11.220.000	17%	13.900.000	4,0%	3.460.000	23,53	24,89	38%	14.680.000	38,00	0,08	
	5	01	01			17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah rapat Dinkes yang dilaksanakan dan makan minum tamu Dinkes dan Puskesmas	100%	2.640.636.909	34%	93.064.000	17%	102.107.494	1,0%	996.000	5,76	0,98	35%	94.060.000	34,98	0,04	
	5	01	01			18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase Perjalanan dinas ke luar daerah	100%	1.441.116.000	34%	117.909.197	17%	66.100.000	3,8%	15.554.600	22,35	23,53	38%	133.463.797	37,80	0,09	
	1	01	02	01		19	Penyediaan Jasa pengamanan kantor	Jumlah pembayaran honor satpam	100%	115.289.280	34%	25.000.000	17%	39.000.000	2,5%	6.000.000	14,71	15,38	37%	31.000.000	36,50	0,27	

1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	k	Rp	K	Rp.	K	Rp.	
	5	01	02	01	20	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Persentase perjalanan dinas dalam daerah	100%	1.769.690.448	34%	21.415.000	17%	61.900.000	0,5%	2.545.000	2,94	4,11	35%	23.960.000	34,50	0,01	
	1	01	02	01	25	Pembinaan dan Pengelolaan Aset	Monev aset Puskesmas	100%	1.246.661.414	34%	88.102.799	17%	101.082.004	0,8%	4.900.000	4,71	4,85	35%	93.002.799	34,80	0,07	
	1	01	02	01	22	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	Tersedianya Renstra, LKPJ, LPPD, DPA dan DPPA	100%	1.626.091.245	34%	81.275.779	17%	50.805.577	0,5%	1.300.000	2,94	2,56	35%	82.575.779	34,50	0,05	
2	1	01	02	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana aparatur berkondisi baik	100%	610.000.000	34%	88.782.000	17%	50.000.000	2,5%	-	14,71	-	37%	88.782.000	36,50	0,15	Dinkes
	1	01	02	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor	Persentase pemeliharaan Gedung Dinkes	100%	610.000.000	34%	88.782.000	17%	50.000.000	2,5%	-	14,71	-	37%	88.782.000	36,50	0,15	
3	5	01	05			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kemampuan aparatur	100%	1.025.000.000	34%	26.880.000	17%	70.965.920	0,2%	-	1,18	-	34%	1.102.000	34,20	0,00	Dinkes
	5	01	05		01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti pelatihan formal	100%	420.000.000	34%	26.880.000		-	0,0%	-			34%	26.880.000	34,00	0,06	
	1	01	02	05	44	Penunjang Operasional Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kesehatan (Pajak Rokok)	Jumlah SDM Puskesmas dan RS yang memahami tentang registrasi dan perizinan	100%	605.000.000	0%	-	17%	70.965.920	0,2%		1,18	-	0%	-	0,20	0,00	
4	1	01	02	15		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Terpenuhi kebutuhan obat-obatan pelayanan kesehatan dasar	95%	35.672.637.500	30%	4.207.055.720	16%	1.048.655.009	1,1%	13.375.050	6,56	1,28	31%	4.220.430.770	33,12	0,12	Dinkes
	1	01	02	15	01	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan (DAK dan Pendamping)	Jumlah Paket obat dan Perbekalan Kesehatan yang diadakan	95%	32.991.000.000	32%	3.866.872.870	16%	4.252.349.000	2,1%	-	13,13	-	34%	3.866.872.870	35,54	0,12	
	1	01	02	15	02	Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	Persentase obat dan Perbekalan kesehatan di Puskesmas	90%	2.186.637.500	30%	260.755.750	15%	238.809.892	0,4%	7.795.250	2,67	3,26	30%	268.551.000	33,78	0,12	
	1	01	02	15	07	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan (DAK dan Pendamping) (penunjang DAK)	Lancarnya Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	100%	495.000.000	33%	41.149.850	17%	38.697.150	0,5%	600.000	2,94	1,55	34%	41.749.850	33,83	0,08	
	1	01	02	15	11	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	Jumlah PIIRT, Toko Obat dan Apotik yang diawasi dan dibina	80%	1.040.000.000	27%	38.277.250	13%	38.000.000	1,2%	4.979.800	9,23	13,10	28%	43.257.050	34,83	0,04	
5	1	01	02	16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Visite Rate	95%	28.845.135.000	32%	6.500.154.822	16%	101.177.923	2,4%	-	14,84	-	34%	6.500.154.822	35,83	0,23	Dinkes
	1	01	02	16	02	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	Persentase keluarga Kelompok Resiko tinggi (Resti) yang terlayani di Puskesmas dan jaringannya termasuk pada daerah terpencil	95%	1.537.500.000	32%	125.121.972	16%	182.652.500	3,2%	6.626.600	20,00	3,63	35%	131.748.572	36,70	0,09	

1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	k	Rp	K	Rp.	K	Rp.	
	1	01	02	16	09	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Persentase fasyankes dan jaringannya yang melayani kesehatan masyarakat perorangan, termasuk posko-posko kesehatan dalam rangka hari raya dan even-even daerah	95%	4.817.385.000	32%	743.873.200	16%	1.714.157.217	3%	69.748.000	15,63	4,07	34%	813.621.200	35,96	0,17	
	1	01	02	16	25	Pembinaan upaya kesehatan dasar masyarakat (Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Terlaksananya pelayanan kesehatan pada masyarakat.	95%	21.750.000.000	32%	5.562.727.550	16%	11.288.225.000	0,5%	-	3,13	-	32%	5.562.727.550	33,86	0,26	
	1	01	02	16	34	Pelayanan Kesehatan Rujukan di Sarana Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Pelayanan Kesehatan Rujukan di sarana Pelayanan Kesehatan	95%	470.000.000	32%	51.355.550,00	16%	44.644.179	1,2%	3.038.200	7,50	6,81	33%	54.393.750	34,60	0,12	
	1	01	02	16	35	Pelayanan Kesehatan pada Pengobatan Tradisional (BATRA)	Jumlah penyehat tradisional yang dipantau dalam pelayanan kesehatan	95%	270.250.000	32%	17.076.550,00	16%	41.274.200	2,1%	17.076.550	13,13	41,37	34%	34.153.100	35,54	0,13	
6	1	01	02	19		Program Promosi Kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Persentase Nagari Siaga Aktif	100%	9.800.000.000	33%	568.646.293	17%	227.966.920	1,4%	30.185.300	8,09	13,24	35%	598.831.593	34,71	0,06	Dinkes
	1	01	02	19	01	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat (DBH Pajak Rokok TA. 2015)	Persentase ketersediaan media promosi	100%	2.295.000.000	33%	156.892.800	17%	183.789.402	1,5%	13.582.400	8,82	7,39	35%	170.475.200	34,83	0,07	
	1	01	02	19	06	Usaha kesehatan institusi dan peran serta masyarakat	Jumlah Posyandu Mandiri	100%	2.020.000.000	33%	177.333.050	17%	132.783.626	1,3%	5.497.700	7,65	4,14	35%	182.830.750	34,63	0,09	
	1	01	02	19	07	Pembinaan dan Pembentukan Nagari Siaga	- Jumlah Nagari Siaga Aktif yang dibina	100%	710.000.000	33%	138.379.050	17%	99.195.000	2,2%	11.105.200	12,94	11,20	36%	149.484.250	35,53	0,21	
							- Jumlah Sertifikasi Nagari Siaga Aktif mandiri															
	1	01	02	19	08	Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Kabupaten	terpenuhinya data dan profil kesehatan dan program SIKDA dan komunikasi data kesehatan	100%	4.775.000.000	33%	96.041.393	17%	132.841.817	0,5%	-	2,94	-	34%	96.041.393	33,83	0,02	
7	1	01	02	20		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan	100%	2.207.259.000	33%	292.015.450	17%	359.590,25	3,6%	67.155.000	21,18	18.675	37%	359.170.450	36,93	0,16	Dinkes
	1	01	02	20	02	pemberian tambahan makanan dan vitamin	Persentase pemberian makanan tambahan bagi balita kurang gizi dan ibu hamil Kurang Energi Koronis (KEK)	100%	756.100.000	33%	115.425.000	17%	431.052.365	4,0%	4.215.000	23,53	0,98	37%	119.640.000	37,33	0,16	
	1	01	02	20	08	Pemantauan status gizi masyarakat	Persentase balita Gizi buruk	90%	724.452.000	30%	71.383.750	15%	182.403.327	5,0%	60.440.000	33,33	33,14	35%	131.823.750	38,89	0,18	
	1	01	02	20	09	Pembinaan dan monitoring program gizi masyarakat	Jumlah Puskesmas yang dilakukan movev gizi	95%	726.707.000	32%	105.206.700	15,8%	111.358.522	1,8%	2.500.000	11,39	2,25	33%	107.706.700	35,23	0,15	
8	1	01	02	21		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Jumlah Nagari ODF (Open Defecation Free)	100%	7.067.548.100	33%	761.992.008	17%	624.048,45	3,6%	16.422.125	21,77	2.632	37%	778.414.133	36,96	0,11	Dinkes
	1	01	02	21	01	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	Jumlah pengawasan, pembinaan, Sanitasi dasar, TTU dan TPM	97%	2.098.352.500	32%	422.605.586	16%	459.436.316	4,1%	4.702.000	25,36	1,02	36%	427.307.586	37,56	0,20	

1	2						3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	k	Rp	K	Rp.	K	Rp.	
	1	01	02	21	08		Pendamping PAMSIMAS	Jumlah Pelatihan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	85%	504.948.000	28%	36.850.060	14%	43.019.960	4,2%	3.018.000	29,65	7,02	33%	39.868.060	38,27	0,08	
	1	01	02	21	09		Penunjang Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)	- Jumlah Rumah Sehat yang dipantau dan dibina	100%	448.869.500	33%	22.881.700	17%	28.353.434	3,4%	1.524.000	20,40	5,38	37%	24.405.700	36,73	0,05	
								- Jumlah pertemuan Petugas Sanitasi Limbah Medis Puskesmas															
	1	01	02	21	10		Pengelolaan dan pengembangan pemeriksaan sanitasi dasar masyarakat	- Jumlah Depot yang diperiksa	85%	1.227.135.200	28%	113.720.236	14%	116.335.379	3,1%	-	21,88	-	31%	113.720.236	36,98	0,09	
								- Jumlah Pelatihan Hygiene Sanitasi pengelolaan DAM															
	1	01	02	21	11		Pelaksanaan Forum Kecamatan dan Kabupaten Sehat dan Kabupaten Sehat	Jumlah Forum Kabupaten Sehat dan Kelompok Kerja Nagari yang dibina	89%	812.478.900	30%	165.934.426	15%	249.971.767	3,2%	7.178.125	21,57	2,87		173.112.551	0,00	0,21	
	1	01	02	21	12		Pelayanan Kesehatan Kerja	Jumlah Kelompok UKK yang dibina	90%	1.032.245.000	30%	-	15%	35.280.582	4,2%	1.574.000	28,00	4,46	33%	1.574.000	36,52	0,00	
	1	01	02	21	13		Pelayanan Kesehatan Olah Raga	Jumlah Pertemuan Kesehatan Olah raga	90%	943.519.000	30%	-	15%	36.271.241	3,2%	1.265.000	21,33	3,49	34%	1.265.000	38,00	0,00	
9	1	01	02	22			Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Succes Rate TB	98%	10.450.960.000	33%	577.449.879	16%	120.294.440	1,7%	42.625.100	10,48	35,43	34%	620.074.979	35,08	0,06	Dinkes
	1	01	02	22	01		Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	terlaksananya fogging focus	98%	1.875.000.000	33%	159.828.000	16%	259.322.423	1,2%	-	7,35	-	34%	159.828.000	34,56	0,09	
	1	01	02	22	05		Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	tercegah dan tertanggulangnya penyakit menular pada	98%	1.850.000.000	33%	127.722.364	16%	167.466.565	2,5%	17.249.400	15,31	10,30	35%	144.971.764	35,88	0,08	
	1	01	02	22	06		Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik	terlaksananya surveilans aktif dan	98%	2.295.000.000	33%	24.368.400	16%	54.539.451	2,1%	615.000	12,86	1,13	35%	24.983.400	35,48	0,01	
	1	01	02	22	08		Peningkatan Imunisasi	tercegah dan tertanggulangnya penyakit menular pada	98%	2.560.960.000	33%	128.061.415	16%	175.577.115	1,2%	11.044.700	7,35	6,29	34%	139.106.115	34,56	0,05	
	1	01	02	22	09		Peningkatan surveillance epidemiologi dan penaggulangan wabah	surveilans epidemiologi penyakit menular & penanggulangan wabah di masyarakat	100%	570.000.000	33%	62.793.500	17%	95.056.696	1,4%	7.760.000	8,40	8,16	35%	70.553.500	34,73	0,12	
	1	01	02	22	15		Pemantauan & Penanggulangan Masalah Kesehatan Akibat Bencana/KLB	terpantaunya jumlah kasus penyakit sebelum, saat terjadi KLB/Bencana dan pasca KLB/Bencana	95%	725.000.000	32%	74.676.200	16%	83.838.651	1,3%	5.956.000	8,21	7,10	33%	80.632.200	34,70	0,11	
	1	01	02	22	13		Sistem Kewaspadaan dini KLB / Wabah / Bencana	- Persentase Sinyal kewaspadaan dini yang direpson - Persentase Kelengkapan dan ketepatan laporan W2 SKDR	100%	575.000.000	33%	-	17%	66.569.211	2,3%	6.846.000	13,80	10,28			0,00	0,00	
10	1	01	02	23			Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya kualitas pelayanan Kesehatan	100%	14.783.911.700	33%	1.499.238.280	17%	523019,85	3,9%	88.610.116	23,22	16.942	37%	1.587.848.396	37,20	0,11	Dinkes

1	2						3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	k	Rp	K	Rp.	K	Rp.	
	1	01	02	23	07		Akreditasi, registrasi dan sertifikasi kesehatan	meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dan honorarium penunjang pelaksana kegiatan	100%	3.919.555.000	33%	450.762.438	17%	519.246.807	3,8%	19.733.200	22,80	3,80	37%	470.495.638	37,13	0,12	
	1	01	02	23	08		Pembinaan dan Evaluasi Monitoring dr/drg/bidan PTT	meningkatnya kopetensi tenaga kesehatan	100%	485.000.000	33%	55.314.008	17%	40.091.304	4,5%	1.819.200	27,24	4,54	38%	57.133.208	37,87	0,12	
	1	01	02	23	09		Upaya peningkatan kinerja petugas dan institusi kesehatan	kualitas kinerja pelayanan kesehatan masyarakat dan administrasi pelayanan kesehatan masyarakat	95%	757.321.500	32%	65.831.950	16%	71.402.500	5,1%	3.643.100	32,21	5,10	37%	69.475.050	38,70	0,09	
	1	01	02	23	10		Pengelolaan dan pembinaan tenaga fungsional	meningkatnya kinerja fungsional tenaga kesehatan di puskesmas	100%	595.000.000	33%	41.456.000	17%	32.178.203	10,2%	3.294.000	61,44	10,24	44%	44.750.000	43,57	0,08	
	1	01	02	23	11		Akreditasi, Registrasi dan Sertifikasi Kesehatan (DAK non Fisik) Tahun 2016	meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	100%	6.027.035.200,00	33%	885.873.884	17%	1.624.000.000	3,7%	60.120.616	22,20	3,70	37%	945.994.500	37,03	0,16	
11	1	01	02	25			Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Persentase Puskesmas dan Pustu yang memiliki sarana prasarana sesuai standar	100%	107.046.500.000	33%	10.009.119.676	17%	2.380.837.644	1,3%	25.362.900	7,65	1,07	35%	10.034.482.576	34,61	0,09	Dinkes
	1	01	02	25	04		Pengadaan puskesmas keliling	Jumlah Pengadaan Puskesmas keliling	100%	4.000.000.000	33%	806.600.750	17%	-	1,3%	-	7,80		35%	806.600.750	34,63	0,20	
	1	01	02	25	06		Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas (DAK dan Pendamping)	Jumlah Puskesmas yang direhab	100%	30.346.500.000	33%	1.230.110.000	17%	6.810.266.000	1,2%	-	7,20	-	35%	1.230.110.000	34,53	0,04	
	1	01	02	25	13		Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas	Jumlah Pemeliharaan dan rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kesehatan	100%	34.000.000.000	33%	4.517.922.476	17%	1.583.042.185	0,3%	4.960.000	1,80	0,31	34%	4.522.882.476	33,63	0,13	
	1	01	02	25	26		Pembangunan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya (Penunjang DAK)	Jumlah Puskesmas yang direhab	100%	4.150.000.000	33%	461.938.750	17%	287.956.502	2,3%	20.402.900	13,80	7,09	36%	482.341.650	35,63	0,12	
	1	01	02	25	27		Pembangunan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan jaringannya (luncuran)	tersedianya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas dan optimalisasi pelkes dan	100%	9.850.000.000	33%	1.251.868.700	17%	2.728.247.343	1,5%	-	9,00	-	35%	1.251.868.700	34,83	0,13	
	1	01	02	25	30		Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas (DAK)	terpenuhinya kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat	100%	7.400.000.000	33%	679.375.000	17%	833.000.000	1,5%	-	9,00	-	35%	679.375.000	34,83	0,09	
	1	01	02	25	35		Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (DAK)	terpenuhinya kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat	100%	13.800.000.000	33%	1.061.304.000		-	0,0%	-			33%	1.061.304.000	33,33	0,08	

1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	k	Rp	K	Rp.	K	Rp.	
12	1	01	02	28		Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase penduduk yang memiliki JKN	100%	180.684.091.900	33%	27.794.258.803	16,6%	2.152.422.484	2,1%	31.308.800	12,59	1,45	35%	27.825.567.603	35,42	0,15	Dinkes
	1	01	02	28	01	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	terciptanya jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat	100%	38.975.000.000	33%	5.976.329.650	16,6%	6.239.263.375	2,3%	9.022.000	13,86	0,14	36%	5.985.351.650	35,63	0,15	
	1	01	02	28	09	Pelayanan gratis di puskesmas dan jaringannya	terjaminnya pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat	90%	4.029.091.900	30%	542.088.528	15%	1.029.807.668	2,2%	22.286.800	14,40	2,16	32%	564.375.328	35,73	0,14	
	1	01	02	28	11	Pelayanan Kesehatan (Kapitasi) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas	terjaminnya pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat	100%	123.500.000.000	33%	20.165.085.838	16,7%	17.500.000.000	1,5%	-	9,00	-	35%	20.165.085.838	34,83	0,16	
	1	01	02	28	12	Pelayanan Kesehatan (Non Kapitasi) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas	terjaminnya pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat	90%	13.580.000.000	30%	1.110.754.787	15%	1.550.000.000	2,4%	-	16,00	-	32%	1.110.754.787	36,00	0,08	
13	1	01	02	30		Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Persentase Lansia yang mendapat pelayanan kesehatan	80%	535.000.000,00	26,7%	42.569.250	13,33%	175.619.042	1,5%	800.000	11,25	0,46	28%	43.369.250	35,21	0,08	Dinkes
	1	01	02	30	01	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Persentase Lansia yang mendapat pelayanan kesehatan	80%	535.000.000	26,7%	42.569.250	13,3%	175.619.042	1,5%	800.000	11,25	0,46	28%	43.369.250	35,21	0,08	
14	1	01	02	32		Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi	92%	21.607.915.700	31%	452.445.365	15%	3.258.002.611	3,6%	12.770.000	23,56	0,39	34%	465.215.365	37,26	0,02	Dinkes
	1	01	04	32	04	Usaha Kesehatan Ibu dan Anak	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Ibu dan Anak	90%	3.587.915.700	30%	339.707.787	15%	126.036.522	3,6%	3.525.000	24,00	2,80	34%	343.232.787	37,33	0,10	
	1	01	04	32	05	Pelayanan kesehatan anak prasekolah dan usia sekolah (Prasekdam Usek)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Kelompok Anak Sekolah UKS dan UKGS dan Peduli remaja (PKPR) Kekerasan Terhadap Anak	95%	520.000.000	32%	66.437.800	16%	33.086.089	2,3%	-	14,53	-	34%	66.437.800	35,75	0,13	
	1	01	04	32	06	Usaha Kesehatan Ibu dan Anak (Jaminan Persalinan) DAK Non Fisik	menurunnya angka kematian ibu maternal dan bayi serta anak balita melalui peningkatan upaya kesehatan ibu dan anak	90%	17.500.000.000	30%	46.299.778	15%	3.098.880.000	1,3%	9.245.000	8,67	0,30	31%	55.544.778	34,78	0,00	
15	1	01	02	33		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Persentase Nagari dengan Posbindu PTM	70%	3.748.186.500	21,7%	323.701.947	13%	355.653.487	2,3%	14.063.900	17,71	3,95	24%	337.765.847	34,27	0,09	Dinkes
	1	01	02	33	01	Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular (PTM) (DBH Pajak Rokok TA. 2015)	Jumlah pencegahan dan pengendalian Penyakit tidak menular	60%	1.160.902.500	20%	87.380.250	10%	135.522.627	2,1%	3.410.200	21,00	2,52	22%	90.790.450	36,83	0,08	
	1	01	02	33	03	Pemantauan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Matra	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan Matra	60%	1.475.000.000	20%	67.584.500	10%	50.893.076	2,5%	7.004.700	25,00	13,76	23%	74.589.200	37,50	0,05	

1	2						3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12																												
	K	Rp.							K	Rp.					K	Rp.					k	Rp.					K	Rp.					K	Rp.																	
	1	01	02	33	02		Deteksi Dini dan Pengendalian Penyakit akibat Rokok (DBH Pajak Rokok)	Terlaksananya deteksi dini dan Pengendalian akibat Rokok (DBH Pajak Rokok)	75%	647.284.000					25%	168.737.197					13%	96.378.306					2,3%	3.649.000					18,40	3,79					27%	172.386.197					36,40	0,27					
	1	01	02	33	04		Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Jumlah ODGJ yang dilayani	100%	465.000.000						20%					72.859.478					2,4%	8.491.200					12,00	11,65					2%	8.491.200					2,40	0,02						
16	02	1	01	02	38		Program Peningkatan Sarana pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Persentase Rujukan dari Pelayanan Primer ke Pelayanan Sekunder	90%	86.500.000.000					30%	4.430.025.584					15%	3.000.000.000					2,5%	-					16,67	-					33%	4.430.025.584					36,11	0,05					Dinkes
	1	01	02	16	33		Biaya operasional RSU Pratama Tapan	Persentase Rujukan dari Pelayanan Primer ke Pelayanan Sekunder	90%	86.500.000.000					30%	4.430.025.584					15%	3.000.000.000					2,5%	-					16,67	-					33%	4.430.025.584					36,11	0,05					
RSUD M. ZEIN PAINAN																																																			
1	1	01	02	2	34		Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	% pemenuhan Kebutuhan pelayanan Operasional dari Penerimaan BLUD	100%	364.250.898.000					83,33%	48.114.193.000					10%	50.270.900.000					3,00%	9.802.086.000					30,00	19,50					86,33%	57.916.279.000					86,33	15,90					RSUD Dr. M. Zein Painan
	1	01	02	02	34	01	Kegiatan penyediaan Kebutuhan Pelayanan BLUD	% Penyediaan Kebutuhan BLUD	100%	364.250.898.000					83,33%	48.114.193.000					10%	50.270.900.000					3,00%	9.802.086.000					30,00	19,50					86,33%	57.916.279.000					86,33	15,90					
2	1	01	02	02	16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Masyarakat / Pasien bermasalah yang mendapatkan pelayanan	180	1.000.000.000					42,05	125.315.000					30	150.000.000					18	-					60,00	-					60,05	125.315.000					33,36	12,53					RSUD Dr. M. Zein Painan
	1	01	02	02	16	11	Kegiatan Peningkatan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	Jumlah pasien Miskin / Bermasalah yang terlayani	180	1.000.000.000					42,05	125.315.000					30	150.000.000					18	-					60,00	-					60,05	125.315.000					33,36	12,53					
3	1	02	02	01	26		Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/Rumah sakit jiwa/Rumah sakit Paru-paru/rumah sakit Mata	% Pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/Rumah sakit jiwa/Rumah sakit Paru-paru/rumah sakit Mata	100%	44.550.000.000					78,28%	12.689.280.000					21,72%	10.428.535.000					5,43%	-					25,00	-					83,71%	12.689.280.000					83,71	28,48					RSUD Dr. M. Zein Painan
							Kegiatan Pembangunan Gedung Hemodialisa	Unit Pembangunan Gedung Hemodialisa	100%	6.300.000.000						3.000.000.000					0	-						0					-					0,00	0,00												
							Kegiatan penyusunan DED RSUD dan Site plan	Dokumen	100%	400.000.000						200.000.000					0	-						0					-					0,00	0,00												
							Kegiatan pengelolaan gas medis	% pengelolaan gas medis	100%	3.500.000.000											0,05	184.081.000						0,05					184.081.000					5,00	5,26												
							Kegiatan pengadaan alat kesehatan	% pengadaan alat kesehatan	100%	25.000.000.000					78%	9.632.753.000					4.228.535.000	0	-						0,78					9.632.753.000					78,00	38,53											
							Kegiatan pengadaan alat CSSD	% pengadaan alat CSSD	100%	6.000.000.000					100%	1.700.000.000					2.000.000.000	0	-						1					1.700.000.000					100,00	28,33											
							Kegiatan pengadaan Radiologi	% Alat Radiologi	100%	3.350.000.000					100%	1.356.527.000					1.000.000.000	0	-						1					1.356.527.000					100,00	40,49											
III							URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																																												
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																																																			
1	03	01	01				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	pemenuhan layanan adminstrasi perkantoran (bln)	72	2.410.969.494					24	1.455.088.534					12	1.489.764.571					3	197.781.177					25,00	13,28					27	1.652.869.711					37,50	68,56					PUTR

1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	k	Rp	K	Rp.	K	Rp.	
	03	01	01	02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	kebutuhan air, listrik dan jasa komunikasi	72	423.636.480	24	269.145.011	12	303.100.000	3	23.844.293	25,00	7,87	27	292.989.304	37,50	69,16	
	03	01	01	05		Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	terlaksananya inventarisasi aset (bln)	72	54.033.736	24	36.458.586	12	11.513.212	3	-	25,00	-	27	36.458.586	37,50	67,47	
	03	01	01	07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	kebutuhan jasa administrasi keuangan (%)	72	534.055.680	24	299.800.000	12	366.250.000	3	62.800.000	25,00	17,15	27	362.600.000	37,50	67,90	
	03	01	01	08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	kebutuhan jasa kebersihan kantor (bln)	72	305.916.134	24	216.429.000	12	204.750.000	3	-	25,00	-	27	216.429.000	37,50	70,75	
	03	01	01	10		Penyediaan Alat Tulis Kantor	terpenuhinya Kebutuhan alat tulis kantor (bln)	72	72.572.981	24	34.993.344	12	23.653.236	3	12.255.644	25,00	51,81	27	47.248.988	37,50	65,11	
	03	01	01	11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan untuk kantor (%)	72	89.202.125	24	32.225.200	12	42.404.123	3	11.773.365	25,00	27,76	27	43.998.565	37,50	49,32	
	03	01	01	12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen penerangan bangunan kantor (bln)	72	10.355.558	24	4.953.000	12	4.994.000	3	-	25,00	-	27	4.953.000	37,50	47,83	
	03	01	01	13		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (bln)	72	107.827.200	24	135.820.000	12	91.250.000	3	-	25,00	-	27	135.820.000	37,50	125,96	
	03	01	01	17		Penyediaan makanan dan minuman	makan minum rapat dan tamu (bln)	72	146.748.672	24	63.825.500	12	78.750.000	3	19.277.500	25,00	24,48	27	83.103.000	37,50	56,63	
	03	01	01	18		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pelaksanaan rapat - rapat koordinasi luar daerah (bln)	72	442.112.256	24	258.513.643	12	285.500.000	3	44.671.375	25,00	15,65	27	303.185.018	37,50	68,58	
	03	01	01	20		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Pelaksanaan rapat - rapat koordinasi dalam daerah (bln)	72	224.508.672	24	102.925.250	12	77.600.000	3	23.159.000	25,00	29,84	27	126.084.250	37,50	56,16	
2	03	01	02			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	pemenuhan sarana dan prasarana aparatur (bln)	72	305.421.555.277	24	14.978.225.273	12	30.190.456.642	3	7.282.475.546	25,00	24,12	27	22.260.700.819	37,50	7,29	Dinas PUTR
	03	01	02	03		Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah pembangunan gedung pemerintah (unit)	23	300.000.000.000	1	14.247.940.816	3	25.683.396.269	0,3	7.218.230.143	10,00	28,10	1,3	21.466.170.959	5,65	7,16	ada pekerjaan yg multiyears smpi tahun2018
	03	01	02	120		Perencanaan Prasarana Gedung Kantor	jumlah dokumen perencanaan	30	700.000.000	10	533.629.460	3	310.032.879	0	1.515.928	-	0,49	10	535.145.388	33,33	76,45	
	03	01	02	24		Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Pemeliharaan/ operasional kendaraan dinas (bln)	72	162.436.608	24	129.297.327	12	139.192.001	3	22.242.136	25,00	15,98	27	151.539.463	37,50	93,29	
	03	01	02	28		Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan peralatan gedung kantor	72	36.403.379	24	17.660.000	12	25.600.000	3	1.940.000	25,00	7,58	27	19.600.000	37,50	53,84	
	03	01	02	22		Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor	72	60.775.312	24	49.697.670	12	48.389.770	3	24.693.000	25,00	51,03	27	74.390.670	37,50	122,40	
	03	01	02	21		Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	Pemeliharaan rumah dinas kantor	1	261.939.978	0	-	1	261.939.978	0,4	839.978	40,00	0,32	0,4	839.978	40,00	0,32	
	03	01	02	42		Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	gedung kantor yang direhab berat	1	4.200.000.000	0	-	1	3.721.905.745	0	13.014.361	-	0,35	0	13.014.361	-	0,31	
3	03	01	03			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan Disiplin aparatur	100	200.000.000	85	38.998.000	10	55.600.000	4	35.600.000	40,00	64,03	89	74.598.000	89,00	37,30	Dinas PUTR

1	2						3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	k	Rp	K	Rp.	K	Rp.	
	03	01	03	03			Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan (paket)	6	200.000.000	2	38.998.000	1	55.600.000	0,5	35.600.000	50,00	64,03	2,5	74.598.000	41,67	37,30	
4	01	03	01	26			Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru- Paru / Rumah Sakit Mata	Persentase penyelesaian Relokasi RSUD	100	63.646.800.305	0	-	100	63.646.800.305	0	0	-	-	0	0	0	0	Dinas PUTR
	01	03	01	26	78		Manajemen Konstruksi RSUD Baru (Lanjutan 2016)	Manajemen Konstruksi RSUD (paket)	1	226.293.805	0		1	226.293.805	0	0	-	-	0	0	0	0	Lanjutan keg.2016
	01	03	01	26	80		Penyusunan Master Plan dan Perencanaan Teknis RSUD Baru (lanjutan2015)	Master Plan RSUD (paket)	1	383.121.500	0		1	383.121.500	0	0	-	-	0	0	0	0	Lanjutan keg.2015
	01	03	01	26	56		Pembangunan Relokasi RSUD dr. M.Zein Painan /PIP (lanjutan 2015)	Pembangunan Relokasi RSUD (paket)	1	63.037.385.000	0		1	63.037.385.000	0	0	-	-	0	0	0	0	Lanjutan keg.2015
5	01	03	01	16			Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Persentase drainase jalan kondisi baik (%)	60	7.870.000.000	42	288.895.980	4	2.240.132.605	0,2	7.944.921	5,00	0,35	42,2	296.840.901	70,33	3,77	Dinas PUTR
	01	03	01	16	29		Pemeliharaan rutin drainase kota	terlaksananya Pemeliharaan drainase (bln)	72	550.000.000	24	288.895.980	12	397.250.297	3	3.914.172	25,00	0,99	27	292.810.152	37,50	53,24	
	01	03	01	16	03		Pembangunan Saluran Drainase dan trotoar	Panjang drainase dan trotoar yang dibangun (m)	720	7.200.000.000	0	-	175	1.731.404.675	0	4.030.749	-	0,23	0	4.030.749	-	0,06	
	01	03	01	16	01		Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase dan trotoar	Jumlah dokumen perencanaan	1	120.000.000	0	-	1	111.477.633	0	-	-	-	0	-	-	-	
7	01	03	01	18			Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan kabupaten yang terpelihara	1730	24.450.000.000	250	5.545.935.150	1	3.849.983.920	0,13	837.903.000	13,00	21,76	250,13	6.383.838.150	14,46	26,11	Dinas PUTR
								Persentase jembatan kabupaten terpelihara	82,2		68,5		3,41		0	-	-	-	68,5	-	83,33		
	01	03	01	18	56		Pemeliharaan Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Jalan (bln)	72	11.700.000.000	24	4.150.050.750	12	3.112.168.967	3	745.070.000	25,00	23,94	27	4.895.120.750	37,50	41,84	
	01	03	01	18	69		Pemeliharaan Jembatan Kabupaten	Pemeliharaan Jembatan (bln)	72	12.750.000.000	24	1.395.884.400	12	737.814.953	3	92.833.000	25,00	12,58	27	1.488.717.400	37,50	11,68	
8	01	03	01	29			Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase Pengembangan Wilayah Strategis	100	17.662.213.211	60	1.354.426.400	10	7.098.702.294	1	13.526.996	10,00	0,19	61	1.367.953.396	61,00	7,75	Dinas PUTR
	01	03	01	29	02		Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur	Persentase Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur (paket)	25	8.662.213.211	1	462.102.200	5	3.662.213.211	0	9.594.622	-	0,26	1	471.696.822	4,00	5,45	
	01	03	01	29	12		Pembangunan Infrastruktur kawasan Destinasi wisata	pembangunan infrastruktur kawasan pariwisata (paket)	20	9.000.000.000	2	892.324.200	5	3.436.489.083	0	3.932.374	-	0,11	2	896.256.574	10,00	9,96	
9	01	03	01	30			Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Pembangunan Sarana Air Bersih Perdesaan (unit)	24	18.880.000.000	5	2.582.262.450	4	3.599.747.762	3	9.372.230	75,00	0,26	8	2.591.634.680	33,33	13,73	Dinas PUTR

1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	k	Rp	K	Rp.	K	Rp.	
	01	03	01	30	50	Optimalisasi Peningkatan Program Pamsimas (DDUB)	Jumlah pamsimas yang terbangun	8	5.500.000.000	1	1.050.000.000	1	500.000.000	0	-	-	-	1	1.050.000.000	12,50	19,09	
	01	03	01	30	51	Penunjang Kegiatan Pamsimas	Penunjang Pamsimas	72	1.500.000.000	24	215.912.450	12	169.747.762	3	8.094.594	25,00	4,77	27	224.007.044	37,50	14,93	
	01	03	01	30	55	Pengembangan Program Hibah Air Minum	jumlah pamsimas yang diobangun	8	6.000.000.000	1	336.359.000	1	1.950.000.000	0	1.277.636	-	0,07	1	337.636.636	12,50	5,63	
	01	03	01	30	56	Pembangunan Pamsimas Reguler APBD	Jumlah pamsimas yang terbangun	8	5.880.000.000	1	979.991.000	1	980.000.000	0	-	-	-	1	979.991.000	12,50	16,67	
10	01	03	01	33		PROGRAM MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	Persentase efektifitas monoev	100	643.552.248,00	65	373.601.401	8	382.456.337	1	53.205.612	12,50	13,91	66	426.807.013	0,66	0,66	Dinas PUTR
	01	03	01	33	01	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring kegiatan fisik dan pembuatan laporan	72	174.293.474	24	102.410.516	12	128.172.576	3	6.969.459	25,00	5,44	27	109.379.975	37,50	62,76	
	01	03	01	33	04	Sinkronisasi Program DAK dan APBN	Koordinasi kegiatan DAK dan APBN	72	269.115.499	24	226.809.873	12	210.153.120	3	41.640.600	25,00	19,81	27	268.450.473	37,50	99,75	
	01	03	01	33	16	Rencana Program dan Sinkronisasi RPI2JM- CIPTA KARYA	Penyusunan Dokumen RPI2JM- CIPTA KARYA	6	165.862.644	2	35.289.072	1	33.948.117	0	2.518.029	-	7,42	2	37.807.101	33,33	22,79	
	01	03	01	33	18	Penyusunan Dokumen HSBGN	Penyusunan Dokumen HSBGN	6	34.280.631	2	9.091.940	1	10.182.524	0	2.077.524	-	20,40	2	11.169.464	33,33	32,58	
11	01	03	01	35		Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Petamanan	persentase taman kota kondisi baik	100	3.715.575.840	70	920.595.496	10	693.208.691	2	142.539.510	20,00	20,56	72	1.063.135.006	72,00	28,61	Dinas PUTR
	01	03	01	35	02	Pemeliharaan dan Operasional Pertamanan	Pemeliharaan taman (bln)	72	3.715.575.840	24	920.595.496	12	693.208.691	1	142.539.510	8,33	20,56	25	1.063.135.006	34,72	28,61	
12	01	03	01	15		Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	Persentase kondisi jalan mantap (baik+sedang)	40,43	2.688.824.510.380	37	66.607.064.576	0,86	52.150.476.179	0	1.970.670.656	-	3,78	37	68.577.735.232	91,52	2,55	Dinas PUTR
	01	03	01	15	25	Peningkatan Jalan Kabupaten (DAK 2018)	ruas jalan yang ditingkatkan	60	2.500.000.000.000	20	34.209.300.500	6	26.001.887.000	0	6.419.064	-	0,02	20	34.215.719.564	33,33	1,37	
	01	03	01	15	26	Peningkatan Jalan (DAU)	Persentase jalan kondisi baik	20	44.074.510.380	8	15.075.057.494	4	8.814.902.076	0	35.102.546	-	0,40	8	15.110.160.040	40,00	34,28	
	01	03	01	15	05	Pembangunan Jembatan Kabupaten	Jembatan yang ditingkatkan	10	26.500.000.000	1	951.976.100	3	5.840.771.180	0	1.795.216.465	-	30,74	1	2.747.192.565	10,00	10,37	ada pekerjaan yg multiyears smpi tahun 2018
	01	03	01	15	24	Perencanaan Pembangunan dan peningkatan Jalan	Dokumen perencanaan jalan	6	2.000.000.000			1	474.461.333	0	7.906.022	-	1,67	0	7.906.022	-	0,40	
	01	03	01	15	04	Perencanaan Pembangunan Jembatan	Dokumen perencanaan jembatan	1	1.550.000.000	1	333.278.266	100	175.192.152	0	-	-	-	1	333.278.266	100,00	21,50	
	01	03	01	15	07	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kecamatan Tarusan	ruas jalan kondisi baik	20	8.000.000.000	5	1.838.862.920	3	634.214.550	0	2.687.500	-	0,42	5	1.841.550.420	25,00	23,02	
	01	03	01	15	08	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kecamatan Bayang	Persentase jalan kondisi baik	20	8.000.000.000	5	1.588.811.520	3	2.190.500.000	0	-	-	-	5	1.588.811.520	25,00	19,86	
	01	03	01	15	09	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kecamatan Bayang Utara	Persentase jalan kondisi baik	20	8.000.000.000	5	776.689.000	3	361.500.000	0	-	-	-	5	776.689.000	25,00	9,71	

1	2						3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	k	Rp	K	Rp.	K	Rp.	
	01	03	01	15	10		Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kecamatan IV Jurai	Persentase jalan kondisi baik	30	8.000.000.000	5	2.230.839.976	3	1.707.973.703	0,0645	630.000	2,15	0,04	5,0645	2.231.469.976	16,88	27,89	
	01	03	01	15	11		Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kecamatan Batang Kapas	Persentase jalan kondisi baik	20	8.000.000.000	5	875.367.460	3	1.221.500.000	0,02	1.675.000	0,67	0,14	5,02	877.042.460	25,10	10,96	
	01	03	01	15	12		Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kecamatan Sutera	Persentase jalan kondisi baik	20	8.000.000.000	5	1.892.245.120	3	246.452.744	0	610.000	-	0,25	5	1.892.855.120	25,00	23,66	
	01	03	01	15	13		Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kecamatan Lengayang	Persentase jalan kondisi baik	20	8.000.000.000	5	2.613.216.772	3	898.555.630	0,02	875.000	0,67	0,10	5,02	2.614.091.772	25,10	32,68	
	01	03	01	15	14		Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kecamatan Ranah Pesisir	Persentase jalan kondisi baik	20	8.000.000.000	5	1.094.605.048	3	295.462.438	0	987.500	-	0,33	5	1.095.592.548	25,00	13,69	
	01	03	01	15	15		Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kecamatan Linggo Sari Baganti	Persentase jalan kondisi baik	20	8.000.000.000	5	879.674.500	3	744.000.000	0	1.037.500	-	0,14	5	880.712.000	25,00	11,01	
	01	03	01	15	16		Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kecamatan Air Pura	Persentase jalan kondisi baik	10	6.000.000.000	5	142.410.000	3	147.000.000	0	-	-	-	5	142.410.000	50,00	2,37	
	01	03	01	15	17		Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kecamatan Pancung Soal	Persentase jalan kondisi baik	15	6.000.000.000	5	228.741.000	3	490.308.938	0	-	-	-	5	228.741.000	33,33	3,81	
	01	03	01	15	18		Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	Persentase jalan kondisi baik	15	6.000.000.000	5	96.477.000	3	199.127.580	0	1.212.500	-	0,61	5	97.689.500	33,33	1,63	
	01	03	01	15	19		Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	Persentase jalan kondisi baik	10	6.000.000.000	5	149.656.500	3	195.000.000	0	-	-	-	5	149.656.500	50,00	2,49	
	01	03	01	15	20		Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kecamatan Lunang	Persentase jalan kondisi baik	10	6.000.000.000	5	831.746.000	3	292.500.000	0	1.250.000	-	0,43	5	832.996.000	50,00	13,88	
	01	03	01	43	82		Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kecamatan Silaut	Persentase jalan kondisi baik	15	6.000.000.000	5	479.965.800	3	-	0	-	-	-	5	479.965.800	33,33	8,00	
	01	03	01	15	29		Penunjang DAK Peningkatan Jalan Kabupaten	Persentase penunjang	72	900.000.000	24	173.095.500	12	169.087.804	3	15.619.059	25,00	9,24	27	188.714.559	37,50	20,97	
	01	03	01	15	31		Penguatan Data Base dan Survey Kondisi (DAK)	Database jalan	6	900.000.000	1	145.048.100	1	150.000.000	0	99.442.500	-	66,30	1	244.490.600	16,67	27,17	
	01	03	01	15	30		Penguatan Data Base dan Survey Kondisi	Database jalan	6	900.000.000		-	1	100.079.053	0,6	-	60,00	-	0,6	-	10,00	-	
	01	03	01	15	32		Pembangunan Jalan (TMMD)	Persentase jalan kondisi baik	5	4.000.000.000			1	800.000.000	0	-	-	-	0	-	-	-	
13	01	03	01	36			Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	Persentase Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	95	1.257.174.568	80		5	895.466.687	0	20.056.000	-	2,24	80	20.056.000	84,21	1,60	Dinas PUTR
	01	03	01	36	02		Rencana Detail Tata Ruang Kota Kambang Kec. Lengayang	Tersusunnya RDTR	1	800.000.000			1	790.846.771	0	-	-	-	0	-	-	-	
	01	03	01	36	06		Koordinasi BKPRD	Terselenggaranya TPKRD (bln)	48	457.174.568			12	104.619.916	3	20.056.000	25,00	19,17	3	20.056.000	6,25	4,39	
15	01	03	01	32			Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Persentase Pengaturan Jasa Konstruksi	100	31.944.000	50	24.706.300	10	35.889.602	0	2.667.100	-	7,43	50	27.373.400	50,00	85,69	Dinas PUTR
	01	03	01	32	01		Pengaturan dan Penyelenggaraan Izin Usaha Jasa Konstruksi	terlaksananya proses rekomendasi IUUK (bln)	72	31.944.000	24	24.706.300	12	35.889.602	3	2.667.100	25,00	7,43	27	27.373.400	37,50	85,69	

1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12	
	K	Rp.						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	k	Rp	K	Rp.	K	Rp.				
16	01	03	01	23		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinarmargaan	Beroperasionalnya Alat berat dan laoratorium (bln)	72	2.150.000.000	24	170.241.640	12	1.189.623.594	3	6.882.295	25,00	0,58	27	177.123.935	37,50	8,24	Dinas PUTR	
	01	03	01	23	12	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinarmargaan	pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium	72	800.000.000	24	10.000.000	12	10.000.000	3	-	25,00	-	27	10.000.000	37,50	1,25		
	01	03	01	23	06	Pengadaan Alat ukur dan bahan laboratorium kebinarmargaan	Jumlah Alat ukur dan bahan laboratorium kebinarmargaan (paket)	12	320.000.000	2	70.675.000	4	161.210.772	0	-	-	-	2	70.675.000	16,67	22,09		
	01	03	01	23	15	Operasional laboratorium		72	130.000.000	24	89.566.640	12	127.512.822	3	6.882.295	25,00	5,40	27	96.448.935	37,50	74,19		
	01	03	01	23	04	Pengadaan Alat - alat berat	Jumlah Pengadaan Alat - alat berat	1	900.000.000			1	890.900.000	0	-	-	-	0	-	-	-		
17	01	03	01	27		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase penduduk berakses air minum/bersih	100	15.950.000.000	70	134.775.480	15	15.430.433.264	0	24.745.374	-	0,16	70	159.520.854	70,00	1,00	Dinas PUTR	
	01	03	01	27	13	Pemeliharaan Sarana Prasarana Air Bersih	Pemeliharaan Sarana Prasarana Air Bersih Kab. Pesisir Selatan (bln)	72	250.000.000	24	95.760.780	12	479.650.013	3	1.669.149	25,00	0,35	27	97.429.929	37,50	38,97		
	01	03	01	27	19	Penunjang Kegiatan AMPL (Air minum dan penyehatan lingkungan)	penunjang AMPL (bln)	72	200.000.000	24	39.014.700	12	168.125.251	3	18.638.539	25,00	11,09	27	57.653.239	37,50	28,83		
	01	03	01	27	23	Pembangunan Infrastruktur Air Minum (DAK Afirmasi 2018)	Persentase penduduk berakses air minum/bersih	100	5.500.000.000	0	-	100	5.471.761.000	0	2.523.350	-	0,05	0	2.523.350	-	0,05		
	01	03	01	27	24	Pembangunan Infrastruktur Air Minum (DAK Reguler 2018)	Persentase penduduk berakses air minum/bersih	100	2.000.000.000	0	-	100	1.592.651.000	0	1.189.336	-	0,07	0	1.189.336	-	0,06		
	01	03	01	27	25	Pembangunan Prasarana Sanitasi (DAK Reguler 2018)	Akses sanitasi layak	100	2.000.000.000	0	-	100	1.785.376.000	0	725.000	-	0,04	0	725.000	-	0,04		
	01	03	01	27	26	Pembangunan Prasarana Sanitasi (DAK Penugasan2018)	Akses sanitasi layak	100	6.000.000.000	0	-	100	5.932.870.000	0	-	-	-	0	-	-	-		
18	01	03	01	16		Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup	Persentase pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup	100	495.778.654	80	237.510.830	20	258.267.824	1	35.912.420	5,00	13,91	81	273.423.250	81,00	55,15	Dinas PUTR	
	01	03	01	16	59	Operasional IPLT	Operasional IPLT (bln)	72	495.778.654	24	237.510.830	12	258.267.824	3	35.912.420	25,00	13,91	27	273.423.250	37,50	55,15		
19	1	01	03	01	15	Program pengembangan Pariwisata	Terwujudnya dukungan terhadap sektor pariwisata	100	250.000.000	90	39.999.840,00	5	140.921.920	0	-	-	-	90	39.999.840	90,00	16,00	Dinas PUTR	
	1	01	03	01	15	14	Pelaksanaan Promosi Wisata	promosi wisata	1	250.000.000	1	39.999.840,00	1	16.810.000	0	-	-	-	1	39.999.840	100,00	16,00	
	1	01	03	01	15	37	Pemeliharaan pentas dan Tenda promosi wisata	pemeliharaan tenda (bln)	48	50.000.000	0	-	12	50.319.157	0	-	-	-	0	-	-	-	
21	01	03	01	15		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Terwujudnya ;ingkungan bersih dan bebas sampah (bln)	72	25.735.348.585,00	24	4.116.953.770	12	4.252.302.662	3	1.070.524.880	25,00	25,18	27	5.187.478.650	37,50	20,16	Dinas PUTR	
	01	03	01	15	35	Operasioanal Tempat pembuangan Akhir	Operasioanal TPA (bln)	72	3.790.675.485	24	490.204.900	12	647.923.854	3	83.630.550	25,00	12,91	27	573.835.450	37,50	15,14		

1	2						3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	k	Rp	K	Rp.	K	Rp.	
	01	03	01	15	36		Operasional Kebersihan dan persampahan	Operasioanal tenaga Kebersihan (bln)	72	15.944.673.100	24	2.541.615.820	12	2.576.752.908	3	802.181.280	25,00	31,13	27	3.343.797.100	37,50	20,97	
	01	03	01	15	37		Pemeliharaan Rutin dan Operasional Kendaraan Kebersihan	Pemeliharaan Kendaraan Kebersihan (bln)	72	6.000.000.000	24	1.085.133.050	12	1.027.625.900	3	184.713.050	25,00	17,97	27	1.269.846.100	37,50	21,16	
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR																							
1	1	01	03	02	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan adminstrasi perkantoran (bulan)	60	5.156.306.115	12	1.419.950.134	13,0909091	623.928.400	3	138.525.008	22,92	22,20	15	1.537.726.892	25,00	29,82	Dinas PSDA
	1	01	03	02	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	440.621.015	12	118.806.064	12	65.700.000	3	12.271.784	25,00	18,68	15	131.077.848	25,00	29,75	
	1	01	03	02	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	60	1.056.882.685	12	336.178.000	12	97.650.000	3	16.100.000	25,00	16,49	15	352.278.000	25,00	33,33	
	1	01	03	02	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	60	546.309.285	12	176.359.000	12	86.244.000	3	12.000.000	25,00	13,91	15	188.359.000	25,00	34,48	
	1	01	03	02	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	60	78.750.000	12	29.645.000	12	15.250.000	3	-	25,00	-	15	29.645.000	25,00	37,64	
	1	01	03	02	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	60	477.294.055	12	78.476.000	12	67.861.900	3	18.765.000	25,00	27,65	15	97.241.000	25,00	20,37	
	1	01	03	02	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	60	325.426.275	12	106.348.400	12	28.160.000	3	4.200.000	25,00	14,91	15	110.548.400	25,00	33,97	
	1	01	03	02	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	60	40.263.645	12	13.161.000	12	6.400.000	3	146.000	25,00	2,28	15	13.307.000	25,00	33,05	
	1	01	03	02	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	60	80.454.940	12	24.250.000	12	13.900.000	3	870.000	25,00	6,26	15	25.120.000	25,00	31,22	
	1	01	03	02	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	60	329.402.195	12	40.975.000	12	70.122.500	3	10.040.000	25,00	14,32	15	51.015.000	25,00	15,49	
	1	01	03	02	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya biaya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	60	957.211.170	12	288.957.420	12	112.050.000	3	33.847.224	25,00	30,21	15	322.804.644	25,00	33,72	
	1	01	03	02	01	20	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya biaya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	60	619.178.885	12	186.046.000	12	60.590.000	3	30.285.000	25,00	49,98	15	216.331.000	25,00	34,94	
	1	01	03	02	01	25	Pembinaan dan Pengelolaan Aset	Terlaksananya Pembinaan dan Pengelolaan Aset	60	204.511.965	12	20.748.250	12				-	#DIV/0!					
2	1	01	03	02	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya program peningkatan sarana dan prasarana	60	2.740.000.000	60	482.983.540	24	698.637.350	8,5	171.717.350	35,42	24,58	32,5	870.354.700	54,17	31,76	Dinas PSDA
	1	01	03	02	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	60	1.140.000.000	12	263.642.400	12	334.832.100	4	32.400.000	33,33	9,68	16	296.042.400	26,67	25,97	
	1	01	03	02	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	60	1.600.000.000	12	219.341.140	12	363.805.250	4	58.236.550	33,33	16,01	16	277.577.690	26,67	17,35	

1	2						3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	k	Rp	K	Rp.	K	Rp.	
4	1	01	03	02	16		Program Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Terlaksananya Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong	151	11.700.000.000	58	2.714.491.450	9	1.648.000.000	0,5	58.204.800	5,56	3,53	58,5	2.772.696.250	38,74	23,70	Dinas PSDA
	1	01	03	02	16	01	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar	Tersedianya Perencanaan Saluran Drainase / Gorong-Gorong (Dokumen)	6	200.000.000	1	49.588.000	1	59.300.000			-	-	1	49.588.000	16,67	24,79	
	1	01	03	02	16	03	Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar	Tersedianya Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong (Paket)	140	11.000.000.000	56	2.586.003.950	7	1.500.000.000	0	22.876.000	-	1,53	56	2.608.879.950	40,00	23,72	
	1	01	03	02	16	31	Pembuatan Database Saluran Drainase/Gorong-gorong	Terlaksananya Pembuatan Database Saluran Drainase/Gorong-gorong (Dokumen)	5	500.000.000	1	78.899.500	1	88.700.000	0,5	35.328.800	50,00	39,83	1,5	114.228.300	30,00	22,85	
5	1	01	03	02	24		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Terlaksananya Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	690	248.414.125.000	158	24.305.515.826	35	12.508.492.409	0	48.790.321	-	0,39	149	23.841.320.897	21,59	9,60	DINAS PSDA
	1	01	03	02	24	72	Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai	Terlaksananya Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai (Dokumen)	9	800.000.000	9	512.985.250	0	-									
	1	01	03	02	24	09	Pelaksanaan Normalisasi saluran sungai	Terlaksananya Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai (Paket)	76	43.171.250.000	23	2.988.020.750	12	1.599.989.409	0	11.600.000	-	0,73	23	2.999.620.750	30,26	6,95	
	1	01	03	02	24	10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Terlaksananya Rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi yang direncanakan (Paket)	204	37.424.500.000	68	5.731.671.500	17	2.140.000.000	0	11.132.300	-	0,52	68	5.742.803.800	33,33	15,35	
	1	01	03	02	24	56	Perencanaan Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Terlaksananya Tersedianya Dokumen Perencanaan Irigasi (Dokumen)	9	5.022.000.000	6	106.498.500	1	53.675.000	0	-	-	-	6	106.498.500	66,67	2,12	
	1	01	03	02	24	15	Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun	Terlaksananya optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun (Paket)	5	12.500.000.000	1	705.134.100	1	700.000.000	0	-	-	-	1	705.134.100	20,00	5,64	
	1	01	03	02	24	54	Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)	Tersedianya peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi (DAK) (Paket)	375	145.296.800.000	48	13.571.833.976	1	7.043.753.000	0	26.058.021	-	0,37	48	13.597.891.997	12,80	9,36	

1	2						3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	k	Rp	K	Rp.	K	Rp.	
	1	01	03	02	24	74	Pembaruan Database Irigasi	Tersedianya pembaruan database irigasi (Dokumen)	5	250.000.000	1	42.891.750	1	88.700.000	0	-	-	-	1	42.891.750	20,00	17,16	
	1	01	03	02	24	73	Operasional Irigasi	Tercapainya tujuan operasional irigasi (Dokumen)	6	3.919.200.000	2	646.480.000	1	852.000.000	0	-	-	-	2	646.480.000	33,33	16,50	
	1	01	03	02	24		Operasional Komisi Irigasi	Terlaksananya Operasional Komisi Irigasi (Dokumen)	1	30.375.000			1	30.375.000	0	-	-	-	0	-	-	-	
5	1	01	03	02	26		Program Pengembangan, Pengelolaan, Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air	Tercapainya program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air	72	6.255.213.000	6	68.328.500	33	924.435.000	0	18.402.000	-	1,99	6	86.730.500	8,33	1,39	
	1	01	03	02	26	07	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring Pembangunan Irigasi, Sungai, Rawa dan Embung (Dokumen)	6	260.213.000	2	31.688.000	1	50.055.000	0	-	-	-	2	31.688.000	33,33	12,18	
	1	01	03	02	26	08	Laporan Pelaksanaan AMDAL	Terlaksananya Laporan Pelaksanaan AMDAL (Dokumen)	48	2.850.000.000	2		1	65.375.000	0	-	-	-	2	-	4,17	-	
	1	01	03	02	26	09	Penyusunan Dokumen UKL-UPL/Dokumen Lingkungan	Terlaksananya Penyusunan Dokumen UKL-UPL (Dokumen)	10	675.000.000	1		4	664.525.000	0	1.202.000	-	0,18	1	1.202.000	10,00	0,18	
	1	01	03	02	26	18	Pengawasan dan Konservasi Sumber Daya Air	Terlaksananya Pengawasan dan Konservasi Sumber Daya Air (Dokumen)	4	2.000.000.000	1	36.640.500	1	93.680.000	0	17.200.000	-	18,36	1	53.840.500	25,00	2,69	
	1	01	03	02	26		Perencanaan Embung dan Bangunan Penampungan Air Lainnya	Terlaksananya Perencanaan Embung dan Bangunan Penampungan Air Lainnya (Paket)	4	470.000.000			1	50.800.000	0	-	-	-	0	-	-	-	
6	1	01	03	02	28		Program Pengendalian Banjir	Terlaksananya Program Pengendalian Banjir	57	29.200.000.000	16	12.571.396.150	13	6.977.127.500	1	79.745.050	7,69	1,14	18	12.651.141.200	31,58	43,33	DINAS PSDA
	1	01	03	02	28	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai	Tersedianya Pelaksanaan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran Tanggul Sungai	1	15.850.000.000	1	8.036.676.450		4.413.141.000	1	52.230.250	#DIV/0!	1,18	2	8.088.906.700	200,00	51,03	
	1	01	03	02	28	04	Pengembangan Pengelolaan Daerah Rawa Dalam Rangka Pengendalian Banjir	Terlaksananya Pengerangan dan Pengurangan Banjir Pada Daerah Rawa	46	11.200.000.000	16	4.449.081.050	8	2.300.000.000	0	-	-	-	16	4.449.081.050	34,78	39,72	
	1	01	03	02	28	07	Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai / Kali	Tersedianya Pembersihan dan Pengerukan Sungai / Kali	10	2.000.000.000	0	-	4	175.286.500	0	-	-	-	0	-	-	-	

1	2						3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	k	Rp	K	Rp.	K	Rp.	
	1	01	03	02	28	13	Pembuatan Database Sungai dan Pantai	Tersedianya Pembuatan Database Sungai dan Pantai	1	150.000.000		85.638.650	1	88.700.000	0	27.514.800	-	31,02	0	113.153.450	-	75,44	
IV							URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN																
1	5		01	01		1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemenuhan layanan adminstrasi perkantoran	60	4.774.280.600	12	1.406.262.646	12	930.280.600	3	148.187.126	25,00	15,93	15	1.554.449.772	25	32,56	Dinas PERKIMTAN
	5		01	01			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pembayaran rekening Listrik, Air, dan Koran	60	416.900.000	12	33.264.416	12	76.900.000	3	11.957.025	25,00	15,55	15	45.221.441	25	10,85	
	5		01	01			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pembayaran jasa administrasi keuangan	60	1.221.600.000	12	206.350.000	12	281.600.000	2	41.000.000	16,67	14,56	14	247.350.000	23,33	20,25	
	5		01	01			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya pembayaran jasa kebersihan kantor dan tersedianya alat kebersihan kantor	60	403.688.800	12	76.954.000	12	75.688.800	3	4.788.800	25,00	6,33	15	81.742.800	25	20,25	
	5		01	01			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	60	153.703.600	12	33.135.800	12	28.703.600	3	7.167.700	25,00	24,97	15	40.303.500	25	26,22	
	5		01	01			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan tersedianya penggandaan dokumen	60	202.157.700	12	20.085.900	12	37.157.700	3	8.847.700	25,00	23,81	15	28.933.600	25	14,31	
	5		01	01			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	60	57.690.500	12	52.789.080	12	11.690.500	3	3.091.700	25,00	26,45	15	55.880.780	25	96,86	
	5		01	01			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	114	872.240.000	78	626.821.000	36	172.240.000		1.200.000	-	0,70	78	628.021.000	68,42	72,00	
	5		01	01			Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum rapat, makan minum tamu, makan minum harian	60	195.000.000	12	45.027.500	12	35.000.000	3	8.595.000	25,00	24,56	15	53.622.500	25	27,50	
	5		01	01			Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	60	787.600.000	12	217.811.950	12	137.600.000	3	52.323.201	25,00	38,03	15	270.135.151	25	34,30	
	5		01	01			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	60	463.700.000	12	94.023.000	12	73.700.000	3	9.216.000	25,00	12,50	15	103.239.000	25	22,26	
2	5		01	02			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	60	17.878.712.500	12	1.914.085.043	12	1.941.712.500	3	50.263.731	25,00	2,59	15	1.964.348.774	25	10,99	Dinas PERKIMTAN
	5		01	02		02	Pembangunan Rumah Dinas	Terlaksananya Pembangunan Pagar Rumah Dinas Pemda Kab. Pessel	12	12.409.087.500	4	1.443.584.500	1	807.087.500		631.900	-	0,08	4	1.444.216.400	33,33	11,64	

1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12	
	K	Rp.						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	k	Rp	K	Rp.	K	Rp.				
	5		01	02		03	Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya Pembangunan Selasar Gedung Kantor Perkimtan,	5	950.000.000	1		2	450.000.000		372.100	-	0,08	1	372.100	20	0,04	
	5		01	02		10	Pengadaan Meubiler	Tersedianya Meubiler	150	374.080.000	86	150.436.000	37	54.080.000	30	33.775.500	81,08	62,45	116	184.211.500	77,33	49,24	
	5		01	02		24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional	60	419.770.000	12	113.786.803	12	84.770.000	3	11.754.831	25,00	13,87	15	125.541.634	25	29,91	
	5		01	02		28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	60	125.775.000	12	7.737.390	12	18.775.000	3	3.500.000	25,00	18,64	15	11.237.390	25	8,93	
	5		01	02		41	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Terlaksananya Rehabilitasi Pagar Rumah Dinas Kajari Kab. Pessel, Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala BPKD Lanjutan, Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan Ketua DPRD	10	3.600.000.000	1	198.540.350	3	527.000.000	3	229.400	100,00	0,04	4	198.769.750	40	5,52	
3	1		01	06			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	Ketersediaan Sistem Pelaporan dan keuangan	60	1.491.673.900	12	105.344.650	12	301.673.900	3	52.492.600	25,00	17,40	15	157.837.250	25	10,58	Dinas Perkimtan
	1		01	06		09	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	60	469.449.500	12	64.125.400	12	94.449.500	3	13.502.300	25,00	14,30	15	77.627.700	25	16,54	
	1		01	06		10	Penyusunan Perencanaan Anggaran	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Anggaran	60	270.000.000	12	41.219.250	12	60.000.000	3	18.240.000	25,00	30,40	15	59.459.250	25	22,02	
	1		01	06		14	Monitoring dan Evaluasi Penataan Kawasan Permukiman	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penataan Kawasan Permukiman	48	288.547.800			12	43.547.800	3	12.693.100	25,00	29,15	3	12.693.100	6,25	4,40	
	1		01	06		15	Monitoring dan Evaluasi Penataan Kegiatan Perumahan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penataan Kegiatan Perumahan	24	150.297.800			12	50.297.800	3	4.051.200	25,00	8,05	3	4.051.200	12,5	2,70	
	1		01	06		16	Sinkronisasi Program RPUJ Cipta Karya	Terlaksananya Sinkronisasi Program RPUJ Cipta Karya	60	313.378.800			12	53.378.800	3	4.006.000	25,00	7,50	3	4.006.000	5	1,28	
4	1		01	03	16		Program Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Panjang Saluran drainase lingkungan kondisi baik (km)	96,17	82.134.600.000	10	9.776.696.000	8	7.935.000.000	0	40.632.300	-	0,51	10	9.817.328.300	10,40	11,95	Dinas Perkimtan
	1		01	03	16	33	Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Kawasan Permukiman	Terlaksananya Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Kawasan Permukiman	96,17	82.134.600.000	10	9.776.696.000	8	7.935.000.000	0	40.632.300	-	0,51	10	9.817.328.300	10,398253	11,95	
5	1		01	03	29		Program Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat Tumbuh	Ketersediaan data perencanaan (database)	1	500.000.000	0		1	500.000.000	0	-	-	-	0	-	0,00	0,00	Dinas Perkimtan

1	2						3		4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	k	Rp	K	Rp.	K	Rp.	
	1		01	03	29	30	Penyusunan Data Base Kawasan Permukiman	Tersedianya Dokumen Data Base Kawasan Permukiman		1	500.000.000			1	500.000.000			-	-			0	-	
6	1		01	03	30		Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Pembangunan Jalan Desa (km)	120		12.000.000.000	30	3.829.628.560	20	289.437.500	0	7.863.000	-	2,72	30	3.837.491.560	25	31,98	Dinas Perkimtan
	1		01	03	30	02	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan	Panjang jalan dan jembatan yang dibangun		1	200.000.000				200.000.000		1.803.000		0,90		1.803.000	0	0,90	
	1		01	03	30	63	Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Tentang Pembangunan Kawasan Permukiman	Terlaksananya koorsdinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan kawasan permukiman		12	50.000.000			12	46.037.500	3	4.958.000	25,00	10,77	3	4.958.000	25	9,92	
	1		01	03	30	65	Sosialisasi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan	Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan		1	50.000.000			1	43.400.000		1.102.000	-	2,54		1.102.000	0	2,20	
7	1		01	04	15		Program Pengembangan Perumahan	Persentase penurunan rumah tidak layak huni	71,43		32.807.695.850	16,66	1.891.938.486	10	7.848.363.200	0	62.848.500	-	0,80	16,66	1.954.786.986	23,32	5,96	Dinas Perkimtan
	1		01	04	15	11	Penunjang Perumahan Permukiman dan BSPS	Tersedianya Penunjang Permukiman dan BSPS		12	848.816.400	12	152.523.536	12	168.816.400	3	13.954.000	25,00	8,27	15	166.477.536	125	19,61	
	1		01	04	15	13	Pematangan Lahan Lokasi Rumah Tapak	Jumlah Pematangan lahan lokasi rumah tapak		20	4.000.000.000	3	679.676.550	4	650.000.000		8.620.100	-	1,33	3	688.296.650	15	17,21	
	1		01	04	15	14	Penyusunan Data Base Perumahan Permukiman	Tersedianya Dokumen Data Base Perumahan Permukiman		1	500.000.000			1	500.000.000		229.400	-	0,05		229.400	0	0,05	
	1		01	04	15	15	Pendataan dan Validasi Data Rumah Tidak Layak Huni	Terlaksannanya Pendataan dan validasi data Rumah Tidak Layak Huni		100	1.621.658.550	20	118.436.150	10	61.007.900	18,23	11.123.500	182,30	18,23	38,23	129.559.650	38,23	7,99	
	1		01	04	15	16	Pembangunan Jalan Minapolitan Mandeh (Lanjutan)	Terlaksananhya pembangunan jalan minapolitan mandeh		2	420.000.000	1	217.659.750	1	200.000.000		1.903.000	-	0,95	1	219.562.750	50	52,28	
	1		01	04	15	17	Rehab Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang direhabilitasi		828	19.846.674.500	28	723.642.500	200	4.246.674.500		1.727.500	-	0,04	28	725.370.000	3,3816425	3,65	
	1		01	04	15	21	Penyusunan Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Pesisir Selatan	Tersedianya Dokumen RP3KP		1	880.000.000			1	862.150.000		2.694.400	-	0,31		2.694.400	0	0,31	
	1		01	04	15	22	Penunjang Kegiatan Pendataan dan Perencanaan Perumahan	Tersedianya Penunjang Pendataan dan Perencanaan		12	302.098.400			12	62.098.400	3	3.307.000	25,00	5,33	3	3.307.000	25	1,09	

1	2						3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
	K	Rp.							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	k	Rp	K	Rp.	K	Rp.			
	1		01	04	15	23	Penunjang Kegiatan Penyediaan dan Pelaksanaan Perumahan	Tersedianya Penunjang kegiatan Penyediaan dan Pelaksanaan	12	320.672.000		12	80.672.000	3	19.289.600	25,00	23,91	3	19.289.600	25	6,02		
	1		01	04	15	27	DAK Perumahan	Terlaksananya DAK Perumahan	260	4.067.776.000		65	1.016.944.000		-	-		-	0	-			
8	1		01	04	16		Program Lingkungan sehat Perumahan	jumlah rumah yang memiliki air bersih dan sanitasi layak	2000	13.134.150.000		573	3.950.350.000	0	6.129.900	-	0,16	0	6.129.900	0	0,05	Dinas Perkimtan	
	1		01	04	16	08	Pembangunan Infrastruktur Sanitasi	Terbangunnya Tangki Septik	2000	11.460.000.000		573	2.865.000.000		-	-		-	0	-			
	1		01	04	16	09	Penunjang Pembangunan Infrastruktur Sanitasi	Terlaksananya Penunjang Pembangunan Infrastruktur Sanitasi	48	818.400.000		12	229.600.000	3	3.053.100	25,00	1,33	3	3.053.100	6,25	0,37		
	1		01	04	16		Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP)	Tersedianya Dokumen RP2KPKP	1	855.750.000		1	855.750.000		3.076.800	-	0,36		3.076.800		0,36		
V							URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT																

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

	1	2	00	02	15		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase Meningkatnya pengetahuan kebencanaan masyarakat melalui promosi	100		95.000.000	33		35.439.854	17		15.000.000	0		-	-	-	-	33		35.439.854	33,00		37,31	BPBD
	2		00	02	15	10	Pelaksanaan Festival Langkisau	jumlah event yang diikuti	5		95.000.000	1		35.439.854	1		15.000.000	-		-	-	-	1		35.439.854	20,00		37,31		
2	1		01	03	23		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebina margaan	Berfungsinya sarana-prasara kebencanaan (%)	100		571.800.000	12		97.198.000	17		45.400.000	3		1.200.000	15,29	2,64	14,60		98.398.000	14,60		17,21	BPBD	
	1		01	03	23	20	Operasional dan Pemeliharaan alat alat berat.	Terlaksananya operasional dan pemeliharaan alat-alat berat (bln)	60		571.800.000	12		97.198.000	12		45.400.000	3		1.200.000	25,00	2,64	15,00		98.398.000	25,00		17,21		
3	1		01	05	23		Program Kesiapsiagaan	Persentase masyarakat yang siap siaga menghadapi bencana	100		717.375.320	60		249.779.070	20		36.383.000	-		-	-	-	60,0		249.779.070	60,00		34,82	BPBD	
	1		01	05	23	13	Jambore dan Bulan Pengurangan Resiko Bencana	jumlah event jambore yang diikuti (kali)	5		717.375.320	1		249.779.070	1		36.383.000	0,00		-	-	-	1,0		249.779.070	20,00		34,82		
4	1		01	05	26		Program Penanganan Tanggap Darurat	Persentase Penanganan Bencana Tanggap Darurat.	100		2.164.210.800	33		671.498.250	17		387.817.000	5		65.301.600	29,41	16,84	38		736.799.850	38,00		34,04	BPBD	
	1		01	05	26	02	Operasional SAR dan Tim Reaksi Cepat (TRC)	Terlaksananya Operasional SAR dan Tim Reaksi Cepat (TRC).	60		1.205.008.500	12		499.850.900	12		335.812.306	3		48.708.500	25,00	14,50	15		548.559.400	25,00		45,52		
	1		01	05	26	03	Operasional Logistik dan Perlengkapan Gudang Logistik	Terlaksananya operasional logistik dan perlengkapan gudang logistik. (bln)	60		959.202.300	12		171.647.350	12		52.004.694	3		16.593.100	25,00	31,91	15,00		188.240.450	25,00		19,62		

1	2						3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	k	Rp	K	Rp.	K	Rp.	
5	1	01	05	27			Program Pengelolaan dan Penanganan Dampak Bencana	Persentase kejadian bencana yang terdata	80	1.229.144.600	60	179.614.160	10	109.906.000	2	31.773.300	20,00	28,91	62	211.387.460	77,50	17,20	BPBD
	1	01	05	27	01		Inventarisasi dan Identifikasi Kerusakan/Kerugian	Jumlah data dan laporan triwulan yang dihasilkan	20	564.113.600	4	73.413.560	4	58.193.000	1	21.404.700	25,00	36,78	5	94.818.260	25,00	16,81	
	1	01	05	27	02		Monitoring dan Evaluasi Kebencanaan	jumlah laporan hasin monitoring dan evaluasi triwulannan (dok)	20	665.031.000	4	106.200.600	4	51.713.000	1	10.368.600	25,00	20,05	5	116.569.200	25,00	17,53	
6	1	01	05	28			Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Persentase perangkat daerah yang memahami tupoksi dalam penanggulangan bencana (%)	90	1.457.053.950	50	433.872.060	15	101.870.644	2	6.152.250	13,33	6,04	52	440.024.310	57,78	30,20	BPBD
	1	01	05	28	07		Operasional dan Perawatan Pusdaltin	Aktifnya Early Warning System (EWS) peringatan dini di Pesisir Selaatan.(bn)	60	1.457.053.950	12	433.872.060	12	101.870.644	3	6.152.250	25,00	6,04	15	440.024.310	25,00	30,20	
7	1	01	1	01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran.	100%	5.943.002.400	33%	1.868.728.950	17%	1.039.873.475	4%	257.169.265	25,00	24,73	37%	2.125.898.215	37,25	35,77	BPBD
	1	01	1	01	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Persentase pelayanan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik.	100%	639.828.000	33%	250.740.000	17%	63.140.000	4%	13.107.101	25,00	20,76	37%	263.847.101	37,25	41,24	
	1	01	1	01	07		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.	Persentase penyediaan jasa administrasi	100%	3.027.403.000	33%	761.600.000	17%	777.300.000	4%	123.000.000	25,00	15,82	37%	884.600.000	37,25	29,22	
	1	01	1	01	08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Persentase Pelayanan Jasa Kebersihan kantor.	100%	66.750.600	33%	22.250.200	17%	6.119.100	4%	-	25,00	-	37%	22.250.200	37,25	33,33	
	1	01	1	01	09		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Persentase pelayanan jasa perbaikan peralatan kerja.	100%	186.895.800	33%	75.449.300	17%	12.100.000	4%	50.000.000	25,00	413,22	37%	125.449.300	37,25	67,12	
	1	01	1	01	10		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase layanan penyediaan alat tulis kantor.	100%	240.000.000	33%	80.000.000	17%	24.657.056	4%	7.768.114	25,00	31,50	37%	87.768.114	37,25	36,57	
	1	01	1	01	11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase pelayanan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.	100%	210.000.000	33%	70.000.000	17%	19.810.084	4%	6.106.400	25,00	30,82	37%	76.106.400	37,25	36,24	
	1	01	1	01	12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase pelayanan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	100%	60.000.000	33%	19.999.450	17%	3.001.200	4%	-	25,00	-	37%	19.999.450	37,25	33,33	
	1	01	1	01	15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persentase pelayanan penyediaan bahan bacaan	100%	27.000.000	33%	10.000.000	17%	4.500.000	4%	810.000	25,00	18,00	37%	10.810.000	37,25	40,04	
	1	01	1	01	17		Penyediaan makanan dan minuman	Persentase pelayanan makanan dan minuman kantor.	100%	70.625.000	33%	23.750.000	17%	5.125.000	4%	797.500	25,00	15,56	37%	24.547.500	37,25	34,76	
	1	01	1	01	18		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase pelayanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.	100%	1.045.000.000	33%	419.515.000	17%	82.921.035	4%	45.655.150	25,00	55,06	37%	465.170.150	37,25	44,51	

1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	k	Rp	K	Rp.	K	Rp.	
	1	01	1	01	20	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Persentase rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah.	100%	369.500.000	33%	135.425.000	17%	41.200.000	4%	9.925.000	25,00	24,09	37%	145.350.000	37,25	39,34	
8	1	01	1	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur.	100%	952.711.140	33%	379.016.630	17%	113.749.881	4%	9.925.000	23,53	8,73	37%	388.941.630	37,00	40,82	BPBD
	1	01	1	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan roda enam,roda empat dan roda dua dalam pemeliharaan	100%	952.711.140	33%	379.016.630	17%	113.749.881	4%	9.925.000	23,53	8,73	37%	388.941.630	37,00	40,82	BPBD
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA																						
1						Program Pelayanan Administrasi perkantoran	terlaksananya Pelayanan Administrasi perkantoran (bln)	60	8.699.932.520	12	2.135.115.798	12	1.320.516.329	3,00	46.337.692	25,00	3,51	15	2.181.453.490	25,00	25,07	Satpol PP dan Damkar
						Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rek. Listrik, Telp, air untk 12 bln	60	445.460.000	12	98.333.134	12	89.400.000	3,00	8.631.482	25,00	9,65	15	106.964.616	25,00	24,01	
						Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penatausahaan keuangan	60	269.000.000	12	69.850.000	12	53.100.000	3,00	-	25,00	-	15	69.850.000	25,00	25,97	
						Penyediaan jasa kebersihan kantor	tersedianya kebersihan kantor	60	292.040.600	12	54.574.400	12	60.282.600	3,00	8.000.000	25,00	13,27	15	62.574.400	25,00	21,43	
						Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	tersedianya jasa service alat administrasi	60	63.950.000	12	15.550.000	12	5.500.000	3,00	665.000	25,00	12,09	15	16.215.000	25,00	25,36	
						Penyediaan Alat Tulis Kantor	tersedianya alat tulis kantor 12 bln	60	168.466.123	12	45.221.625	12	27.281.498	3,00	2.524.000	25,00	9,25	15	47.745.625	25,00	28,34	
						Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan pengadaan 12 bln	60	239.109.217	12	67.249.240	12	21.600.112	3,00	3.765.000	25,00	17,43	15	71.014.240	25,00	29,70	
						Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya alat listrik dan elektronik	60	96.999.000	12	16.436.200	12	15.957.000	3,00	-	25,00	-	15	16.436.200	25,00	16,94	
						Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedia surat kabar untuk 12 bln	60	77.200.500	12	21.040.000	12	14.680.000	3,00	1.675.000	25,00	11,41	15	22.715.000	25,00	29,42	
						Penyediaan makanan dan minuman	makanan dan minuman harian, rapat, tamu untuk (bln)	60	196.050.000	12	52.682.500	12	75.300.000	3,00	825.000	25,00	1,10	15	53.507.500	25,00	27,29	
						Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	perjalanan dinas luar daerah (bln)	60	996.607.000	12	231.448.299	12	89.375.000	3,00	7.550.000	25,00	8,45	15	238.998.299	25,00	23,98	
						Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Honorarium, makan petugas piket	60	4.678.750.000	12	1.203.290.400	12	816.390.119	3,00	6.377.210	25,00	0,78	15	1.209.667.610	25,00	25,85	
						Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	perjalanan dinas dalam daerah 12 bln	60	1.176.300.080	12	259.440.000	12	51.650.000	3,00	6.325.000	25,00	12,25	15	265.765.000	25,00	22,59	
2						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	60	2.528.592.810	12	645.883.307	12	324.200.000	3,00	15.160.175	25,00	4,68	15	661.043.482	25,00	26,14	Satpol PP dan Damkar
						Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan kantor yang layak	60	667.797.830	12	165.921.000	12	60.600.000	3,00	-	25,00	-	15	165.921.000	25,00	24,85	
						Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	60	435.213.830	12	115.831.000	12	39.200.000	3,00	-	25,00	-	15	115.831.000	25,00	26,61	
						Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional	terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional	60	1.425.581.150	12	364.131.307	12	224.400.000	3,00	15.160.175	25,00	6,76	15	379.291.482	25,00	26,61	

1	2						3		4		5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	k	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3							Program Peningkatan Disiplin Paratur	Persentase SDM yang disiplin			100%	1.893.619.600	20%	87.069.600	20%	350.045.053	-	-	-	-	20%	87.069.600	20,00	4,60	Satpol PP dan Damkar
							Pengadaan Pakaian Dinas Beseta Perlengkapan	Tersedianya pakaian dinas bagi satpol pp (bln)			60	1.893.619.600	12	297.029.150	12	350.045.053	3,00	-	25,00	-	15	297.029.150	25,00	15,69	
4							Program Peningkatan dan kenyamanan lingkungan	Tertib dan amanya lingkungan			100%	2.130.037.170	20%	656.000.000	20%	170.310.424	5%	39.817.129	25,00	23,38	25%	695.817.129	25,00	32,67	Satpol PP dan Damkar
							Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban umum	Terciptanya Koordinasi antara Penegak Perda			100%	2.130.037.170	20%	656.000.000	20%	170.310.424	2%	39.817.129	10,00	23,38	22%	695.817.129	22,00	32,67	
5							Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Terpeliharanya Kantrantibmas dan Berkurang tindak kriminal			100%	4.209.528.436	20%	291.525.835	20%	214.977.585	0,03	1.981.000	15,00	0,92	0,23	293.506.835	23,00	6,97	Satpol PP dan Damkar
							Forum Penegak Perda	Terciptanya Koordinasi antara Penegak Perda (bln)			60	1.191.722.626	12	77.190.175	12	85.463.781	3,00	1.981.000	25,00	2,32	1500%	79.171.175	25,00	6,64	
							Operasional PAM Balimau Paga	Terciptanya Kelancaran Balimau Paga			5	306.362.250	1	51.824.300	1	22.571.709	-	-	-	-	100%	51.824.300	20,00	16,92	
							Operasional Pengamanan Festival Langkisau (bln)	Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan			60	1.503.226.000	12	54.236.420	12	41.287.149	3,00	-	25,00	-	15	54.236.420	25,00	3,61	
							Operasional PAM Lebaran	Terciptanya Ketentraman dan kenyamanan di titik rawan trantibum pada saat lebaran			5	1.208.217.560	1	108.274.940	1	65.654.946	-	-	-	-	1	108.274.940	20,00	8,96	
6							Program Penanganan Tanggap Darurat	Terlaksananya respon cepat terhadap tanggap darurat bencana (bln)			60	14.199.887.056	12	2.074.415.150	12	1.432.965.350	3,00	45.932.624	25,00	3,21	15	2.120.347.774	25,00	14,93	
							Operasional Pemadam Kebakaran	Terbayarnya honorarium satgas damkar (bln)			60	14.199.887.056	12	2.074.415.150	12	1.432.965.350	3,00	45.932.624	25,00	3,21	15	2.120.347.774	25,00	14,93	
VI							URUSAN SOSIAL																		
1							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Administrasi Perkantoran			72	662.560.000	24	511.402.856	12	506.187.938	3	97.412.982	25,00	19,24	3	97.412.982	4,17	14,70	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
							Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan terhadap telepon, air dan listrik			72	51.240.000	24	3.589.406.000	12	29.400.000	3	2.412.024	25,00	8,20	3,00	2.412.024	4,17	4,71	
							Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya jasa administrasi dan laporan keuangan			72	65.000.000	24	75.041.200.000	12	78.019.001	3	10.555.000	25,00	13,53	3,00	10.555.000	4,17	16,24	

1	2						3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	k	Rp	K	Rp.	K	Rp.	
							Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhnya biaya kebersihan kantor dalam satu tahun, penjaga kantor, petugas kebersihan, pramu kantor dan sopir	72	129.000.000	24	101.436.700,000	12	109.290.941	3	34.230.210	25,00	31,32	3,00	34.230.210	4,17	26,54	
							Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya operasional administrasi kantor	72	46.000.000	24	33.788.288,000	12	28.030.683	3	3.816.000	25,00	13,61	3,00	3.816.000	4,17	8,30	
							Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan penggandaan dan percetakan kantor	72	42.000.000	24	25.899.250	12	30.549.813	3	3.532.400	25,00	11,56	3,00	3.532.400	4,17	8,41	
							Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kebutuhan penerangan kantor	72	22.000.000	24	7.682.500,000	12	4.305.000	3	315.000	25,00	7,32	3,00	315.000	4,17	1,43	
							Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan terhadap informasi	72	13.000.000	24	10.320.000,000	12	11.320.000	3	960.000	25,00	8,48	3,00	960.000	4,17	7,38	
							Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum rapat, tamu	72	22.000.000	24	17.050.000,000	12	36.122.500	3	1.500.000	25,00	4,15	3,00	1.500.000	4,17	6,82	
							Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya tugas-tugas rutin dalam provinsi dan luar provinsi	72	138.660.000	24	171.545.512,000	12	115.250.000	3	28.792.348	25,00	24,98	3,00	28.792.348	4,17	20,76	
							Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya tugas-tugas rutin dalam daerah	72	133.660.000	24	65.050.000,000	12	63.900.000	3	11.300.000	25,00	17,68	3,00	11.300.000	4,17	8,45	
2							Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	72	625.640.000	24	598.739.138,000	12	324.466.183	3	52.468.040	25,00	16,17	3,00	52.468.040	4,17	8,39	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
							Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terenuhinya kebutuhan peralatan kantor	72	121.000.000	24	241.931.500	12	59.115.581	3	-	25,00	-	3,00	-	4,17	-	
							Pengadaan Meubiler	Terpenuhinya kebutuhan meubiler kantor	72	81.000.000	24	74.860.000	12	11.294.090	3	10.375.000	25,00	91,86	3,00	10.375.000	4,17	12,81	
							Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya sarana gedung kantor yang baik	72	85.140.000	24	88.151.500	12	55.464.012	3	1.950.000	25,00	3,52	3,00	1.950.000	4,17	2,29	
							Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya dinas yang siap pakai	72	285.000.000	24	185.946.138	12	191.342.500	3	39.743.040	25,00	20,77	3,00	39.743.040	4,17	13,94	
							Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	72	25.500.000	24	7.850.000	12	7.250.000	3	400.000	25,00	5,52	3,00	400.000	4,17	1,57	
							Pelaksanaan Festifal Langkisau	Trcapainya pelaksanaan festival alngkisau	72	28.000.000	24	14.717.800	12	28.000.000	3	21.956.500	25,00	78,42	3,00	21.956.500	4,17	78,42	
3							Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah pelayanan sosial yang mendapatkan rehabilitasi dan pelatihan (kec per prano tagana)	51	189.000.000	15	90.358.150,00	12	236.212.501	0,00	17.403.100	-	7,37	-	17.403.100	-	9,21	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1	2						3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	k	Rp	K	Rp.	K	Rp.	
							Penanganan Masalah Strategis tentang Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	Terpenuhinya operasional penanganan bencana	51	110.000.000	15	77.291.400	12	170.157.667	0,00	10.296.100	-	6,05	-	10.296.100	-	9,36	
							Monitoring, Evaluasi dan Kebijakan Perberasan (RASKIN)	Beras raskin terdistribusi dengan baik (Kec)	15	79.000.000			12	66.054.834	2,00	7.107.000	16,67	10,76	2,00	7.107.000	13,33	9,00	
4							Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	PMKS yang dapat diberdayakan dengan memberikan bimbingan dan bantuan (%)	75	1.170.000.000	60	373.969.242,000	56,25	459.513.227	5,00	26.999.550	8,89	5,88	5,00	26.999.550	6,67	2,31	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
							Penunjang Operasional Program Keluarga Harapan (PKH)	Terpenuhinya penanganan fakir miskin dan OMKS Progran PKH	100	115.000.000	0,5	84.817.418	0,5	95.201.486	0,03	2.859.900	6,00	3,00	0,03	2.859.900	0,03	2,49	
							Pelayanan orang terlantar diperjalanan	Tertanganinya kasus Orang Terlantar, Mayat Terlantar dan ODGJ	30	85.000.000	9	68.413.830	9	52.026.104	9,00	14.845.000	100,00	28,53	9,00	14.845.000	30,00	17,46	
							Pendampingan Bantuan KUBE Fakir Miskin	Terbinanya KUBE Fakir Miskin 2018	2	120.000.000	2	21.188.440	2	80.312.897	2,00	4.124.900	100,00	5,14	2,00	4.124.900	100,00	3,44	
							Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Iuran APBD	Validnya data PBI APBD	6	100.000.000	2	38.329.900	1	30.161.192	0,00	3.707.250	-	12,29	0,00	3.707.250	0,00	3,71	
							Pengembangan SLRT Kabupaten Pesisir Selatan	Meningkatnya cakupan penerima layanan kesejahteraan sosial (%)	100	750.000.000	10	59.287.550	10	201.811.546	0,00	1.462.500	-	0,72	0,00	1.462.500	0,00	0,20	
5							Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Jumlah penyandang cacat yang dibina dan pemberian jaminan sosial penyandang cacat berat (orang)	90	150.000.000	68	77.291.400,000	18	61.700.261	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
							Bimbingan Sosial dan Pendampingan Jaminan Sosial Penyandang Cacat Berat	Terpenuhinya biaya hidup bagi penyandang cacat	90	150.000.000	68	77.291.400	18	61.700.261	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	
6							Program pembinaan panti asuhan/panti jompo	Jumlah panti dan anak panti yang mendapatkan pelayanan sosial (panti asuhan per anak)	300	800.000.000	180	402.922.680,000	80	318.548.618	80,00	132.138.350	100,00	41,48	80,00	132.138.350	26,67	16,52	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
							Penyediaan Bahan Sembako Anak Dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan bahan sembako anak dalam panti	300	800.000.000	180	402.922.680,000	80	318.548.618	80,00	132.138.350	100,00	41,48	80,00	132.138.350	26,67	16,52	
7							Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS Lembaga, PSKS Perseorangan dan LKS yang mendapatkan bimbingan dan pelatihan (%)	100	350.000.000	94	226.166.680	75	133.592.367	8,53	15.200.000	11,37	11,38	8,53	15.200.000	8,53	4,34	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
							Peningkatan Kualitas Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Kabupaten Pesisir Selatan	Meningkatnya kualitas kinerja LKKS dan terfasilitasinya TKSK	100	350.000.000	94	226.166.680	75	133.592.367	8,53	15.200.000	11,37	11,38	8,53	15.200.000	8,53	4,34	

1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	k	Rp	K	Rp.	K	Rp.	
8						Penanaman Nilai- Nilai Kepahlawanan dan Keperintisan	Meningkatnya pemahaman tentang nllai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial (org)	600	270.000.000	100	196.344.200,000	100	118.721.478	0,00	4.242.500	-	3,57	0,00	4.242.500	0,00	1,57	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Sarasehan Penanaman Nilai-nilai Kepahlawanan bagi Generasi Muda	Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan (org)	600	120.000.000	100	81.351.200	100	39.910.087	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	
						Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepahlawanan dan Keperintisan	Terpenuhinya sarana dan prasarana kebutuhan TMP Sago dan MPN Ilyas Yacub	2	150.000.000	2	114.993.000	2	78.811.391	0,00	4.242.500	-	5,38	0,00	4.242.500	0,00	2,83	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR																
I						URUSAN TENAGA KERJA																
01	02	01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemenuhan layanan administrasi perkantoran (bln)	72	4.149.928.641	24	1.330.321.825	12	590.536.850	3	102.335.695	25,00	17,33	27	1.432.657.520	37,50	34,52	Dinas Nakertran
	02	01	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya biaya jasa telepon dan listrik	72	281.676.000	24	114.600.000	12	36.000.000	3	6.382.445	25,00	17,73	27	120.982.445	37,50	42,95	
	02	01	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan.	72	480.168.540	24	111.971.100	12	77.500.000	3	12.300.000	25,00	15,87	27	124.271.100	37,50	25,88	
	02	01	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedinya jasa petugas kebersihan kantor.	72	1.024.028.824	24	271.371.400	12	162.175.700	3	28.307.350	25,00	17,45	27	299.678.750	37,50	29,26	
	02	01	01	01	10	Penyediaan alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor.	72	222.114.913	24	72.574.700	12	32.221.550	3	11.349.200	25,00	35,22	27	83.923.900	37,50	37,78	
	02	01	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.	Tersedianya barang cetakan dan pengandaan.	72	168.834.688	24	54.742.200	12	24.583.600	3	6.143.700	25,00	24,99	27	60.885.900	37,50	36,06	
	02	01	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	72	101.626.351	24	21.286.000	12	17.311.000	3	3.476.000	25,00	20,08	27	24.762.000	37,50	24,37	
	02	01	01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan.	Tersedianya bahan bacaan/surat kabar.	72	74.939.200	24	13.220.000	12	14.320.000	3	785.000	25,00	5,48	27	14.005.000	37,50	18,69	
	02	01	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan minum rapat dan tamu kantor.	72	184.488.800	24	36.905.000	12	31.800.000	3	4.675.000	25,00	14,70	27	41.580.000	37,50	22,54	
	02	01	01	01	18	Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Adanya rapat- rapat koordinasi dan konsultasi baik dalam propinsi maupun luar propinsi.	72	748.497.500	24	296.000.000	12	97.500.000	3	17.572.000	25,00	18,02	27	313.572.000	37,50	41,89	
	02	01	01	01	31	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah dinas tenaga kerja dan transmigrasi.	72	50.873.070	24	50.873.070	0	0	0	0			24	50.873.070	33,33	100,00	

1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	k	Rp	K	Rp.	K	Rp.	
	02	01	01	01	20	Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Adanya rapat- rapat koordinasi dan konsultasi se kecamatan dalam kabupaten.	72	532.365.000	24	198.600.000	12	55.725.000	3	4.000.000	25,00	7,18	27	202.600.000	37,50	38,06	
	02	01	01	01	38	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan	Tersusnya data perkembangan hasil pelaksanaan kegiatan.	72	280.315.755	24	88.178.355	12	41.400.000	3	7.345.000	25,00	17,74	27	59.882.445	37,50	42,95	
2	02	02	01	02		Program Penyediaan sarana dan Prasarana Aparatur	Pemenuhan sarpras penunjang kerja (Bln)	72	3.247.183.616	24	1.004.125.300	12	1.069.453.000	3	133.863.700	25,00	12,52	27	1.137.989.000	37,50	35,05	Dinas Nakertran
	02	01	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.	Tersednya kendaraan dinas/Operasional yang layak dan siap pakai.	72	732.991.008	24	388.668.700	12	127.060.000	3	21.293.400	25,00	16,76	27	409.962.100	37,50	55,93	
	02	01	01	02	09	Pengadaan Peralatan Kantor	Tersedianya peralatan kantor.	72	732.991.008	24	255.451.600	12	102.895.800	3	89.870.700	25,00	87,34	27	345.322.300	37,50	47,11	
	02	01	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor.	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung dan halaman kantor.	72	136.499.400	24	27.900.000	12	23.400.000	3	10.275.000	25,00	43,91	27	38.175.000	37,50	27,97	
	02	02	01	02	10	Pengadaan Mobiler	Tersedianya mobiler kantor.	24	127.105.000	24	127.105.000	0	0	0	0			27	127.105.000	112,50	100,00	
	02	01	01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor.	72	796.867.700	24	173.500.000	12	126.867.700	3	12.424.600	25,00	9,79	27	185.924.600	37,50	23,33	
	02	01	01	02	42	Rehab sedang/ berat gedung kantor	Terlaksananya rehab sedang/ berat sarana dan prasarana BLK	12	720.729.500	12	31.500.000	12	689.229.500	0	0	0,00	0,00	12	31.500.000	100,00	4,37	
4	02	01	01	15		Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja yang terampil dan mempunyai keahlian (orang)	144	8.590.002.825,00	160	630.632.000,00	112	774.494.500,00	3	12.257.405	2,68	1,58	163	642.889.405	113,19	7,48	Dinas Nakertran
	02	01	01	15	06	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja.	Jumlah peserta pelatihan	60	8.570.504.825	20	630.632.000	10	754.996.500	3	6.748.405	30,00	0,89	23	637.380.405	38,33	7,44	
	02	01	01	15	13	Pemeliharaan peralatan Workshop BLK Painan	Terpeliharanya peralatan workshop bagi siswa BLK	54	19.498.000	18	0	9	19.498.000	3	5.509.000	33,33	28,25	21	5.509.000	38,89	28,25	
5	02	01	01	16		Program peningkatan kesempatan kerja	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pekerjaan di Luar Negeri	326	336.322.000,00	350	221.984.350,00	150	114.337.650,00	3	12.310.000	2,00	10,77	353	234.294.350	108,28	69,66	Dinas Nakertran
	02	01	01	16	02	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja.	Publikasi yang dilaksanakan	72	269.286.900	24	154.949.250	12	114.337.650	3	12.310.000	25,00	10,77	27	167.259.250	37,500	62,112	
	01	02	01	16	14	Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah (PTKD)	Dokumen PTKD	1	67.035.100	1	67.035.100	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	1	67.035.100	100,000	100,000	
6	02	01	01	17		Program Perlindungan dan Pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang menerapkan aturan-aturan ketenagakerjaan	100	416.899.685,00	40	61.655.000,00	20	62.265.000,00	3	1.775.000	15,00	2,85	43	63.430.000	43,0	15,2	Dinas Nakertran

1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	k	Rp	K	Rp.	K	Rp.	
	02	01	01	17	05	Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.	pengawasan yang dilaksanakan (bin)	72	416.899.685	24	61.655.000	12	62.265.000	3	1.775.000	25,00	2,85	27	63.430.000	37,5	15,2	
II						URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																
1						Penguatan dan pembangunan kelembagaan beserta jaringan dan penyusunan regulasi Daerah	persentase kelembagaan daerah yang responsif gender dan pemenuhan hak	80%	375.000.000	29%	156.395.105	30%	201.693.506	3,83%	7.728.350	12,77	3,83	32,87%	164.123.455	41,09	43,77	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Pengembangan Fasilitas Forum Anak Daerah	Jumlah kecamatan yang tersentuh perlindungan	15	110.000.000	0		2	86.129.949	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	
						Pembinaan Kelembagaan PUG dan Perlindungan Anak	Terimplementasinya pembinaan kelembagaan PUG	60%	165.000.000	29,04%	89.289.340,000	30%	84.103.590	2,40%	6.728.350	8,00	8,00	31,44%	96.017.690	52,40	58,19	
						Penyusunan Anggaran Responsif Gender	OPD yang menerapkan anggaran responsif gender	45	100.000.000	20	67.105.765,000	20	31.459.967	0,00	1.000.000	-	3,18	20,00	68.105.765	44,44	68,11	
2						Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Tercapainya penguatan dan pembangunan kelembagaan beserta jaringan P2TP2A	80%	467.500.000	60%	60.563.060,000	50%	145.344.827	0,07	10.273.400	14,14	7,07	0,67	70.836.460	83,84	15,15	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Pemberdayaan (P2TP2A)	Jumlah Kecamatan yang menurun kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	15	275.000.000	2	60.563.060,000	2	113.859.822	0,00	7.843.500	-	6,89	2,00	68.406.560	13,33	24,88	
						Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	dokumen profil Gender	5	192.500.000			1	31.485.005	0,00	2.429.900	-	7,72	0,00	2.429.900	0,00	1,26	
3						Perlindungan anak	Jumlah Nagari yang mendapat program perlindungan anak	15	250.000.000	3	149.307.060,000	3	71.012.892	0,00	11.445.100	-	16,12	3,00	160.752.160	20,00	64,30	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Pembinaan Nagari Layak Anak	Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak anak	15	250.000.000	3	149.307.060,000	2	71.012.892	0,00	11.445.100	-	16,12	3,00	160.752.160	20,00	64,30	
4						Program Peningkatan Perempuan di Perdesaan/Nagari	Meningkatnya peran perempuan di nagari/ kecamatan	0,70%	295.000.000	0,58%	234.689.514	0,10%	75.000.000	0,04%	1.100.000	40,00	1,47	0,62%	235.789.514	88,57	79,93	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Pemberdayaan Kelembagaan GOW Kabupaten	even GOW yang dilaksanakan (kali)	60	295.000.000	12	234.689.514,000	8	75.000.000,0	2,00	1.100.000	25,00	1,47	14,00	235.789.514	23,33	79,93	
III						URUSAN PANGAN																
1	1	02	03	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah cakupan pelayanan administrasi perkantoran	72	720.000.000	24	451.143.502	12	300.631.331	3	89.316.807	25,00	29,71	27	540.460.309	25,00	75,06	Dinas Pangan
	1	02	03	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pembayaran rekening listrik, air, telpon dan faks(bulan)	72	90.000.000	24	58.509.350	12	45.480.000	3	9.347.387	25,00	20,55	27	67.856.737	37,50	75,40	

1	2						3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	k	Rp	K	Rp.	K	Rp.	
	1	02	03	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pembayaran honor dan operasional pengelola keuangan (bulan)	72	80.000.000	24	51.500.000	12	77.850.000	3	8.750.000	25,00	11,24	27	60.250.000	37,50	75,31	
	1	02	03	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor (bulan)	72	50.000.000	24	36.563.000	12	19.407.631	3	8.418.420	25,00	43,38	27	44.981.420	37,50	89,96	
	1	02	03	01	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (bulan)	72	60.000.000	24	30.392.000	12	20.589.700	3	3.995.500	25,00	19,41	27	34.387.500	37,50	57,31	
	1	02	03	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan (bulan)	72	10.000.000	24	3.112.500	12	5.124.000	3	493.000	25,00	9,62	27	3.605.500	37,50	36,06	
	1	02	03	01	01	13	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan dan bahan kebersihan kantor	72	80.000.000	24	43.175.500	12	44.050.000	3	7.825.000	25,00	17,76	27	51.000.500	37,50	63,75	
	1	02	03	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	72	10.000.000	24	8.435.000	12	2.600.000	3	460.000	25,00	17,69	27	8.895.000	37,50	88,95	
	1	02	03	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman (bulan)	72	25.000.000	24	19.387.500	12	14.630.000	3	2.767.500	25,00	18,92	27	22.155.000	37,50	88,62	
	1	02	03	01	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya dana untuk Rapat-rapat Koordinasi dan	72	180.000.000	24	124.083.652	12	42.825.000	3	32.590.000	25,00	76,10	27	156.673.652	37,50	87,04	
	1	02	03	01	01	20	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya dana untuk Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah (bulan)	72	135.000.000	24	75.985.000	12	28.075.000	3	14.670.000	25,00	52,25	27	90.655.000	37,50	67,15	
2	1	02	03	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kecukupan sarana dan prasarana aparatur (persentase)	100	2.120.000.000	33	319.770.750	16	159.162.500	3	25.710.800	18,75	16,15	36	345.481.550	36,00	16,30	Dinas Pangan
	1	02	03	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya 1 unit komputer dan printer (unit)	60	1.800.000.000	23	136.827.000	2	13.000.000	0	-	-	-	23	136.827.000	38,33	7,60	
	1	02	03	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan kantor (bulan)	72	150.000.000	24	63.955.000	12	36.000.000	3	5.435.000	25,00	15,10	27	69.390.000	37,50	46,26	
	1	02	03	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (bulan)	72	150.000.000	24	100.788.750	12	99.312.500	3	19.624.800	25,00	19,76	27	120.413.550	37,50	80,28	
	1	02	03	01	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan kantor (bulan)	72	20.000.000	24	18.200.000	12	10.850.000	3	651.000	25,00	6,00	27	18.851.000	37,50	94,26	
3	1	02	03	01	16	01	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)	Ketersediaan Energi	2400	1.980.000.000	3955	751.712.939	2400	501.386.324	0	58.273.000	-	11,62	3955	809.985.939	164,79	40,91	Dinas Pangan
								Protein (gram/kapita/hari)	63		77		63		0	-	-		77	-	122,22		
	1	02	03	01	16	01	Penanganan Daerah Rawan Pangan	Terlaksananya penanganan kasus pada daerah rawan pangan (kk)	60	300.000.000	11	56.158.920	10	42.240.120	0	1.525.000	-	3,61	11	57.683.920	18,33	19,23	

1	2						3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	k	Rp	K	Rp.	K	Rp.	
	1	02	03	01	16	14	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Jumlah kelompok desa mandiri pangan yang aktif (kelompok)	14	160.000.000	14	80.271.360	14	29.949.690	0	5.293.000	-	17,67	14	85.564.360	100,00	53,48	
	1	02	03	01	16	43	Penguatan Kelembagaan Cadangan Pangan Masyarakat	Jumlah kelompok lumbung pangan yang aktif (kelompok)	23	130.000.000	23	54.679.850	23	71.889.895	0	6.767.300	-	9,41	23	61.447.150	100,00	47,27	
	1	02	03	01	16	45	Pemantauan Produksi Pangan, Jaringan Distribusi, Pasokan Pangan dan HBKN	Tersedianya informasi produksi pangan, jaringan distribusi, pasokan pangan, dan HBKN di 15 kecamatan	15	80.000.000	15	45.334.790	15	59.586.761	0	4.217.000	-	7,08	15	49.551.790	100,00	61,94	
	1	02	03	01	16	46	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten	Tersedianya cadangan pangan pemerintah kabupaten pesisir selatan (ton)	100	250.000.000	46,5	84.791.480	6	98.189.419	0	7.670.100	-	7,81	46,5	92.461.580	46,50	36,98	
	1	02	03	01	16	52	Pengembangan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM)	Jumlah LDPM yang aktif (kelompok)	6	75.000.000	6	36.549.200	6	32.450.290	0	6.831.500	-	21,05	6	43.380.700	100,00	57,84	
	1	02	03	01	16	57	Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan	Terbentuknya kawasan mandiri pangan (nagari)	12	300.000.000	2	36.549.200	2	49.163.282	0	4.985.800	-	10,14	2	41.535.000	16,67	13,85	
	1	02	03	01	16	61	Penyusunan Data Base Ketahanan Pangan	Tersusunnya dokumen database ketahanan pangan	5	50.000.000	0	0	1	24.175.500	0	-	-	-	0	-	0,00	0,00	
	1	02	03	01	16	64	Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat/TTI	Terlaksananya pembinaan TTI yang sudah terbentuk (kelompok)	5	200.000.000	5	29.568.139	5	26.277.699	1	10.121.100	20,00	38,52	5	39.689.239	100,00	19,84	
	1	02	03	01	16	68	Analisis Ketersediaan Pangan Berdasarkan Analisa Neraca Bahan Makanan (NBM)	Jumlah dokumen analisis ketersediaan pangan (dokumen)	6	250.000.000	1	162.810.000	4	36.680.585	0	9.351.700	-	25,49	1	172.161.700	16,67	68,86	
	1	02	03	01	16	69	Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Tersedianya laporan kewaspadaan pangan (bulan)	72	185.000.000	24	165.000.000	27	30.783.083	3	1.510.500	11,11	4,91	27	166.510.500	37,50	90,01	
4.	1	02	03	01	17		Program Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Tingkat Konsumsi Energi (kkal/kapita/hari)	2150	2.900.000.000	2377	1.014.662.993	2377	1.248.134.393	0	69.499.500	-	5,57	2377	1.084.162.493	110,56	37,38	Dinas Pangan
								Protein (gram/kapita/hari)	57		63		63		-	-	-		63	-	110,53		
	1	02	03	01	17	05	Peningkatan dan Pengembangan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Jumlah pameran/promosi pangan yang diikuti (kali)	18	500.000.000	3	234.638.627	3	397.945.384	0	7.158.700	-	1,80	3	241.797.327	16,67	48,36	
	1	02	03	01	17	06	Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (Kelompok)	Jumlah KRPL yang dibina dan dokumen identifikasi Calon Lokasi KRPL	60	250.000.000	20	50.226.800	10	134.718.359	0	11.554.800	-	8,58	20	61.781.600	33,33	24,71	
	1	02	03	01	17	07	Peningkatan Penanganan Keamanan Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen (kali)	Jumlah sosialisasi keamanan pangan yang dilaksanakan	18	500.000.000	3	78.200.620	3	72.524.832	0	2.039.500	-	2,81	3	80.240.120	16,67	16,05	
	1	02	03	01	17	08	Penyusunan Pola Pangan Harapan (dokumen)	Tersedianya dokumen analisis pola pangan harapan	6	100.000.000	1	38.154.242	1	26.033.521	0	500.000	-	1,92	1	38.654.242	16,67	38,65	
	1	02	03	01	17	17	Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan (rumusan)	Jumlah rumusan yang dihasilkan dari Dewan Ketahanan Pangan	6	150.000.000	1	96.433.241	1	107.538.259	0	1.352.000	-	1,26	1	97.785.241	16,67	65,19	

[illegible]

1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	k	Rp	K	Rp.	K	Rp.	
1	1	02	01			Program pelayanan administrasi perkantoran	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	72	1.280.000.000	24	45.640.671	12	432.097.724	3	91.379.753	25,00	21,15	27	137.020.424	37,50	10,70	Dinas Lingkungan Hidup
	1	02	01	02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia (Bulan)	72	130.000.000	24	113.900.000	12	23.700.000	3	6.826.053	25,00	28,80	27	120.726.053	38	92,87	
	1	02	01	07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang tersedia(Bulan)	72	130.000.000	24	113.743.000	12	59.400.000	3	13.050.000	25,00	21,97	27	126.793.000	38	97,53	
	1	02	01	08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang tersedia (Bulan)	72	100.000.000	24	19.972.000	12	67.945.200	3	15.407.000	25,00	22,68	27	35.379.000	38	35,38	
	1	02	01	09		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja yang tersedia (Bulan)	72	10.000.000	24	55.056.680	12	5.050.000	3	1.210.000	25,00	23,96	27	56.266.680	38	562,67	
	1	02	01	10		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ketersediaan Alat Tulis Kantor	72	100.000.000	24	50.340.400	12	23.852.800	3	11.645.000	25,00	48,82	27	61.985.400	38	61,99	
	1	02	01	11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan Penggandaan yang tersedia (Bulan)	72	100.000.000	24	58.747.200	12	23.790.600	3	3.130.000	25,00	13,16	27	61.877.200	38	61,88	
	1	02	01	11		Penyusunan Rencana Strategis SKPD	Jumlah Dokumen Revisi Renstra Yang Dihasilkan	72	100.000.000	24	10.728.500	-	10.114.760	0	260.600	#DIV/0!	2,58	24	10.989.100	33	10,99	
	1	02	01	12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (Bulan)	72	100.000.000	24	15.745.300	12	6.481.292	3	246.000	25,00	3,80	27	15.991.300	38	15,99	
	1	02	01	15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Bulan)	72	100.000.000	24	45.522.500	12	10.400.000	3	1.080.000	25,00	10,38	27	46.602.500	38	46,60	
	1	02	01	17		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Ketersediaan Makanan dan Minuman	72	100.000.000	24	261.595.031	12	18.565.000	0	-	-	-	24	261.595.031	33	261,60	
	1	02	01	18		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Yang Dihasiri	72	135.000.000	24	93.025.000	12	109.920.000	3	16.490.600	25,00	15,00	27	109.515.600	38	81,12	
	1	02	01	20		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Dalam	72	120.000.000	24	90.312.950	12	35.000.000	3	10.250.000	25,00	29,29	27	100.562.950	38	83,80	
	1	02	01	22		Penunjang operasional perencanaan dan pelaporan	Jenis Laporan Yang Disampaikan	114	55.000.000	38	-	19	37.878.072	3	11.784.500	15,79	31,11	41	11.784.500	36	21,43	
2	1	02	02			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	pemenuhan layanan Sarana dan prasarana Aparatur (bln)	72	1.382.728.850	24	466.960.200	12	160.243.036	3	47.073.800	25,00	29,38	27	514.034.000	37,50	37,18	Dinas Lingkungan Hidup
	1	02	02	05		Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya layanan kendaraan dinas operasional	72	1.182.728.850	24	394.242.950	12	71.497.200	3	20.239.800	25,00	28,31	27	414.482.750	37,50	35,04	

1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	k	Rp	K	Rp.	K	Rp.	
	1	02	02	09		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya layanan Perlengkapan gedung kantor	72	100.000.000	24	72.717.250	12	27.302.656	3	26.412.000	25,00	96,74	27	99.129.250	37,50	99,13	
	1	02	02	42		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Luas Gedung Kantor Yang Direhab (m2)	820	100.000.000			820	61.443.180	0	422.000	-	0,69	-	422.000	0,00	0,42	
3	1	02	06			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya kualitas pelaporan Perangkat daerah (%)	100	80.000.000	80	53.524.450	85	19.369.900	0	1.577.400	-	8,14	80	55.101.850	80,00	68,88	
	1	02	06	01		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jenis Laporan Yang Disampaikan (doumen)	36	80.000.000	12		6	19.369.900	3	1.577.400	50,00	8,14	15	1.577.400	41,67	1,97	
4	1	02	05	15		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Meningkatkan Kualitas air, kualitas udara dan kualitas tanah di bawah baku mutu	100	450.000.000	70	136.371.900	80	66.314.672	5	6.770.000	6,25	10,21	75	143.141.900	75,00	31,81	Dinas PU dan Penataan Ruang
	1	02	05	23		Penyusunan Laporan Periodik Volume Sampah	Jumlah Kecamatan	90	150.000.000	15	84.519.050	15	66.314.672	7	6.770.000	46,67	10,21	22	91.289.050	24,44	60,86	
5	1	02	05	16		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Peningkatan Peluang Partisipasi dalam Pengelolaan Lingkungan	50%	4.082.666.380	25%	2.133.746.478	30%	957.596.210	0,00%	295.291.465	-	30,84	0,25	2.429.037.943	50,00	59,50	Dinas Lingkungan Hidup
	1	02	05	16	01	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Jumlah Lokasi Titik Pantau dan Frekwensi Pemantauan	78	500.000.000	26	334.086.400	13	279.169.350	1300%	154.222.413	100,00	55,24	39	488.308.813	50,00	97,66	
	1	02	05	16	04	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Jumlah laporan hasil pengawasan	6	250.000.000	2	118.491.576	1	109.074.120	0	25.075.120	-	22,99	2	143.566.696	33,33	57,43	
	1	02	05	16	22	Pembuatan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Lingkungan Hidup	Jumlah Buku Standar Pelayanan Minimal (SPM) LH	6	150.000.000	2	70.200.700	1	44.589.056	-	-	-	-	2	70.200.700	33,33	46,80	
	1	02	05	16	23	Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Peringatan Hari Lingkungan Hidup Yang Diaksanakan (Kali)	6	200.000.000	2	55.969.000	2	82.895.460	0	54.222.000	-	65,41	2	110.191.000	33,33	55,10	
	1	02	05	16	28	Penunjang Operasional Laboratorium	Jumlah Operasional Laboratorium Yang Tersedia (Bulan)	72	1.500.000.000	24	233.336.900	12	113.861.356	3	7.233.958	25,00	6,35	27	240.570.858	37,50	16,04	
	1	02	05	16	31	Koordinasi Gerakan Sumatera Barat Bersih (GSB)	Jumlah gerakan terpadu yang dikordinasikan	6	200.000.000	2	150.206.452	1	71.473.592	0	17.555.046	-	24,56	2	167.761.498	33,33	83,88	
						Pembinaan Pelaksanaan PROKLIM dan KALPATARU	Jumlah Calon Yang Masuk Seleksi Nasional	36	358.238.500			6	71.647.700	4,00	24.619.372	66,67	34,36	4	24.619.372	11,11	6,87	
						Sekolah Berbudaya dan Berwawasan Lingkungan (ADIWIYATA)	Jumlah Sekolah Adiwiyata yang dibina	125	924.427.880			25	184.885.576	-	12.363.556	-	6,69	0	12.363.556	0,00	1,34	
7	1	02	05	19		Program Peningkatan Kualitas dan akses Informasi SDA dan Lingkungan	Peningkatan Kualitas Dokumen Lingkungan	100%	4.455.400.000	25%	1.318.608.040	30%	973.554.382	6,94%	67.581.274	23,14	6,94	31,94%	1.386.189.314	31,94	31,11	Dinas Lingkungan Hidup

1	2						3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	k	Rp	K	Rp.	K	Rp.	
	1	02	05	19	07		Pembuatan Buku Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)	Jumlah Buku Laporan SLHD	6	300.000.000	2	240.811.791	1	112.597.526	-	4.011.400	-	3,56	2	244.823.191	33,33	81,61	
	1	02	05	19	14		Pembahasan Dokumen AMDAL dan UKL-UPL	Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup yang dibahas	150	2.000.000.000	60	209.331.150	30	106.853.436	12	16.138.174	40,00	15,10	72	225.469.324	48,00	11,27	
	1	02	05	19	17		Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah Pengaduan Masyarakat di bidang LH yang ditindak lanjuti (kasus)	40	250.000.000	8	216.313.700	8	177.075.240	3	26.368.100	37,50	14,89	11	242.681.800	27,50	97,07	
	1	02	05	19	37		Penyusunan RPPLH Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen RPPLH Yang Disusun	5	120.000.000	1	-	1	121.250.000	0	-	-	-	1	-	20,00	0,00	
							Penyusunan Dokumen KLHS	Dokumn KLHS yang dihasilkan	4	1.710.400.000			1	427.600.000	0	15.934.600	-	3,73	0	15.934.600	0,00	0,93	
	1	02	05	19	49		Inventarisasi Kegiatan yang belum memiliki izin lingkungan	Laporan hasil inventarisasi	5	75.000.000	1	38.725.200	1	28.178.180	-	5.129.000	-	18,20	1	43.854.200	20,00	58,47	
8	1	02	05	20			Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Pencapaian Kualitas air, kualitas udara dan kualitas tanah di bawah baku mutu	90	417.000.000	70	160.107.150	5	58.931.380	0	5.513.200	-	9,36	70,00	165.620.350	77,78	39,72	Dinas Lingkungan Hidup
	1	02	05	20	10		Pemantauan Kualitas Media Skala Kabupaten	Jumlah laporan hasil pemantauan	5	417.000.000			1	58.931.380	1	5.513.200	100,00	9,36	1	5.513.200	20,00	1,32	
VI							URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																
1	3	00	02	01	26		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase peningkatan pelayanan perkantoran	100	4.990.000	80	663.838	85	519.073	1	140.349	1,18	27,04	81	804.187	81,00	16,12	Disdukcapil
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya tagihan jaringan komunikasi, listrik dan PDAM	72	350.000	12	61.465,90	12	61.200	3	17.197	25,00	28,10	15	78.663	20,83	22,48	
							Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya honorium pengelola kegiatan	72	750.000	12	56.041,00	12	126.800	3	25.700	25,00	20,27	15	81.741	20,83	10,90	
							Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jenis peralatan dan bahan kebersihan yang tersedia	48	225.000	6	25.929,10	8	31.735,2	2	3.208	25,00	10,11	8	29.137	16,67	12,95	
							Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	60	125.000	10	19.999,50	20	4.500,0	7	1.060	35,00	23,56	17	21.060	28,33	16,85	
							Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	3000	220.000	400	32.742,00	571	31.800,0	571	2.083	100,00	6,55	971	34.825	32,37	15,83	
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan kantor	900	120.000	150	18.901,90	178	20.200,0	3	-	1,69	-	153	18.902	17,00	15,75	
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen penerangan gedung kantor	300	100.000	50	22.069,00	69	7.910,15	8	553	11,59	6,99	58	22.622	19,33	22,62	
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang baru	80	750.000	24	172.714,68	9	55.950,0	2	6.900	22,22	12,33	26	179.615	32,50	23,95	
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah bahan bacaan surat kabar/majalah yang tersedia	18	75.000	3	8.870,00	3	8.900,0	3	750	100,00	8,43	6	9.620	33,33	12,83	

1	2						3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	k	Rp	K	Rp.	K	Rp.	
							Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman rapat	60	125.000	10	13.100,00	12	9.130,0	3	2.837	25,00	31,07	13	15.937	21,67	12,75	
							Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah rapat - rapat koordinasi keluar daerah yang diikuti	190	1.250.000	32	172.180,40	24	102.950,0	4	61.569	16,67	59,80	36	233.749	18,95	18,70	
							Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah rapat - rapat koordinasi dalam daerah yang diikuti	480	900.000	80	59.825,00	70	57.997,5	20	18.492	28,57	31,88	100	78.317	20,83	8,70	
2	3	00	02	01	26		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor Yang Kondusif	95	1.323.000	9	208.733,18	9	90.812	3	8.953	33,33	9,86	12	217.686	12,63	16,45	Disdukcapil
							Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah perbaikan gedung kantor yang dilaksanakan	10	500.000	2	83.075,95	2	25.235,0	-	-	-	-	2	83.076	20,00	16,62	
							Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	85	823.000	7	125.657,23	7	65.577,0	3	8.953	42,86	13,65	10	134.610	11,76	16,36	
3	3	00	02	01	26		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang disusun	40	280.000	-	-	10	66.091,7	5	5.960	50,00	9,02	5	5.960	12,50	2,13	Disdukcapil
							Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang diterbitkan	40	280.000	-	-	10	66.091,7	5	5.960	50,00	9,02	5	5.960	12,50	2,13	
4	3	00	02	01	21		Penataan Administrasi Kependudukan	Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kependudukan	A	20.939.500	C	3.085.750	B	6.746.243		269.306		3,99		3.355.056	40,29	16,02	Disdukcapil
	3	00	02	01	21	51	Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu	Jumlah data yang dikonsolidasikan	180.000	1.500.000	120.000	343.143,5	123.000	257.284,7	41.000	14.579	33,33	5,67	161.000	357.722	89,44	23,85	
	3	00	02	01	21	42	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan	Jumlah Data Anomali Yang Diperbaiki	105.124	500.000	74.535	120.659,0	102.200	72.259,0	25.550	7.510	25,00	10,39	100.085	128.169	95,21	25,63	
								Jumlah Data Ganda Yang Dihapus	61.363		39.183		58.363		14.591	-	25,00		53.774	-	87,63		
	3	00	02	01	21	13	Penyediaan Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat	Jumlah baliho dan spanduk kependudukan yang	120	650.000	22	123.146,5	24	67.165,8	2	4.836	8,33	7,20	24	127.983	20,00	19,69	
							Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Jumlah pengurusan kutipan akta kelahiran 0-18 Thn	165.648	600.000	158.250	188.191,1	146.820	147.598,9	5.492	22.861	3,74	15,49	163.742	211.052	98,85	35,18	
							Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil	Jumlah SDM Pelayanan yang terampil	31	175.000	-	844,1	15	32.095,96	-	-	-	-	-	844	0,00	0,48	
							Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah tindakan razia/penerbitan yang dilakukan	14	422.500	-	84.430,2	2	70.811,3	-	1.491	-	2,11	-	85.921	0,00	20,34	
							Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jumlah pengurusan Kartu Identitas Anak (KIA)	19.667	230.000	1024	20.559,0	5.300	52.150,75	3.595	8.650	67,83	16,59	4.619	29.209	23,49	12,70	
							Pelayanan Dokumen Kependudukan	Jumlah pengurusan Kartu Keluarga	142.026	505.000	62.979	130.170,8	139.953	101.274,5	15.129	14.372	10,81	14,19	78.108	144.543	55,00	28,62	

1	2						3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	k	Rp	K	Rp.	K	Rp.	
								Jumlah Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk	17.500		11.471		11.750		2.877	-	24,49		14.348	-	81,99		
							Penerbitan NIK Nasional dan Penerapan e_KTP	Jumlah perekaman KTP bagi Wajib KTP	324.436	1.500.000	305.045	528.586,7	324.026	138.576,2	3.546	22.332	1,09	16,12	308.591	550.919	95,12	36,73	
							Pelaksanaan Pelayanan Unit Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Keliling (UP3SK)	Jumlah titik kunjungan pelayanan mobil keliling	300	1.750.000	50	296.856,95	50	168.925,0	15	57.235	30,00	33,88	65	354.092	21,67	20,23	
							Pengesahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian	Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan	1.500	300.000	-	-	800	35.790,2	199	3.016	24,88	8,43	199	3.016	13,27	1,01	
							Pendataan dan Pelaporan Perkawinan Cerai	Jumlah laporan perkawinan dan perceraian yang diterbitkan	48	300.000	-	-	12	26.568,5	2	2.686	16,67	10,11	2	2.686	4,17	0,90	
							Pembangunan dan Pengelolaan Sistem Data Warehouse	Jumlah registrasi pelayanan online	2.500	350.000	-	-	1.000	89.849,7	-	5.000	-	5,56	-	5.000	0,00	1,43	
							Pengelolaan Arsip Administrasi Kependudukan Berbasis Digital	Jumlah arsip Akta Kelahiran yang diarsipkan secara digital	145.000	357.000	-	-	100.000	71.520,1	18.039	4.527	18,04	6,33	18.039	4.527	12,44	1,27	
							Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu (DAK Non Fisik)	Jumlah blanko dokumen kependudukan yang diadakan	10.777.500	6.500.000	215.500	1.249.161,90	215.500	1.353.364,0	-	14.738	-	1,09	215.500	1.263.900	2,00	19,44	
							Pelayanan Administrasi Kependudukan di Satker	Jumlah UKL yang dibentuk	60	5.300.000	-	-	15	4.061.008,3	15	85.475	100,00	2,10	15	85.475	25,00	1,61	
VII							URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																
1	1	02	07	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	pemenuhan layanan administrasi perkantoran (bln)	72	3.163.267.560	24	1.038.562.276	12	865.423.668	3	150.657.052	25,00	17,41	27	1.189.219.328	37,50	37,59	DPMDPPKB
	1	02	07	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	telpon, air, listrik (12 Bulan)	72	213.000.000	24	69.698.004	12	38.280.000	3	8.522.202	25,00	22,26	27	78.220.206	37,50	36,72	
	1	02	07	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Roda 4 sebanyak 6 Unit Roda 2 sebanyak 70 Unit	36 420	1.784.588.860	12 140	664.811.922	12	265.419.210	2	110.784.850	16,67	41,74	14	775.596.772	38,89	43,46	
	1	02	07	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	Honor penunjang kelancaran administrasi perkantoran (12 Bulan)	72	480.000.000	24	105.100.000	12	101.100.000	0	-	-	-	24	105.100.000	33,33	21,90	
	1	02	07	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan Kantor	biaya kebersihan Kantor	72	625.678.700	24	179.652.350	12	121.717.400	3	29.250.000	25,00	24,03	27	208.902.350	37,50	33,39	
	1	02	07	01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Perbaikan Genset Perbaikan Laptop Perbaikan AC, Sound System dan Mesin Tik	6 90 54	60.000.000	2 30 18	19.300.000	1 15 9	9.950.000	0 8 2	2.100.000	- 53,33 22,22	21,11	2 38 20	21.400.000	33,33 42,22 37,04	35,67	

1	2						3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12					
	K	Rp.							K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		k	Rp.	K	Rp.			K	Rp.			
	1	02	07	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	ATK Kantor	72	210.000.000		24	51.226.494		12	48.621.019		3	11.280.075		25,00	23,20	27	62.506.569		37,50	29,77	
	1	02	07	01	01	11	Penyediaan Barang cetak dan pengadaan	Cetak dan pengadaan	72	180.000.000		24	56.615.200		12	41.343.954		3	15.107.783		25,00	36,54	27	71.722.983		37,50	39,85	
	1	02	07	01	01	12	Penyediaan kompponen intalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor	alat alat elektronik kantor	72	111.630.000		24	21.850.500		12	8.152.085		3	3.000.000		25,00	36,80	27	24.850.500		37,50	22,26	
	1	02	07	01	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	alat perlengkapan kantor	48	300.000.000		16	95.050.000		8	28.700.000		0	-		-	-	16	95.050.000		33,33	31,68	
								lemari arsip	30			5			5			0			-		5					
	1	02	07	01	01	15	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Koran 2 terbitan	72	18.000.000		24	5.360.000		12	4.140.000		0	-		-	-	24	5.360.000		33,33	29,78	
	1	02	07	01	01	17	Penyediaan makan dan minunm	makan minum tamu	72	120.000.000		24	52.540.000		12	25.900.000		3	3.850.000		25,00	14,86	27	56.390.000	37,50	46,99		
								makan minum rapat																				
	1	02	07	01	01	18	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Rapat Koordinasi dalam propinsi	72	913.950.000		24	323.125.825		12	114.200.000		3	21.088.000		25,00	18,47	27	344.213.825	37,50	37,66		
								Rapat Kooerdinasi Luar Propinsi																				
	1	02	07	01	01	20	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi Dalam daerah	Rapat koordinasi dalam daerah	72	332.100.000		24	77.460.000		12	57.900.000		3	9.300.000		25,00	16,06	27	86.760.000		37,50	26,12	
2	1	02	07	01	02		Program Peningkatan Sara dan Prasarana Aparatur	Pemenuhan layanan sarpras bagi aparatur (bln)	72	1.000.000.000		24	38.300.000		12	34.525.000		3	1.500.000		25,00	4,34	27	39.800.000		37,50	3,98	DPMDPPKB
	1	02	07	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung dan kantor	ganti pintu mushola	1	1.000.000.000		0	38.300.000		1	34.525.000		1	1.500.000		100,00	4,34	1	39.800.000		100,00	3,98	
								Ganti Pagar	2	0		2	0		0	-		-	0	-		0,00						
								Cor Halaman Kantor	1	0		1	0		0	-		-	0	-		0,00						
3	1	02	07	01	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan		740	1.570.294.000		4	272.600.404		184	366.564.859		0	13.577.110		-	3,70	4	286.177.514		66,67	47,91	DPMDPPKB
	1	02	07	01	15	04	Pencanangan dan Penilaian Bulan Bhakti Gotong royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kabupaten	1 kali pencanangan BBGRM TK. Kab. Pessel	6	445.294.000		2	95.024.299		1	200.000.000		0	80.200		-	0,04	2	95.104.499		33,33	21,36	
	1	02	07	01	15	05	Pemutakhiran Data Profil dan Data IDM Nagari	182 data IDM	728	345.000.000		0	-		182	72.803.055		0	12.704.810		-	17,45	0	12.704.810		0,00	3,68	
	1	02	07	01	15	12	Pembinaan Nagari Berprestasi Tingkat Kabupaten	Nagari Berprestasi	6	780.000.000		2	177.576.105		1	93.761.804		0	792.100		-	0,84	2	178.368.205		33,33	22,87	
4	1	02	07	01	16		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan/ Nagari	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang aktif	52,5	818.882.800		40	81.421.392		1,5	163.776.560		0	20.207.072		-	12,34	40	101.628.464		76,19	12,41	DPMDPPKB
	1	02	07	01	16	02	Pembinaan dan Pelatihan Bumrag dan Lembaga Ekonomi Masyarakat Nagari	Rakor Bumrag	60	818.882.800		1	81.421.392		12	163.776.560		0	20.207.072		-	12,34	1	101.628.464		1,67	12,41	
5	1	02	07	01	17		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa/Nagari	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Nagari (%)	50	800.000.000		30	120.000.000		5	234.014.830		1	852.000		20,00	0,36	31	120.852.000		62,00	15,11	DPMDPPKB

1	2						3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	k	Rp	K	Rp.	K	Rp.	
	1	02	07	01	17	02	Pendampingan Pelaksanaan TMND	TMMN/TMMD	4	800.000.000	1	120.000.000	1	234.014.830	0	852.000	-	0,36	1	120.852.000	25,00	15,11	
6	1	02	07	01	25		Program Pemberdayaan Lembaga Pemerintahan Desa/ Nagari	Persentase nagari yang dibina (%)	100	4.443.226.668	60	212.987.662	12	1.043.000.678	4,5	83.203.350	37,50	7,98	64,5	296.191.012	64,50	6,67	DPMDPPKB
	1	02	07	01	25	03	Facilitasi Pemekaran, Penilaian Barnus Nagari dan Wali Nagari	Pemilihan 105 Nagari	182	3.000.000.000	40	84.435.815	105	815.298.700	0	56.429.300	-	6,92	40	140.865.115	21,98	4,70	
	1	02	07	01	25	04	Pembinaan dan Monitoring Pemerintahan Nagari	monev 90 Keuangan Nagari	182	658.577.400	54	128.551.847	90	151.979.000	12	23.457.050	13,33	15,43	66	152.008.897	36,26	23,08	
	1	02	07	01	25	13	Penyusunan Ranperda dan peraturan Bupati Pesisir Selatan Tentang Pemerintahan Nagari	4 Perbub	4	244.649.268	2	-	1	40.774.878	0	-	-	-	2	-	50,00	0,00	
	1	02	07	01	25	14	Penyelesaian Konflik Pemerintahan Nagari	Jumlah konflik yang ditangani	100	540.000.000	24	-	12	34.948.100	2	3.317.000	16,67	9,49	26	3.317.000	26,00	0,61	
7	1	02	07	01	26		Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat/ Nagari	persentase LPM yang aktif membina kelompok	70,43	5.385.962.000	63	1.297.021.003	7	1.320.564.762	2	79.216.850	28,57	6,00	65	1.376.237.853	92,29	25,55	DPMDPPKB
	1	02	07	01	26	08	Pembinaan Administrasi Program Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari (P3MD)	Rakor P3MD 4 Kali	36	1.000.000.000	8	161.131.599	4	65.297.631	1	8.883.900	25,00	13,61	9	170.015.499	25,00	17,00	
	1	02	07	01	26	10	Pemberdayaan Kelembagaan Tim Penggerak PKK Kabupaten	Orientasi PKK Jambore PKK HKG PKK Lomba Dasa wisma Lomba Posyandu	36 36 36 36 36	4.085.962.000	12 12 12 12 12	1.073.930.254	6 6 6 6 6	1.199.999.866	1 1 1 1 0	66.895.450 - - - -	16,67 16,67 16,67 -	5,57	13 13 13 12	1.140.825.704 - - - -	36,11 36,11 36,11 33,33	27,92	
	1	02	07	01	26	08	Pemberdayaan Keberlanjutan Badan Pengelola Sarana Prasarana Air Minum dan Sanitasi Nagari (BP-SPAMS)	Monev 105 BP-SPAMS	142	300.000.000	77	61.959.150	12	55.267.265	5	3.437.500	41,67	6,22	82	65.396.650	57,75	21,80	
8	1	02	07	01	27		Program Pengembangan Kawasan Perdesaan	persentase kawasan pedesaan yang dikembangkan (%)	40	349.225.800	20	82.513.548	5	110.098.048	0	25.192.800	-	22,88	20	107.706.348	50,00	30,84	DPMDPPKB
	1	02	07	01	27	04	Pembinaan Potensi Kawasan Perdesaan /Nagari	Monev 3 Kawasan	5	349.225.800	3	82.513.548	3	110.098.048	1	25.192.800	33,33	22,88	4	107.706.348	80,00	30,84	
								Pembentukan 1 kawasan	5		3		1		0	-	-		3	-	60,00		
VIII							URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																
1	1	02	08	01	27		Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Keluarga Berencana	Persentase klinik yang terpenuhi sarprasnya	80	29.954.808.546	72	4.156.039.874	2	5.946.936.291	0	128.709.132	-	2,16	72	4.284.749.006	90,00	14,30	DPMDPPKB
	1	02	07	01	27	01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Keluarga Berencana (DAK Fisik KB)	Pengadaan Komputer LCD Proyektor Lemari penyimpanan alokon	2 15 26	7.479.580.800	0 0 0	2.656.363.524	2 15 26	1.461.000.000	0 0 0	- - -	- - -	0 0 0	2.656.363.524 - -	0,00 0,00 0,00	35,51		
	1	02	07	01	27	02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Keluarga Berencana (Penunjang DAK Fisik KB)	Honor Penagadaaan Barang Jasa Honor Penerima Barang dan Jasa	8 5	273.277.746	0 0		8 5	45.546.291	0 0	- -	- -	0 0	- -	0,00 0,00	0,00		
	1	02	07	01	27	03	Operasional Balai Penyuluh Keluarga Berencana (DAK Non Fisik KB)	beroperasinya balai penyuluh (bin)	72	22.201.950.000	24	1.499.676.350	12	4.440.390.000	3	128.709.132	25,00	2,90	27	1.628.385.482	37,50	7,33	

1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	k	Rp	K	Rp.	K	Rp.	
2	1	02	07	01	29	Program Penguatan Kelembagaan	persentase kelembagaan KB yang telah ada (%)	10	150.483.974	5	-	5	234.161.150	0	-	-	-	5	-	50,00	0,00	DPMDPPKB
	1	02	07	01	29	Membangun jaringan Kemitraan dengan institusi peduli kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga	Pemilihan KB Lestari	6	150.483.974	2	-	1	234.161.150	0	-	-	-	2	-	33,33	0,00	
							Pemilihan Keluarga Harmonis	6		2		1		0	-	-		2	-	33,33		
							Jambore Saka Kencana	6		2		1		0	-	-		2	-	33,33		
							Perbaikan alat alat kerja kantor	6		2		1		0	-	-		2	-	33,33		
3	1	02	07	01	31	Program Pelayanan Keluarga Berencana	Persentase KB Wanita	80	1.881.075.000	60	555.510.000	8	203.325.473	2	44.676.423	25,00	21,97	62	600.186.423	77,50	31,91	DPMDPPKB
	1	02	07	01	31	Bhakti KB Kes IBI/IDI/TNI/Bahangkara/PKK dan Jambore	IUD	600	1.881.075.000	367	555.510.000	100	203.325.473	89	44.676.423	89,00	21,97	456	600.186.423	76,00	31,91	DPMDPPKB
							MOW	300		177		50		0	-	-		177	-	59,00		
							MOP	600		290		100		0	-	-		290	-	48,33		
							Pencan Bhakti IBI KB	6		2		1		0	-	-		2	-	33,33		
							Pencan Bhakti TNI KB Kes	6		2		1		0	-	-		2	-	33,33		
							Pencan Bhakti PKK KB Kes	6		2		1		0	-	-		2	-	33,33		
IX						URUSAN PERHUBUNGAN																
1	1	02	01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	72	7.806.354.500	24	1.906.560.189	12	736.373.855	3	102.846.107	25,00	13,97	27	2.009.406.296	37,50	25,74	Dinas Perhubungan
	1	02	01	02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Lamanya penggunaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	72	458.693.000	24	125.548.679	12	80.400.000	3	7.630.299	25,00	9,49	27	133.178.978	37,50	29,03	
	1	02	01	03		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	72	1.307.900.000	24	463.960.000	12	44.822.025	3	-	25,00	-	27	463.960.000	37,50	35,47	
	1	02	01	07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Lamanya penggunaan jasa administrasi keuangan	72	390.400.000	24	125.137.000	12	119.100.000	3	18.600.000	25,00	15,62	27	143.737.000	37,50	36,82	
	1	02	01	08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah penggunaan jasa kebersihan kantor	72	276.581.000	24	65.014.000	12	17.712.500	3	2.708.000	25,00	15,29	27	67.722.000	37,50	24,49	
	1	02	01	09		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Lamanya pemakaian jasa perbaikan peralatan kerja	72	1.307.900.000	24	30.970.500	12	21.880.000	3	-	25,00	-	27	30.970.500	37,50	2,37	
	1	02	01	10		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Lamanya penggunaan alat tulis kantor	72	249.965.100	24	77.185.030	12	34.097.870	3	3.724.500	25,00	10,92	27	80.909.530	37,50	32,37	
	1	02	01	11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Lamanya penggunaan barang cetakan dan penggandaan	72	515.573.400	24	142.130.320	12	30.550.600	3	2.780.000	25,00	9,10	27	144.910.320	37,50	28,11	
	1	02	01	12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Lamanya penggunaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	72	63.682.000	24	17.707.000	12	17.079.910	3	692.238	25,00	4,05	27	18.399.238	37,50	28,89	
	1	02	01	15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	72	122.400.000	24	35.800.000	12	14.500.000	3	720.000	25,00	4,97	27	36.520.000	37,50	29,84	

1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	k	Rp	K	Rp.	K	Rp.	
	1	02	01	17		Penyediaan makanan dan minuman	Lamanya penyediaan makanan dan minuman	72	202.150.000	24	45.797.500	12	49.850.000	3	4.930.200	25,00	9,89	27	50.727.700	37,50	25,09	
	1	02	01	18		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Lamanya rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	72	1.419.650.000	24	344.217.400	12	115.350.000	3	38.328.200	25,00	33,23	27	382.545.600	37,50	26,95	
	1	02	01	20		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Lamanya rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	72	1.062.200.000	24	316.250.000	12	63.900.000	3	9.500.000	25,00	14,87	27	325.750.000	37,50	30,67	
	1	02	01	22		Penunjang operasional perencanaan dan pelaporan	Jumlah penunjang operasional perencanaan dan pelaporan	72	351.260.000	24	90.842.760	12	114.130.950	3	11.232.670	25,00	9,84	27	102.075.430	37,50	29,06	
	1	02	01	27		Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS	Jumlah jasa tenaga kerja non PNS	72	78.000.000	24	26.000.000	12	13.000.000	3	2.000.000	25,00	15,38	27	28.000.000	37,50	35,90	
2	1	02	02			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100	2.954.809.000	40	1.139.091.550	20	493.262.539	5	62.195.962	25,00	12,61	45	1.201.287.512	45,00	40,66	Dinas Perhubungan
	1	02	02	05		Pengadaan meubiler	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/ operasional	4	800.000.000	-	532.871.100	1	56.357.539	0	-	-	-	0	532.871.100	0,00	67	
	1	02	02	22		pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	72	508.500.000	24	167.250.000	12	83.600.000	3	4.000.000	25,00	4,78	27	171.250.000	37,50	34	
	1	02	02	24		pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Lamanya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	72	1.646.309.000	24	438.970.450	12	353.305.000	3	58.195.962	25,00	16,47	27	497.166.412	37,50	30	
3	1	02	06			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	tingkat pelayanan pelaporan (bulan)	72	507.707.790	24	165.442.416	12	131.239.036	3	6.732.760	25,00	5,13	27	172.175.176	37,50	33,91	Dinas Perhubungan
	1	02	06	07		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	Jumlah Monitoring dan Evaluasi kegiatan	72	507.707.790	24	165.442.416	12	131.239.036	3	6.732.760	25,00	5,13	27	172.175.176	37,50	33,91	
4	1	02	09	15		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	17	27.450.321.877	2	3.006.530.877	3	4.443.791.000	-	62.551.400	-	1,41	2,00	3.069.082.277	11,76	11,18	Dinas Perhubungan
	1	02	09	15	40	Pembangunan Fasilitas Transportasi (DAK)	Jumlah pembangunan fasilitas transportasi	17	27.450.321.877	2	3.006.530.877	3	4.443.791.000	0	62.551.400	-	1,41	2,00	3.069.082.277	11,76	11,18	
5	1	02	09	15		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas LLAJ	Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	25	2.140.156.690	7	461.730.650	2	89.241.070	0,00	1.309.560	-	1,47	7,00	463.040.210	28,00	21,64	Dinas Perhubungan
	1	02	09	16	13	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat Keselamatan Lalu Lintas	Jumlah alat keselamatan lalu lintas yang terpelihara	18	1.110.197.260	4	197.920.910	1	36.401.350	0	-	-	-	4,00	197.920.910	22,22	17,83	
	1	02	09	16	14	Rehabilitas Sarana dan Prasarana Fasilitas Pos Retribusi (TPR)	Jumlah pos retribusi (TPR) yang dipelihara	7	1.029.959.430	3	263.809.740	1	52.839.720	-	1.309.560	-	2,48	3,00	265.119.300	42,86	25,74	
6	1	02	09	17		Program peningkatan pelayanan angkutan	Persentase peningkatan pelayanan angkutan	100	6.152.269.160	70,00	1.430.348.550	10	307.623.630	4	92.036.020	40,00	29,92	74,00	1.522.384.570	74,00	24,75	Dinas Perhubungan
	1	02	09	17	18	Pengawasan dan Pengendalian LLAJ	Lamanya Pengawasan dan Pengendalian LLAJ	72	1.579.879.500	24	342.663.720	12	96.800.000	3	17.400.000	25,00	17,98	27,00	360.063.720	37,50	22,79	

1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	k	Rp	K	Rp.	K	Rp.	
	1	02	09	17	24	Operasional pengamanan lalu lintas angkutan laut	Lamanya Operasional Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Laut	72	1.220.761.500	24	254.183.850	12	6.449.500	3	18.318.900	25,00	284,04	27,00	272.502.750	37,50	22,32	
	1	02	09	17	25	Pembinaan dan penertiban lalu lintas angkutan laut	Lamanya Pembinaan dan Penertiban Lalu Lintas Angkutan Laut	72	712.792.120	24	212.117.990	12	48.035.150	3	5.802.750	25,00	12,08	27,00	217.920.740	37,50	30,57	
	1	02	09	17	27	Pelajar Pelopor Keselamatan Berlalu lintas	Jumlah Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas	5	345.000.000	1	32.690.500	1	25.815.500	0	10.943.000	-	42,39	1,00	43.633.500	20,00	12,65	
	1	02	09	17	28	Pemilihan Sopir Teladan (Abiyasa)	Jumlah Pemilihan Sopir Teladan (Abiyasa)	5	225.000.000	1	29.034.500	1	16.684.500	0	-	-	-	1,00	29.034.500	20,00	12,90	
	1	02	09	17	30	Operasional Transportasi Pelayanan Pendidikan	Lamanya Operasional Transportasi Pelayanan pendidikan	72	2.068.836.040	24	559.657.990	12	113.838.980	3	39.571.370	25,00	34,76	27,00	599.229.360	37,50	28,96	
	1	02	09	18		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah sarana dan prasarana perhubungan	1	300.000.000	-	-	1	36.275.999	0	-	-	-	0,00	-	0,00	-	
	1	02	09	18	14	Pembangunan Pagar,Taman Kantor dan Papan Nama (Merk Dinas)	Jumlah pembangunan pagar, taman kantor dan papan (merk dinas)	1	300.000.000	-	-	1	36.275.999	0	-	-	-	0,00	-	0,00	-	
	1	02	09	19	04	Pembangunan Penerangan jalan Umum	Jumlah pembangunan penerangan jalan umum	231	28.440.000.000	-	-	31	4.440.000.000	6,45	27.050.470	20,81	0,61	6,45	27.050.470	2,79	0,10	
	1	02	09	19	05	Pemeliharaan rutin/berkala Penerangan Jalan Umum	Lamanya Pemeliharaan rutin/berkala Penerangan Jalan umum	48	13.200.000.000	-	-	12	3.999.990.300	3	946.236.400	25,00	23,66	3,00	946.236.400	6,25	7,17	
7	1	02	09	20		Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Jumlah Kendaraan yang layak jalan	87.000	5.977.646.190	72.000	733.419.920	10.000	3.628.876.440	2000	203.415.170	20,00	5,61	74000,00	936.835.090	85,06	15,67	Dinas Perhubungan
	1	02	09	20	04	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	Lamanya pelayanan pengujian kendaraan bermotor	72	2.572.033.840	24	733.419.920	12	223.264.090	3	181.189.170	25,00	81,15	27,00	914.609.090	37,50	35,56	
	1	02	09	20	05	Pengadaan Alat Uji Mekanis PKB	Jumlah Pengadaan alat uji mekanis PKB	1	3.405.612.350	-	-	1	3.405.612.350	0	22.226.000	-	0,65	0,00	22.226.000	0,00	0,65	
8	1	02	09	23		Program Peningkatan Pelayanan Terminal dan Perparkiran	Persentase Peningkatan Pelayanan Terminal dan Perparkiran	72	1.638.034.700	24	424.069.190	12	85.737.500	3	20.007.010	25,00	23,34	27,00	444.076.200	37,50	27,11	Dinas Perhubungan
	1	02	09	23	01	Pelayanan Terminal dan Perparkiran	Lamanya Pelayanan Terminal dan Perparkiran	72	1.638.034.700	24	424.069.190	12	85.737.500	3	20.007.010	25,00	23,34	27,00	444.076.200	37,50	27,11	
9	3	01	03	15		Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	72	2.100.753.040	24	497.724.839	12	227.350.100	3	64.694.360	25,00	28,46	27,00	562.419.199	37,50	26,77	Dinas Perhubungan
	3	01	03	15	24	Pelayanan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah	Lamanya Pelayanan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah	72	2.100.753.040	24	497.724.839	12	227.350.100	3	64.694.360	25,00	28,46	27,00	562.419.199	37,50	26,77	
X						URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																
1	1	02	10	01	20	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	cakupan pelayanan Adminstrasi perkantoran (bln)	60	3.832.662.000	12	486.637.000	12	594.316.000	3	139.920.000	25,00	23,54	15	626.557.000	25,00	16,35	Dinas Kominfo

1	2						3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	k	Rp	K	Rp.	K	Rp.	
	1	02	10	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kebutuhan air, listrik dan jasa komunikasi	60	678.620.000	12	39.952.000	12	73.200.000	3	7.472.000	25,00	10,21	15	47.424.000	25,00	6,99	
	1	02	1	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kebutuhan Jasa administrasi keuangan (%)	60	342.975.000	12	46.350.000	12	73.350.000	3	7.565.000	25,00	10,31	15	53.915.000	25,00	15,72	
	1	02	10	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kebutuhan jasa kebersihan kantor (%)	60	206.404.000	12	30.035.000	12	41.603.000	3	9.718.000	25,00	23,36	15	39.753.000	25,00	19,26	
	1	02	10	01	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Peralatan kerja yang terkondisi dengan baik (%)	60	198.889.000	12	5.892.000	12	42.000.000	3	800.000	25,00	1,90	15	6.692.000	25,00	3,36	
	1	02	10	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kebutuhan Alat Tulis Kantor (%)	60	247.636.000	12	37.172.000	12	29.963.000	3	20.848.000	25,00	69,58	15	58.020.000	25,00	23,43	
	1	02	10	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetak dan penggandaan untuk kantor (%)	60	520.431.000	12	37.814.000	12	32.617.000	3	5.650.000	25,00	17,32	15	43.464.000	25,00	8,35	
	1	02	10	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Komponen penerangan bangunan kantor (%)	60	98.457.000	12	7.498.000	12	15.938.000	3	-	25,00	-	15	7.498.000	25,00	7,62	
	1	02	10	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan (surat kabar) media informasi (3 media)	60	132.650.000	12	13.785.000	12	21.400.000	3	505.000	25,00	2,36	15	14.290.000	25,00	10,77	
	1	02	10	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan minum rapat dan tamu	60	189.950.000	12	21.630.000	12	22.500.000	3	5.676.000	25,00	25,23	15	27.306.000	25,00	14,38	
	1	02	10	01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi luar daerah (%)	60	866.650.000	12	144.977.000	12	182.950.000	3	65.711.000	25,00	35,92	15	210.688.000	25,00	24,31	
	1	02	10	01	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dalam daerah (%)	60	200.000.000	12	62.450.000	12	37.800.000	3	14.475.000	25,00	38,29	15	76.925.000	25,00	38,46	
	1	02	10	01	01	22	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	Jumlah Penyusunan laporan perencanaan (dokumen)	30	150.000.000	6	39.082.000	6	20.995.000	0	1.500.000	-	7,14	6	40.582.000	20,00	27,05	
2	1	02	10	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	jumlah bulan layanan sarpras kantor bagi aparatur	60	640.000.000	12	597.468.000	12	455.270.000	3	13.963.000	25,00	3,07	15	611.431.000	25,00	95,54	Dinas Kominfo
	1	02	10	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan rutin berkala gedung dan halaman kantor (%)	100%	290.000.000	20%	62.050.000	60%	200.000.000	0	-	-	-	0,2	62.050.000	20,00	21,40	
	1	02	10	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas	100%	80.000.000	20%	44.069.000	50%	65.950.000	21%	13.963.000	42,34	21,17	41%	58.032.000	41,17	72,54	
	1	02	10	01	02	82	Pengadaan Kendaraan Roda 2	Jumlah Kendaraan Roda 2	15	90.000.000	2	42.220.000	3	66.670.000	0	-	-	-	2	42.220.000	13,33	46,91	
	1	02	10	01	02	84	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor	100%	180.000.000	20%	449.129.000	40%	122.650.000	0	-	-	-	20%	449.129.000	20,00	249,52	
4	1	02	10	01	18		Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Jumlah informasi pemerintah daerah yang dipublikasi dan evaluasi (Dokumen)	20	1.976.660.000	5	351.528.000	7	332.332.000	0	18.470.000	-	5,56	5	369.998.000	25,00	18,72	Dinas Kominfo

1	2						3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	k	Rp	K	Rp.	K	Rp.	
	1	02	10	01	18	05	Pengumpulan dan Penyebaran Informasi Daerah melalui Website	Penyebaran informasi kebijakan pemerintah daerah (berita dan artikel)	10.140	625.070.000	2.028	81.208.000	2028	125.014.000	0	17.470.000	-	13,97	2028	98.678.000	20,00	15,79	
	1	02	10	01	18	07	Publikasi dan Promosi Daerah	Terpublikasi dan terpromosinya daerah (TV dan media online)	40	1.351.590.000	8	270.320.000	8	207.318.000	0	1.000.000	-	0,48	8	271.320.000	20,00	20,07	
5	1	02	10	01	19		Program Peningkatan Akses Informasi dan Komunikasi	Persentase akses informasi	100	644.835.000	60	495.389.620	10	449.582.000	0	9.448.000	-	2,10	60	504.837.620	60,00	78,29	Dinas Kominfo
	1	02	10	01	19	14	Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	Tersedianya Kelompok Informasi Masyarakat	75	112.357.000	1	57.221.000	15	112.357.000	0	1.100.000	-	0,98	1	58.321.000	1,33	51,91	
	1	02	10	01	19		Operasional Penerangan Keliling, Pameran dan Posko Informasi	Operasional Penyebaran informasi Pemda melalui Mopen dan Pameran (%)	100%	63.519.000	20%	67.052.000	20%	63.519.000	0	1.026.000	-	1,62	0,2	68.078.000	20,00	107,18	
	1	02	10	01	19	19	Operasional LPPL Radio Langkisau FM	Penyebaran informasi Pemda melalui radio Langkisau FM (%)	100%	273.706.000	20%	371.022.000	20%	273.706.000	0	7.322.000	-	2,68	0,2	378.344.000	20,00	138,23	
	1	02	10	01	19	19	Operasional Pelayanan Informasi Publik	Sumber Daya Manusia yang mampu melayani masyarakat dalam pelayanan informasi publik (orang)	1350	195.253.000	272	94.620	272	195.253.000	0	8.439.000	-	4,32	272	8.533.620	20,15	4,37	
6	1	02	10	01	15		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Jumlah SDM ASN yang memiliki kemampuan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	680	348.802.000	90	56.278.000	120	77.096.000	-	-	-	-	90	56.278.000	13,24	16,13	Dinas Kominfo
	1	02	10	01	15	07	Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informatika	Peraturan Perundang-undangan bid.kominfo (dokumen)	6	202.090.000	2	56.278.000	2	40.418.000	-	-	-	-	2	56.278.000	33,33	27,85	
	1	02	10	01	15	08	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Komunikasi dan Informatika	Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kominfo (orang)	1350	146.712.000	270	-	0	36.678.000	-	-	-	-	270	-	20,00	0,00	
7	1	02	10	01	17		Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika	Peningkatan kualitas SDM IT	1350	54.321.000	180	-	90	54.321.000	-	-	-	-	180	-	13,33	0,00	Dinas Kominfo
	1	02	10	01	17	01	Pelatihan /Bimbingan Teknis SDM TIK	Bimtek peningkatan SDM bidang TIK (orang)	1350	54.321.000	180	-	90	54.321.000	-	-	-	-	180	-	13,33	0,00	
8	1	02	10	01	19		Program Peningkatan Akses Informasi dan Komunikasi	Akses Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	6	820.042.000	-	559.000.000	2	820.042.000	-	-	-	-	0	559.000.000	0,00	68,17	Dinas Kominfo
	1	02	10	01	19	11	Pembuatan Master Plan Teknologi Informasi Komunikasi Kab.Pesisir Selatan	Buku Perencanaan dan Panduan Penyusunan Perencanaan Pengembangan TIK Kab. Pessel (dokumen)	5	126.694.000	0	559.000.000	1	126.694.000	-	-	-	-	0	559.000.000	0,00	441,22	
	1	02	10	01	19	18	Pembangunan infrastruktur TIK Kab.Pessel	Penguatan signal selular dan pemasangan CCTV (%)	100%	693.348.000	20%	-	20%	693.348.000	-	-	-	-	20%	-	20,00	0,00	

1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	k	Rp	K	Rp.	K	Rp.	
9	1	02	10	01	20	Program Penyelenggaraan E Government	Persentase cakupan nagari yang terintegrasi smartcity	100	2.600.753.000			42	2.600.753.000	-	-	-	-	0	-	0,00	0,00	Dinas Kominfo
	1	02	10	01	20	02	Pembangunan dan Pengembangan Program Aplikasi Elektronik	50	340.894.000	5		15	340.894.000	5	58.045.000	33,33	17,03	10	58.045.000	20,00	17,03	
	1	02	10	01	20	03	Pengembangan Smart City	60	2.126.545.000	12		12	2.126.545.000	3	8.867.000	25,00	0,42	15	8.867.000	25,00	0,42	
	1	02	10	01	20	03	Pengawasan dan Pengendalian Jaringan dan Data TIK (%)	60	133.314.000	12		12	133.314.000	3	-	25,00	-	15	-	25,00	0,00	
							Perawatan jaringan dan komunikasi data (bln)															
XI							URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH															
1	06	1	02	11	1	Program Pelayanan Administrasi perkantoran	Jumlah cakupan pelayanan administrasi perkantoran	72	3.387.953.000	24	1.213.259.857	12	941.487.800	3	127.913.340	25,00	13,59	27	1.341.173.197	37,50	39,59	DKUPP
	06	1	02	11	1	02	Penyediaan Jasa Konomikasi, Sumber daya air dan listrik	72	402.100.000	24	105.361.700	12	200.640.000	3	16.058.670	25,00	8,00	27	121.420.370	37,50	30,20	
	06	1	02	11	2	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	72	630.000.000	24	193.142.000	12	110.400.000	3	17.600.000	25,00	15,94	27	210.742.000	37,50	33,45	
	06	1	02	11	2	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	72	284.964.000	24	121.112.000	12	241.993.000	3	34.250.500	25,00	14,15	27	155.362.500	37,50	54,52	
	06	1	02	11	2	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	72	207.102.300	24	75.427.190	12	35.614.900	3	5.955.720	25,00	16,72	27	81.382.910	37,50	39,30	
	06	1	02	11	2	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	72	198.786.700	24	68.803.400	12	35.324.000	3	-	25,00	-	27	68.803.400	37,50	34,61	
	06	1	02	11	2	11	Penyediaan Komponen, Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	72	75.000.000	24	52.156.000	12	12.455.000	3	-	25,00	-	27	52.156.000	37,50	69,54	
	06	1	02	11	2	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	72	60.000.000	24	19.820.000	12	13.260.000	3	840.000	25,00	6,33	27	20.660.000	37,50	34,43	
	06	1	02	11	2	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	72	230.000.000	24	88.825.000	12	50.655.000	3	4.345.000	25,00	8,58	27	93.170.000	37,50	40,51	
	06	1	02	11	2	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	72	750.000.000	24	286.547.567	12	130.300.000	3	31.448.450	25,00	24,14	27	317.996.017	37,50	42,40	
	06	1	02	11	2	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	72	400.000.000	24	202.065.000	12	70.350.000	3	17.415.000	25,00	24,75	27	219.480.000	37,50	54,87	
	06	1	02	11	2	22	Penunjang operasional perencanaan dan pelaporan	60	150.000.000			10	40.495.900	2	-	20,00	-	2	-	3,33	-	

1	2						3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	k	Rp	K	Rp.	K	Rp.	
2	1	1	02	11	02		Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya kecukupan sarana dan prasarana aparatur (persentase)	100	293.814.700	33	70.715.103	16	36.281.250	6	27.783.000	37,50	76,58	39	98.498.103	39,00	33,52	DKUPP
	1	1	02	11	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	80	130.594.200	20	25.020.850	29	15.447.000	0	-	-	-	20	25.020.850	25,00	19,16	
	1	1	02	11	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Trsedianya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (Persen)	72	38.000.000	24	13.530.038	12	3.000.000	3	-	25,00	-	27	13.530.038	37,50	35,61	
	1	1	02	11	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas operasional	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas operasional	72	110.165.500	24	29.549.215	12	16.694.250	3	27.083.000	25,00	162,23	27	56.632.215	37,50	51,41	
	1	1	02	11	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor	72	15.055.000	24	2.615.000	12	1.140.000	3	700.000	25,00	61,40	27	3.315.000	37,50	22,02	
4	02	1	02	11	15		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Promosi Produk unggulan daerah(paket)	6	1.275.584.000	2	139.664.200	1	246.479.900	0	1.200.000	-	0,49	2	140.864.200	33,33	11,04	DKUPP
	02	1	02	11	15	10	Pelaksanaan Festival Langkisau	Promosi Produk unggulan daerah(paket)	6	1.275.584.000	2	139.664.200	1	246.479.900	0	1.200.000	-	0,49	2	140.864.200	33,33	11,04	
XII							URUSAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN																
1	1	02	12	.01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya administrasi pelayanan perkantoran (bln)	72	1.125.270.969	24	652.767.385	12	550.131.434	3,00	133.602.759	25,00	24,29	27	786.370.144	37,50	69,88	DPMP2TSP
	1	02	12	.01	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik air, telpon	72	102.021.120	24	46.344.612	12	42.000.000	3,00	4.774.559	25,00	11,37	27	51.119.171	37,50	50,11	
	1	02	12	.01	.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Honor KPA,PPTK,PPK Bend dsb	72	120.056.200	24	64.030.000	12	67.800.000	3,00	11.250.000	25,00	16,59	27	75.280.000	37,50	62,70	
	1	02	12	.01	.08		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Sapu, kain pel pembersih, bak sampah	72	32.454.950	24	13.163.000	12	82.018.500	3,00	917.500	25,00	1,12	27	14.080.500	37,50	43,38	
	1	02	12	.01	.09		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan	service komputer printer, laptop	72	22.254.320	24	10.680.000	12	15.200.000	3,00	1.950.000	25,00	12,83	27	12.630.000	37,50	56,75	
	1	02	12	.01	.10		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Buku pena tinta, kertas	72	67.330.829	24	31.906.000	12	32.324.500	3,00	8.113.500	25,00	25,10	27	40.019.500	37,50	59,44	
	1	02	12	.01	.11		Penyediaan Barang Cetak dan P	cetak sppd, kwitansi, rka, renja, laporan keu	72	66.396.935	24	45.274.000	12	24.870.700	3,00	7.432.400	25,00	29,88	27	52.706.400	37,50	79,38	
	1	02	12	.01	.12		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	lampu , kabel, stokkontak, saklar	72	30.735.562	24	8.061.700	12	14.831.000	3,00	472.200	25,00	3,18	27	8.533.900	37,50	27,77	
	1	02	12	.01			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	komputer, printer, spingjer	72	86.000.000	24	57.940.000	12	37.650.000	3,00	-	25,00	-	27	57.940.000	37,50	67,37	

1	2						3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	k	Rp	K	Rp.	K	Rp.	
	1	02	12	.01		15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	koran, buku	72	111.271.600	24	18.270.000	12	13.900.000	3,00	7.200.000	25,00	51,80	27	25.470.000	37,50	22,89	
	1	02	12	.01		.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	makan rapat, tamu	72	57.575.733	24	23.225.000	12	32.400.000	3,00	600.000	25,00	1,85	27	23.825.000	37,50	41,38	
	1	02	12	.01		.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	rapat ke propinsi dan luar propinsi	72	291.902.400	24	264.598.823	12	98.500.000	3,00	75.256.600	25,00	76,40	27	339.855.423	37,50	116,43	
	1	02	12	.01		.20	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	survei, peninjauan lapangan	72	137.271.320	24	69.274.250	12	54.474.000	3,00	15.636.000	25,00	28,70	27	84.910.250	37,50	61,86	
	1	02	12	.01		.22	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	cetak RKA, RENSTRA, LKPJ, RKPD, dan laporan lainnya	48	136.650.936	0		12	34.162.734	3,00	-	25,00	-	3	-	6,25	0,00	
2	1	02	02				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	tersedianya sarpras penunjang (bln)	72	1.123.008.791	24	353.540.486	12	345.633.600	3,00	4.769.000	25,00	1,38	27	358.309.486	37,50	31,91	DPMP2TSP
	1	02	12	02		22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	pemeliharaan rutin	72	43.234.500	24	20.799.000	12	97.250.000	3,00	-	25,00	-	27	20.799.000	37,50	48,11	
	1	02	12	02			Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Pengadaan kendaraan dinas	6	500.000.000	3	185.210.000	3	27.750.000	-	-	-	-	3	185.210.000	50,00	37,04	
	1	02	12	02		42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehab gedung kantor	4	458.900.000	2	101.294.000	2	165.458.600	-	-	-	-	2	101.294.000	50,00	22,07	
	1	02	12	02		24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas	72	120.874.291	24	46.237.486	12	55.175.000	3,00	4.769.000	25,00	8,64	27	51.006.486	37,50	42,20	
3	1	02	12	15			Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi	Jumlah investor yang menanamkan modal	5	1.148.948.150	1	305.204.727	1	270.185.500	-	28.008.202	-	10,37	1	333.212.929	20,00	29,00	DPMP2TSP
	1	02	12	15		1	Promosi Investasi di Dalam Negeri	Jumlah promosi yang dilaksanakan	30	806.063.750	5	229.847.323	5	213.038.100	1,00	23.147.202	20,00	10,87	6	252.994.525	20,00	31,39	
	1	02	12	15		1	Pelayanan kerjasama Investasi	Tersedianya Dokumen MOU antara investor dengan Pemerintahan daerah	5	342.884.400	1	75.357.404	1	57.147.400	-	4.861.000	-	8,51	1	80.218.404	20,00	23,40	
4	1	02	12	16			PROG. PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	persentase pencapaian target investasi	100	657.257.858	90	305.240.441	10	253.817.571	2	36.711.350	20,00	14,46	92	341.951.791	92,00	52,03	DPMP2TSP
	1	02	12	16		1	Pendataan Realisasi Investasi Non	Tersedianya dokumen data investasi non fasilitasi rumah (dok) tangga	6	59.895.000	2	27.085.500	1	27.962.500	-	4.617.250	-	16,51	2	31.702.750	33,33	52,93	
	1	02	12	16		1	Pelayanan Penanaman Modal	Tercapainya pelaksanaan pelayanan perizinan penanaman modal pada investor (bln)	72	122.515.607	24	55.636.500	12	53.198.000	3	11.343.700	25,00	21,32	27	66.980.200	37,50	54,67	
	1	02	12	16		2	Pengembangan sistem informasi perizinan dan penanaman	Terlaksananya sistem pelayananan perizinan secara online (bln)	72	151.854.637	24	81.332.700	12	82.796.200	3	-	25,00	-	27	81.332.700	37,50	53,56	
	1	02	12	16		2	Lokakarya penyusunan LKPM	lokakarya 40 orang peserta	240	90.000.000	80	29.925.591	40	49.913.000	-	-	-	-	80	29.925.591	33,33	33,25	

1	2						3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	k	Rp	K	Rp.	K	Rp.	
	1	02	12	16		2	Koordinasi bidang penanaman modal	Tercapainya koordinasi penanaman modal (bln0	72	105.749.014	24	68.292.150	12	28.772.621	3	4.546.000	25,00	15,80	27	72.838.150	37,50	68,88	
	1	02	12	16		2	Pengawasan dan pengendalian penanaman modal	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian (bln)	72	127.243.600	24	42.968.000	12	11.175.250	3	16.204.400	25,00	145,00	27	59.172.400	37,50	46,50	
5	1	02	12	18			Program Peningkatan pelayanan Publik Bidang Perizinan	Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	19500	541.040.202	5000	177.687.114	3000	313.542.064	800	40.884.000	26,67	13,04	5800	218.571.114	29,74	40,40	DPMP2TSP
	1	02	12	18		0	Operasional penyelenggaraan periz	izin yang diterbitkan	19500	303.600.000	5000	62.163.800	3000	177.687.114	800	25.546.750	26,67	14,38	5800	87.710.550	29,74	28,89	
	1	02	12	18		0	Monitoring dan evaluasi pelayanan	Terlaksananya pemberitahuan perpanjangan izin (bln)	72	141.093.801	24	-	12	62.163.800	3	11.305.500	25,00	18,19	27	11.305.500	37,50	8,01	
	1	02	12	18		0	Survey indeks kepuasan masyarakat	Jumlah jajak pendapat yang dilakukan	6	52.093.801	2	44.252.600	1	29.438.550	-	4.031.750	-	13,70	2	48.284.350	33,33	92,69	
	1	02	12	18		0	Penyusunan Naskah akademis ten	Tersedianya Naskah akademis	1	44.252.600	0	-	1	44.252.600	-	-	-	-	0	-	-	-	
XII							URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																
1	3	00	04	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)	600	3.254.776.316	200	1.254.804.777	100	475.364.398	25,00	159.618.971	25,00	33,58	225,00	1.414.423.748	37,50	43,46	DISPARPORA
							Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat kantor (%)	600	56.355.000	200	9.999.000	100	11.589.000	32,23	3.735.000	32,23	32,23	232,23	13.734.000	38,70	24,37	
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air dan Listrik	Tersedianya jasa telpon, sumber daya air dan listrik (%)	600	309.900.000	156,38	75.563.339	100	52.800.000	24,73	13.059.151	24,73	24,73	181,11	88.622.490	30,19	28,60	
							Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya pembayaran/honorarium tenaga administrasi keuangan (%)	600	451.800.000	191,89	127.200.000	100	79.800.000	27,44	21.900.000	27,44	27,44	219,33	149.100.000	36,56	33,00	
							Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya petugas kebersihan kantor (%)	600	259.514.000	198,61	97.814.000	100	40.229.350	32,50	13.075.500	32,50	32,50	231,11	110.889.500	38,52	42,73	
							Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja (%)	600	128.883.000	199,77	52.947.500	100	18.968.000	13,19	2.501.920	13,19	13,19	212,96	55.449.420	35,49	43,02	
							Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor untuk operasional (%)	600	189.374.496	199,92	65.841.000	100	30.877.724	28,39	8.765.100	28,39	28,39	228,30	74.606.100	38,05	39,40	
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan pada (%)	600	175.469.200	199,95	69.983.800	100	26.367.300	25,04	6.602.000	25,04	25,04	224,99	76.585.800	37,50	43,65	
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik bangunan kantor (%)	600	60.452.620	199,24	17.174.000	100	10.799.024	22,80	2.462.000	22,80	22,80	222,03	19.636.000	37,01	32,48	

1	2						3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	k	Rp	K	Rp.	K	Rp.	
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan (koran) dan peraturan perundang-undangan (%)	600	79.065.000	198,89	36.990.000	100	10.500.000	14,86	1.560.000	14,86	14,86	213,75	38.550.000	35,62	48,76	
							Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman pada (%)	600	316.641.000	199,87	187.096.400	100	32.384.000	33,87	10.967.500	33,87	33,87	233,74	198.063.900	38,96	62,55	
							Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terwujudnya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan instansi terkait (%)	600	798.022.000	172,14	317.970.738	100	102.850.000	36,11	37.135.800	36,11	36,11	208,25	355.106.538	34,71	44,50	
							Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terwujudnya koordinasi dan konsultasi kedalam daerah dengan instansi terkait (%)	600	429.300.000	199,68	196.225.000	100	58.200.000	65,04	37.855.000	65,04	65,04	264,72	234.080.000	44,12	54,53	
2	3	00	04	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarpras bagi aparatur	600	1.919.225.150	200,00	524.624.622	100	360.285.500	25,00	78.062.886	25,00	21,67	225,00	602.687.508	37,50	31,40	DISPARPORA
							Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya secara rutin/berkala Gedung Kantor (%)	600	404.720.000	199,88	168.686.000	100	59.000.000	29,11	17.176.000	29,11	29,11	228,99	185.862.000	38,16	45,92	
							Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara secara rutin/berkala (%)	600	1.298.965.150	199,94	355.938.622	100	235.745.500	25,83	60.886.886	25,83	25,83	225,77	416.825.508	37,63	32,09	
							Pembangunan Tempat Parkir	Terlaksananya Pembangunan Tempat Parkir (%)	200	215.540.000	0	0	100	65.540.000	0	-	-	-	0	-	0	0,00	
3	13	1	2	13	16		Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	80	4.874.759.675	50	964.411.138	10	925.875.640	1	25.130.400	10,00	2,71	51	989.541.538	63,75	20,30	DISPARPORA
	13	1	2	13	16	2	Peringatan hari-hari Besar Nasional	Terlaksananya peringatan hari-hari besar nasional (kali)	5	4.116.009.675	1	831.775.050	1	767.792.780	-	1.250.000	-	0,16	1,00	833.025.050	20,00	20,24	
	13	1	2	13	16	3	Sosialisasi Bahaya Narkoba bagi Generasi Muda	Jumlah peserta sosialisasi	400	80.000.000			100	26.285.320	-	3.154.000	-	12,00	-	3.154.000	0,00	3,94	
	13	1	2	13	16	14	Penyeleksian dan Pengiriman Anggota Paskibraka tingkat Provinsi dan Nasional	Jumlah anggota paskibraka yang di seleksi ke tingkat provinsi dan Nasional	500	303.750.000	97	59.901.900	100	70.571.200	2,71	20.726.400	2,71	29,37	99,51	80.628.300	19,90	26,54	
	13	1	2	13	16	15	Penyeleksian Jambore Pemuda Indonesia (JPI)	Jumlah anggota JPI yang diseleksi	500	250.000.000	95	47.734.188	100	30.000.100	0	-	-	-	95,47	47.734.188	19,09	19,09	
	13	1	2	13	16	20	Peringatan Sumpah Pemuda	Terlaksananya peringatan sumpah pemuda (kali)	5	125.000.000	1	25.000.000	1	31.226.240	0	-	-	-	1,00	25.000.000	20,00	20,00	
4	13	1	2	13	20		Program pembinaan dan pemsayarakatan olahraga	Jumlah Atlit dan pemuda berprestasi	215	5.025.393.445	45	807.315.619	35	782.157.459	0	17.557.200	-	2,24	45	824.872.819	20,93	16,41	DISPARPORA
	13	1	2	13	20	19	Penyelenggaraan Open Tournamen Volly pantai Tingkat Nasional	Terlaksananya open tournamen Volly pantai tingkat Nasional (kali)	6	2.085.681.345	1	347.051.059	1	326.109.059	2,24	7.362.200	224,47	2,26	3,24	354.413.259	54,08	16,99	

1	2						3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	k	Rp	K	Rp.	K	Rp.	
	13	1	2	13	20	20	Penyelenggaraan Paralayang Internasional	Terlaksananya paralayang internasional (kali)	6	2.149.712.100	1	304.681.560	1	350.716.040	-	1.002.000	-	0,29	1,00	305.683.560	16,67	14,22	
	13	1	2	13	20	37	Olah Raga Massal (Car Free Day)	Jumlah olahraga massal yang dilaksanakan (%)	500	500.000.000	95,78	97.583.000	100	75.010.200	0	-	-	-	95,78	97.583.000	19,16	19,52	
	13	1	2	13	20	38	Aktivasi dan Bantuan Untuk club-club Olahraga	Jumlah aktivasi dan bantuan untuk club-club olahraga yang dilakukan (%)	500	290.000.000	100	58.000.000	80	30.322.160	7,00	9.193.000	8,75	30,32	107,00	67.193.000	21,40	23,17	
5	13	1	2	13	22		Program pembinaan olahraga berprestasi	Terlaksananya Pembinaan Olahraga Berprestasi	215	250.000.000	45	49.999.600	35	30.000.000	0	12.500.000	-	41,67	45	62.499.600	20,93	25,00	DISPARPORA
	13	1	2	13	22	2	Pengiriman atlit dan pemuda berprestasi	Jumlah atlit dan pemuda berprestasi yang dikirim (%)	500	250.000.000	100	49.999.600	100	30.000.000	-	12.500.000	-	41,67	100,00	62.499.600	20,00	25,00	
XIII							URUSAN STATISTIK																
1	1	02	10	01	19		Program Peningkatan Akses Informasi dan Komunikasi	Data Statistik sektoral untuk Perangkat Daerah	24	212.642.000	8	114.778.000	4	159.184.000	1	15.954	25,00	0,01	9	114.793.954	37,50	53,98	Dinas Kominfo
	1	02	10	01	19	21	Pengumpulan data statistik sektoral	Data Sektoral Perangkat Daerah (buku)	225	86.215.000	0	-	45	86.215.000	0	-	-	-	0	-	0,00	0,00	Dinas Kominfo
	1	02	10	01	19	21	Penyediaan Data Pesisir Selatan Dalam Angka	Data Pesisir Selatan Dalam Angka (buku)	1.250	72.969.000	250	57.389.000	0	72.969.000	0	1.000.000		1,37	250	58.389.000	20,00	80,02	Dinas Kominfo
	1	02	10	01	19	21	Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan informasi daerah	Pengamanan aplikasi pemerintah daerah (aplikasi)	40	53.458.000	7	57.389.000	5	72.969.000	0	49.700.000	-	68,11	7	107.089.000	17,50	200,32	Dinas Kominfo
XIV							URUSAN KEBUDAYAAN																
1	01	01	01	01	15		Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase seni budaya yang dilestarikan	100	7.560.866.000	33	4.227.558.000	16,67	1.457.027.000	0,33	135.000.000	1,98	9,27	33,66	4.362.558.000	33,66	57,70	Dinas Pendiidkan dan Kebudayaan
	01	01	01	01	15	24	Pagelaran Seni dan Budaya	Terlaksananya pagelaran seni dan budaya tingkat Kabupaten dan	4	1.254.144.000	0	-	1	313.536.000	0,00	-	-	-	0	-	0,00	0,00	
	01	01	01	01	15	28	Fasilitasi dan Kegiatan Pendamping Festival Seni dan Budaya	Terlaksananya fasilitasi dan kegiatan pendamping festival budaya maritim 2018	4	1.226.048.000	0	-	1	306.512.000	0,00	-	-	-	0	-	0,00	0,00	
	01	01	01	01	15	34	Pengiriman Tim Kesenian	Jumlah Event yang diikuti	6	2.457.348.000	2	819.116.000	1	409.558.000	0,33	135.000.000	32,96	32,96	2,33	954.116.000	38,83	38,83	
	01	01	01	01	15	46	Sumarak Pesisir Selatan	Jumlah Event yang diselenggarakan	6	2.161.326.000	2	720.442.000	1	360.221.000	0,00	-	-	-	2	720.442.000	33,33	33,33	
	01	01	01	01	15	54	Perawatan Cakar Budaya, Museum dan Peninggalan bawah air	Jumlah cagar budaya (peninggalan sejarah, museum, dan peninggalan bawah air) yang dipelihara	133	462.000.000	40	2.688.000.000	18	67.200.000	0,00	-	-	-	40	2.688.000.000	30,08	581,82	
2	01	01	01	01	16		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	100	2.080.903.000	33,33	620.000.000	16,67	480.903.000	4,17	324.402.017	25,00	67,46	37,5	944.402.017	37,50	45,38	Dinas Pendiidkan dan Kebudayaan

1	2						3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	k	Rp	K	Rp.	K	Rp.	
	01	01	01	01	16	15	Penyusunan Perda tentang Kurikulum Muatan Lokal BAMK Berbasis ABS-SBK	Ranperda tentang kurikulum muatan lokal BAMK berbasis ABS-SBK	1	128.722.000	0	-	1	128.722.000	1,00	2.396.000	100,00	1,86	1	2.396.000	100,00	1,86	
	01	01	01	01	16	42	Paket Seni Tradisional dan Modern	Terlaksananya 6 (enam) paket seni	36	1.860.000.000	12	620.000.000	6	310.000.000	6,00	310.000.000	100,00	100,00	18	930.000.000	50,00	50,00	
	01	01	01	01	16	47	Pendokumentasian Simbol-simbol Adat Pada Setiap Nagari Yang Ada di Kabupaten Pesisir Selatan	60 simbol adat atau karya adat di 15 kecamatan	60	92.181.000	0	-	30	42.181.000	20,00	12.006.000	66,67	28,46	20	12.006.000	33,33	13,02	
xv							URUSAN PERPUSTAKAAN																
1	18	19					Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Peningkatan angka kunjungan ke perpustakaan umum daerah, puskel, OPD, Nagari, TBM dll (org)	160.160	2.982.476.994	20.160	890.144.010	20.000	718.752.291	3.200	117.463.500	16,00	16,34	23.360	1.007.607.510	14,59	33,78	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	18	19	03				Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca	Jumlah publikasi yang dilakukan	100	305.759.454	33	148.626.000	20	77.133.464	-	-	-	-	33,00	148.626.000	33,00	48,61	
	18	19	05				Pernyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	Penambahan koleksi buku, majalah dan koran	1000	924.898.054	333	227.200.500	166	92.697.554	10	12.237.500	6,02	13,20	343,00	239.438.000	34,30	25,89	
	18	19	06				Pelayanan Perpustakaan Umum Daerah dan Kantin Baca	Terlaksananya Pelayana Pustaka Umum Daerah dan Kantin Baca (bin)	48	311.000.000		-	12	57.388.958	3	9.623.500	25,00	16,77	3,00	9.623.500	6,25	3,09	
	18	19	07				Pelayanan Perpustakaan Keliling	Terlaksananya Pelayanan Perpustakaan Keliling	72	833.244.056	24	379.094.510	12	253.349.546	3	68.078.400	25,00	26,87	27,00	447.172.910	37,50	53,67	
	18	19	13				Pelaksanaan Rumah Pintar Perintis	Terlaksananya pelayanan rumah pintar perintis Painan	72	607.575.430	24	135.223.000	12	172.352.430	3	27.524.100	25,00	15,97	27,00	162.747.100	37,50	26,79	
	18	19	23				Bintek Pengelola Perpustakaan	Jumlah peserta bintek	200	65.830.339	0	-	50	65.830.339	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	
xvi							URUSAN KEARSIPAN																
1	18	01					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	cakupan pelayanan administrasi perkantoran	72	4.361.769.359	24	1.334.507.040	12	704.549.069	3	111.178.587	25,00	15,78	27	1.445.685.627	37,50	33,14	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	18	01	02				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran rekening telepon, air dan listrik	72	270.119.972	24	60.119.972	12	30.000.000	3	10.532.687	25,00	35,11	27,00	70.652.659	37,50	26,16	
	18	01	03				Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan & perlengkapan kantor	72	799.867.570	24	325.728.570	12	109.139.000	3	-	25,00	-	27,00	325.728.570	37,50	40,72	
	18	01	06				penyedia Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional	Terpeliharannya Kendaraan Dinas perasional	72	612.779.217	24	126.354.217	12	121.425.000	3	27.219.500	25,00	22,42	27,00	153.573.717	37,50	25,06	
	18	01	07				Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pengelola administrasi keuangan dan aset	72	412.000.000	24	155.800.000	12	61.200.000	3	10.300.000	25,00	16,83	27,00	166.100.000	37,50	40,32	
	18	01	08				Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa kebersihan kantor	72	191.499.000	24	50.079.000	12	58.920.000	3	13.427.000	25,00	22,79	27,00	63.506.000	37,50	33,16	
	18	01	09				Penyedia Jasa Perbaikan Peralatan kerja	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Kerja	72	300.150.000	24	41.086.750	12	3.850.000	3	2.180.000	25,00	56,62	27,00	43.266.750	37,50	14,42	

1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	k	Rp	K	Rp.	K	Rp.	
	18	01	10			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK	72	137.746.669	24	48.163.000	12	24.583.669	3	2.588.000	25,00	10,53	27,00	50.751.000	37,50	36,84	
	18	01	11			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan & penggandaan	72	137.268.275	24	49.260.875	12	18.007.400	3	5.215.000	25,00	28,96	27,00	54.475.875	37,50	39,69	
	18	01	12			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen instalasi listrik dan bola lampu	72	134.993.500	24	69.544.500	12	30.449.000	3	737.000	25,00	2,42	27,00	70.281.500	37,50	52,06	
	18	01	15			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan & per-UU	72	83.140.000	24	23.140.000	12	-	3	-	25,00	#DIV/0!	27,00	23.140.000	37,50	27,83	
	18	01	17			Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan & minuman	72	135.557.500	24	34.182.500	12	21.375.000	3	2.612.000	25,00	12,22	27,00	36.794.500	37,50	27,14	
	18	01	18			Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi & konsultasi ke luar	72	669.957.656	24	217.757.656	12	127.200.000	3	19.362.400	25,00	15,22	27,00	237.120.056	37,50	35,39	
	18	01	20			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi & konsultasi dalam	72	476.690.000	24	133.290.000	12	98.400.000	3	17.005.000	25,00	17,28	27,00	150.295.000	37,50	31,53	
2	18	02				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	cakupan layanan sarpras bagi aparatur (bln)	72	407.300.000	24	247.300.000	12	95.000.000	3	480.000	-	0,51	27,00	247.780.000	37,50	60,83	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	18	02	22			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (bln)	72	407.300.000	24	247.300.000	12	95.000.000	3	480.000	25,00	0,51	27,00	247.780.000	37,50	60,83	
3	18	16				Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah	Jumlah dokumen/arsip daerah yang terselamatkan & terlestarikan	80	249.505.343	33	-	20	249.505.343	-	4.424.186	-	1,77	33,00	4.424.186	41,25	1,77	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	18	16	14			Bimtek Kearsipan bagi Petugas Unit Arsip (Setiap OPD, BUMD, dan Nagari)	Jumlah peserta bimtek	360	249.505.343		-	90	249.505.343	-	4.424.186	-	1,77	0,00	4.424.186	0,00	1,77	
						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
I						URUSAN PERIKANAN																
1						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Lancarnya Pelayanan Adminisitrasi	72	1.466.630.457	24	1.466.630.457	12	599.811.000	3	59.343.047	25,00	9,89	27,00	1.525.973.504	37,50	104,05	Dinas Perikanan
						Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi , sumber daya listrik dan air (bulan)	72	287.694.015	24	79.194.015	12	51.000.000	3	8.088.647	25,00	15,86	27,00	87.282.662	37,50	30,34	
						Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tertibnya Administerasi Keuangan (bulan)	72	677.317.000	24	188.567.000	12	121.250.000	3	4.000.000	25,00	3,30	27,00	192.567.000	37,50	28,43	
						Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Kebersihan Kantor (bulan)	72	429.470.000	24	133.644.000	12	70.826.000	3	12.667.500	25,00	17,89	27,00	146.311.500	37,50	34,07	
						Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja (bulan)	72	127.430.000	24	43.705.000	12	9.725.000	3	-	25,00	-	27,00	43.705.000	37,50	34,30	
						Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK (bulan)	72	224.562.833	24	73.582.833	12	34.980.000	3	4.082.000	25,00	11,67	27,00	77.664.833	37,50	34,58	
						Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan(bulan)	72	179.993.000	24	57.443.000	12	28.050.000	3	3.466.400	25,00	12,36	27,00	60.909.400	37,50	33,84	

1	2						3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	k	Rp	K	Rp.	K	Rp.	
							Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik.penerangan bangunan kantor (bulan)	72	148.343.180	24	117.843.180	12	6.500.000	3	1.386.000	25,00	21,32	27,00	119.229.180	37,50	80,37	
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (Bulan)	72	397.723.601	24	123.523.601	12	49.200.000	3	-	25,00	-	27,00	123.523.601	37,50	31,06	
							Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Bulan)	72	57.115.000	24	18.435.000	12	14.680.000	3	1.155.000	25,00	7,87	27,00	19.590.000	37,50	34,30	
							Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum (Bulan)	72	326.243.500	24	101.143.500	12	45.100.000	3	4.572.500	25,00	10,14	27,00	105.716.000	37,50	32,40	
							Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi Luar Daerah (bulan)	72	478.185.328	24	369.685.328	12	108.500.000	3	7.100.000	25,00	6,54	27,00	376.785.328	37,50	78,79	
							Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah (Bulan)	72	424.400.000	24	176.400.000	12	60.000.000	3	12.825.000	25,00	21,38	27,00	189.225.000	37,50	44,59	
2							Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	cakupan layanan Sarana dan prasarana Aparatur (%)	72	987.485.930	24	987.485.930	12%	276.214.000	3	37.434.170	2.500,00	13,55	27	1.024.920.100	37,50	103,79	Dinas Perikanan
							Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas / operasiona (bulan)	72	1272953095	24	226.739.095	12	276.214.000	3	37.434.170	25,00	13,55	27	264.173.265	37,50	20,75	
3							Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Berkembangnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	270.892.500	40	52.360.700	20	218.531.800	5,00	1.100.000	25,00	0,50	45,00	53.460.700	45,00	19,74	Dinas Perikanan
							Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	Terlaksananya monitoring dan terevaluasi program / kegiatan Dinas (bulan)	72	474.423.200	24	52.360.700	12	84.562.500	3,00	-	25,00	-	27,00	52.360.700	37,50	11,04	
							Penyusunan Perencanaan Anggaran	Tersusunnya perencanaan anggaran yang akuntable (kali)	14	261.175.000	0	-	8	56.175.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
							Pengembangan dan Peningkatan Data dan Informasi	Tersusunnya data dan informasi yang valid dan benar	18	377.794.300	0	-	3	77.794.300	-	1.100.000	-	1,41	-	1.100.000	-	0,29	
4							Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	90.511	5.752.372.330,00	24.924,23	1.480.181.536	14.505	555.000.000	3.178,50	17.739.375	21,91	3,20	28.102,73	1.497.920.911	31,05	26,04	Dinas Perikanan
							Operasional Balai Benih Ikan (BBI) Pincuran Boga	Beroperasionalnya BBI Pincuran Boga (Bulan)	72	638.823.850	24	154.610.936	12	212.456.500	3,00	17.739.375	25,00	8,35	27,00	172.350.311	37,50	26,98	
							Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	291.080	20.229.567.550	71.508	3.167.990.120	39.440	4.307.230.000	8.111,30	3.674.500	20,57	0,09	79.619,49	3.171.664.620	27,35	15,68	
							Penyediaan Sarana Prasarana Pemberdayaan Skala Kecil Untuk Nelayan (DAK)	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Skala Kecil Nelayan (paket)	10	10.149.080.000	1,00	1.340.607.400	6	1.887.381.000	-	2.307.300	-	0,12	1,00	1.342.914.700	10,00	13,23	

1	2						3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	k	Rp	K	Rp.	K	Rp.	
							Operasional Balai Sekaya maritim	Beroperasionalnya Balai Sekaya Maritim (Bulan)	48	80.000.000	-	-	12	29.800.200	3,00	-	25,00	-	3,00	-	6,25	-	
							Penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (paket)	6	5.124.872.250	1	1.044.872.250	1	1.680.000.000	-	1.367.200	-	0,08	1,00	1.046.239.450	16,67	20,41	
							Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah Pembudidaya Yang Tersertifikasi CBIB (orang)	492	660.167.000	10	45.934.780	62	145.000.000	-	3.678.000	-	2,54	10,00	49.612.780	2,03	7,52	
							Penanganan Hama dan Penyakit Ikan	Tertanganinya Hama dan Penyakit Ikan (kasus)	45	3.243.685.000	10	45.934.780	15	60.168.500	-	3.678.000	-	6,11	10,00	49.612.780	22,22	1,53	
5							Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah UPR Yang Tersertifikasi CPIB(UPR)	33	838.953.450	3	57.198.350	9	625.000.000	-	6.920.600	-	1,11	3,00	64.118.950	9,09	7,64	Dinas Perikanan
							Pembinaan Unit Perbenihan Rakyat (UPR)	Terbinanya Unit Perbenihan Rakyat (UPR)	90	223.936.450	15	58.322.650	8	30.762.000	-	1.744.600	-	5,67	15,00	60.067.250	16,67	26,82	
							Pembinaan Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan)	Terbinanya Kelompok Pembudidaya Ikan	400	697.621.200	10	52.106.000	20	47.044.000	-	5.176.000	-	11,00	10,00	57.282.000	2,50	8,21	
6							Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah Kelompok Pmbudidayaan Ikan (Pokdakan) Kelompok	460	8.570.042.750	70	1.478.248.485	75	1.533.500.000	-	7.955.000	-	0,52	70,00	1.486.203.485	15,22	17,342	Dinas Perikanan
							Pendampingan Kegiatan Pusat dan Propinsi Bidang Perikanan Budidaya	Tertunjangan kegiatan pusat dan Propinsi bidang perikanan budidaya (Bulan)	72	358.548.000	24	84.421.723	12	65.823.000	3,00	3.489.000	25,00	5,30	27,00	87.910.723	37,50	24,519	
							Pendampingan Kegiatan Pusat dan Provinsi Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil	Terdampingnya kegiatan Provinsi dan Pusat (Bulan)	72	308.662.500	24	64.429.400	12	88.853.000	3,00	4.466.000	25,00	5,03	27,00	68.895.400	37,50	22,321	
7							Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	90.511	960.000.000	25.641	230.000.000	14.505	240.000.000	2.901	1.742.000	20,00	0,73	28.542	231.742.000	31,53	24,140	Dinas Perikanan
							Peningkatan Produksi Ikan	Tersedianya benih dan pakan berkualitas (Ton)	3	240.000.000	0	230.000.000	3	240.000.000	-	1.742.000	-	0,73	-	231.742.000	-	96,559	
8							Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB) kelompok	95	1.298.274.750	55	147.769.100	25	307.603.500	-	9.699.500	-	3,15	55,00	157.468.600	57,89	12,129	Dinas Perikanan
							Pendampingan Asuransi Nelayan	Tersalurkannya Asuransi nelayan (%)	100	240.000.000	100	59.029.600	100	50.470.500	25,00	8.703.000	25,00	17,24	125,00	67.732.600	125,00	28,222	
							Pro Gerakan Anti Kemiskinan Nelayan (Pro Gakin)	Terlaksananya Kegiatan Pro Gerakan Anti Kemiskinan (KUB)	20	373.038.750	4	59.442.500	4	61.455.000	-	-	-	-	4,00	59.442.500	20,00	15,935	
							Sosialisasi dan Pendampingan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perikanan	Tersalurkannya KUR Perikanan ke Nelayan (KUB)	425	305.236.000	75	29.297.000	25	52.619.000	-	-	-	-	75,00	29.297.000	17,65	9,598	
							Penguatan Kelembagaan KUB Perikanan Tangkap	Terbentuknya kelembagaab KUB yag lebih yang berbadan hukum (KUB)	96	380.000.000	0	0	1	143.059.000	-	996.500	-	0,70	-	996.500	-	0,262	

1	2						3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	k	Rp	K	Rp.	K	Rp.	
9							Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan	Terbinanya Kelompok Pengolah Pemasar (Poklahsar)	308	1.930.245.400	54	295.168.005	48	277.075.000	-	23.770.100	-	8,58	54	318.938.105	17,53	16,52	Dinas Perikanan
							Gerakan Masyarakat Makan Ikan (GEMARAKIN)	Terciptanya variasi menu makanan hasil olahan perikanan (orang)	750	682.796.500	100,00	75.571.076	100	99.700.000	-	8.190.100	-	8,21	100,00	83.761.176	13,33	12,27	
							Promosi dan Publikasi Produk Hasil Kelautan dan Perikanan	Dikenalnya produk kelautan dan perikanan Kab.Pessel (kali)	23	674.811.400	2	105.830.579	4	79.600.000	-	-	-	-	2,00	105.830.579	8,70	15,68	
							Pendampingan Kegiatan Pusat dan Propinsi Bidang P2HP	Tertunjangnya kegiatan Propinsi (bulan)	72	328.137.500	24	56.295.450	12	48.875.000	3,00	9.515.000	25,00	19,47	27,00	65.810.450	37,50	20,06	
							Pembinaan Poklahsar Bidang P2HP	Terbinanya Poklahsar Bidang P2HP (kelompok)	302	244.500.000	37	57.470.900	54	48.900.000	-	6.065.000	-	12,40	37,00	63.535.900	12,25	25,99	
10							Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan	Jumlah UPI yang menerapkan cara Pengolahan Ikan Yang Baik (Kelompok)	57	1.120.771.200	3	133.901.150	9	154.800.000	-	675.000	-	0,44	3,00	134.576.150	5,26	12,01	Dinas Perikanan
							Pengawasan mutu Hasil Perikanan	Terlaksananya Pengawasan terhadap Muu Hasil Perikanan (kali)	22	640.771.200	6	133.901.150	5	80.500.000	-	675.000	-	0,84	6,00	134.576.150	27,27	21,00	
							Pelatihan Cara Pengolahan yang baik(GMP/SSOP)	Terjaminnya mutu hasil olahan perikanan (kali)	8	480.000.000	0	0	5	74.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
II							URUSAN PARIWISATA																
1	2	01	02	13	16		Program Pengembangan Destinasi Wisata	jumlah destinasi wisata unggulan (Kawasan)	10	8.278.502.805	3	2.910.690.034	2	2.710.629.400	0	166.099.200	-	6,13	3	3.076.789.234	30,00	37,17	DISPARPORA
	2	1	02	13	16	8	Pemeliharaan rutin/berkala kawasan Objek wisata	terpeliharanya objek wisata (bln)	72	1.229.153.425	24,00	495.895.500	12	188.189.000	3,00	13.421.700	25,00	7,13	27,00	509.317.200	37,50	41,44	
	2	1	02	13	16	16	Pengawasan dan Monitoring Obyek Wisata Se Kabupaten Pesisir Selatan	pengawasan dan monitoring objek wisata yang di laksanakan (bln)	72	318.716.500	24,00	80.069.050	12	33.438.000	3,00	11.227.000	25,00	33,58	27,00	91.296.050	37,50	28,64	
	2	1	02	13	16	18	Pelaksanaan Pengelolaan Objek Wisata Pantai Carocok Painan	pengelolaan objek wisata carocok painan (bln)	72	1.847.355.680	24	263.614.800	12	473.350.000	3,00	66.395.000	25,00	14,03	27,00	330.009.800	37,50	17,86	
	2	1	02	13	16	94	Pembangunan Sarana dan prasarana obyek wisata (DAK)	Jumlah objek yang dibangun	10	4.000.000.000	4	1.991.088.284	2	1.681.980.000	-	1.150.000	-	0,07	4,00	1.992.238.284	40,00	49,81	
	2	1	02	13	16	93	Pelaksanaan Pengelolaan Objek Wisata Mandeh	pengelolaan objek wisata Mandeh (bln)	60	425.912.000	12	80.022.400	12	263.672.500	3,00	73.580.500	25,00	27,91	15,00	153.602.900	25,00	36,06	
	2	1	02	13	16	98	Pembuatan Perencanaan (DED dan RAB Obyek Wisata)	Jumlah pembuatan DED dan RAB yang di buat setiap tahunnya	20	457.365.200			5	69.999.900	-	325.000	-	0,46	-	325.000	0,00	0,07	
2	2	01	02	15			Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Angka kunjungan wisata	7.030.423	8.762.661.425	1.984.312	1.488.105.550	1.050.909	1.465.480.600	175.152	57.978.600	16,67	3,96	2.159.464	1.546.084.150	30,72	17,64	DISPARPORA
	2	01	02	13	15	11	Pelaksanaan Tour De Singkarak	Terlaksananya Tour de singkarak (kali)	5	3.369.697.000	1	585.839.100	1	525.007.000	3,96	1.250.000	395,63	0,24	4,96	587.089.100	99,13	17,42	

1	2						3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	k	Rp	K	Rp.	K	Rp.	
	2	01	02	13	15	14	Pelaksanaan Promosi Pariwisata	Jenis promosi pariwisata yang dilakukan (kali)	30	3.080.681.500	12	447.533.050	6	539.075.000	1,00	44.583.800	16,67	8,27	13,00	492.116.850	43,33	15,97	
	2	01	02	13	15	28	Pembuatan Pusat Informasi Pariwisata	Jumlah Pusat informasi di kawasan mandeh	5	423.782.925	1	77.612.400	1	58.436.000	-	12.144.800	-	20,78	1,00	89.757.200	20,00	21,18	
	2	01	02	13	15	30	Festifal pesona mandeh	Terlaksananya festival mandeh (kali)	5	1.888.500.000	1	377.121.000	1	342.962.600	0	-	-	-	1	377.121.000	20,00	19,97	
3	2	01	02	13	17		Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah kelompok sadar wisata yang dibina	37	794.592.000	28	149.577.500	2	161.521.000	0	19.983.500	-	12,37	28	169.561.000	75,68	21,34	DISPARPORA
	2	1	2	13	17	1	Pelaksanaan Famtrip	Jumlah pelaksanaan famtrip yang dilaksanakan (%)	10	594.592.000	4	90.550.000	2	78.591.000	-	17.121.000	-	21,78	4,00	107.671.000	40,00	18,11	
	2	1	2	13			Pelatihan dan sertifikasi pelaku wisata	Jumlah Pelatihan dan sertifikasi pelaku wisata (kali)	40	200.000.000	10	59.027.500	3	82.930.000	-	2.862.500	-	3,45	10,00	61.890.000	25,00	30,95	
4	2	1	2	13	18		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah kelompok ekonomi kreatif yang berkembang	10	3.832.311.980	4	525.335.900	2	1.089.161.000	0	139.970.164	-	12,85	4	665.306.064	40,00	17,36	DISPARPORA
	2	1	2	13	18	5	Pemilihan Uda dan Uni Duta Wisata 2017	Jumlah event pemilihan Uda-uni	6	939.685.480	2,00	165.984.000	1	224.800.000	-	9.646.000	-	4,29	2,00	175.630.000	33,33	18,69	
	2	1	2	13	18	14	Pembinaan Uda Uni Kab. Pessel	pembinaan yang dilakukan (bln)	72	100.000.000	24	-	12	99.820.000	3,00	5.452.000	25,00	5,46	27,00	5.452.000	37,50	5,45	
	2	1	2	13	18	23	Aktifasi Ekonomi Kreatif	Jumlah kelompok yang difasilitasi	48	823.777.000	10	109.989.000	6	298.038.000	1,00	37.816.000	16,67	12,69	11,00	147.805.000	22,92	17,94	
	2	1	2	13	18	25	Pendataan dan Pembinaan Ekonomi Kreatif	Buku hasil pendataan (dokumen)	5	802.185.000	1	74.705.800	1	167.515.000	-	11.669.000	-	6,97	1,00	86.374.800	20,00	10,77	
	2	1	2	13	18	26	Partisipasi Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang berpartisipasi dalam iven-iven (%)	10	1.166.664.500	2	174.657.100	2	298.988.000	1,00	75.387.164	50,00	25,21	3,00	250.044.264	30,00	21,43	
III							URUSAN PERTANIAN																
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN																							
1							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya pelayanan administrasi yang prima (%)	100	6.474.148.000	33,33	1.393.924.000	50,00	908.765.000	-	121.580.000	-	13,38	33	1.515.504.000	33,33	23,41	Distanhorbun
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)	72	961.416.000	24	156.305.000	12	131.000.000	6	21.470.000	50,00	16,39	30	177.775.000	41,67	18,49	
							Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya layanan jasa administrasi keuangan perkantoran (bulan)	72	1.182.633.000	24	336.834.000	12	194.500.000	6	17.500.000	50,00	9,00	30	354.334.000	41,67	29,96	
							Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya layanan jasa kebersihan kantor/ cleaning service (bulan)	72	622.241.000	24	16.353.000	12	130.550.000	-	-	-	-	24	16.353.000	33,33	2,63	
							Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpeliharanya peralatan kerja dinas (bulan)	72	215.116.000	24	47.473.000	12	20.250.000	-	-	-	-	24	47.473.000	33,33	22,07	

1	2						3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	k	Rp	K	Rp.	K	Rp.	
							Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK dinas dan UPTD/ BPK (bulan)	72	724.094.000	24	213.527.000	12	110.000.000	6	9.816.000	50,00	8,92	30	223.343.000	41,67	30,84	
							Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya cetakan dan penggandaan dinas (bulan)	72	291.174.000	24	70.027.000	12	34.233.000	6	6.315.000	50,00	18,45	30	76.342.000	41,67	26,22	
							Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik kantor (bulan)	72	58.613.000	24	12.146.000	12	7.607.000	-	-	-	-	24	12.146.000	33,33	20,72	
							Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Teredianya bahan bacaan dan perundang - undangan (bulan)	72	83.448.000	24	25.790.000	12	16.400.000	6	1.095.000	50,00	6,68	30	26.885.000	41,67	32,22	
							Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan minum rapat dinas dan tamu dinas (bulan)	72	289.824.000	24	56.037.000	12	45.100.000	6	6.772.000	50,00	15,02	30	62.809.000	41,67	21,67	
							Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Lancarnya koordinasi dan konsultasi dengan lembaga di luar daerah (bulan)	72	1.266.580.000	24	295.007.000	12	143.000.000	6	40.932.000	50,00	28,62	30	335.939.000	41,67	26,52	
							Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Lancarnya koordinasi dan konsultasi dengan lembaga di dalam daerah (bulan)	72	779.009.000	24	164.425.000	12	76.125.000	6	17.680.000	50,00	23,22	30	182.105.000	41,67	23,38	
2							Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana kantor yang representatif (%)	80	2.891.920.000	27	693.320.000	40	544.213.000	-	22.029.000	-	4,05	27	715.349.000	33,33	24,74	Distanhorbun
							Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan roda dua dinas (unit)	36	813.000.000	3	54.600.000	16	320.750.000	-	-	-	-	3	54.600.000	8,33	6,72	
							Pengadaan Meubiler	Tersedianya mebeleur yang representatif (unit)	6	302.338.000	4	62.250.000	2	8.250.000	-	-	-	-	4	62.250.000	66,67	20,59	
							Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor (paket)	5	617.450.000	1	370.726.000	1	10.000.000	-	-	-	-	1	370.726.000	20,00	60,04	
							Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas roda empat dan roda dua (unit)	72	966.132.000	12	205.744.000	25	176.713.000	6	22.029.000	24,00	12,47	18	227.773.000	25,00	23,58	
							Pengadaan Peralatan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang representati (paket)	5	193.000.000	1	-	3	28.500.000	-	-	-	-	1	-	20,00	-	
3							Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	Jumlah kelompok tani pemanfaat alsintan (kelompok)	27	5.601.639.000	22	897.759.200	24	1.239.232.400	-	17.168.000	-	1,39	22	914.927.200	81,48	16,33	Distanhorbun
								Jumlah kelompok tani yang menggunakan teknologi tepat guna (kelompok)	123		120		123		32		26,02		152		123,58		
							Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Jumlah alat dan mesin pertanian (unit)	148	1.137.662.000	33	778.195.000	31	752.283.700	-	10.843.000	-	1,44	33	789.038.000	22,30	69,36	

1	2						3		4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	k	Rp	K	Rp.	K	Rp.	
								Pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Jumlah alat dan mesin pertanian bribage tanam yang dipelihara (unit)	50	332.806.000,00	50	49.756.200	50	51.725.000	-	6.190.000	-	11,97	50	55.946.200	100,00	16,81	
								Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	Jumlah petani yang dilatih menjadi operator alsintan (orang)	125	408.538.000	25	9.686.000	50	22.590.000	-	-	-	-	25	9.686.000	20,00	2,37	
								Pengembangan Teknologi Budidaya Padi SRI	Jumlah petani yang mengikuti sosialisasi dan pembinaan budidaya padi SRI (orang)	240	3.722.633.000	60	60.122.000	60	412.633.700	-	135.000	-	0,03	60	60.257.000	25,00	1,62	
4								Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Jumlah Produksi Padi (Ton)	1.796.305	34.132.340.000	647.192	3.991.977.900	296.078	3.767.769.800	109.610	264.089.400	37,02	7,01	756.802	4.256.067.300	42,13	12,47	
									Jumlah Produksi jagung (Ton)	775.968		327.261		117.398		34.684	-	29,54		361.945	-	46,64		
									Jumlah Produksi Cabe (Ton)	18.455		8.241		2.991		750	-	25,08		8.991	-	48,72		
									Jumlah produksi bawang merah (Ton)	1.509		1.552		250		15	-	6,00		1.567	-	103,84		
									Jumlah produksi Buah-buahan (Ton)	179.202		64.362		29.713		12.547	-	42,23		76.909	-	42,92		
									Jumlah Produksi Kelapa Sawit (Ton)	1.063.225		333.218		166.740		83.800	-	50,26		417.018	-	39,22		
									Jumlah Produksi Karet (Ton)	66.118		20.938		10.963		2.957	-	26,97		23.895	-	36,14		
									Jumlah Produksi gambir (Ton)	41.090		11.177		6.817		2.577	-	37,80		13.754	-	33,47		
									Jumlah Produksi Pala (Ton)	1.783		497		288		134	-	46,53		631	-	35,38		
									Jumlah Produksi kakao (Ton)	8.547		2.198		1.424		226	-	15,87		2.424	-	28,36		
									Jumlah Produksi Kopi (Ton)	7.315		1.989		1.234		661	-	53,57		2.650	-	36,23		
									Jumlah Produksi Cengkeh (Ton)	1.970		722		325		53	-	16,31		775	-	39,36		
								Pengembangan Bibit Unggul Perkebunan	Tersedianya bibit unggul tanaman Perkebunan (batang)	23.250	4.573.073.000	7407	372.540.000	82040	622.722.000	-	9.046.200	-	1,45	7.407	381.586.200	31,86	8,34	
								Pembenahan dan Pengolahan Data Statistik Pertanian	Jumlah buku statistik pertanian (buku)	6	1.016.642.000	2	288.962.000	1	195.647.000	-	13.039.900	-	6,67	2	302.001.900	33,33	29,71	
								Pengendalian Hama Penyakit/OPT	Jumlah pengamatan dan pengendalian OPT	15	651.000.000	15	249.321.000	15	147.579.000	-	7.000.000	-	4,74	15	256.321.000	100,00	39,37	
								Pengembangan Bibit Unggul Pertanian	Jumlah pertemuan kelompok penangkar (kali)	10	1.231.119.000	2	232.176.000	4	387.027.000	-	6.335.000	-	1,64	2	238.511.000	20,00	19,37	
								Pengembangan Tanaman Hortikultura	Jumlah petani yang mengikuti pelatihan penangkar tanaman hortikultura (orang)	145	2.341.856.000	125	640.563.000	25	314.562.000	-	4.481.400	-	1,42	125	645.044.400	86,21	27,54	

1	2						3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	k	Rp	K	Rp.	K	Rp.	
							Pengujian Mutu Pupuk dan Pestisida	Jumlah sampel pupuk dan pestisida yang	16	113.765.000	8	54.004.000	0	-	-	4.893.600			8	58.897.600	50,00	51,77	
							Penyusunan Data Base Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Jumlah peta LP2B (peta)	15	2.295.690.000	4	532.998.000	2	343.819.000	-	-	-	-	4	532.998.000	26,67	23,22	
							Sekolah Lapang Budidaya Kakao	Jumlah petani yang mengikuti sekolah lapang (orang)	60	276.655.000	11	161.181.000	1	50.310.000	-	525.000	-	1,04	11	161.706.000	18,33	58,45	
							Pelatihan Teknis Budidaya Tanaman Karet	Jumlah petani yang mengikuti pelatihan teknis budidaya tanaman karet (orang)	140	1.969.770.000	65	416.676.000	25	124.570.800	-	3.206.200	-	2,57	65	419.882.200	46,43	21,32	
							Pengendalian Hama Perkebunan	Jumlah gerakan pengendalian hama perkebunan (gerakan)	90	750.377.000	24	230.717.900	15	155.015.000	-	18.345.000	-	11,83	24	249.062.900	26,67	33,19	
							Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Perkebunan	Jumlah kelompok penangkar yang dibina (kelompok)	40	342.046.000	-	-	2	92.229.000	-	9.516.200	-	10,32	-	9.516.200	-	2,78	
							Penunjang Kegiatan Provinsi dan Pusat Bidang Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan	Terfasilitasinya kegiatan pusat dan provinsi yang ada di daerah (bulan)	60	415.837.000	12	36.905.000	12	213.675.000	-	35.845.700	-	16,78	12	72.750.700	20,00	17,50	
							LOAN IPDMIP	Jumlah petani yang mengikuti SL Budidaya Padi (orang)	720	6.009.136.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan	Rasio Penyuluh Terhadap Kelompok Tani	0,103	6.072.687.000	0,097	387.967.000	0,103	560.307.000	-	75.927.600	-	13,55	0	463.894.600	94,17	7,64	
								Jumlah Penyuluh Berprestasi (orang)	10		4		2		-	-	-	4		40,00			
							Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	Jumlah PPL yang difasilitasi operasional (orang)	780	5.358.687.000	156	310.710.000	156	517.182.000	-	75.927.600	-	14,68	156	386.637.600	20,00	7,22	
							Penyusunan Program Penyuluh Pertanian/Perkebunan	Jumlah program penyuluhan yang dihasilkan (dokumen)	64	714.000.000	16	77.257.000	16	43.125.000	-	-	-	-	16	77.257.000	25,00	10,82	
5							Program Peningkatan Kelembagaan Petani	Jumlah Gapoktan Berprestasi (gapoktan)	6	1.404.994.000	2	226.411.000	1	399.032.000	-	-	-	-	2	226.411.000	33,33	16,11	Distanhorbun
								Jumlah Kelompok Tani Berprestasi (kelompok)	7		3		1		-	-	-	3	-	42,86			
								Jumlah Petani Berprestasi (orang)	5		1		1		-	-	-	1	-	20,00			
							Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani (LKMA)	Jumlah LKMA yang dibina	145	210.390.000	145	98.984.000	145	116.040.000	-	16.248.200	-	14,00	145	115.232.200	100,00	54,77	
							Fasilitasi Pembentukan Kelompok Tani Berbadan Hukum	Jumlah kelompok tani yang berbadan hukum (kelompok)	465	813.146.000	50	93.633.000	115	246.496.000	-	24.988.700	-	10,14	50	118.621.700	10,75	14,59	
							Fasilitasi Asuransi Usaha Tanaman Padi	Luas lahan usaha tani yang difasilitasi (ha)	10.600	381.458.000	168	33.794.000	2.000	36.496.000	-	2.000.000	-	5,48	168	35.794.000	1,58	9,38	
6							Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian	Jumlah Diversifikasi Hasil Olahan Tanaman Pangan (jenis)	6	3.299.958.000	2	421.180.000	3	914.978.000	-	27.570.800	-	3,01	2	448.750.800	33,33	13,60	Distanhorbun
							Peningkatan Nilai Tambah dan Penekanan Susut Hasil Komoditi Tanaman Pangan	Terlaksananya revitalisasi RMU	2	1.276.126.000	1	99.826.000	1	482.127.000	-	15.368.700	-	3,19	1	115.194.700	50,00	9,03	

1	2						3		4		5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	k	Rp	K	Rp.	K	Rp.	
								Pengembangan Pasca Panen Komoditi Tanaman Perkebunan	Terlaksananya pelatihan pengolahan hasil karet, gambir, dan kelapa		30	323.920.000	6	216.899.000	3	50.752.000	-	1.904.800	-	3,75	6	218.803.800	20,00	67,55	
								Peningkatan Kelompok Pengolahan Hasil Tanaman Hortikultura	Tersedianya sarana pengolahan hasil tanaman hortikultura		16	153.810.000	8	70.820.000	5	61.252.000	-	2.479.300	-	4,05	8	73.299.300	50,00	47,66	
								Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian Unggulan Daerah	Jumlah kegiatan promosi yang diikuti (kegiatan)		12	208.902.000	3	33.635.000	3	42.057.000	-	-	-	-	3	33.635.000	25,00	16,10	
								Penumbuhan Agrowisata	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan budidaya sehat tanaman jeruk pada Agrowisata		105	330.000.000	-	-	20	41.049.000	-	1.288.000	-	3,14	-	1.288.000	-	0,39	
								Pengembangan Jaringan Pemasaran Produksi Perkebunan	Rapat - rapat koordinasi dan asosiasi bidang perkebunan yang diselenggarakan (bulan)		48	447.200.000	-	-	30	49.832.000	-	4.872.000	-	9,78	-	4.872.000	-	1,09	
								Penilaian Uji Mutu Hasil Usaha Tanaman Perkebunan	Dokumen hasil uji rendemen tanaman perkebunan (dokumen)		2	560.000.000	-	-	1	187.909.000	-	1.658.000	-	0,88	-	1.658.000	-	0,30	
7								Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian/ Perkebunan	Meningkatnya sarana dan prasarana pertanian/perkebunan		6,90	19.243.980.000	4,06	7.695.486.000	5	4.507.608.000	-	-	-	-	4	7.695.486.000	58,84	39,99	Distanhorbun
								Pengembangan Prasarana dan sarana pertanian (penunjang satker 08)	Terfasilitasinya kegiatan pusat (satker 08) (kegiatan)		4	464.100.000	1	62.250.000	1	95.676.000	-	16.683.700	-	17,44	1	78.933.700	25,00	17,01	
								Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian	Panjang Jalan Produksi/ Jalan Usaha Tani yang dibangun/ direhabilitasi (paket)		21	4.226.880.000	13	2.261.697.000	8	1.945.199.000	-	11.532.500	-	0,59	13	2.273.229.500	61,90	53,78	
								DAK Bidang Pertanian dan Pendamping	Jumlah embung/ dam parit saluran yang dibangun/ direhabilitasi (unit)		51	13.230.000.000	24	5.334.634.000	12	2.423.233.000	-	8.629.500	-	0,36	24	5.343.263.500	47,06	40,39	
								Penunjang DAK Bidang Pertanian	Lancarnya pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Pertanian (kegiatan)		4	1.323.000.000	2	36.905.000	1	43.500.000	-	28.007.800	-	64,39	2	64.912.800	50,00	4,91	
DINAS PETERNAKAN																									
1	2	00	03	02	01			Program pelayanan administrasi peerkantoran	terlaksananya pelayanan administrasi		72	3.067.772.264	24	1.105.940.872	12	561.930.701	3	132.839.590	25,00	23,64	27	1.238.780.462	37,50	40,38	Disnakkeswan
								Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pembayaran rekening listrik, air dan telpon kantor		72	257.400.000	24	81.289.040	12	56.000.000	3	23.653.751	25,00	42,24	27	104.942.791	37,50	40,77	
								Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pembayaran honor jasa administrasi keuangan		72	572.400.000	24	238.250.000	20	140.920.000	3	31.800.000	15,00	22,57	27	270.050.000	37,50	47,18	
								Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya pemeliharaan kebersihan kantor		72	41.172.000	24	12.320.000	12	30.858.000	3	5.049.500	25,00	16,36	27	17.369.500	37,50	42,19	

1	2						3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	k	Rp	K	Rp.	K	Rp.	
							Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	72	93.900.000	24	35.183.500	12	20.040.000	3	1.377.000	25,00	6,87	27	36.560.500	37,50	38,94	
							Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK	72	209.496.264	24	69.757.808	12	35.034.001	3	8.873.765	25,00	25,33	27	78.631.573	37,50	37,53	
							Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya administrasi perkantoran	72	136.962.000	24,00	46.333.900	12,00	26.970.400	3,00	11.503.200	25,00	42,65	27,00	57.837.100	37,50	42,23	
							Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik /penerangan gedung kantor	72	55.482.000	24,00	65.634.000	12,00	5.570.800	3,00	248.400	25,00	4,46	27,00	65.882.400	37,50	118,75	
							Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	72	36.000.000	24,00	12.793.000	12,00	5.420.000	3,00	600.000	25,00	11,07	27,00	13.393.000	37,50	37,20	
							Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk peserta rapat dan tamu dinas	72	164.340.000	24,00	51.227.000	12,00	50.722.500	3,00	2.772.500	25,00	5,47	27,00	53.999.500	37,50	32,86	
							Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah	72	859.440.000	24,00	297.637.624	12,00	104.800.000	3,00	16.450.000	25,00	15,70	27,00	314.087.624	37,50	36,55	
							Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah	72	534.900.000	24,00	195.515.000	12,00	59.025.000	3,00	19.275.000	25,00	32,66	27,00	214.790.000	37,50	40,16	
							Penunjang operasional perencanaan	Terlaksananya penunjang operasional perencanaan	48	106.280.000	24,00	-	12,00	26.570.000	3,00	11.236.474	25,00	42,29	27,00	11.236.474	56,25	10,57	
2							Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	tersedianyan sarpras bagi aparatur (bln)	72	2.325.952.700	24	817.575.650	12	605.630.000	3	76.082.500	25,00	12,56	27	893.658.150	37,50	38,42	Disnakeswan
							Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur kantor	24	334.550.000	12	113.725.000	3	127.050.000	3	17.590.000	100,00	13,84	15	131.315.000	62,50	39,25	
							Pemeliharaan rutin/berkala gedung kator	Terpeliharanya gedung kantor	72	502.384.000	24	200.737.000	12	134.000.000	3	29.000.000	25,00	21,64	27	229.737.000	37,50	45,73	
							Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan operasional	terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	72	929.598.700	24	309.910.700	12	210.400.000	3	29.492.500	25,00	14,02	27	339.403.200	37,50	36,51	
							Pengadaan peralatan kantor	tersedianya peralatan kantor	24	559.420.000	19	193.202.950	4	134.180.000	-	-	-	-	19	193.202.950	79,17	34,54	
3							Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	tersedianya pelaporan kinerja dan keuangan (bln0	72	156.000.000	24	53.074.277	12	26.838.458	3	4.842.098	25,00	18,04	27	57.916.375	37,50	37,13	Disnakeswan
							Penyusunan Laporan Tahunan dan Statistik	Tersusunnya laporan tahunan	24	156.000.000	8	53.074.277	4	26.838.458	4	4.842.098	100,00	18,04	12	57.916.375	50,00	37,13	
4	2	00	03	02	22		Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Populasi ternak		8.060.005.320		2.504.517.101		2.080.186.324,25	-	114.013	#DIV/0!	0,01	0	2.504.631.114		31,07	Disnakeswan
							- Sapi Potong		84.472		81.786		82.281		0	-	-		81786	-	96,82		
							- Kerbau		8.666		8.506		8.466		0	-	-		8506	-	98,16		

1	2						3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	k	Rp	K	Rp.	K	Rp.	
								- Kambing	41.920		40.856		41.794		0	-	-		40856	-	97,46		
								- Ayam Buras	813.635		787.857		796.547		0	-	-		787857	-	96,83		
								- Ayam Ras Petelur	114.310		97.500		98.745		0	-	-		97500	-	85,29		
								- Ayam Ras Pedaging	2.107.620		1.734.200		1.079.102		0	-	-		1734200	-	82,28		
								- Itik	157.021		157.266		152.403		0	-	-		157266	-	100,16		
								Produksi temak (kg)															
								- Daging Sapi	1.397.267		1.354.022		1.367.562		0	-	-		1354022	-	96,91		
								- Daging Kerbau	55.114		40.520		40.925		0	-	-		40520	-	73,52		
								- Daging Kambing	50.704		44.958		41.709		0	-	-		44958	-	88,67		
								- Daging Ayam	872.623		965.301		974.954		0	-	-		965301	-	110,62		
								- Daging Ayam Ras Petelur	47.153		71.162		71.174		0	-	-		71162	-	150,92		
								- Daging Ayam Ras Pedaging	1.686.623		1.886.261		1.894.581		0	-	-		1886261	-	111,84		
								- Daging Itik	64.771		92.447		94.228		0	-	-		92447	-	142,73		
								- Telur Ayam Ras	727.013		751.725		628.021		0	-	-		751725	-	103,40		
								- Telur Ayam Buras	341.727		503.243		334.550		0	-	-		503243	-	147,26		
								- Telur Itik	716.016		863.392		694.958		0	-	-		863392	-	120,58		
							Pembibitan dan Perawatan Ternak	Terlaksananya operasional pemeliharaan ternak di P4 Lengayang	60,00	1.985.984.000	24	575.394.900	12	207.376.323	3	19.455.634	25,00	9,38	27	594.850.534	45,00	29,95	
							Pembelian dan Pendistribusian Vaksin dan Pakan Ternak	Tersedianya vaksin dan obat2an ternak	68.000	1.424.584.627	22.000	513.802.112	11.000	227.091.844	-	4.542.000	-	2,00	22.000	518.344.112	32,35	36,39	
							Peningkatan Mutu Genetik Melalui IB	Terlayannya akseptor IB	35.000	2.208.956.866	16.361	671.583.751	4.000	375.310.808	2.900	26.576.936	72,50	7,08	19.261	698.160.687	55,03	31,61	
							Pemberdayaan Kelembagaan dan Usaha Peternakan	Jumlah petani ternak yang dilatih dan mendapat sosialisasi	740	1.319.818.845	160	430.581.378	80	173.912.936	150	19.816.700	187,50	11,39	310	450.398.078	41,89	34,13	
							Budidaya Itik Bayang	Terlaksananya penetasan telur itik yang distribusikan ke kelompok tani ternak	31.000	687.301.760	8.000	226.268.340	1.500	113.528.833	-	5.070.751	-	4,47	8.000	231.339.091	25,81	33,66	
							Budidaya ayam lokal	Terlaksananya penetasan telur ayam lokal dan budidaya ayam lokal	6.000	433.359.222	1.500	86.886.620	1.500	63.212.339	-	4.625.225	-	7,32	1.500	91.511.845	25,00	21,12	
							Peningkatan Sarana Prasarana Peternakan (DAK)	Terlaksananya pembangunan sarana prasarana peternakan	12	3.000.000.000	4	563.116.434	4	500.000.000	-	30.000.000	-	6,00	4	593.116.434	33,33	19,77	
							Pengembangan ternak untuk menunjang percepatan pembangunan	Terdistribusikannya ternak kepada masyarakat	240	2.400.000.000	65	725.135.000	971	419.753.241	-	3.925.900	-	0,94	65	729.060.900	27,08	30,38	

1	2						3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	k	Rp	K	Rp.	K	Rp.	
5							Program Pengembangan Agribisnis Peternakan	Jumlah kelompok tani yang menerima bantuan ternak (kelp)	20	562.226.021	4	167.722.221	4	68.821.234	-	3.844.061	-	5,59	4	171.566.282	20,00	30,52	Disnakkeswan
							Pencapaian swasembada daging sapi dan kerbau	tersedianya operasional kegiatan APBN	72	562.226.021	24	167.722.221	3	68.821.234	3	3.844.061	100,00	5,59	27	171.566.282	37,50	30,52	
6	2	00	03	02	21		Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	-Jumlah hewan ternak yang divaksinasi	70.000	349.708.312	22.000	193.913.000	11.000	157.250.000	-	-	-	-	22.000	193.913.000	31,43	55,45	Disnakkeswan
							Pendistribusian vaksin ternak	- biosecurity	720	130.509.220	240	83.584.000	120	33.750.000	-	-	-	-	240	83.584.000	33,33	64,04	
								- vaksin SE	35.000	72.460.840	22.000	46.407.000	5.250	36.750.000	-	-	-	-	22.000	46.407.000	62,86	64,04	
								- vaksin rabies	35.000	21.738.252	22.000	13.922.000	5.250	36.750.000	-	-	-	-	22.000	13.922.000	62,86	64,04	
								- penanganan gangguan reproduksi	250	125.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	-	-	-	-	100	50.000.000	40,00	40,00	
7	2	00	03	02	23		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Ternak	Even Promosi yang diikuti	20	3.272.485.100	7	1.090.828.367	3	1.074.067.742	-	15.972.132	-	1,49	7	1.106.800.499	35,00	33,82	Disnakkeswan
							Promosi atas hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah	Even Promosi	20	2.269.262.100	7	756.420.700	3	913.327.600	-	13.919.632	-	1,52	7	770.340.332	35,00	33,95	
8	2	00	03	02	24		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Jumlah teknologi yang diterapkan	4	1.003.223.000	2	334.407.667	1	160.740.142	-	2.052.500	-	1,28	2	336.460.167	50,00	33,54	Disnakkeswan
							Penerapan Teknologi Peternakan	jumlah teknologi yang diterapkan kelompok	4	1.003.223.000	2	334.407.666,67	1	160.740,14	-	2.052.500	-	1.276,91	2	336.460.167	50,00	33,54	
9	2	00	03	02	32		Program Peningkatan Sarana Prasarana Peternakan	Jumlah sarana prasarana peternakan yang tersedia	24	3.980.000.000	13	334.333.090	5	63.895.958	-	35.132.472	-	54,98	13	369.465.562	54,17	9,28	Disnakkeswan
							Peningkatan Sarana Prasarana Peternakan	Tersedianya sarana prasarana peternakan	12	3.980.000.000	9	334.333.090	1	63.895.958	-	35.132.472	-	54,98	9	369.465.562	75,00	9,28	
IV							URUSAN PERDAGANGAN																
1	06	1	02	11	15		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah pasar rakyat memenuhi syarat pengelolaan SNI 8152:2015	9	4.912.360.000	1	265.519.390	1	372.216.830	0	27.675.000	-	7,44	1	293.194.390	11,11	5,97	DKUPP
								Koefesien variasi harga bahan kebutuhan pokok antarwaktu	< 9 %		< 9 %		< 9 %		< 9 %	-		< 9 %	-				
	06	1	02	11	15	03	Peningkatan pengawasan peredaran barang	Jumlah kecamatan yang diawasi barang beredar	42	540.000.000	12	56.637.070	15	70.860.000	0	17.202.500	-	24,28	12	73.839.570	28,57	13,67	
	06	1	02	11	15	04	Operasionalisasi dan perlengkapan UPTD Kemetrolagian	Tertaksana-nya persiapan pelayanan UPTD(bulan)	72	2.378.725.000	24	61.521.800	12	107.497.460	3	6.000.000	25,00	5,58	27	67.521.800	37,50	2,84	
	06	1	02	11	15	22	Pemantauan harga dan Operasi Pasar	Jumlah Kecamatan yang dilaksana-kan pemantauan harga barang (kecamatan)	30	1.713.635.000	7	147.360.520	4	124.892.910	0	4.472.500	-	3,58	7	151.833.020	23,33	8,86	

1	2						3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	k	Rp	K	Rp.	K	Rp.	
								Jumlah papan display informasi harga	5	-	1	-		-	0	-			1	-	20,00		
	06	1	02	11	15	24	Pembuatan Database Perdagangan	Database perdagangan(dok)	5	280.000.000		-	1	68.966.460	0	4.000.000	-	5,80	0	4.000.000	0,00	1,43	
2	06	1	02	11	18		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah pasar rakyat memenuhi syarat teknis SNI	9	64.791.341.000	3	12.690.351.000	3	17.735.701.990	0	191.533.550	-	1,08	3	12.881.884.550	33,33	19,88	DKUPP
	06	1	02	11	18	06	Peningkatan sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Promosi Produk Unggulan Daerah(paket)	12	938.850.000	4	273.801.120	2	223.106.200	0	75.878.800	-	34,01	4	349.679.920	33,33	37,25	
	06	1	02	11	18	11	Pelayanan Administrasi Penerimaan/ Tagihan dan pengelolaan Pasar	Data Realisasi PAD Pasar	72	1.378.644.000	24	404.461.680	12	88.950.000	0	12.238.500	-	13,76	24	416.700.180	33,33	30,23	
	06	1	02	11	18	12	Pengamanan dan Pengelolaan Pasar	Realisasi PAD Retribusi Pasar	72	2.105.724.000	24	597.707.970	12	355.992.400	0	35.041.000	-	9,84	24	632.748.970	33,33	30,05	
	06	1	02	11	18	34	Peningkatan Pasar Nagari dalam Kabupaten Pesisir Selatan	Pasar Nagari yang terbangun / direvitalisasi	20	8.677.932.000	7	1.233.405.100	1	150.000.000	0	-	-	-	7	1.233.405.100	35,00	14,21	
	06	1	02	11	18	43	Pemeliharaan rutin/ berkala bangunan Pasar Kab. Pesisir Selatan	Jumlah bangunan Pasar yang direhaph	15	9.104.405.000	3	639.325.000	4	806.000.000	0	3.243.000	-	0,40	3	642.568.000	20,00	7,06	
	06	1	02	11	18	50	Revitalisasi pasar hilalang kecamatan pancung soal (Alokasi dana bantuan keuangan yang bersifat khusus propinsi TA 2016)	Jumlah bangunan Pasar yang direhaph	1	213.855.000	1	213.855.120		-	0	-			1	213.855.120	100,00	100,00	
	06	1	02	11	18	51	Revitalisasi pasar balai jumat lahan kecamatan LSB (Alokasi dana bantuan keuangan yang bersifat khusus propinsi TA 2016)	Jumlah bangunan Pasar yang direhaph	1	199.436.000	1	199.435.570		-	0	-			1	199.435.570	100,00	100,00	
	06	1	02	11	18	56	Pembangunan Pasar dalam Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Pasar Rakyat yang dibangun/ direvitalisasi	24	24.524.919.000	6	8.980.783.440	7	11.758.961.000	0	11.659.250	-	0,10	6	8.992.442.690	25,00	36,67	
	06	1	02	11	18	58	Rehab Pasar Asam Kumbang Kecamatan IV Nagar Bayang Utara (Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus Propinsi TA 2017)	Jumlah Pasar yang direvitalisasi	1	147.576.000	1	147.576.000		-	0	-			1	147.576.000	100,00	100,00	
	06	1	02	11	18	60	Penunjang Percepatan Pembangunan Pasar dalam Kab. Pesisir Selatan	Penunjang Operasional Percepatan Pembangunan Pasar	48	800.000.000		-	12	411.093.390	0	53.473.000	-	13,01	0	53.473.000	0,00	6,68	
	06	1	02	11	18	63	Pembuatan buku Profil Pasar Kab. Pesisir Selatan	Data profil Pasar (dok)	4	200.000.000		-	1	44.555.000	0	-	-	-	0	-	0,00	-	
	06	1	02	11	18	65	Pembangunan Pasar Kabupaten (DAK)	Jumlah Pasar Rakyat yang dibangun	15	15.000.000.000		-	3	3.897.044.000	0	-	-	-	0	-	0,00	-	
	06	1	02	11	18		Pembangunan Pasar Kabupaten (Penunjang DAK)	tersediannya biaya operasional	72	1.500.000.000		-	12	3.897.044.000	3	-	25,00	-	3	-	4,17	-	
V							URUSAN PERINDUSTRIAN																
1	07	1	02	11	16		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah fasilitas legalitas produk IKM	170	3.938.996.000	10	1.076.661.100	25	1.076.661.100	0	26.260.670	-	2,44	10	1.102.921.770	5,88	28,00	DKUPP
	07	1	02	11	16	09	Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta	jumlah IKM yang mengikuti sosialisasi kemitraan dengan BUMN, BUMD/swasta	60	120.000.000	30	66.425.900		66.425.900	0	-	-	-	30	66.425.900	50,00	55,35	

1	2						3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	k	Rp	K	Rp.	K	Rp.	
	07	1	02	11	16	10	Pemutakhiran Data IKM	Data IKM (dok)	6	366.210.000	2	96.984.920	1	96.984.920	0	7.195.000	-	7,42	2	104.179.920	33,33	28,45	
	07	1	02	11	16	15	Penunjang Operasional Dekranasda dan Pembinaan IKM	Jumlah Promosi Produk unggulan daerah	36	2.143.803.000	12	816.000.730	6	816.000.730	0	10.489.670	-	1,29	12	826.490.400	33,33	38,55	
	07	1	02	11	16	20	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (REPIK)	Perda REPIK (dok)	3	133.983.000	1	97.249.550	1	97.249.550	0	1.352.000	-	1,39	1	98.601.550	33,33	73,59	
	07	1	02	11	16	22	Fasilitasi IKM terhadap Pemanfaatan sumber daya	Fasilitasi pengurusan sertifikasi produk IKM (IKM)	125	575.000.000	-	-	25	-	0	-	-	-	0	-	0,00	-	
	07	1	02	11	16	24	Pengembangan Sentra Industri Kecil Menengah	Jumlah IKM yang dilatih	250	600.000.000	-	-	40	-	0	7.224.000	-	-	0	7.224.000	0,00	1,20	
2	07	1	02	11	19		Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	Jumlah kelembagaan sentra IKM	6	4.563.754.000	1	85.873.500	3	1.204.543.000	0	8.772.840	-	0,73	1	94.646.340	16,67	2,07	DKUPP
	07	1	02	11	19	5	Penumbuhan dan Penataan Sentra-sentra Industri Unggulan	Jumlah IKM sentra yang dibina dan dilatih	240	1.146.383.000	25	85.873.500	40	104.513.080	0	2.952.000	-	2,82	25	88.825.500	10,42	7,75	
	07	1	02	11	19	07	Pembangunan Sentra IKM (DAK) 2018	Jumlah sarana sentra IKM yang dibangun	3	3.106.701.000	-	-	1	1.000.000.000	0	-	-	-	0	-	0,00	-	
	07	1	02	11	19	08	Pembangunan Gedung Sentra IKM (Penunjang DAK)	Penunjang Operasional Pembangun-an Sentra	24	310.670.000	-	-	12	100.029.920	3	5.820.840	25,00	5,82	3	5.820.840	12,50	1,87	
10	07	1	02	11	20		Program Peningkatan Iklim Usaha Industri	Jumlah IKM yang dibina	50	57.725.000	-	-	50	57.725.030	0	-	-	-	0	-	0,00	-	DKUPP
	07	1	02	11	20	02	Pembinaan dan Pengawasan Indutri Kecil dan Menengah	Jumlah IKM yang dibina	50	57.725.000	-	-	50	57.725.030	0	-	-	-	0	-	0,00	-	
VI							URUSAN TRANSMIGRASI																
1							Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Persentase sarana dan prasarana	100	10.467.693.930	60	1.409.033.280	70	695.342.700	1	43.811.400	1,43	6,30	61	1.452.844.680	61,00	13,88	Dinas Nakertran
	02	01	01	15		06	Fasilitas Dukungan KTM Lunang Silaut	Adanya Fasilitas Dukungan KTM	12	5.318.496.000	4	342.248.000	2	342.248.000	1	11.225.000	50,00	3,28	5	353.473.000	41,67	6,65	
	02	01	01	15		07	Pendampingan dana pembantuan KTM Lunang Silaut.	Adanya pemdampingan dana pembantuan KTM Lunang Silaut.	6	1.440.871.940	2	504.646.040	1	108.725.900	1	21.426.400	100,00	19,71	3	526.072.440	50,00	36,51	
	02	01	01	15		12	Pembinaan Usaha Transmigrasi	Jumlah kelompok tyang dibina	6	2.168.672.790	2	310.189.240	1	115.165.600	1	11.160.000	100,00	9,69	3	321.349.240	50,00	14,82	
	02	01	01	15		11	Perencanaan Fasilitas dukungan KTM	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	6	1.539.653.200	2	251.950.000	1	129.203.200	0	0	0,00	0,00	2	251.950.000	33,33	16,36	
							PENUNJANG URUSAN																
I							INSPEKTORAT																
1	3	00	01	01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi perkantoran	67	6.057.500.000	22	1.165.404.355	11	511.677.878	3	95.913.325	22,39	18,74	25	1.261.317.680	36,57	20,82	Inspektorat
	3	00	01	01	02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Tagihan Rekening listrik, telepon dan air	72	433.500.000	24	95.873.912	12	49.800.000	3	7.860.525	25,00	15,78	27	103.734.437	37,50	23,93	

1	2						3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
	K	Rp.							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	k	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
	3	00	01	01	07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah biaya honorarium pengelola keuangan	72	481.000.000	24	130.725.000	12	82.800.000	3	12.950.000	25,00	15,64	27	143.675.000	37,50	29,87	
	3	00	01	01	08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah sarana Kebersihan	72	433.000.000	24	110.145.400	12	57.205.391	3	12.830.000	25,00	22,43	27	122.975.400	37,50	28,40	
	3	00	01	01	09		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Perbaikan Peralatan Kerja	72	310.500.000	24	61.981.900	12	24.350.000	3	6.350.000	25,00	26,08	27	68.331.900	37,50	22,01	
	3	00	01	01	10		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK	72	458.500.000	24	70.373.500	12	31.655.923	3	5.240.000	25,00	16,55	27	75.613.500	37,50	16,49	
	3	00	01	01	11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetakan penggandaan	72	343.500.000	24	85.041.500	12	22.793.564	3	3.800.000	25,00	16,67	27	88.841.500	37,50	25,86	
	3	00	01	01	12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan	72	218.500.000	24	43.378.000	12	12.738.000	-	-	-	-	24	43.378.000	33,33	19,85	
	3	00	01	01	15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat Kabar dean Buku Per-UU	72	158.500.000	24	21.300.000	12	6.400.000	3	720.000	25,00	11,25	27	22.020.000	37,50	13,89	
	3	00	01	01	17		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah biaya jamuan makan dan minum	72	320.500.000	24	80.407.500	12	43.610.000	3	11.715.000	25,00	26,86	27	92.122.500	37,50	28,74	
	3	00	01	01	18		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Koordinasi dan Kosultasi yang diikuti luar daerah	72	1.935.000.000	24	363.777.643	12	92.000.000	3	28.447.800	25,00	30,92	27	392.225.443	37,50	20,27	
	3	00	01	01	20		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Koordinasi dan Kosultasi yang diikuti dalam daerah	72	725.000.000	24	102.400.000	12	53.325.000	3	6.000.000	25,00	11,25	27	108.400.000	37,50	14,95	
	3	00	01	01	40		Kegiatan Penyebarluaskan Informasi Pembangunan	Jumlah kegiatan penyampaian nformasi pembangunan	12	240.000.000	-	-	2	35.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	3	00	01	02			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	72	7.276.000.000	12	602.529.100	6	277.742.000	1	49.440.500	18,75	17,80	13	651.969.600	18,23	8,96	Inspektorat
	3	00	01	02	07		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	72	335.000.000	24	156.000.000	12	3.000.000	3	3.000.000	25,00	100,00	27	159.000.000	37,50	47,46	
	3	00	01	02	09		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	72	395.000.000	24	84.230.000	12	9.000.000	3	9.000.000	25,00	100,00	27	93.230.000	37,50	23,60	
	3	00	01	02			Pengadaan Mobileur	Jumlah Pengadaan Mobileur	72	487.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	
	3	00	01	02	22		Pemel. Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	72	690.000.000	24	69.965.000	12	40.000.000	-	-	-	-	24	69.965.000	33,33	10,14	
	3	00	01	02	24		Pemel. Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	72	1.170.000.000	24	292.334.100	12	225.742.000	3	37.440.500	25,00	16,59	27	329.774.600	37,50	28,19	
	3	00	01	02			Pemel. Rutin/Berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	72	720.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	
	3	00	01	02			Pengadaan kendaraan roda 4 dan roda 2	Jumlah Pengadaan kendaraan roda 4	72	2.900.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	

1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	k	Rp	K	Rp.	K	Rp.	
	3	00	01	02		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Persentase Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	72	579.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	3	00	01	20		Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksaan dan Aparatur Pengawasan	Terlaksananya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	3.484	21.645.500.000	700	3.878.403.300	541	2.228.250.939	71	521.970.350	13,10	23,43	771	4.400.373.650	22,12	20,33	Inspektorat
	3	00	01	20	01	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah Pengawasan Internal secara Berkala	1.424	9.750.000.000	256	1.844.678.200	200	1.051.610.535	60	265.681.000	30,00	25,26	316	2.110.359.200	22,19	21,64	
	3	00	01	20	02	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda	Jumlah kasus pengaduan di lingkungan Pemerintahan Daerah	280	650.000.000	63	934.211.350	45	632.026.454	10	169.913.350	22,22	26,88	73	1.104.124.700	26,07	169,87	
	3	00	01	20	05	Inventarisasi temuan Pengawasan	Jumlah temuan pengawasan yang telah terinventarisir	9.600	321.500.000	2.279	67.647.770	1.500	24.345.000	55	900.000	3,67	3,70	2.334	68.547.770	24,31	21,32	
	3	00	01	20	06	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah Hasil Temuan Pengawasan yang telah ditindak lanjuti	9.600	9.100.000.000	1.602	696.422.600	1.500	458.379.450	300	85.476.000	20,00	18,65	1.902	781.898.600	19,81	8,59	
						Pelaksanaan Matuitas SPIP	Jumlah OPD yang mengimplemtasikan SPIP	45	666.000.000	42	59.563.500	-	-	-	-	-	-	42	59.563.500	93,33	8,94	
	3	00	01	20	15	Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah LKPD yang direview	6	300.500.000	1	96.993.600	1	16.986.500	-	-	-	-	1	96.993.600	16,67	32,28	
	3	00	01	20	18	Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dievaluasi	45	307.500.000	45	72.584.230	45	23.362.500	-	-	-	-	45	72.584.230	100,00	23,60	
	3	00	01	20	22	Evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKA Perubahan OPD	Jumlah Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Perubahan RKA yang di evaluasi	45	550.000.000	45	106.302.050	45	21.540.500	-	-	-	-	45	106.302.050	100,00	19,33	
4	3	00	01	21		Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan		42	2.160.000.000	14	505.735.350	7	228.549.000	2	46.313.051	28,57	20,26	16	552.048.401	38,10	25,56	Inspektorat
	3	00	01	21	01	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah APIP yang mengikuti diklat	72	1.725.000.000	24	445.983.350	12	199.785.000	4	46.313.051	33,33	23,18	28	492.296.401	38,89	28,54	
	3	00	01	21	03	Pelatihan Khusus Aparatur Pengawasan Pada Kantor Sendiri	Jumlah APIP yang mengikuti Pelatihan Kantor Sendiri	12	435.000.000	4	59.752.000	2	28.764.000	-	-	-	-	4	59.752.000	33,33	13,74	
II						PERENCANAAN																
1						PROGRAM PELAYANAN ADM PERKATORAN	Terpenuhinya kebutuhan adm perkantoran untuk aparatur	72	5.660.000.000	24	1.890.267.065	12	954.818.742	3	149.497.180	25,00	15,66	27	2.039.764.245	37,50	36,04	Bapedalitbang
						Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah pramu kantor yang tersedia	72	395.000.000	24	91.000.000	12	65.000.000	3,00	10.000.000	25,00	15,38	27	101.000.000	37,50	25,57	

1	2						3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	k	Rp	K	Rp.	K	Rp.	
							Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia	72	690.000.000	24	221.704.221	12	114.000.000	3,00	20.559.380	25,00	18,03	27	242.263.601	37,5	35,11	
							Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa keuangan yang tersedia	72	375.000.000	24	187.218.116	12	75.687.985,000	3	12.924.000	25,00	17,08	27	200.142.116	37,50	53,37	
							Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang tersedia	72	375.000.000	24	94.250.000	12	65.000.000	3	10.000.000	25,00	15,38	27	104.250.000	37,50	27,80	
							Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan perbaikan kerja	72	360.000.000	24	92.990.500	12	44.250.000	3,00	460.000	25,00	1,04	27	93.450.500	37,5	25,96	
							Penyediaan Alat Tulis Kantor	jumlah alat tulis kantor yang tersedia	72	390.000.000	24	69.995.249	12	37.814.729,000	3,00	9.112.300	25,00	24,10	27	79.107.549	37,5	20,28	
							Peny. Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	72	390.000.000	24	102.273.300	12	37.710.630,000	3,00	9.970.000	25,00	26,44	27	112.243.300	37,5	28,78	
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	72	165.000.000	24	54.113.400	12	24.661.665,000	3,00	6.563.700	25,00	26,61	27	60.677.100	37,5	36,77	
							Peny. Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang tersedia	72	60.000.000	24	11.371.500	12	5.400.000	3	1.305.000	25,00	24,17	27	12.676.500	37,50	21,13	
							Peny. Makanan dan Minuman	Jumlah makan dan minum yang tersedia	72	255.000.000	24	124.565.225	12	45.400.000	3,00	8.889.000	25,00	19,58	27	133.454.225	37,5	52,33	
							Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang tersedia	72	1.200.000.000	24	570.853.454	12	299.425.000	3,00	37.763.000	25,00	12,61	27	608.616.454	37,50	50,72	
							Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah jasa pengaman kantor yang tersedia	72	330.000.000	24	91.000.000	12	52.000.000	3	8.000.000	25,00	15,38	27	99.000.000	37,50	30,00	
							Rapat-rapat dan Koordinasi Dalam Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang tersedia	72	375.000.000	24	113.820.000	12	48.075.000	3	7.684.000	25,00	15,98	27	121.504.000	37,50	32,40	
							Penunjang operasional perencanaan dan pelaporan	Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia	72	300.000.000	24	65.112.100	12	40.393.733,000	3	6.266.800	25,00	15,51	27	71.378.900	37,5	23,79	
2							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terpenuhinya sarana dan prasarana bagi aparatur (bln)	72	3.762.309.000	24	1.148.682.745	12	363.655.764	3	38.469.712	25,00	10,58	27	1.187.152.457	37,50	31,55	Bapedalitbang
							Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor untuk menunjang pelaksanaan tugas (bln)	72	1.536.500.000	24	356.235.140,000	12	60.050.000	3	-	25,00	-	27	356.235.140	37,5	23,18	
							Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor	Tersediannya peralatan dan bahan kebersihan serta penataan kantor untuk pemeliharaan gedung kantor (bln)	72	831.277.000	24	294.856.650,000	12	85.577.014,000	3	879.000	25,00	1,03	27	295.735.650	37,50	35,58	

1	2						3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	k	Rp	K	Rp.	K	Rp.	
							Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersediannya BBM, service, suku cadang, jasa KIR dan pembayaran STNK bagi kendaraan dinas operasional (bln)	72	1.394.532.000	24	497.590.955,000	12	218.028.750,000	3,00	37.590.712	25,00	17,24	27	535.181.667	37,50	38,38	
3							PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN	Persentase tercapainya sinkronisasi program dan pemanfaatan ruang dengan daerah sekitar (%)	100	595.000.000	0	-	80	90.869.450	20	29.501.664	25,00	32,47	20	29.501.664	20,00	4,96	Bapedalitbang
							Koordinasi Kerjasama Pembangunan antar Daerah (Koordinasi Spasial, Kerjasama Wilayah dan Perbatasan)	terlaksananya koordinasi kebijakan pembangunan dengan daerah tetangga (bln)	48	595.000.000	0	-	12	90.869.450,000	3	29.501.664	25,00	32,47	3	29.501.664	6,25	4,96	
4							PROGRAM PENGEMBANGAN DATA INFORMASI	Terpenuhinya data sistem informasi perencanaan daerah yang valid	21	1.750.000.000	18	451.901.769,000	2	182.230.820,000	-	8.851.900	-	4,86	17,8	460.753.669	83,18	26,33	Bapedalitbang
							Forum Data kabupaten Pesisir Selatan	Tersediannya data informasi bagi pengambilan kebijakan daerah (Laporan)	6	700.000.000	2	216.415.739,000	1	61.115.802,000	0,00	2.701.900	-	4,42	2	219.117.639	33,33	31,30	
							Koordinasi Penyusunan Profil Daerah	Tersediannya data informasi bagi pengambilan kebijakan daerah (Laporan)	6	700.000.000	2	169.734.150,000	1	61.915.018,000	0,00	-	-	-	2	169.734.150	33	24,25	
							Penyebarnya Informasi Pembangunan	tersebar nya informasi pelaksanaan pembangunan	95	350.000.000	85	65.751.880,000	85	59.200.000	10,39	6.150.000	12,22	10,39	95,39	71.901.880	100	20,54	
5							PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SDA	Terwujudnya sinkronisasi rencana pembangunan daerah (%)	100	2.229.000.000	80	243.940.964	10	302.907.700	2,00	31.718.962	20,00	10,47	82	275.659.926	82,00	12,37	Bapedalitbang
							Koordinasi Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah	terlaksananya koordinasi dengan instansi mitra kerja (bln)	72	1.254.000.000	24	243.940.964	12	101.169.500,0	3,00	25.910.562	25,00	25,61	27	269.851.526	37,50	21,52	
							Koordinasi program IPDMIP Kab. P	Terkoordinasikannya kegiatan IPDMIP (bln)	48	975.000.000	0	-	12	201.738.200,000	3,00	5.808.400	25,00	2,88	3	5.808.400	0,06	0,01	
6							PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	100	810.000.000	85	1.007.779.015	5	198.670.406	0,00	31.326.400	-	15,77	85	1.039.105.415	85,00	128,28	Bapedalitbang
							Penyusunan perubahan RTRW Kab. Pessel	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian terhadap pemanfaatan	1	810.000.000	-	1.007.779.015	1	198.670.406	0,00	31.326.400	-	15,77	0	1.039.105.415	0	128,28	
7							PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	Terwujudnya sinkronisasi rencana pembangunan daerah (%)	100	932.612.000	80	287.280.483	10	112.099.447	3,00	10.167.000	30,00	9,07	83	297.447.483	83,00	31,89	Bapedalitbang
							Koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah	Buku Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (dok)	6	932.612.000	2	287.280.483	1	112.099.447	17,50	10.167.000	1.750,00	9,07	19,5	297.447.483	325,00	31,89	

1	2						3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	k	Rp	K	Rp.	K	Rp.	
8							PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Terwujudnya sistem perencanaan daerah yang berkualitas dan partisipatif	100	8.790.000.000	90	2.233.999.002	5	970.488.300	0	146.427.050	-	15,09	90	2.380.426.052	90,00	27,08	Bapedalitbang
							Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	terselenggaranya musrenbang kabupaten (kali)	6	1.050.000.000	2	299.954.806	1	174.872.452	1	77.930.200	100,00	44,56	3	377.885.006	50,00	35,99	
							Penyusunan Rancangan RKPD	Tersusunnya dokumen RKPD perencanaan daerah (dok)	6	700.000.000	2	157.512.225	1	64.692.289	0	16.129.600	-	24,93	2	173.641.825	33,33	24,81	
							Penyusunan Nota Kesepakatan KUA dan PPA APBD Kab. Pessel	Tersusunnya dokumen perencanaan penganggaran daerah (dok)	12	1.190.000.000	4	283.467.800	2	80.143.796	0	8.493.200	-	10,60	4	291.961.000	33,33	24,53	
							Penyusunan Nota Kesepakatan KUA dan PPA APBD Perubahan	Tersusunnya dokumen perencanaan penganggaran	12	1.190.000.000	4	254.892.160	2	80.032.882	0	-	-	-	4	254.892.160	33,33	21,42	
							Penyusunan PERDA RPJMD Kab.	Tersusunnya Perda/Revisi perda RPJMD (dok)	1	1.100.000.000	-	455.684.368	1	104.079.136	0	3.115.900	-	2,99	0	458.800.268	-	41,71	
							Fasilitasi dan sinkronisasi RPJM Nagari	Terlaksanannya fasilitasi dan sinkronisasi RPJM Nagari (nagari)	182	500.000.000	37	155.578.950	104	126.200.005.000	5,00	270.000	4,81	0,21	42	155.848.950	23,08	31,17	
							Koodinasi penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah	Terkoordinasinya proses penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD (bln)	16	400.000.000	0	-	12	98.921.396.000	3,00	9.553.500	25,00	9,66	3	9.553.500	18,75	2,39	
							Pengelolaan Sistem Informasi perencanaan pembangunan Daerah	Terkelolanya perencanaan pembangunan daerah secara lebih komprehensif (dok)	72	1.250.000.000	24	382.558.049	12	105.954.870.000	0,00	12.632.000	-	11,92	24	395.190.049	33,33	31,62	
							Evaluasi RKPD	Laporan triwulan evaluasi RKPD (dok)	20	450.000.000	4	68.338.950	4	64.810.964.000	0,00	6.559.650	-	10,12	4	74.898.600	20,00	16,64	
							Monitoring, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana pembangunan	Laporan triwulan hasil movev pelaksanaan DAK dan TP (dok)	24	960.000.000	8	176.011.694	4	70.780.510.000	0,00	11.743.000	-	16,59	8	187.754.694	33,33	19,56	
9							PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR	Terwujudnya sinkronisasi rencana pembangunan kawasan perkotaan (%)	100	1.787.000.000	80	329.273.993	10	172.623.600	2,00	65.234.100	20,00	37,79	82	394.508.093	82,00	22,08	Bapedalitbang
							Koordinasi program pembangunan sanitasi dan permukiman (PPSP)	Terkoordinasikannya pelaksanaan program AMPL dan PPSP (dok)	5	527.000.000	1	106.804.793	1	59.914.600.000	0,00	59.914.600	-	100,00	1	166.719.393	20	31,64	
							Penunjang Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat (PAMSIMAS)	Terkoordinasikannya pelaksanaan program Pamsimas	6	1.260.000.000	2	222.469.200	1	112.709.000	0,00	5.319.500	-	4,72	2	227.788.700	33,33	18,08	

1	2						3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	k	Rp	K	Rp.	K	Rp.	
10							PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA	Terwujudnya sinkronisasi rencana pembangunan daerah (%)	100	1.398.918.000	80	258.780.709	8	125.451.809	2,00	9.893.000	25,00	7,89	82	268.673.709	82,00	19,21	Bapedalitbang
							Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Terkoordinasikannya perencanaan pembangunan lingkup bidang sosial budaya (bin)	72	1.398.918.000	24	258.780.709	12	125.451.809	3,00	9.893.000	25,00	7,89	27	268.673.709	37,50	19,21	
11							PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	Terwujudnya sinkronisasi rencana pembangunan daerah (%)	100	1.299.458.500	80	330.469.848	10	135.099.600	3,00	23.024.824	30,00	17,04	83,00	353.494.672	83,00	27,20	Bapedalitbang
							Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Terkoordinasikannya perencanaan pembangunan lingkup bidan ekonomi	6	600.000.000	2	168.055.682	1	89.223.600	1,00	11.947.700	100,00	13,39	3	180.003.382	50,00	30,00	
							Kegiatan koodinasi percepatan pemb. Kawasan perdesaan	Terwujudnya akselerasi pembangunan di Kawasan Pedesaan	6	699.458.500	2	162.414.166	1	45.876.000	1,00	11.077.124	100,00	24,15	3	173.491.290	50,00	24,80	
8							PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Terwujudnya sistem perencanaan daerah yang berkualitas dan partisipatif	100	525.000.000	90	76.246.300	5	57.734.164	0	18.661.420	-	32,32	90	94.907.720	90,00	18,08	Bapedalitbang
							Koordinasi Penyusunan TAPKIN	Tersusunnya kontrak kinerja / RKT SKPD (dok)	10	525.000.000	2	76.246.300	2	57.734.164	1,00	18.661.420	50,00	32,32	3	94.907.720	30,00	18,08	
III							KEUANGAN																
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH																							
1	3	00	03	01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		72	9.596.926.960	24	2.241.606.193	12	1.529.446.675	3	161.531.792	25,00	10,56	27	2.403.137.985	37,50	25,04	BPKD
	3	00	03	01	02		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya dana untuk jasa pelayanan rek air, listrik dan Telp (bulan)	72	1.032.900.000	24	287.896.053	12	167.400.000	3	42.712.654	25,00	25,52	27	330.608.707	37,50%	32,01%	
	3	00	03	01	07		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya dana Administrasi Jasa Pengelolaan Keuangan Daerah dalam 1 Tahun (bulan)	72	4.152.757.712	24	461.759.940	12	841.996.200	3	30.434.566	25,00	3,61	27	492.194.506	37,50%	11,85%	
	3	00	03	01	08		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor (bulan)	72	957.500.000	24	287.010.570	12	152.250.000	3	-	25,00	-	27	287.010.570	37,50%	29,97%	
	3	00	03	01	10		Penyediaan alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor (bulan)	72	320.908.386	24	109.499.082	12	31.898.768	3	1.695.300	25,00	5,31	27	111.194.382	37,50%	34,65%	
	3	00	03	01	11		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan (bulan)	72	243.141.229	24	79.200.836	12	34.130.530	3	2.475.000	25,00	7,25	27	81.675.836	37,50%	33,59%	
	3	00	03	01	12		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi listrik/Penerangan Kantor (bulan)	72	131.754.000	24	26.495.020	12	14.850.000	3	7.451.000	25,00	50,18	27	33.946.020	37,50%	25,76%	
	3	00	03	01	15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan (bulan)	72	123.740.000	24	14.390.000	12	13.900.000	3	680.000	25,00	4,89	27	15.070.000	37,50%	12,18%	

1	2						3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	k	Rp	K	Rp.	K	Rp.	
	3	00	03	01	17		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum rapat, tamu dan pegawai (piket kantor) (bulan)	72	408.485.000	24	126.600.450	12	63.475.000	3	8.565.200	25,00	13,49	27	135.165.650	37,50%	33,09%	
	3	00	03	01	18		Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah (bulan)	72	1.329.898.900	24	572.719.419	12	126.594.700	3	48.368.792	25,00	38,21	27	621.088.211	37,50%	46,70%	
	3	00	03	01	20		Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah (bulan)	72	313.189.600	24	134.588.874	12	47.300.000	3	14.347.000	25,00	30,33	27	148.935.874	37,50%	47,55%	
	3	00	03	01	22		Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	Tersusunnya Dokumen Anggaran dan Pelaporan Pelaksanaan Pertanggungjawaban SKPD (bulan)	72	582.652.133	24	120.861.449	12	35.651.477	3	4.802.280	25,00	13,47	27	125.663.729	37,50%	21,57%	
							Penyusunan Rencana Strategis	Tersusunnya Renstra SKPD			1	20.584.500	1	-	0	-	-	#DIV/0!	1	20.584.500			
2	3	00	03	02			Program Penyediaan Sarana Prasarana Aparatur		72,00	17.905.015.886	24	5.698.867.511	12	1.824.490.750	3	220.256.402	25,00	12,07	27	5.919.123.913	37,50	33,06	BPKD
	3	00	03	02	05		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional (unit)	35	13.655.656.840	17	4.540.713.960	3	1.400.330.000	0	132.407.889	-	9,46	17	4.673.121.849	48,57%	34,22%	
	3	00	03	02	07		Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Terpenuhiya kebutuhan Perlengkapan gedung kantor (unit)	25	448.000.000	3	128.838.700	0	-	0	-			3	128.838.700	12,00%	28,76%	
	3	00	03	02	09		Pengadaan Peralatan gedung kantor	Terpenuhiya kebutuhan peralatan gedung kantor (unit)	33	225.043.296	7	210.539.500	0	-	0	-			7	210.539.500	21,21%	93,56%	
	3	00	03	02	10		Pengadaan Meubiler		50	159.000.000	8	22.930.000	0	-	0	-			8	22.930.000	16,00%	14,42%	
	3	00	03	02	22		Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor (unit)	6	1.244.800.000	2	484.921.280	1	185.400.000	0	35.947.000	-	19,39	2	520.868.280	33,33%	41,84%	
	3	00	03	02	24		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Opeasional (Kendaraan Roda4 dan Roda 2) (bulan)	72	1.402.115.750	24	263.493.151	12	203.760.750	3	36.781.786	25,00	18,05	27	300.274.937	37,50%	21,42%	
	3	00	03	02	26		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Kantor (bulan)	72	770.400.000	24	47.430.920	12	35.000.000	3	15.119.727	25,00	43,20	27	62.550.647	37,50%	8,12%	
3	3	00	03	06			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tercapainya Optimalisasi Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	90%	1.826.496.241,00	60%	488.032.064,00	10%	274.930.626,00	0	1.409.463	-	0,51	60%	489.441.527	66,67	26,80	BPKD
	3	00	03	06	01		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tertibnya pengelolaan keuangan daerah (buku)	1320	719.742.336	440	192.438.303	220	95.000.000	0	-	-	-	440	192.438.303	33,33%	26,74%	
	3	00	03	06	02		Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Tersedianya informasi keuangan semester (buku)	1080	452.640.035	440	115.508.498	160	58.165.001	0	-	-	-	440	115.508.498	40,74%	25,52%	

1	2						3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
	K	Rp.							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	k	Rp	K	Rp.	K	Rp.			
	3	00	03	06	04		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Terpenuhinya informasi keuangan daerah yang transparansi (buku)	540	654.113.870	180	180.085.263	90	121.765.625	0	1.409.463	-	1,16	180	181.494.726	33,33%	27,75%	
4	3	00	03	15			Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Tersosialisanya program PD melalui promosi	100	116.000.000	80	14.802.291	5	16.000.000	0	-	-	-	80	14.802.291	80,00	12,76	BPKD
	3	00	03	15	10		Pelaksanaan Festival Langkisau	Terlaksananya Pameran pada Festival Langkisau (persen)	6	116.000.000	2	14.802.291	1%	16.000.000	25%	-	2.500,00	-	225%	14.802.291	37,50%	12,76%	
5	3	00	03	20			Program Peningkatan Sistem Pegawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tercapainya pencegahan kerugian negara	100	838.611.213	95	257.419.968	3	118.893.022	0	-	-	-	95	257.419.968	95,00	30,70	BPKD
	3	00	03	20	33		Penanganan Kasus dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	Terlaksananya peningkatan sistem Pengawasan Internal (persen)	6	838.611.213	2	257.419.968	1	118.893.022	0%	-	-	-	200%	257.419.968	33,33%	30,70%	
6	3	00	03	17			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	dokumen apbd dan p-apbd tepat waktu (dokumen)	4	17.868.881.298	4	4.433.625.297	4	2.505.710.841	0	235.502.538	-	9,40	4	4.669.127.835	100,00	26,13	BPKD
								Persentase perangkat daerah yang tertib Penatausahaan Barang Milik Daerah (persen)	75%		75%		75%	0	-	-	-	75%	-	100,00			
								Persentase penyelesaian administrasi keuangan sesuai SOP	100%		100%		100%	0	-	-	-	100%	-	100,00			
	3	00	03	17	02		Penyusunan Standar Satuan Harga	Tersusunnya Standar Harga (buku)	790	486.666.048	230	160.014.900	0	-	0	-			230	160.014.900	29,11%	32,88%	
	3	00	03	17	06		Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Tersedianya Buku Rancangan Perda tentang APBD (buku)	600	1.221.430.489	200	357.334.505	100	196.890.457	0	42.616.407	-	21,64	200	399.950.912	33,33%	32,74%	
	3	00	03	17	07		Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	Tersedianya Buku Rancangan Perda tentang Penjabaran APBD (buku)	600	1.058.850.607	200	281.189.370	100	167.936.775	0	46.548.395	-	27,72	200	327.737.765	33,33%	30,95%	
	3	00	03	17	08		Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Tersedianya Buku Rancangan Perda tentang Perubahan APBD (buku)	600	1.711.872.584	200	284.256.381	100	153.557.528	0	-	-	-	200	284.256.381	33,33%	16,60%	
	3	00	03	17	09		Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersedianya Buku Rancangan Perda tentang Penjabaran Perubahan APBD (buku)	600	1.071.506.464	200	280.639.120	100	151.435.488	0	-	-	-	200	280.639.120	33,33%	26,19%	
	3	00	03	17	10		Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tercapainya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah (buku)	540	850.803.806	180	204.884.903	90	110.112.302	0	7.112.966	-	6,46	180	211.997.869	33,33%	24,92%	

1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	k	Rp	K	Rp.	K	Rp.	
	3	00	03	17	11	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tercapainya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah (buku)	540	841.680.012	180	194.962.670	90	113.935.421	0	7.139.115	-	6,27	180	202.101.785	33,33%	24,01%	
	3	00	03	17	20	Penyusunan DPA SKPD	Tersedianya buku DPA SKPD (buku)	3.096	818.642.648	1032	239.956.202	516	96.454.216	0	12.512.102	-	12,97	1032	252.468.304	33,33%	30,84%	
	3	00	03	17	22	Penghapusan Barang - barang Inventaris	Terlaksananya Proses Penghapusan Barang-barang Inventaris (bulan)	72	492.608.279	24	138.133.012	12	50.177.192	3	10.391.975	25,00	20,71	27	148.524.987	37,50%	30,15%	
	3	00	03	17	28	Penyusunan DPA Perubahan SKPD	Tersedianya buku DPA Perubahan SKPD (buku)	3.096	690.444.044	1032	185.302.575	516	81.031.348	0	-	-	-	1032	185.302.575	33,33%	26,84%	
	3	00	03	17	29	Penunjang Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah (bulan)	72	2.509.900.114	24	1.009.262.760	12	403.648.070	3	30.030.517	25,00	7,44	27	1.039.293.277	37,50%	41,41%	
	3	00	03	17	41	Pengelolaan dan Penatausahaan Gaji PNSD	Terlaksananya Pengloaan dan Penatausahaan Gaji ASN (bulan)	72	561.795.159	24	176.112.919	12	92.062.955	3	30.030.517	25,00	32,62	27	206.143.436	37,50%	36,69%	
	3	00	03	17	42	Pengelolaan dan Penatausahaan Kas Daerah	Terwujudnya Pengelolaan dan Penatausahaan Kas Daerah (persen)	500	276.426.716	100	48.522.501	100	51.428.705	25	12.988.724	25,00	25,26	125	61.511.225	25,00%	22,25%	
	3	00	03	17	57	Verifikasi Rencana Kebutuhan Barang dan Pemeliharaan Barang	Terlaksananya verifikasi rencana kebutuhan barang dan Pemeliharaan Barang (bulan)	60	350.420.624	12	46.428.710	0	-	0	-	-	-	12	46.428.710	20,00%	13,25%	
	3	00	03	17	43	Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Daerah	Tertatanya Manajemen Aset Daerah dengan Baik	3.930	1.090.793.320	1698	826.624.769	0	-	0	-	-	-	1698	826.624.769	43,21%	75,78%	
	3	00	03	17	57	Penyusunan rancangan kebutuhan barang dan pemeliharaan	Terlaksananya penyusunan rencana kebutuhan barang dan Pemeliharaan Barang (bulan)	48	219.592.389	0	-	12	39.592.389	3	1.102.000	25,00	2,78	3	1.102.000	6,25%	0,50%	
	3	00	03	17	75	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	(buku)	2.400	922.792.510	0	-	600	205.792.510	0	14.022.463	-	6,81	0	14.022.463	0,00%	1,52%	
	3	00	03	17	79	Bimbingan Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah	(persen)	400	663.466.849	0	-	100	153.466.849	25	-	25,00	-	25	-	6,25%	0,00%	
	3	00	03	17	80	Pembinaan Laporan Keuangan OPD	(unit SKPD)	180	319.077.313	0	-	45	96.077.313	0	12.627.500	-	13,14	0	12.627.500	0,00%	3,96%	
	3	00	03	17	82	Revisi Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Beneri Salatan	(buku)	360	285.087.356	0	-	90	45.087.356	0	-	-	-	0	-	0,00%	0,00%	
	3	00	03	17	83	Penyusunan Standar Biaya	(buku)	400	405.789.327	0	-	100	87.789.327	0	8.379.857	-	9,55	0	8.379.857	0,00%	2,07%	
	3	00	03	17	84	Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD	(persen)	400	253.998.705	0	-	100	43.998.705	25	-	25,00	-	25	-	6,25%	0,00%	
	3	00	03	17	86	Bimnngan Teknis Belanja Non Tunai	(persen)	400	765.235.935	0	-	1	165.235.935	25	-	2.500,00	-	25	-	6,25%	0,00%	

1	2						3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	k	Rp	K	Rp.	K	Rp.	
7							Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan keuangan Kabupaten Kota	Persentase OPD yang memenuhi kualitas penatausahaan keuangan	90%	3.499.812.182	90%	693.664.662	90%	177.026.256	0	36.519.222	-	20,63	90%	730.183.884	100,00	20,86	BPKD
	3	00	03	18	06		Analisa APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018	Tersedianya Buku Analisa APBD (buku)	240	380.076.292	80	69.066.135	40	55.404.764	0	-	-	-	80	69.066.135	33,33%	18,17%	
							Asistensi Penataan Hibah dan Bantuan Sosial	Tersalurnya Dana Hibah dan Bantuan Sosial (bulan)	72	316.212.864	24	157.746.322	0	-	0	-			24	157.746.322	33,33%	49,89%	
	3	00	03	18	09		Pengelolaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial	Tersalurnya Dana Hibah dan Bantuan Sosial (bulan)	72	456.134.330	24	126.849.549	12	66.420.690	3	16.781.942	25,00	25,27	27	143.631.491	37,50%	31,49%	
	1	20	28	18	11		Penyusunan dan Sosialisasi pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2017	Tersedianya buku pedoman pelaksanaan kegiatan (buku)	1.200	962.188.806	400	165.748.260	0	-	0	-			400	165.748.260	33,33%	17,23%	
	3	00	03	18	12		Analisa Standar belanja Kabupaten Pesisir Selatan	Tersedianya Analisa Standar Belanja (buku)	500	1.059.999.088	100	174.254.396	0	-	0	-			100	174.254.396	20,00%	16,44%	
	3	00	03	18	13		Rekonsiliasi dana Transfer ke Daerah	(persen)	400	325.200.802	0	-	100	55.200.802	25	19.737.280	25,00	35,76	25	19.737.280	6,25%	6,07%	
8	3	00	03	19			Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari	Terbina dan meningkatnya Pengetahuan Sumber daya	90%	1.779.601.815	90%	498.233.339,00	90%	139.792.863,00	0	48.013.983	-	34,35	90%	546.247.322	100,00	30,69	BPKD
	3	00	03	19	09		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Nagari	Terlaksananya tertib administrasi pengelolaan keuangan nagari (nagari)	1092	373.472.746	364	96.134.892	182	36.642.282	0	20.014.368	-	54,62	364	116.149.260	33,33%	31,10%	
	3	00	03	19	10		Monitoring dan Evaluasi dana Transfer ke Nagari	Terevaluasinya dana transfer ke nagari (bulan)	72	351.118.231	24	199.344.635	12	42.116.855	3	27.999.615	25,00	66,48	27	227.344.250	37,50%	64,75%	
	3	00	03	19	16		Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Kas Daerah	(persen)	400	361.033.726	0	-	100	61.033.726	25	-	25,00	-	25	-	6,25%	0,00%	
	3	00	03	19	12		TOT Aplikasi SIMDA DESA (Nagari)	Terselenggaranya TOT Aplikasi Siskuedes (persen)	600	693.977.112	200	202.753.812	0	-	0	-			200	202.753.812	33,33%	29,22%	
BADAN PENDAPATAN DAERAH																							
1	3	00	03	02	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	3.262.934.167	40	726.423.971	20	614.317.911	27	164.870.403	134,19	26,84	67	891.294.374	66,84	27,32	Badan Pendapatan
	3	00	03	02	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	60	360.676.157	12	57.413.580	12	52.800.000	3	10.935.903	25,00	20,71	15,00	68.349.483	25,00	18,95	
	3	00	03	02	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersusunnya Laporan Keuangan (Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan)	60	916.665.188	12	111.142.150	12	210.450.000	3	33.000.000	25,00	15,68	15	144.142.150	25,00	15,72	
	3	00	03	02	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terciptanya suasana kantor yang bersih dan nyaman	60	69.912.849	12	30.104.000	12	47.585.000	3	1.000.000	25,00	2,10	15	31.104.000	25,00	44,49	
	3	00	03	02	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor dalam 12 Bulan	60	191.141.155	12	43.714.000	12	28.386.711	3	5.850.000	25,00	20,61	15	49.564.000	25,00	25,93	

1	2						3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	k	Rp	K	Rp.	K	Rp.	
	3	00	03	02	01	11	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan	60	139.854.012	12	28.675.000	12	24.000.000	3	3.553.100	25,00	14,80	15	32.228.100	25,00	23,04	
	3	00	03	02	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kebutuhan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60	88.070.026	12	13.412.500	12	16.180.040	3	-	25,00	-	15	13.412.500	25,00	15,23	
	3	00	03	02	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Buku Referensi Perundang-undangan	60	43.400.000	12	4.920.000	12	5.000.000	3	4.800.000	25,00	96,00	15	9.720.000	25,00	22,40	
	3	00	03	02	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya makan-minum tamu dan piket	60	332.784	12	57.636.000	12	44.070.000,00	3	15.144.400	25,00	34,36	15	72.780.400	25,00	21870,15	
	3	00	03	02	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	60	812.554.925	12	220.682.041	12	102.967.500	3	56.812.000	25,00	55,17	15	277.494.041	25,00	34,15	
	3	00	03	02	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	60	470.861.300	12	112.821.500,000	12	58.230.000	3,00	33.775.000,00	25,00	58,00	15	146.596.500	25,00	31,13	
	3	00	03	02	01	22	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan (Renja, Renstra, KUA PPAS,	60	169.465.771	12	45.903.200,000	12	24.648.660	3,00	-	25,00	-	15	45.903.200	25,00	27,09	
2	3	00	03	02	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	2.256.160.505	30	676.185.300	17	379.975.000	13	49.243.345	76,95	12,96	43	725.428.645	42,93	32,15	Badan Pendapatan
	3	00	03	02	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	100	1.273.397.255	29	370.482.000	16	200.000.000	0,6	1.200.000	3,82	0,60	29,69	371.682.000	29,69	29,19	
	3	00	03	02	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	100	372.275.000	52	191.892.000	5	20.000.000	73,75	14.750.000	1.372,76	73,75	125,30	206.642.000	125,30	55,51	
	3	00	03	02	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	100	555.488.250	20	113.811.300	19	104.975.000	27,48	28.843.345	145,39	27,48	47,96	142.654.645	47,96	25,68	
	3	00	03	02	02	130	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	Terlaksananya Operasional kantor	100	55.000.000	-	-	100	55.000.000	8,09	4.450.000	8,09	8,09	8,09	4.450.000	8,09	8,09	
3	3	00	03	02	15		Program Pengembangan Data/Informasi	Terlaksananya pengembangan Data/Informasi	100	256.245.000	-	-	18	45.000.000	11,11	5.000.000	63,27	11,11	11,11	5.000.000	11,11	1,95	Badan Pendapatan
	3	00	03	02	15	11	Penyebarnya Informasi Pembangunan	Tersusunnya Laaporan Capaian Kinerja	100	256.245.000	-	-	18	45.000.000	11,11	5.000.000	63,27	11,11	11,11	5.000.000	11,11	1,95	

[illegible]

1	2						3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	k	Rp	K	Rp.	K	Rp.	
1	3	00	04	01	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran (bln)	72	3.694.120.000	24	1.368.084.000	12	566.197.922	3	108.672.777	25,00	19,19	27	1.476.756.777	37,50	39,98	BKPSDM
	3	00	04	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air dan Listrik	Tersedianya jasa telpon, sumber daya air dan listrik (bln)	72	442.480.000	24	198.880.000	12	60.900.000	3	15.227.285	25,00	25,00	27	214.107.285	37,50	48,39	
	3	00	04	01	01	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasaperalatan dan perlengkapan kantor (bln)	72	53.402.000	24	15.954.000	12	9.362.784	3	3.693.200	25,00	39,45	27	19.647.200	37,50	36,79	
	3	00	04	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya pembayaran/honorarium tenaga administrasi keuangan BKPSDM	72	631.032.000	24	250.182.000	12	64.200.000	3	12.450.000	25,00	19,39	27	262.632.000	37,50	41,62	
	3	00	04	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya petugas kebersihan kantor (bln)	72	255.000.000	24	47.000.000	12	52.000.000	3	11.000.000	25,00	21,15	27	58.000.000	37,50	22,75	
	3	00	04	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor untuk operasional BKPSDM (bln)	72	221.973.000	24	82.295.000	12	34.295.038	3	6.729.592	25,00	19,62	27	89.024.592	37,50	40,11	
	3	00	04	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan pada BKPSDM (bln)	72	302.143.000	24	112.815.000	12	47.332.000	3	6.713.000	25,00	14,18	27	119.528.000	37,50	39,56	
	3	00	04	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik bangunan kantor BKPSDM (bln)	72	75.025.000	24	44.913.000	12	7.528.100	3	740.300	25,00	9,83	27	45.653.300	37,50	60,85	
	3	00	04	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan (koran) dan peraturan perundang-undangan (bln)	72	77.119.000	24	24.519.000	12	25.900.000	3	752.000	25,00	2,90	27	25.271.000	37,50	32,77	
	3	00	04	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman pada BKPSDM (bln)	72	240.333.000	24	69.613.000	12	42.680.000	3	5.367.500	25,00	12,58	27	74.980.500	37,50	31,20	
	3	00	04	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terwujudnya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan instansi terkait (bln)	72	832.905.000	24	363.705.000	12	117.300.000	3	28.622.700	25,00	24,40	27	392.327.700	37,50	47,10	
	3	00	04	01	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terwujudnya koordinasi dan konsultasi kedalam daerah dengan instansi terkait (bln)	72	398.565.000	24	139.065.000	12	64.700.000	3	17.137.200	25,00	26,49	27	156.202.200	37,50	39,19	
	3	00	04	01	01	40	Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Tersampainya informasi pembangunan (Festival Langkisau, Pawai Legoris, Acara HUT RI) (bln)	72	164.143.000	24	19.143.000	12	40.000.000	3	240.000	25,00	0,60	27	19.383.000	37,50	11,81	
2	3	00	04	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya layanan sarpras bagi aparatur (bln)	72	2.899.457.000	24	966.702.000	12	576.617.000	3	29.234.476	25,00	5,07	27	995.936.476	37,50	34,35	BKPSDM

1	2						3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	k	Rp	K	Rp.	K	Rp.	
	3	00	04	01	02		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (jenis)	112	783.962.000	72	314.162.000	12	224.700.000	0	-	-	-	72	314.162.000	64,29	40,07	
	3	00	04	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (unit)	27	437.880.000	11	70.260.000	2	2.500.000	0	-	-	-	11	70.260.000	40,74	16,05	
	3	00	04	01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya secara rutin/berkala Gedung Kantor (jenis)	10	864.819.000	4	317.885.000	2	181.800.000	0	-	-	-	4	317.885.000	40,00	36,76	
	3	00	04	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara secara rutin/berkala (%)	500	595.731.000	200	194.286.000	100%	129.825.000	20	23.667.476	2.000,00	18,23	220	217.953.476	44,00	36,59	
	3	00	04	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala (unit)	342	217.065.000	137	70.109.000	77	37.792.000	17	5.567.000	22,08	14,73	154	75.676.000	45,03	34,86	
3	3	00	04	01	31		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	tersedianya ASN yang profesional (org)	17669	9.643.715.000	6140	2.849.692.092	2548	1.340.437.898	1850	319.993.969	72,61	23,87	7990	3.169.686.061	45,22	32,87	BKPSDM
	3	00	04	01	31	02	Seleksi Penerimaan Calon PNS	Jumlah Pelamar yang Mengikuti Seleksi dan Diterima Menjadi PNS (orang)	1004	770.850.000	204	171.113.600	200	106.218.674	0	1.899.669	-	1,79	204	173.013.269	20,32	22,44	
	3	00	04	01	31	11	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	Jumlah PNS yang Mendapatkan Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas (orang)	390	2.283.364.000	173	839.987.584	20	188.593.300	6	22.250.000	30,00	11,80	179	862.237.584	45,90	37,76	
	3	00	04	01	31	26	Penyelenggaraan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan	Jumlah sidang yang dilakukan oleh Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (kali)	56	313.969.000	137	111.369.144	12	74.830.900	8	21.405.200	66,67	28,60	145	132.774.344	258,93	42,29	
	3	00	04	01	31	49	Pengambilan Sumpah PNS dan Pelantikan Jabatan	Jumlah diadakan acara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Jabatan (kali)	53	176.623.000	5	31.189.500	12	36.358.150	5	10.477.100	41,67	28,82	10	41.666.600	18,87	23,59	
	3	00	04	01	31	35	Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi	Jumlah Peserta Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (orang)	235	1.131.798.000	73	258.321.000	27	213.476.300	27	116.042.840	100,00	54,36	100	374.363.840	42,55	33,08	
	3	00	04	01	31	25	Penyelenggaraan Majelis Pertimbangan Pegawai	Jumlah sidang yang dilakukan oleh Tim Majelis Pertimbangan Pegawai (kali)	34	231.324.000	10	76.602.682	6	39.717.850	2	10.200.000	33,33	25,68	12	86.802.682	35,29	37,52	
	3	00	04	01	31	40	Pemberian Satyalencana Karya Satya X, XX, dan XXX Tahun	Jumlah berkas PNS yang diusulkan untuk menerima Satya lencana karya satya X, XX, dan XXX Tahun (berkas)	1050	135.000.000	297	81.807.412	150	41.228.168	127	1.500.000	84,67	3,64	424	83.307.412	40,38	61,71	
	3	00	04	01	31	16	Penyusunan Formasi PNS	Tercapainya Penyusunan Formasi PNS (orang)	12216	518.711.000	4220	210.269.559	1666	77.149.870	1666	29.852.910	100,00	38,69	5886	240.122.469	48,18	46,29	
	3	00	04	01	31	36	Pengelolaan administrasi mutasi pegawai	Jumlah PNS yang melakukan Mutasi Pindah dan Mutasi Jabatan fungsional (orang)	766	210.735.000	161	45.402.090	200	30.072.500	0	3.290.750	-	10,94	161	48.692.840	21,02	23,11	

1	2						3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	k	Rp	K	Rp.	K	Rp.	
	3	00	04	01	31	39	Pemeriksaan Kasus PNS dan Masalah Perceraian	Jumlah PNS yang melanggar disiplin dan masalah perceraian yang diberikan rekomendasi (orang)	237	213.661.000	57	44.699.340	30	18.962.800	9	3.399.500	30,00	17,93	66	48.098.840	27,85	22,51	
	3	00	04	01	31	42	Pemetaan Potensi Pejabat Struktural	Jumlah peserta yang mengikuti pemetaan potensi pejabat struktural (orang)	1628	1.067.334.000	803	463.487.181	225	153.846.550	0	-	-	-	803	463.487.181	49,32	43,42	
	3	00	04	01	31	38	Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)	Jumlah data PNS yang dentry dalam jaringan database (data)	35778	324.996.000	7178	158.533.000	2700	40.449.100	606	6.623.000	22,44	16,37	7784	165.156.000	22	50,82	
	3	00	04	01	31	56	Pengelolaan Administrasi Kepangkatan dan Pemakaian Gelar Pegawai	Jumlah berkas PNS yang diproses untuk usulan kenaikan pangkat dan pemakaian gelar (berkas)	8340	1.057.125.000	1240	195.259.000	1600	151.704.986	1056	56.963.000	66,00	37,55	2296	252.222.000	28	23,86	
	3	00	04	01	31	37	Pengelolaan Administrasi Pensiun Pegawai	Jumlah berkas PNS yang diproses untuk usulan BUP, janda/duda, APS dan MPP (berkas)	1257	473.851.000	208	83.148.000	200	43.401.950	49	1.554.000	24,50	3,58	257	84.702.000	20,45	17,88	
	3	00	04	01	31	53	Pembekalan ASN yang memasuki purnabakti	Jumlah PNS yang mengikuti pembekalan sebelum pensiun (orang)	405	297.969.000	0	-	105	72.969.600	86	21.790.000	81,90	29,86	86	21.790.000	21,23	7,31	
	3	00	04	01	31	22	Pengelolaan administrasi karpeg, karis/karsu dan taspen	Jumlah berkas PNS yang diproses usulan karpeg, karis/karsu dan taspen (berkas)	2110	225.596.000	448	48.135.000	200	34.168.100	244	11.883.000	122,00	34,78	692	60.018.000	32,80	26,60	
	3	00	04	01	31	28	Pelaksanaan Pengkoreksian Angka Kredit	Jumlah berkas PNS yang diproses untuk usulan pengkoreksian angka kredit bagi jabatan fungsional (berkas)	5621	210.809.000	946	30.368.000	1050	17.289.100	493	863.000	46,95	4,99	1439	31.231.000	25,60	14,81	
4	3	00	04	01	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terselenggaranya pelaporan Kinerja dan keuangan (bln)	72	113.071.000	24	21.953.000	12	14.918.220	3	-	25,00	-	27	21.953.000	37,50	19,42	BKPSDM
	3	00	04	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen laporan akuntabilitas kinerja BKPSDM (laporan)	66	113.071.000	22	21.953.000	11	14.918.220	0	-	-	-	22	21.953.000	33,33	19,42	
5	3	00	04	01	29		Program Pendidikan Kedinasan	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan sesuai jenjang	1032	9.060.887.000	220	2.538.297.846	138	1.576.003.442	102	274.741.831	73,91	17,43	322	2.813.039.677	31,20	31,05	BKPSDM
	3	00	04	01	29	06	Peningkatan keterampilan dan profesionalisme	Jumlah PNS yang Mengikuti Pendidikan Pim II dan Pim III (orang)	56	3.490.679.000	20	1.175.626.246	12	562.932.950	6	10.733.000	50,00	1,91	26	1.186.359.246	46,43	33,99	

1	2						3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	k	Rp	K	Rp.	K	Rp.	
	3	00	04	01	29	08	Diklat Kepemimpinan Tk. IV	Jumlah Pegawai ASN yang mengikuti Diklat PIM Tk. IV (orang)	180	3.346.888.000	60	998.233.000	30	703.005.450	30	135.472.729	100,00	19,27	90	1.133.705.729	50,00	33,87	
	3	00	04	01	29	07	Diklat Prajabatan bagi Calon PNS	Jumlah Peserta yang Mengikuti Diklat Prajabatan (orang)	646	1.705.162.000	140	364.438.600	66	166.907.302	66	126.232.102	100,00	75,63	206	490.670.702	31,89	28,78	
	3	00	04	01	29	09	Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Pegawai ASN yang mengikuti Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah (orang)	150	518.158.000	0	-	30	143.157.740	0	2.304.000	-	1,61	0	2.304.000	0,00	0,44	
V							PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																
1							PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH	Terwujudnya sisten inovasi daerah	11,5	892.976	3,5	160.434	5	89.825	0	4.627	-	5,15	3,50	165.061	30,43	18,48	Bapedalitbang
							pengembangan inovasi pada generasi muda	Terciptanya inovasi pada generasi muda (inovasi)	18	492.976	6	72.170	9	89.825	0	4.627	-	5,15	6,00	76.797	33,33	15,58	
							Forum Inovasi Daerah	Terkoordinasinya dewan riset daerah	5	400.000	1	88.264	1,00	-	0	-	-		1,00	88.264	20,00	22,07	
2							PROGRAM PENELITIAN , PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN SDM & IPTEK DAERAH	Terselenggaranya kajian kebijakan pembangunan yang berkualitas (jml kajian)	20	2.621.642	2	204.800	3	510.820	0,00	43.541	-	8,52	2	248.341	10,00	9,47	Bapedalitbang
							Koordinasi kelitbangan	Meningkatnya kerjasama antara pusat, provinsi dan daerah serta peningkatan kinerja daerah (kerjasama)	5	690.000	1	-	1	146.708	0,00	18.333	-	12,50	1	18.333	20	2,66	
							pengkajian pemanfaatan dana desa	Terwujudnya konsistensi penelitian dan penganggaran dana desa	1	141.642	-		1	141.642	16,60	1.390	1.660,00	0,98	16,6	1.390	1660,00	0,98	
							Penguatan kerjasama kelitbangan	Terhimpunnya informasi untuk pembangunan daerah dan penerapan inovasi yang ada di Kab. Pessel (kerjasama)	4	1.000.000	-	15.784	1	140.283	0,00	19.400	-	13,83	0	35.184	0	3,52	
							Penataan kawasan pariwisata berbasis daur ulang	Terciptanya kawasan wisata yang asri dan nyaman (kawasan)	4	600.000	-	-	1	82.187	0,00	4.418	-	5,38	0	4.418	0	0,74	
							Kajian strategis pembukaan jalan Kambang Muaro Labuh	Tersedianya hasil kajian terhadap pembukaan jalan kambang muaro labuah (kajian)	1	190.000	1	189.016	-	-	0,00	4.418			1	193.434	100	101,81	
							URUSAN PENDUKUNG																
I							SEKRETARIAT DAERAH																
1	4	00	01	01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	540	41.145.348.440	170	9.136.228.552	85	5.650.886.503,00	25	1.163.633.893	29,41	20,59	195	10.299.862.445	36,11	25,03	Setda

1	2						3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	k	Rp	K	Rp.	K	Rp.	
	4	00	01	01	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah tagihan pengiriman surat menyurat	72	1.073.600.000	24	317.374.060	12	106.839.619,00	3	32.058.500	25,00	30,01	27	349.432.560	37,50	32,55	Bagian Umum
	4	00	01	01	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rekening listrik dan air	72	5.700.000.000	24	1.648.064.396	12	665.000.000,00	3	229.157.343	25,00	34,46	27	1.877.221.739	37,50	32,93	
	4	00	01	01	03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa	600	2.152.000.000	200	357.002.200	100	194.910.400,00	8	10.400.000	8,00	5,34	208	367.402.200	34,67	17,07	
	4	00	01	01	07		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah biaya honorarium pengelola keuangan	72	2.325.000.000	24	582.718.199	12	233.583.142,25	3	38.704.900	25,00	16,57	27	621.423.099	37,50	26,73	Bagian Keuangan
	4	00	01	01	08		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah biaya honorarium tenaga kebersihan yang dibayarkan	72	2.712.200.000	24	658.604.600	12	360.000.000,00	3	700.000	25,00	0,19	27	659.304.600	37,50	24,31	
	4	00	01	01	09		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	600	723.500.000	200	162.058.000	100	59.787.200,00	40	21.219.000	40,00	35,49	240	183.277.000	40,00	25,33	
	4	00	01	01	12		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	600	425.800.000	200	97.112.700	100	67.182.000,00	20	5.507.000	20,00	8,20	220	102.619.700	36,67	24,10	
	4	00	01	01	13		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	600	355.700.000	200	100.692.250	100	49.336.193,00	45	15.204.000	45,00	30,82	245	115.896.250	40,83	32,58	
	4	00	01	01	17		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah biaya jamuan makan dan minum	72	10.172.548.440	24	2.867.903.760	12	1.651.390.200,00	3	339.088.890	25,00	20,53	27	3.206.992.650	37,50	31,53	
	4	00	01	01	18		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah yang diikuti	72	3.850.000.000	24	1.186.276.775	12	238.537.600,00	3	29.704.000	25,00	12,45	27	1.215.980.775	37,50	31,58	
	4	00	01	01	20		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah yang diikuti	72	550.000.000	24	138.384.750	12	73.656.000,00	3	26.772.500	25,00	36,35	27	165.157.250	37,50	30,03	
	4	00	01	01	22		Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Sekretariat Daerah	36	1.225.000.000	12	278.594.150	6	65.096.698,50	2	7.324.800	33,33	11,25	14	285.918.950	38,89	23,34	Bagian Keuangan
	4	00	01	01	27		Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS	Jumlah tenaga kerja kontrak yang dibayarkan	60	960.000.000	24	174.885.200	12	166.185.686,25	12	27.000.000	100,00	16,25	36	201.885.200	60,00	21,03	
	4	00	01	01	35		Penyusunan dan Finalisasi Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	35	1.120.000.000	14	183.523.758	7	209.787.764,00	2	24.948.709	28,57	11,89	16	208.472.467	45,71	18,61	
	4	00	01	01	47		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Provinsi yang diikuti	54	7.800.000.000	6	383.033.754	12	1.509.594.000,00	3	355.844.251	25,00	23,57	9	738.878.005	16,67	9,47	
2	4	00	01	02			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	540	31.855.400.000	170	6.277.248.531	85	4.740.017.441,00	15	643.716.254	17,65	13,58	185	6.920.964.785	34,26	21,73	
	4	00	01	02	05		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas roda 2	13	340.000.000	2	31.590.000	2	36.500.000,00	-	-	-	-	2	31.590.000	15,38	9,29	Bagian Umum

1	2						3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	k	Rp	K	Rp.	K	Rp.	
	4	00	01	02	06		Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	400	3.690.000.000			100	839.659.000,00	25	131.402.540	25,00	15,65	25	131.402.540	6,25	3,56	
	4	00	01	02	08		Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas	Jumlah Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	600	492.500.000	200	118.661.000	100	65.000.000,00	-	-	-	-	200	118.661.000	33,33	24,09	
	4	00	01	02	09		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	600	3.400.000.000	200	1.089.301.100	100	297.386.421,00	8	17.765.000	8,00	5,97	208	1.107.066.100	34,67	32,56	
	4	00	01	02	10		Pengadaan Meubileur	Jumlah Pengadaan Meubiler	600	1.156.000.000	200	388.700.000	100	140.000.000,00	10	700.000	10,00	0,50	210	389.400.000	35,00	33,69	
	4	00	01	02	18		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Dinas/Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Rumah Dinas/Jabatan	400	1.290.000.000		216.867.245	100	207.600.000,00	10	8.587.600	10,00	4,14	10	225.454.845	2,50	17,48	
	4	00	01	02	20		Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah pemeliharaan Rumah Jabatan	400	3.350.000.000			100	661.300.000,00	10	10.141.000	10,00	1,53	10	10.141.000	2,50	0,30	
	4	00	01	02	21		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas	Jumlah pemeliharaan rumah dinas	600	3.592.000.000	200	951.723.500	100	413.519.840,00	35	102.812.500	35,00	24,86	235	1.054.536.000	39,17	29,36	
	4	00	01	02	22		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	600	5.323.000.000	200	1.733.468.978	100	559.873.170,00	10	12.620.000	10,00	2,25	210	1.746.088.978	35,00	32,80	
	4	00	01	02	23		Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan	Jumlah pemeliharaan mobil jabatan	48	2.600.000.000			12	501.510.000,00	3	107.317.620	25,00	21,40	3	107.317.620	6,25	4,13	
	4	00	01	02	24		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	72	5.479.900.000	24	1.530.149.208	12	840.303.760,00	3	235.395.744	25,00	28,01	27	1.765.544.952	37,50	32,22	
	4	00	01	02	25		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah pemeliharaan perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	48	880.000.000		199.031.500	12	165.365.250,00	3	16.274.250	25,00	9,84	3	215.305.750	6,25	24,47	
	4	00	01	02	29		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubileur	Jumlah Pemeliharaan Meubelur	600	262.000.000	200	17.756.000	100	12.000.000,00	6	700.000	6,00	5,83	206	18.456.000	34,33	7,04	
3	01	4	00	01	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru MDQ,TPQ/TPSQ sesuai dengan Kriteria	560	386.000.000,00	180	167.100.450,00	90	222.750.947,75	20	35.718.000	22,22	16,03	200	202.818.450	35,71	52,54	
	01	4	00	01	20	29	Monitoring dan Evaluasi Unit Kesehatan Sekolah (UKS)	Jumlah sekolah yang dibina	8	191.000.000	4	89.386.100	4	85.080.735,50	2	20.963.000	50,00	24,64	6	110.349.100	75,00	57,77	Bagian Kesra
	01	4	00	01	20	30	Standarisasi MDTA, TPQ/TPSQ	Jumlah sosialisasi Standarisasi MDQ TPQ/TPSQ yang dilaksanakan	6	195.000.000	3	77.714.350	3	137.670.212,25	2	14.755.000	66,67	10,72	5	92.469.350	83,33	47,42	
4	05	4	00	01	15		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah Kasus yang ditangani atau di Fasilitas	22	1.781.000.000	6	168.029.450	3	158.206.611,00	1	106.638.850	33,33	67,40	7	274.668.300	31,82	15,42	
	05	4	00	01	15	07	Peningkatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Kab.Pessel	Jumlah aliran kepercayaan yang diawasi	30	815.000.000	10	110.272.300	5	94.470.619,25	5	77.049.500	100,00	81,56	15	187.321.800	50,00	22,98	Bagian Kesbangpol
	05	4	00	01	15	09	Operasionalisasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	Jumlah konflik sosial yang difasilitasi	89	966.000.000	6	57.757.150	20	63.735.992	7	29.589.350	35,00	46,42	13	87.346.500	14,61	9,04	Bagian Kesbangpol

1	2						3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	k	Rp	K	Rp.	K	Rp.	
5	05	4	00	01	16		Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Jumlah Rekomendasi kebijakan pencegahan gangguan keamanan Nasional di Daerah	28	1.560.000.000	7	283.753.548,00	4	147.912.275,25	1	5.276.500	25,00	3,57	8	289.030.048	28,57	18,53	
								Persentase Penurunan Pungli di Kabupaten Pesisir Selatan	505		155		80		20	-	25,00	#DIV/0!	175	-	34,65		
	05	4	00	01	16	06	Komunitas Inteligen Daerah	Jumlah Rekomendasi	55	600.000.000	35	283.753.548	20	106.516.843,50	2	2.986.900	10,00	2,80	37	286.740.448	67,27	47,79	Bagian Kesbangpol
	05	4	00	01	16	36	Operasionalisasi Unit Bantuan Tugas Sapu Bersih Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah kasus pungutan liar yang ditangani	14	960.000.000	0		3	41.395.431,75	1	2.289.600	33,33	5,53	1	2.289.600	7,14	0,24	
6	05	4	00	01	17		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Kehadiran Stakeholders dalam mengikuti Sidang Paripurna DPRD dalam Rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Pesisir Selatan	360	4.450.000.000,00		730.358.109,00	90	428.720.074,50	-	55.952.400	-	13,05	0	786.310.509	-	17,67	
								Persentase Peserta yang memahami pengetahuan wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara	490		145		80		20	-	25,00		165	-	33,67		
	05	4	00	01	17	04	Pelaksanaan Upacara Kesadaran Nasional dan Hari Besar Lainnya	Jumlah pelaksanaan upacara hari kesadaran nasional dan hari besar lainnya	132	1.480.000.000	44	309.841.500	22	145.519.457,50	4	12.456.300	18,18	8,56	48	322.297.800	36,36	21,78	Bagian Kesbangpol
	05	4	00	01	17	05	Pelaporan RANHAM	Jumlah Laporan RanHam	50	250.000.000	10	35.104.079	10	31.691.413	1	1.242.000	10,00	3,92	11	36.346.079	22,00	14,54	Bagian Hukum
	05	4	00	01	17	06	Peningkatan Kesadaran Bela Negara	Jumlah Sosialisasi dan pelatihan wawasan kebangsaan dan peningkatan kesadaran bela negara yang dilaksanakan	21	1.740.000.000	4	188.465.850	2	55.629.907,75	2	42.254.100	100,00	75,96	6	230.719.950	28,57	13,26	
	05	4	00	01	17	21	Peringatan Hari Jadi Pesisir Selatan	Jumlah undangan yang hadir	4.800	980.000.000		196.946.680	1.200	195.879.296,25	-	-	-	-	-	196.946.680	-	20,10	Bagian Pemerintahan dan Otda
								Jumlah sidang paripurna	1				1		-	-	-		-				
7	05	4	00	01	19		Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Jumlah Rekomendasi kebijakan untuk pencegahan dan penanggulangan potensi konflik dimasyarakat	28	1.263.000.000	7	195.938.400	4	83.600.077,50	1	2.979.000	25,00	3,56	8	198.917.400	28,57	15,75	
	05	4	00	01	19	02	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Jumlah Rapat Koordinasi Forum Kewaspadaan dini masyarakat	24	1.263.000.000	8	195.938.400	4	83.600.077,50	1	2.979.000	25,00	3,56	9	198.917.400	37,50	15,75	

1	2						3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	k	Rp	K	Rp.	K	Rp.	
8	05	4	00	01	20		Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Persentase penurunan kasus narkoba tingkat pelajar	495	4.358.000.000	145	723.739.200	80	432.703.267,25	20	9.488.600	25,00	2,19	165	733.227.800	33,33	16,82	
	05	4	00	01	20	10	Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika	Jumlah sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkotika	120	4.358.000.000		723.739.200	30	432.703.267,25	15	9.488.600	50,00	2,19	15	733.227.800	12,50	16,82	
9	05	4	00	01	21		Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase Jumlah Ormas /LSM yang memenuhi syarat administrasi yang lengkap	510	400.000.000	160	156.832.800	80	81.697.347,50	20	8.376.500	25,00	10,25	180	165.209.300	35,29	41,30	
	05	4	00	01	21	10	Monitoring Evaluasi Keberadaan Ormas/LSM sesuai dengan Undang-Undang Keormasan	Jumlah Ormas yang mendapat pembinaan	193	400.000.000	29	56.343.900	29	58.791.992,25	5	5.686.900	17,24	9,67	34	62.030.800	17,62	15,51	
	05	4	00	01	21	11	Meneliti dan Memeriksa Persyaratan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai	Jumlah Parpol yang mengajukan bantuan keuangan yang diverifikasi	33	295.000.000	22	100.488.900	11	22.905.355,25	11	2.689.600	100,00	11,74	33	103.178.500	100,00	34,98	
10	06	4	00	01	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	300	308.000.000	200	144.161.700,00	100	109.422.350,00	24	24.670.000	24,00	22,55	224	168.831.700	74,67	54,82	
	06	4	00	01	16	23	Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Peptisida	Jumlah kios pupuk bersubsidi dan pestisida yang diawasi	190	258.000.000	95	144.161.700	95	60.143.100,00	20	8.553.500	21,05	14,22	115	152.715.200	60,53	59,19	Bagian Perekonomian
	06	4	00	01	16	26	Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Koordinasi LPG 3 Kg/Gas dan BBM yang dimonev	Jumlah pangkalan LPJ 3 Kg/Gas dan BBM yang dimonev	60	50.000.000			60	49.279.250,00	15	16.116.500	25,00	32,70	15	16.116.500	25,00	32,23	
11	06	4	00	01	21		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan	270	3.005.800.000	180	1.145.181.766	90	1.164.412.768,50	25	146.041.500	27,78	12,54	205	1.291.223.266	75,93	42,96	
	06	4	00	01	21	20	Tim Silaturahmi Pemda	Jumlah Masjid yang dikunjungi	115	801.800.000	55	383.367.800	60	389.895.050,75	-	900.000	-	0,23	55	384.267.800	47,83	47,93	
	06	4	00	01	21	21	Persiapan dan Penyelenggaraan MTQ	Jumlah Cabang yang diikuti	10	500.000.000			10	155.808.794	-	90.753.800	-	58,25	0	90.753.800	-	18,15	
	06	4	00	01	21	22	Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji	Jumlah Jamaah Haji yang difasilitasi	310	453.000.000	205	264.601.149	105	168.077.545	-	-	-	-	205	264.601.149	66,13	58,41	
	06	4	00	01	21	23	Pembinaan Lembaga Didikan Subuh	Jumlah Masjid yang dikunjungi	30	210.000.000	15	95.122.000	15	89.779.047,25	6	4.946.000	40,00	5,51	21	100.068.000	70,00	47,65	
	06	4	00	01	21	24	Pengembangan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Basandi Kitabullah (ABS-SBK)	Jumlah KAN yang dibina	74	120.000.000	37	23.865.450	37	79.361.272,00	-	-	-	-	37	23.865.450	50,00	19,89	Bagian Kesra
	06	4	00	01	21	25	Koordinasi dan Konsultasi Kesejahteraan Rakyat dan Urusan Keagamaan	Jumlah Rapat Koordinasi yang dilaksanakan	36	675.000.000	24	332.802.067	12	117.091.246,75	-	18.490.700	-	15,79	24	351.292.767	66,67	52,04	
	06	4	00	01	21	26	Pengelolaan Pemberian Hibah Bansos	Jumlah Proposal yang difasilitasi	300	116.000.000	150	45.423.300	150	42.299.812,50	50	20.811.000	33,33	49,20	200	66.234.300	66,67	57,10	

1	2						3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	k	Rp	K	Rp.	K	Rp.	
	06	4	00	01	21	28	Pembinaan Pondok Pesantren, MDTA, dan Pondok Alquran	Jumlah Pondok Pesantren, MDTA, dan Pondok Alquran yang dibina	15	130.000.000			15	122.100.000,00	-	10.140.000	-	8,30	0	10.140.000	-	7,80	
12	10	4	00	01	18		Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa	Jumlah kerjasama dengan Media Massa dalam penyebaran informasi daerah yang diatur dalam perundang-undangan yang	160	11.070.000.000	52	3.046.661.947,00	27	750.362.759,00	8	94.803.646	29,63	12,63	60,00	3.141.465.593	37,50	28,38	
	10	4	00	01	18	01	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah kerja sama dengan Media Massa	160	4.100.000.000	52	1.166.383.360	27	268.363.355,00	8	5.318.821	29,63	1,98	60	1.171.702.181	37,50	28,58	Bagian Humas dan Protokol
	10	4	00	01	18	04	Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kegiatan pemerintah daerah	14.700	1.800.000.000	4800	340.816.611	2400	135.705.690,00	1000	16.020.835	41,67	11,81	5800	356.837.446	39,46	19,82	
	10	4	00	01	18	07	Publikasi dan Promosi Daerah	Jumlah publikasi dan promosi daerah	320	4.800.000.000	90	1.539.461.976	50	285.789.262,00	20	73.463.990	40,00	25,71	110	1.612.925.966	34,38	33,60	
	10	4	00	01	18	08	Bintek Kapasitas Kewartawanan dan Pers/Studi Banding	Jumlah Peserta Bintek Kewartawanan dan Pers	130	370.000.000			30	60.504.452,00	-	-	-	-	0	-			
14	13	4	00	01	20		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Persentase PNS Yang Mengikuti Olah Raga	555	295.000.000	175	50.089.800	95	33.738.400,75	50	5.150.000	52,63	15,26	225	55.239.800	40,54	18,73	
	13	4	00	01	20	18	Pemasyarakatan Olahraga Aparatur	Jumlah kegiatan olahraga aparatur yang dilaksanakan	144	295.000.000	48	50.089.800	24	33.738.400,75	6	5.150.000	25,00	15,26	54	55.239.800	37,50	18,73	
15	18	4	00	01	16		Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Persentase Arsip Sekretariat Daerah yang dikelola dengan baik	490	1.385.000.000	145	268.296.673	80	60.795.772,00	40	5.032.000	50,00	8,28	185	273.328.673	37,76	19,73	
	18	4	00	01	16	02	Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah	Jumlah arsip Lingkup Setda yang ditata	14.000	1.385.000.000	4000	268.296.673	2.500	60.795.772,00	1000	5.032.000	40,00	8,28	5000	273.328.673	35,71	19,73	
16	06	4	00	01	18		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah rekomendasi untuk pengendalian harga dan inflasi daerah	3	440.000.000				45.651.400,00	1	3.289.000		7,20	1	3.289.000	33,33	0,75	
	06	4	00	01	18	62	Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Jumlah Penerima KUR yang dimonitoring dan	90	440.000.000			15	45.651.400,00	2	3.289.000	13,33	7,20	2	3.289.000	2,22	0,75	
17	01	4	00	01	20		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase penyampaian perkembangan fisik dan keuangan OPD sesuai target dan tepat waktu	450	5.490.000.000	150	1.374.303.662	75	312.333.192,25	50	79.602.700	66,67	25,49	200	1.453.906.362	44,44	26,48	
	01	4	00	01	20	20	Optimalisasi Fungsi Koordinasi Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesra	Jumlah Koordinasi Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	72	900.000.000	24	250.024.865	12	59.829.797,75	3	15.991.800	25,00	26,73	27	266.016.665	37,50	29,56	Asisten II
	01	4	00	01	20	27	Pengendalian Program Pembangunan Daerah	Jumlah rapat evaluasi dan monitoring program pembangunan daerah yang dilaksanakan	24	730.000.000	8	117.356.018	4	72.959.900,00	1	9.834.700	25,00	13,48	9	127.190.718	37,50	17,42	Bagian Pembangunan dan Infrastruktur

1	2						3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	k	Rp	K	Rp.	K	Rp.	
	01	4	00	01	20	28	Pemantapan dan Optimalisasi Fungsi Staf Ahli Bupati	Jumlah Rekomendasi Staf Ahli Bupati	72	2.060.000.000	24	494.918.570	12	59.839.474.50	3	30.398.000	25,00	50,80	27	525.316.570	37,50	25,50	Staf Ahli
	01	4	00	01	20	29	Optimalisasi Fungsi Koordinasi Bidang Umum, Organisasi dan Keuangan	Jumlah Koordinasi Asisten Bidang Administrasi Umum	72	900.000.000	24	249.122.028	12	59.855.384,00	3	2.964.200	25,00	4,95	27	252.086.228	37,50	28,01	Asisten III
	01	4	00	01	20	30	Optimalisasi Fungsi Koordinasi Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum	Jumlah Koordinasi Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	72	900.000.000	24	262.882.181	12	59.848.636,00	3	20.414.000	25,00	34,11	27	283.296.181	37,50	31,48	Asisten I
18	01	4	00	01	22		Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Persentase pevelangan yang sesuai dengan aturan yang berlaku	564	4.990.593.573	184	659.265.875	95	670.922.559	35	45.773.100	36,84	6,82	219	705.038.975	38,83	14,13	
								Persentase pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui SPSE	195		45		35		35		100,00		80	-	41,03		
	01	4	00	01	22	02	Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen evaluasi, pelaporan dan pengelolaan pengadaan barang dan jasa	612	685.000.000	162	79.120.958	150	180.225.445	80	5.660.100	53,33	3,14	242	84.781.058	39,54	12,38	
	01	4	00	01	22	04	Pembinaan dan Pengawasan Jasa Kontruksi	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan	144	439.750.000	24	54.871.800	24	16.348.950	1	1.012.000	4,17	6,19	25	55.883.800	17,36	12,71	
	01	4	00	01	22	07	Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah badan/lembaga yang difasilitasi dalam pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik	135	745.843.573	90	414.744.830	45	182.254.698	45	13.693.000	100,00	7,51	135	428.437.830	100,00	57,44	
	01	4	00	01	22	08	Fasilitasi Lelang dan Klarifikasi PBJ	Jumlah Fasilitasi dan Klarifikasi Lelang	725	1.025.000.000			150	118.175.411	80	18.162.600	53,33	15,37	80	18.162.600	11,03	1,77	
	01	4	00	01	22	11	Penyusunan Standar Dokumen Pengadaan Barang / Jasa Daerah	Jumlah Standar Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	4	470.000.000			1	50.675.522	-	1.267.700	-	2,50	0	1.267.700	-	0,27	
	01	4	00	01	22	12	Pembinaan dan Konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Peserta pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa	90	805.000.000	15	110.528.287	15	83.475.553	-	4.250.100	-	5,09	15	114.778.387	16,67	14,26	
	01	4	00	01	22	13	Pengembangan Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Standar Operasional Prosedur Barang dan Jasa	9	820.000.000	0		1	39.766.982	-	1.727.600	-	4,34	0	1.727.600	-	0,21	
19	02	4	00	01	22		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase Peningkatan Ekonomi Pesisir Selatan	270	356.000.000	175	146.372.221	95	196.912.500,00	30	12.343.700	31,58	6,27	205	158.715.921	75,93	44,58	
	02	4	00	01	22	24	Pameran Apkasi dan Sumbar Expo	Jumlah Pameran yang diikuti	2	281.000.000	1	146.372.221	1	129.271.500,00	-	-	-	-	1	146.372.221	50,00	52,09	
	02	4	00	01	22	26	Koordinasi Peningkatan Ekonomi Pesisir Selatan	Jumlah rapat koordinasi peningkatan ekonomi Pesisir Selatan	4	75.000.000			4	67.641.000,00	1	12.343.700	25,00	18,25	1	12.343.700	25,00	16,46	

1	2						3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	k	Rp	K	Rp.	K	Rp.	
20	03	4	00	01	17		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Aset Setda yang dikelola dalam kondisi baik	520	2.135.000.000	160	638.560.470	85	454.986.085,50	25	85.713.060	29,41	18,84	185	724.273.530	35,58	33,92	
	03	4	00	01	17	43	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Jumlah Dokumen Aset/barang daerah lingkup Setda	24	1.505.000.000	8	320.718.022	4	278.703.163,25	2	79.115.400	50,00	28,39	10	399.833.422	41,67	26,57	Bagian Keuangan
	03	4	00	01	17	51	Penyusunan Harga Satuan Pokok Kegiatan	Jumlah dokumen HSPK yang disusun	3	210.000.000	2	97.999.900	1	89.562.974	1	1.118.900	100,00	1,25	3	99.118.800	100,00	47,20	Bagian Pembangunan
	03	4	00	01	17	52	Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah	36	240.000.000	24	122.762.948	12	47.819.461	1	2.255.200	8,33	4,72	25	125.018.148	69,44	52,09	Bagian Pembangunan
	03	4	00	01	17	54	Penyusunan Prosedur Kegiatan	Jumlah dokumen prosedur kegiatan yang disusun	3	180.000.000	2	97.079.600	1	38.900.487	1	3.223.560	100,00	8,29	3	100.303.160	100,00	55,72	
21	04	4	00	01	31		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Pemeringkatan kompetensi camat	6	1.036.000.000		572.853.226	6	183.894.308,25	-	27.208.804	-	14,80	0,00	600.062.030	-	57,92	
	04	4	00	01	31	31	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian yang difasilitasi	300	315.000.000	200	141.294.494	100	44.144.249,25	25	8.073.897	25,00	18,29	225	149.368.391	75,00	47,42	
	04	4	00	01	31	34	Peningkatan Etos Kerja Keprotokolan	Jumlah pelaksanaan Keprotokolan	36	721.000.000	24	431.558.732	12	139.750.059	3	19.134.907	25,00	13,69	27	450.693.639	75,00	62,51	
22	01	4	00	01	16		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Jumlah pelaksanaan keprotokoleran pemerintah daerah	315	2.075.000.000	100	755.299.800	50	229.224.100,00	15	31.608.000	30,00	13,79	115	786.907.800	36,51	37,92	
	01	4	00	01	16	01	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri	Jumlah Kunjungan Kerja Pejabat Negara yang difasilitasi	220	2.075.000.000	140	755.299.800	70	229.224.100,00	15	31.608.000	21,43	13,79	155	786.907.800	70,45	37,92	
23	01	4	00	01	26		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Rancangan Produk hukum yang difasilitasi	550	2.160.000.000	175	1.154.523.108	95	448.726.269	30	31.153.100	31,58	6,94	205	1.185.676.208	37,27	54,89	
								Persentase Produk Hukum yang di Publikasi	570		190		95		30		31,58		220	-	38,60		
	01	4	00	01	26	01	Penyusunan Peraturan Bupati	Jumlah Peraturan Bupati yang difasilitasi	100	780.000.000	50	511.281.200	50	193.437.389	51	11.466.000	102,00	5,93	101	522.747.200	101,00	67,02	
	01	4	00	01	26	02	Pembentukan Peraturan Daerah	Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah	26	810.000.000	18	334.225.863	8	103.857.590	3	6.663.100	37,50	6,42	21	340.888.963	80,77	42,09	
	01	4	00	01	26	03	Pembuatan Buku Lembaran Daerah dan SJD Hukum	Jumlah Buku SJD yang Disusun	1020	390.000.000	760	159.371.920	260	77.393.461	-	2.013.000	-	2,60	760	161.384.920	74,51	41,38	
	01	4	00	01	26	04	Validasi, Evaluasi dan Klarifikasi Keputusan Bupati dan Produk Hukum Pemerintah Nagari	Jumlah Produk Hukum Nagari yang Dievaluasi	58	180.000.000	35	149.644.125	23	74.037.829	2	11.011.000	8,70	14,87	37	160.655.125	63,79	89,25	

1	2						3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	k	Rp	K	Rp.	K	Rp.	
24	01	4	00	01	28		Program Penataan Kelembagaan dan Ketatausahaan Pemda	Persentase penataan kelembagaan dan ketatausahaan Pemda	535	1.640.000.000	160	122.933.575	90	291.332.345,50	-	38.408.674	-	13,18	160	161.342.249	29,91	9,84	
	01	4	00	01	28	04	Evaluasi Jabatan SKPD	Jumlah Perangkat daerah yang di evaluasi jabatan	45	550.000.000			45	99.054.498,50	-	13.833.318	-	13,97	0	13.833.318	-	2,52	
	01	4	00	01	28	08	Koordinasi Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah rapat koordinasi Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	36	220.000.000	24	122.933.575	12	42.117.862,25	-	2.213.980	-	5,26	24	125.147.555	66,67	56,89	
	01	4	00	01	28	09	Penyusunan Peraturan Daerah tentang OPD dan Peraturan Bupati tentang Jabatan Struktural	Jumlah Ranperda dan ranperbup tentang jabatan struktural	80	660.000.000	20	81.589.450	60	101.803.084,75	-	7.272.576	-	7,14	20	88.862.026	25,00	13,46	
	01	4	00	01	28	15	Forum Pengendalian Harga dan Inflasi Daerah	Jumlah Rapat TPID yang dilaksanakan	6	210.000.000	4	107.916.805	2	48.356.900,00	-		-	-	4	107.916.805	66,67	51,39	
25	01	4	00	01	37		Program Pelayanan Administrasi (KDH)	Persentase Terpenuhi pelayanannya Administrasi perkantoran Kepala Daerah	500	12.100.000.000	145	3.300.748.088	80	1.601.746.500	25	130.903.800	31,25	8,17	170	3.431.651.888	34,00	28,36	
	01	4	00	01	37	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Rumah Dinas	Jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan	72	600.000.000	24	163.812.600	12	65.002.500	3	1.400.000	25,00	2,15	27	165.212.600	37,50	27,54	
	01	4	00	01	37	04	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti luar daerah	72	11.500.000.000	24	3.136.935.488	12	1.536.744.000	3	129.503.800	25,00	8,43	27	3.266.439.288	37,50	28,40	
26	01	4	00	01	39		Program Peningkatan Disiplin Aparatur (KDH)	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	500	1.679.000.000	145	557.651.858	80	226.500.000	25	22.000.000	31,25	9,71	170	579.651.858	34,00	34,52	
	01	4	00	01	39	01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapan	400	1.679.000.000	130	557.651.858	65	226.500.000	15	22.000.000	23,08	9,71	145	579.651.858	36,25	34,52	
27	01	4	00	01	40		Program Advokasi Pemerintah Daerah	Persentase Sengketa hukum yang difasilitasi	510	2.350.000.000	145	450.993.872	85	94.304.068	50	13.783.200	58,82	14,62	195	464.777.072	38,24	19,78	
	01	4	00	01	40	01	Penyelesaian Sengketa Hukum	Jumlah perkara hukum yang	58	2.350.000.000	12	450.993.872	6	94.304.068	3	13.783.200	50,00	14,62	15	464.777.072	25,86	19,78	
28	01	4	00	01	47		Program Pemantapan Otonomi Daerah	Persentase tahapan penegasan batas wilayah administrasi pemerintahan	190	5.269.000.000		1.153.023.825	30	675.696.388,45	15	93.024.500	50,00	13,77	15	1.246.048.325	7,89	23,65	
								Persentase Tahapan Pembakuan Nama Rupa Bumi	400				100		40		40,00		40		10,00		
								Persentase Nagari Binaan Perantau	80				17		5		29,41		5		6,25		
								Persentase Penyelesaian Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	399				67		25		37,31		25		6,27		
								Jumlah Kerjasama dengan Pihak Ketiga	78		1		14		1		7,14		2		2,56		
								Persentase kehadiran stakeholders pada rapat koordinasi pimpinan daerah	450		90		90		0		-		90		20,00		

1	2						3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	k	Rp	K	Rp.	K	Rp.	
	01	4	00	01	47	01	Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten	Jumlah rapat koordinasi camat dan wali nagari	10	597.000.000	2	63.582.900	2	62.260.879,75	1	2.324.500	50,00	3,73	3	65.907.400	30,00	11,04	
								Jumlah Rakor camat dengan perangkat daerah	9					0					0		-		
	01	4	00	01	47	02	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah fasilitasi Rakor Gubernur dengan Kabupaten Kota	24	1.200.000.000	8	314.334.104	4	99.539.854,00	2	21.394.700	50,00	21,49	10	335.728.804	41,67	27,98	
								Jumlah fasilitasi serah terima jabatan camat															
								Jumlah penyelesaian permasalahan di kecamatan															
	01	4	00	01	47	03	Koordinasi dan Pembinaan Kewilayahan	Jumlah Rakor kecamatan yang dihadiri	90	1.180.000.000	30	288.663.947	15	46.463.665,50	4	9.026.000	26,67	19,43	34	297.689.947	37,78	25,23	
								Laporan Evaluasi pelaksanaan Tupoksi Camat						-	-					-			
	01	4	00	01	47	08	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen LPPD	3	237.000.000	2	146.144.227	1	58.162.656,25	1	20.651.800	100,00	35,51	3	166.796.027	100,00	70,38	
	01	4	00	01	47	09	Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah	Jumlah Mou dan Perjanjian Kerjasama (PKS) antar daerah	33	100.000.000	1	78.521.841	8	48.879.711,50	1	5.720.000	12,50	11,70	2	84.241.841	6,06	84,24	
								Jumlah asistensi MoU kerjasama dengan pihak ketiga															
	01	4	00	01	47	10	Penilaian Kompetensi Camat	Jumlah Camat terbaik	6	340.000.000	3	132.655.856	3	160.786.958,20	-	952.000	-	0,59	3	133.607.856	50,00	39,30	
								Nilai Peringkat Tingkat Provinsi					3 besar										
								Jumlah Peserta Workshop					30 orang										
	01	4	00	01	47	12	Penamaan Rupa Bumi dan Unsur Alami	Laporan nama rupa bumi dan unsur	5	495.000.000	1	129.120.950	1	46.343.569,25	-	-	-	-	1	129.120.950	20,00	26,09	
	01	4	00	01	47	13	Fasilitasi Penegasan Batas Daerah dan Kecamatan	Jumlah fasilitasi penetapan dan penegasan batas nagari	70	520.000.000	0		10	51.940.078,75	40	11.695.500	400,00	22,52	40	11.695.500	57,14	2,25	
	01	4	00	01	47	14	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Jumlah dokumen LKPJ	1	50.000.000			1	48.682.581,75	1	15.218.000	100,00	31,26	1	15.218.000	100,00	30,44	
	01	4	00	01	47	15	Fasilitasi Kerjasama Rantau	Jumlah fasilitasi nagari binaan perantau tingkat Kabupaten	12	550.000.000			3	52.636.433,50	1	6.042.000	33,33	11,48	1	6.042.000	8,33	1,10	
29	01	4	00	01	57		Program Peningkatan IMTAQ Bagi Pegawai	Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan Jemaah Haji oleh Pemerintah Daerah	580	1.450.000.000	180	341.863.118,00	100	126.472.964,00	-	15.920.000	-	12,59	180	357.783.118	31,03	24,67	
								Peringkat MTQ Pesisir selatan	5		6		5		-	-	-	-	6	-	120,00		
								Persentase kunjungan mesjid tim silaturahmi Pemda	380		105		80		-	-	-	-	105	-	27,63		
								Persentase mesjid yang dapat hibah bansos	415		120		80		-	-	-	-	120	-	28,92		
	01	4	00	01	57	01	Peningkatan Imtaq bagi Pegawai di Lingkungan Pemda Kab. Pessel dan Penyelenggaraan Hari Besar	Jumlah ceramah agama yang dilaksanakan	144	1.450.000.000	48	341.863.118	24	126.472.964,00	6	15.920.000	25,00	12,59	54	357.783.118	37,50	24,67	
30	01	4	00	01	78		Program Peningkatan Pengawasan Akuntabilitas Kinerja Aparatur	Peningkatan Nilai AKIP Kabupaten	A	1.495.000.000	BB	201.389.735	BB	134.555.028	-	17.219.626	#VALUE!	12,80		218.609.361		14,62	

1	2						3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	k	Rp	K	Rp.	K	Rp.	
								Peningkatan Pemeringkatan	3,3500														
								Persentase tahapan penyampaian dokumen LKPJ Bupati	400														
	01	4	00	01	78	01	Penyusunan Lakip Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Perangkat Daerah yang menyampaikan Lkj tepat waktu	225	955.000.000	45	149.183.985	45	85.189.366,25	35	12.260.898	77,78	14,39	80	161.444.883	35,56	16,91	
	01	4	00	01	78	03	Monev Kinerja SKPD	Jumlah Laporan monev Kinerja Perangkat daerah	112	540.000.000	50	52.205.750	50	49.365.662	-	4.958.728	-	10,04	50	57.164.478	44,64	10,59	
31	01	4	00	01	80		Program Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik	Tingkat Kepuasan Masyarakat	A	1.790.000.000	BB	33.621.900	BB	202.796.544,50	-	16.971.613		8,37		50.593.513		2,83	
	01	4	00	01	80	01	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah PD pelayanan publik yang disurvei	124	530.000.000	2	33.621.900	17	69.324.401,75	10,00	11.525.613	58,82	16,63	12	45.147.513	9,68	8,52	
	01	4	00	01	80	04	Fasilitasi Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah inovasi pelayanan publik yang difasilitasi	8	820.000.000	0		2	59.042.996,25	4,00	2.992.000	200,00	5,07	4	2.992.000	50,00	0,36	
	01	4	00	01	80	08	Peningkatan Manajemen Pelayanan Publik	Jumlah laporan pelayanan publik	16	440.000.000	0		4	74.429.147	2,00	2.454.000	50,00	3,30	2	2.454.000	12,50	0,56	
II							SEKRETARIAT DPRD																
1	4	00	02	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah cakupan pelayanan administrasi perkantoran (bln)	72	19.315.050.000	24	6.438.930.000	12	3.219.165.000	3	560.788.000	25,00	17,42	27	6.999.718.000	37,50	36,24	Setwan
	4	00	02	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat (bulan)	72	49.416.000	24	16.472.000	12	8.236.000	3	750.000	25,00	9,11	27	17.222.000	37,50	34,85	
	4	00	02	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pembayaran rekening listrik, air, telpon dan faks(bulan)	72	1.514.716.000	24	504.900.000	12	252.450.000	3	71.583.000	25,00	28,36	27	576.483.000	37,50	38,06	
	4	00	02	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pembayaran honor dan operasional pengelola keuangan (bulan)	72	4.577.604.000	24	1.525.868.000	12	762.934.000	3	2.650.000	25,00	0,35	27	1.528.518.000	37,50	33,39	
	4	00	02	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan dan bahan kebersihan kantor (bulan)	72	1.272.150.000	24	424.050.000	12	212.025.000	3	40.395.000	25,00	19,05	27	464.445.000	37,50	36,51	
	4	00	02	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor (bulan)	72	357.768.000	24	119.256.000	12	59.628.000	3	60.000.000	25,00	100,62	27	179.256.000	37,50	50,10	
	4	00	02	01	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (bulan)	72	349.598.000	24	117.130.000	12	58.265.000	3	-	25,00	-	27	117.130.000	37,50	33,50	
	4	00	02	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan (bulan)	72	365.140.000	24	121.710.000	12	60.855.000	3	500.000	25,00	0,82	27	122.210.000	37,50	33,47	
	4	00	02	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (bulan)	72	1.321.000.000	24	440.330.000	12	220.165.000	3	26.920.000	25,00	12,23	27	467.250.000	37,50	35,37	
	4	00	02	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman (bulan)	72	2.950.080.000	24	983.360.000	12	491.680.000	3	86.523.000	25,00	17,60	27	1.069.883.000	37,50	36,27	

1	2						3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	k	Rp	K	Rp.	K	Rp.	
	4	00	02	01	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya dana untuk Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (bulan)	72	1.713.296.000	24	571.096.000	12	285.548.000	3	89.709.000	25,00	31,42	27	660.805.000	37,50	38,57	
	4	00	02	01	01	19	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor (bulan)	72	585.150.000	24	195.050.000	12	97.525.000	3	52.250.000	25,00	53,58	27	247.300.000	37,50	42,26	
	4	00	02	01	01	20	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Tersedianya dana untuk Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah (bulan)	72	1.241.120.000	24	413.704.000	12	206.852.000	3	14.507.000	25,00	7,01	27	428.211.000	37,50	34,50	
	4	00	02	01	01	22	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	Tersedianya dana Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	72	199.404.000	24	66.468.000	12	33.234.000	3	-	25,00	-	27	66.468.000	37,50	33,33	
	4	00	02	01	01	24	Penyediaan Jasa Publikasi	Tersedianya Dana untuk mempublikasikan kegiatan DPRD	72	2.818.608.000	24	939.536.000	12	469.768.000	3	115.001.000	25,00	24,48	27	1.054.537.000	37,50	37,41	
2	4	00	02	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	layanan sarana dan prasarana aparatur (bln)	72	12.573.889.000	24	3.364.384.000	12	2.217.814.000	3	348.716.000	25,00	15,72	27	3.713.100.000	37,50	29,53	Setwan
	4	00	02	01	02	06	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas	Tersedianya Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas (paket)	12	1.442.780.000	4	480.904.000	2	298.462.000	0	-	-	-	4	480.904.000	33,33	33,33	
	4	00	02	01	02	08	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan / Dinas	Tersedianya Peralatan Rumah Jabatan/Dinas (paket)	12	326.407.000	4	124.586.000	2	59.400.000	0	1.290.000	-	2,17	4	125.876.000	33,33	38,56	
	4	00	02	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor (paket)	12	2.227.800.000	4	742.600.000	2	531.805.000	0	-	-	-	4	742.600.000	33,33	33,33	
	4	00	02	01	02	20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Terpeliharanya kondisi rumah Jabatan (bulan)	72	1.254.000.000	24	418.000.000	12	299.000.000	3	-	25,00	-	27	418.000.000	37,50	33,33	
	4	00	02	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya kondisi Gedung kantor (bulan)	72	1.520.000.000	24	404.000.000	12	272.000.000	3	153.000.000	25,00	56,25	27	557.000.000	37,50	36,64	
	4	00	02	01	02	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya Kondisi Mobil Jabatan (bulan)	72	2.019.022.000	24	513.004.000	12	326.502.000	3	149.551.000	25,00	45,80	27	662.555.000	37,50	32,82	
	4	00	02	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (bulan)	72	1.527.880.000	24	529.290.000	12	324.645.000	3	26.946.000	25,00	8,30	27	556.236.000	37,50	36,41	
	4	00	02	01	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan kantor (bulan)	72	270.000.000	24	90.000.000	12	55.000.000	3	15.499.000	25,00	28,18	27	105.499.000	37,50	39,07	
	4	00	02	01	02	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Terpeliharanya kondisi peralatan rumah Jabatan/dinas (bulan)	72	186.000.000	24	62.000.000	12	51.000.000	3	2.430.000	25,00	4,76	27	64.430.000	37,50	34,64	

1	2						3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	k	Rp	K	Rp.	K	Rp.	
3	4	00	02	01	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin Aparatur dan anggota DPRD	1530	2.868.678.000	510	813.510.000	255	494.921.000	0	-	-	-	510	813.510.000	33,33	28,36	Setwan
	4	00	02	01	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang disediakan (stel)	1530	2.868.678.000	510	813.510.000	255	494.921.000	0	-	-	-	510	813.510.000	33,33	28,36	
4	4	00	02	01	15		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Terpenuhinya dan terlaksananya tugas kedewanan anggota DPRD Kab. Pessel (bln)	72	149.706.217.000	24	41.254.686.000	12	24.402.761.000	3	5.124.692.000	25,00	21,00	27	46.379.378.000	37,50	30,98	Setwan
	4	00	02	01	15	01	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Peraturan dan Keputusan yang disahkan	48	55.680.876.000	24	14.911.310.000	12	8.731.073.000	2	1.248.543.000	16,67	14,30	26	16.159.853.000	54,17	29,02	
	4	00	02	01	15	02	Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	Jumlah Rapat-Rapat Hearing/dialog yang dilaksanakan	48	505.068.000	16	168.356.000	8	84.178.000	2	20.700.000	25,00	24,59	18	189.056.000	37,50	37,43	
	4	00	02	01	15	03	Rapat-rapat Alat Kelengkapan	Jumlah rumusan yang dihasilkan dari Dewan Ketahanan Pangan	156	642.204.000	52	214.068.000	26	107.034.000	8	9.033.000	30,77	8,44	60	223.101.000	38,46	34,74	
	4	00	02	01	15	04	Rapat-rapat Paripurna	Jumlah Rapat-Rapat Paripurna	180	1.181.982.000	58	393.994.000	29	196.997.000	12	11.075.000	41,38	5,62	70	405.069.000	38,89	34,27	
	4	00	02	01	15	05	Kegiatan Reses	Terselenggaranya penyerapan aspirasi dari konstituen daerah pemilihan	18	14.175.000.000	6	4.725.000.000	3	2.362.500.000	1	-	33,33	-	7	4.725.000.000	38,89	33,33	
	4	00	02	01	15	07	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Terselenggaranya kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	48	20.616.508.000	16	5.873.768.000	8	3.436.884.000	2	1.380.227.000	25,00	40,16	18	7.253.995.000	37,50	35,19	
	4	00	02	01	15	11	Konsultasi, Koordinasi dan Pembinaan Alat Kelengkapan DPRD	Terselenggaranya konsultasi, koordinasi dan Pembinaan Alat Kelengkapan DPRD	96	20.252.597.000	32	4.750.864.000	16	3.375.432.000	2	905.022.000	12,50	26,81	34	5.655.886.000	35,42	27,93	
	4	00	02	01	15	12	Konsultasi, Koordinasi dan Pembinaan Pimpinan DPRD	Terselenggaranya konsultasi, koordinasi dan Pembinaan Pimpinan dan anggota DPRD	450	13.249.356.000	150	3.416.452.000	75	2.208.226.000	20	249.462.000	26,67	11,30	170	3.665.914.000	37,78	27,67	
	4	00	02	01	15	13	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam dan Luar Daerah	Terselenggaranya kunjungan kerja Pimpinan dan anggota DPRD	60	22.302.646.000	20	6.434.214.000	10	3.717.107.000	6	1.300.630.000	60,00	34,99	26	7.734.844.000	43,33	34,68	
	4	00	02	01	15	14	General Check Up Pimpinan dan Anggota DPRD	Tersedianya kegiatan General Chech Up Pimpinan dan Anggota DPRD	6	1.099.980.000	2	366.660.000	1	183.330.000	0	-	-	-	2	366.660.000	33,33	33,33	

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019

Nama OPD : **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12 bulan	158,400,000	APBDKOTA		12 bulan	
01.05.	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	tersedianya jasa jaminan barang milik daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 tahun	75,693,000	APBDKOTA		1 tahun	
01.07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12 bulan	217,050,000	APBDKOTA		12 bulan	
01.08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12 bulan	50,193,000	APBDKOTA		12 bulan	
01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12 bulan	57,895,000	APBDKOTA		12 bulan	
01.11.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12 bulan	87,949,700	APBDKOTA		12 bulan	
01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pesisir Selatan	12 bulan	30,000,000	APBDKOTA		12 bulan	
01.13.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Pesisir Selatan	1 tahun	322,900,000	APBDKOTA		1 tahun	
01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	tersedianya baha bacaan peraturan perundang-undangan	Pesisir Selatan	1 tahun	13,900,000	APBDKOTA		1 tahun	
01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	tersedianya makanan dan minuman	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 tahun	92,585,000	APBDKOTA		1 tahun	
01.18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	terlaksananya layanan administrasi perkantoran	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 tahun	202,050,000	APBDKOTA		1 tahun	
01.19.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	terlaksananya layanan administrasi perkantoran	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 tahun	102,000,000	APBDKOTA		1 tahun	
01.22.	Penyediaan Biaya Operasional Unit Kerja Bawahan	tersedianya biaya operasional unit kerja bawahan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 tahun	250,000,000	APBDKOTA		1 tahun	
01.24.	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS	tersedianya jasa tenaga kerja Non PNS	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	114 orang	1,420,250,000	APBDKOTA		114 orang	
01.30.	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	terlaksananya layanan administrasi perkantoran	Pesisir Selatan	1 tahun	80,000,000	APBDKOTA		1 tahun	
01.31.	Operasional UPTD	terlaksananya layanan administrasi perkantoran	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 tahun	30,000,000	APBDKOTA		1 tahun	
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
02.22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	tersedianya biaya pemeliharaan rutin gedung kantor	Disdikbud	1 unit	35,000,000	APBDKOTA		1 unit	
02.24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	tersedianya biaya operaisonal dan pemeliharaan rutin kendaraan dinas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3 mobil 1 sepeda motor	137,604,500	APBDKOTA		3 mobil 1 sepeda motor	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
02.28.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	tersedianya biaya pemeliharaan alat-alat kantor	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12 bulan	42,000,000	APBDKOTA		12 bulan	
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
05.01.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	terlaksananya pelatihan formal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100%	50,000,000	APBDKOTA		100%	
05.03.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	terlaksananya bimtek kepegawaian	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 kali	75,366,000	APBDKOTA		1 kali	
05.15.	Pelatihan Penatausahaan Keuangan Unit Bawahan	terlaksananya pelatihan pengellaan keuangan untuk bendahara sekolah	Pesisir Selatan	155 bendahara sekolah	143,282,000	APBDKOTA		155 bendahara sekolah	
15.	Program Pengembangan Nilai Budaya								
15.06.	Atraksi seni Tk.SD, SMP dan SLTA		Pesisir Selatan		300,000,000	APBDKOTA			
15.11.	Carocok Art International Dance Festival		IV Jurai		1,500,000,000	APBDKOTA			
15.12.	Festival Film Pendek dan Film Dokumenter tingkat SMA dan SMK se-Kabupaten Pesisir Selatan		IV Jurai		250,000,000	APBDKOTA			
15.14.	Festival Band antar Pelajar		Pesisir Selatan		200,000,000	APBDKOTA			
15.15.	Pengiriman Tim Kesenian	Terkirimnya tim kesenian dan kru sebagai upaya pengenalan budaya Kabupaten Pesisir Selatan serta operasional kegiatan berkesenian	Menyesuaikan	100%	450,000,000	APBDKOTA		100%	
15.16.	Pelatihan Adat Basandi Syarak, Syarak basandi Khitab Bullah Tingkat Umum		IV Jurai		75,000,000	APBDKOTA			
15.17.	Sumarak Pesisir Selatan dengan kegiatan	tes	Carocok Painan	tes	500,000,000	APBDKOTA		tes	
15.20.	Bintek Pengelola Cakar Budaya		Pesisir Selatan		200,000,000	APBDKOTA			
15.21.	Perawatan Cakar Budaya, Museum dan Peninggalan Bersejarah	jumlah cagar budaya, museum dan peninggalan bawah air	Rumah Percetakan Uang, Pulau Cingkuak dan Makam Sutan Samah	3 situs	100,000,000	APBDKOTA		3 situs	
15.24.	Pagelaran Seni dan Budaya	Terlaksananya pagelaran seni dan budaya tingkat Kabupaten dan Provinsi	Painan	100%	400,000,000	APBDKOTA		100%	
15.25.	Pengukuhan Rekor Muri		Pesisir Selatan		1,500,000,000	APBDKOTA			
15.26.	Penyelenggaraan Lomba-lomba Seni dan Adat		Pesisir Selatan		200,000,000	APBDKOTA			
15.28.	Fasilitasi dan Kegiatan Pendamping Festival Seni dan Budaya	Terlaksananya fasilitasi dan kegiatan pendamping festival budaya mairitim 2018	Painan	100%	400,000,000	APBDKOTA		100%	
15.29.	Pendataan dan inventarisasi simbol-simbol dan nilai adat	terlaksananya pendataan dan inventarisasi simbol-simbol dan nilai adat	Pesisir Selatan	100%	270,000,000	APBDKOTA		100%	
15.30.	Festival Silat Tradisi	terlaksananya event festival silat tradisi se kab. Pesisir Selatan	Disdikbud	100%	200,000,000	APBDKOTA		100%	
15.31.	Festival Babiola	terlaksananya event festival babiola se Kab. Pesisir Selatan	Pesisir Selatan	100%	200,000,000	APBDKOTA		100%	
15.32.	Festival Permainan Anak Nagari	terlaksananya festival permainan anak nagari	Pesisir Selatan	100%	140,000,000	APBDKOTA		100%	
15.33.	Pelatihan Adat Bagi Pemangku Adat	jumlah pemangku adat yang dilatih	Pesisir Selatan	100%	120,000,000	APBDKOTA		100%	
15.35.	Paket Seni Tradisional dan Modern	Paket seni tradisional dan modern	Pesisir Selatan	100%	350,000,000	APBDKOTA		100%	

Nama OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
15.36.	Pengadaan Peralatan Pendidikan Pada Bidang Kebudayaan	terlaksananya pengadaan peralatan pendidikan pada bidang kebudayaan	Painan	100%	500,000,000	APBDKOTA		100%	
15.37.	Pembuatan Film Dokumenter, Dokudrama , Layar Lebar	tersedianya film dokumenter, dokudrama dan layar lebar	Menyesuaikan	100%	1,500,000,000	APBDKOTA		100%	
15.38.	Pesisir Selatan Asia Malay Festival	terlaksananya pesisir selatan asia malay festival	Painan	100%	750,000,000	APBDKOTA		100%	
15.39.	Operasional Teknis Kebudayaan	terlaksananya teknis kebudayaan pada kegiatan daerah	Pesisir Selatan	100%	350,000,000	APBDKOTA		100%	
15.40.	Bimtek Tentang Undang-Undang No.5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan		IV Jurai		150,000,000	APBDKOTA			
15.41.	Pendokumentasian Secara Digital Atraksi Adat dan Budaya Tradisional Kabupaten Pesisir Selatan	terlaksananya pendokumentasian secara digital atraksi adat dan budaya tradisional Selatan	Pesisir Selatan	15%	120,000,000	APBDKOTA		15%	
15.42.	Pelestarian dan Perlindungan Bahasa Minang Kabau di Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	terlaksananya pelestarian bahasa daerah pesisir selatan	Pesisir Selatan	1 paket	50,000,000	APBDKOTA		1 paket	
15.43.	Pelatihan dan Pembinaan Guru Seni Budaya Tingkat SD se Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019	adanya pelatihan dan pembinaan pada kalangan Guru SD se- Kab Pesisir Selatan, sehingga bisa dijadikan rujukan dalam pelajaran Muatan Lokal di Sekolah	Pesisir Selatan	25%	67,500,000	APBDKOTA		25%	
15.44.	Festifal Seni Multikultur		Pesisir Selatan		1,500,000,000	APBDKOTA			
15.44.	Pengembangan data dan informasi Pendidikan Anak Usia Dini	diperoleh data dan informasi yang akurat dan valid400 satuan PAUD	15 kecamatan	400 satuan PAUD	180,000,000	APBDKOTA		400 satuan PAUD	
15.45.	Lomba Tingkat Pendidikan Anak usia Dini/ Taman Kanak-kanak	Terlaksananya lomba untuk anak PAUD tingkat Kabupaten & Propinsi	Kabupaten/Provinsi	3 jenis kegiatan	350,000,000	APBDKOTA		3 jenis kegiatan	
15.45.	Sosialisasi Tentang Pemajuan Kebudayaan	jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	Pesisir Selatan	100%	40,000,000	APBDKOTA		100%	
15.46.	Magang Tenaga Pendidikan PAUD	terlaksananya magang tenaga pendidik PAUD	Luar Provinsi	30 PTK	223,225,000	APBDKOTA		30 PTK	
15.46.	Pembuatan Feature Kebudayaan	terlaksananya feature kebudayaan	Pesisir Selatan	100%	100,000,000	APBDKOTA		100%	
15.47.	Pelatihan Verifikasi bantuan program PTK PAUD	terlaksananya pada verifikasi bantuan PTK PAUD bagi pengelola	Painan	300 orang	250,000,000	APBDKOTA		300 orang	
15.48.	Pembinaan pada Lembaga PAUD Percontohan di Kecamatan	Terlaksannya PAUD Percontohan di kecamatan	15 kecamatan	15 lembaga	125,000,000	APBDKOTA		15 lembaga	
15.48.	Rehab/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan		Kab. Pesisir Selatan		500,000,000	APBDKOTA			
15.55.	Peningkatan Kapasitas Pengelola PAUD		Pesisir Selatan		300,000,000	APBDKOTA			
15.58.	Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama PAUD	Terlaksananya koordinasi kerja sama dengan tenaga PAUD	Pesisir Selatan	3 triwulan	120,000,000	APBDKOTA		3 triwulan	
15.67.	Lomba Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas Berprestasi		IV Jurai		250,000,000	APBDKOTA			
15.68.	Pelatihan operator PAUD dan DIKMAS		Pesisir Selatan		172,500,000	APBDKOTA			
15.69.	Akreditasi satuan PAUD dan Dikmas		Pesisir Selatan		150,000,000	APBDKOTA			
15.70.	Sosialisasi DAK BOP PAUD		Painan		250,000,000	APBDKOTA			
16.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
16.01.	Pembangunan Gedung Sekolah	terlaksananya pembangun gedung sekolah baru SD	Alang Rambah	1 unit	2,500,000,000	APBDKOTA		1 unit	

Nama OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
16.01.	Pembangunan Gedung Sekolah	terlaksananya pembangun gedung sekolah baru SD	Kec. Basa Ampek Balai	1 unit	950,000,000	APBDKOTA		1 unit	
16.01.	Pembangunan Gedung Sekolah	terlaksananya pembangun gedung sekolah baru SD	Kec. IV Jurai	1 unit	60,000,000	APBDKOTA		1 unit	
16.01.	Pembangunan Gedung Sekolah	terlaksananya pembangun gedung sekolah baru SD	Kec. Koto XI Tarusan	1 unit	100,000,000	APBDKOTA		1 unit	
16.01.	Pembangunan Gedung Sekolah	terlaksananya pembangun gedung sekolah baru SD	Nagari Lubuk Betung Inderapura	1 unit	800,000,000			1 unit	
16.02.	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah		kampung koto sungai pinang		780,000,000				
16.04.	Penambahan Ruang Guru Sekolah	terlaksananya penambahan ruang guru sekolah dasar	Lunang Barat	100%	0			100%	
16.04.	Penambahan Ruang Guru Sekolah	terlaksananya penambahan ruang guru sekolah dasar	SDN 03 Simpang Tarusan, SDN 05 Nanggalo Tarusan, SDN 21 Kapuh Tarusan, SDN 36 Dusun Tarusan, SDN 20 Koto Baru Bayang, SDN 28 Karang Pauh Bayang, SDN 40 Lereng Bukit Bayang, SDN 06 Pulut-Pulut Bayang Utara, SDN 08 Limau-Limau Bayang Utara, SDN 34 Gunung Bungkuk IV Jurai, SDN 18 Bukit Kecil IV Jurai, SDN 14 Laban IV Jurai, SDN 25 Sei Nyalo Batang Kapas, SDN 27 Lubuk Nyiur Batang Kapas, SDN 29 Taratak Tempatih batang Kapas, SDN 07 Sikabu Munto Sutura, SDN SDn 09 Ujung Air Sutura, SDN 16 Pd. Lawas Sutura, SDN 02 Medan Baik Lengayang, SDN 06 Pulai Lengayang, SDN 10 Ganting Lengayang, SDn 16 Lubuk Begalung Lengayang, SDN 12 Sei. Liku Ranah Pesisir, SDN 15 Koto Kabun Ranah	100%	4,950,000,000	APBDKOTA		100%	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Pesisir, SDN 05 Pc. Soal, SDN 03 Air Pura, SDN 05 Alang Rambah Basah Ampek Balai						
16.05.	Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum Sekolah	terlaksananya pembangunan ruang labor SMP	Muara Sakai	3 sekolah	295,000,000			3 sekolah	
16.05.	Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum Sekolah	terlaksananya pembangunan ruang labor SMP	Nagari Lunang	3 sekolah	590,000,000			3 sekolah	
16.05.	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamata, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran cagar budaya	Pesisir Selatan	50%	75,000,000	APBDKOTA		50%	
16.09.	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	Terpenuhinya kebutuhan parkir sekolah	10 kecamatan	100%	750,000,000	APBDKOTA		100%	
16.101.	Pembangunan gedung sekolah SMP		Amping parak		50,000,000				
16.101.	Pembangunan gedung sekolah SMP		Kec. Koto XI Tarusan		300,000,000	APBDKOTA			
16.101.	Pembangunan gedung sekolah SMP		Kec. Lengayang		70,000,000	APBDKOTA			
16.102.	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah SMP		Kampung Koto Sungai Pinang		780,000,000				
16.104.	Penambahan ruang guru sekolah SMP	terlaksananya pembangunan ruang guru SMP	Kambang Utara	2 sekolah	250,000,000			2 sekolah	
16.104.	Penambahan ruang guru sekolah SMP	terlaksananya pembangunan ruang guru SMP	Kampung Koto Berapak	2 sekolah	0			2 sekolah	
16.104.	Penambahan ruang guru sekolah SMP	terlaksananya pembangunan ruang guru SMP	Sungai Liku Ateh	2 sekolah	0			2 sekolah	
16.11.	Pembangunan Ruang Ibadah		Cluang		200,000,000				
16.11.	Pembangunan Ruang Ibadah		Kampung Sindang		50,000,000				
16.11.	Pembangunan Ruang Ibadah		Kampung UPT Sindang		50,000,000				
16.11.	Pembangunan Ruang Ibadah		Tanjung Batang Kapas		70,000,000				
16.112.	Pembangunan perpustakaan sekolah SMP	jumlah ruang pustaka yang dibangun	Kambang Utara	5 sekolah	285,000,000			5 sekolah	
16.112.	Pembangunan perpustakaan sekolah SMP	jumlah ruang pustaka yang dibangun	Kampung Lubuk Langinang	5 sekolah	285,000,000			5 sekolah	
16.112.	Pembangunan perpustakaan sekolah SMP	jumlah ruang pustaka yang dibangun	Kampung Sindang	5 sekolah	285,000,000			5 sekolah	
16.112.	Pembangunan perpustakaan sekolah SMP	jumlah ruang pustaka yang dibangun	Limau Gadang	5 sekolah	285,000,000			5 sekolah	
16.112.	Pembangunan perpustakaan sekolah SMP	jumlah ruang pustaka yang dibangun	Nagari Lunang Dua	5 sekolah	285,000,000			5 sekolah	
16.112.	Pembangunan perpustakaan sekolah SMP	jumlah ruang pustaka yang dibangun	SMPN 7 Sutura, SMPN 8 Sutura, SMPN 8 Linggo Sari Baganti, SMPN 3 Ranah Ampek Hulu, SMPN 5 Ranah Pesisir	5 sekolah	1,450,000,000	APBDKOTA		5 sekolah	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
16.114.	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary SMP	terlaksananya pembangunan sarana air bersih dan sanitary SMP	Kampung UPT Sindang	13 sekolah	95,000,000			13 sekolah	
16.114.	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary SMP	terlaksananya pembangunan sarana air bersih dan sanitary SMP	Lakitan Selatan	13 sekolah	1,520,000,000			13 sekolah	
16.114.	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary SMP	terlaksananya pembangunan sarana air bersih dan sanitary SMP	Painan Utara	13 sekolah	285,000,000			13 sekolah	
16.114.	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary SMP	terlaksananya pembangunan sarana air bersih dan sanitary SMP	Silaut VI	13 sekolah	95,000,000			13 sekolah	
16.119.	Pengadaan mebeluer sekolah SMP	Terlaksananya pengadaan meubeler untuk siswa SMP	SMPN 1 Tarusan, SMPN 3 Tarusan, SMPN 4 Tarusan, SMPN 1 Bayang, SMPN 2 Bayang, SMPN 3 Bayang, SMPN 1 Bayang Utara, SMPN 1 IV Jurai, SMPN 3 IV Jurai, SMPN 1 Painan, SMPN 1 Batang Kapas, SMPN 2 Batang Kapas, SMPN 1 Sutura, SMPN 3 Sutura, SMPN 4 Sutura, SMPn 7 Sutura, SMPN 1 Lengayang, SMPN 1 Ranah Pesisir, SMPN 2 Ranah Pesisir, SMPN 3 Ranah Pesisir, SMPN 1 Linggo sari Baganti, SMPN 2 Linggo Sari Baganti, SMPN 3 Linggo Sari Baganti, SMPN 2 Pancung Soal, SMPN 1 Basa Ampek Balai, SMPN 1 Lunang, SMPN 1 Silaut, SMPN 2 Silaut	29 paket	1,392,000,000	APBDKOTA		29 paket	
16.12.	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	terlaksnanya pembangunan perpustakaan sekolah	Cluang	6 SD	285,000,000			6 SD	
16.12.	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	terlaksananya pembangunan perpustakaan sekolah	Kampung Lubuk Langinang	6 SD	285,000,000			6 SD	
16.12.	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	terlaksnanya pembangunan perpustakaan sekolah	Kampung Painan Utara Jalan Pemuda	6 SD	1,140,000,000			6 SD	
16.12.	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	terlaksnanya pembangunan perpustakaan sekolah	Koto Durian kampung Pelangai Kaciak Mudiak Nagari Pelangai kaciak	6 SD	285,000,000			6 SD	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
16.12.	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	terlaksananya pembangunan perpustakaan sekolah	Koto VIII Pelangai	6 SD	570,000,000			6 SD	
16.12.	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	terlaksananya pembangunan perpustakaan sekolah	Lagan Mudik Punggasan	6 SD	570,000,000	APBDKOTA		6 SD	
16.12.	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	terlaksananya pembangunan perpustakaan sekolah	Lunang Barat	6 SD	285,000,000			6 SD	
16.12.	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	terlaksananya pembangunan perpustakaan sekolah	Lunang Tiga	6 SD	285,000,000			6 SD	
16.12.	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	terlaksananya pembangunan perpustakaan sekolah	Nagari Kubu Tapan	6 SD	285,000,000			6 SD	
16.12.	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	terlaksananya pembangunan perpustakaan sekolah	Nagari Lunang Selatan	6 SD	350,000,000			6 SD	
16.12.	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	terlaksananya pembangunan perpustakaan sekolah	SDN 35 Kampung Sawah, SDN 02 TaratakTeleng Bayang Utara, SDN 04 Sago IV Jurai, SDN 15 Koto Panjang Batang Kapas, SDN 31 Pulaui Lengayang, SDN 04 Pasar Surantih	6 SD	900,000,000	APBN		6 SD	
16.12.	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	terlaksananya pembangunan perpustakaan sekolah	Silaut VI	6 SD	285,000,000			6 SD	
16.12.	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	terlaksananya pembangunan perpustakaan sekolah	Sungai Sangkir	6 SD	285,000,000			6 SD	
16.122.	Pengadaaan sarana mobilitas sekolah SMP		Ganting Mudiak Selatan Surantih		75,000,000				
16.122.	Pengadaaan sarana mobilitas sekolah SMP		Kampung Sindang		10,000,000				
16.122.	Pengadaaan sarana mobilitas sekolah SMP		Smp N 2 Silaut		400,000,000				
16.126.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang guru sekolah SMP		Kampung Bukit Siayah		0				
16.14.	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary	terlaksananya pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Cluang	100%	665,000,000			100%	
16.14.	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary	terlaksananya pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Kampung Rumah Panjang	100%	95,000,000			100%	
16.14.	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary	terlaksananya pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Kampung Sindang	100%	95,000,000			100%	
16.14.	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary	terlaksananya pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Kampung UPT Sindang	100%	95,000,000			100%	
16.14.	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary	terlaksananya pembangunan sarana air bersih dan sanitary	KOTO GADANG KE LUBUK BUAYA BUKIT SILAPU DAN AIR SIKAMBING	100%	95,000,000			100%	
16.14.	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary	terlaksananya pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Kp. Bukit Tapus, Nagari Pondok Parian Lunang	100%	95,000,000			100%	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
16.14.	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary	terlaksananya pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Lunang Barat	100%	190,000,000			100%	
16.14.	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary	terlaksananya pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Nagari Lunang Dua	100%	380,000,000			100%	
16.14.	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary	terlaksananya pembangunan sarana air bersih dan sanitary	SDN 42 Kubang Bayang, SDN 01 Asam Kumbang Bayang Utara, SDN 03 Sei. Gayo IV Jurai, SDN 16 Teluk Kasai Batang Kapas, SDN 14 Sei. Sirah Sutura	100%	500,000,000	APBN		100%	
16.14.	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary	terlaksananya pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Tigo Sungai Inderapura	100%	9,500,000,000			100%	
16.144.	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SMP	jumlah ruang belajar sekolah yang direhab	SMPN 2 Tarusan, SMPN 1 Batang Kapas, SMPN 3 IV Jurai, SMPN 3 Sutura, SMPN 2 Lengayang, SMPN 1 pancung Soal	6 sekolah	1,200,000,000	APBDKOTA		6 sekolah	
16.145.	Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah SMP	terlaksananya rehab pada ruang guru sekolah SMP	Koto VIII Pelangai	3 sekolah	500,000,000			3 sekolah	
16.145.	Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah SMP	terlaksananya rehab pada ruang guru sekolah SMP	Nagari Lunang Dua	3 sekolah	150,000,000			3 sekolah	
16.145.	Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah SMP	terlaksananya rehab pada ruang guru sekolah SMP	Nagari Pasir Binjai	3 sekolah	500,000,000			3 sekolah	
16.145.	Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah SMP	terlaksananya rehab pada ruang guru sekolah SMP	SMPN 5 Tarusan, SMPN 4 Bayang, SMPN 2 Ranah Pesisir	3 sekolah	750,000,000	APBDKOTA		3 sekolah	
16.146.	Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah SMP		Lunang Tiga		50,000,000				
16.15.	Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa	terlaksananya pengadaan buku dan alat tulis siswa	SDN 22 Duku Tarusan, SDN 04 Nanggalo Tarusan, SDN 02 PS. Baru Bayang, SDN 12 Api-Api Bayang, SDN 02 Taratak Teleng Bayang, SDN 04 Koto Ranah Bayang Utara, SDN 23 painan Utara IV Jurai, SDN 26 Painan Selatan IV Jurai, SDN 13 Painan Utara, SDN 01 Ps. Kuok Batang Kapas, SDN 21 Limau Sundai	100%	1,000,000,000	APBN		100%	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Batang Kapas, SDN 04 Ps. Surantih Sutura, SDN 08 Ps. Surantih, SDN 07 Koto Baru Lengayang, SDN 30 Ps. Lakitan Lengayang, SDN 24 Koto Raya Lengayang, SDN 08 Pd. Laban Ranah Pesisir, SDN 01 Koto Nan IV Ranah Pesisir, SDN 01 Rantau Batu Ambacang Linggo Sari Baganti, SDN 07 Koto Panai Linggo Sari Baganti						
16.15.	Penyusunan Peraturan Daerah tentangKurikulum Muatan Lokal BAMK Berbasis ABS-SBK	Rancangan peraturan Daerah tentang Kurikulum Muatan lokal BAMk berbasis Adat Basandi Sara', sara' basandi Kitabullah	Pesisir Selatan	100%	128,722,000	APBDKOTA		100%	
16.154.	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah SMP		Pesisir Selatan		1,200,000,000	APBN			
16.159.	Pelatihan penyusunan kurikulum SMP	Terlaksananya penyusunan dan pengembangan K 2006 dan K 2013	Painan	2 semester	112,500,000	APBDKOTA		2 semester	
16.160.	Pembangunan Pagar Sekolah SMP	jumlah pagar SMP yang dibangun	kampung Tsm Silaut II	6 sekolah	0			6 sekolah	
16.160.	Pembangunan Pagar Sekolah SMP	jumlah pagar SMP yang dibangun	Kampung Lubuk Langinang	6 sekolah	450,000,000			6 sekolah	
16.160.	Pembangunan Pagar Sekolah SMP	jumlah pagar SMP yang dibangun	Kampung Sindang	6 sekolah	5,000,000			6 sekolah	
16.160.	Pembangunan Pagar Sekolah SMP	jumlah pagar SMP yang dibangun	Kampung UPT Sindang	6 sekolah	45,000,000			6 sekolah	
16.160.	Pembangunan Pagar Sekolah SMP	jumlah pagar SMP yang dibangun	Kec. Koto XI Tarusan	6 sekolah	200,000,000	APBDKOTA		6 sekolah	
16.160.	Pembangunan Pagar Sekolah SMP	jumlah pagar SMP yang dibangun	Kec. Linggo Sari Baganti	6 sekolah	200,000,000	APBDKOTA		6 sekolah	
16.160.	Pembangunan Pagar Sekolah SMP	jumlah pagar SMP yang dibangun	Kec. Pancung Soal	6 sekolah	100,000,000	APBDKOTA		6 sekolah	
16.160.	Pembangunan Pagar Sekolah SMP	jumlah pagar SMP yang dibangun	Sambungo	6 sekolah	200,000,000			6 sekolah	
16.160.	Pembangunan Pagar Sekolah SMP	jumlah pagar SMP yang dibangun	Silaut VI	6 sekolah	50,000,000			6 sekolah	
16.160.	Pembangunan Pagar Sekolah SMP	jumlah pagar SMP yang dibangun	SMPN 02 Ranah Ampek Hulu Tapan	6 sekolah	500,000,000			6 sekolah	
16.160.	Pembangunan Pagar Sekolah SMP	jumlah pagar SMP yang dibangun	SMPN 3 Tarusan, SMPN 8 Sutura, SMPN 9 Tarsuan, SMPN 1 IV Jurai, SMPN 4 Lengayang, SMPN 8 Linggo Sari Baganti	6 sekolah	750,000,000	APBDKOTA		6 sekolah	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
16.160.	Pembangunan Pagar Sekolah SMP	jumlah pagar SMP yang dibangun	Tanjung Gadang dan Koto Taratak	6 sekolah	400,000,000			6 sekolah	
16.160.	Pembangunan Pagar Sekolah SMP	jumlah pagar SMP yang dibangun	Taratak	6 sekolah	200,000,000			6 sekolah	
16.161.	Pembangunan Pagar Sekolah SD	Pembangunan Pagar SD	1. SDN 10 Koto Jua Bayang, 2. SD 07 Ps Salido IV Jurai, 3. SDN 08 Koto Gunung Batang Kapas, 4. SDN 28 Ps. Surantih Sutura, 5. SDN 34 Koto Rawang Lengayang, 6. SDN 12 Pd. Cupak Lengayang, 7. SDN 10 Sumedang Ranah Pesisir, 8. SDN 01 Pc. Soal, 9. SDN 01 Air Pura, 10. SDN 02 Ps. Bukit Basa Ampek Balai.	100%	1,500,000,000	APBDKOTA		100%	
16.161.	Pembangunan Pagar Sekolah SD	Pembangunan Pagar SD	Durian Seribu	100%	1,274,000,000			100%	
16.161.	Pembangunan Pagar Sekolah SD	Pembangunan Pagar SD	Inderapura	100%	250,000,000			100%	
16.161.	Pembangunan Pagar Sekolah SD	Pembangunan Pagar SD	kampung Tsm Silaut II	100%	0			100%	
16.161.	Pembangunan Pagar Sekolah SD	Pembangunan Pagar SD	Kampung Silaut III	100%	150,000,000			100%	
16.161.	Pembangunan Pagar Sekolah SD	Pembangunan Pagar SD	Kampung Sindang	100%	72,000,000			100%	
16.161.	Pembangunan Pagar Sekolah SD	Pembangunan Pagar SD	Kampung Taratak	100%	0			100%	
16.161.	Pembangunan Pagar Sekolah SD	Pembangunan Pagar SD	Kampung UPT Sindang	100%	120,000,000			100%	
16.161.	Pembangunan Pagar Sekolah SD	Pembangunan Pagar SD	Kec. Bayang	100%	100,000,000	APBDKOTA		100%	
16.161.	Pembangunan Pagar Sekolah SD	Pembangunan Pagar SD	Kec. Koto XI Tarusan	100%	225,000,000	APBDKOTA		100%	
16.161.	Pembangunan Pagar Sekolah SD	Pembangunan Pagar SD	Kec. Lengayang	100%	50,000,000	APBDKOTA		100%	
16.161.	Pembangunan Pagar Sekolah SD	Pembangunan Pagar SD	Kec. Sutura	100%	50,000,000	APBDKOTA		100%	
16.161.	Pembangunan Pagar Sekolah SD	Pembangunan Pagar SD	Kec.Lengayang	100%	100,000,000	APBDKOTA		100%	
16.161.	Pembangunan Pagar Sekolah SD	Pembangunan Pagar SD	Kp. Bukit Tapus, Nagari Pondok Parian Lunang	100%	150,000,000			100%	
16.161.	Pembangunan Pagar Sekolah SD	Pembangunan Pagar SD	Lubuk Bay	100%	0			100%	
16.161.	Pembangunan Pagar Sekolah SD	Pembangunan Pagar SD	Mandeh	100%	0			100%	
16.161.	Pembangunan Pagar Sekolah SD	Pembangunan Pagar SD	Pasar Sungai Tunu	100%	0			100%	
16.161.	Pembangunan Pagar Sekolah SD	Pembangunan Pagar SD	Silaut VI	100%	50,000,000			100%	
16.161.	Pembangunan Pagar Sekolah SD	Pembangunan Pagar SD	Tanjung Batang Kapas	100%	100,000,000			100%	
16.161.	Pembangunan Pagar Sekolah SD	Pembangunan Pagar SD	Taratak Sungai	100%	0			100%	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Lundang						
16.162.	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar (DAK Reguler 2019))		Pesisir Selatan		8,338,500,000	APBN			
16.163.	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar (DAK Afirmasi 2019))		SDN 01 Silaut, SDN 05 Silaut, dan SDN 08 Silaut		471,000,000	APBN			
16.164.	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama (DAK Reguler 2019)		Pesisir Selatan		6,338,000,000	APBN			
16.165.	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama (DAK Afirmasi 2019)		Pesisir Selatan		158,000,000	APBN			
16.166.	Lomba Tingkat Pendidikan Sekolah Dasar	Lomba Tingkat Pendidikan Sekolah Dasar	Kab/Prov	100%	129,000,000	APBDKOTA		100%	
16.167.	Lomba Tata Kelola Pendidikan Dasar		Pesisir Selatan		110,000,000	APBDKOTA			
16.168.	Lomba Peningkatan Pendidikan Menengah Pertama	Terlaksananya lomba bagi siswa SMP di Tingkat Kabupaten dan Propinsi	Kab. Pesisir Selatan	10 cbg lomba	800,000,000	APBDKOTA		10 cbg lomba	
16.17.	Fasilitasi Lembaga Kerapatan Adat Nagari		IV Jurai		200,000,000	APBDKOTA			
16.170.	Penyelenggaraan Gebyar Pendidikan Tingkat Provinsi dan Pusat	Terlaksananya kegiatan peyelenggaraan Gebyar pendidikan tingkat provinsi dan pusat	Propinsi Sumbar	100%	82,000,000	APBDKOTA		100%	
16.171.	Penyelenggaraan Tingkat Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Tingkat Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Painan	100%	750,000,000	APBDKOTA		100%	
16.172.	Bimtek Pengelolaan Dana BOS SD	jumlah pengelolah dana BOS yang dilatih	Pesisir Selatan	770 orang	455,000,000	APBDKOTA		770 orang	
16.174.	Pelaksanaan Akreditasi Sekolah SMP	Terlaksananya penilaian Akreditasi sekolah SD dan SMP	Kab. Pesisir Selatan	25 sekolah	130,000,000	APBDKOTA		25 sekolah	
16.175.	Piloting Sekolah Penguatan Pendidikan Karakter SMP	jumlah SMP piloting penguatan pendidikan karakter di 15 kecamatan di kabupaten pesisir selatan	Pesisir selatan	15 SMP	525,000,000	APBDKOTA		15 SMP	
16.176.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP	Pembinaan Minat,Bakat, dan Kreativitas Siswa SMP	Pesisir selatan	100%	315,194,000	APBDKOTA		100%	
16.177.	Monitoring, Evaluasi Penggunaan Dana BOS SMP	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi Penggunaan Dana BOS SMP	Painan	100%	45,000,000	APBDKOTA		100%	
16.178.	Monitoring, Evaluasi Penggunaan Dana BOS SD	Monitoring, Evaluasi Penggunaan Dana BOS SD	Painan	100%	85,000,000	APBDKOTA		100%	
16.18.	Pelatihan Seni Tradisional	terlaksananya pelatihan seni budaya bagi tenaga pendidik	Pesisir Selatan	100%	687,500,000	APBDKOTA		100%	
16.18.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga SIswa	Terlaksananya kebutuhan alat musik drum band sekolah	30 sekolah	100%	750,000,000	APBDKOTA		100%	
16.18.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Terlaksananya kebutuhan alat musik drum band sekolah	Kec. Airpura	100%	50,000,000	APBDKOTA		100%	
16.18.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Terlaksananya kebutuhan alat musik drum band sekolah	Kec. Bayang	100%	0	APBDKOTA		100%	
16.18.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Terlaksananya kebutuhan alat musik drum band sekolah	Kec. IV Jurai	100%	25,000,000	APBDKOTA		100%	
16.18.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Terlaksananya kebutuhan alat musik drum	Kec. Lengayang	100%	250,000,000	APBDKOTA		100%	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		band sekolah							
16.18.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Terlaksananya kebutuhan alat musik drum band sekolah	Kec. Pancung Soal, Kec. Airpura, Kec. Basa IV Balai, Kec. Ranah IV Hulu, Kec. Lunang, Kec. Silaut	100%	1,000,000,000	APBDKOTA		100%	
16.18.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Terlaksananya kebutuhan alat musik drum band sekolah	Kec. Tapan	100%	200,000,000	APBDKOTA		100%	
16.180.	Penguatan Kompetensi Supervisi Kepala Sekolah	jumlah kepala sekolah yang mengikuti pelatihan kompetensi supervisi	Painan	463 orang	250,000,000	APBDKOTA		463 orang	
16.181.	Penyelenggaraan Pendidikan Karakter di Pendidikan Dasar	Penyelenggaraan Pendidikan Karakter di Pendidikan dasar	Menyesuaikan	100%	490,000,000	APBDKOTA		100%	
16.182.	Pengadaan Media Pendidikan Sekolah Dasar (Komputer/laptop/proyektor)	terlaksananya pengadaan media pendidikan Sekolah dasar	1)SDN 04 Nanggalo Tarusan, 2)SDN 10 Sei. Lundang Tarusan, 3)SDN 44 Taratak Tarusan, 4)SDN 05 Ps. Baru Bayang, 5)SDN 13 Kubang Bayang, 6)SDN 35 Ambacang Kamba Bayang, 7)SDN 36 Lubuk Pasing Bayang, 8)SDN 01 Tambang IV Jurai, 9)SDN 15 Bunga Pasang IV Jurai, 10)SDN 21 Bunga Pasang IV Jurai, 11)SDN 06 Anakan Batang Kapas, 12)SDN 17 Sapan Batang Kapas, 13)SDN 02 Ampalu Sutura, 14)SDN 12 Gunung Lelo Sutura, 15)SDN 14 Koto Baru Lengayang, 16)SDN 27 Ps. Kambang Lengayang, 17)SDN 28 Ps. Gompom Lengayang, 18)SDN 37 Tampunik Lengayang, 19)SDN 05 Lunang, 20) SDN	70 unit	1,050,000,000	APBDKOTA		70 unit	
16.183.	Pengadaan Media Pembelajaran SD (KIT IPA,IPS,bahasa,PJOK,Seni Budaya dan Keterampilan)	terlaksananya pengadaan media pembelajaran SD	1)SDN 01 Barung belantai Tarusan, 2)SDN 02 Talawi Tarusan,3)SDN 37 Koto Pulai Tarusan,4)SDN 41 Kapuh	130 unit	2,880,000,000	APBDKOTA		130 unit	

Nama OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Pasar Baru Bayang,6)SDN 09 Telu Bakung Bayang,7)SDN 14 Lubuk Aur Bayang,8)SDN 27 Limau Asam Bayang, 9)SDN 01 Asam Kumbang Bayang Utara, 10)SDN 04 Koto Ranah Bayang Utara, 11)SDN 05 Salido Kecil IV Jurai, 12)SDN 19 Painan Selatan, 13)SDN 27 Sago IV Jurai, 14)SDN 22 Salido IV Jurai,15)SDN 11 Teluk Betung Batang Kapas, 16)SDN 14 Koto Nan Tigo Batang Kapas, 17)SDN 23 Ps.Kuok, 18)SDN 02 Ampalu Sutera, 19)SDN 05 Timbulun Sutera, 20)SDN 16 Padang Lawas Sutera, 21)SDN 19 Talang Tan Saidi Lengayang, 22)SDN 24 Koto Raya Lengayang, 23)SDN 36 Rangeh Lengayang, 24)SDN 44 Kapau Lengayang, 25)SDN 07 Labuhan Ranah Pesisir, 26)SDN 12 Sei Liku Ranah Pesisir, 27)SDN 19 Pdg. Sirah Ranah Pesisir, 28)SDN 05 Muara Kandis Linggo Sari Baganti,						
16.184.	Lanjutan Pembangunan Ruang Belajar SMP	jumlah ruang belajar yang dibangun	SMPN 7Linggo Sari Baganti,SMPN 8 Tarusan,SMPN 5 Sutera,SMPN 4 Tarusan,SMPN 7 Sutera,SMPN 4 Silaut,SMPN 9 Tarusan	7 sekolah	875,000,000	APBDKOTA		7 sekolah	
16.185.	Pengadaan Media Pendidikan SMP (	jumlah sekolah yang menyediakan media	Kec. Silaut	61 unit	150,000,000	APBDKOTA		61 unit	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Komputer/laptop/proyektor)	pembelajaran							
16.186.	Pengadaan Komputer Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dan Ujian Kompetensi Guru (UKG)	Terlaksananya ujian-ujian berbasis komputer di sekolah	SMPN 1 Batang Kapas,SMPN 1 Sutera,SMPN 1 Linggo Sari Baganti,SMPN 1 Lunang,SMPN 1	100%	1,500,000,000	APBDKOTA		100%	
16.187.	Pembinaan Bagi wakil kepala SMP	terlaksananya pembinaan pada wakil kepala SMP	Painan	75 orang	112,500,000	APBDKOTA		75 orang	
16.188.	Pembinaan bagi proktor dan teknisi sekolah pelakasana UNBK tahun 2019	terlaksananya pembinaan bagi prokotor dan teknisi sekolah pelaksanaan UNBK tahun2019	Painan	75 orang	112,500,000	APBDKOTA		75 orang	
16.189.	Operasional Sarana Mobilitas Daerah Terpencil Sekolah Dasar		Tarusan		210,000,000	APBDKOTA			
16.19.	FLS2N Tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama		IV jurai		350,000,000	APBDKOTA			
16.19.	Pengadaan Mebeleur Sekolah	Terlaksananya Pengadaan meubeler untuk siswa SD	Pesisir Selatan	100%	1,500,000,000	APBDKOTA		100%	
16.191.	Sosialisasi dan Informasi Pendidikan Dasar	Sosialisasi dan Informasi Pendidikan Dasar	Pesisir Selatan	100%	250,000,000	APBDKOTA		100%	
16.21.	Lomba Pidato Adar Antar Siswa Tingkat SLTP		IV Jurai		150,000,000	APBDKOTA			
16.22.	Lomba Fotografi Dengan Tema "Situs Purbakala"	terlaksananya lomba fotografi situs cagar budaya	Painan	100%	75,000,000	APBDKOTA		100%	
16.22.	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah		Kacamatan Sutera		280,000,000				
16.22.	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah		Kampung Sindang		25,000,000				
16.22.	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah		Koto Nan Tigo Selatan Surantih		50,000,000				
16.22.	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah		Nagari Batang Arah Tapan		100,000,000				
16.22.	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah		Nagari Taratak Sungai Lundang		0				
16.22.	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah		SDN 10 Pasar Melintang dan SDN 02 Padang Kejai		200,000,000				
16.23.	Feature Kebudayaan Pesisir Selatan		Pesisir Selatan		100,000,000	APBDKOTA			
16.24.	Lomba Lukis Budaya Kabupaten Pesisir Selatan		IV Jurai		100,000,000	APBDKOTA			
16.25.	Penyusunan peraturan Daerah tentang Penegasan dan Penerapan serta Pelestarian Simbol-Symbol Adat dan Nilai-Nilai Adat Berbasis ABS-SBK Adat Salingka Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan		Painan		128,722,000	APBDKOTA			
16.26.	Pelatihan Tari Tradisi	terlaksananya pelatihan tari tradisi	Painan	100%	124,500,000	APBDKOTA		100%	
16.26.	Pemeliharaan/Rutin Berkala Ruang Guru Sekolah		Amping Parak Timur		30,000,000				
16.26.	Pemeliharaan/Rutin Berkala Ruang Guru Sekolah		Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan		1,000,000,000				
16.26.	Pemeliharaan/Rutin Berkala Ruang Guru		Lansano Taratak		250,000,000				

Nama OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Sekolah								
16.26.	Pemeliharaan/Rutin Berkala Ruang Guru Sekolah		Lunang Barat		0				
16.27.	Workshop Badampiang	terlaksananya workshop badampiang	Painan	100%	111,000,000	APBDKOTA		100%	
16.28.	Revitalisasi dan Pemugaran Situs Cagar Budaya	terlaksananya revitalisasi situs cagar budaya	Markas Tentara Pelajar & Rumah Percetakan Uang	100%	1,500,000,000	APBDKOTA		100%	
16.29.	Penelitian dan Kajian Situs Cagar Budaya	terlaksananya penelitian dan kajian situs cagar budaya	Pesisir Selatan	70%	50,000,000	APBDKOTA		70%	
16.30.	Pembangunan Museum	terlaksananya pembangunan museum Kab. Pessel	Kec.IV Jurai	70%	100,000,000	APBDKOTA		70%	
16.31.	Lawatan Sejarah Kabupaten Pesisir Selatan		Museum Mande Rubiah		84,811,000	APBDKOTA			
16.32.	Penyusunan Buku Kerajaan-Kerajaan Lokal Pesisir Selatan	terlaksananya penyusunan buku-buku kerajaan lokal pesisir selatan	Pesisir Selatan	50%	176,045,000	APBDKOTA		50%	
16.33.	Seminar Cagar Budaya yang Ada di Kabupaten Pesisir Selatan	terlaksananya seminar cagar budaya yang ada di Kab. Pessel	Pesisir Selatan	85%	40,000,000	APBDKOTA		85%	
16.34.	Pendokumentasian Simbol-Symbol Adat Pada Setiap Nagari yang Ada di Kabupaten Pesisir Selatan	Terlaksananya pendataan dan inventarisasi simbol-simbol dan nilai-nilai adat pesisir selatan sebagai bahan dasar pengelolaan adat dan tradisi	Pesisir Selatan	100%	175,000,000	APBDKOTA		100%	
16.38.	Lomba Film Pendek Antar Pelajar	terlaksananya lomba film pendek antar pelajar	Painan	100%	75,000,000	APBDKOTA		100%	
16.41.	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah	Terlaksananya pembangunan rehabilitasi sedang bangunan sekolah	Menyesuaikan	100%	100,000,000	APBDKOTA		100%	
16.41.	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah	Terlaksananya pembangunan rehabilitasi sedang bangunan sekolah	Pesisir Selatan	100%	100,000,000	APBDKOTA		100%	
16.44.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	terlaksananya rehab sedang/berat ruang kelas sekolah	Inderapura	100%	250,000,000			100%	
16.44.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	terlaksananya rehab sedang/berat ruang kelas sekolah	Kampung Bukit Siayah	100%	400,000,000			100%	
16.44.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	terlaksananya rehab sedang/berat ruang kelas sekolah	Kampung kasai	100%	150,000,000			100%	
16.44.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	terlaksananya rehab sedang/berat ruang kelas sekolah	Kampung Lubuk Langinang	100%	100,000,000			100%	
16.44.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	terlaksananya rehab sedang/berat ruang kelas sekolah	Kampung Painan Utara Jalan Setia Budi Painan	100%	400,000,000			100%	
16.44.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	terlaksananya rehab sedang/berat ruang kelas sekolah	Kampung Tanah Bato	100%	50,000,000			100%	
16.44.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	terlaksananya rehab sedang/berat ruang kelas sekolah	Kampung Ujung Tanah Nagari Palokan Inderapura Kec Airpura	100%	200,000,000			100%	
16.44.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	terlaksananya rehab sedang/berat ruang kelas sekolah	Kecamatan BAB Tapan	100%	1,200,000,000			100%	
16.44.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	terlaksananya rehab sedang/berat ruang kelas	Kelok Koto Langang	100%	100,000,000			100%	

Nama OPD : **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Sekolah	sekolah							
16.44.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	terlaksananya rehab sedang/berat ruang kelas sekolah	Koto Baru Rawang	100%	200,000,000			100%	
16.44.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	terlaksananya rehab sedang/berat ruang kelas sekolah	Koto VIII Pelangai	100%	150,000,000			100%	
16.44.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	terlaksananya rehab sedang/berat ruang kelas sekolah	Lunang Tiga	100%	300,000,000			100%	
16.44.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	terlaksananya rehab sedang/berat ruang kelas sekolah	Menyesuaikan	100%	6,500,000,000	APBN		100%	
16.44.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	terlaksananya rehab sedang/berat ruang kelas sekolah	Nagari Kubang Koto Berapak	100%	50,000,000			100%	
16.44.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	terlaksananya rehab sedang/berat ruang kelas sekolah	Nagari Kubu Tapan	100%	100,000,000			100%	
16.44.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	terlaksananya rehab sedang/berat ruang kelas sekolah	Sungai Liku Ateh	100%	150,000,000			100%	
16.44.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	terlaksananya rehab sedang/berat ruang kelas sekolah	Tanah Kare	100%	200,000,000			100%	
16.51.	Rehabilitasi Sedang/Berat Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	Terlaksananya pekerjaan rehab taman, lapangan upacara	Menyesuaikan	100%	180,000,000	APBDKOTA		100%	
16.53.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Ibadah		Kampung Pasar Baru		400,000,000				
16.53.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Ibadah		Punggasan		50,000,000				
16.53.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Ibadah		Sungai liku Ateh		50,000,000				
16.62.	Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB		Kambang Utara		540,000,000				
16.62.	Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB		Kampung Lubuk Langinang		900,000,000				
16.62.	Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB		Kayu Gadang		540,000,000				
16.62.	Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB		Koto Nan Tigo Utara Surantih		360,000,000				
16.62.	Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB		PASAR KAMBANG		360,000,000				
16.62.	Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB		silaut VI		360,000,000				
16.62.	Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB		SMPN 6 Lengayang		375,000,000	APBDKOTA			
16.70.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pembinaan Minat,Bakat, dan Kreativitas Siswa SD	painan,padang,pusat	100%	405,182,000	APBDKOTA		100%	
16.73.	Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar		Menyesuaikan		250,000,000	APBDKOTA			
16.79.	Penambahan ruang kelas baru SD/Mi/SDLB	Pembangunan Ruang Kelas Baru SD	Kacamatan Sutera	100%	2,970,000,000			100%	
16.79.	Penambahan ruang kelas baru SD/Mi/SDLB	Pembangunan Ruang Kelas Baru SD	Kelok Koto Langang	100%	330,000,000			100%	
16.79.	Penambahan ruang kelas baru SD/Mi/SDLB	Pembangunan Ruang Kelas Baru SD	Lubuk Bunta	100%	800,000,000			100%	

Nama OPD : **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
16.79.	Penambahan ruang kelas baru SD/MI/SDLB	Pembangunan Ruang Kelas Baru SD	Nagari Lalang Panjang Inderapura	100%	495,000,000			100%	
16.79.	Penambahan ruang kelas baru SD/MI/SDLB	Pembangunan Ruang Kelas Baru SD	Tanjung Batang Kapas	100%	330,000,000	APBDKOTA		100%	
16.80.	Penyelenggara Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar	Menyesuaikan	100%	889,216,500	APBDKOTA		100%	
17.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya								
17.05.	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah		Kab. Pesisir Selatan		250,000,000	APBDKOTA			
18.	Program Pendidikan Non Formal								
18.01.	Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal	Tertaksananya pelatihan tutor pendidikan Non Formal	Painan	30 orang	60,000,000	APBDKOTA		30 orang	
18.15.	Penyelenggaraan Paket C	Tertaksananya Penyelenggaraan Paket C	Painan	240 orang	470,000,000	APBDKOTA		240 orang	
18.16.	Pelaksanaan UNPK Paket B	Tertaksananya Ujian Paket B	Painan	150 orang	70,000,000	APBDKOTA		150 orang	
18.17.	Pelaksanaan UNPK Paket C	Tertaksananya Ujian Paket C	Painan	250 orang	80,000,000	APBDKOTA		250 orang	
18.18.	Pelatihan Tutor Paket C dan B	Pelatihan Tutor Paket C	painan	108 orang	130,400,000	APBDKOTA		108 orang	
18.19.	Pelatihan Tutor Pendidikan Kesetaraan		Pesisir Selatan		142,000,000	APBDKOTA			
18.20.	Pelatihan tenaga kependidikan non formal		IV Jurai		50,000,000	APBDKOTA			
18.21.	Pelatihan Tutor Keaksaraan Fungsional Keterampilan		IV Jurai		52,000,000	APBDKOTA			
18.22.	Pelatihan LKP(Lembaga Kursus dan Pelatihan) dan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)	Tertaksananya pelatihan LKP dan PKBM	Painan	80 orang	180,000,000	APBDKOTA		80 orang	
18.23.	Peringatan Hari Aksara Internasional (HAI)	Tertaksananya Kegiatan Hari Aksara Internasional	pariaman	1 kali	200,000,000	APBDKOTA		1 kali	
18.24.	Rintisan Aksara Kewirausahaan	jumlah WB di 8 lembaga	Pesisir selatan	160 orang	350,000,000	APBDKOTA		160 orang	
18.27.	Pelatihan Pendidikan Keluarga	Tertaksananya pelatihan pendidikan keluarga untuk PAUD dan SD	Painan	120 orang	280,000,000	APBDKOTA		120 orang	
20.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan								
20.01.	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	Terseleksinya bahan-bahan sertifikasi guru, sesuai dengan petunjuk teknis aturan sertifikasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	16 orang x 4 triwulan	209,280,000	APBDKOTA		16 orang x 4 triwulan	
20.03.	Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	jumlah pendidik yang akan mengikuti pelatihan kompetensi mapel UN dan OSN	Menyesuaikan	300 orang	616,239,700	APBDKOTA		300 orang	
20.06.	Pembinaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Guru (PPPG)	Memberdayakan PKG, MGMP untuk menunjang Standar Pendidikan yang ada disetiap kecamatan	Pesisir Selatan	600 orang	500,000,000	APBDKOTA		600 orang	
20.08.	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Meningkatkan Kompetensi pengawas SD dan SMP untuk menjadi asesor pada penilaian kepala sekolah	Pesisir Selatan	100 orang	500,000,000	APBDKOTA		100 orang	
20.09.	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	Terpetahkannya kompetensi dan penyebaran guru	Pesisir Selatan	15 kecamatan	75,000,000	APBDKOTA		15 kecamatan	
20.10.	Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Pendidik	terukurnya kemampuan kompetensi tenaga pendidikan mulai dari TK, SD, dan SMP	Painan	9 kategori	415,035,000	APBDKOTA		9 kategori	
20.13.	Pembinaan Pusat Kegiatan Guru PAUD	jumlah pusat kegiatan belajar yang dibina	Pesisir Selatan	15 kecamatan	300,000,000	APBDKOTA		15 kecamatan	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
20.14.	Pembinaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran	jumlah guru yang mengikuti pembinaan musyawarah guru mata pelajaran	IV Jurai	15 kecamatan	180,000,000	APBDKOTA		15 kecamatan	
20.15.	Pembinaan Tim Evaluasi Pembuatan Master Soal Pendidikan Dasar	jumlah tim pembuatan master soal yang dilatih	Painan	3 tim	92,000,000	APBDKOTA		3 tim	
20.16.	Pembinaan Tim Evaluasi Pembuatan Master Soal SMP	Terlaksananya Pembinaan Bagi Tim Penyusun soal Ujian SMP	Painan	10 Mapel	150,000,000	APBDKOTA		10 Mapel	
20.19.	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik PAUD	Peningkatan Kompetensi Guru PAUD yang ada dalam wilayah kecamatan	Pesisir Selatan	150 tendik	175,000,000	APBDKOTA		150 tendik	
20.22.	Pengembangan Kompetensi Kepala Sekolah	jumlah kepala sekolah yang mengikuti pelatihan kompetensi	Painan	100 orang	380,000,000	APBDKOTA		100 orang	
20.23.	Bimtek Forum Ilmiah Guru Dalam Pengembangan PKB	jumlah guru yang mengikuti PKB	Painan	100 orang	215,000,000	APBDKOTA		100 orang	
20.24.	Bimbingan Penilaian Kinerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah	jumlah guru, kepek, dan pengawas yang dinilai kinerjanya	Pesisir Selatan	849 orang	772,331,000	APBDKOTA		849 orang	
20.25.	Penilaian angka kredit tenaga pendidik	Terlaksananya Penilaian angka kredit tenaga pendidik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 tahun	200,000,000	APBDKOTA		1 tahun	
20.26.	Pembinaan Tenaga Pendidikan Melalui Guru Pembelajar	jumlah tenaga pendidik yang mengikuti GP	Pesisir Selatan	80 orang	130,000,000	APBDKOTA		80 orang	
20.28.	Bimtek Peningkatan Kompetensi Guru SD	peningkatan Kompetensi guru SD untuk menuju delapan standar nasional pendidikan	Painan	400 orang	450,000,000	APBDKOTA		400 orang	
20.29.	Penilaian Hasil Belajar Tingkat Satuan Pendidikan SMP	Terciptanya aplikasi hasil belajar siswa (rapor)	Painan	1 kegiatan	150,000,000	APBDKOTA		1 kegiatan	
20.31.	Kegiatan Sosialisasi Juknis Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kredit Guru	Terlaksananya Sosialisasi Juknis	Painan	2 angkatan	140,000,000	APBDKOTA		2 angkatan	
20.32.	Rekrutmen dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah SD dan SMP	tersedianya 30 orang calon kepala sekolah SMP dan 60 orang kepala SD yang sudah memiliki NUKS dari LP2KS indonesia	Painan	150 orang	200,000,000	APBDKOTA		150 orang	
20.33.	Pelatihan Revolusi Mental Kepala Sekolah	terlatihnya revolusi mental 45 orang kepala SMP dan 120 orang kepala sekolah SD	Painan	165 orang	250,000,000	APBDKOTA		165 orang	
20.34.	Penguatan Kepala Sekolah dan Pengawas	terpenuhinya kepala sekolah yang sudah mempunyai sertifikat sesuai tuntutan Permendiknas No. 28 Tahun 2010	Pesisir Selatan	184 orang	276,000,000	APBDKOTA		184 orang	
20.37.	Penyediaan Jasa Tenaga Pendidik Non PNS	Tersedianya guru honor untuk memenuhi kekurangan guru di Kab. Pesisir Selatan	Pesisir Selatan	1220 guru SD	11,556,000,000	APBDKOTA		1220 guru SD	
22.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan								
22.07.	Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan	tersedianya website dinas pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 tahun	71,000,000	APBDKOTA		1 tahun	
22.10.	Penyelenggaraan Akademi Komunitas	Tersedianya biaya operasional penyelenggaraan akademi komunitas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 tahun	550,000,000	APBDKOTA		1 tahun	
22.11.	Sosialisasi dan updating data pokok pendidikan (Dapodik)	Terlaksananya Sosialisasi dan updating data pokok pendidikan (dapodik)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 kali	150,000,000	APBDKOTA		1 kali	
22.12.	Pemetaan Penjaminan Mutu Pendidikan	Terlaksananya Pengembangan Sistem Perencanaan Data Penjaminan Mutu Pendidikan	Pesisir Selatan	100%	123,758,200	APBDKOTA		100%	
22.14.	Pendataan dan Pemetaan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Terlaksananya Pendataan dan pemetaan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Pesisir Selatan	100%	74,996,000	APBDKOTA		100%	

Nama OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
22.15.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Ujian Nasional dan Ujian Ujian Sekolah Berstandar Nasional	Terlaksananya Monitoring pelaksanaan ulangan dan ujian SD dan SMP	Pesisir Selatan	2 jenjang satuan ppendidikan	225,000,000	APBDKOTA		2 jenjang satuan ppendidikan	
22.16.	Monitoring, Evalusasi dan Pelaporan Pembinaan Pembelajaran Sekolah		Pesisir Selatan		150,000,000	APBDKOTA			
22.17.	Bantuan Siswa Miskin Jenjang SD	terlasurkannya bantuan untuk siswa miskin di SD	Pesisir Selatan	14.000 siswa	6,300,000,000	APBDKOTA		14.000 siswa	
22.18.	Bantuan Siswa Miskin Jenjang SMP	tersalurkannya bantuan untuk siswa miskin jenjang SMP	Pesisir Selatan	8.000 siswa	6,000,000,000	APBDKOTA		8.000 siswa	

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019

Nama OPD : **DINAS KESEHATAN**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Dinas Kesehatan dan Puskesmas		335,940,000	APBDKOTA			
01.06.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		Dinas Kesehatan dan Puskesmas		400,000,000	APBDKOTA			
01.07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Dinas Kesehatan dan Puskesmas		190,000,000	APBDKOTA			
01.08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		dinas kesehatan dan puskesmas		458,259,724	APBDKOTA			
01.09.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja		dinas kesehatan		15,000,000	APBDKOTA			
01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor		dinkes		27,631,620	APBDKOTA			
01.11.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		dinkes		27,450,685	APBDKOTA			
01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		dinas kesehatan		20,000,000	APBDKOTA			
01.13.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		dinkes		500,000,000	APBDKOTA			
01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Dinas Kesehatan		13,900,000	APBDKOTA			
01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman		Dinas Kesehatan dan Puskesmas		90,000,000	APBDKOTA			
01.18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah		dinas kesehatan		147,936,588	APBDKOTA			
01.19.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah		dinkes		60,000,000	APBDKOTA			
01.21.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor		dinas kesehatan dan puskesmas		221,000,000	APBDKOTA			
01.30.	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan		dinas kesehatan		100,000,000	APBDKOTA			
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
02.05.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		Dinas Kesehatan		300,000,000	APBDKOTA			
02.22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Dinas Kesehatan		500,000,000	APBDKOTA			
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
05.01.	Pendidikan dan Pelatihan Formal		Dinas Kesehatan		35,000,000	APBDKOTA			
05.16.	Legalisasi dan Registrasi Tenaga Fungsional Kesehatan		dinas kesehatan		70,965,920	APBDKOTA			

Nama OPD : **DINAS KESEHATAN**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
15.	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan								
15.01.	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)		puskesmas		4,252,349,000	APBN			
15.02.	Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan		puskesmas		200,000,000	APBDKOTA			
15.07.	Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Penunjang DAK)		Dinas Kesehatan		30,000,000	APBDKOTA			
16.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat								
16.02.	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan		pesisir selatan		150,000,000	APBDKOTA			
16.09.	Peningkatan Kesehatan Masyarakat		pesisir selatan		1,714,157,217	APBDKOTA			
16.15.	Pelayanan Kesehatan Rujukan di Sarana Pelayanan Kesehatan		pesisir selatan		60,000,000	APBDKOTA			
16.16.	Pelayanan Kesehatan pada Pengobatan Tradisional (Batra)		pesisir selatan		30,000,000	APBDKOTA			
16.17.	Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar Masyarakat (Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)		pesisir selatan		11,288,225,000	APBN			
16.18.	Penanggulangan Kegawatdaruratan Terpadu		pesisir selatan		400,000,000	APBDKOTA			
17.	Program Pengawasan Obat dan Makanan								
17.02.	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya		15 kecamatan		40,000,000	APBDKOTA			
17.16.	Peningkatan manajemen aset/ barang daerah		Dinas Kesehatan,Puskesm as dan RSUD		111,190,204	APBDKOTA			
19.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat								
19.01.	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat		puskesmas		190,000,000	APBDKOTA			
19.06.	Pembinaan dan Pembentukan Nagari Siaga		nagari dan puskesmas		90,000,000	APBDKOTA			
19.07.	Upaya kesehatan institusi dan peran serta masyarakat (PSM)		posyandu dan puskesmas		110,000,000	APBDKOTA			
19.08.	Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Kabupaten		kabupaten pesisir selatan		120,000,000	APBDKOTA			
19.09.	Implementasi Gerakan Masyarakat		Kabupaten Pesisir Selatan		100,000,000	APBDKOTA			
20.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat								
20.02.	Pemberian tambahan makanan dan vitamin		Puskesmas		350,000,000	APBDKOTA			
20.08.	Pemantauan status gizi masyarakat		puskesmas		100,000,000	APBDKOTA			
20.09.	Pembinaan dan monitoring program gizi masyarakat		Puskesmas		100,000,000	APBDKOTA			
21.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat								
21.01.	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat		Kabupaten Pesisir Selatan		400,000,000	APBDKOTA			

Nama OPD : **DINAS KESEHATAN**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
21.07.	Pendamping PAMSIMAS		Dinas Kesehatan dan lokasi pamsimas		40,000,000	APBDKOTA			
21.08.	Penunjang Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)		Kabupaten Pesisir Selatan dan Puskesmas		25,000,000	APBDKOTA			
21.09.	Pengelolaan dan Pengembangan Pemeriksaan Sanitasi Dasar Masyarakat		Kabupaten Pesisir Selatan dan Dinas Kesehatan		80,000,000	APBDKOTA			
21.10.	Pelaksanaan Forum Kecamatan dan Kabupaten Sehat		15 Kecamatan		300,000,000	APBDKOTA			
21.11.	Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		puskesmas		60,000,000	APBDKOTA			
22.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular								
22.01.	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk		Kabupaten Pesisir Selatan		150,000,000	APBDKOTA			
22.01.	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk		Lunang Barat		0				
22.01.	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk		Lunang Tiga		0				
22.01.	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk		Nagari Lunang Dua		0				
22.05.	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular		Kabupaten Pesisir Selatan		167,000,000	APBDKOTA			
22.06.	Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik		Kabupaten Pesisir Selatan		40,000,000	APBDKOTA			
22.08.	Peningkatan Imunisasi		Kabupaten Pesisir Selatan		150,000,000	APBDKOTA			
22.09.	Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah		puskesmas		75,000,000	APBDKOTA			
22.12.	Sistem Kewaspadaan Dini KLB/Wabah/Bencana		puskesmas		66,000,000	APBDKOTA			
22.14.	Pemantauan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Akibat Bencana/KLB		Kabupaten Pesisir Selatan		75,000,000	APBDKOTA			
23.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan								
23.07.	Akreditasi, Registrasi dan Sertifikasi Kesehatan		Kabupaten Pesisir Selatan		200,000,000	APBDKOTA			
23.08.	Akreditasi, Registrasi dan Sertifikasi Kesehatan (DAK non Fisik)		Kabupaten Pesisir Selatan		1,624,000,000	APBN			
23.09.	Pembinaan dan Evaluasi Monitoring dr/drg/bidan PTT		puskesmas		40,000,000	APBDKOTA			
23.10.	Pengelolaan dan Pembinaan Tenaga Fungsional		puskesmas dan rumah sakit		45,000,000	APBDKOTA			
23.11.	Upaya Peningkatan Kinerja Petugas dan Institusi Kesehatan		puskesmas		100,000,000	APBDKOTA			
23.12.	Akreditasi Rumah Sakit		rumah sakit		0	APBN			
25.	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya								
25.04.	Pengadaan puskesmas keliling		puskesmas tanjung		900,000,000	APBDKOTA			

Nama OPD : **DINAS KESEHATAN**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			beringin dan kambing						
25.06.	Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas (DAK dan Pendamping)		puskesmas		6,810,266,000	APBN			
25.14.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas		kecamatan		2,000,000,000	APBDKOTA			
25.24.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya		puskesmas tarusan dan pustu pulau karam		2,700,000,000	APBDKOTA			
25.25.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya (Penunjang DAK)		Dinas Kesehatan		350,000,000	APBDKOTA			
25.26.	Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas (DAK)		puskesmas		833,000,000	APBN			
25.28.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Puskesmas		puskesmas		75,000,000	APBDKOTA			
25.29.	Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah		puskesmas		0	APBN			
26.	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata								
26.18.	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit		rumah sakit		0	APBN			
26.27.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit		rumah sakit		0	APBN			
28.	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan								
28.01.	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat		Kabupaten Pesisir Selatan		6,300,000,000	APBDKOTA			
28.09.	Pelayanan gratis di puskesmas dan jaringannya		Kabupaten Pesisir Selatan		1,300,000,000	APBDKOTA			
28.11.	Pelayanan Kesehatan (Kapitasi) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		puskesmas		17,500,000,000	APBDKOTA			
28.11.	Pelayanan Kesehatan (Kapitasi) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		Rsud tapan		84,000,000	APBDKOTA			
28.12.	Pelayanan Kesehatan (Non Kapitasi) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		puskesmas		1,100,000,000	APBDKOTA			
28.12.	Pelayanan Kesehatan (Non Kapitasi) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		Rsud tapan		150,000,000	APBDKOTA			
30.	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia								
30.01.	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan		Dinas Kesehatan dan Puskesmas		175,619,042	APBDKOTA			
32.	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak								
32.04.	Usaha Kesehatan Ibu dan Anak		Dinas Kesehatan dan Puskesmas		126,036,522	APBDKOTA			
32.05.	Pelayanan kesehatan anak pra sekolah dan usia sekolah (Prasekdam Usek)		Dinas Kesehatan dan Puskesmas		40,000,000	APBDKOTA			
32.06.	Usaha Kesehatan Ibu dan Anak (Jaminan Persalinan) DAK Non Fisik		Kecamatan dan Puskesmas		3,098,880,000	APBN			
33.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular								
33.01.	Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Tidak		puskesmas		100,000,000	APBDKOTA			

Nama OPD : **DINAS KESEHATAN**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Menular (PTM)								
33.02.	Deteksi Dini dan Pengendalian Penyakit Akibat Rokok		puskesmas		75,000,000	APBDKOTA			
33.03.	Pemantauan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Matra		puskesmas		40,000,000	APBDKOTA			
33.04.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat		puskesmas		72,859,478	APBDKOTA			
35.	Program Peningkatan Sarana Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit								
35.01.	Operasional Pelayanan RSU Pratama Tapan		RSUD Pratama Tapan		4,000,000,000	APBDKOTA			

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019

Nama OPD : **RSUD DR. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
16.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat								
16.11.	Peningkatan pelayanan dan Penanggulangan Masalah kesehatan		Painan		200,000,000	APBDKOTA			
26.	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata								
26.03.	Pembangunan gudang obat/apotik		Painan		0	APBDKOTA			
26.18.	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit		Painan		27,000,000,000	APBDKOTA			
26.20.	Pengadaan ambulance/mobil jenazah		Painan		0	APBDKOTA			
26.27.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit		Painan		0	APBDKOTA			
26.28.	Pembangunan Sarana dan Prasarana RSUD		Painan		19,000,000,000	APBDKOTA			
26.34.	Penyusunan DED RSUD dan Site Plan		Painan		200,000,000	APBDKOTA			
26.35.	Pengelolaan Gas Medis		Painan		3,500,000,000	APBDKOTA			
26.36.	Pengadaan IPAL		Painan		0	APBDKOTA			
37.	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD								
37.01.	Penyediaan Kebutuhan Pelayanan BLU		Painan		55,300,000,000	APBDKOTA			

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019

Nama OPD : **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Kominukasi, Sumber Daya Air dan Listrik	IV Jurai	12 Bulan	318,255,000	APBDKOTA		12 Bulan	
01.05.	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	IV Jurai	12 Bulan	30,000,000	APBDKOTA		12 Bulan	
01.07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	IV Jurai	12 Bulan	390,950,000	APBDKOTA		12 Bulan	
01.08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	IV Jurai	12 Bulan	270,000,000	APBDKOTA		12 Bulan	
01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	IV Jurai	12 Bulan	24,835,898	APBDKOTA		12 Bulan	
01.11.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	IV Jurai	12 Bulan	60,000,000	APBDKOTA		12 Bulan	
01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	IV Jurai	12 Bulan	5,243,700	APBDKOTA		12 Bulan	
01.13.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	IV Jurai	12 Bulan	95,812,500	APBDKOTA		12 Bulan	
01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		IV Jurai		2,000,000	APBDKOTA			
01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Penyediaan Makan dan Minum	IV Jurai	12 Bulan	82,687,500	APBDKOTA		12 Bulan	
01.18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultansi Keluar Daerah	IV Jurai	12 Bulan	350,000,000	APBDKOTA		12 Bulan	
01.19.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultansi Dalam Daerah	IV Jurai	12 Bulan	100,000,000	APBDKOTA		12 Bulan	
01.30.	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan		IV Jurai		50,000,000	APBDKOTA			
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
02.03.	Pembangunan Gedung Kantor		Kec. Sutera		150,000,000	APBDKOTA			
02.05.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan IV Jurai	8 Unit	950,000,000	APBDKOTA		8 Unit	
02.22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	IV Jurai	12 Bulan	100,000,000	APBDKOTA		12 Bulan	
02.24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		IV Jurai		146,151,600	APBDKOTA			
02.28.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		IV Jurai		35,000,000	APBDKOTA			
03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
03.03.	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Kerja	IV Jurai	helai	58,380,000	APBDKOTA		helai	

Nama OPD : **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Lapangan							
03.05.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Kecamatan IV Jurai	Helai	85,000,000	APBDKOTA		Helai	
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
05.01.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	IV Jurai	-	75,000,000	APBDKOTA		-	
15.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan								
15.01.	Perencanaan Pembangunan Jalan	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Jalan	IV Jurai	Paket	500,000,000	APBDKOTA		Paket	
15.03.	Pembangunan Jalan Kabupaten	Terlaksananya Pembangunan Jalan Kabupaten	BAB Tapan	Paket	700,000,000	APBDKOTA		Paket	
15.03.	Pembangunan Jalan Kabupaten	Terlaksananya Pembangunan Jalan Kabupaten	Basa IV Balai Tapan	Paket	200,000,000	APBDKOTA		Paket	
15.03.	Pembangunan Jalan Kabupaten	Terlaksananya Pembangunan Jalan Kabupaten	Kecamatan Bayang Utara	Paket	300,000,000	APBDKOTA		Paket	
15.04.	Perencanaan Pembangunan Jembatan	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Jembatan	IV Jurai	Paket	400,000,000	APBDKOTA		Paket	
15.04.	Perencanaan Pembangunan Jembatan	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Jembatan	Sutera	Paket	200,000,000	APBDKOTA		Paket	
15.05.	Pembangunan Jembatan Kabupaten	Terlaksananya Pembangunan Jembatan Kabupaten	-	paket	12,750,000,000	APBDKOTA		paket	
15.05.	Pembangunan Jembatan Kabupaten	Terlaksananya Pembangunan Jembatan Kabupaten	Air Pura	paket	800,000,000	APBDKOTA		paket	
15.05.	Pembangunan Jembatan Kabupaten	Terlaksananya Pembangunan Jembatan Kabupaten	Bayang	paket	500,000,000	APBDKOTA		paket	
15.05.	Pembangunan Jembatan Kabupaten	Terlaksananya Pembangunan Jembatan Kabupaten	Bayu	paket	500,000,000	APBDKOTA		paket	
15.05.	Pembangunan Jembatan Kabupaten	Terlaksananya Pembangunan Jembatan Kabupaten	IV Jurai	paket	18,450,000,000	APBDKOTA		paket	
15.05.	Pembangunan Jembatan Kabupaten	Terlaksananya Pembangunan Jembatan Kabupaten	Kec. IV Jurai	paket	0	APBDKOTA		paket	
15.05.	Pembangunan Jembatan Kabupaten	Terlaksananya Pembangunan Jembatan Kabupaten	Kec. Koto XI Tarusan	paket	100,000,000	APBDKOTA		paket	100,000,000
15.05.	Pembangunan Jembatan Kabupaten	Terlaksananya Pembangunan Jembatan Kabupaten	Kec. Lengayang	paket	0	APBDKOTA		paket	
15.05.	Pembangunan Jembatan Kabupaten	Terlaksananya Pembangunan Jembatan Kabupaten	Kec. Ranah Pesisir	paket	170,000,000	APBDKOTA		paket	
15.05.	Pembangunan Jembatan Kabupaten	Terlaksananya Pembangunan Jembatan Kabupaten	Koto XI Tarusan	paket	6,050,000,000	APBDKOTA		paket	
15.05.	Pembangunan Jembatan Kabupaten	Terlaksananya Pembangunan Jembatan Kabupaten	Lengayang	paket	4,450,000,000	APBDKOTA		paket	
15.05.	Pembangunan Jembatan Kabupaten	Terlaksananya Pembangunan Jembatan Kabupaten	Linggo Sari Baganti	paket	4,240,000,000	APBDKOTA		paket	
15.05.	Pembangunan Jembatan Kabupaten	Terlaksananya Pembangunan Jembatan Kabupaten	Lunang	paket	810,000,000	APBDKOTA		paket	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
15.05.	Pembangunan Jembatan Kabupaten	Terlaksananya Pembangunan Jembatan Kabupaten	Pancung Soal	paket	3,000,000,000	APBDKOTA		paket	
15.05.	Pembangunan Jembatan Kabupaten	Terlaksananya Pembangunan Jembatan Kabupaten	Rahul	paket	3,000,000,000	APBDKOTA		paket	
15.05.	Pembangunan Jembatan Kabupaten	Terlaksananya Pembangunan Jembatan Kabupaten	Ranah Pesisir	paket	1,000,000,000	APBDKOTA		paket	
15.05.	Pembangunan Jembatan Kabupaten	Terlaksananya Pembangunan Jembatan Kabupaten	Silaut	paket	1,800,000,000	APBDKOTA		paket	
15.05.	Pembangunan Jembatan Kabupaten	Terlaksananya Pembangunan Jembatan Kabupaten	Sutera	paket	1,500,000,000	APBDKOTA		paket	
15.07.	Pembangunan Jalan Strategi/Desa Kec. Koto XI Tarusan	Terlaksananya Pembangunan Jalan Strategi/Desa Kec. Koto XI Tarusan	Kec. Koto XI Tarusan	Paket	415,000,000	APBDKOTA		Paket	
15.08.	Pembangunan Jalan Strategi/Desa Kec. Bayang	Terlaksananya Pembangunan Jalan Strategi/Desa Kec. Bayang	Kec. Bayang	Paket	1,050,000,000	APBDKOTA		Paket	
15.09.	Pembangunan Jalan Strategi/Desa Kec. Bayang Utara	Terlaksananya Pembangunan Jalan Strategi/Desa Kec. Bayang Utara	Kec. Bayang Utara	Paket	200,000,000	APBDKOTA		Paket	
15.09.	Pembangunan Jalan Strategi/Desa Kec. Bayang Utara	Terlaksananya Pembangunan Jalan Strategi/Desa Kec. Bayang Utara	Kec. IV Nagari Bayang Utara	Paket	930,000,000	APBDKOTA		Paket	
15.10.	Pembangunan Jalan Strategi/Desa Kec. IV Jurai	Terlaksananya Pembangunan Jalan Strategi/Desa Kec. IV Jurai	IV Jurai	Paket	350,000,000	APBDKOTA		Paket	
15.10.	Pembangunan Jalan Strategi/Desa Kec. IV Jurai	Terlaksananya Pembangunan Jalan Strategi/Desa Kec. IV Jurai	Kec. IV Jurai	Paket	1,320,000,000	APBDKOTA		Paket	
15.11.	Pembangunan Jalan Strategi/Desa Kec. Batang Kapas	Terlaksananya Pembangunan Jalan Strategi/Desa Kec. Batang Kapas	Kec. Batang Kapas	Paket	300,000,000	APBDKOTA		Paket	
15.12.	Pembangunan Jalan Strategi/Desa Kec. Sutera	Terlaksananya Pembangunan Jalan Strategis/Desa Kec. Sutera	Kec. Sutera	Paket	600,000,000	APBDKOTA		Paket	
15.13.	Pembangunan Jalan Strategi/Desa Kec. Lengayang	Terlaksananya Pembangunan Jalan Strategis/Desa Kec. Lengayang	Kec, Lengayang	Paket	130,000,000	APBDKOTA		Paket	
15.13.	Pembangunan Jalan Strategi/Desa Kec. Lengayang	Terlaksananya Pembangunan Jalan Strategis/Desa Kec. Lengayang	Kec. Lengayan	Paket	100,000,000	APBDKOTA		Paket	
15.13.	Pembangunan Jalan Strategi/Desa Kec. Lengayang	Terlaksananya Pembangunan Jalan Strategis/Desa Kec. Lengayang	Kec. lengayang	Paket	200,000,000	APBDKOTA		Paket	
15.13.	Pembangunan Jalan Strategi/Desa Kec. Lengayang	Terlaksananya Pembangunan Jalan Strategis/Desa Kec. Lengayang	Kec. Lengayang	Paket	1,985,000,000	APBDKOTA		Paket	
15.14.	Pelaksanaan Promosi Pariwisata	Terlaksananya Pelaksanaan Promosi Pariwisata	IV Jurai	1 paket	50,000,000	APBDKOTA		1 paket	
15.14.	Pembangunan Jalan Strategi/Desa Kec. Ranah Pesisir	Terlaksananya Pembangunan Jalan Strategis/Desa Kec. Ranah Pesisir	Kec. Ranah Pesisir	Paket	1,230,000,000	APBDKOTA		Paket	
15.14.	Pembangunan Jalan Strategi/Desa Kec. Ranah Pesisir	Terlaksananya Pembangunan Jalan Strategis/Desa Kec. Ranah Pesisir	Kec. Ranah Pesisir	Paket	50,000,000	APBDKOTA		Paket	
15.14.	Pembangunan Jalan Strategi/Desa Kec. Ranah Pesisir	Terlaksananya Pembangunan Jalan Strategis/Desa Kec. Ranah Pesisir	Kec.Ranah Pesisir	Paket	200,000,000	APBDKOTA		Paket	
15.14.	Pembangunan Jalan Strategi/Desa Kec. Ranah Pesisir	Terlaksananya Pembangunan Jalan Strategis/Desa Kec. Ranah Pesisir	Ranah Pesisir	Paket	500,000,000	APBDKOTA		Paket	
15.15.	Pembangunan Jalan Strategi/Desa Kec. Linggo Sari Baganti	Terlaksananya Pembangunan Jalan Strategis/Desa Kec. Linggo Sari Baganti	Kec. Linggo Sari Baganti	Paket	700,000,000	APBDKOTA		Paket	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
15.15.	Pembangunan Jalan Strategi/Desa Kec. Linggo Sari Baganti	Terlaksananya Pembangunan Jalan Strategis/Desa Kec. Linggo Sari Baganti	Kec. Linggo Sari Bagganti	Paket	0	APBDKOTA		Paket	
15.17.	Pembangunan Jalan Strategi/Desa Kec. Pancung Soal	Terlaksananya Pembangunan Jalan Strategis/Desa Kec. Pancung Soal	Kec. Pancung Soal	Paket	450,000,000	APBDKOTA		Paket	
15.19.	Pembangunan Jalan Strategi/Desa Kec. RAH Tapan	Terlaksananya Pembangunan Jalan Strategis/Desa Kec. RAH Tapan	Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan	paket	0	APBDKOTA		paket	
15.19.	Pembangunan Jalan Strategi/Desa Kec. RAH Tapan	Terlaksananya Pembangunan Jalan Strategis/Desa Kec. RAH Tapan	Ranah Ampek Hulu	paket	350,000,000	APBDKOTA		paket	
15.20.	Pembangunan Jalan Strategi/Desa Kec. Lunang	Terlaksananya Pembangunan Jalan Strategis/Desa Kec. Lunang	Kec. Lunang	Paket	500,000,000	APBDKOTA		Paket	
15.21.	Pembangunan Jalan Strategi/Desa Kec. Silaut	Terlaksananya Pembangunan Jalan Strategis/Desa Kec.Silaut	Kec. Silaut	paket	450,000,000	APBDKOTA		paket	
15.24.	Peningkatan Jalan (DAU)	Terlaksananya Peningkatan Jalan (DAU)	Air Pura	Paket	21,080,000,000	APBDKOTA		Paket	
15.24.	Peningkatan Jalan (DAU)	Terlaksananya Peningkatan Jalan (DAU)	BAB Tapan	Paket	4,500,000,000	APBDKOTA		Paket	
15.24.	Peningkatan Jalan (DAU)	Terlaksananya Peningkatan Jalan (DAU)	Basa IV Balai Tapan	Paket	6,960,000,000	APBDKOTA		Paket	
15.24.	Peningkatan Jalan (DAU)	Terlaksananya Peningkatan Jalan (DAU)	Batang Kapas	Paket	63,260,000,000	APBDKOTA		Paket	
15.24.	Peningkatan Jalan (DAU)	Terlaksananya Peningkatan Jalan (DAU)	Batang Kapas	Paket	3,600,000,000	APBDKOTA		Paket	
15.24.	Peningkatan Jalan (DAU)	Terlaksananya Peningkatan Jalan (DAU)	Bayang	Paket	16,720,000,000	APBDKOTA		Paket	
15.24.	Peningkatan Jalan (DAU)	Terlaksananya Peningkatan Jalan (DAU)	Bayang	Paket	3,900,000,000	APBDKOTA		Paket	
15.24.	Peningkatan Jalan (DAU)	Terlaksananya Peningkatan Jalan (DAU)	Bayu	Paket	7,700,000,000	APBDKOTA		Paket	
15.24.	Peningkatan Jalan (DAU)	Terlaksananya Peningkatan Jalan (DAU)	IV Jurai	Paket	52,880,000,000	APBDKOTA		Paket	
15.24.	Peningkatan Jalan (DAU)	Terlaksananya Peningkatan Jalan (DAU)	Kec. Koto XI Tarusan	Paket	10,500,000,000	APBDKOTA		Paket	
15.24.	Peningkatan Jalan (DAU)	Terlaksananya Peningkatan Jalan (DAU)	Korto XI Tarusan	Paket	2,800,000,000	APBDKOTA		Paket	
15.24.	Peningkatan Jalan (DAU)	Terlaksananya Peningkatan Jalan (DAU)	Koto XI Tarusan	Paket	21,600,000,000	APBDKOTA		Paket	
15.24.	Peningkatan Jalan (DAU)	Terlaksananya Peningkatan Jalan (DAU)	Lenagayang	Paket	1,800,000,000	APBDKOTA		Paket	
15.24.	Peningkatan Jalan (DAU)	Terlaksananya Peningkatan Jalan (DAU)	Lengayang	Paket	103,830,000,000	APBDKOTA		Paket	
15.24.	Peningkatan Jalan (DAU)	Terlaksananya Peningkatan Jalan (DAU)	Linggo Sari Baganti	Paket	46,819,863,000	APBDKOTA		Paket	
15.24.	Peningkatan Jalan (DAU)	Terlaksananya Peningkatan Jalan (DAU)	Lunang	Paket	27,240,000,000	APBDKOTA		Paket	
15.24.	Peningkatan Jalan (DAU)	Terlaksananya Peningkatan Jalan (DAU)	Pancung Soal	Paket	11,300,000,000	APBDKOTA		Paket	
15.24.	Peningkatan Jalan (DAU)	Terlaksananya Peningkatan Jalan (DAU)	Rahul	Paket	4,200,000,000	APBDKOTA		Paket	
15.24.	Peningkatan Jalan (DAU)	Terlaksananya Peningkatan Jalan (DAU)	Ranah Pesisir	Paket	35,160,000,000	APBDKOTA		Paket	
15.24.	Peningkatan Jalan (DAU)	Terlaksananya Peningkatan Jalan (DAU)	Ranah Pesisir	Paket	5,400,000,000	APBDKOTA		Paket	
15.24.	Peningkatan Jalan (DAU)	Terlaksananya Peningkatan Jalan (DAU)	Silaut	Paket	1,400,000,000	APBDKOTA		Paket	
15.24.	Peningkatan Jalan (DAU)	Terlaksananya Peningkatan Jalan (DAU)	Sutera	Paket	83,075,134,000	APBDKOTA		Paket	
15.25.	Pemeliharaan Pentas dan Tenda Promosi Wisata	Terlaksananya Pemeliharaan Pentas dan Tenda Promosi Wisata	IV Jurai	1 paket	50,000,000	APBDKOTA		1 paket	
15.27.	Operasional Tempat Pembuangan Akhir	Terlaksananya Operasional Tempat Pembuangan Akhir	IV Jurai	12 Bulan	700,000,000	APBDKOTA		12 Bulan	
15.28.	Operasional Kebersihan dan Persampahan	Terlaksananya Operasional Kebersihan dan	IV Jurai	12 bulan	2,770,000,000	APBDKOTA		12 bulan	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persampahan							
15.29.	Penunjang DAK Peningkatan Jalan	Terlaksananya Penunjang DAK Peningkatan Jalan	-	Paket	177,542,194	APBDKOTA		Paket	
15.32.	Pemeliharaan Rutin dan Operasional Kendaraan Kebersihan		IV Jurai		1,300,000,000	APBDKOTA			
16.	Program Saluran Drainase/Gorong-Gorong								
16.01.	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar	Tersebar	Paket	115,500,000	APBDKOTA		Paket	
16.05.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Drainase dan Trotoar	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Drainase dan Trotoar	IV Jurai	paket	50,000,000	APBDKOTA		paket	
16.05.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Drainase dan Trotoar	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Drainase dan Trotoar	Kab. Pesisir Selatan	paket	250,000,000	APBDKOTA		paket	
16.05.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Drainase dan Trotoar	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Drainase dan Trotoar	Kec. Silaut	paket	0	APBDKOTA		paket	
16.06.	Pemeliharaan Drainase Perkotaan		Tersebar		300,000,000	APBDKOTA			
16.10.	Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar		-		200,000,000	APBDKOTA			
16.10.	Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar		BAB Tapan		0	APBDKOTA			
16.10.	Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar		IV Jurai		1,000,000,000	APBDKOTA			
16.10.	Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar		Kec. BAB Tapan		2,000,000,000	APBDKOTA			
16.10.	Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar		Kec. Batang Kapas		400,000,000	APBDKOTA			
16.10.	Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar		Kec. Bayang		2,100,000,000	APBDKOTA			
16.10.	Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar		Kec. IV Jurai		10,750,000,000	APBDKOTA			
16.10.	Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar		Kec. Koto XI Tarusan		175,000,000	APBDKOTA			
16.10.	Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar		Kec. Lengayang		3,180,000,000	APBDKOTA			
16.10.	Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar		Kec. Linggo Sari Baganti		400,000,000	APBDKOTA			
16.10.	Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar		Kec. Pancung Soal		60,000,000	APBDKOTA			
16.10.	Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar		Kec. Ranah Pesisir		200,000,000	APBDKOTA			
16.10.	Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar		Kec. Silaut		200,000,000	APBDKOTA			
16.10.	Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar		Kec. Sutera		1,400,000,000	APBDKOTA			
16.10.	Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar		Kec.Lengayang		100,000,000	APBDKOTA			
16.10.	Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar		Kecamatan Sutera		450,000,000	APBDKOTA			
16.15.	Penyusunan Database Drainase		IV Jurai		50,000,000	APBDKOTA			
18.	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan								
18.04.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan		BAB Tapan		1,200,000,000	APBDKOTA			
18.04.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan		Batang Kapas		400,000,000	APBDKOTA			
18.04.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan		Bayang		1,930,000,000	APBDKOTA			
18.04.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan		Bayang Utara		1,150,000,000	APBDKOTA			
18.04.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan		IV Jurai		1,550,000,000	APBDKOTA			

Nama OPD : **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
18.04.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan		Kec. Batang Kapas		0	APBDKOTA			
18.04.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan		Kec. Linggo Sari Baganti		100,000,000	APBDKOTA			
18.04.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan		Koto XI Tarusan		2,700,000,000	APBDKOTA			
18.04.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan		Lengayang		1,240,000,000	APBDKOTA			
18.04.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan		Linggo sari Baganti		1,100,000,000	APBDKOTA			
18.04.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan		Linggo Sari Baganti		400,000,000	APBDKOTA			
18.04.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan		Pancung Soal		1,000,000,000	APBDKOTA			
18.04.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan		RAHUL		400,000,000	APBDKOTA			
18.04.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan		Ranah Pesisir		2,880,000,000	APBDKOTA			
18.04.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan		Ranah Pesisir		675,000,000	APBDKOTA			
18.04.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan		Silaut		1,000,000,000	APBDKOTA			
18.04.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan		Sutera		620,000,000	APBDKOTA			
18.12.	Pemeliharaan Jalan Kabupaten	Terlaksananya Pemeliharaan Jalan Kabupaten	Kab. Pesisir Selatan	1 paket	3,300,000,000	APBDKOTA		1 paket	
18.13.	Pemeliharaan jembatan kabupaten	Terlaksananya Pemeliharaan Jembatan Kabupaten	Kab. Pesisir Selatan	Unit	1,000,000,000	APBDKOTA		Unit	
19.	Program Peningkatan kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan								
19.35.	Penyusunan Dokumen Lingkungan	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Lingkungan	IV Jurai	paket	500,000,000	APBDKOTA		paket	
21.	Program Pengaturan Jasa Konstruksi								
21.01.	Pengaturan dan Penyelenggaraan Izin Usaha Jasa Konstruksi		IV Jurai		40,000,000	APBDKOTA			
22.	Program Pembangunan Sistem Informasi / Database Jalan dan Jembatan								
22.01.	Penyusunan sistem informasi/data base jalan	Terlaksananya Penyusunan Sistem Informasi/data Base Jalan	IV Jurai	12 Bulan	200,000,000	APBDKOTA		12 Bulan	
22.05.	Penyusunan Sisyem Informasi/Database Jembatan	Terlaksananya Penyusunan Sistem Informasi/data Base Jembatan	IV Jurai	12 Bulan	150,000,000	APBDKOTA		12 Bulan	
23.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan								
23.06.	Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	Terlaksananya Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	IV Jurai	unit	169,271,311	APBDKOTA		unit	
23.12.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	IV Jurai	unit	10,500,000	APBDKOTA		unit	
23.14.	Operasional Laboratorium	Terlaksananya Operasional Laboratorium	IV Jurai	12 Bulan	133,888,463	APBDKOTA		12 Bulan	
24.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya								
24.09.	Pelaksanaan Normalisasi saluran sungai		Kec. Koto XI Tarusan		0	APBDKOTA			
26.	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata								
26.29.	Manajemen Konstruksi RSUD Baru		IV Jurai		226,293,805	APBDKOTA			
26.30.	Operasional Pembangunan RSUD		IV Jurai		64,345,050	APBDKOTA			

Nama OPD : **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
26.31.	Penyusunan MasterPlan dan Perencanaan Teknis RSUD Baru		IV Jurai		383,121,500	APBDKOTA			
26.32.	Pembangunan Relokasi RSUD		IV Jurai		63,037,385,000	APBDKOTA			
26.33.	Pembuatan Amdal RSUD Baru		IV Jurai		378,411,000	APBDKOTA			
27.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah								
27.13.	Pembangunan Infrastruktur Air Minum	Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Air Minum	Air Pura	paket	1,500,000,000	APBDKOTA		paket	
27.13.	Pembangunan Infrastruktur Air Minum	Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Air Minum	Batang Kapas	paket	3,700,000,000	APBDKOTA		paket	
27.13.	Pembangunan Infrastruktur Air Minum	Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Air Minum	Bayang	paket	1,500,000,000	APBDKOTA		paket	
27.13.	Pembangunan Infrastruktur Air Minum	Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Air Minum	Koto XI Tarusan	paket	3,500,000,000	APBDKOTA		paket	
27.13.	Pembangunan Infrastruktur Air Minum	Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Air Minum	Pancung Soal	paket	1,500,000,000	APBDKOTA		paket	
27.13.	Pembangunan Infrastruktur Air Minum	Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Air Minum	RAHUL	paket	2,000,000,000	APBDKOTA		paket	
27.13.	Pembangunan Infrastruktur Air Minum	Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Air Minum	Ranah Pesisir	paket	200,000,000	APBDKOTA		paket	
27.15.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Air Bersih Kab.Pesisir Selatan		tersebar		200,000,000	APBDKOTA			
27.18.	Penunjang Kegiatan AMPL (Air Minum dan Penyertaan Lingkungan)	Terlaksananya Penunjang Kegiatan AMPL (Air Minum dan Penyertaan Lingkungan)	IV Jurai	12 bulan	176,531,514	APBDKOTA		12 bulan	
27.19.	Pembangunan Sanitasi IPALD Hibah Australia (sAIIIG)		Kab. Pesisir Selatan		9,075,000,000	APBDKOTA			
27.20.	Pembangunan Infrastruktur Air Minum (DAK)		tersebar		0	APBDKOTA			
27.21.	Pembangunan Infrastruktur Sanitasi (DAK)		tersebar		0	APBDKOTA			
27.22.	Penunjang Sanitasi (DAK)		IV Jurai		50,000,000	APBDKOTA			
27.23.	Penunjang Air Minum (DAK)		IV Jurai		50,000,000	APBDKOTA			
29.	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh								
29.02.	Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur	Terlaksananya Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur	BAB Tapan	paket	200,000,000	APBDKOTA		paket	
29.02.	Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur	Terlaksananya Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur	BAB TAPAN	paket	750,000,000	APBDKOTA		paket	
29.02.	Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur	Terlaksananya Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur	IV Jurai	paket	3,000,000,000	APBDKOTA		paket	
29.02.	Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur	Terlaksananya Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur	IV Jurai	paket	200,000,000	APBDKOTA		paket	
29.02.	Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur	Terlaksananya Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur	Kec. Batang Kapas	paket	950,000,000	APBDKOTA		paket	
29.02.	Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur	Terlaksananya Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur	Kec. Bayang	paket	200,000,000	APBDKOTA		paket	
29.02.	Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur	Terlaksananya Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur	Kec. Bayang Utara	paket	200,000,000	APBDKOTA		paket	

Nama OPD : **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
29.02.	Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur	Terlaksananya Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur	Kec. IV Jurai	paket	12,419,085,046	APBDKOTA		paket	
29.02.	Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur	Terlaksananya Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur	Kec. Koto XI Tarusan	paket	200,000,000	APBDKOTA		paket	
29.02.	Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur	Terlaksananya Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur	Kec. Lengayang	paket	750,000,000	APBDKOTA		paket	
29.02.	Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur	Terlaksananya Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur	Kec. Linggo Sari Baganti	paket	200,000,000	APBDKOTA		paket	
29.02.	Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur	Terlaksananya Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur	Kec. Lunang	paket	200,000,000	APBDKOTA		paket	
29.02.	Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur	Terlaksananya Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur	Kec. Pancung Soal	paket	200,000,000	APBDKOTA		paket	
29.02.	Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur	Terlaksananya Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur	Kec. Silaut	paket	200,000,000	APBDKOTA		paket	
29.02.	Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur	Terlaksananya Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur	Kec. Sutura	paket	200,000,000	APBDKOTA		paket	
29.02.	Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur	Terlaksananya Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur	Koto XI Tarusan	paket	1,400,000,000	APBDKOTA		paket	
29.02.	Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur	Terlaksananya Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur	Lengayang	paket	15,500,000,000	APBDKOTA		paket	
29.32.	Pembangunan Infrastruktur Kawasan Destinasi Wisata	Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Kawasan Destinasi Wisata	IV Jurai	paket	14,650,000,000	APBDKOTA		paket	
29.32.	Pembangunan Infrastruktur Kawasan Destinasi Wisata	Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Kawasan Destinasi Wisata	Kec. bayang	paket	1,000,000,000	APBDKOTA		paket	
29.32.	Pembangunan Infrastruktur Kawasan Destinasi Wisata	Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Kawasan Destinasi Wisata	Kec. Bayang	paket	1,500,000,000	APBDKOTA		paket	
29.32.	Pembangunan Infrastruktur Kawasan Destinasi Wisata	Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Kawasan Destinasi Wisata	Kec. Lengayang	paket	1,000,000,000	APBDKOTA		paket	
29.32.	Pembangunan Infrastruktur Kawasan Destinasi Wisata	Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Kawasan Destinasi Wisata	Koto XI Tarusan	paket	3,500,000,000	APBDKOTA		paket	
30.	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan								
30.09.	Pembangunan Pamsimas Reguler	Terlaksananya Pembangunan Pamsimas Reguler	Tersebar	Paket	1,000,000,000	APBDKOTA		Paket	
30.10.	Pembangunan IPAL Komunal	Terlaksananya Pembangunan IPAL Komunal	Batang Kapas	Paket	900,000,000	APBDKOTA		Paket	
30.10.	Pembangunan IPAL Komunal	Terlaksananya Pembangunan IPAL Komunal	Kecamatan Lengayang	Paket	1,350,000,000	APBDKOTA		Paket	
30.10.	Pembangunan IPAL Komunal	Terlaksananya Pembangunan IPAL Komunal	Pancung Soal	Paket	1,350,000,000	APBDKOTA		Paket	
30.10.	Pembangunan IPAL Komunal	Terlaksananya Pembangunan IPAL Komunal	Sutura	Paket	450,000,000	APBDKOTA		Paket	
30.11.	Pembangunan Pipa Distribusi dan Sambungan Rumah (SR)		IV Jurai		150,000,000	APBDKOTA			
30.11.	Pembangunan Pipa Distribusi dan Sambungan Rumah (SR)		Kec. Lengayang		150,000,000	APBDKOTA			
30.11.	Pembangunan Pipa Distribusi dan Sambungan Rumah (SR)		Linggo Sari Baganti		1,500,000,000	APBDKOTA			
30.13.	Penunjang Kegiatan Pamsimas	Terlaksananya Penunjang Kegiatan	Lengayang	12 Bulan	300,000,000	APBDKOTA		12 Bulan	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Pamsimas							
30.16.	Pengembangan Program Hibah Air Minum	Terlaksananya Pengembangan Program Hibah Air Minum	Tersebar	paket	2,000,000,000	APBDKOTA		paket	
30.17.	Optimalisasi Peningkatan Program Pamsimas (DDUB)	Terlaksananya Optimalisasi Peningkatan Program Pamsimas	Lengayang	Paket	500,000,000	APBDKOTA		Paket	
30.22.	Penyusunan Database Air Minum dan Sanitasi	Terlaksananya Penyusunan Database Air Minum dan Sanitasi	IV Jurai	12 bulan	200,000,000	APBDKOTA		12 bulan	
32.	Program Perencanaan Tata Ruang								
32.04.	Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan		Kec. Koto XI Tarusan		500,000,000	APBDKOTA			
33.	Program Pemanfaatan Ruang								
33.06.	Pelatihan aparat dalam pemanfaatan ruang	Terlaksananya Pelatihan Aparat dalam Pemanfaatan Ruang	IV Jurai	-	60,000,000	APBDKOTA		-	
34.	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang								
34.01.	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	IV Jurai	-	200,000,000	APBDKOTA		-	
34.05.	Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pasar Tapan		BAB Tapan		500,000,000	APBDKOTA			
34.06.	Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Wisata Pantai Sago		IV Jurai		500,000,000	APBDKOTA			
35.	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pertamanan								
35.02.	Pemeliharaan dan Operasional Pertamanan		IV Jurai		1,200,000,000	APBDKOTA			
36.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan								
36.01.	Pelaksanaan Pendataan Bangunan Gedung Implementasi Perda Bangunan Gedung Tahap 2		-		50,000,000	APBDKOTA			
36.02.	Pengendalian Tata Bangunan dan Lingkungan		-		50,000,000	APBDKOTA			
36.03.	Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor	BAB Tapan	13 Paket	9,000,000,000	APBDKOTA		13 Paket	
36.03.	Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor	IV Jurai	13 Paket	30,750,000,000	APBDKOTA		13 Paket	
36.03.	Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor	Kecamatan BAB Tapan	13 Paket	200,000,000	APBDKOTA		13 Paket	
36.03.	Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor	Kecamatan Basa IV Balai Tapan	13 Paket	1,200,000,000	APBDKOTA		13 Paket	
36.03.	Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor	Kecamatan IV Jurai	13 Paket	31,000,000,000	APBDKOTA		13 Paket	
36.03.	Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor	Kecamatan Pancung Soal	13 Paket	3,000,000,000	APBDKOTA		13 Paket	
36.03.	Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor	Kecamatan Silaut	13 Paket	1,500,000,000	APBDKOTA		13 Paket	
36.07.	Perencanaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Terlaksananya Perencanaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	-	1 Paket	100,000,000	APBDKOTA		1 Paket	
36.08.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor		IV Jurai		500,000,000	APBDKOTA			
36.08.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor		Kec. Pancung Soal		1,900,000,000	APBDKOTA			
36.08.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor		Kecamatan IV Jurai		2,500,000,000	APBDKOTA			

Nama OPD : **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
36.08.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor		Linggo Sari Baganti		1,500,000,000	APBDKOTA			
37.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Peribadatan								
37.01.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Ibadah	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Ibadah	IV Jurai	1 Paket	16,000,000,000	APBDKOTA		1 Paket	
38.	Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan								
38.02.	Sinkronisasi Program DAK dan APBN	Terlaksananya Sinkronisasi Program DAK dan APBN	IV Jurai	12 Bulan	250,000,000	APBDKOTA		12 Bulan	
38.10.	Rencana Program dan Sinkronisasi RPI2JM-Cipta-Karya	Terlaksananya Rencana Program dan Sinkronisasi RPI2JM-Cipta Karya	IV Jurai	12 bulan	35,000,000	APBDKOTA		12 bulan	
38.11.	Penyusunan Dokumen HSBGN	Terlaksananya Penyusunan Dokumen HSBGN	IV Jurai	12 Bulan	15,000,000	APBDKOTA		12 Bulan	
38.18.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	IV Jurai	12 bulan	130,000,000	APBDKOTA		12 bulan	

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019

Nama OPD : **DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Painan		75,000,000	APBDKOTA			
01.07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Painan		110,000,000	APBDKOTA			
01.08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Painan		95,000,000	APBDKOTA			
01.09.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja		Painan		25,000,000	APBDKOTA			
01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Painan		85,000,000	APBDKOTA			
01.11.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Painan		35,000,000	APBDKOTA			
01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Painan		15,000,000	APBDKOTA			
01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Painan		15,000,000	APBDKOTA			
01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman		Painan		75,000,000	APBDKOTA			
01.18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah		Painan		167,000,000	APBDKOTA			
01.19.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah		Painan		90,000,000	APBDKOTA			
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
02.05.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		Painan		36,000,000	APBDKOTA			
02.09.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Painan		60,000,000	APBDKOTA			
02.10.	Pengadaan Meubiler		Painan		75,000,000	APBDKOTA			
02.22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Painan		350,000,000	APBDKOTA			
02.24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Painan		370,000,000	APBDKOTA			
02.34.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Berat		Painan		70,000,000	APBDKOTA			
02.42.	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor		Basa IV Balai		200,000,000	APBDKOTA			
02.42.	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor		Pancung Soal		100,000,000	APBDKOTA			
03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
03.05.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu		Painan		50,000,000	APBDKOTA			
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
05.01.	Pendidikan dan Pelatihan Formal		Painan		50,000,000	APBDKOTA			

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
16.	Program Saluran Drainase/Gorong-Gorong								
16.01.	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar		Lengayang		60,000,000	APBDKOTA			
16.08.	Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong		tersebar		200,000,000	APBDKOTA			
16.10.	Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar		Balai Selasa		100,000,000	APBDKOTA			
16.10.	Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar		Batang Kapas		800,000,000	APBDKOTA			
16.10.	Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar		IV Jurai		200,000,000	APBDKOTA			
16.10.	Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar		Koto XI Tarusan		300,000,000	APBDKOTA			
16.10.	Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar		Lengayang		300,000,000	APBDKOTA			
16.10.	Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar		Linggo Sari Baganti		200,000,000	APBDKOTA			
16.10.	Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar		Pancung Soal		200,000,000	APBDKOTA			
16.10.	Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar		Ranah IV Hulu		200,000,000	APBDKOTA			
16.10.	Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar		Ranah Pesisir		300,000,000	APBDKOTA			
16.10.	Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar		Silaut		200,000,000	APBDKOTA			
16.10.	Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar		Sutera		700,000,000	APBDKOTA			
16.11.	Pembuatan Database Saluran Drainase/Gorong-gorong		Painan		100,000,000	APBDKOTA			
17.	Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong								
17.03.	Pembangunan turap/talud/bronjong		Kampung lagan gadang mudik		200,000,000				
17.03.	Pembangunan turap/talud/bronjong		Kec. Ranah Pesisir		200,000,000	APBDKOTA			
17.03.	Pembangunan turap/talud/bronjong		Pasa Malintang		9,600,000,000				
17.03.	Pembangunan turap/talud/bronjong		siguntur tua		4,080,000,000				
24.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya								
24.05.	Perencanaan normalisasi saluran sungai		Basa IV Balai		300,000,000	APBDKOTA			
24.05.	Perencanaan normalisasi saluran sungai		Lengayang		110,000,000	APBDKOTA			
24.09.	Pelaksanaan Normalisasi saluran sungai		Basa IV Balai Tapan		200,000,000	APBDKOTA			
24.09.	Pelaksanaan Normalisasi saluran sungai		Bayang		300,000,000	APBDKOTA			
24.09.	Pelaksanaan Normalisasi saluran sungai		Kec. Koto XI Tarusan		550,000,000	APBDKOTA			350,000,000
24.09.	Pelaksanaan Normalisasi saluran sungai		Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan		0	APBDKOTA			
24.09.	Pelaksanaan Normalisasi saluran sungai		Kec. Tapan		200,000,000	APBDKOTA			
24.09.	Pelaksanaan Normalisasi saluran sungai		Linggo Sari Baganti		400,000,000	APBDKOTA			
24.09.	Pelaksanaan Normalisasi saluran sungai		Lubuk Bunta		450,000,000,000				
24.09.	Pelaksanaan Normalisasi saluran sungai		Lunang		300,000,000	APBDKOTA			
24.09.	Pelaksanaan Normalisasi saluran sungai		Pancung Soal		900,000,000	APBDKOTA			
24.09.	Pelaksanaan Normalisasi saluran sungai		Ranah Pesisir		300,000,000	APBDKOTA			

Nama OPD : **DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
24.10.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi		Airpura		200,000,000	APBDKOTA			
24.10.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi		Basa IV Balai Tapan		200,000,000	APBDKOTA			
24.10.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi		Batang Kapas		750,000,000	APBDKOTA			
24.10.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi		Kec. BAB Tapan		200,000,000	APBDKOTA			
24.10.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi		Kec. Bayang		420,000,000	APBDKOTA			
24.10.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi		Kec. IV Jurai		150,000,000	APBDKOTA			
24.10.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi		Kec. IV Nagari Bayang Utara		100,000,000	APBDKOTA			
24.10.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi		Kec. Koto XI Tarusan		0	APBDKOTA			
24.10.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi		Kec. Linggo Sari Baganti		100,000,000	APBDKOTA			
24.10.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi		Kec. Ranah Pesisir		100,000,000	APBDKOTA			
24.10.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi		Kec. Sutera		150,000,000	APBDKOTA			
24.10.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi		Kec. Sutera		150,000,000	APBDKOTA			
24.10.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi		Ranah Pesisir		400,000,000	APBDKOTA			
24.15.	Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun		Tersebar		1,500,000,000	APBDKOTA			
24.18.	Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (Penunjang DAK)		Painan		200,000,000	APBDKOTA			
24.19.	Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)		Tersebar		0	APBDKOTA			
24.20.	Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi		Tersebar		110,000,000	APBDKOTA			
24.25.	Operasional Irigasi		Tersebar		852,000,000	APBDKOTA			
24.27.	Pengelolaan Aset Irigasi		Painan		350,000,000	APBDKOTA			
24.28.	Perencanaan Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)		Tersebar		800,000,000	APBDKOTA			
26.	Program Pengembangan, Pengelolaan, Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air								
26.07.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		Tersebar		50,000,000	APBDKOTA			
26.08.	Perencanaan Embung dan Bangunan Penampungan Air Lainnya		Lunang		150,000,000	APBDKOTA			
26.09.	Pengawasan dan Konservasi Sumber Daya Air		Painan		100,000,000	APBDKOTA			
26.10.	Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan		Painan		70,000,000	APBDKOTA			
26.11.	Dokumen Lingkungan		Bayang		65,000,000	APBDKOTA			
26.11.	Dokumen Lingkungan		Lengayang		470,000,000	APBDKOTA			
26.11.	Dokumen Lingkungan		Sutera		65,000,000	APBDKOTA			
28.	Program Pengendalian Banjir								
28.03.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai		Batang Kapas		300,000,000	APBDKOTA			

Nama OPD : **DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
28.03.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai		Bayang		300,000,000	APBDKOTA			
28.03.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai		IV Jurai		300,000,000	APBDKOTA			
28.03.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai		Koto XI Tarusan		300,000,000	APBDKOTA			
28.03.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai		Lengayang		700,000,000	APBDKOTA			
28.03.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai		Linggo Sari Baganti		400,000,000	APBDKOTA			
28.03.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai		Lunang		300,000,000	APBDKOTA			
28.03.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai		Ranah IV Hulu		400,000,000	APBDKOTA			
28.03.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai		Ranah Pesisir		400,000,000	APBDKOTA			
28.03.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai		Silaut		300,000,000	APBDKOTA			
28.03.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai		Sutera		700,000,000	APBDKOTA			
28.04.	Pengembangan Pengelolaan Daerah Rawa Dalam Rangka Pengendalian Banjir		Airpura		400,000,000	APBDKOTA			
28.04.	Pengembangan Pengelolaan Daerah Rawa Dalam Rangka Pengendalian Banjir		Lengayang		350,000,000	APBDKOTA			
28.04.	Pengembangan Pengelolaan Daerah Rawa Dalam Rangka Pengendalian Banjir		Lunang		200,000,000	APBDKOTA			
28.04.	Pengembangan Pengelolaan Daerah Rawa Dalam Rangka Pengendalian Banjir		Pancung Soal		200,000,000	APBDKOTA			
28.07.	Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali		Tersebar		1,000,000,000	APBDKOTA			
28.12.	Perencanaan Prasarana Pengaman Muara dan Pantai		Lengayang		500,000,000	APBDKOTA			
28.18.	Pembuatan Database Sungai dan Pantai		Painan		100,000,000	APBDKOTA			

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019

Nama OPD : **DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		IV Jurai		76,900,000	APBDKOTA			
01.07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		IV Jurai		279,900,000	APBDKOTA			
01.08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		IV Jurai		75,688,800	APBDKOTA			
01.09.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja		IV Jurai		10,000,000	APBDKOTA			
01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor		IV Jurai		28,703,600	APBDKOTA			
01.11.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		IV Jurai		38,282,700	APBDKOTA			
01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		IV Jurai		11,690,500	APBDKOTA			
01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman		IV Jurai		11,860,000	APBDKOTA			
01.18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah		Kab. Pesisir Selatan		163,250,000	APBDKOTA			
01.19.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah		Kab. Pesisir Selatan		76,400,000	APBDKOTA			
01.21.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor		IV Jurai		76,400,000	APBDKOTA			
01.30.	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan		IV Jurai		75,000,000	APBDKOTA			
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
02.05.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		IV Jurai		35,000,000	APBDKOTA			
02.07.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		IV Jurai		50,000,000	APBDKOTA			
02.09.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		IV Jurai		100,000,000	APBDKOTA			
02.10.	Pengadaan Meubiler		IV Jurai		50,000,000	APBDKOTA			
02.22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		IV Jurai		50,000,000	APBDKOTA			
02.24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		IV Jurai		84,770,000	APBDKOTA			
02.28.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		IV Jurai		18,775,000	APBDKOTA			
03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
03.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		IV Jurai		40,000,000	APBDKOTA			
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
05.01.	Pendidikan dan Pelatihan Formal		-		50,000,000	APBDKOTA			

Nama OPD : **DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
06.06.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan		IV Jurai		94,449,500	APBDKOTA			
06.09.	Sinkronisasi Program RPIJM Cipta Karya		IV Jurai		54,020,700	APBDKOTA			
15.	Program Pengembangan Perumahan								
15.10.	Penunjang Kegiatan Pendataan dan Perencanaan Perumahan		IV Jurai		150,000,000	APBDKOTA			
15.11.	Penunjang perumahan permukiman & BSPS		IV Jurai		200,000,000	APBDKOTA			
15.15.	Pembangunan Rumah Khusus Nelayan		-		0				
15.16.	Pelaksanaan Promosi dan Publikasi		IV Jurai		40,000,000	APBDKOTA			
15.17.	Rehap Rumah Tidak Layak Huni		-		250,000,000	APBDKOTA			
15.17.	Rehap Rumah Tidak Layak Huni		Balai Sinayan Lumpo		60,000,000				
15.17.	Rehap Rumah Tidak Layak Huni		Barung-Barung Balantai Selatan		150,000,000				
15.17.	Rehap Rumah Tidak Layak Huni		Br.Br.Balantai Selatan		150,000,000				
15.17.	Rehap Rumah Tidak Layak Huni		duku utara		300,000,000				
15.17.	Rehap Rumah Tidak Layak Huni		Duku Utara		600,000,000				
15.17.	Rehap Rumah Tidak Layak Huni		Durian Seribu		15,000,000				
15.17.	Rehap Rumah Tidak Layak Huni		Inderapura Tengah		225,000,000				
15.17.	Rehap Rumah Tidak Layak Huni		Kacamatan Sutera		6,750,000,000				
15.17.	Rehap Rumah Tidak Layak Huni		KAMBANG BARAT		375,000,000				
15.17.	Rehap Rumah Tidak Layak Huni		Kampung Alai		15,000,000				
15.17.	Rehap Rumah Tidak Layak Huni		Kampung Bukit Lengkuas		45,000,000				
15.17.	Rehap Rumah Tidak Layak Huni		Kampung dusun Tuo		45,000,000				
15.17.	Rehap Rumah Tidak Layak Huni		Kampung Ladang Tinggi		15,000,000				
15.17.	Rehap Rumah Tidak Layak Huni		Kampung Muaro Aie &Kampung Dilan		225,000,000				
15.17.	Rehap Rumah Tidak Layak Huni		Kampung Pasar Sebelah		30,000,000				
15.17.	Rehap Rumah Tidak Layak Huni		Kampung Sawah Liek		15,000,000				
15.17.	Rehap Rumah Tidak Layak Huni		Kampung Silaut		30,000,000				
15.17.	Rehap Rumah Tidak Layak Huni		Kampung Talang Mandiingin		30,000,000				
15.17.	Rehap Rumah Tidak Layak Huni		Kampung Tanah Bato		300,000,000				
15.17.	Rehap Rumah Tidak Layak Huni		Kec. Air Pura		300,000,000	APBDKOTA			
15.17.	Rehap Rumah Tidak Layak Huni		Kec. BAB Tapan		260,000,000	APBDKOTA			

Nama OPD : **DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
15.17.	Rehap Rumah Tidak Layak Huni		Kec. Batang Kapas		400,000,000	APBDKOTA			
15.17.	Rehap Rumah Tidak Layak Huni		Kec. Bayang		465,000,000	APBDKOTA			
15.17.	Rehap Rumah Tidak Layak Huni		Kec. IV Jurai		400,000,000	APBDKOTA			
15.17.	Rehap Rumah Tidak Layak Huni		Kec. IV Nagari Bayang Utara		30,000,000	APBDKOTA			
15.17.	Rehap Rumah Tidak Layak Huni		Kec. Koto XI Tarusan		120,000,000	APBDKOTA			
15.17.	Rehap Rumah Tidak Layak Huni		Kec. Lengayang		450,000,000	APBDKOTA			
15.17.	Rehap Rumah Tidak Layak Huni		Kec. Pancung Soal		150,000,000	APBDKOTA			
15.17.	Rehap Rumah Tidak Layak Huni		Kec. Ranah Pesisir		365,000,000	APBDKOTA			
15.17.	Rehap Rumah Tidak Layak Huni		Kec. Sutura		150,000,000	APBDKOTA			
15.17.	Rehap Rumah Tidak Layak Huni		Kec. Tapan		200,000,000	APBDKOTA			
15.17.	Rehap Rumah Tidak Layak Huni		Kecamatan Pancung Soal		1,065,000,000				
15.17.	Rehap Rumah Tidak Layak Huni		Kelok Koto Langang, Sungai liku Tengah dan Sungai liku Ateh		150,000,000				
15.17.	Rehap Rumah Tidak Layak Huni		Koto Ranah		300,000,000				
15.17.	Rehap Rumah Tidak Layak Huni		Koto Rawang		375,000,000				
15.17.	Rehap Rumah Tidak Layak Huni		Koto VIII Pelangai		420,000,000				
15.17.	Rehap Rumah Tidak Layak Huni		Lagan Mudik Punggasan		300,000,000				
15.17.	Rehap Rumah Tidak Layak Huni		Lakitan Selatan		1,500,000,000				
15.17.	Rehap Rumah Tidak Layak Huni		Limau Gadang		300,000,000				
15.17.	Rehap Rumah Tidak Layak Huni		Lubuk Bunta		15,000,000				
15.17.	Rehap Rumah Tidak Layak Huni		Lunang Barat		300,000,000				
15.17.	Rehap Rumah Tidak Layak Huni		lunang utara		75,000,000				
15.17.	Rehap Rumah Tidak Layak Huni		mandeh		1,200,000,000				
15.17.	Rehap Rumah Tidak Layak Huni		Mandeh		1,200,000,000				
15.17.	Rehap Rumah Tidak Layak Huni		Marapalam		150,000,000				
15.17.	Rehap Rumah Tidak Layak Huni		Muara Sakai		225,000,000				
15.17.	Rehap Rumah Tidak Layak Huni		Muaro Gadang barat dan timur		1,500,000,000				
15.17.	Rehap Rumah Tidak Layak Huni		nagari		150,000,000				
15.17.	Rehap Rumah Tidak Layak Huni		Nagari		375,000,000				
15.17.	Rehap Rumah Tidak Layak Huni		Nagari Api-Api		825,000,000				
15.17.	Rehap Rumah Tidak Layak Huni		Nagari Bunga Pasang Salido		300,000,000				
15.17.	Rehap Rumah Tidak Layak Huni		Nagari Kampung Tengah Tapan		300,000,000				

Nama OPD : **DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
15.17.	Rehap Rumah Tidak Layak Huni		Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hille		750,000,000				
15.17.	Rehap Rumah Tidak Layak Huni		Nagari Lalang Panjang Inderapura		750,000,000				
15.17.	Rehap Rumah Tidak Layak Huni		Nagari Lunang		60,000,000				
15.17.	Rehap Rumah Tidak Layak Huni		Nagari Lunang Dua		570,000,000				
15.17.	Rehap Rumah Tidak Layak Huni		Nagari Painan Timur		15,000,000				
15.17.	Rehap Rumah Tidak Layak Huni		Nagari Pasar Baru		450,000,000				
15.17.	Rehap Rumah Tidak Layak Huni		Nagari Puluik-Puluik		90,000,000				
15.17.	Rehap Rumah Tidak Layak Huni		Nagari Sambungo		300,000,000				
15.17.	Rehap Rumah Tidak Layak Huni		Nagari Sindang Lunang		225,000,000				
15.17.	Rehap Rumah Tidak Layak Huni		Nagari Sungai Sirah		300,000,000				
15.17.	Rehap Rumah Tidak Layak Huni		Nagari Tambang		225,000,000				
15.17.	Rehap Rumah Tidak Layak Huni		Pasia Pelangai		30,000,000				
15.17.	Rehap Rumah Tidak Layak Huni		Pelangai		165,000,000				
15.17.	Rehap Rumah Tidak Layak Huni		pelangai gadang		150,000,000				
15.17.	Rehap Rumah Tidak Layak Huni		Pesisir Selatan		3,900,000,000	APBDKOTA			
15.17.	Rehap Rumah Tidak Layak Huni		Simpang Gunung Tapan		75,000,000				
15.17.	Rehap Rumah Tidak Layak Huni		Sungai Sirah Air Haji		900,000,000				
15.17.	Rehap Rumah Tidak Layak Huni		Sungai Tunu		45,000,000				
15.17.	Rehap Rumah Tidak Layak Huni		tanah kareh		210,000,000				
15.17.	Rehap Rumah Tidak Layak Huni		Tigo Sungai Inderapura		450,000,000				
15.19.	Pendataan dan Validasi Data Rumah Tidak Layak Huni		Pesisir Selatan		100,000,000	APBDKOTA			
15.20.	Pendampingan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		Pesisir Selatan		183,547,800	APBDKOTA			
15.23.	Bantuan Jamban (WC)		Labuh		500,000,000				
15.23.	Bantuan Jamban (WC)		KAMBANG BARAT		250,000,000				
15.23.	Bantuan Jamban (WC)		Koto Ranah		75,000,000				
15.23.	Bantuan Jamban (WC)		Labuh		500,000,000				
15.23.	Bantuan Jamban (WC)		Lagan Mudik Punggasan		100,000,000				
15.23.	Bantuan Jamban (WC)		Lunang Barat		2,000,000,000				
15.23.	Bantuan Jamban (WC)		Lunang Bart		500,000,000				
15.23.	Bantuan Jamban (WC)		Lunang utara		500,000,000				
15.23.	Bantuan Jamban (WC)		Nagari		75,000,000				
15.23.	Bantuan Jamban (WC)		Nagari Bunga		100,000,000				

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Pasang salido						
15.23.	Bantuan Jamban (WC)		Nagari Lunang		1,000,000,000				
15.23.	Bantuan Jamban (WC)		Nagari Punggasan Utara, Kecamatan Linggo Sari Baganti		160,000,000				
15.23.	Bantuan Jamban (WC)		Nagari Sindang Lunang		100,000,000				
15.23.	Bantuan Jamban (WC)		Silaut VI, Tanjung sari dan Sambungo		100,000,000				
15.23.	Bantuan Jamban (WC)		Sungai Sirah Air Haji		100,000,000				
15.25.	Pematangan Lahan Lokasi Rumah Tapak		Pesisir Selatan		400,000,000	APBDKOTA			
15.26.	Penunjang Pembangunan Rumah Khusus Nelayan		Kab. Pesisir Selatan		50,000,000	APBDKOTA			
15.27.	Penunjang Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Rumah Tidak Layak Huni		Kab. Pesisir Selatan		100,000,000	APBDKOTA			
15.28.	DAK Perumahan		Kab. Pesisir Selatan		0	APBDKOTA			
15.29.	Penunjang DAK Perumahan		Kab. Pesisir Selatan		100,000,000	APBDKOTA			
15.31.	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan		Pesisir Selatan		400,000,000	APBDKOTA			
15.32.	Pembangunan Jalan Minapolitan		Pesisir Selatan		200,000,000	APBDKOTA			
16.	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah								
16.04.	Sertifikasi Tanah Hak Milik Pemerintah Daerah		Pesisir Selatan		350,000,000	APBDKOTA			
16.05.	Penetapan Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Keserasian Kawasan dan Lingkungan Hunian Berimbang		Pesisir Selatan		0	APBDKOTA			
16.05.	Perencanaan Pengadaan Tanah		Pesisir Selatan		100,000,000	APBDKOTA			
16.06.	Persiapan Pengadaan Tanah		Pesisir Selatan		100,000,000	APBDKOTA			
16.07.	Pelaksanaan Pengadaan Tanah		Pesisir Selatan		9,000,000,000	APBDKOTA			
16.07.	Pemeliharaan Drainase Kawasan		batu hampa		0				
16.07.	Pemeliharaan Drainase Kawasan		Duku Utara		0				
16.07.	Pemeliharaan Drainase Kawasan		jinang kampung pansur		0				
16.07.	Pemeliharaan Drainase Kawasan		Kampung Bunga Pasang I		200,000,000				
16.07.	Pemeliharaan Drainase Kawasan		kampung painan timur		0				
16.07.	Pemeliharaan Drainase Kawasan		kapeh panji jaya talaok		250,000,000				
16.07.	Pemeliharaan Drainase Kawasan		Koto baru		1,000,000,000				
16.07.	Pemeliharaan Drainase Kawasan		Lubuk Begalung		0				
16.07.	Pemeliharaan Drainase Kawasan		Nagari Batu Hampa		0				

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
16.07.	Pemeliharaan Drainase Kawasan		Nagari Lunang		150,000,000				
16.07.	Pemeliharaan Drainase Kawasan		Nagari Pasir Binjai		0				
16.07.	Pemeliharaan Drainase Kawasan		Nagari Sambungo		1,000,000,000				
16.07.	Pemeliharaan Drainase Kawasan		Nagari Silaut		0				
16.07.	Pemeliharaan Drainase Kawasan		Nagari Talang Balarik Tapan		450,000,000				
16.07.	Pemeliharaan Drainase Kawasan		Pasar Baru		1,200,000,000				
16.07.	Pemeliharaan Drainase Kawasan		Pasar Lama		500,000,000				
16.07.	Pemeliharaan Drainase Kawasan		Pasar Pagi		0				
16.07.	Pemeliharaan Drainase Kawasan		Pesisir Selatan		0	APBDKOTA			
16.07.	Pemeliharaan Drainase Kawasan		Tanjung Beringin IV, Nagari Lunang Selatan		90,000,000				
16.07.	Pemeliharaan Drainase Kawasan		Teratak Tempatih		0				
16.08.	Pembangunan Infrastruktur Sanitasi		Pesisir Selatan		4,000,000,000	APBDKOTA			
16.08.	Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong		Kab. Pesisir Selatan		0	APBDKOTA			
16.08.	Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah		Pesisir Selatan		100,000,000	APBDKOTA			
16.09.	Pengadaan Pilar Batas Tanah		Pesisir Selatan		0	APBDKOTA			
16.10.	Fasilitasi Pengadaan Tanah		Pesisir Selatan		100,000,000	APBDKOTA			
16.10.	Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar		-		0	APBDKOTA			
16.10.	Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar		Amping Parak		0	APBDKOTA			
16.10.	Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar		Kec. Sutera		400,000,000	APBDKOTA			
16.11.	Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Perumahan Permukiman		Ampalu		400,000,000				
16.11.	Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Perumahan Permukiman		Bukit Kaciak		800,000,000				
16.11.	Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Perumahan Permukiman		Kudo-kudo		800,000,000				
16.11.	Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Perumahan Permukiman		Lubuk Aur		0				
16.11.	Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Perumahan Permukiman		nagari		250,000,000				
16.11.	Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Perumahan Permukiman		nagari sungai sarik		350,000,000				
16.11.	Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Perumahan Permukiman		Padang Cupak		200,000,000				
16.13.	Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Kawasan Permukiman		Pesisir Selatan		9,032,861,400	APBDKOTA			
16.14.	Inventarisasi Tanah Pemerintah Daerah		Pesisir Selatan		175,500,000	APBDKOTA			
16.14.	Pembangunan Drainase (DAK)		Pesisir Selatan		0	APBDKOTA			

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
16.21.	Penunjang Pembangunan Infrastruktur Sanitasi		IV Jurai		229,600,000	APBDKOTA			
16.22.	Peningkatan PSU (Prasarana dan Sarana Utilitas Umum) Perumahan		Pesisir Selatan		2,400,000,000	APBDKOTA			
16.23.	Pengadaan MCK Bagi Masyarakat Miskin		Kab. Pesisir Selatan		0	APBDKOTA			
16.26.	Bantuan Jamban (WC)		Kab. Pesisir Selatan		0	APBDKOTA			
17.	Program Penyelesaian Konflik konflik Pertanahan								
17.01.	Fasilitasi Penyelesaian Konflik konflik pertanahan		Pesisir Selatan		107,400,000	APBDKOTA			
18.	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan								
18.01.	Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal		IV Jurai		300,000,000	APBDKOTA			
23.	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman								
23.01.	Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman		pesisir selatan		0	APBDKOTA			
23.02.	Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Tentang Pembangunan Kawasan Permukiman		pesisir selatan		100,000,000	APBDKOTA			
23.03.	Pemeliharaan Jalan Kawasan		pesisir selatan		0	APBDKOTA			
23.04.	Penataan Kawasan Kumuh		pesisir selatan		2,750,000,000	APBDKOTA			
23.05.	Penyusunan DED Kawasan Kumuh		Pesisir Selatan		1,500,000,000	APBDKOTA			
23.06.	Penunjang Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman		pesisir selatan		150,000,000	APBDKOTA			
23.07.	Penyusunan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Kawasan Permukiman		pesisir selatan		50,000,000	APBDKOTA			
23.08.	Penyusunan Dokumen Lingkungan Kawasan Kumuh		pesisir selatan		0	APBDKOTA			
23.09.	Penunjang Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman		pesisir selatan		50,000,000	APBDKOTA			
23.10.	Penyusunan Dokumen Rencana Kawasan Permukiman (RKP) Kab. Pesisir Selatan		Pesisir Selatan		800,000,000	APBDKOTA			
27.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah								
27.08.	Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana dan prasaran air limbah		Nagari Batang Betung		1,000,000,000				
27.08.	Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana dan prasaran air limbah		Nagari Bukit Buai Tapan		2,000,000,000				
27.08.	Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana dan prasaran air limbah		Nagari Sungai Sirah		0				
36.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan								
36.03.	Pembangunan Gedung Kantor		Kab. Pesisir Selatan		100,000,000	APBDKOTA			
36.04.	Pembangunan Rumah Dinas		Kab. Pesisir Selatan		1,600,000,000	APBDKOTA			
36.04.	Pembangunan Rumah Dinas		Nagari Kampung Tengah		350,000,000	APBDKOTA			

Nama OPD : **DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
36.05.	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas		Kab. Pesisir Selatan		600,000,000	APBDKOTA			
36.08.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor		Pesisir Selatan		200,000,000	APBDKOTA			

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019

Nama OPD : **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Jasa Komonikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	IV JURAI	100 %	100,000,000	APBDKOTA		100 %	
01.07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Biaya Honorarium Pengelola Keuangan	IV Jurai	100%	1,600,000,000	APBDKOTA		100%	
01.08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa Kebersihan kantor	IV Jurai	100 %	20,000,000	APBDKOTA		100 %	
01.09.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kelancaran pelaksanaan alat tugas	IV Jurai	100 %	50,000,000	APBDKOTA		100 %	
01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kelancaran pelaksanaan kerja dengan ATK	IV Jurai	100 %	70,000,000	APBDKOTA		100 %	
01.11.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyedian barang cetakan dan pengadaan pelaksanaan tugas	IV Jurai	100 %	60,000,000	APBDKOTA		100 %	
01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah tagihan komponen intalasi, listrik penerangan bangunan	IV Jurai	100 %	10,000,000	APBDKOTA		100 %	
01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	IV Jurai	100 %	9,000,000	APBDKOTA		100 %	
01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makan dan MInum Rapat	IV Jurai	10 bulan	20,000,000	APBDKOTA		10 bulan	
01.19.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksnanya tugas dengan adanya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Daerah	IV JURAI	100 %	100,000,000	APBDKOTA		100 %	
01.20.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Negeri		IV JURAI		260,000,000	APBDKOTA			
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
02.07.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terwujudnya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	IV JURAI	1 paket	50,000,000	APBDKOTA		1 paket	
02.22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		IV Jurai		45,000,000	APBDKOTA			
02.22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		IV JURAI		150,000,000	APBDKOTA			
02.24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tertibnya pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	IV JURAI	19 Unit	150,000,000	APBDKOTA		19 Unit	
03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
03.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kelancaran Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya bagi SAR/TRC	IV Jurai	30 Orang	60,000,000	APBDKOTA		30 Orang	
03.05.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Terlaksnanya pengadaan pakaian pada hari-hari tertentu bagi karyawan	IV JURAI	90 stel	40,000,000	APBDKOTA		90 stel	
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
05.01.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal meningkatkan wawasan ASN yang handal	IV JURAI	10 orang	25,000,000	APBDKOTA		10 orang	
05.13.	Pelatihan Teknis Tenaga Satgas SAR	Terlaksanya Pelatihan Teknis Tenaga Satgas SAR handal	IV JURAI	20 Orang	40,000,000	APBDKOTA		20 Orang	

Nama OPD : **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
05.20.	Pendidikan dan Pelatihan Dasar Manajemen Bencana	Terlaksananya Aparatur BPBD yang mengikuti diklat Dasar Kebencanaan	IV Jurai	10 Orang	40,000,000	APBDKOTA		10 Orang	
15.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata								
15.12.	Pelaksanaan Pameran/Bazar Festival Langkisau		IV JURAI		25,000,000	APBDKOTA			
23.	Program Kesiapsiagaan								
23.02.	Penyusunan Rencana Kontijen Banjir	Terlaksananya Penyusunan SOP Rencana Kontijensi Banjir	Painan	1 dukumen	30,000,000	APBDKOTA		1 dukumen	
23.07.	Pembinaan dan Pembentukan Kelompok Siaga Bencana Sekolah (KSBS)	Terlaksananya Sosialisasi dan pelatihan kebencanaan bagi sekolah-sekolah	IV JURAI	10 KSBS	100,000,000	APBDKOTA		10 KSBS	
23.09.	Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Bagi Kelompok Perempuan di Kabupaten Pesisir Selatan	Terlaksananya Sosialisasi PRB Bagi Kelompok Perempuan di Pesisir Selatan	IV JURAI	1 dukumen	100,000,000	APBDKOTA		1 dukumen	
23.13.	Jambore dan Bulan Pengurangan Resiko Bencana	Terlaksananya penyelenggaraan Hari BNPB tingkat Propinsi dan bnpb pusat	IV JURAI	2 Jenis	110,000,000	APBDKOTA		2 Jenis	
23.15.	Operasional dan Pemeliharaan Alat-Alat Berat	Terlaksananya Pemeliharaan Alat-Alat Berat	IV JURAI	1 eskavator	85,000,000	APBDKOTA		1 eskavator	
23.17.	Peningkatan Akses Komunikasi dan Pengadaan data dan Informasi Real Time untuk tanggap darurat	Terlaknanya penyusunan dokumen Data DIBI	IV JURAI	12 dokumen	80,000,000	APBDKOTA		12 dokumen	
24.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana								
24.08.	Pengadaan Peralatan-peralatan SAR dan TRC	Terlaksananya pengadaan Tenda Pleton, Perahu Karet, Pick Up	IV JURAI	2 unit	660,000,000	APBDKOTA		2 unit	
25.	Program Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat dan Pemangku Lainnya dalam Pengurangan Resiko Bencana								
25.02.	Pengembangan Program Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Masyarakat dan Nagari Tangguh	Terlaksananya pembinaan Nagari Tangguh bencana	IV JURAI	10 Nagari	200,000,000	APBDKOTA		10 Nagari	
26.	Program Penanganan Tanggap Darurat								
26.02.	Operasional SAR dan Tim Reaksi Cepat (TRC)	Kelancaran penanganan jadian bencana bersama SAR	IV JURAI	15 Kecamatan	130,000,000	APBDKOTA		15 Kecamatan	
26.03.	Operasional Logistik dan Perlengkapan Gudang Logistik	Terlaksananya pendistribusian peraltan dan logistik	IV JURAI	15 Kecamatan	80,000,000	APBDKOTA		15 Kecamatan	
26.04.	Operasional Posko Piket Satgas SAR	Terlaksananya piket posko satgas SAR	IV JURAI	4 posko	80,000,000	APBDKOTA		4 posko	
27.	Program Pengelolaan dan Penanganan Dampak Bencana								
27.03.	Inventarisasi dan Identifikasi Kerusakan/Kerugian	Jumlah Inventarasi dan Indentifikasi Kerusakan /Kerugian	IV JURAI	15 Kecamatan	85,000,000	APBDKOTA		15 Kecamatan	
27.04.	Monitoring dan Evaluasi Kebencanaan	Jumlah dan Monitoring Evaluasi Kebencanaan T	IV JURAI	15 Kecamatan	75,000,000	APBDKOTA		15 Kecamatan	
27.05.	Sosialisasi dan Koordinasi Program	Terlaksanaya sosialisasi dan koordinasi program pada pasca bencana	IV JURAI	4 kali	50,000,000	APBDKOTA		4 kali	
27.06.	Perencanaan dan Penetapan Prioritas	Terlaksananya pembuatan dukumen gambar dan RAB perncaaan gambar dukumen lingkungan RAB	IV JURAI	10 Dukumen	100,000,000	APBDKOTA		10 Dukumen	
27.07.	Pemulihan Sosial Psikologis	Terlaksanya pertemuan Rapat pemulihan sosial psikologis pasca bencana	IV JURAI	1 pertemuan	30,000,000	APBDKOTA		1 pertemuan	
27.08.	Rekonstruksi Non Fisik Pelayanan Kesehatan,	Terlaksanya pertemuan pasca bencana bagi	IV JURAI	4 pertemuan	30,000,000	APBDKOTA		4 pertemuan	

Nama OPD : **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Pelayanan Pendidikan, Pelayanan Perekonomian, Pelayanan Pemerintah Umum dan Pelayanan Peribadatan	pelayanan kesehatan, pendidikan, perekonomian, pemerintah /umum dan peribadatan							
28.	Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana								
28.07.	Operasional dan Perwatan PUSDALTIN	Erlaksananya perawatan Early Warning System (EWS)	IV JURAI	8 EWS	150,000,000	APBDKOTA		8 EWS	

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019

Nama OPD : **DINAS SATUAN POLISI, PAMONG PRAJA DAN**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kab. Pesisir Selatan		90,000,000	APBDKOTA			
01.07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Kab. Pesisir Selatan		88,500,000	APBDKOTA			
01.08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Kab. Pesisir Selatan		50,000,000	APBDKOTA			
01.09.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja		Kab. Pesisir Selatan		15,000,000	APBDKOTA			
01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Kab. Pesisir Selatan		30,000,000	APBDKOTA			
01.11.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Kab. Pesisir Selatan		45,000,000	APBDKOTA			
01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Kab. Pesisir Selatan		17,600,000	APBDKOTA			
01.13.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kab. Pesisir Selatan		36,000,000	APBDKOTA			
01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Kab. Pesisir Selatan		17,500,000	APBDKOTA			
01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman		Kab. Pesisir Selatan		29,300,000	APBDKOTA			
01.18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah		Kab. Pesisir Selatan		178,000,000	APBDKOTA			
01.19.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah		Kab. Pesisir Selatan		160,000,000	APBDKOTA			
01.30.	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan		Kab. Pesisir Selatan		15,000,000	APBDKOTA			
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
02.03.	Pembangunan Gedung Kantor		Mandeh, Taratak Sutera		200,000,000	APBDKOTA			
02.03.	Pembangunan Gedung Kantor		Painan		2,500,000,000	APBDKOTA			
02.05.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		Kab. Pesisir Selatan		995,000,000	APBDKOTA			
02.10.	Pengadaan Meubiler		Kab. Pesisir Selatan		25,000,000	APBDKOTA			
02.22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Kab. Pesisir Selatan		76,500,000	APBDKOTA			
02.24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Kab. Pesisir Selatan		230,000,000	APBDKOTA			
02.26.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		Kab. Pesisir Selatan		20,000,000	APBDKOTA			
03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
03.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		Kab. Pesisir Selatan		370,000,000	APBDKOTA			

Nama OPD : **DINAS SATUAN POLISI, PAMONG PRAJA DAN**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
05.01.	Pendidikan dan Pelatihan Formal		Kab. Pesisir Selatan		50,000,000	APBDKOTA			
05.10.	Seleksi Satgas Pemadam Kebakaran		Kab. Pesisir Selatan		100,000,000	APBDKOTA			
05.22.	Pendidikan Dasar Satpol PP		Kab. Pesisir Selatan		60,000,000	APBDKOTA			
05.23.	Penertiban Pelanggaran Hukum Terhadap Ketentuan Pelanggaran Perda		Kab. Pesisir Selatan		70,000,000	APBDKOTA			
05.24.	Pelatihan Kesapmataa dan Bela Diri		Kab. Pesisir Selatan		295,000,000	APBDKOTA			
05.25.	Diklat PPNS dan Manajemen PPNS		Kab. Pesisir Selatan		40,000,000	APBDKOTA			
05.26.	Sosialisasi Pencegahan Kebakaran		Kab. Pesisir Selatan		250,000,000	APBDKOTA			
05.27.	Uji Kompetensi Pol PP		Kab. Pesisir Selatan		35,000,000	APBDKOTA			
15.	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan								
15.11.	Deteksi Dini (Intelijen) Pelanggaran Perda		Kab. Pesisir Selatan		80,000,000	APBDKOTA			
15.12.	Pembinaan dan Pembekalan Aparat Linmas		Kab. Pesisir Selatan		450,000,000	APBDKOTA			
15.14.	Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum		Kab. Pesisir Selatan		350,000,000	APBDKOTA			
15.16.	Pengamanan Pemilu		Kab. Pesisir Selatan		3,000,000,000	APBDKOTA			
15.17.	Pembentukan Satpol PP Tingkat Kecamatan		Kabupaten Pesisir Selatan		100,000,000	APBDKOTA			
15.21.	Perekutan Anggota Sat Pol PP		Kab. Pesisir Selatan		200,000,000	APBDKOTA			
16.	Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal								
16.06.	Operasi Pengamanan Ivent-Ivent Tertentu		Kab. Pesisir Selatan		695,000,000	APBDKOTA			
16.07.	Pembentukan Pol PP Pelajar		Kec. IV Jurai		80,000,000	APBDKOTA			
16.16.	Forum Penegakan Perda		Kab. Pesisir Selatan		200,000,000	APBDKOTA			
16.18.	Pengendalian Keamanan Objek Wisata		Kab. Pesisir Selatan		1,000,000,000	APBDKOTA			
16.22.	Sosialisasi Perda dan Perbup		Kab. Pesisir Selatan		100,000,000	APBDKOTA			
16.26.	Pengendalian Jasa Pengamanan Kantor dan Objek Vital dan Aset Negara		Kab. Pesisir Selatan		1,595,000,000	APBDKOTA			
16.27.	Kemah Bhakti Satpol PP se Sumatera Barat dan Indonesia		Indonesia		95,000,000	APBDKOTA			
24.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana								
24.07.	Pengadaan Peralatan-Peralatan Pemadam Kebakaran		Kab. Pesisir Selatan		250,000,000	APBDKOTA			
24.09.	Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran		Tarusan, Pc. Soal, Lunang		5,700,000,000	APBDKOTA			
24.11.	Rehabilitasi Posko Pemadam Kebakaran		Tapan		200,000,000	APBDKOTA			
24.12.	Pembuatan Bak Penampungan Air dan Akses Jalan Masuk Mobil Damkar		Kab. Pesisir Selatan		150,000,000	APBDKOTA			
24.13.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran		Kab. Pesisir Selatan		150,000,000	APBDKOTA			
24.15.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana		Kab. Pesisir Selatan		150,000,000	APBDKOTA			

Nama OPD : **DINAS SATUAN POLISI, PAMONG PRAJA DAN**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Penanggulangan Bencana Kebakaran								
24.16.	Pengadaan Peralatan Keamanan		Kab. Pesisir Selatan		85,000,000	APBDKOTA			
26.	Program Penanganan Tanggap Darurat								
26.01.	Operasional Pemadam Kebakaran		Kab. Pesisir Selatan		2,800,000,000	APBDKOTA			

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019

Nama OPD : **DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Salido- Painan		30,000,000	APBDKOTA			
01.07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Salido- Painan		85,000,000	APBDKOTA			
01.08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Salido- Painan		110,000,000	APBDKOTA			
01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Salido- Painan		30,000,000	APBDKOTA			
01.11.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Salido- Painan		31,000,000	APBDKOTA			
01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Salido- Painan		4,500,000	APBDKOTA			
01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Salido- Painan		25,000,000	APBDKOTA			
01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman		Salido- Painan		36,500,000	APBDKOTA			
01.18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah		Salido- Painan		140,000,000	APBDKOTA			
01.19.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah		Salido- Painan		64,000,000	APBDKOTA			
01.29.	Monitoring Evaluasi Kegiatan		Salido- Painan		50,000,000	APBDKOTA			
01.30.	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan		Salido- Painan		45,000,000	APBDKOTA			
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
02.05.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		Painan		36,000,000	APBDKOTA			
02.09.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Salido- Painan		45,000,000	APBDKOTA			
02.10.	Pengadaan Meubiler		Salido- Painan		25,601,000	APBDKOTA			
02.22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Salido- Painan		70,000,000	APBDKOTA			
02.24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Salido- Painan		200,000,000	APBDKOTA			
02.28.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Salido- Painan		13,700,000	APBDKOTA			
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
05.01.	Pendidikan dan Pelatihan Formal		Painan		45,000,000	APBDKOTA			
15.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya								
15.03.	Pelatihan Ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin		mandeh		0				
15.03.	Pelatihan Ketrampilan berusaha bagi keluarga		Mandeh		0				

Nama OPD : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

[illegible]

Nama OPD : **DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
21.02.	Pembinaan Nagari Layak Anak		Salido- Painan		100,000,000	APBDKOTA			
21.18.	Penguatan Kelembagaan Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Kabupaten		Salido- Painan		150,000,000	APBDKOTA			
22.	Program Penguatan dan Pembangunan Kelembagaan beserta jaringan dan penyusunan regulasi daerah								
22.03.	Penyusunan Anggaran Responsif Gender		Salido- Painan		40,000,000	APBDKOTA			
22.05.	Fasilitasi Forum Anak Daerah		Painan		90,000,000	APBDKOTA			
24.	Penanaman Nilai-nilai Kepahlawanan dan Keberintisan								
24.01.	Sarasehan Penanaman Nilai-nilai Kepahlawanan Bagi Generasi Muda		Salido- Painan		50,000,000	APBDKOTA			
24.04.	Peningkatan Sarana Prasarana Kepahlawanan dan Keberintisan		Sago		85,000,000	APBDKOTA			

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019

Nama OPD : **DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jl. Rimbo Panjang, Laban Salido		39,600,000	APBDKOTA			
01.07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Jl. Rimbo Panjang, Laban Salido		87,824,000	APBDKOTA			
01.08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Jl. Rimbo Panjang, Laban Salido		178,393,270	APBDKOTA			
01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Jl. Rimbo Panjang, Laban Salido		35,443,705	APBDKOTA			
01.11.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jl. Rimbo Panjang, Laban Salido		27,041,960	APBDKOTA			
01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jl. Rimbo Panjang, Laban Salido		19,042,100	APBDKOTA			
01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jl. Rimbo Panjang, Laban Salido		14,320,000	APBDKOTA			
01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman		Jl. Rimbo Panjang, Laban Salido		34,980,000	APBDKOTA			
01.18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah		Jl. Rimbo Panjang, Laban Salido		107,250,000	APBDKOTA			
01.19.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah		Jl. Rimbo Panjang, Laban Salido		84,000,000	APBDKOTA			
01.29.	Monitoring Evaluasi Kegiatan		Jl. Rimbo Panjang, Laban Salido		45,540,000	APBDKOTA			
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
02.03.	Pembangunan Gedung Kantor		Jl. Rimbo Panjang, Laban Salido		185,000,000	APBDKOTA			
02.09.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Jl. Rimbo Panjang, Laban Salido		282,185,380	APBDKOTA			
02.22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Jl. Rimbo Panjang, Laban Salido		150,000,000	APBDKOTA			
02.24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Jl. Rimbo Panjang, Laban Salido		128,000,000	APBDKOTA			
02.28.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Jl. Rimbo Panjang, Laban Salido		25,740,000	APBDKOTA			
02.42.	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor		Jl. Rimbo Panjang, Laban Salido		200,000,000	APBDKOTA			
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
05.03.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan		Jl. Rimbo Panjang,		50,000,000	APBDKOTA			

Nama OPD : **DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Perundang-undangan		Laban Salido						
15.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja								
15.04.	Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK		Jl. Rimbo Panjang, Laban Salido		75,000,000	APBDKOTA			
15.06.	Pendampingan Dana Pembantuan KTM Lunang Silaut		Lunang Silaut		196,958,900	APBDKOTA			
15.06.	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja		Jl. Rimbo Panjang, Laban Salido		850,000,000	APBDKOTA			
15.07.	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana BLK		Jl. Rimbo Panjang, Laban Salido		50,000,000	APBDKOTA			
15.09.	Perencanaan Fasilitas Dukungan KTM		Lunang Silaut		234,053,200	APBDKOTA			
15.11.	Operasional Badan Pengelola KTM Lunang Silaut		Lunang Silaut		61,800,000	APBDKOTA			
15.16.	Pembinaan LPKS		Jl. Rimbo Panjang, Laban Salido		50,000,000	APBDKOTA			
15.17.	Pembinaan Usaha Transmigrasi		Lunang Silaut		125,000,000	APBDKOTA			
15.23.	Fasilitas Dukungan KTM Lunang Silaut		Lunang Silaut		1,099,301,000	APBDKOTA			
15.30.	Pembinaan Sosial Budaya Kawasan Transmigrasi		Lunang Silaut		125,000,000	APBDKOTA			
16.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja								
16.02.	Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja		Jl. Rimbo Panjang, Laban Salido		185,000,000	APBDKOTA			
16.09.	Job Fair		Jl. Rimbo Panjang, Laban Salido		175,000,000	APBDKOTA			
17.	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan								
17.05.	Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja		Jl. Rimbo Panjang, Laban Salido		88,513,500	APBDKOTA			
17.10.	Sosialisasi Berbagai Peraturan Perundang-undangan Tentang Ketenaga Kerjaan		Jl. Rimbo Panjang, Laban Salido		65,000,000	APBDKOTA			

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019

Nama OPD : **DINAS PANGAN**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kab. Pesisir Selatan		70,000,000	APBDKOTA			
01.07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Kab. Pesisir Selatan		70,000,000	APBDKOTA			
01.08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Kab. Pesisir Selatan		110,000,000	APBDKOTA			
01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Kab. Pesisir Selatan		40,000,000	APBDKOTA			
01.11.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Kab. Pesisir Selatan		22,500,000	APBDKOTA			
01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Kab. Pesisir Selatan		18,750,000	APBDKOTA			
01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Kab. Pesisir Selatan		3,900,000	APBDKOTA			
01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman		Kab. Pesisir Selatan		15,500,000	APBDKOTA			
01.18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah		Kab. Pesisir Selatan		197,500,000	APBDKOTA			
01.19.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah		Kab. Pesisir Selatan		100,000,000	APBDKOTA			
01.21.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor		Kab. Pesisir Selatan		14,000,000	APBDKOTA			
01.30.	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan		Kab. Pesisir Selatan		50,000,000	APBDKOTA			
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
02.09.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Kab. Pesisir Selatan		75,000,000	APBDKOTA			
02.10.	Pengadaan Meubiler		Kab. Pesisir Selatan		31,250,000	APBDKOTA			
02.22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Kab. Pesisir Selatan		25,000,000	APBDKOTA			
02.24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Kab. Pesisir Selatan		100,000,000	APBDKOTA			
02.28.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Kab. Pesisir Selatan		11,000,000	APBDKOTA			
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
05.01.	Pendidikan dan Pelatihan Formal		Kab. Pesisir Selatan		40,000,000	APBDKOTA			
16.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)								
16.01.	Penanganan Daerah Rawan Pangan		Kab. Pesisir Selatan		75,000,000	APBDKOTA			
16.14.	Pengembangan Desa Mandiri Pangan		Kab. Pesisir Selatan		50,000,000	APBDKOTA			
16.32.	Pembangunan Lumbung Pangan (DAK dan Pendamping)		Kab. Pesisir Selatan		2,315,000,000	APBN			

Nama OPD : **DINAS PANGAN**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
16.43.	Penguatan Kelembagaan Cadangan Pangan Masyarakat		Kab. Pesisir Selatan		50,000,000	APBDKOTA			
16.45.	Pemantauan Produksi Pangan, Jaringan Distribusi, Pasokan Pangan dan HBKN		Kab. Pesisir Selatan		60,000,000	APBDKOTA			
16.46	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten		Kab. Pesisir Selatan		615,000,000	APBDKOTA			
16.52.	Penyusunan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan (FSVA)		Kab. Pesisir Selatan		35,000,000	APBDKOTA			
16.53.	Pengembangan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM)		Kab. Pesisir Selatan		40,000,000	APBDKOTA			
16.57.	Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan		Kab. Pesisir Selatan		50,000,000	APBDKOTA			
16.61.	Penyusunan Data Base Ketahanan Pangan		Kab. Pesisir Selatan		30,000,000	APBDKOTA			
16.64.	Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat/ TTI		Kab. Pesisir Selatan		75,000,000	APBDKOTA			
16.68.	Analisis Ketersediaan Pangan Berdasarkan Analisa Neraca Bahan Makanan (NBM)		Kab. Pesisir Selatan		40,000,000	APBDKOTA			
16.69.	Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)		Kab. Pesisir Selatan		35,000,000	APBDKOTA			
16.70.	Penunjang DAK Ketahanan Pangan		Kab. Pesisir Selatan		200,000,000	APBDKOTA			
17.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat								
17.05.	Peningkatan dan Pengembangan Promosi Panganekaragaman Konsumsi Pangan		Kab. Pesisir Selatan		245,000,000	APBDKOTA			
17.06.	Percepatan Panganekaragaman Konsumsi Pangan		Kab. Pesisir Selatan		275,000,000	APBDKOTA			
17.07.	Peningkatan Penanganan Keamanan Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen		Kab. Pesisir Selatan		90,000,000	APBDKOTA			
17.08.	Penyusunan Pola Pangan Harapan		Kab. Pesisir Selatan		50,000,000	APBDKOTA			
17.09.	Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan		Kab. Pesisir Selatan		110,000,000	APBDKOTA			
17.17.	Tekhnologi Pengolahan Pangan Lokal		Kab. Pesisir Selatan		100,000,000	APBDKOTA			
17.22.	Model Percontohan Keamanan Pangan		Nagari Jinang Kampung Pansur		70,000,000	APBDKOTA			
17.23.	Gerakan Konsumsi B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman)		Kab. Pesisir Selatan		200,000,000	APBDKOTA			
17.25.	Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan		Kab. Pesisir Selatan		150,000,000	APBDKOTA			
17.28.	Penyusunan Ranperda tentang Ketahanan Pangan		Kab. Pesisir Selatan		150,000,000	APBDKOTA			

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019

Nama OPD : **DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		IV Jurai		24,000,000	APBDKOTA			
01.07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		IV Jurai		59,500,000	APBDKOTA			
01.08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		IV Jurai		68,000,000	APBDKOTA			
01.09.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja		IV Jurai		5,000,000	APBDKOTA			
01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor		IV Jurai		24,000,000	APBDKOTA			
01.11.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		IV Jurai		24,000,000	APBDKOTA			
01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		IV Jurai		6,500,000	APBDKOTA			
01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		IV Jurai		10,500,000	APBDKOTA			
01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman		IV Jurai		18,000,000	APBDKOTA			
01.18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah		IV Jurai		150,000,000	APBDKOTA			
01.19.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah		IV Jurai		35,000,000	APBDKOTA			
01.30.	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan		IV Jurai		70,000,000	APBDKOTA			
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
02.05.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		IV Jurai		120,000,000	APBDKOTA			
02.07.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		IV Jurai		100,000,000	APBDKOTA			
02.10.	Pengadaan Meubiler		IV Jurai		70,000,000	APBDKOTA			
02.24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		IV Jurai		80,000,000	APBDKOTA			
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
05.01.	Pendidikan dan Pelatihan Formal		IV Jurai		50,000,000	APBDKOTA			
05.03.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		IV Jurai		100,000,000	APBDKOTA			
05.21.	Pelatihan Teknis Lingkungan Hidup		Luar Daerah		100,000,000	APBDKOTA			
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
06.01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD		IV Jurai		25,000,000	APBDKOTA			
06.05.	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan		15 Kecamatan		45,000,000	APBDKOTA			

Nama OPD : **DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
15.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan								
15.10.	Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan		Kab.Pessel		70,000,000	APBDKOTA			
15.13.	Penyusunan Laporan Periodik Volume Sampah		Kab.Pessel		100,000,000	APBDKOTA			
15.15.	Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Program Pengelolaan Bank Sampah dan 3R		Kab.Pessel		100,000,000	APBDKOTA			
15.16.	Pembuatan Plank Himbauan Kebersihan		Kab.Pessel		100,000,000	APBDKOTA			
15.18.	Pengadaan Motor Sampah		Kab.Pessel		300,000,000	APBDKOTA			
15.29.	Pengadaan Bank Sampah		Kab.Pessel		150,000,000	APBDKOTA			
15.30.	Pembangunan Gedung 3R		Kab.Pessel		200,000,000	APBDKOTA			
15.31.	Pengadaan TPS		Kab.Pessel		200,000,000	APBDKOTA			
16.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup								
16.01.	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura		IV Jurai		300,000,000	APBDKOTA			
16.03.	Pemantauan Kualitas Lingkungan		Kab.Peseel		150,000,000	APBDKOTA			
16.04.	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup		IV Jurai		70,000,000	APBDKOTA			
16.06.	Pengelolaan B3 dan Limbah B3		Kab.Pessel		100,000,000	APBDKOTA			
16.20.	Penilaian Kalpataru		Kab.Pessel		100,000,000	APBDKOTA			
16.21.	Pengujian Air Sungai se Kabupaten Pesisir Selatan		Kab.Pessel		216,000,000	APBDKOTA			
16.22.	Pembuatan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Lingkungan Hidup		Kab.Pessel		50,000,000	APBDKOTA			
16.23.	Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia		Kab.Pessel		100,000,000	APBDKOTA			
16.28.	Penunjang Operasional Laboratorium		Kab.Pessel		1,000,000,000	APBDKOTA			
16.31.	Koordinasi Gerakan Sumatera Barat Bersih (GSB)		Kab.Pessel		80,000,000	APBDKOTA			
15.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan								
16.33.	Sosialisasi dan Pembinaan Pengelolaan Persampahan		Painan		25,000,000	APBDKOTA			
16.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup								
16.36.	Identifikasi sumber pencemar lingkungan berdasarkan sumber pencemar lingkungan		Kab.Pessel		150,000,000	APBDKOTA			
16.39.	Pembinaan Pelaksanaan PROKLIM DAN KALPATARU		Kab.Pessel		200,000,000	APBDKOTA			
16.42.	Sekolah Berbudaya dan Berwawasan Lingkungan (ADIWIYATA)		Kab.Pessel		225,000,000	APBDKOTA			
16.44.	Penyusunan Perda Pengelolaan Sampah		Painan		60,000,000	APBDKOTA			
17.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam								
17.19.	Pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati Wilayah		Kab.Pessel		450,000,000	APBDKOTA			

Nama OPD : **DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
17.22.	Pembangunan Bank Bibit Tanaman		Kab.Pessel		150,000,000	APBDKOTA			
19.	Program Peningkatan kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan								
19.03.	Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumber daya hutan (NSDH) nasional dan daerah		Kab.Pessel		100,000,000	APBDKOTA			
19.06.	Pembangunan Pos Pengaduan Lingkungan Hidup		Kab.Pessel		80,000,000	APBDKOTA			
19.07.	Pembuatan Buku Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (LSLHD)		Kab.Pessel		50,000,000	APBDKOTA			
19.09.	Inventarisasi Kegiatan Yang Belum Memiliki Izin Lingkungan		15 Kecamatan		50,000,000	APBDKOTA			
19.10.	Penguatan Komisi AMDAL yang Berlisensi		Kab.Pessel		100,000,000	APBDKOTA			
19.14.	Pembahasan Dokumen AMDAL dan UKL-UPL		Kab.Pessel		200,000,000	APBDKOTA			
19.16.	Pembinaan, Pelaksanaan dan Implementasi AMDAL-UKL-UPL dan SPPL		Kab.Pessel		100,000,000	APBDKOTA			
19.17.	Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup		Kab.Pessel		200,000,000	APBDKOTA			
19.33.	Uji Tapak Kegiatan Dokumen AMDAL dan UKL-UPL		15 Kecamatan		150,000,000	APBDKOTA			
19.34.	Sosialisasi Peraturan dan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup		Painan		50,000,000	APBDKOTA			
20.	Program Peningkatan Pengendalian Polusi								
20.08.	Pemantauan Kualitas Media Skala Kabupaten		Kab.Pessel		150,000,000	APBDKOTA			
20.12.	Inventarisasi Lahan Akses Terbuka		kab.Pessel		300,000,000	APBDKOTA			

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019

Nama OPD : **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		PAINAN		66,750,000	APBDKOTA			
01.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		PAINAN		120,000,000	APBDKOTA			
01.07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		PAINAN		162,500,000	APBDKOTA			
01.08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		PAINAN		35,000,000	APBDKOTA			
01.09.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja		PAINAN		20,000,000	APBDKOTA			
01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor		PAINAN		37,000,000	APBDKOTA			
01.11.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		PAINAN		25,000,000	APBDKOTA			
01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		PAINAN		8,500,000	APBDKOTA			
01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		PAINAN		14,900,000	APBDKOTA			
01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman		PAINAN		15,000,000	APBDKOTA			
01.18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah		PAINAN		178,582,000	APBDKOTA			
01.19.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah		PAINAN		61,040,000	APBDKOTA			
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
02.05.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		KABUPATEN PESIR SELATAN		72,000,000	APBDKOTA			
02.10.	Pengadaan Meubiler		PAINAN		250,000,000	APBDKOTA			
02.22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		PAINAN		98,000,000	APBDKOTA			
02.24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		PAINAN		120,000,000	APBDKOTA			
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
05.01.	Pendidikan dan Pelatihan Formal		JAKARTA		50,000,000	APBDKOTA			
15.	Program Penataan Administrasi Kependudukan								
15.01.	Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu		KABUPATEN PESIR SELATAN		300,000,000	APBDKOTA			
15.03.	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)		KABUPATE PESIR SELATAN		125,000,000	APBDKOTA			
15.07.	Penyediaan informasi yang dapat diakses		KABUPATE		250,000,000	APBDKOTA			

Nama OPD : **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	masyarakat		PESISIR SELATAN						
15.14.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		KABUPATE PESISIR SELATAN		120,000,000	APBDKOTA			
15.15.	Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)		PAINAN		90,000,000	APBDKOTA			
15.16.	Pelayanan Dokumen Kependudukan		PAINAN		140,000,000	APBDKOTA			
15.17.	Penerbitan NIK Nasional dan Penerapan e-KTP (KTP elektronik)		PAINAN		245,000,000	APBDKOTA			
15.18.	Pendataan Penduduk Rentan dan Penduduk Asing		KABUPATEN PESISIR SELATAN		60,000,000	APBDKOTA			
15.22.	Pelaksanaan Pelayanan Unit Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil keliling (UP3SK)		KABUPATE PESISIR SELATAN		200,000,000	APBDKOTA			
15.25.	Pendataan dan Pelaporan Perkawinan Cerai		KABUPATEN PESISIR SELATAN		35,000,000	APBDKOTA			
15.25.	Pendataan dan Pelaporan Perkawinan Cerai		PAINAN		35,000,000	APBDKOTA			
15.27.	Pembangunan dan Pengelolaan Sistem Data Warehouse		PAINAN		600,000,000	APBDKOTA			
15.28.	Pengelolaan Arsip Administrasi Kependudukan Berbasis Digital		PAINAN		135,000,000	APBDKOTA			
15.28.	Pengelolaan Arsip Administrasi Kependudukan Berbasis Digital		PAINAN		135,000,000	APBDKOTA			
15.31.	Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu (DAK non Fisik)		PAINAN		1,400,000,000	APBDKOTA			
15.33.	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kependudukan		PAINAN		65,000,000	APBDKOTA			
15.34.	Pelayanan Administrasi Kependudukan di Satker		KABUPATEN PESISIR SELATAN		5,000,000,000	APBDKOTA			
15.35.	Penataan dan Pemeliharaan Arsip Pendaftaran Penduduk		PAINAN		75,000,000	APBDKOTA			
15.36.	Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga		KABUPATEN PESISIR SELATAN		140,000,000	APBDKOTA			
15.40.	Survey IKM Bidang Administrasi Kependudukan		KABUPATEN PESISIR SELATAN		110,000,000	APBDKOTA			
15.41.	Peningkatan pelayanan pencatatan kelahiran		KABUPATEN PESISIR SELATAN		200,000,000	APBDKOTA			
15.42.	Peningkatan pelayanan pencatatan kematian		KABUPATEN PESISIR SELATAN		200,000,000	APBDKOTA			
21.	Program perencanaan pembangunan daerah								
21.21.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja		PAINAN		80,000,000	APBDKOTA			

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019

Nama OPD : **DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		IV Jurai		28,000,000	APBDKOTA			
01.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		IV Jurai		90,000,000	APBDKOTA			
01.06.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		IV Jurai		315,000,000	APBDKOTA			
01.07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		IV Jurai		60,000,000	APBDKOTA			
01.08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		IV Jurai		95,000,000	APBDKOTA			
01.09.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja		IV Jurai		25,000,000	APBDKOTA			
01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor		IV Jurai		30,000,000	APBDKOTA			
01.11.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		IV Jurai		30,000,000	APBDKOTA			
01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		IV Jurai		25,000,000	APBDKOTA			
01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		IV Jurai		3,000,000	APBDKOTA			
01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman		IV Jurai		20,000,000	APBDKOTA			
01.18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah		IV Jurai		150,000,000	APBDKOTA			
01.19.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah		IV Jurai		55,000,000	APBDKOTA			
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
02.22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		IV Jurai		65,000,000	APBDKOTA			
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
05.03.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		IV Jurai		50,000,000	APBDKOTA			
15.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan								
15.04.	Pencanangan dan Penilaian Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kabupaten		Kab. Pesisir Selatan		60,000,000	APBDKOTA			
15.05.	Pembinaan Keluarga Berencana		Kab. Pesisir Selatan		120,000,000	APBDKOTA			
15.12.	Pembinaan Nagari Berprestasi Tingkat Kabupaten		Kab. Pesisir Selatan		100,000,000	APBDKOTA			
16.	Program Kesehatan Reproduksi Remaja								
16.03.	Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja		Kab. Pesisir Selatan		70,000,000	APBDKOTA			

Nama OPD : **DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
16.08.	Fasilitasi Pembinaan Produk Unggulan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat		Kab. Pesisir Selatan		100,000,000	APBDKOTA			
16.13.	Pembentukan dan Pembinaan Posyantek dan Gelar TTG		Kab. Pesisir Selatan		80,000,000	APBDKOTA			
16.14.	Pelatihan dan pembinaan badan usaha nagari (BUMNAG, LKM)		Kab. Pesisir Selatan		150,000,000	APBDKOTA			
16.16.	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin		Kab. Pesisir Selatan		250,000,000	APBDKOTA			
18.	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa								
18.07.	Publikasi dan Promosi Daerah		Kab. Pesisir Selatan		65,000,000	APBDKOTA			
22.	Program Pengembangan kawasan perdesaan								
22.02.	Pembinaan Badan Kerjasama Antar Nagari		Kab. Pesisir Selatan		200,000,000	APBDKOTA			
22.03.	Pembinaan Potensi Kawasan Masyarakat Perdesaan/Nagari		Kabupaten Pesisir Selatan		150,000,000	APBDKOTA			
23.	Program Pemberdayaan Lembaga Pemerintahan Desa/Nagari								
23.03.	Fasilitasi Pemekaran, Penilaian Bamus Nagari dan Wali Nagari		Kab. Pesisir Selatan		90,000,000	APBDKOTA			
23.04.	Pembinaan Keuangan Pemerintahan Nagari		Kab. Pesisir Selatan		150,000,000	APBDKOTA			
23.08.	Pelatihan Aparatur Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Nagari		Kab. Pesisir Selatan		120,000,000	APBDKOTA			
23.13.	Penyusunan Ranperda dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Tentang Pemerintahan Nagari		IV Jurai		75,000,000	APBDKOTA			
23.15.	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Nagari		Kab. Pesisir Selatan		90,000,000	APBDKOTA			
23.20.	Pemutakhiran Data Profil dan IDM Nagari		Kab. Pesisir Selatan		110,000,000	APBDKOTA			
23.21.	Fasilitasi dan Pembinaan RPJM dan RKP Nagari		Kab. Pesisir Selatan		200,000,000	APBDKOTA			
23.22.	Pengawasan dan Penanganan Masalah Desa		Kab. Pesisir Selatan		220,000,000	APBDKOTA			
24.	Pemberdayaan lembaga sosial dan ekonomi masyarakat/nagari								
24.02.	Pembinaan Administrasi Program Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari (P3MD)		Kab. Pesisir Selatan		150,000,000	APBDKOTA			
24.04.	Pelatihan pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat nagari (LPMN)		Kab. Pesisir Selatan		170,000,000	APBDKOTA			
24.06.	Fasilitasi dan monev KKN		Kab. Pesisir Selatan		70,000,000	APBDKOTA			
24.10.	Pemberdayaan Kelembagaan Tim Penggerak PKK Kabupaten		Kab. Pesisir Selatan		550,000,000	APBDKOTA			
24.11.	Pemberdayaan Keberkelanjutan Badan Pengelola Sarana Prasarana Air Minum dan Sanitasi Nagari (BP-SPAMS)		Kab. Pesisir Selatan		120,000,000	APBDKOTA			
24.12.	Pemberdayaan Kelembagaan Posyandu terintegrasi		Kab. Pesisir Selatan		450,000,000	APBDKOTA			
24.19.	Memasyarakatkan Olahraga di Desa/Nagari		Kab. Pesisir Selatan		200,000,000	APBDKOTA			
24.20.	Pembinaan Lembaga Adat dan Sosial Lainnya		Kab. Pesisir Selatan		80,000,000	APBDKOTA			

Nama OPD : **DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
27.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Keluarga Berencana (DAK Bidang Keluarga Berencana)								
27.01.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Keluarga Berencana (DAK Fisik)		Kab. Pesisir Selatan		1,300,000,000	APBN			
27.02.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Keluarga Berencana (Penunjang DAK Fisik)		Kab. Pesisir Selatan		60,000,000	APBDKOTA			
27.03.	Operasional Balai Penyuluh Keluarga Berencana (DAK Non Fisik)		Kab. Pesisir Selatan		4,300,000,000	APBN			
29.	Program penguatan kelembagaan								
29.02.	Membangun jaringan kemitraan dengan institusi peduli kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga		Kab. Pesisir Selatan		250,000,000	APBDKOTA			
29.06.	Pembinaan Kampung KB		Kab. Pesisir Selatan		180,000,000	APBDKOTA			
29.07.	Pemilihan Duta GenRe		Kab. Pesisir Selatan		200,000,000	APBDKOTA			
31.	Program Pelayanan keluarga berencana								
31.01.	Bakhti KB kes IBI/ IDI/ TNI/ Bahayangkara/ PKK dan Jombore		Kab. Pesisir Selatan		300,000,000	APBDKOTA			

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019

Nama OPD : **DINAS PERHUBUNGAN**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kab. Pesisir Selatan		80,000,000	APBDKOTA			
01.07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Kec. IV Jurai		120,000,000	APBDKOTA			
01.08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Kec. IV Jurai		50,000,000	APBDKOTA			
01.09.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja		Kec. IV Jurai		30,000,000	APBDKOTA			
01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Kec. IV Jurai		40,000,000	APBDKOTA			
01.11.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Kec. IV Jurai		35,000,000	APBDKOTA			
01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Kec. IV Jurai		20,000,000	APBDKOTA			
01.13.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kec. IV Jurai		100,000,000	APBDKOTA			
01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Kec. IV Jurai		14,500,000	APBDKOTA			
01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman		Kec. IV Jurai		50,000,000	APBDKOTA			
01.18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah		Indonesia		150,000,000	APBDKOTA			
01.19.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah		Kab. Pesisir Selatan		100,000,000	APBDKOTA			
01.21.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor		Kec. IV Jurai		13,000,000	APBDKOTA			
01.24.	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS		Kec. IV Jurai		26,000,000	APBDKOTA			
01.30.	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan		Kec. IV Jurai		180,000,000	APBDKOTA			
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
02.03.	Pembangunan Gedung Kantor		Kecamatan IV Jurai dan Rahul Tapan		875,000,000	APBDKOTA			
02.05.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		Kec. IV Jurai		1,780,000,000	APBDKOTA			
02.10.	Pengadaan Meubiler		Kec. IV Jurai		200,000,000	APBDKOTA			
02.22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Kec. IV Jurai		100,000,000	APBDKOTA			
02.24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Kec. IV Jurai		400,000,000	APBDKOTA			
03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
03.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		Kec. IV Jurai		180,000,000	APBDKOTA			

Nama OPD : **DINAS PERHUBUNGAN**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
05.01.	Pendidikan dan Pelatihan Formal		Indonesia		45,000,000	APBDKOTA			
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
06.05.	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan		Kab. Pesisir Selatan		150,000,000	APBDKOTA			
15.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan								
15.11.	Penyusunan Alur Jaringan Trayek transportasi Laut		Kab. Pesisir Selatan		75,000,000	APBDKOTA			
16.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ								
16.04.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan		Kab. Pesisir Selatan		0	APBDKOTA			
16.07.	Rehabilitasi /Pemeliharaan Alat Keselamatan Lalu Lintas		Kab. Pesisir Selatan		250,000,000	APBDKOTA			
16.08.	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Pos Retribusi (TPR)		Kab. Pesisir Selatan		100,000,000	APBDKOTA			
17.	Program peningkatan pelayanan angkutan								
17.14.	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan		Kab. Pesisir Selatan		180,000,000	APBDKOTA			
17.16.	Penunjang Kegiatan WTN		Kab. Pesisir Selatan		100,000,000	APBDKOTA			
17.18.	Pengawasan dan Pengendalian LLAJ		Kab. Pesisir Selatan		200,000,000	APBDKOTA			
17.21.	Operasional pengamanan lalu lintas angkutan laut		Kab. Pesisir Selatan		180,000,000	APBDKOTA			
17.22.	Pembinaan dan penertiban lalu lintas angkutan laut		Kab. Pesisir Selatan		100,000,000	APBDKOTA			
17.24.	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Belalu lintas		Kab. Pesisir Selatan		75,000,000	APBDKOTA			
17.25.	Pemilihan Sopir Teladan (Abiyasa)		Kab. Pesisir Selatan		50,000,000	APBDKOTA			
17.27.	Operasional Transportasi Pelayanan Pendidikan		Kab. Pesisir Selatan		250,000,000	APBDKOTA			
17.28.	Pelayanan Terminal dan Perpakiran		IV Jurai, Bayang dan Koto XI Tarusan		250,000,000	APBDKOTA			
17.29.	Penyusunan Database Perhubungan		IV Jurai		75,000,000	APBDKOTA			
17.49.	Pelayanan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah		Kab. Pesisir Selatan		350,000,000	APBDKOTA			
18.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan								
18.01.	Pembangunan Gedung Terminal		Silaut		0	APBDKOTA			
18.02.	Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal		Kab. Pesisir Selatan		0	APBDKOTA			
18.10.	Pembangunan Dermaga/Tambatan Kapal		Kab. Pesisir Selatan		0	APBDKOTA			
18.11.	Pembangunan Pos Retribusi		Silaut		0	APBDKOTA			
18.12.	Pengembangan Pembangunan Pelabuhan		Panasahan Carocok Painan		2,150,000,000	APBDKOTA			
18.13.	Pembangunan Fasilitas Transportasi Pedesaan (DAK)		Pesisir Selatan		0	APBDKOTA			

Nama OPD : **DINAS PERHUBUNGAN**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
18.14.	Pengadaan Portal Parkir Elektrik		Carocok Painan		0	APBDKOTA			
18.15.	Pembangunan Posko Petugas Parkir		Carocok Painan		0	APBDKOTA			
19.	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas								
19.04.	Pembangunan Penerangan Jalan Umum		Kec. BAB Tapan		100,000,000	APBDKOTA			
19.04.	Pembangunan Penerangan Jalan Umum		Kec. Batang Kapas		200,000,000	APBDKOTA			
19.04.	Pembangunan Penerangan Jalan Umum		Kec. Bayang		500,000,000	APBDKOTA			
19.04.	Pembangunan Penerangan Jalan Umum		Kec. IV Jurai		50,000,000	APBDKOTA			
19.04.	Pembangunan Penerangan Jalan Umum		Kec. IV Jurai, Kec. Batang Kapas		200,000,000	APBDKOTA			
19.04.	Pembangunan Penerangan Jalan Umum		Kec. Koto XI Tarusan		300,000,000	APBDKOTA			
19.04.	Pembangunan Penerangan Jalan Umum		Kec. Lengayang		200,000,000	APBDKOTA			
19.04.	Pembangunan Penerangan Jalan Umum		Kec. Linggo Sari Baganti		650,000,000	APBDKOTA			
19.04.	Pembangunan Penerangan Jalan Umum		Kec. Lunang		0	APBDKOTA			
19.04.	Pembangunan Penerangan Jalan Umum		Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan		0	APBDKOTA			
19.04.	Pembangunan Penerangan Jalan Umum		Kec. Ranah Pesisir		350,000,000	APBDKOTA			
19.04.	Pembangunan Penerangan Jalan Umum		Kec. Silaut		0	APBDKOTA			
19.04.	Pembangunan Penerangan Jalan Umum		Kec. Sutura		200,000,000	APBDKOTA			
19.05.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Penerangan Jalan Umum		Kab. Pesisir Selatan		5,000,000,000	APBDKOTA			
19.12.	Pengadaan Rambu-rambu RPPJ		IV Jurai, Koto XI Tarusan dan Lengayang		150,000,000	APBDKOTA			
19.15.	Pengadaan dan Pemasangan Papan Nama Jalan		IV Jurai		75,000,000	APBDKOTA			
19.18.	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan		Kab. Pesisir Selatan		1,000,000,000	APBDKOTA			
19.19.	Pengadaan dan Pemasangan Alat Keselamatan Lalu Lintas		Pesisir Selatan		1,557,794,000	APBDKOTA			
20.	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor								
20.08.	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor		IV Jurai		300,000,000	APBDKOTA			

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019

Nama OPD : **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Dinas Kominfo		150,000,000	APBDKOTA			
01.07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Dinas Kominfo		58,500,000	APBDKOTA			
01.08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Dinas Kominfo		37,000,000	APBDKOTA			
01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Dinas Kominfo		50,000,000	APBDKOTA			
01.11.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Dinas Kominfo		120,000,000	APBDKOTA			
01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Dinas Kominfo		20,000,000	APBDKOTA			
01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Dinas Kominfo		25,000,000	APBDKOTA			
01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman		Dinas Kominfo		40,000,000	APBDKOTA			
01.18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah		Dinas Kominfo		150,000,000	APBDKOTA			
01.19.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah		Dinas Kominfo		120,000,000	APBDKOTA			
01.30.	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan		Dinas Kominfo		75,000,000	APBDKOTA			
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
02.09.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Dinas Kominfo		420,000,000	APBDKOTA			
02.22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Dinas Kominfo		85,000,000	APBDKOTA			
02.24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Dinas Kominfo		185,000,000	APBDKOTA			
02.26.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		Dinas Kominfo		50,000,000	APBDKOTA			
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
05.01.	Pendidikan dan Pelatihan Formal		Dinas Kominfo		50,000,000	APBDKOTA			
17.	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika								
17.01.	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi		Dinas Kominfo		350,000,000	APBDKOTA			
18.	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa								
18.05.	Pengumpulan dan Penyebaran Informasi Daerah Melalui Website		Dinas Kominfo		300,000,000	APBDKOTA			
18.07.	Publikasi dan Promosi Daerah		Dinas Kominfo		225,000,000	APBDKOTA			

Nama OPD : **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
19.	Program Peningkatan akses Informasi dan Komunikasi								
19.11.	Pembuatan Master Plan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) Kabupaten Pessel		Kab. Pesisir Selatan		185,000,000	APBDKOTA			
19.12.	Penyediaan Data Statistik Daerah		Dinas Kominfo		120,000,000	APBDKOTA			
19.14.	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat		Dinas Kominfo		100,000,000	APBDKOTA			
19.15.	Penyelenggaraam Persandian dan Keamanan Informasi Daerah		Dinas Kominfo		185,000,000	APBDKOTA			
19.16.	Operasional Penerangan Keliling, Pameran dan Posko Informasi		Dinas Kominfo		65,000,000	APBDKOTA			
19.17.	Operasional LPPL Radio Langkisau FM		Dinas Kominfo		250,780,000	APBDKOTA			
19.18.	Pembangunan Infrastruktur TIK Kabupaten Pesisir Selatan		Kabupaten Pesisir Selatan		2,735,000,000	APBDKOTA			
19.19.	Operasional Pelayanan Informasi Publik		Dinas Kominfo		220,000,000	APBDKOTA			
19.22.	Penyediaan Data Pesisir Selatan Dalam Angka		Dinas Kominfo		78,500,000	APBDKOTA			
19.23.	Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan		Dinas Kominfo		220,000,000	APBDKOTA			
20.	Program Penyelenggaraan E-Government								
20.02.	Pembangunan dan Pengembangan Program Aplikasi Elektronik		Dinas Kominfo		390,000,000	APBDKOTA			
20.03.	Pengembangan SMART CITY		Dinas Kominfo		3,700,000,000	APBDKOTA			
20.04.	Pengawasan dan Pengendalian Jaringan dan Data TIK		Dinas Kominfo		138,350,000	APBDKOTA			
20.05.	Pembangunan Command Centre		Dinas Kominfo		2,200,000,000	APBDKOTA			
20.06.	Pembangunan Jaringan Pemda Mandiri FO		Kabupaten Pesisir Selatan		1,900,000,000	APBDKOTA			

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019

Nama OPD : **DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Painan, salido, sago		225,000,000	APBDKOTA			
01.07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Painan		150,000,000	APBDKOTA			
01.08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Painan,Salido,Sago		320,833,000	APBDKOTA			
01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Painan,		40,000,000	APBDKOTA			
01.11.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Painan		45,000,000	APBDKOTA			
01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Painan		10,000,000	APBDKOTA			
01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Painan		15,000,000	APBDKOTA			
01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman		Painan		45,000,000	APBDKOTA			
01.18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah		Painan		155,000,000	APBDKOTA			
01.19.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah		Painan		95,000,000	APBDKOTA			
01.30.	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan		Painan		75,000,000	APBDKOTA			
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
02.09.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Painan		62,500,000	APBDKOTA			
02.22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Painan		150,000,000	APBDKOTA			
02.24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Painan		185,000,000	APBDKOTA			
02.26.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		Painan		30,000,000	APBDKOTA			
03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
03.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		Painan		37,500,000	APBDKOTA			
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
05.01.	Pendidikan dan Pelatihan Formal		Painan		50,000,000	APBDKOTA			
15.	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan								
15.03.	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa		Kab. Pessel		243,750,000	APBDKOTA			
15.04.	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah		Kab. Pessel		730,000,000	APBDKOTA			

Nama OPD : **DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
15.04.	Pengembangan Kapasitas Pranata Pengukuran, Standarisasi, Pengujian dan Kualitas		Kab. Pessel		150,000,000	APBDKOTA			
15.08.	Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah		Kab. Pessel		200,000,000	APBDKOTA			
15.08.	Pemantauan Harga dan Opsai Pasar		Kab. Pessel		265,000,000	APBDKOTA			
16.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah								
16.03.	Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah		Kab. Pessel		150,000,000	APBDKOTA			
16.03.	Penyusunan Kebijakan Industri Terkait dan Industri Penunjang Industri Kecil dan Menengah		Kab. Pessel		45,000,000	APBDKOTA			
16.06.	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan		Kab. Pessel		200,000,000	APBDKOTA			
16.06.	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan		lunang utara		15,000,000				
16.07.	Fasiliitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Swasta/BUMN/BUMD		Kab. Pessel		50,000,000	APBDKOTA			
16.10.	Pemutakhiran Data IKM		Kab. Pessel		75,000,000	APBDKOTA			
16.11.	Penunjang Operasional Dekranasda dan Pembinaan IKM		Kab. Pessel		1,000,000,000	APBDKOTA			
16.16.	Pembinaan dan Pengawasan IKM		Kab pessel		150,000,000	APBDKOTA			
16.17.	Pendataan dan Validasi Data UMKM		Kab. Pessel		75,000,000	APBDKOTA			
17.	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri								
17.10.	Pembinaan kemampuan teknologi industri kepada IKM		Kab. Pessel		100,000,000	APBDKOTA			
18.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi								
18.04.	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian		Kab. Pssel		35,000,000	APBDKOTA			
18.06.	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan		kab.pessel		250,000,000	APBDKOTA			
18.09.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		Kab. Pessel		40,000,000	APBDKOTA			
18.21.	Bimbingan Teknis Kelembagaan dan Usaha Koperasi		Kab. Pessel		150,000,000	APBDKOTA			
18.22.	Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi		Kab. Pessel		300,000,000	APBDKOTA			
18.25.	Revitalisasi Koperasi/KUD		Kab. Pessel		75,000,000	APBDKOTA			
18.27.	Penunjang Percepatan Pembangunan Pasar Dalam Kabupaten Pesisir Selatan		Kab. Pessel		500,000,000	APBDKOTA			
18.28.	Pelayanan Administrasi Penerimaan/Tagihan dan Pengelolaan Pasar		Kab. Pessel		100,000,000	APBDKOTA			
18.37.	Pengamanan dan Pengelolaan Pasar		Kab. Pessel		375,000,000	APBDKOTA			
18.39.	Penyelenggaraan Painan Expo		Kab. Pessel		300,000,000	APBDKOTA			
18.40.	Pembuatan Database Perdagangan		Kab. Pessel		70,000,000	APBDKOTA			

Nama OPD : **DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
19.	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial								
19.05.	Penumbuhan dan Penataan Sentra sentra Industri Unggulan		Kab. Pessel		40,000,000	APBDKOTA			
19.06.	Pengembangan Sentra Industri Kecil Menengah		Kab. Pessel		100,000,000	APBDKOTA			
19.07.	Pembangunan Sentra IKM (DAK)		Kab pessel		14,578,282,750	APBDKOTA			
19.08.	Pembangunan Sentra IKM Penunjang (DAK)		Kab pessel		100,000,000	APBDKOTA			

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019

Nama OPD : **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		IV Jurai		42,000,000	APBDKOTA			
01.07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		IV Jurai		67,800,000	APBDKOTA			
01.08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		IV Jurai		82,018,500	APBDKOTA			
01.09.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja		IV Jurai		15,200,000	APBDKOTA			
01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor		IV Jurai		32,324,500	APBDKOTA			
01.11.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		IV Jurai		24,870,700	APBDKOTA			
01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		IV Jurai		14,831,000	APBDKOTA			
01.13.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		IV Jurai		37,650,000	APBDKOTA			
01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		IV Jurai		13,900,000	APBDKOTA			
01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman		IV Jurai		32,400,000	APBDKOTA			
01.18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah		IV Jurai		98,500,000	APBDKOTA			
01.19.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah		IV Jurai		54,474,000	APBDKOTA			
01.30.	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan		IV Jurai		34,162,734	APBDKOTA			
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
02.05.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		IV Jurai		60,000,000	APBDKOTA			
02.10.	Pengadaan Meubiler		IV Jurai		35,000,000	APBDKOTA			
02.22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		IV Jurai		97,250,000	APBDKOTA			
02.24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		IV Jurai		55,175,000	APBDKOTA			
03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
03.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		IV Jurai		23,500,000	APBDKOTA			
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
05.01.	Pendidikan dan Pelatihan Formal		IV Jurai		50,000,000	APBDKOTA			
15.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi								
15.04.	Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian		Investor		45,000,000	APBDKOTA			

Nama OPD : **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	pelaksanaan investasi PMDN/ PMA								
15.06.	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha		Kabupaten Pesisir Selatan		35,000,000	APBDKOTA			
15.17.	Pelayanan kerjasama Investasi		Kabupaten Pesisir Selatan		57,147,400	APBDKOTA			
15.20.	Promosi Investasi di Dalam Negeri dan di Luar Negeri		Luar Daerah		213,038,100	APBDKOTA			
15.21.	Pendataan Realisasi Investasi Non Fasilitas Rumah Tangga		Kabupaten Pesisir Selatan		27,962,500	APBDKOTA			
16.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi								
16.05.	Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah		Kabupaten Pesisir Selatan		82,796,200	APBDKOTA			
16.15.	Pelayanan Penanaman Modal		Kabupaten Pesisir Selatan		53,198,000	APBDKOTA			
16.20.	Pengembangan sistem informasi perizinan dan penanaman modal		Kabupaten Pesisir Selatan		85,000,000	APBDKOTA			
16.22.	Koordinasi Bidang Penanaman Modal		Kabupaten Pesisir Selatan		60,959,800	APBDKOTA			
16.24.	Pengawasan dan pengendalian penanaman modal		Kabupaten Pesisir Selatan		28,074,000	APBDKOTA			
18.	Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan								
18.01.	Operasional Penyelenggaraan Perizinan		Kabupaten Pesisir Selatan		135,800,000	APBDKOTA			
18.02.	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perizinan		Kabupaten Pesisir Selatan		61,003,000	APBDKOTA			
18.13.	Penyelesaian permasalahan pengaduan perizinan		Kecamatan		40,500,000	APBDKOTA			
18.14.	Sosialisasi peraturan perizinan dan non perizinan		Kecamatan		135,000,000	APBDKOTA			
18.15.	Survey indeks kepuasan masyarakat		Kabupaten Pesisir Selatan		27,588,500	APBDKOTA			
19.	Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal								
19.06.	Publikasi Perizinan, Penanaman Modal dan Peluang Investasi		Kabupaten Pesisir Selatan		95,000,000	APBDKOTA			

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019

Nama OPD : **DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		kec. IV Jurai		10,000,000	APBDKOTA			
01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		kec. IV Jurai		150,000,000	APBDKOTA			
01.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		kec. IV Jurai		100,000,000	APBDKOTA			
01.07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		kec. IV Jurai		100,000,000	APBDKOTA			
01.08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		kec. IV Jurai		160,000,000	APBDKOTA			
01.09.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja		kec. IV Jurai		50,000,000	APBDKOTA			
01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor		kec. IV Jurai		65,000,000	APBDKOTA			
01.11.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		kec. IV Jurai		80,000,000	APBDKOTA			
01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		kec. IV Jurai		50,000,000	APBDKOTA			
01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		kec. IV Jurai		40,000,000	APBDKOTA			
01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman		kec. IV Jurai		90,000,000	APBDKOTA			
01.18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah		kec. IV Jurai		250,000,000	APBDKOTA			
01.19.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah		kec. IV Jurai		200,000,000	APBDKOTA			
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
02.05.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		Kec.IV jurai		500,000,000	APBDKOTA			
02.22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Kec.IV jurai		160,000,000	APBDKOTA			
02.24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Kec.IV jurai		260,000,000	APBDKOTA			
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
05.01.	Pendidikan dan Pelatihan Formal		kab pessel		50,000,000	APBDKOTA			
15.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata								
15.10.	Pelaksanaan Festival Langkisau		kec. IV Jurai		150,000,000	APBDKOTA			
15.11.	Pelaksanaan Tour De Singkarak		kec. IV Jurai		600,000,000	APBDKOTA			
15.30.	Festival Pesona Mandeh		kec. Koto XI Tarusan		315,000,000	APBDKOTA			
15.32.	Mountain Bike Exploring		kawasan wisata bahari mandeh		50,000,000	APBDKOTA			

Nama OPD : **DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
15.33.	Lomba Drum Band Tingkat SLTA se-Sumatera Barat		kawasan wisata bahari mandeh		75,000,000	APBDKOTA			
15.34.	Parade Tangkuluak		kab.pessel		125,000,000	APBDKOTA			
15.35.	Aktivasi Promosi Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan Oleh Nagari Atau BUMNAG		kab.pessel		250,000,000	APBDKOTA			
15.36.	Penyusunan Profil dan Promosi Pariwisata Pesisir Selatan		kab.pessel		500,000,000	APBDKOTA			
16.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata								
16.08.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kawasan Objek Wisata		kab.pessel		200,000,000	APBDKOTA			
16.10.	Pelaksanaan Pengelolaan Objek Wisata Pantai Carocok Painan		kec. IV Jurai		750,000,000	APBDKOTA			
16.12.	Pelaksanaan Pengelolaan Obyek Wisata Mandeh		kec. Koto XI Tarusan		750,000,000	APBDKOTA			
16.18.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Obyek Wisata (DAK)		kec.bayang		3,000,000,000	APBDKOTA			
16.24.	Penyeleksian Jambore Pemuda Indonesia (JPI)		kab.pessel		400,000,000	APBDKOTA			
16.29.	Peringatan Sumpah Pemuda dan Haornas		kab.pessel		150,000,000	APBDKOTA			
16.32.	Pembentukan Paskibraka		kab.pessel		800,000,000	APBDKOTA			
16.33.	Penilaian Pemuda Pelapor dan Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan		kab.pessel		250,000,000	APBDKOTA			
16.38.	Pembuatan Perencanaan (DED dan RAB Obyek Wisata)		kab pessel		200,000,000	APBDKOTA			
16.39.	Pengawasan dan Monitoring Obyek Wisata Se Kabupaten Pesisir Selatan		kab.pessel		75,000,000	APBDKOTA			
16.45.	Pembangunan Mushola Pulau Setan		pulau setan		300,000,000	APBDKOTA			
16.46.	Pembangunan Sistem Pengaman, Keselamatan dan Informasi Pariwisata		kab pessel		350,000,000	APBDKOTA			
18	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif								
18.03.	Pelatihan Ekonomi Kreatif		kab pessel		180,000,000	APBDKOTA			
18.23.	Aktifasi Ekonomi Kreatif		kab.pessel		300,000,000	APBDKOTA			
18.24.	Partisipasi Ekonomi Kreatif		3 kali dalam provinsi dan 3 kali luar provinsi		350,000,000	APBDKOTA			
18.29.	Pemilihan Uda dan Uni Kabupaten Pesisir Selatan		kec. IV Jurai		300,000,000	APBDKOTA			
19.	Program Pengembangan SDM dan Kemitraan Kepariwisataan								
19.08.	Fan Trip		kab.,pessel		240,000,000	APBDKOTA			
19.12.	Pemberdayaan Bagari (Bumnag) Dalam Mengelola Objek Wisata		kab.,pessel		120,000,000	APBDKOTA			
19.13.	Focus Group Diskusi (FGD) Pelaku Kepariwisataan		painan		125,000,000	APBDKOTA			

Nama OPD : **DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
20.	program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga								
20.37.	Olah Raga Massal (Senam)		kab. pessel		120,000,000	APBDKOTA			
21.	Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga								
21.07.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olah Raga		kab. pessel		150,000,000	APBDKOTA			
21.10.	Pembangunan Stadion Olahraga		kec.lunang		200,000,000	APBDKOTA			
21.12.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga		kab. pessel		370,000,000	APBDKOTA			
21.44.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pemuda dan Olahraga		kab. pessel		50,000,000	APBDKOTA			
21.47.	Pembangunan Gedung Olahraga Beserta Sarana dan Prasarana (DAK) Bidang Olahraga		kab.pessel		16,000,000,000	APBDKOTA			
23.	Program Pembinaan Olah Raga Berprestasi								
23.03.	Open Catur Pantai Tk. Nasional		kab,.pessel		75,000,000	APBDKOTA			
23.04.	Maraton Painan-Mandeh (42km)		painan-sei pinang		100,000,000	APBDKOTA			
23.05.	Pelatihan Pelatih Sepak Bola		painan		225,000,000	APBDKOTA			
23.06.	Pelatihan Pengurus Cabang Olahraga		painan		90,000,000	APBDKOTA			
23.07.	Pekan Paralympic Kabupaten (Pekan Olahraga Penyandang Cacat)		kab.pessel		100,000,000	APBDKOTA			
23.08.	open Tournamen Voli Pantai Tingkat Nasional		kec,IV jurai		450,000,000	APBDKOTA			
23.09.	Open Paralayang Tingkat Nasional		kec. IV Jurai		425,000,000	APBDKOTA			

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019

Nama OPD : **DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang tersedia	Painan	100%	65,000,000	APBDKOTA		100%	
01.06.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya BBM, Servis, suku cadang, jasa KIR dan pembayaran STNK bagi kendaraan dinas operasional	Painan	100%	211,580,000	APBDKOTA		100%	
01.07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah administrasi keuangan yang tersedia	Painan	100%	80,000,000	APBDKOTA		100%	
01.08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang tersedia	Painan	100%	64,000,000	APBDKOTA		100%	
01.09.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah perbaikan peralatan kerja	Painan	100%	33,461,000	APBDKOTA		100%	
01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	Painan	100%	24,000,000	APBDKOTA		100%	
01.11.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan pengadaan tersedia	Painan	100%	17,680,000	APBDKOTA		100%	
01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan tersedia	Painan	100%	17,500,000	APBDKOTA		100%	
01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Painan		7,500,000	APBDKOTA			
01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	jumlah makan minum yang tersedia	Painan	100%	25,000,000	APBDKOTA		100%	
01.18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah yg tersedia	Painan	100%	180,000,000	APBDKOTA		100%	
01.19.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah yg tersedia	Painan	100%	110,000,000	APBDKOTA		100%	
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
02.03.	Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya pagar kantor untuk menunjang keamanan kantor	Painan	100%	198,000,000	APBDKOTA		100%	
02.05.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional roda 2	Painan	100%	45,000,000	APBDKOTA		100%	
02.09.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Painan		52,000,000	APBDKOTA			
02.10.	Pengadaan Meubiler	Jumlah Mobiler	Painan	100%	45,000,000	APBDKOTA		100%	
02.22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan serta penataan kantor untuk pemeliharaan gedung akntor	Painan	100%	50,000,000	APBDKOTA		100%	
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
05.01.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tersedianyan tenaga terampil	Painan	100%	40,000,000	APBDKOTA		100%	
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
06.01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jumlah laporan Kinerja	Painan	100%	15,000,000	APBDKOTA		100%	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
06.11.	Pengelolaan Arsip OPD	Terlaksananya Pengelolaan Arsip Dinas	Painan	100%	12,500,000	APBDKOTA		100%	
15.	Program Pengembangan data/informasi								
15.11.	Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Meningkatnya pemahaman stake holders terhadap program penyebarluasan informasi pembangunan daerah dlm promosi daerah	Painan	100%	50,000,000	APBDKOTA		100%	
15.15.	Pembuatan Regulasi Daerah tentang Kearsiapan		Painan		30,000,000	APBDKOTA			
16.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan								
16.02.	Pengembangan minat dan budaya baca	Terlaksananya Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Painan	5 Event	110,000,000	APBDKOTA		5 Event	
16.07.	Pembinaan dan Movev Unit Arsip	Terwujudnya Unit Kearsipan yang berkualitas	Painan	10 unit	70,000,000	APBDKOTA		10 unit	
16.08.	Bimtek Kearsipan Bagi Petugas Unit Arsip (Setiap OPD, BUMD dan Nagari)	Terlaksananya Bimtek Kearsipan Bagi Petugas Arsip	Painan	45 Orang	200,000,000	APBDKOTA		45 Orang	
16.09.	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah		Painan		50,000,000	APBDKOTA			
16.13.	Penataan dan Pengelolaan Arsip Inaktif (Depo Arsip Daerah)	Terlaksananya penataan dan pengelolaan arsip LKD dan OPD	Painan	500 Berkas	50,000,000	APBDKOTA		500 Berkas	
16.13.	Penyusunan Regulasi Daerah Tentang Perpustakaan	Terlaksananya pembahasan Perda dan Perbup	Painan	100%	50,000,000	APBDKOTA		100%	
16.15.	Pelayanan Perpustakaan Umum Daerah dan Kantin Baca	Terlaksananya penilaian kelembagaan Perpustakaan Umum Daerah dan Kantin Baca	Painan	1 Tahun	60,000,000	APBDKOTA		1 Tahun	
16.15.	Penilaian Unit Arsip	Terlaksananya Penilaian terhadap Unit Arsip	Painan	6 Unit Arsip Terbaik	100,000,000	APBDKOTA		6 Unit Arsip Terbaik	
16.16.	Pelayanan dan Operasional Perpustakaan Keliling	Terlaksananya Pelayanan Perpustakaan Umum Daerah	Pesisir Selatan	12 Bulan	265,000,000	APBDKOTA		12 Bulan	
16.22.	Pelayanan Rumah Pintar Perintis Painan	Terlaksananya Pelayanan Rumah Pintar Perintis Painan	Painan	1 Unit	172,000,000	APBDKOTA		1 Unit	
16.24.	Penelusuran dan Penulisan Serta Perekam Cerita Rakyat	Terlaksananya penelusuran dan penulisan cerita rakyat	Painan	100%	30,000,000	APBDKOTA		100%	
16.31.	Bimtek Pengelola Perpustakaan	Terlaksananya Bimtek Pengelola Perpustakaan	Pesisir Selatan	70 Orang	75,000,000	APBDKOTA		70 Orang	
16.32.	Pemeliharaan dan Perawatan Bahan-bahan Perpustakaan Umum Daerah	Terlaksananya pemeliharaan bahan - bahan perpustakaan umum daerah	Painan	100%	7,500,000	APBDKOTA		100%	
16.33.	Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi Pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat	Terlaksananya Supervisi dan Pembinaan perpustakaan nagari, perpustakaan sekolah dan Perpustakaan masyarakat	Painan	15 Lembaga	50,000,000	APBDKOTA		15 Lembaga	
17.	Program Pemeliharaan rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan								
17.02.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Arsip Daerah		Painan		30,000,000	APBDKOTA			
18.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi								
18.10.	Akuisisi dan Alih Media Arsip Strategis Pemerintah (Pusat dan Daerah)	Tersedianya arsip strategis pemerintah (pusat dan daerah)	Painan	12 bh	60,000,000	APBDKOTA		12 bh	

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019

Nama OPD : **DINAS PERIKANAN**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Painan	12 bulan	50,000,000	APBDKOTA		12 bulan	
01.07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersusunnya Laporan Keuangan	Painan	12 Bulan	120,000,000	APBDKOTA		12 Bulan	
01.08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Kebersihan Kantor	Painan	12 Bulan	75,000,000	APBDKOTA		12 Bulan	
01.09.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Painan	12 Bulan	24,000,000	APBDKOTA		12 Bulan	
01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Painan	12 Bulan	38,000,000	APBDKOTA		12 Bulan	
01.11.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Painan	12 Bulan	30,000,000	APBDKOTA		12 Bulan	
01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Painan	12 Bulan	8,000,000	APBDKOTA		12 Bulan	
01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundangan	Painan	12 Bulan	7,500,000	APBDKOTA		12 Bulan	
01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minum	Painan	12 Bulan	60,000,000	APBDKOTA		12 Bulan	
01.18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar daerah yang dihadiri	Painan	12 Bulan	210,000,000	APBDKOTA		12 Bulan	
01.19.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang dihadiri	Painan	12 Bulan	60,000,000	APBDKOTA		12 Bulan	
01.30.	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	Terlaksananya CALK,SAKIP,LKPJ,RENJA,RENSTRA,LPPD	Painan	12 Bulan	43,000,000	APBDKOTA		12 Bulan	
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
02.09.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan gedung kantor	Painan	1 paket	25,000,000	APBDKOTA		1 paket	
02.10.	Pengadaan Meubiler	Terlaksananya Pengadaan Sarana Kantor	Painan	1 paket	50,000,000	APBDKOTA		1 paket	
02.22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Rehab Bangunan Kantor Dinas Perikanan	Painan	1 paket	100,000,000	APBDKOTA		1 paket	
02.24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Operasional Dinas	Painan	12 Bulan	250,000,000	APBDKOTA		12 Bulan	
03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
03.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Yang Diadakan	Painan	2 Paket	40,000,000	APBDKOTA		2 Paket	
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
05.01.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN Yang Terlatih	Painan	5 Orang	50,000,000	APBDKOTA		5 Orang	
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
06.05.	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Kabupaten Pesisir Selatan	12 Bulan	75,000,000	APBDKOTA		12 Bulan	

Nama OPD : **DINAS PERIKANAN**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
06.08.	Peningkatan Data dan Informasi	Tersusunnya Data dan Informasi Yang Valid dan Akurat	Painan	5 Dokumen	77,000,000	APBDKOTA		5 Dokumen	
21.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap								
21.06.	Pengadaan Alat Bantu Penangkapan Ikan		Kec. IV Jurai		100,000,000	APBDKOTA			
21.06.	Pengadaan Alat Bantu Penangkapan Ikan		Kec. Koto XI Tarusan		200,000,000	APBDKOTA			
21.06.	Pengadaan Alat Bantu Penangkapan Ikan		Kec. Lengayang		100,000,000	APBDKOTA			
21.06.	Pengadaan Alat Bantu Penangkapan Ikan		Kec. Linggo Sari Baganti		50,000,000	APBDKOTA			
21.06.	Pengadaan Alat Bantu Penangkapan Ikan		Kec. Ranah Pesisir		150,000,000	APBDKOTA			
21.10.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	9 Kecamatan	1 paket	2,750,000,000	APBDKOTA		1 paket	
21.10.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	Kec. Koto XI Tarusan	1 paket	0	APBDKOTA		1 paket	
21.10.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	Kec. Lengayang	1 paket	240,000,000	APBDKOTA		1 paket	
21.11.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemberdayaan Skala Kecil untuk Nelayan	Tersedianya Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Skala Kecil Nelayan	9 Kecamatan	2 Paket	7,955,104,000	APBN		2 Paket	
21.18.	Sosialisasi dan Pendampingan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perikanan	Tersalurnya KUR perikanan ke nelayan	15 Kecamatan	85 Orang	60,000,000	APBDKOTA		85 Orang	
21.22.	Penunjang Kegiatan Pusat dan Provinsi Bidang Perberdayaan Nelayan Kecil		Tersebar		88,000,000	APBDKOTA			
21.25.	Penunjang Kegiatan DAK Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil	Terlaksananya Kegiatan DAK Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil	10 Kecamatan	12 Bulan	45,000,000	APBDKOTA		12 Bulan	
21.27.	Pengelolaan Balai Sekaya Maritim	Terlaksananya Operasional Balai Sekaya Maritim	Kecamatan Koto XI Tarusan	12 Bulan	245,000,000	APBDKOTA		12 Bulan	
21.42.	Pro Gerakan Anti Kemiskinan Nelayan (PROGAKIN)	Terlaksananya kegiatan Pro Anti Kemiskinan Nelayan (PROGAKIN)	kampung luhung, lansano dan Sungai Bungin	3 Kampung	75,000,000	APBDKOTA		3 Kampung	
21.46.	Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Tersebar	2 TPI	50,000,000	APBDKOTA		2 TPI	
21.47.	Penguatan Kelembagaan KUB Perikanan Tangkap	Terbentuknya Kelembagaan KUB yang berbadan hukum	9 Kecamatan	30 KUB	152,500,000	APBDKOTA		30 KUB	
21.56.	Pelatihan Bidang Perikanan	Meningkatnya pengetahuan nelayan menggunakan alat tangkap	Kabupaten	2 paket	180,000,000	APBDKOTA		2 paket	
25.	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya								
25.02.	Penunjang Kegiatan DAK Bidang Perikanan Budidaya	Terlaksananya Kegiatan DAK Bidang Perikanan Budidaya	Kabupaten	1 paket	35,000,000	APBDKOTA		1 paket	
25.04.	Penunjang Kegiatan Propinsi Bidang Perikanan Budidaya	Jumlah Pokdakan Penerima Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya	Tersebar	14 Pokdakan	66,000,000	APBDKOTA		14 Pokdakan	
25.08.	Pembinaan Unit Pembenihan Rakyat (UPR)	Jumlah Unit Pembenihan Rakyat (UPR) yang dibina	6 Kecamatan	15 UPR	39,375,000	APBDKOTA		15 UPR	
25.12.	Pembinaan Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan)	Terbinanya Kelompok Pembudidayaan Ikan (Pokdakan)	15 Kecamatan	30 Pokdakan	50,000,000	APBDKOTA		30 Pokdakan	
25.19.	Pengelolaan Pabrik Pengolahan Pakan Ikan	Beroperasinya Pabrik Pengolahan Pakan Ikan	Painan	12 Bulan	70,000,000	APBDKOTA		12 Bulan	

Nama OPD : **DINAS PERIKANAN**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
25.20.	Pengelolaan Balai Benih Ikan (BBI) Pincuran Boga	Beroperasinya BBI Pincuran Boga	Painan	12 Bulan	200,000,000	APBDKOTA		12 Bulan	
25.24.	Demfarm Budidaya Lele Sistem Bioflok		Kec. IV Jurai		100,000,000	APBDKOTA			
25.40.	Peningkatan SDM Aparatur BBI dan Pelaku Usaha Perikanan	Meningkatnya SDM Aparatur BBI dan Pelaku Usaha Perikanan	Painan	3 Oang	52,500,000	APBDKOTA		3 Oang	
25.46.	Penanganan Hama dan Penyakit Ikan	Tertanganinya dan terlatihnya pokdakan akan hama penyakit ikan	15 Kecamatan	10 Kasus	84,000,000	APBDKOTA		10 Kasus	
25.52.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya Ikan (DAK)	Tersedianya Penyedian Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya Ikan (DAK)	Tersebar	16 Paket	658,269,600	APBN		16 Paket	
25.53.	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	Jumlah Pembudidaya yang dilatih CPIB dan CBIB	Painan	40 Orang	70,000,000	APBDKOTA		40 Orang	
26.	Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan								
26.08.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolah dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Poklahsar penerima paket pengolahan dan pemasaran yang memadai	5 Kec	5 Poklahsar	375,000,000	APBDKOTA		5 Poklahsar	
26.23.	Pembinaan Kelompok Usaha Pengolahan dan Pemasaran (POKHLASAR) Hasil Perikanan	Terbinanya Poklahsar Bidang P2HP	Painan	54 Poklahsar	50,000,000	APBDKOTA		54 Poklahsar	
26.28.	Pendampingan Kegiatan Pusat dan Provinsi Bidang P2HP		Tersebar		75,000,000	APBDKOTA			
26.31.	Promosi dan Publikasi Produk Hasil Kelautan dan Perikanan	Dikenalnya Produk Kelautan dan Perikana Kab.Pessel	Painan , Padang dan Jakarta	4 Kali	130,000,000	APBDKOTA		4 Kali	
26.33.	Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan	Jumlah masyarakat yang mengikuti bina mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan	Painan	80 Orang	280,000,000	APBDKOTA		80 Orang	
26.34.	Sertifikasi Produk Kelautan dan Perikanan	Jumlah Produk ikan yang telah tersertifikasi	15 Kecamatan	5 produk	100,000,000	APBDKOTA		5 produk	
26.36.	Pengawasan Mutu Hasil Perikanan	Terlaksananya Pengawasan Mutu Hasil Perikanan	15 Kec	4 kali	177,500,000	APBDKOTA		4 kali	
26.37.	Gerakan Memasyarakat Makan Ikan (GEMARIKAN)		Painan, Padang dan Jakarta		150,000,000	APBDKOTA			

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019

Nama OPD : **DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik untuk operasional kantor	Kab. Pessel	12 bulan	173,310,000	APBDKOTA		12 bulan	
01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik untuk operasional kantor	Kec. BAB Tapan, Lengayang dan Pc. Soal	12 bulan	35,000,000	APBDKOTA		12 bulan	
01.07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor 7 Orang Pengelola Keuangan, Honor 2 Orang Tenaga Administrasi Perkantoran, Honor 1 Orang Petugas Absensi Elektronik, Honor 2 Orang Tenaga Keamanan dan Honor 2 Orang	IV Jurai	12 Bulan	207,856,000	APBDKOTA		12 Bulan	
01.08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Cleaning Service	IV Jurai	12 Bulan	143,000,000	APBDKOTA		12 Bulan	
01.09.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpeliharanya peralatan kerja Dinas	IV Jurai	12 bulan	35,224,200	APBDKOTA		12 bulan	
01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pembelian ATK (1 Kantor Kabupaten dan 15)	Kab. Pessel	12 bulan	120,999,780	APBDKOTA		12 bulan	
01.11.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya cetakan dan penggandaan untuk kabupaten dan kecamatan (1 Kantor kabupaten dan 15 BPK)	IV Jurai	12 bulan	51,801,750	APBDKOTA		12 bulan	
01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat- alat listrik dan elektronik untuk kabupaten da BBH bayang BBU padang laban,gudang alsintan padang	Kab. Pessel	12 bulan	10,417,825	APBDKOTA		12 bulan	
01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Lancarnya koordinasi dan konsultasi dengan lembaga/dinas di dalam daerah	IV Jurai	1 paket	13,640,000	APBDKOTA		1 paket	
01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu dinas	IV Jurai	12 bulan	51,909,000	APBDKOTA		12 bulan	
01.18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah		Prov dan Pusat		240,130,000	APBDPROV			
01.19.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Lancarnya koordinasi dan konsultasi dengan lembaga/dinas di dalam daerah	Kab. Pessel	12 bulan	144,595,000	APBDKOTA		12 bulan	
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
02.05.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua Bagi Penyuluh Pertanian Lapangan	Kab. Pesisir Selatan	15 unit	90,000,000	APBDKOTA		15 unit	
02.05.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua Bagi Penyuluh Pertanian Lapangan	Kab. Pessel	15 unit	300,000,000	APBDKOTA		15 unit	
02.09.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya personel Komputer/Pc Tersedianya Printer	BPP	4 Unit	52,000,000	APBDKOTA		4 Unit	
02.10.	Pengadaan Meubiler	Terlaksananya pengadaan mobiler	BPP	4 unit	125,000,000	APBDKOTA		4 unit	
02.10.	Pengadaan Meubiler	Terlaksananya pengadaan mobiler	Dinas	4 unit	20,000,000	APBDKOTA		4 unit	
02.22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor Dinas dan 15	Kab. Pessel	12 Bulan	154,605,000	APBDKOTA		12 Bulan	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		BPK (Balai Penyuluh Kecamatan)							
02.24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya 3 Unit Kendaraan Dinas Roda empat dan 25 Unit kendaraan Dinas Roda Dua	IV Jurai	12 Bulan	178,643,000	APBDKOTA		12 Bulan	
03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
03.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas dan kelengkapan Aparatur	Kab. Pessel	220 Paket	75,000,000	APBDKOTA		220 Paket	
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
05.01.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Bertambahnya pengetahuan dan wawasan ASN Dipertahorhun	IV Jurai	10 Aparatur	50,000,000	APBDKOTA		10 Aparatur	
18.	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian /Perkebunan								
18.02.	Pengadaan sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	Terlaksananya pengadaan alsintan tepat guna	Dusun Baru Tapan	48 unit	3,000,000,000			48 unit	
18.02.	Pengadaan sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	Terlaksananya pengadaan alsintan tepat guna	Inderapura Utara	48 unit	750,000,000			48 unit	
18.02.	Pengadaan sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	Terlaksananya pengadaan alsintan tepat guna	Kec. BAB Tapan	48 unit	300,000,000	APBDKOTA		48 unit	
18.02.	Pengadaan sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	Terlaksananya pengadaan alsintan tepat guna	Kec. BAB Tapan, Kec. Lunang	48 unit	100,000,000	APBDKOTA		48 unit	
18.02.	Pengadaan sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	Terlaksananya pengadaan alsintan tepat guna	Kec. Batang Kapas	48 unit	100,000,000	APBDKOTA		48 unit	
18.02.	Pengadaan sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	Terlaksananya pengadaan alsintan tepat guna	Kec. Batang Kapas dan IV Jurai	48 unit	785,000,000	APBDKOTA		48 unit	
18.02.	Pengadaan sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	Terlaksananya pengadaan alsintan tepat guna	Kec. Batang Kapas dan Ranah Pesisir	48 unit	785,000,000	APBDKOTA		48 unit	
18.02.	Pengadaan sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	Terlaksananya pengadaan alsintan tepat guna	Kec. Bayang Utara	48 unit	785,000,000	APBDKOTA		48 unit	
18.02.	Pengadaan sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	Terlaksananya pengadaan alsintan tepat guna	Kec. Lengayang	48 unit	885,000,000	APBDKOTA		48 unit	
18.02.	Pengadaan sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	Terlaksananya pengadaan alsintan tepat guna	Kec. Sutura	48 unit	1,770,000,000	APBDKOTA		48 unit	
18.02.	Pengadaan sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	Terlaksananya pengadaan alsintan tepat guna	Koto Rawang	48 unit	27,500,000			48 unit	
18.02.	Pengadaan sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	Terlaksananya pengadaan alsintan tepat guna	Limau Gadang	48 unit	100,000,000			48 unit	
18.02.	Pengadaan sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	Terlaksananya pengadaan alsintan tepat guna	nagari	48 unit	95,000,000			48 unit	
18.02.	Pengadaan sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	Terlaksananya pengadaan alsintan tepat guna	Nagari Air Hitam	48 unit	37,500,000			48 unit	
18.02.	Pengadaan sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	Terlaksananya pengadaan alsintan tepat guna	Nagari Bunga Pasang Salido	48 unit	450,000,000			48 unit	
18.02.	Pengadaan sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	Terlaksananya pengadaan alsintan tepat guna	Nagari Kampung Tengah Tapan	48 unit	100,000,000			48 unit	
18.02.	Pengadaan sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	Terlaksananya pengadaan alsintan tepat guna	Nagari Kubang Koto Berapak	48 unit	56,500,000			48 unit	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
18.02.	Pengadaan sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	Terlaksananya pengadaan alsintan tepat guna	Nagari Lunang	48 unit	600,000,000			48 unit	
18.02.	Pengadaan sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	Terlaksananya pengadaan alsintan tepat guna	Nagari sambungo	48 unit	150,000,000			48 unit	
18.02.	Pengadaan sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	Terlaksananya pengadaan alsintan tepat guna	Nagari Sindang Lunang	48 unit	375,000,000			48 unit	
18.02.	Pengadaan sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	Terlaksananya pengadaan alsintan tepat guna	Nagari Talang Balarik Tapan	48 unit	775,000,000			48 unit	
18.02.	Pengadaan sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	Terlaksananya pengadaan alsintan tepat guna	Nagari Taluk Tigo Sakato	48 unit	120,000,000			48 unit	
18.02.	Pengadaan sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	Terlaksananya pengadaan alsintan tepat guna	Puluik-Puluik, Teratak Teleng dan Teratak BAru	48 unit	165,000,000			48 unit	
18.02.	Pengadaan sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	Terlaksananya pengadaan alsintan tepat guna	Salido sari bulan	48 unit	99,000,000			48 unit	
18.02.	Pengadaan sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	Terlaksananya pengadaan alsintan tepat guna	Salido Sari Bulan	48 unit	40,000,000			48 unit	
18.02.	Pengadaan sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	Terlaksananya pengadaan alsintan tepat guna	Taluk	48 unit	275,000,000			48 unit	
18.10.	Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna	Terlatihnya operator alsintan (penggunaan alat tanam)	Kab. Pessel	60 orang	72,598,000	APBDKOTA		60 orang	
18.15.	Pengembangan Teknologi Budidaya Padi SRI	Terlaksananya percontohan budidaya padi SRI	Kec. Bayang, Kec. Lengayang, Sutura	25 Ha	250,000,000	APBDKOTA		25 Ha	
18.15.	Pengembangan Teknologi Budidaya Padi SRI	Terlaksananya percontohan budidaya padi SRI	Kec. Bayang, Kec. Lengayang, Sutura	25 Ha	250,000,000	APBDKOTA		25 Ha	
18.17.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna		Kab. Pessel		144,000,000	APBDKOTA			
18.17.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna		Kec. Ranah Pesisir		65,173,500	APBDKOTA			
18.25.	Pengembangan Teknologi Budidaya Padi Organik		Kec. Bayang Utara		150,000,000	APBDKOTA			
18.25.	Pengembangan Teknologi Budidaya Padi Organik		Kec. Bayang, Kec. IV Nagari Bayang Utara		150,000,000	APBDKOTA			
19.	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan								
19.03.	Pengembangan Bibit Unggul Perkebunan	1. Jumlah bibit gambir yang disalurkan, 2. Jumlah bibit pala yang disalurkan, 3. Jumlah bibit cengkeh yang disalurkan, 4. Jumlah bibit kakao yang disalurkan, 5. Replantting Kelpa sawit yang dilaksanakan, 6.Jumlah bibit kopi yang disalurkan	Kec. BAB Tapan, Lunang dan Silaut	1. 62.500 batang, 2. 5.000 batang, 3. 9.000 batang, 4. 30.000 batang, 5. 114.100 batang, 6. 83.500 batsng	2,600,000,000	APBDKOTA		1. 62.500 batang, 2. 5.000 batang, 3. 9.000 batang, 4. 30.000 batang, 5. 114.100 batang, 6. 83.500 batsng	
19.03.	Pengembangan Bibit Unggul Perkebunan	1. Jumlah bibit gambir yang disalurkan, 2. Jumlah bibit pala yang disalurkan, 3. Jumlah bibit cengkeh yang disalurkan, 4. Jumlah bibit kakao yang disalurkan, 5. Replantting Kelpa sawit yang dilaksanakan, 6.Jumlah bibit kopi	Kec. Batang Kapas	1. 62.500 batang, 2. 5.000 batang, 3. 9.000 batang, 4. 30.000 batang, 5. 114.100 batang, 6.	200,000,000	APBDKOTA		1. 62.500 batang, 2. 5.000 batang, 3. 9.000 batang, 4. 30.000 batang, 5. 114.100 batang, 6. 83.500	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		yang disalurkan		83.500 batsng				batsng	
19.03.	Pengembangan Bibit Unggul Perkebunan	1. Jumlah bibit gambir yang disalurkan, 2. Jumlah bibit pala yang disalurkan, 3. Jumlah bibit cengkeh yang disalurkan, 4. Jumlah bibit kakao yang disalurkan, 5. Replantting Kelpa sawit yang dilaksanakan, 6.Jumlah bibit kopi yang disalurkan	Kec. IV Jurai, Bayang, Lengayang, dan BAB Tapan	1. 62.500 batang, 2. 5.000 batang, 3. 9.000 batang, 4. 30.000 batang, 5. 114.100 batang, 6. 83.500 batsng	100,000,000	APBDKOTA		1. 62.500 batang, 2. 5.000 batang, 3. 9.000 batang, 4. 30.000 batang, 5. 114.100 batang, 6. 83.500 batsng	
19.03.	Pengembangan Bibit Unggul Perkebunan	1. Jumlah bibit gambir yang disalurkan, 2. Jumlah bibit pala yang disalurkan, 3. Jumlah bibit cengkeh yang disalurkan, 4. Jumlah bibit kakao yang disalurkan, 5. Replantting Kelpa sawit yang dilaksanakan, 6.Jumlah bibit kopi yang disalurkan	Kec. IV Jurai, Bayang, LSB, BAB Tapan, Batang Kapas	1. 62.500 batang, 2. 5.000 batang, 3. 9.000 batang, 4. 30.000 batang, 5. 114.100 batang, 6. 83.500 batsng	100,000,000	APBDKOTA		1. 62.500 batang, 2. 5.000 batang, 3. 9.000 batang, 4. 30.000 batang, 5. 114.100 batang, 6. 83.500 batsng	
19.03.	Pengembangan Bibit Unggul Perkebunan	1. Jumlah bibit gambir yang disalurkan, 2. Jumlah bibit pala yang disalurkan, 3. Jumlah bibit cengkeh yang disalurkan, 4. Jumlah bibit kakao yang disalurkan, 5. Replantting Kelpa sawit yang dilaksanakan, 6.Jumlah bibit kopi yang disalurkan	Kec. IV Jurai, Sutura dan Bayang	1. 62.500 batang, 2. 5.000 batang, 3. 9.000 batang, 4. 30.000 batang, 5. 114.100 batang, 6. 83.500 batsng	49,500,000	APBDKOTA		1. 62.500 batang, 2. 5.000 batang, 3. 9.000 batang, 4. 30.000 batang, 5. 114.100 batang, 6. 83.500 batsng	
19.03.	Pengembangan Bibit Unggul Perkebunan	1. Jumlah bibit gambir yang disalurkan, 2. Jumlah bibit pala yang disalurkan, 3. Jumlah bibit cengkeh yang disalurkan, 4. Jumlah bibit kakao yang disalurkan, 5. Replantting Kelpa sawit yang dilaksanakan, 6.Jumlah bibit kopi yang disalurkan	Kec. Ranah Pesisir	1. 62.500 batang, 2. 5.000 batang, 3. 9.000 batang, 4. 30.000 batang, 5. 114.100 batang, 6. 83.500 batsng	25,000,000	APBDKOTA		1. 62.500 batang, 2. 5.000 batang, 3. 9.000 batang, 4. 30.000 batang, 5. 114.100 batang, 6. 83.500 batsng	
19.03.	Pengembangan Bibit Unggul Perkebunan	1. Jumlah bibit gambir yang disalurkan, 2. Jumlah bibit pala yang disalurkan, 3. Jumlah bibit cengkeh yang disalurkan, 4. Jumlah bibit kakao yang disalurkan, 5. Replantting Kelpa sawit yang dilaksanakan, 6.Jumlah bibit kopi yang disalurkan	Kec. Silaut	1. 62.500 batang, 2. 5.000 batang, 3. 9.000 batang, 4. 30.000 batang, 5. 114.100 batang, 6. 83.500 batsng	200,000,000	APBDKOTA		1. 62.500 batang, 2. 5.000 batang, 3. 9.000 batang, 4. 30.000 batang, 5. 114.100 batang, 6. 83.500 batsng	
19.03.	Pengembangan Bibit Unggul Perkebunan	1. Jumlah bibit gambir yang disalurkan, 2. Jumlah bibit pala yang disalurkan, 3. Jumlah bibit cengkeh yang disalurkan, 4. Jumlah bibit kakao yang disalurkan, 5. Replantting Kelpa sawit yang dilaksanakan, 6.Jumlah bibit kopi yang disalurkan	Kec. Sutura dan Lengayang	1. 62.500 batang, 2. 5.000 batang, 3. 9.000 batang, 4. 30.000 batang, 5. 114.100 batang, 6. 83.500 batsng	2,600,000,000	APBDKOTA		1. 62.500 batang, 2. 5.000 batang, 3. 9.000 batang, 4. 30.000 batang, 5. 114.100 batang, 6. 83.500 batsng	
19.03.	Pengembangan Bibit Unggul Perkebunan	1. Jumlah bibit gambir yang disalurkan, 2. Jumlah bibit pala yang disalurkan, 3. Jumlah bibit cengkeh yang disalurkan, 4. Jumlah bibit kakao yang disalurkan, 5. Replantting Kelpa sawit yang dilaksanakan, 6.Jumlah bibit kopi yang disalurkan	Kec. tarusan, IV jurai, Batang Kapas, Sutura dan Rahul	1. 62.500 batang, 2. 5.000 batang, 3. 9.000 batang, 4. 30.000 batang, 5. 114.100 batang, 6. 83.500 batsng	449,500,000	APBDKOTA		1. 62.500 batang, 2. 5.000 batang, 3. 9.000 batang, 4. 30.000 batang, 5. 114.100 batang, 6. 83.500 batsng	
19.03.	Pengembangan Bibit Unggul Perkebunan	1. Jumlah bibit gambir yang disalurkan, 2. Jumlah bibit pala yang disalurkan, 3. Jumlah bibit cengkeh yang disalurkan, 4. Jumlah bibit kakao yang disalurkan, 5. Replantting Kelpa sawit yang dilaksanakan, 6.Jumlah bibit kopi yang disalurkan	Nag. Ngatau Gadang Kec. Bayang Utara dan Nag. Kubang Kec. Bayang dan IV Jurai	1. 62.500 batang, 2. 5.000 batang, 3. 9.000 batang, 4. 30.000 batang, 5. 114.100 batang, 6. 83.500 batsng	325,000,000	APBDKOTA		1. 62.500 batang, 2. 5.000 batang, 3. 9.000 batang, 4. 30.000 batang, 5. 114.100 batang, 6. 83.500 batsng	
19.03.	Pengembangan Bibit Unggul Perkebunan	1. Jumlah bibit gambir yang disalurkan, 2. Jumlah bibit pala yang disalurkan, 3. Jumlah bibit cengkeh yang disalurkan, 4. Jumlah bibit kakao yang disalurkan, 5. Replantting Kelpa	Silaut	1. 62.500 batang, 2. 5.000 batang, 3. 9.000 batang, 4. 30.000 batang, 5.	104,000,000	APBDKOTA		1. 62.500 batang, 2. 5.000 batang, 3. 9.000 batang, 4. 30.000 batang, 5. 114.100	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		sawit yang dilaksanakan, 6.Jumlah bibit kopi yang disalurkan		114.100 batang, 6. 83.500 batsng				batang, 6. 83.500 batsng	
19.07.	Pengembangan Bibit Unggul Pertanian	1. Tersalurnya bibit unggul padi, 2. Demlot bibi unggul jagung di lahan tidur dan pekarangan, 3. Terlaksananya perbanyakan benih pokok varietas bawaan untuk penangkar, 4. Perbanyakan benih dasar varietas sarai sarumpun	Kab. Pessel	1. 17 ton, 2. 10 Ha, 3. 200 hektar, 4. 0,1 hektar	270,500,000	APBDKOTA		1. 17 ton, 2. 10 Ha, 3. 200 hektar, 4. 0,1 hektar	
19.07.	Pengembangan Bibit Unggul Pertanian	1. Tersalurnya bibit unggul padi, 2. Demlot bibi unggul jagung di lahan tidur dan pekarangan, 3. Terlaksananya perbanyakan benih pokok varietas bawaan untuk penangkar, 4. Perbanyakan benih dasar varietas sarai sarumpun	Kec. Linggo Sari Baganti	1. 17 ton, 2. 10 Ha, 3. 200 hektar, 4. 0,1 hektar	50,000,000	APBDKOTA		1. 17 ton, 2. 10 Ha, 3. 200 hektar, 4. 0,1 hektar	
19.07.	Pengembangan Bibit Unggul Pertanian	1. Tersalurnya bibit unggul padi, 2. Demlot bibi unggul jagung di lahan tidur dan pekarangan, 3. Terlaksananya perbanyakan benih pokok varietas bawaan untuk penangkar, 4. Perbanyakan benih dasar varietas sarai sarumpun	Kec. Sutura	1. 17 ton, 2. 10 Ha, 3. 200 hektar, 4. 0,1 hektar	50,000,000	APBDKOTA		1. 17 ton, 2. 10 Ha, 3. 200 hektar, 4. 0,1 hektar	
19.07.	Pengembangan Bibit Unggul Pertanian	1. Tersalurnya bibit unggul padi, 2. Demlot bibi unggul jagung di lahan tidur dan pekarangan, 3. Terlaksananya perbanyakan benih pokok varietas bawaan untuk penangkar, 4. Perbanyakan benih dasar varietas sarai sarumpun	Lengayang	1. 17 ton, 2. 10 Ha, 3. 200 hektar, 4. 0,1 hektar	50,000,000	APBDKOTA		1. 17 ton, 2. 10 Ha, 3. 200 hektar, 4. 0,1 hektar	
19.08.	Pengembangan Tanaman Holtikultura	1. Terlaksananya pelatihan penangkaran tanaman hortikultura, 2. Tersalurnya bibit jeruk kepada kelompok tani, 3. Tersalurnya bibit lengkeng kepada kelompok tani, 4. Tersalurnya bibit pisang kepada kelompok tani, 5. Tersalurnya bibit manggis kepada kelompok tani, 6. Tersalurnya bibit durian kepada kelompok tani	Kab. Pessel	1. 25 orang, 2. 10,000 batang, 3. 2.000 batang, 4. 2.000 batang, 5. 950 batang, 6. 950 batang	850,000,000	APBDKOTA		1. 25 orang, 2. 10,000 batang, 3. 2.000 batang, 4. 2.000 batang, 5. 950 batang, 6. 950 batang	
19.08.	Pengembangan Tanaman Holtikultura	1. Terlaksananya pelatihan penangkaran tanaman hortikultura, 2. Tersalurnya bibit jeruk kepada kelompok tani, 3. Tersalurnya bibit lengkeng kepada kelompok tani, 4. Tersalurnya bibit pisang kepada kelompok tani, 5. Tersalurnya bibit manggis kepada kelompok tani, 6. Tersalurnya bibit durian kepada kelompok tani	Lengayang	1. 25 orang, 2. 10,000 batang, 3. 2.000 batang, 4. 2.000 batang, 5. 950 batang, 6. 950 batang	12,500,000	APBDKOTA		1. 25 orang, 2. 10,000 batang, 3. 2.000 batang, 4. 2.000 batang, 5. 950 batang, 6. 950 batang	
19.12.	Optimasi Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat	Terlaksananya pengadaan bibit sawit	Kab. Pessel	130 batang	110,000,000	APBDKOTA		130 batang	
19.18.	Sekolah Lapang Pengendalian Hama dan Penyakit/ OPT Tanaman Perkebunan	Terlaksananya sekolah lapang pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman perkebunan	Kab. Pessel	40 petani	82,500,000	APBDKOTA		40 petani	
19.20.	Pemberdayaan Balai Benih Tanaman Pangan	Terlaksananya penangkaran benih sebar dan sertifikasi oleh Balai Pengawasan Sertifikat Benih (BPSB)	Ranah Pesisir	2000 kg benih	678,800,000	APBDKOTA		2000 kg benih	
19.21.	Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Perkebunan	1. Terlaksananya pengadaan alat tebang kelapa dalam (chain saw), 2. Penumbuhan	Kab. Pessel	1. 15 unit, 2. 2 hektar, 3. 3	95,200,000	APBDKOTA		1. 15 unit, 2. 2 hektar, 3. 3 kelompok penangkar	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		kebun induk gambir, 3. Penumbuhan kelompok penangkar tanaman perkebunan (kopi dan pala)		kelompok penangkar					
19.21.	Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Perkebunan	1. Terlaksananya pengadaan alat tebang kelapa dalam (chain saw), 2. Penumbuhan kebun induk gambir, 3. Penumbuhan kelompok penangkar tanaman perkebunan (kopi dan pala)	Kec. Batang Kapas	1. 15 unit, 2. 2 hektar, 3. 3 kelompok penangkar	75,000,000	APBDKOTA		1. 15 unit, 2. 2 hektar, 3. 3 kelompok penangkar	
19.21.	Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Perkebunan	1. Terlaksananya pengadaan alat tebang kelapa dalam (chain saw), 2. Penumbuhan kebun induk gambir, 3. Penumbuhan kelompok penangkar tanaman perkebunan (kopi dan pala)	Kec. Batang Kapas, Ranah Pesisir dan Lengayang	1. 15 unit, 2. 2 hektar, 3. 3 kelompok penangkar	75,000,000	APBDKOTA		1. 15 unit, 2. 2 hektar, 3. 3 kelompok penangkar	
19.21.	Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Perkebunan	1. Terlaksananya pengadaan alat tebang kelapa dalam (chain saw), 2. Penumbuhan kebun induk gambir, 3. Penumbuhan kelompok penangkar tanaman perkebunan (kopi dan pala)	Nag. Sungai Tunu dan Sumedang Kec. Ranah Pesisir	1. 15 unit, 2. 2 hektar, 3. 3 kelompok penangkar	150,000,000	APBDKOTA		1. 15 unit, 2. 2 hektar, 3. 3 kelompok penangkar	
19.22.	Pembinaan Kelompok Tani Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura		Kab. Pessel		100,000,000	APBDKOTA			
19.23.	Pengendalian Hama Perkebunan	Terlaksananya gerakan pengendalian hama tupai	Kab. Pessel	15 kali	150,000,000	APBDKOTA		15 kali	
19.26.	Penunjang Kegiatan Provinsi dan Pusat Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	Terfasilitasinya kegiatan yang bersumber dari dana propinsi dan pusat	Kab. Pessel	12 bulan	98,797,000	APBDKOTA		12 bulan	
19.31.	Pelatihan Teknis Budidaya Tanaman Karet	Terlaksananya pelatihan teknis budidaya karet yang baik	Kab. Pessel	20 petani	40,000,000	APBDKOTA		20 petani	
19.32.	Penumbuhan Budidaya Tanaman Sorgum		Kab. Pessel		165,000,000	APBDKOTA			
19.41.	Penyusunan Data Base Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Terlaksananya penyusunan dokumen dan peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Kab. Pessel	6 kecamatan	1,500,000,000	APBDKOTA		6 kecamatan	
19.41.	Penyusunan Data Base Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Terlaksananya penyusunan dokumen dan peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Kec. Air Pura, Pancung Soal, Rahul, BAB Tapan, Lunang dan Silaut	6 kecamatan	750,000,000	APBDKOTA		6 kecamatan	
19.42.	Pembenahan dan Pengolahan Data Statistik Pertanian	Tersedianya buku statistik pertanian	Kab. Pessel	150 buku	169,589,000	APBDKOTA		150 buku	
19.44.	Sekolah Lapang Budidaya Tanaman Hortikultura	Terlaksananya sekolah lapang Good Agriculture Practise (SL-GAP) tanaman bawang merah	Kab. Pessel	20 orang	50,000,000	APBDKOTA		20 orang	
19.45.	Sekolah Lapang Budidaya Tanaman Perkebunan	Terlaksananya Sekolah Lapang budidaya tanaman kakao (sambung samping)	Kab. Pessel	40 petani	109,995,000	APBDKOTA		40 petani	
19.46.	Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) Tanaman Pangan dan Hortikultura	Terlaksananya sekolah lapang pengendalian hama terpadu pada komoditi padi, jagung, cabe dan bawang merah	Kab. Pessel	160 petani	274,285,000	APBDKOTA		160 petani	
19.47.	Penangkaran Bibit Unggul Perkebunan	Terlaksananya penangkaran bibit sawit unggul siap tanam	Kec. Ranah IV Hulu Tapan	30.000 batang	1,200,000,000	APBDKOTA		30.000 batang	
19.48.	Penyusunan Action Plan Kawasan Pertanian	Terlaksananya penyusunan dokumen action plan komoditi unggulan kabupaten	Kab. Pessel	1 dokumen	283,947,000	APBDKOTA		1 dokumen	
19.49.	Pemantauan Peredaran Pupuk dan Pestisida	1. Terlaksananya pengujian sampel pupuk dan	Kab. Pessel	1. 8 sampel, 2. 50	60,000,000	APBDKOTA		1. 8 sampel, 2. 50 kios	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		pestisida, 2. Terlaksananya supervisi ke kios pupuk bersubsidi		kios pupuk				pupuk	
19.50.	Pengendalian OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura	1. Terlaksananya pengadaan pestisida ramah lingkungan, 2. Terlaksananya bimbingan teknis pengendalian OPT, 3. Tersedianya sprayer	14 Kecamatan (Kecuali Silaut)	1. 1 paket, 2. 25 petani, 3. 70 unit	200,000,000	APBDKOTA		1. 1 paket, 2. 25 petani, 3. 70 unit	
19.50.	Pengendalian OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura	1. Terlaksananya pengadaan pestisida ramah lingkungan, 2. Terlaksananya bimbingan teknis pengendalian OPT, 3. Tersedianya sprayer	IV Jurai	1. 1 paket, 2. 25 petani, 3. 70 unit	0	APBDKOTA		1. 1 paket, 2. 25 petani, 3. 70 unit	
19.50.	Pengendalian OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura	1. Terlaksananya pengadaan pestisida ramah lingkungan, 2. Terlaksananya bimbingan teknis pengendalian OPT, 3. Tersedianya sprayer	Kab. Pessel	1. 1 paket, 2. 25 petani, 3. 70 unit	0	APBDKOTA		1. 1 paket, 2. 25 petani, 3. 70 unit	
19.50.	Pengendalian OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura	1. Terlaksananya pengadaan pestisida ramah lingkungan, 2. Terlaksananya bimbingan teknis pengendalian OPT, 3. Tersedianya sprayer	Ranah Pesisir	1. 1 paket, 2. 25 petani, 3. 70 unit	49,000,000	APBDKOTA		1. 1 paket, 2. 25 petani, 3. 70 unit	
20.	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan								
20.01.	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan		Kab. Pessel		650,000,000	APBDKOTA			
20.01.	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan		Kec. IV Jurai, LSB dan Sutera		0	APBDKOTA			
20.01.	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan		Ranah Pesisir		0	APBDKOTA			
20.07.	Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian/Perkebunan	Jumlah programa penyuluhan pertanian yang dihasilkan	Kab. Pessel	16 dokumen	65,000,000	APBDKOTA		16 dokumen	
28.	Program Peningkatan Kelembagaan Petani								
28.01.	Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani (LKMA)	Jumlah LKMA yang dibina	Kab. Pessel	145 LKMA	125,000,000	APBDKOTA		145 LKMA	
28.02.	Fasilitasi Asuransi Usaha Tanaman Padi	Luas Lahan Petani yang difasilitasi	Kab. Pessel	2000 Ha	45,000,000	APBDKOTA		2000 Ha	
28.03.	Fasilitasi Pembentukan Kelompok Tani Berbadan Hukum	Jumlah kelompok tani yang berbadan hukum	Kab. Pessel	100 Poktan	195,500,000	APBDKOTA		100 Poktan	
28.05.	LOAN IPDMIP	jumlah petani yang mengikuti SL budidaya padi	IV Jurai	180 orang	0	APBDKOTA		180 orang	
28.05.	LOAN IPDMIP	jumlah petani yang mengikuti SL budidaya padi	Kab. Lima Puluh Kota	180 orang	0	APBDKOTA		180 orang	
28.05.	LOAN IPDMIP	jumlah petani yang mengikuti SL budidaya padi	Kab. Pessel	180 orang	0	APBDKOTA		180 orang	
28.05.	LOAN IPDMIP	jumlah petani yang mengikuti SL budidaya padi	Kec. Bayang, IV Jurai, Batang Kapas, Sutera	180 orang	1,200,000,000	APBDKOTA		180 orang	
28.05.	LOAN IPDMIP	jumlah petani yang mengikuti SL budidaya padi	Ranah Pesisir	180 orang	0	APBDKOTA		180 orang	
28.06.	Penunjang LOAN IPDMIP	kegiatan Loan IPDMIP yang difasilitasi	Kab. Pessel	1 kegiatan	84,000,000	APBDKOTA		1 kegiatan	
28.07.	Forum Komunikasi Petani/Kontak Tani	jumlah pertemuan kontak tani yang dilaksanakan	IV Jurai	2 kali pertemuan	65,000,000	APBDKOTA		2 kali pertemuan	

Nama OPD : **DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
30.	Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian								
30.05.	Pengembangan Pasca Panen Tanaman Hortikultura	1. Jumlah Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Hortikultura (Peralatan Masak) 2. Jumlah UP3HP yang dilatih Pengolahan Pisang	-	4 Paket, 1 UP3HP	40,000,000	APBDKOTA		4 Paket, 1 UP3HP	
30.05.	Pengembangan Pasca Panen Tanaman Hortikultura	1. Jumlah Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Hortikultura (Peralatan Masak) 2. Jumlah UP3HP yang dilatih Pengolahan Pisang	Kab. Pessel	4 Paket, 1 UP3HP	80,000,000	APBDKOTA		4 Paket, 1 UP3HP	
30.06.	Pengembangan Jaringan Pemasaran Produksi Perkebunan	Rapat - rapat Koordinasi dan Asosiasi Bidang Perkebunan yang dilaksanakan	Prov dan Pusat	12 Bulan	60,000,000	APBDPROV		12 Bulan	
30.08.	Promosi dan Expo Komoditi Perkebunan	Terlaksananya partisipasi Dinas dalam memeriahkan Festival Langkisau dan Mandeh	Dalam Provinsi dan Luar Provinsi	2 Event	105,000,000	APBDPROV		2 Event	
30.09.	Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian Unggulan Daerah	Partisipasi Dinas dalam Event Festival Langkisau dan Mandeh, Pawai Alegoris 17 Agustus dan APKASI	IV Jurai	4 Event	70,000,000	APBDKOTA		4 Event	
30.11.	Penumbuhan Agrowisata	1. Terlaksananya Demplot Budidaya jeruk 2. Saprodi Budidaya Jeruk Organik yang disalurkan pada Kawasan Agrowisata 3. Peralatan Pengolaha Jeruk yang di salurkan	Kec. Koto XI Tarusan	2 Unit, 18 Ha, 2 Unit	180,000,000	APBDKOTA		2 Unit, 18 Ha, 2 Unit	
30.14.	Pengembangan Pasca Panen Tanaman Pangan	Jumlah lantai jemur yang di rehab	Kab. Pessel	3 unit	668,002,000	APBDKOTA		3 unit	
30.14.	Pengembangan Pasca Panen Tanaman Pangan	Jumlah lantai jemur yang di rehab	Keltan Cubadak Jaya Kamp. Lubuk Pasing Nag. Talaok Kec. Bayang	3 unit	100,000,000	APBDKOTA		3 unit	
30.14.	Pengembangan Pasca Panen Tanaman Pangan	Jumlah lantai jemur yang di rehab	Nag. Kubang Kec. Bayang	3 unit	200,000,000	APBDKOTA		3 unit	
30.15.	Pengembangan Pasca Panen Tanaman Perkebunan	Jumlah Alat Pengolahan Kopi yang disalurkan	-	2 Paket	200,000,000	APBDKOTA		2 Paket	
30.15.	Pengembangan Pasca Panen Tanaman Perkebunan	Jumlah Alat Pengolahan Kopi yang disalurkan	Kab. Pessel	2 Paket	100,000,000	APBDKOTA		2 Paket	
30.17.	Lomba budidaya tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah Lomba Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai GAP dan SOP yang dilaksanakan	Kab. Pessel	1 Event	50,000,000	APBDKOTA		1 Event	
31.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan								
31.01.	Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (Penunjang Satker 08)	Kegiatan Satker 08 yang difasilitasi	Kab. Pessel	1 kegiatan	110,000,000	APBDKOTA		1 kegiatan	
31.02.	Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian	1 Panjang JUT yang di bangun/rehabilitasi 2 jalan produksi yang di bangun 3 lanjutan pembangunan BPP 4 terehabilitasinya jaringan irigasi	Kampung Gobah	1 kegiatan,2 paket , 12 paket, 2 paket, 1 paket, 5 paket	100,000,000	APBDKOTA		1 kegiatan,2 paket , 12 paket, 2 paket, 1 paket, 5 paket	
31.02.	Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian	1 Panjang JUT yang di bangun/rehabilitasi 2 jalan produksi yang di bangun 3 lanjutan pembangunan BPP 4 terehabilitasinya jaringan irigasi	Kec. BAB Tapan	1 kegiatan,2 paket , 12 paket, 2 paket, 1 paket, 5 paket	150,000,000	APBDKOTA		1 kegiatan,2 paket , 12 paket, 2 paket, 1 paket, 5 paket	
31.02.	Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian	1 Panjang JUT yang di bangun/rehabilitasi 2 jalan produksi yang di bangun 3 lanjutan pembangunan BPP 4 terehabilitasinya jaringan irigasi	Kec. Bayang	1 kegiatan,2 paket , 12 paket, 2 paket, 1 paket, 5 paket	180,000,000	APBDKOTA		1 kegiatan,2 paket , 12 paket, 2 paket, 1 paket, 5 paket	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
31.02.	Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian	1 Panjang JUT yang di bangun/rehabilitasi 2 jalan produksi yang di bangun 3 lanjutan pembangunan BPP 4 terehabilitasinya jaringan irigasi	Kec. IV Jurai	1 kegiatan,2 paket , 12 paket, 2 paket, 1 paket, 5 paket	400,000,000	APBDKOTA		1 kegiatan,2 paket , 12 paket, 2 paket, 1 paket, 5 paket	
31.02.	Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian	1 Panjang JUT yang di bangun/rehabilitasi 2 jalan produksi yang di bangun 3 lanjutan pembangunan BPP 4 terehabilitasinya jaringan irigasi	Kec. IV Jurai, Ranah Pesisir	1 kegiatan,2 paket , 12 paket, 2 paket, 1 paket, 5 paket	400,000,000	APBDKOTA		1 kegiatan,2 paket , 12 paket, 2 paket, 1 paket, 5 paket	
31.02.	Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian	1 Panjang JUT yang di bangun/rehabilitasi 2 jalan produksi yang di bangun 3 lanjutan pembangunan BPP 4 terehabilitasinya jaringan irigasi	Kec. Koto XI Tarusan, Sutura, Bayang	1 kegiatan,2 paket , 12 paket, 2 paket, 1 paket, 5 paket	950,000,000	APBDKOTA		1 kegiatan,2 paket , 12 paket, 2 paket, 1 paket, 5 paket	
31.02.	Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian	1 Panjang JUT yang di bangun/rehabilitasi 2 jalan produksi yang di bangun 3 lanjutan pembangunan BPP 4 terehabilitasinya jaringan irigasi	Kec. Lengayang dan Sutura	1 kegiatan,2 paket , 12 paket, 2 paket, 1 paket, 5 paket	400,000,000	APBDKOTA		1 kegiatan,2 paket , 12 paket, 2 paket, 1 paket, 5 paket	
31.02.	Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian	1 Panjang JUT yang di bangun/rehabilitasi 2 jalan produksi yang di bangun 3 lanjutan pembangunan BPP 4 terehabilitasinya jaringan irigasi	Kec. Lengayang, Lunag, Sutura, Koto XI Tarusan, BAB Tapan, dan Bayang	1 kegiatan,2 paket , 12 paket, 2 paket, 1 paket, 5 paket	2,275,000,000	APBDKOTA		1 kegiatan,2 paket , 12 paket, 2 paket, 1 paket, 5 paket	
31.02.	Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian	1 Panjang JUT yang di bangun/rehabilitasi 2 jalan produksi yang di bangun 3 lanjutan pembangunan BPP 4 terehabilitasinya jaringan irigasi	Kec. Lunang	1 kegiatan,2 paket , 12 paket, 2 paket, 1 paket, 5 paket	400,000,000	APBDKOTA		1 kegiatan,2 paket , 12 paket, 2 paket, 1 paket, 5 paket	
31.02.	Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian	1 Panjang JUT yang di bangun/rehabilitasi 2 jalan produksi yang di bangun 3 lanjutan pembangunan BPP 4 terehabilitasinya jaringan irigasi	Kec. PC Soal	1 kegiatan,2 paket , 12 paket, 2 paket, 1 paket, 5 paket	200,000,000	APBDKOTA		1 kegiatan,2 paket , 12 paket, 2 paket, 1 paket, 5 paket	
31.02.	Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian	1 Panjang JUT yang di bangun/rehabilitasi 2 jalan produksi yang di bangun 3 lanjutan pembangunan BPP 4 terehabilitasinya jaringan irigasi	Kec. Pc. Soal dan Lunang, Silaut	1 kegiatan,2 paket , 12 paket, 2 paket, 1 paket, 5 paket	600,000,000	APBDKOTA		1 kegiatan,2 paket , 12 paket, 2 paket, 1 paket, 5 paket	
31.02.	Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian	1 Panjang JUT yang di bangun/rehabilitasi 2 jalan produksi yang di bangun 3 lanjutan pembangunan BPP 4 terehabilitasinya jaringan irigasi	Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan	1 kegiatan,2 paket , 12 paket, 2 paket, 1 paket, 5 paket	0	APBDKOTA		1 kegiatan,2 paket , 12 paket, 2 paket, 1 paket, 5 paket	
31.02.	Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian	1 Panjang JUT yang di bangun/rehabilitasi 2 jalan produksi yang di bangun 3 lanjutan pembangunan BPP 4 terehabilitasinya jaringan irigasi	Kec. Sutura	1 kegiatan,2 paket , 12 paket, 2 paket, 1 paket, 5 paket	300,000,000	APBDKOTA		1 kegiatan,2 paket , 12 paket, 2 paket, 1 paket, 5 paket	
31.02.	Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian	1 Panjang JUT yang di bangun/rehabilitasi 2 jalan produksi yang di bangun 3 lanjutan pembangunan BPP 4 terehabilitasinya jaringan irigasi	Kec. Sutura, IV Jurai	1 kegiatan,2 paket , 12 paket, 2 paket, 1 paket, 5 paket	400,000,000	APBDKOTA		1 kegiatan,2 paket , 12 paket, 2 paket, 1 paket, 5 paket	
31.02.	Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian	1 Panjang JUT yang di bangun/rehabilitasi 2 jalan produksi yang di bangun 3 lanjutan pembangunan BPP 4 terehabilitasinya jaringan irigasi	Kecamatan Lengayang	1 kegiatan,2 paket , 12 paket, 2 paket, 1 paket, 5 paket	150,000,000	APBDKOTA		1 kegiatan,2 paket , 12 paket, 2 paket, 1 paket, 5 paket	
31.02.	Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian	1 Panjang JUT yang di bangun/rehabilitasi 2 jalan produksi yang di bangun 3 lanjutan pembangunan BPP 4 terehabilitasinya jaringan irigasi	Lunang Barat	1 kegiatan,2 paket , 12 paket, 2 paket, 1 paket, 5 paket	225,000,000	APBDKOTA		1 kegiatan,2 paket , 12 paket, 2 paket, 1 paket, 5 paket	

Nama OPD : **DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		jaringan irigasi							
31.02.	Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian	1 Panjang JUT yang di bangun/rehabilitasi 2 jalan produksi yang di bangun 3 lanjutan pembangunan BPP 4 terehabilitasinya jaringan irigasi	Nagari Lubuk Betung Inderapura	1 kegiatan,2 paket , 12 paket, 2 paket, 1 paket, 5 paket	270,000,000	APBDKOTA		1 kegiatan,2 paket , 12 paket, 2 paket, 1 paket, 5 paket	
31.03.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Brigade Pertanian	Jumlah sarana dan mobilisasi alsintan dari Brigade Tanam ke lahan petani	Ranah Pesisir	1 Unit	320,000,000	APBDKOTA		1 Unit	
31.04.	DAK Bidang Pertanian dan Pendampingan	1 Jumlah embung/embung/damparit saluran yang di bangun atau di rehab 2 tersedianya kendaraan operasional PPL 3 jumlah BPP yang di bangun	Kab. Pessel	13 paket,50 unit,1paket	4,480,000,000	APBN		13 paket,50 unit,1paket	
31.04.	DAK Bidang Pertanian dan Pendampingan	1 Jumlah embung/embung/damparit saluran yang di bangun atau di rehab 2 tersedianya kendaraan operasional PPL 3 jumlah BPP yang di bangun	Kec. Ranah IV Hulu Tapan	13 paket,50 unit,1paket	0	APBN		13 paket,50 unit,1paket	
31.05.	Penunjang DAK Bidang Pertanian	Lancarnya pelaksanaan DAK bidang pertanian	Kab. Pessel (Kec. Bayang, Bayang Utara, IV Jurai, Batang Kapas, Ranah Pesisir	Hononarium pelaksana kegiatan,dan operasional	160,000,000	APBDKOTA		Hononarium pelaksana kegiatan,dan operasional	

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019

Nama OPD : **DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya biaya untuk jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Painan	1 tahun	90,000,000	APBDKOTA		1 tahun	
01.07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya honor untuk tenaga administrasi keuangan	Painan	20 orang	140,920,000	APBDKOTA		20 orang	
01.08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terciptanya kebersihan lingkungan kantor kabupaten dan kecamatan	Painan	12 bulan	35,858,000	APBDKOTA		12 bulan	
01.09.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor	Painan	7 unit komputer, 14 unit laptop, 15 printer, 10 unit AC, 1 unit genset	20,040,000	APBDKOTA		7 unit komputer, 14 unit laptop, 15 printer, 10 unit AC, 1 unit genset	
01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya pengadaan ATK untuk administrasi perkantoran	Painan	1 tahun	35,034,000	APBDKOTA		1 tahun	
01.11.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya pendataan dana untuk biaya cetakan dan pengadaan	Painan	1 tahun	26,970,400	APBDKOTA		1 tahun	
01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya pembelian komponen instalasi listrik/penerangan kantor	Painan	1 unit kantor kabupaten, 5 unit Puskesmas, 1 unit RPH	5,570,800	APBDKOTA		1 unit kantor kabupaten, 5 unit Puskesmas, 1 unit RPH	
01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya jumlah bahan bacaan	Painan	3 koran dan 1 paket buku ilmu pengetahuan	5,420,000	APBDKOTA		3 koran dan 1 paket buku ilmu pengetahuan	
01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya penyediaan makan dan minum rapat	Painan	12 bulan	50,722,500	APBDKOTA		12 bulan	
01.18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya penyediaan dana untuk konsultasi dan koordinasi keluar daerah	Kab, dan Prov	12 bulan	157,520,000	APBDKOTA		12 bulan	
01.19.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya penyediaan dana untuk kondultasi dan koordinasi dalam daerah	Painan	12 bulan	89,025,000	APBDKOTA		12 bulan	
01.30.	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	Terlaksananya penyediaan dana untuk menunjang operasional perencanaan	Painan	12 bulan	30,000,000	APBDKOTA		12 bulan	
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
02.09.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Painan		20,000,000	APBDKOTA			
02.10.	Pengadaan Meubiler	Terlaksananya pembelian meja Represionis	Painan	1 Unit Meja Represionis	15,000,000	APBDKOTA		1 Unit Meja Represionis	
02.22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan bangunan dan pagar kantor serta pembuatan taman kantor	Painan	12 bulan	135,000,000	APBDKOTA		12 bulan	
02.24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Operasional	Painan	2 Unit Kendaraan Roda 4 dan 40 Unit Roda 2	210,400,000	APBDKOTA		2 Unit Kendaraan Roda 4 dan 40 Unit Roda 2	

Nama OPD : **DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
03.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas	Painan	65 helai	400,000,000	APBDKOTA		65 helai	
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
05.01.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	Painan	5 orang	45,000,000	APBDKOTA		5 orang	
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
06.10.	Penyusunan Laporan Tahunan dan Statistik	Terlaksananya jumlah dokumen yang dihasilkan	Painan	2 Dokumen	30,000,000	APBDKOTA		2 Dokumen	
21.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak								
21.02.	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	1. Terlaksananya pendataan jumlah hewan yang ditangani 2. Terfasilitasi operasional pelayanan medis didaerah integrasi	15 Kecamatan	1. 11.200 ekor 2. 96 OB	300,000,000	APBDKOTA		1. 11.200 ekor 2. 96 OB	
21.02.	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	1. Terlaksananya pendataan jumlah hewan yang ditangani 2. Terfasilitasi operasional pelayanan medis didaerah integrasi	15 Kecamatan	1. 11.200 ekor 2. 96 OB	580,000,000	APBN		1. 11.200 ekor 2. 96 OB	
21.02.	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	1. Terlaksananya pendataan jumlah hewan yang ditangani 2. Terfasilitasi operasional pelayanan medis didaerah integrasi	Sutera dan Silaut	1. 11.200 ekor 2. 96 OB	6,000,000	APBDKOTA		1. 11.200 ekor 2. 96 OB	
21.04.	Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah	1. Terlaksananya pendataan jumlah cek poin yang difasilitasi 2. Terlaksananya pendataan bahan asal hewan yang terawasi	-	1. 2 unit selama 12 bulan 2. 70 sampel	0	APBDKOTA		1. 2 unit selama 12 bulan 2. 70 sampel	
21.04.	Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah	1. Terlaksananya pendataan jumlah cek poin yang difasilitasi 2. Terlaksananya pendataan bahan asal hewan yang terawasi	15 Kecamatan	1. 2 unit selama 12 bulan 2. 70 sampel	94,611,610	APBDKOTA		1. 2 unit selama 12 bulan 2. 70 sampel	
21.07.	Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Rabies	Terlaksananya pengendalian dari penyakit rabies	15 Kecamatan	5.000 ekor HPR	175,787,361	APBDKOTA		5.000 ekor HPR	
21.07.	Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Rabies	Terlaksananya pengendalian dari penyakit rabies	15 Kecamatan	5.000 ekor HPR	270,000,000	APBN		5.000 ekor HPR	
21.08.	Penyusunan Ranperda Rabies	Tersusunnya naskah akademis ranperda rabies	painan	1 dokumen	35,356,617	APBN		1 dokumen	
21.09.	Pengawasan Peredaran Obat Hewan	Terlaksananya pendataan jumlah lokasi peredaran obat hewan yang diawasi	15 Kecamatan	15 Kecamatan	47,709,740	APBDKOTA		15 Kecamatan	
22.	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan								
22.02.	Pembibitan dan Perawatan Ternak	Terlaksananya pendataan jumlah ternak yang dipelihara	Lengayang	64 ekor ternak sapi	462,960,000	APBDKOTA		64 ekor ternak sapi	
22.03.	Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat		Jinang Kampung Pansur		0	APBDKOTA			
22.03.	Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat		Kampung Muaro Aie & Kampung Dilan		0	APBDKOTA			
22.03.	Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat		Kec. Batang Kapas		100,000,000	APBDKOTA			
22.03.	Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat		Kec. IV Jurai		100,000,000	APBDKOTA			
22.03.	Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat		Kec. Ranah Pesisir, Kec. Linggo Sari		125,000,000	APBDKOTA			

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Baganti						
22.03.	Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat		Kec. Silaut		150,000,000	APBDKOTA			
22.03.	Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat		Koto Ranah		90,000,000	APBDKOTA			
22.03.	Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat		Mandeh		24,000,000	APBDKOTA			
22.03.	Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat		nagari		8,000,000	APBDKOTA			
22.03.	Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat		Nagari Api-Api		80,000,000	APBDKOTA			
22.03.	Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat		Tapan, Lunang, Pancung Soal		400,000,000	APBDKOTA			
22.03.	Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat		Tapan, Silaut		400,000,000	APBDKOTA			
22.06.	Pembelian dan Pendistribusian Vaksin dan Pakan Ternak	Terlaksananya pendataan jumlah vaksin yang disediakan dan didistribusi	6 Puskesmas	5.500 dosis vaksin rabies dan 5.500 dosis vaksin SE	289,133,000	APBDKOTA		5.500 dosis vaksin rabies dan 5.500 dosis vaksin SE	
22.06.	Pembelian dan Pendistribusian Vaksin dan Pakan Ternak	Terlaksananya pendataan jumlah vaksin yang disediakan dan didistribusi	6 Puskesmas	5.500 dosis vaksin rabies dan 5.500 dosis vaksin SE	200,000,000	APBN		5.500 dosis vaksin rabies dan 5.500 dosis vaksin SE	
22.10.	Peningkatan Mutu Genetik Melalui IB	Terlaksananya pendataan jumlah akseptor IB yang dilayani	15 Kecamatan	6.000 ekor	442,065,000	APBDKOTA		6.000 ekor	
22.13.	Budidaya Itik Bayang	Terlaksananya pendataan jumlah kelompok yang mendapat bantuan ternak itik	Kec. Bayu, Kec. Bayang, Kec. Sutura, Kec. Lengayang, Kec. Lunang	7.500 ekor itik, 8 Kelompok	150,000,000	APBDKOTA		7.500 ekor itik, 8 Kelompok	
22.13.	Budidaya Itik Bayang	Terlaksananya pendataan jumlah kelompok yang mendapat bantuan ternak itik	Kec. Bayu, Kec. Bayang, Kec. Sutura, Kec. Lengayang, Kec. Lunang	7.500 ekor itik, 8 Kelompok	1,225,000,000	APBN		7.500 ekor itik, 8 Kelompok	
22.14.	Budidaya ayam lokal	Terlaksananya pendataan jumlah kelompok yang difasilitasi	Kec. IV Jurai, Kec. Ranah Pesisir, Kec. Koto XI Tarusan	4 kelompok tani ternak	172,292,700	APBDKOTA		4 kelompok tani ternak	
22.15.	Pengadaan Perlengkapan Petugas	1. Terlaksananya penyediaan kontainer depo sarana untuk pelayanan IB 2. Terlaksananya penyediaan kontainer penyimpanan bibit	-	1. 1 unit 2. 2 Unit	0	APBDKOTA		1. 1 unit 2. 2 Unit	
22.15.	Pengadaan Perlengkapan Petugas	1. Terlaksananya penyediaan kontainer depo sarana untuk pelayanan IB 2. Terlaksananya penyediaan kontainer penyimpanan bibit	Painan	1. 1 unit 2. 2 Unit	97,889,000	APBDKOTA		1. 1 unit 2. 2 Unit	
22.17.	Pengembangan Ternak untuk Menunjang Percepatan Pembangunan	Terlaksananya pendataan jumlah kelompok/masyarakat yang mendapatkan bantuan pengembangan ternak	-	17 kelompok	3,020,000,000	APBN		17 kelompok	
22.18.	Pemberdayaan Kelembagaan dan Usaha Peternakan	Terlaksananya pendataan jumlah peternak yang mendapatkan pengetahuan melalui sekolah lapangan	Painan	120 orang	260,950,000	APBDKOTA		120 orang	
22.22.	Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan	terbentuknya kelompok tani ternak budidaya	IV Jurai, Bayang,	4 Kelompok	59,784,300	APBDKOTA		4 Kelompok	

Nama OPD : **DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Kerbau		Batang Kapas, Silaut						
22.23.	Fasilitasi Pengembangan Modal Usaha Peternakan	1. Terlaksananya pendataan jumlah peternak yang mendapat fasilitasi akses kredit usaha 2. Terlaksananya pendataan jumlah peternak yang mendapat fasilitasi AUTS/K	-	1. 40 peternak 2. 800 polis	148,707,120	APBDKOTA		1. 40 peternak 2. 800 polis	
23.	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan								
23.07.	Promosi atas hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah	Terlaksananya promosi hasil peternakan yang diikuti	Painan	3 even	275,000,000	APBDKOTA		3 even	
24.	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan								
24.07.	Penerapan Teknologi Peternakan	Terlaksananya pendataan jumlah peternak yang difasilitasi dalam penerapan teknologi peternakan	Kabupaten Pesisir Selatan	10 kelompok tani ternak	278,650,000	APBDKOTA		10 kelompok tani ternak	
29.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Peternakan								
29.01.	Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian Mendukung Peternakan	1. sarana prasarana pasar ternak yg dibangun 2. Pembangunan pasar ternak dan RPH 3. Pengadaan Mobil Pelayanan Keliling Kesehatan Hewan 4. Dokumen Perencanaan Sarana Prasarana	-	1. 4 Unit 2. 2 unit 3. 1 Paket 4. 3 Dokumen	3,500,000,000	APBDKOTA		1. 4 Unit 2. 2 unit 3. 1 Paket 4. 3 Dokumen	
29.01.	Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian Mendukung Peternakan	1. sarana prasarana pasar ternak yg dibangun 2. Pembangunan pasar ternak dan RPH 3. Pengadaan Mobil Pelayanan Keliling Kesehatan Hewan 4. Dokumen Perencanaan Sarana Prasarana	Lengayang	1. 4 Unit 2. 2 unit 3. 1 Paket 4. 3 Dokumen	2,230,000,000	APBDKOTA		1. 4 Unit 2. 2 unit 3. 1 Paket 4. 3 Dokumen	
29.01.	Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian Mendukung Peternakan	1. sarana prasarana pasar ternak yg dibangun 2. Pembangunan pasar ternak dan RPH 3. Pengadaan Mobil Pelayanan Keliling Kesehatan Hewan 4. Dokumen Perencanaan Sarana Prasarana	Lengayang	1. 4 Unit 2. 2 unit 3. 1 Paket 4. 3 Dokumen	550,000,000	APBN		1. 4 Unit 2. 2 unit 3. 1 Paket 4. 3 Dokumen	
29.02.	Peningkatan Sarana/Prasarana Peternakan (DAK dan Penunjang)	Terlaksananya pendataan jumlah sarana peasarana yang dibangun	BAB Tapan dan Pancung Soal	3 paket pekerjaan	3,750,000,000	APBDKOTA		3 paket pekerjaan	
29.03.	Peningkatan Sarana/Prasarana Peternakan (DAK dari DAU)	Terlaksananya fasilitasi kegiatan DAK	Painan	1 tahun	0	APBDKOTA		1 tahun	

Nama OPD : BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Bapedalitbang		65,000,000	APBDKOTA			
01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Bapedalitbang		120,000,000	APBDKOTA			
01.07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Bapedalitbang		89,871,985	APBDKOTA			
01.08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Bapedalitbang		65,000,000	APBDKOTA			
01.09.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja		Bapedalitbang		50,000,000	APBDKOTA			
01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Bapedalitbang		37,814,729	APBDKOTA			
01.11.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Bapedalitbang		37,710,630	APBDKOTA			
01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Bapedalitbang		30,000,000	APBDKOTA			
01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Bapedalitbang		5,400,000	APBDKOTA			
01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman		Bapedalitbang		50,000,000	APBDKOTA			
01.18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah		Luar Daerah, Pusat		299,425,000	APBDKOTA			
01.19.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah		Kab. Pesisir Selatan		48,075,000	APBDKOTA			
01.21.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor		Bapedalitbang		52,000,000	APBDKOTA			
01.30.	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan		Kab. Pesisir Selatan		50,000,000	APBDKOTA			
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
02.03.	Pembangunan Gedung Kantor		Kantor Bapedalitbang		0	APBDKOTA			
02.05.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		Kantor Bapedalitbang		70,000,000	APBDKOTA			
02.09.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Kantor Bapedalitbang		65,000,000	APBDKOTA			
02.22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Kantor Bapedalitbang		86,000,000	APBDKOTA			
02.24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Kantor Bapedalitbang		237,528,750	APBDKOTA			
03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
03.05.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu		Bapedalitbang		27,500,000	APBDKOTA			
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								

Nama OPD : **BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
05.01.	Pendidikan dan Pelatihan Formal		Kab. Pesisir Selatan		50,000,000	APBDKOTA			
05.28.	Bimbingan Teknis Bagi Aparatur Perencana		Kab. Pesisir Selatan		80,000,000	APBDKOTA			
15.	Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah								
15.01.	Pengembangan inovasi pada generasi muda		Kab. Pesisir Selatan		107,977,115	APBDKOTA			
15.02.	Perumusan dan Penajaman Sistem Inovasi Daerah		Kab. Pesisir Selatan		100,000,000	APBDKOTA			
15.04.	Pelaksanaan pengkajian peraturan perundang-undangan		Kab. Pesisir Selatan		100,000,000	APBDKOTA			
15.07.	Forum Data Kabupaten Pesisir Selatan		Kab. Pesisir Selatan		62,300,000	APBDKOTA			
15.09.	Koordinasi Penyusunan Profil Daerah		Kantor Bapedalitbang		0	APBDKOTA			
15.11.	Penyebarluasan Informasi Pembangunan		Kab. Pesisir Selatan		70,000,000	APBDKOTA			
16.	Program Penelitian, Pengembangan dan Pemanfaatan SDM dan IPTEK.								
16.01.	Koordinasi Kelitbangan		Kab, Prov, Pusat		50,000,000	APBDKOTA			
16.07.	Kajian Kebijakan Pusat dan Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan		Kab. Pesisir Selatan		250,000,000	APBDKOTA			
16.08.	Penyusunan Rencana Induk dan Rencana Aksi Kelitbangan		Kab. Pesisir Selatan		150,000,000	APBDKOTA			
16.09.	Koordinasi Spasial, Kerjasama Wilayah dan Perbatasan		Kab. Pesisir Selatan		91,000,000	APBDKOTA			
17.	Program Peningkatan Kelembagaan dan Sumber Daya Kelitbangan								
17.01.	Penguatan kerjasama kelitbangan		Kab, Prov, Pusat		50,000,000	APBDKOTA			
19.	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar								
19.12.	Koordinasi Program Pembangunan Sanitasi dan Permukiman (PPSP)		Kab. Pesisir Selatan		49,517,147	APBDKOTA			
19.13.	Penunjang Program Air Minum, Sanitasi Masyarakat (PAMSIMAS)		Kab. Pesisir Selatan		125,000,000	APBDKOTA			
19.15.	Penyusunan Perencanaan Kawasan Perkotaan (Urban Planning) Ibu Kota Kecamatan		Kab. Pesisir Selatan		0	APBDKOTA			
21.	Program perencanaan pembangunan daerah								
21.08.	Penyusunan Rancangan RKPd		Kab. Pesisir Selatan		64,692,289	APBDKOTA			
21.09.	Penyelenggaraan Musrenbang RKPd		Kab. Pesisir Selatan		174,872,452	APBDKOTA			
21.13.	Monitoring, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah		Kab. Pesisir Selatan		70,780,510	APBDKOTA			
21.16.	Penyusunan NOTA Kesepekatan KUA dan PPAS Perubahan APBD Kabupaten Pesisir Selatan		Kab. Pesisir Selatan		80,032,882	APBDKOTA			
21.17.	Penyusunan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS RAPBD Kabupaten Pesisir Selatan		Kab. Pesisir Selatan		80,143,796	APBDKOTA			
21.19.	Penyusunan Perjanjian Kinerja		Kab. Pesisir Selatan		57,734,164	APBDKOTA			

Nama OPD : **BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
21.23.	Koordinasi Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Daerah		Kab. Pesisir Selatan		98,921,396	APBDKOTA			
21.26.	Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Kab. Pesisir Selatan		105,954,870	APBDKOTA			
21.29.	Evaluasi RKPD		Kab. Pesisir Selatan		64,810,964	APBDKOTA			
21.31.	Fasilitasi dan Sinkronisasi RPJM Nagari		Kab. Pesisir Selatan		125,000,000	APBDKOTA			
21.36.	Pengesahan Perubahan RTRW Kabupaten Pesisir Selatan		Kab. Pesisir Selatan		0	APBDKOTA			
22.	Program perencanaan pembangunan ekonomi								
22.04.	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Jumlah Laporan Koordinasi bidang ekonomi	Kab, Prov, Pusat	4 dokumen	89,223,600	APBDKOTA		4 dokumen	
22.09.	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah		Kab, Prov, Pusat		140,000,000	APBDKOTA			
22.11.	Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan		Kab, Prov, Pusat		120,000,000	APBDKOTA			
23.	Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya								
23.01.	Koordinasi Penyusunan Masterplan Pendidikan		-		0	APBDKOTA			
23.03.	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya		Kabupaten, Provinsi, Pusat		125,000,000	APBDKOTA			
23.07.	Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah		-		0	APBDKOTA			
24.	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam								
24.09.	Koordinasi Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah		Kab, Prov, Pusat		101,169,500	APBDKOTA			
24.10.	Koordinasi Program IPDMIP Kabupaten Pesisir Selatan		Kab, Prov, Pusat		275,000,000	APBDKOTA			
24.16.	Koordinasi Perencanaan SDA dan Lingkungan Hidup		Kab, Prov, Pusat		77,368,400	APBDKOTA			
24.17.	Penunjang Program IPDMIP		Kab. Pesisir Selatan		190,000,000	APBDKOTA			
26.	Program Perencanaan Tata Ruang								
26.04.	Pengesahan Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan		Kabupaten Pesisir Selatan		200,000,000	APBDKOTA			

Nama OPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		painan		180,000,000	APBDKOTA			
01.07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		painan		900,000,000	APBDKOTA			
01.08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		painan		200,000,000	APBDKOTA			
01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor		painan		50,000,000	APBDKOTA			
01.11.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		painan		50,000,000	APBDKOTA			
01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		painan		29,000,000	APBDKOTA			
01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		painan		20,000,000	APBDKOTA			
01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman		painan		80,000,000	APBDKOTA			
01.18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah		painan		215,000,000	APBDKOTA			
01.19.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah		painan		50,000,000	APBDKOTA			
01.30.	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan		painan		80,000,000	APBDKOTA			
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
02.05.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		painan		2,000,000,000	APBDKOTA			
02.22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		painan		200,000,000	APBDKOTA			
02.24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		painan		230,000,000	APBDKOTA			
02.26.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		painan		50,000,000	APBDKOTA			
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
05.01.	Pendidikan dan Pelatihan Formal		painan		100,000,000	APBDKOTA			
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
06.02.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran		painan		78,304,900	APBDKOTA			
06.04.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		painan		150,000,000	APBDKOTA			
15.	Program Pengembangan data/informasi								
15.11.	Penyebarluasan Informasi Pembangunan		painan		20,000,000	APBDKOTA			
17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah								

Nama OPD : **BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
17.06.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD		painan		230,000,000	APBDKOTA			
17.07.	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD		painan		200,000,000	APBDKOTA			
17.08.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD		painan		180,000,000	APBDKOTA			
17.09.	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD		painan		220,000,000	APBDKOTA			
17.10.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		painan		180,000,000	APBDKOTA			
17.100.	Penyusunan APBD dan Penjabaran APBD		painan		0	APBDKOTA			400,000,000
17.101.	Penyusunan Perubahan APBD dan Penjabaran Perubahan APBD		painan		300,000,000	APBDKOTA			300,000,000
17.102.	Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Periodik dan Pembinaan Laporan Keuangan SKPD		painan		200,000,000	APBDKOTA			200,000,000
17.103.	Penunjang Bendera Umum Daerah		painan		841,996,200	APBDKOTA			841,996,200
17.104.	Pengelolaan Dana Transfer		painan		106,900,801	APBDKOTA			106,900,801
17.105.	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD		painan		400,000,000	APBDKOTA			400,000,000
17.108.	Pengelola Dana PPKD		painan		80,000,000	APBDKOTA			80,000,000
17.11.	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		painan		150,000,000	APBDKOTA			
17.20.	Penyusunan DPA SKPD		painan		100,000,000	APBDKOTA			
17.22.	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		painan		0	APBDKOTA			250,000,000
17.27.	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pemeliharaan		painan		50,000,000	APBDKOTA			
17.28.	Penyusunan Standar Biaya		painan		130,000,000	APBDKOTA			
17.29.	Penyusunan DPA Perubahan SKPD		painan		150,000,000	APBDKOTA			
17.36.	Pengelolaan dan Penatausahaan Kas Daerah		painan		80,000,000	APBDKOTA			
17.39.	Pengelolaan dan Penatausahaan Gaji PNSD		painan		120,000,000	APBDKOTA			
17.41.	Bimbingan Teknis Belanja Non Tunai		painan		185,000,000	APBDKOTA			
17.42.	Bimbingan Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah		painan		200,000,000	APBDKOTA			
17.47.	Penunjang Sistim Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah		painan		450,000,000	APBDKOTA			
17.62.	Sosialisasi Penatausahaan Barang Milik Daerah		painan		250,000,000	APBDKOTA			
17.64.	Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD		painan		60,000,000	APBDKOTA			
17.69.	Pembinaan Laporan Keuangan OPD		painan		100,000,000	APBDKOTA			
17.72.	Revisi Kebijakan Akuntansi Pemerintah		painan		80,000,000	APBDKOTA			

Nama OPD : **BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Daerah Kabupaten Pesisir Selatan								
17.82.	Penghapusan Barang-barang Inventaris		painan		100,000,000	APBDKOTA			
17.99.	Pedoman Penyusunan RKA		painan		300,000,000	APBDKOTA			300,000,000
18.	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota								
18.06.	Analisa APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018		painan		60,000,000	APBDKOTA			
18.10.	Rekonsiliasi Dana Transfer ke Daerah		painan		70,000,000	APBDKOTA			
18.11.	Pengelolaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial		painan		80,000,000	APBDKOTA			
19.	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari								
19.04.	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Nagari		painan		75,000,000	APBDKOTA			
19.08.	Monitoring dan Evaluasi penatausahaan Kas Daerah		painan		80,000,000	APBDKOTA			
19.10.	Monitoring dan evaluasi dana transfer ke nagari		painan		50,000,000	APBDKOTA			
20.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH								
20.33.	Penanganan Kasus dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah		painan		150,000,000	APBDKOTA			

Nama OPD : BADAN PENDAPATAN DAERAH

[illegible]

Nama OPD : **BADAN PENDAPATAN DAERAH**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
05.07.	Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah		Badan Pendapatan		90,000,000	APBDKOTA			
15.	Program Pengembangan data/informasi								
15.11.	Penyebarluasan Informasi Pembangunan		Badan Pendapatan		49,500,000	APBDKOTA			
17.	Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah								
17.21.	Penyusunan Laporan PAD		Badan Pendapatan		81,399,848	APBDKOTA			
17.31.	Pendataan dan Verifikasi Pajak Daerah	Terlaksananya pendataan dan verifikasi pajak daerah	Badan Pendapatan	1 tahun	176,528,440	APBDKOTA		1 tahun	
17.33.	Pengadaan Barang Kuasi		Badan Pendapatan		120,000,000	APBDKOTA			
17.43.	Verifikasi dan Penetapan Pajak Daerah	Terlaksananya verifikasi dan penetapan pajak daerah	Badan Pendapatan	800 berkas BPHTB, 100 SKP Reklame	145,280,568	APBDKOTA		800 berkas BPHTB, 100 SKP Reklame	
17.50.	Pelayanan Peningkatan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah I	Terlaksananya pelayanan pemungutan pajak daerah wilayah I	Badan Pendapatan	175.877 SPPT PBB-P2, 35 Hotel dan Cotage, 65 Restoran/Rumah Makan	269,999,000	APBDKOTA		175.877 SPPT PBB-P2, 35 Hotel dan Cotage, 65 Restoran/Rumah Makan	
17.51.	Pelayanan Peningkatan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah II	Terlaksananya pelayanan pemungutan pajak daerah wilayah II	Badan Pendapatan	81.226 SPPT PBB-P2, 5 Hotel dan Cotage, 30 Restoran/Rumah Makan	190,000,000	APBDKOTA		81.226 SPPT PBB-P2, 5 Hotel dan Cotage, 30 Restoran/Rumah Makan	
17.52.	Pelayanan Peningkatan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah III	Terlaksananya Pelayanan pemungutan Pajak Daerah Wilayah III	Badan Pendapatan	33.256 SPPT PBB-P2, 25 Hotel dan Cotage, 35 Restoran/Rumah Makan,	200,000,000	APBDKOTA		33.256 SPPT PBB-P2, 25 Hotel dan Cotage, 35 Restoran/Rumah Makan,	
17.63.	Sosialisasi Pajak Daerah		Badan Pendapatan		132,000,000	APBDKOTA			
17.68.	Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah		Badan Pendapatan		67,421,694	APBDKOTA			
17.75.	Monitoring dan Evaluasi PAD		Badan Pendapatan		0	APBDKOTA			
17.78.	Pemetaan Potensi Pendapatan Asli Daerah	Tersedianya buku pemetaan potensi pajak daerah	Badan Pendapatan	Buku potensi pajak daerah	235,000,000	APBDKOTA		Buku potensi pajak daerah	
17.80.	Cetak Massal dan Pengadaan Bahan-bahan Dokumen PBB-P2	Terlaksananya Pencetakan dan pengadaan bahan dokumen PBB-P2	Badan Pendapatan	SPPT, DHKP, STTS, TTS	322,592,477	APBDKOTA		SPPT, DHKP, STTS, TTS	
17.94.	Zonasi Nilai Jual Objek Pajak	Tersedianya Buku Zonasi Nilai Tanah	Badan Pendapatan	5 Kecamatan	518,700,000	APBDKOTA		5 Kecamatan	
17.95.	Pengadaan Sarana Reklame		Badan Pendapatan		325,000,000	APBDKOTA			
17.96.	Penunjang Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah		Badan Pendapatan		25,000,000	APBDKOTA			
17.97.	Penyusunan Sistem Operasional dan Prosedur		Badan Pendapatan		100,000,000	APBDKOTA			
17.98.	Verifikasi dan Validasi Piutang PBB-P2		Badan Pendapatan		220,000,000	APBDKOTA			

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019

Nama OPD : **BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik selama 12 bulan	BKPSDM	100%	60,900,000	APBDKOTA		100%	
01.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKPSDM	100%	9,362,000	APBDKOTA		100%	
01.07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya jasa Administrasi keuangan	BKPSDM	100 %	105,550,000	APBDKOTA		100 %	
01.08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terbayarnya Petugas Jasa Kebersihan Kantor	BKPSDM	100%	52,000,000	APBDKOTA		100%	
01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	BKPSDM	100%	34,297,000	APBDKOTA		100%	
01.11.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Pengadaan selama 12 bulan	BKPSDM	100%	47,332,000	APBDKOTA		100%	
01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BKPSDM	100%	7,528,100	APBDKOTA		100%	
01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BKPSDM	100%	8,900,000	APBDKOTA		100%	
01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersediannya Makan dan Minum PNS selama 12 bulan	BKPSDM	100%	42,680,000	APBDKOTA		100%	
01.18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah selama 12 bulan	BKPSDM	100%	117,300,000	APBDKOTA		100%	
01.19.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah selama 12 bulan	BKPSDM	100%	64,700,000	APBDKOTA		100%	
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
02.07.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	BKPSDM	100%	81,400,000	APBDKOTA		100%	
02.09.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersediannya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	BKPSDM	100%	190,000,000	APBDKOTA		100%	
02.22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersediannya Gedung Kantor	BKPSDM	100%	198,000,000	APBDKOTA		100%	
02.24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terbayarnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	BKPSDM	100%	90,540,000	APBDKOTA		100%	
02.28.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	BKPSDM	100%	35,332,000	APBDKOTA		100%	
03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
03.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		BKPSDM		22,500,000	APBDKOTA			
03.05.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu		BKPSDM		16,000,000	APBDKOTA			
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
05.04.	Penunjang Bimtek dan Kursus Keterampilan		BKPSDM		50,000,000	APBDKOTA			

Nama OPD : **BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
05.05.	Pelaksanaan Achievement Motivation Training (AMT)	Jumlah Pegawai ASN yang mengikuti AMT	BKPSDM	100 orang	95,875,000	APBDKOTA		100 orang	
05.06.	Diklat Revolusi Mental		BKPSDM		96,540,000	APBDKOTA			
05.07.	Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah		BKPSDM		156,760,000	APBDKOTA			
05.08.	Diklat Teknis Manajemen Kinerja ASN	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimtek Manajemen Kinerja ASN	BKPSDM	40 orang (1 Angkatan)	118,876,000	APBDKOTA		40 orang (1 Angkatan)	
05.09.	Diklat Uji Kompetensi Sertifikasi Polisi Pamong Praja		BKPSDM		42,650,000	APBDKOTA			
05.14.	Bimbingan Teknis Kepamongprajaan (camat non pemerintahan)		BKPSDM		132,765,000	APBDKOTA			
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
06.01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	BKPSDM	11 Jenis Laporan	25,400,000	APBDKOTA		11 Jenis Laporan	
15.	Program Pendidikan Kedinasan								
15.06.	Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme		BKPSDM		563,960,000	APBDKOTA			
15.07.	Pendidikan dan Pelatihan Pra jabatan bagi CPNS		BKPSDM		401,276,834	APBDKOTA			
15.08.	Pendidikan dan Pelatihan PIM Tk. IV		BKPSDM		467,987,000	APBDKOTA			
15.09.	Diklat Pimpemendagri		BKPSDM		185,400,000	APBDKOTA			
15.11.	Penyebarluasan Informasi Pembangunan		BKPSDM		35,000,000	APBDKOTA			
17.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur								
17.02.	Seleksi Penerimaan Calon PNS		BKPSDM		169,680,000	APBDKOTA			
17.08.	Pemberian Penghargaan Bagi PNS Yang Berprestasi		BKPSDM		112,364,000	APBDKOTA			
17.11.	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas		BKPSDM		188,654,000	APBDKOTA			
17.18.	Penyusunan Formasi PNS		BKPSDM		56,438,000	APBDKOTA			
17.20.	Penyelenggaraan Majelis Pertimbangan Pegawai		BKPSDM		48,600,000	APBDKOTA			
17.21.	Penyelenggaraan badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan		BKPSDM		49,670,000	APBDKOTA			
17.23.	Pengelolaan Administrasi Karpeg, Karis/Karsu dan Taspen		BKPSDM		43,226,700	APBDKOTA			
17.25.	Pengelolaan Administrasi Mutasi Pegawai		BKPSDM		57,233,400	APBDKOTA			
17.26.	Pengelolaan Administrasi Pensiun Pegawai		BKPSDM		75,754,000	APBDKOTA			
17.27.	Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dan SAPK		BKPSDM		65,329,000	APBDKOTA			
17.30.	Pengelolaan administrasi kepengkatan dan pemakaian gelar PNS		BKPSDM		162,300,000	APBDKOTA			
17.33.	Pemeriksaan Kasus PNS, Masalah Perceraian dan Pembinaan Disiplin PNS		BKPSDM		38,183,600	APBDKOTA			

Nama OPD : **BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
17.35.	Pengadaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah		BKPSDM		65,348,000	APBDKOTA			
17.36.	Pembekalan calon PNS		BKPSDM		65,000,000	APBDKOTA			
17.37.	Pembekalan ASN yang Memasuki Purnabakti		BKPSDM		75,653,000	APBDKOTA			
17.40.	Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi		BKPSDM		198,760,000	APBDKOTA			
17.41.	Pengambilan Sumpah PNS dan Pelantikan Jabatan		BKPSDM		40,819,000	APBDKOTA			
17.42.	Pengambilan Sumpah PNS		BKPSDM		34,240,700	APBDKOTA			
17.44.	Pengkoreksian Angka Kredit		BKPSDM		43,149,500	APBDKOTA			
17.45.	Monitoring dan Pembinaan Disiplin PNS		BKPSDM		47,634,000	APBDKOTA			
17.48.	Pemberian Satyalencana Karya Satya X,XX,dan XXX Tahun		BKPSDM		46,145,800	APBDKOTA			
17.50.	Pemetaan Potensi Jabatan Struktural		BKPSDM		154,300,000	APBDKOTA			
17.51.	Kegiatan Pembekalan Pasangan Pra Nikah		BKPSDM		14,403,000	APBDKOTA			
17.54.	Pelaksanaan Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian		BKPSDM		176,400,000	APBDKOTA			
17.55.	Penyelenggaraan Tim Penilai Kinerja ASN		BKPSDM		48,000,000	APBDKOTA			
17.56.	Penilaian Evaluasi Kinerja		BKPSDM		65,000,000	APBDKOTA			
17.59.	Pengelolaan Tata Naskah Dinas		BKPSDM		72,000,000	APBDKOTA			
17.60.	Sosialisasi Perka BKN No. 2 Tahun 2018		BKPSDM		70,000,000	APBDKOTA			
17.61.	Sosialisasi Tentang Peraturan Tidak Pidana Korupsi		BKPSDM		80,000,000	APBDKOTA			

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019

Nama OPD : **SEKRETARIAT DAERAH**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah tagihan pengiriman surat menyurat	PESISIR SELATAN	12 bulan	100,839,500	APBDKOTA		12 bulan	
01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rekening listrik dan air	PESISIR SELATAN	12 bulan	650,000,000	APBDKOTA		12 bulan	
01.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa	PESISIR SELATAN	100%	175,000,000	APBDKOTA		100%	
01.07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah biaya honorarium pengelola keuangan	PESISIR SELATAN	12 bulan	283,690,917	APBDKOTA		12 bulan	
01.08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Biaya Honorarium tenaga kebersihan yang dibayar	PESISIR SELATAN	12 bulan	360,000,000	APBDKOTA		12 bulan	
01.09.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki	PESISIR SELATAN	100%	55,000,000	APBDKOTA		100%	
01.11.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan	PESISIR SELATAN	100%	100,000,000	APBDKOTA		100%	
01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan	PESISIR SELATAN	12 bulan	52,500,000	APBDKOTA		12 bulan	
01.13.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	PESISIR SELATAN	12 bulan	45,500,000	APBDKOTA		12 bulan	
01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Biaya Jamuan Makan dan Minum	PESISIR SELATAN	12 bulan	1,450,500,000	APBDKOTA		12 bulan	
01.18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah yang diikuti	PESISIR SELATAN	12 bulan	1,360,560,071	APBDKOTA		12 bulan	
01.19.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah yang diikuti	PESISIR SELATAN	12 bulan	55,000,000	APBDKOTA		12 bulan	
01.24.	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS	Jumlah tenaga kerja kontrak yang dibayarkan	PESISIR SELATAN	12 orang	178,000,000	APBDKOTA		12 orang	
01.25.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Rumah Dinas (KDH)	Jumlah Komponen instalasi listrik penerangan bangunan	PESISIR SELATAN	12 bulan	55,000,000	APBDKOTA		12 bulan	
01.28.	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (KDH)	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti luar daerah	PESISIR SELATAN	12 bulan	1,150,000,000	APBDKOTA		12 bulan	
01.30.	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang disusun	PESISIR SELATAN	6 Dokumen	101,550,000	APBDKOTA		6 Dokumen	
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
02.05.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	PESISIR SELATAN	2 Unit	36,500,000	APBDKOTA		2 Unit	
02.06.	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	PESISIR SELATAN	100%	650,000,000	APBDKOTA		100%	
02.08.	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	PESISIR SELATAN	100%	50,000,000	APBDKOTA		100%	
02.09.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan peralatan gedung kantor	PESISIR SELATAN	100%	205,000,000	APBDKOTA		100%	

Nama OPD : **SEKRETARIAT DAERAH**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
02.10.	Pengadaan Meubiler	Jumlah Pengadaan Meubiler	PESISIR SELATAN	100%	165,000,000	APBDKOTA		100%	
02.20.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah pemeliharaan Rumah Jabatan	PESISIR SELATAN	2 unit	575,000,000	APBDKOTA		2 unit	
02.21.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah pemeliharaan rumah dinas	PESISIR SELATAN	15 unit	450,500,000	APBDKOTA		15 unit	
02.22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	PESISIR SELATAN	6 unit	401,000,000	APBDKOTA		6 unit	
02.23.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah pemeliharaan mobil jabatan	PESISIR SELATAN	2 unit	450,000,000	APBDKOTA		2 unit	
02.24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	PESISIR SELATAN	roda empat 30 unit, roda dua 40 unit	750,600,000	APBDKOTA		roda empat 30 unit, roda dua 40 unit	
02.25.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah pemeliharaan perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	PESISIR SELATAN	100%	150,000,000	APBDKOTA		100%	
02.27.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Rumah Dinas/Jabatan	PESISIR SELATAN	100%	205,000,000	APBDKOTA		100%	
02.29.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah Pemeliharaan Meubeliur	PESISIR SELATAN	100%	10,000,000	APBDKOTA		100%	
03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
03.06.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (KDH)	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	PESISIR SELATAN	65 Stel	210,000,000	APBDKOTA		65 Stel	
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
05.01.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	PESISIR SELATAN	8 orang	55,000,000	APBDKOTA		8 orang	
05.19.	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian yang difasilitasi	PESISIR SELATAN	100%	45,000,000	APBDKOTA		100%	
15.	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan								
15.07.	Peningkatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah aliran kepercayaan yang diawasi	PESISIR SELATAN	5 aliran	70,000,000	APBDKOTA		5 aliran	
15.09.	Operasionalisasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	Jumlah konflik sosial yang difasilitasi	PESISIR SELATAN	21 Rekomendasi	75,000,000	APBDKOTA		21 Rekomendasi	
15.20.	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)	Jumlah rekomendasi koordinasi Pimpinan Daerah	PESISIR SELATAN	4 Rekomendasi	45,000,000	APBDKOTA		4 Rekomendasi	
15.23.	Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Jumlah kios pupuk bersubsidi dan pestisida yang diawasi	Kab. Pesisir Selatan	115 Kios	56,000,000	APBDKOTA		115 Kios	
15.26.	Pameran Apkasi dan Sumbar Expo	Jumlah Pameran Apkasi yang diikuti	Kab. Pesisir Selatan	1 Kali	170,000,000	APBDKOTA		1 Kali	
16.	program penyelamatan dan pelestarian dokumen / arsip daerah								
16.02.	Pendataan dan Penataan dokumen/Arsip Daerah (Unit Arsip Ke Depo Arsip Daerah)	Jumlah arsip Lingkup Setda yang ditata	PESISIR SELATAN	2500 berkas	50,500,000	APBDKOTA		2500 berkas	
16.02.	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri	Jumlah kunjungan kerja pejabat negara yang difasilitasi	PESISIR SELATAN	80 Kali	175,000,000	APBDKOTA		80 Kali	
16.07.	Peningkatan Etos Kerja Keprotokolan	Jumlah pelaksanaan Keprotokolan	PESISIR SELATAN	80 kali	139,750,059	APBDKOTA		80 kali	
16.14.	Operasionalisasi Unit Bantuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah kasus pungutan liar yang tangani	PESISIR SELATAN	3 Kasus	41,000,000	APBDKOTA		3 Kasus	
16.16.	Pembinaan Hasil Karya Pemuda Pelopor	Jumlah pemuda pelopor yang dibina	PESISIR SELATAN	15 Orang	25,000,000	APBDKOTA		15 Orang	
16.25.	Koordinasi dan Konsultasi pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Jumlah rapat koordinasi pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak	PESISIR SELATAN	35 Kali	55,000,000	APBDKOTA		35 Kali	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		kriminal							
17.	Pembinaan dan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan								
17.02.	Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Energi Baru dan Terbarukan		Pesisir Selatan		90,000,000	APBDKOTA			
17.07.	Pelaksanaan Upacara Kesadaran Nasional dan Hari Besar Lainnya	Jumlah pelaksanaan upacara hari kesadaran nasional dan hari besar lainnya	PESISIR SELATAN	22 kali	113,000,000	APBDKOTA		22 kali	
17.10.	Pelaporan RANHAM	Jumlah Laporan RANHAM	PESISIR SELATAN	10 Laporan	45,000,000	APBDKOTA		10 Laporan	
17.12.	Peringatan Hari Jadi Pesisir Selatan	Jumlah undangan yang hadir	PESISIR SELATAN	1200 orang	166,497,401	APBDKOTA		1200 orang	
17.16.	Peningkatan manajemen aset/ barang daerah	Jumlah Dokumen Aset/barang daerah lingkup Sekretariat Daerah	PESISIR SELATAN	4 Dokumen	153,000,000	APBDKOTA		4 Dokumen	
17.58.	Penilaian Kompetensi ASN		PESISIR SELATAN		136,668,914	APBDKOTA			
18.	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa								
18.01.	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah kerja sama dengan Media Massa	PESISIR SELATAN	27 Media Massa	134,846,432	APBDKOTA		27 Media Massa	
18.04.	Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kegiatan pemerintah daerah	PESISIR SELATAN	2400 lembar Cetak Foto, 100 Video, 60 Spanduk	135,705,690	APBDKOTA		2400 lembar Cetak Foto, 100 Video, 60 Spanduk	
18.07.	Publikasi dan Promosi Daerah	Jumlah publikasi dan promosi daerah	PESISIR SELATAN	50 Kali	285,789,262	APBDKOTA		50 Kali	
18.08.	Bintek Kapasitas Kewartawanan dan Pers/Studi Banding	Jumlah Peserta Bintek Kewartawanan dan Pers	PESISIR SELATAN	30 Orang	60,504,452	APBDKOTA		30 Orang	
18.38.	Forum Pengendalian Harga dan Inflasi Daerah	Jumlah Rapat TPID yang dilaksanakan	PESISIR SELATAN	2 Kali	45,000,000	APBDKOTA		2 Kali	
19.	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan								
19.02.	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Jumlah rapat kordinasi tim kewaspadaan dini daerah	PESISIR SELATAN	4 Kali	73,000,000	APBDKOTA		4 Kali	
20.	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)								
20.10.	Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika	Jumlah sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkotika	PESISIR SELATAN	30 Sekolah	215,000,000	APBDKOTA		30 Sekolah	
20.18.	Pemasyarakatan Olahraga aparatur	Jumlah kegiatan olahraga aparatur yang dilaksanakan	PESISIR SELATAN	24 Kali	25,000,000	APBDKOTA		24 Kali	
20.26.	Optimalisasi Fungsi Koordinasi Bidang Umum, Organisasi dan Keuangan	Jumlah Koordinasi Asisten Bidang Administrasi Umum	PESISIR SELATAN	12 bulan	50,867,915	APBDKOTA		12 bulan	
20.27.	Optimalisasi Fungsi Koordinasi Asisten Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesra	Jumlah Koordinasi Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	PESISIR SELATAN	12 bulan	50,867,915	APBDKOTA		12 bulan	
20.28.	Optimalisasi Fungsi Koordinasi Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum	Jumlah Koordinasi Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	PESISIR SELATAN	12 Bulan	50,867,915	APBDKOTA		12 Bulan	
20.30.	Pengendalian Program Pembangunan Daerah	Jumlah rapat evaluasi dan monitoring program pembangunan daerah yang dilaksanakan	PESISIR SELATAN	4 Kali	62,016,250	APBDKOTA		4 Kali	
20.32.	Pemantapan dan Optimalisasi Fungsi Staf Ahli	Jumlah Rekomendasi Staf Ahli Bupati	PESISIR SELATAN	24 Rekomendasi	50,863,553	APBDKOTA		24 Rekomendasi	
20.34.	Koordinasi Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan		PESISIR SELATAN		35,800,491	APBDKOTA			
20.35.	Penyusunan Prosedur Kegiatan	Jumlah dokumen prosedur kegiatan yang disusun	PESISIR SELATAN	2 Dokumen	33,063,366	APBDKOTA		2 Dokumen	
20.36.	Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan	PESISIR SELATAN	12 Dokumen	40,646,435	APBDKOTA		12 Dokumen	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Pembangunan Daerah	Kegiatan Pembangunan Daerah							
20.37.	Penyusunan Harga Satuan Pokok Kegiatan	Jumlah dokumen HSPK yang disusun	PESISIR SELATAN	1 Dokumen	76,540,758	APBDKOTA		1 Dokumen	
21.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat								
21.06.	Monitoring, dan Evaluasi Unit Kesehatan Sekolah (UKS)	Jumlah UKS yang dibina	Kab. Pesisir Selatan	4 Tingkatan	35,187,364	APBDKOTA		4 Tingkatan	
21.10.	Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Politik	Jumlah sosialisasi UU dan Peraturan bidang politik yang dilaksanakan	PESISIR SELATAN	15 Kali	75,000,000	APBDKOTA		15 Kali	
21.12.	Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah	Jumlah pemantauan pelaporan dan evalausi perkembangan politik di daerah	PESISIR SELATAN	12 kali	65,000,000	APBDKOTA		12 kali	
21.14.	Bintek Akuntabilitas Bantuan Keuangan Partai Politik	Jumlah Bimtek Akuntabilitas Bantuan Keuangan Partai Politik	PESISIR SELATAN	1 Kali	65,000,000	APBDKOTA		1 Kali	
21.15.	Monitoring, Evaluasi Keberadaan Ormas/LSM sesuai Undang-Undang Keormasan	Jumlah ormas yang mendapat pembinaan	PESISIR SELATAN	40 ormas	25,000,000	APBDKOTA		40 ormas	
21.17.	Verifikasi Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai	Jumlah Parpol yang mengajukan bantuan keuangan yang diverifikasi	PESISIR SELATAN	15 parpol	23,000,000	APBDKOTA		15 parpol	
22.	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan								
22.04.	Pembinaan dan Pengawasan Jasa Kontruksi	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan	PESISIR SELATAN	24 Kali	13,910,200	APBDKOTA		24 Kali	
22.05.	Pembinaan dan Konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Peserta Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa	PESISIR SELATAN	15 orang	122,000,000	APBDKOTA		15 orang	
22.08.	Fasilitasi Lelang dan Klarifikasi PBJ	Jumlah Fasilitasi dan Klarifikasi Lelang	PESISIR SELATAN	175 Paket	160,000,000	APBDKOTA		175 Paket	
22.09.	Fasilitasi Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik	Jumlah badan/lembaga yang difasilitasi dalam pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik	PESISIR SELATAN	45 OPD	154,490,200	APBDKOTA		45 OPD	
22.10.	Koordinasi Peningkatan Ekonomi Pesisir Selatan	Jumlah Rapat Koordinasi peningkatan ekonomi pesisir selatan yang dilaksanakan	PESISIR SELATAN	4 Kali	70,000,000	APBDKOTA		4 Kali	
22.14.	Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen evaluasi, pelaporan dan pengelolaan pengadaan barang dan jasa	PESISIR SELATAN	12 Dokumen	75,000,000	APBDKOTA		12 Dokumen	
26.	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan								
26.05.	Publikasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Lembaga Daerah yang dipublikasi	PESISIR SELATAN	270 buku	80,000,000	APBDKOTA		270 buku	
26.11.	Validasi Keputusan Bupati dan Evaluasi/Klarifikasi Peraturan Nagari	Jumlah Keputusan Bupati yang divalidasi	PESISIR SELATAN	550 Dokumen	50,000,000	APBDKOTA		550 Dokumen	
26.16.	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Bupati	Jumlah Peraturan Bupati yang difasilitasi	PESISIR SELATAN	50 Dokumen	125,000,000	APBDKOTA		50 Dokumen	
26.17.	Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Peraturan Daerah yang di fasilitasi	PESISIR SELATAN	6 Dokumen	100,000,000	APBDKOTA		6 Dokumen	
28.	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatausahaan Pemda								
28.06.	Penataan dan Penguatan Kelembagaan	Laporan Forum Kelembagaan	PESISIR SELATAN	30 Dokumen	100,000,000	APBDKOTA		30 Dokumen	
28.10.	Penataan jabatan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen standar kompetensi jabatan	PESISIR SELATAN	45 PD	85,000,000	APBDKOTA		45 PD	
46.	Advokasi Pemerintah Daerah								
46.01.	Penyelesaian Sengketa Hukum	Jumlah Perkara Hukum yang diselesaikan	PESISIR SELATAN	10 Kasus	90,000,000	APBDKOTA		10 Kasus	
47.	Program Pemantapan Otonomi Daerah								
47.02.	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitasi Rakor Gubernur dengan Kabupaten/Kota	PESISIR SELATAN	4 Kali	84,608,876	APBDKOTA		4 Kali	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
47.03.	Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah	Jumlah MOU dan Perjanjian Kerjasama (PKS) antar daerah	PESISIR SELATAN	1 MOU	41,547,755	APBDKOTA		1 MOU	
47.04.	Fasilitasi Kerjasama Rantau	Jumlah Fasilitasi Nagari binaan perantau tingkat Kabupaten	PESISIR SELATAN	3 Nagari	44,740,968	APBDKOTA		3 Nagari	
47.05.	Fasilitasi Penegasan Batas Daerah dan Kecamatan	Jumlah Fasilitasi penetapan dan penegasan batas nagari	PESISIR SELATAN	40 Nagari	44,149,067	APBDKOTA		40 Nagari	
47.08.	Penamaan Rupa Bumi dan Unsur Alami	Laporan Nama rupa bumi unsur buatan	PESISIR SELATAN	1 Dokumen	39,392,033	APBDKOTA		1 Dokumen	
47.09.	Koordinasi dan Pembinaan Kewilayahan	Jumlah Rakor Kecamatan yang dihadiri	PESISIR SELATAN	15 Kali	39,494,117	APBDKOTA		15 Kali	
47.15.	Rapat Koordinasi Penyeleggaran Pemerintah Kabupaten	Jumlah rapat koordinasi camat dan wali nagari	PESISIR SELATAN	2 Kali	52,971,748	APBDKOTA		2 Kali	
57.	Program Peningkatan IMTAQ								
57.01.	Peningkatan IMTAQ bagi Pegawai di Lingkungan Pemda Kab. Pesisir Selatan dan Penyelenggaraan Hari Besar Islam	Jumlah ceramah agama yang dilaksanakan	PESISIR SELATAN	24 Kali	125,000,000	APBDKOTA		24 Kali	
57.05.	Tim Silaturahmi Pemerintah Daerah	JUmlah safari Pemerintah Daerah yang dilakukan	PESISIR SELATAN	60 Kali	250,000,000	APBDKOTA		60 Kali	
57.09.	Peningkatan Kapasitas KAN	Jumlah KAN yang dibina	PESISIR SELATAN	37 KAN	25,000,000	APBDKOTA		37 KAN	
57.10.	Verifikasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial	Jumlah Proposal Hibah Bansos Masjid yang diverifikasi	PESISIR SELATAN	150 Proposal	25,000,000	APBDKOTA		150 Proposal	
57.11.	Lomba Didikan Shubuh Tergiat	Jumlah Lembaga Didikan Subuh yang sudah dikunjungi	PESISIR SELATAN	15 Kali	40,000,000	APBDKOTA		15 Kali	
57.12.	Sosialisasi Standarisasi MDQ, TPQ/TPSQ	Jumlah Sosialisasi Standarisasi MDQ TPQ/TPSQ yang dilaksanakan	PESISIR SELATAN	3 Kali	25,000,000	APBDKOTA		3 Kali	
57.13.	Persiapan dan Penyelenggaraan MTQ	Jumlah Cabang MTQ yang diikuti	PESISIR SELATAN	10 Cabang	475,000,000	APBDKOTA		10 Cabang	
57.14.	Koordinasi dan Konsultasi Kesejahteraan Rakyat dan Urusan Keagamaan	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Kesejahteraan Rakyat dan Urusan Keagamaan yang dilaksanakan	PESISIR SELATAN	12 Kali	100,000,000	APBDKOTA		12 Kali	
57.15.	Pembinaan Pondok Pesantren, MDTA, dan Pondok Alquran	Jumlah Pondok Pesantren, MDTA, dan Pondok Alquran yang dibina	PESISIR SELATAN	15 Unit	50,000,000	APBDKOTA		15 Unit	
57.16.	Fasilitasi Jema'ah Haji	Jumlah Tenaga Pendamping Haji Daerah (TPHD)	PESISIR SELATAN	1 Orang	150,000,000	APBDKOTA		1 Orang	
78.	Peningkatan Pengawasan Akuntabilitas Kinerja Aparatur								
78.01.	Penyusunan LAKIP Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Kinerja	PESISIR SELATAN	45 OPD	80,000,000	APBDKOTA		45 OPD	
78.05.	Monev Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Monev Kinerja Perangkat Daerah	PESISIR SELATAN	4 Laporan	40,000,000	APBDKOTA		4 Laporan	
78.07.	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Jumlah Dokumen LPPD	PESISIR SELATAN	1 Dokumen	49,438,257	APBDKOTA		1 Dokumen	
78.08.	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Jumlah Dokumen LKPJ	PESISIR SELATAN	1 Dokumen	41,380,195	APBDKOTA		1 Dokumen	
80.	Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik								
80.01.	Fasilitasi Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah inovasi pelayanan publik yang difasilitasi	PESISIR SELATAN	2 inovasi	50,000,000	APBDKOTA		2 inovasi	
80.04.	Indek Kepuasan Masyarakat	Jumlah PD pelayanan publik yang disurvei	PESISIR SELATAN	15 Laporan	50,000,000	APBDKOTA		15 Laporan	

Nama OPD : **SEKRETARIAT DAERAH**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
80.08.	Peningkatan Manajemen Pelayanan Publik	Jumlah laporan pelayanan publik	PESISIR SELATAN	4 Laporan	75,000,000	APBDKOTA		4 Laporan	

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019

Nama OPD : **SEKRETARIAT DPRD**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		DPRD Kab. Pessel		13,284,000	APBDKOTA			
01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		DPRD Kab. Pessel		391,140,000	APBDKOTA			
01.07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		DPRD Kab. Pessel		466,152,000	APBDKOTA			
01.08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		DPRD Kab. Pessel		307,500,000	APBDKOTA			
01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor		DPRD Kab. Pessel		72,304,000	APBDKOTA			
01.11.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		DPRD Kab. Pessel		75,030,000	APBDKOTA			
01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		DPRD Kab. Pessel		78,966,000	APBDKOTA			
01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		DPRD Kab. Pessel		190,650,000	APBDKOTA			
01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman		DPRD Kab. Pessel		458,347,000	APBDKOTA			
01.18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah		DPRD Kab. Pessel		392,036,000	APBDKOTA			
01.19.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah		DPRD Kab. Pessel		120,390,000	APBDKOTA			
01.20.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Negeri		Luar Negeri		2,050,000,000	APBDKOTA			
01.21.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor		DPRD Kab. Pessel		141,450,000	APBDKOTA			
01.23.	Penyediaan Jasa Publikasi		DPRD Kab. Pessel		820,000,000	APBDKOTA			
01.30.	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan		DPRD Kab. Pessel		34,065,000	APBDKOTA			
01.32.	Penyediaan Memori DPRD		Kab. Pesisir Selatan		50,000,000	APBDKOTA			
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
02.05.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		DPRD Kab. Pessel		1,845,000,000	APBDKOTA			
02.06.	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas		DPRD Kab. Pessel		250,000,000	APBDKOTA			
02.07.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		DPRD Kab. Pessel		123,677,000	APBDKOTA			
02.08.	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas		DPRD Kab. Pessel		43,112,000	APBDKOTA			
02.09.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		DPRD Kab. Pessel		717,500,000	APBDKOTA			
02.20.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan		Kab. Pesisir Selatan		61,500,000	APBDKOTA			
02.22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		DPRD Kab. Pessel		273,798,000	APBDKOTA			

Nama OPD : SEKRETARIAT DPRD

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
02.23.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan		DPRD Kab. Pessel		344,093,000	APBDKOTA			
02.24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		DPRD Kab. Pessel		181,369,000	APBDKOTA			
02.25.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas		Kab. Pesisir Selatan		47,970,000	APBDKOTA			
02.26.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		DPRD Kab. Pessel		47,970,000	APBDKOTA			
02.27.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas		DPRD Kab. Pessel		39,360,000	APBDKOTA			
02.28.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		DPRD Kab. Pessel		39,360,000	APBDKOTA			
02.40.	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan		Kab. Pesisir Selatan		1,537,500,000	APBDKOTA			
02.42.	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor		DPRD Kab. Pessel		615,000,000	APBDKOTA			
03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
03.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		DPRD Kab. Pessel		532,611,000	APBDKOTA			
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
05.03.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		DPRD Kab. Pessel		61,500,000	APBDKOTA			
15.	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah								
15.01.	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		DPRD Kab. Pessel		5,924,650,000	APBDKOTA			
15.02.	Pembahasan Non Ranperda		DPRD Kab. Pessel		3,587,500,000	APBDKOTA			
15.03.	Rapat-rapat Alat Kelengkapan		DPRD Kab. Pessel		109,710,000	APBDKOTA			
15.04.	Rapat-rapat Paripurna		DPRD Kab. Pessel		201,922,000	APBDKOTA			
15.04.	Rapat-rapat Paripurna		Kab. Pesisir Selatan		100,000,000	APBDKOTA			
15.05.	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam dan Luar Daerah		Kab. Pesisir Selatan, Luar Daerah		4,050,441,000	APBDKOTA			
15.09.	Konsultasi, Koordinasi dan Pembinaan Pimpinan DPRD		Kab. Pesisir Selatan		2,716,118,000	APBDKOTA			
15.10.	Konsultasi, Koordinasi dan Pembinaan Alat Kelengkapan DPRD		Kab. Pesisir Selatan		4,144,282,000	APBDKOTA			
15.11.	Sosialisasi Perda Inisiative		Kab. Pesisir Selatan		717,500,000	APBDKOTA			
15.13.	Penunjang Operasional dan Pelaporan Sistem Informasi LHKPN (e-LHKPN) Anggota DPRD dan Operator Pokok-Pokok Pikiran DPRD		Kab. Pesisir Selatan		51,250,000	APBDKOTA			
15.14.	General Check Up Pimpinan dan Anggota DPRD		Kab. Pesisir Selatan		187,913,000	APBDKOTA			
15.15.	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD		DPRD Kab. Pessel		3,863,653,000	APBDKOTA			
15.16.	Kegiatan Reses		DPRD Kab. Pessel		2,421,563,000	APBDKOTA			
15.17.	Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh		DPRD Kab. Pessel		86,282,000	APBDKOTA			

Nama OPD : **SEKRETARIAT DPRD**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Masyarakat/Tokoh Agama								
15.19.	Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD		Kab. Pesisir Selatan		300,000,000	APBDKOTA			

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019

Nama OPD : **KECAMATAN KOTO XI TARUSAN**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat	Tarusan	100%	1,500,000	APBDKOTA		100%	
01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Rekening Listrik	Tarusan	100%	12,500,000	APBDKOTA		100%	
01.07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Biaya Honorarium Pengelola Keuangan	Tarusan	100%	47,100,000	APBDKOTA		100%	
01.08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan	Tarusan	100%	12,800,000	APBDKOTA		100%	
01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat Tulis Kantor	Tarusan	100%	18,325,000	APBDKOTA		100%	
01.11.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan Penggandaan	Tarusan	100%	15,600,000	APBDKOTA		100%	
01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tarusan		4,000,000	APBDKOTA			
01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Surat Kabar dan Buku Perundang-Undangan	Tarusan	100%	9,550,000	APBDKOTA		100%	
01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Biaya Jamuan Makan dan Minum	Tarusan	100%	23,500,000	APBDKOTA		100%	
01.18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Yang Diikuti Luar Daerah	Tarusan	100%	22,000,000	APBDKOTA		100%	
01.19.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Yang Diikuti Dalam Daerah	Tarusan	100%	71,375,000	APBDKOTA		100%	
01.30.	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	Jumlah Laporan Perencanaan dan Pelaporan Yang Dibuat	Tarusan	100%	7,500,000	APBDKOTA		100%	
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
02.07.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Tarusan		18,000,000	APBDKOTA			
02.22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Tarusan		12,000,000	APBDKOTA			
02.24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Tarusan		50,500,000	APBDKOTA			
02.28.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Tarusan		6,000,000	APBDKOTA			
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
05.01.	Pendidikan dan Pelatihan Formal		Tarusan		10,000,000	APBDKOTA			
15.	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan								
15.15.	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Trantibum		Tarusan		13,640,000	APBDKOTA			
15.17.	Pagelaran Seni Budaya dan Potensi Daerah pada Festival Langkisau		Kec. Koto XI Tarusan		23,125,000	APBDKOTA			

Nama OPD : **KECAMATAN KOTO XI TARUSAN**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
16.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial								
16.12.	Monitoring dan Evaluasi Distribusi Beras Miskin		Kec. Koto Xi Tarusan		6,550,000	APBDKOTA			
17.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan								
17.06.	Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional		Tarusan		16,500,000	APBDKOTA			
17.84.	Fasilitasi Capaian Penerimaan PBB-P2		Kec. Koto Xi Tarusan		7,650,000	APBDKOTA			
18.	Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan								
18.25.	Fasilitasi Penyelenggaraan PATEN		Tarusan		12,270,000	APBDKOTA			
19.	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari								
19.07.	Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Keuangan Pemerintah Nagari		Kec. Koto Xi Tarusan		49,535,000	APBDKOTA			
21.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat								
21.05.	Pembinaan UKS Kecamatan		Tarusan		7,680,000	APBDKOTA			
21.09.	Penyelenggaran Musrenbang RKPD		Tarusan		14,430,000	APBDKOTA			
24.	Pemberdayaan lembaga sosial dan ekonomi masyarakat/nagari								
24.15.	Pembinaan PKK Kecamatan		Kec. Koto Xi Tarusan		40,725,000	APBDKOTA			
24.16.	Pembinaan Bulan Bakti Gotong Royong		Kec. Koto Xi Tarusan		3,550,000	APBDKOTA			
24.17.	Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga		Kec. Koto Xi Tarusan		7,850,000	APBDKOTA			
47.	Program Pemantapan Otonomi Daerah								
47.09.	Koordinasi dan Pembinaan Kewilayahan		Kec. Koto Xi Tarusan		15,605,000	APBDKOTA			
57.	Program Peningkatan IMTAQ								
57.03.	Fasilitasi Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)		Kec. Koto Xi Tarusan		5,000,000	APBDKOTA			
57.17.	Lembaga Didikan Shubuh		Kec. Koto Xi Tarusan		6,500,000	APBDKOTA			

Nama OPD : KECAMATAN BAYANG

[illegible]

Nama OPD : **KECAMATAN BAYANG**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
17.06.	Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional	Jumlah Pelaksanaan Peringatan upacara Hari Besar Nasional	Kecamatan Bayang	Kecamatan Bayang	30,000,000	APBDKOTA		Kecamatan Bayang	
18.	Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan								
18.25.	Fasilitasi Penyelenggaraan PATEN	Jumlah Rekomendasi Yang Dikeluarkan	Kecamatan Bayang	240 Rekomendasi	14,945,700	APBDKOTA		240 Rekomendasi	
19.	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari								
19.07.	Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Keuangan Pemerintah Nagari		Kecamatan Bayang		15,625,613	APBDKOTA			
21.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat								
21.05.	Pembinaan UKS Kecamatan	Jumlah Sekolah Yang Dibina	Kecamatan Bayang	1 Sekolah	15,850,000	APBDKOTA		1 Sekolah	
21.09.	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah Musrenbang RKPD Yang Diselenggarakan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Bayang	1 Kali	18,012,500	APBDKOTA		1 Kali	
24.	Pemberdayaan lembaga sosial dan ekonomi masyarakat/nagari								
24.15.	Pembinaan PKK Kecamatan	Jumlah PKK Nagari yang Dibina	Kecamatan Bayang	17 Nagari	53,850,000	APBDKOTA		17 Nagari	
24.16.	Pembinaan Bulan Bakti Gotong Royong	Jumlah Bulan Bhakti Gotong Royong Yang Dilakukan	Kecamatan Bayang	1 Kali	15,875,000	APBDKOTA		1 Kali	
47.	Program Pemantapan Otonomi Daerah								
47.09.	Koordinasi dan Pembinaan Kewilayahan	Jumlah Koordinasi dan Pembinaan Kewilayahan Yang Dilakukan	Kecamatan bayang	12 Bulan	12,462,500	APBDKOTA		12 Bulan	
57.	Program Peningkatan IMTAQ								
57.03.	Fasilitasi Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)	Jumlah Peringatan Hari Besar Islam Yang difasilitasi	Kecamatan Bayang	Kecamatan Bayang	10,000,000	APBDKOTA		Kecamatan Bayang	
57.17.	Lembaga Didikan Shubuh	Jumlah Lembaga Didikan Subuh Yang Diikuti	Kecamatan bayang	Kecamatan Bayang	14,000,000	APBDKOTA		Kecamatan Bayang	
57.18.	Penunjang Kegiatan MTQ	Jumlah MTQ Yang Diikuti	Kecamatan bayang	1 Kali	40,000,000	APBDKOTA		1 Kali	

Nama OPD : KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA

[illegible]

Nama OPD : **KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
17.06.	Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional		Kec. IV Nagari Bayang Utara		50,000,000	APBDKOTA			
18.	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa								
18.07.	Publikasi dan Promosi Daerah		Kab. Pesisir Selatan		25,000,000	APBDKOTA			
18.25.	Fasilitasi Penyelenggaraan PATEN		Kec. IV Nagari Bayang Utara		15,000,000	APBDKOTA			
19.	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari								
19.04.	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Nagari		Kec. IV Nagari Bayang Utara		15,000,000	APBDKOTA			
19.05.	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Pemerintahan Nagari		Kec. IV Nagari Bayang Utara		15,000,000	APBDKOTA			
21.	Program perencanaan pembangunan daerah								
21.09.	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD		Kec. IV Nagari Bayang Utara		20,000,000	APBDKOTA			
24.	Pemberdayaan lembaga sosial dan ekonomi masyarakat/nagari								
24.15.	Pembinaan PKK Kecamatan		Kec. IV Nagari Bayang Utara		60,000,000	APBDKOTA			
24.16.	Pembinaan Bulan Bakti Gotong Royong		Kec. IV Nagari Bayang Utara		10,000,000	APBDKOTA			
57.	Penataan Administrasi Kependudukan								
57.02.	Penataan Administrasi Kependudukan		Kec. IV Nagari Bayang Utara		10,254,840	APBDKOTA			
58.	Pemantapan Otonomi Daerah								
58.04.	Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan		Kec. IV Nagari Bayang Utara		10,000,000	APBDKOTA			
58.07.	Pembinaan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan (Pramuka, UKS, dan Festival Langkisau)		Kec. IV Nagari Bayang Utara		7,175,000	APBDKOTA			

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019

Nama OPD : **KECAMATAN IV JURAI**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kec. IV Jurai		9,450,000	APBDKOTA			
01.07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Kec. IV Jurai		67,500,000	APBDKOTA			
01.08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Kec. IV Jurai		45,000,000	APBDKOTA			
01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Kec. IV Jurai		18,000,000	APBDKOTA			
01.11.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Kec. IV Jurai		12,000,000	APBDKOTA			
01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Kec. IV Jurai		3,000,000	APBDKOTA			
01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Kec. IV Jurai		5,800,000	APBDKOTA			
01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman		Kec. IV Jurai		30,000,000	APBDKOTA			
01.18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah		Kec. IV Jurai		30,000,000	APBDKOTA			
01.30.	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan		Kec. IV Jurai		29,000,000	APBDKOTA			
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
02.07.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Kec. IV Jurai		50,000,000	APBDKOTA			
02.22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Kec. IV Jurai		55,000,000	APBDKOTA			
02.24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Kec. IV Jurai		45,000,000	APBDKOTA			
02.28.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Kec. IV Jurai		10,000,000	APBDKOTA			
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
05.01.	Pendidikan dan Pelatihan Formal		Kec. IV Jurai		15,000,000	APBDKOTA			
15.	Program Keluarga Berencana								
15.05.	Pembinaan Keluarga Berencana		Kec. IV Jurai		3,000,000	APBDKOTA			
15.15.	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Trantibum		Kec. IV Jurai		25,000,000	APBDKOTA			
16.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah								
16.01.	Fasilitasi bagi Indstri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya		Kec. IV Jurai		30,000,000	APBDKOTA			
16.12.	Monitoring dan Evaluasi Distribusi Beras Miskin		Kec. IV Jurai		20,000,000	APBDKOTA			

Nama OPD : **KECAMATAN IV JURAI**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
17.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan								
17.06.	Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional		Kec. IV Jurai		50,000,000	APBDKOTA			
18.	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa								
18.07.	Publikasi dan Promosi Daerah		Kab. Pesisir Selatan		20,000,000	APBDKOTA			
18.25.	Fasilitasi Penyelenggaraan PATEN		Kec. IV Jurai		15,000,000	APBDKOTA			
21.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat								
21.05.	Pembinaan UKS Kecamatan		Kec. IV Jurai		20,000,000	APBDKOTA			
21.09.	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD		Kec. IV Jurai		25,000,000	APBDKOTA			
47.	Program Pemandapan Otonomi Daerah								
47.09.	Koordinasi dan Pembinaan Kewilayahan		Kec. IV Jurai		7,200,000	APBDKOTA			
57.	Program Peningkatan IMTAQ								
57.17.	Lembaga Didikan Shubuh		Kec. IV Jurai		10,000,000	APBDKOTA			
72.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Nagari								
72.03.	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari		Kec. IV Jurai		50,000,000	APBDKOTA			

Nama OPD : KECAMATAN BATANG KAPAS

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kec. Batang Kapas		12,500,000	APBDKOTA			
01.07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Kec. Batang Kapas		70,000,000	APBDKOTA			
01.08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Kec. Batang Kapas		32,000,000	APBDKOTA			
01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Kec. Batang Kapas		28,000,000	APBDKOTA			
01.11.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Kec. Batang Kapas		6,500,000	APBDKOTA			
01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Kec. Batang Kapas		2,500,000	APBDKOTA			
01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Kec. Batang Kapas		3,500,000	APBDKOTA			
01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman		Kec. Batang Kapas		23,500,000	APBDKOTA			
01.18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah		Kec. Batang Kapas		50,000,000	APBDKOTA			
01.19.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah		Kec. Batang Kapas		50,000,000	APBDKOTA			
01.30.	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan		Kec. Batang Kapas		13,000,000	APBDKOTA			
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
02.06.	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas		Kec. Batang Kapas		8,000,000	APBDKOTA			
02.07.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Kec. Batang Kapas		35,000,000	APBDKOTA			
02.09.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Kec. Batang Kapas		40,000,000	APBDKOTA			
02.21.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas		Kec. Batang Kapas		9,000,000	APBDKOTA			
02.22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Kec. Batang Kapas		13,000,000	APBDKOTA			
02.24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Kec. Batang Kapas		25,000,000	APBDKOTA			
02.26.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		Kec. Batang Kapas		9,000,000	APBDKOTA			
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
05.01.	Pendidikan dan Pelatihan Formal		-		1,000,000	APBDKOTA			
16.	Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal								
16.12.	Fasilitasi Masalah Trantib dan Pertanahan		Kec. Batang Kapas		14,500,000	APBDKOTA			
18.	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa								

Nama OPD : **KECAMATAN BATANG KAPAS**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
18.07.	Publikasi dan Promosi Daerah		Kec. Batang Kapas		28,000,000	APBDKOTA			
18.25.	Fasilitasi Penyelenggaraan PATEN		Kec. Batang Kapas		50,000,000	APBDKOTA			
19.	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari								
19.09.	Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Pengelolaan Pemerintahan Nagari		Kec. Batang Kapas		50,000,000	APBDKOTA			
21.	Program perencanaan pembangunan daerah								
21.09.	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD		Kec. Batang Kapas		14,500,000	APBDKOTA			
24.	Pemberdayaan lembaga sosial dan ekonomi masyarakat/nagari								
24.15.	Pembinaan PKK Kecamatan		Kec. Batang Kapas		65,000,000	APBDKOTA			
24.16.	Pembinaan Bulan Bakti Gotong Royong		Kec. Batang Kapas		10,000,000	APBDKOTA			
47.	Program Pemantapan Otonomi Daerah								
47.09.	Koordinasi dan Pembinaan Kewilayahan		Kec. Batang Kapas		12,000,000	APBDKOTA			
47.12.	Penilaian Kompetensi Camat		Kec. Batang Kapas		10,000,000	APBDKOTA			
57.	Program Peningkatan IMTAQ								
57.02.	Peningkatan kegiatan keagamaan didikan subuh (wirid remaja)		Kec. Batang Kapas		8,500,000	APBDKOTA			
58.	Pemantapan Otonomi Daerah								
58.07.	Pembinaan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan (Pramuka, UKS, dan Festival Langkisau)		Kec. Batang Kapas		10,000,000	APBDKOTA			
59.	Program Pemberdayaan Potensi Unggulan Kecamatan								
59.01.	Fasilitasi Pemberdayaan Program Unggulan Kecamatan		Kec. Batang Kapas		30,000,000	APBDKOTA			

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019

Nama OPD : **KECAMATAN SUTERA**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kec. Sutera		6,240,000	APBDKOTA			
01.07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Kec. Sutera		42,600,000	APBDKOTA			
01.08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Kec. Sutera		22,170,000	APBDKOTA			
01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Kec. Sutera		20,109,000	APBDKOTA			
01.11.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Kec. Sutera		9,608,600	APBDKOTA			
01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Kec. Sutera		1,928,000	APBDKOTA			
01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Kec. Sutera		2,880,000	APBDKOTA			
01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman		Kec. Sutera		37,950,000	APBDKOTA			
01.18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah		Kec. Sutera		25,600,000	APBDKOTA			
01.19.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah		Kec. Sutera		49,800,000	APBDKOTA			
01.30.	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan		Kec. Sutera		7,875,000	APBDKOTA			
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
02.09.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Kec. Sutera		61,000,000	APBDKOTA			
02.21.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas		Kec. Sutera		3,500,000	APBDKOTA			
02.22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Kec. Sutera		15,500,000	APBDKOTA			
02.24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Kec. Sutera		34,970,000	APBDKOTA			
02.28.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Kec. Sutera		2,400,000	APBDKOTA			
03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
03.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		Kec. Sutera		7,650,000	APBDKOTA			
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
05.01.	Pendidikan dan Pelatihan Formal		Kec. Sutera		10,000,000	APBDKOTA			
18.	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa								
18.07.	Publikasi dan Promosi Daerah		Kec. Sutera		13,362,000	APBDKOTA			
18.25.	Fasilitasi Penyelenggaraan PATEN		Kec. Sutera		7,500,000	APBDKOTA			

Nama OPD : **KECAMATAN SUTERA**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
19.	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari								
19.06.	Pembinaan Administrasi dan Keuangan Pemerintahan Nagari		Kec. Sutera		26,153,800	APBDKOTA			
21.	Program perencanaan pembangunan daerah								
21.09.	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD		Kec. Sutera		28,590,000	APBDKOTA			
24.	Pemberdayaan lembaga sosial dan ekonomi masyarakat/nagari								
24.15.	Pembinaan PKK Kecamatan		Kec. Sutera		39,242,960	APBDKOTA			
24.16.	Pembinaan Bulan Bakti Gotong Royong		Kec. Sutera		17,332,440	APBDKOTA			
47.	Program Pemantapan Otonomi Daerah								
47.09.	Koordinasi dan Pembinaan Kewilayahan		Kec. Sutera		6,000,000	APBDKOTA			
57.	Program Peningkatan IMTAQ								
57.17.	Lembaga Didikan Shubuh		Kec. Sutera		4,442,000	APBDKOTA			

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019

Nama OPD : **KECAMATAN LENGAYANG**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Rekening	Kambang	100%	12,402,000	APBDKOTA		100%	
01.07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah biaya honorarium pengelolaan keuangan	kambang	100%	32,000,000	APBDKOTA		100%	
01.08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah biaya Honorarium petugas kebersihan dan pramu kantor	kambang	100%	13,700,000	APBDKOTA		100%	
01.09.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja		kambang		5,000,000	APBDKOTA			
01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat tulis kantor	kambang	100%	23,500,000	APBDKOTA		100%	
01.11.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetakan penggandaan	kambang	100%	20,192,000	APBDKOTA		100%	
01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan	kambang	100%	5,000,000	APBDKOTA		100%	
01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		kambang		5,000,000	APBDKOTA			
01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	jumlah biaya jamuan makan dan minum	kambang	100%	24,750,000	APBDKOTA		100%	
01.18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah		kambang		30,000,000	APBDKOTA			
01.19.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	- Jumlah Koordinasi dan konsultasi yang diikuti dalam daerah - Penyelesaian konflik	kambang	100%	45,000,000	APBDKOTA		100%	
01.30.	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan		Kec. Lengayang		8,500,000	APBDKOTA			
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
02.06.	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah pengadaan perlengkapan rumah dinas	kambang	100%	25,000,000	APBDKOTA		100%	
02.09.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	kambang	100%	50,742,000	APBDKOTA		100%	
02.21.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah pemeliharaan rumah dinas	kambang	100%	12,500,000	APBDKOTA		100%	
02.22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	kambang	0%	25,000,000	APBDKOTA		0%	
02.24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	kambang	100%	26,000,000	APBDKOTA		100%	
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
05.01.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan	kambang	100%	25,000,000	APBDKOTA		100%	
15.	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan								
15.15.	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Trantibum	Jumlah penyelesaian permasalahan trantibun yang difasilitasi	kambang	100%	12,000,000	APBDKOTA		100%	

Nama OPD : **KECAMATAN LENGAYANG**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
16.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial								
16.12.	Monitoring dan Evaluasi Distribusi Beras Miskin	Jumlah Nagari yang menyalurkan bantuan non tunai tepat sasaran	kambang	100%	8,500,000	APBDKOTA		100%	
17.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan								
17.06.	Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional	Jumlah pelaksanaan PHBN	kambang	100%	20,750,000	APBDKOTA		100%	
17.11.	Fasilitasi Penanganan Kasus KDRT dan Anak	Jumlah kasus KDRT dan anak yang difasilitasi	kambang	100%	20,000,000	APBDKOTA		100%	
17.84.	Fasilitasi Capaian Penerimaan PBB-P2	Persentase penerimaan PBB terhadap target	kambang	100%	18,000,000	APBDKOTA		100%	
18.	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa								
18.07.	Publikasi dan Promosi Daerah		Kec. Lengayang		24,500,000	APBDKOTA			
18.25.	Fasilitasi Penyelenggaraan PATEN	Jumlah rekomendasi yang di keluarkan	kambang	100%	25,000,000	APBDKOTA		100%	
19.	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan								
19.01.	Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	Jumlah satuan keamanan yang dibina	kambang	100%	26,500,000	APBDKOTA		100%	
19.07.	Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Keuangan Pemerintah Nagari	Jumlah Nagari yang dibina dan di fasilitasi	kambang	100%	25,000,000	APBDKOTA		100%	
19.32.	Fasilitasi Lomba Kecamatan Sehat	jumlah titik pantau	kambang	100%	22,000,000	APBDKOTA		100%	
20.	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)								
20.01.	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Jumlah sekolah yang dilakukan sosialisasi	kambang	100%	12,000,000	APBDKOTA		100%	
21.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial								
21.03.	Pembinaan Kelembagaan KAN		kambang		27,000,000	APBDKOTA			
21.05.	Pembinaan UKS Kecamatan	Jumlah sekolah yang dibina	kambang	4 sekolah	15,000,000	APBDKOTA		4 sekolah	
21.09.	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah Musrenbang RKPD yang diselenggarakan di tingkat Kecamatan	kambang	100%	12,000,000	APBDKOTA		100%	
24.	Pemberdayaan lembaga sosial dan ekonomi masyarakat/nagari								
24.10.	Pemberdayaan Kelembagaan Tim Penggerak PKK Kabupaten		kambang		45,000,000	APBDKOTA			
24.16.	Pembinaan Bulan Bakti Gotong Royong		kambang		19,000,000	APBDKOTA			
24.17.	Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga		kambang		16,500,000	APBDKOTA			
26.	Program Penanganan Tanggap Darurat								
26.06.	Pemeliharaan Kendaraan dan Peralatan Tanggap Darurat	Jumlah pemeliharaan kendaraan tanggap darurat	kambang	100%	15,000,000	APBDKOTA		100%	
47.	Program Pemantapan Otonomi Daerah								
47.09.	Koordinasi dan Pembinaan Kewilayahan	jumlah koordinasi dan pembinaan kewilayaan yang dilakukan	kambang	100%	6,000,000	APBDKOTA		100%	
57.	Program Peningkatan IMTAQ								
57.02.	Peningkatan kegiatan keagamaan didikan subuh (wirid remaja)	jumlah lembaga didikan subuh yang dikunjungi	kambang	100%	25,000,000	APBDKOTA		100%	
57.03.	Fasilitasi Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)	Jumlah peringatan hari besar Islam	kambang	100%	5,000,000	APBDKOTA		100%	
57.04.	Fasilitasi MTQ tingkat kabupaten	Jumlah MTQ yang di ikuti	kambang	100%	50,000,000	APBDKOTA		100%	

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019

Nama OPD : **KECAMATAN RANAH PESISIR**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kec. Ranah Pesisir		18,000,000	APBDKOTA			
01.07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Kec. Ranah Pesisir		48,900,000	APBDKOTA			
01.08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Kec. Ranah Pesisir		15,800,100	APBDKOTA			
01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Kec. Ranah Pesisir		20,200,000	APBDKOTA			
01.11.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Kec. Ranah Pesisir		15,000,000	APBDKOTA			
01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Kec. Ranah Pesisir		2,500,000	APBDKOTA			
01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Kec. Ranah Pesisir		3,200,000	APBDKOTA			
01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman		Kec. Ranah Pesisir		34,040,000	APBDKOTA			
01.18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah		Kec. Ranah Pesisir		23,800,000	APBDKOTA			
01.19.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah		Kec. Ranah Pesisir		134,740,000	APBDKOTA			
01.30.	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan		Kec. Ranah Pesisir		9,500,000	APBDKOTA			
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
02.05.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		Kec. Ranah Pesisir		17,500,000	APBDKOTA			
02.22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Kec. Ranah Pesisir		3,925,000	APBDKOTA			
02.24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Kec. Ranah Pesisir		76,755,000	APBDKOTA			
02.26.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		Kec. Ranah Pesisir		7,500,000	APBDKOTA			
02.28.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Kec. Ranah Pesisir		9,000,000	APBDKOTA			
03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
03.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		Kec. Ranah Pesisir		16,800,000	APBDKOTA			
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
05.01.	Pendidikan dan Pelatihan Formal		Kec. Ranah Pesisir		22,800,000	APBDKOTA			
15.	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan								
15.15.	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Trantibum		Kec. Ranah Pesisir		22,860,000	APBDKOTA			

Nama OPD : **KECAMATAN RANAH PESISIR**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
18.	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa								
18.07.	Publikasi dan Promosi Daerah		Kec. Ranah Pesisir		17,500,000	APBDKOTA			
18.25.	Fasilitasi Penyelenggaraan PATEN		Kec. Ranah Pesisir		17,846,000	APBDKOTA			
19.	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari								
19.07.	Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Keuangan Pemerintah Nagari		Kec. Ranah Pesisir		30,035,000	APBDKOTA			
21.	Program perencanaan pembangunan daerah								
21.09.	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD		Kec. Ranah Pesisir		12,961,500	APBDKOTA			
24.	Pemberdayaan lembaga sosial dan ekonomi masyarakat/nagari								
24.15.	Pembinaan PKK Kecamatan		Kec. Ranah Pesisir		104,203,250	APBDKOTA			
24.16.	Pembinaan Bulan Bakti Gotong Royong		Kec. Ranah Pesisir		9,326,600	APBDKOTA			
24.17.	Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga		Kec. Ranah Pesisir		11,500,000	APBDKOTA			
47.	Program Pemantapan Otonomi Daerah								
47.09.	Koordinasi dan Pembinaan Kewilayahan		Kec. Ranah Pesisir		4,247,200	APBDKOTA			
57.	Program Peningkatan IMTAQ								
57.04.	Fasilitasi MTQ tingkat kabupaten		Kec. Ranah Pesisir		0	APBDKOTA			

Nama OPD : KECAMATAN AIRPURA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kec. Airpura		7,500,000	APBDKOTA			
01.07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Airpura		45,000,000	APBDKOTA			
01.08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Kec. Airpura		24,000,000	APBDKOTA			
01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Kec. Airpura		20,000,000	APBDKOTA			
01.11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Kec. Airpura		17,000,000	APBDKOTA			
01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Kec. Airpura		10,000,000	APBDKOTA			
01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Kec. Airpura		4,000,000	APBDKOTA			
01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman		Kec. Airpura		15,000,000	APBDKOTA			
01.18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah		Kec. Airpura		42,000,000	APBDKOTA			
01.19.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah		Kec. Airpura		35,000,000	APBDKOTA			
01.30.	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan		Kec. Airpura		10,000,000	APBDKOTA			
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
02.07.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Kec. Airpura		20,000,000	APBDKOTA			
02.09.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Kec. Airpura		20,000,000	APBDKOTA			
02.21.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas		Kec. Airpura		25,000,000	APBDKOTA			
02.22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Kec. Airpura		20,000,000	APBDKOTA			
02.24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Kec. Airpura		45,000,000	APBDKOTA			
02.26.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		Kec. Airpura		12,000,000	APBDKOTA			
02.28.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Kec. Airpura		15,000,000	APBDKOTA			
03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
03.05.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu		Kec. Airpura		12,000,000	APBDKOTA			
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
05.01.	Pendidikan dan Pelatihan Formal		Kec. Airpura		23,640,000	APBDKOTA			
15.	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan								

Nama OPD : **KECAMATAN AIRPURA**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
15.15.	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Trantibum		Kec. Airpura		20,000,000	APBDKOTA			
16.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial								
16.12.	Monitoring dan Evaluasi Distribusi Beras Miskin		Kec. Airpura		8,000,000	APBDKOTA			
17.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan								
17.06.	Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional		Kec. Airpura		40,000,000	APBDKOTA			
17.84.	Fasilitasi Capaian Penerimaan PBB-P2		Kec. Airpura		15,000,000	APBDKOTA			
18.	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa								
18.07.	Publikasi dan Promosi Daerah		Kec. Airpura		15,000,000	APBDKOTA			
18.25.	Fasilitasi Penyelenggaraan PATEN		Kec. Airpura		27,000,000	APBDKOTA			
19.	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari								
19.07.	Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Keuangan Pemerintah Nagari		Kec. Airpura		25,000,000	APBDKOTA			
21.	Program perencanaan pembangunan daerah								
21.09.	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD		Kec. Airpura		15,000,000	APBDKOTA			
24.	Pemberdayaan lembaga sosial dan ekonomi masyarakat/nagari								
24.15.	Pembinaan PKK Kecamatan		Kec. Aipura		50,000,000	APBDKOTA			
24.16.	Pembinaan Bulan Bakti Gotong Royong		Kec. Airpura		12,000,000	APBDKOTA			
47.	Program Pemantapan Otonomi Daerah								
47.09.	Koordinasi dan Pembinaan Kewilayahan		Kec. Airpura		7,500,000	APBDKOTA			

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019

Nama OPD : **KECAMATAN PANCUNG SOAL**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kecamatan Pancung Soal		15,000,000	APBDKOTA			
01.07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Kecamatan Pancung Soal		50,800,000	APBDKOTA			
01.08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Kecamatan Pancung Soal		35,000,000	APBDKOTA			
01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Kecamatan Pancung Soal		25,000,000	APBDKOTA			
01.11.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Kecamatan Pancung Soal		15,000,000	APBDKOTA			
01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Kecamatan Pancung Soal		5,000,000	APBDKOTA			
01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Kecamatan Pancung Soal		6,000,000	APBDKOTA			
01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman		Kecamatan Pancung Soal		20,000,000	APBDKOTA			
01.18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah		Kecamatan Pancung Soal		60,000,000	APBDKOTA			
01.19.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah		Kecamatan Pancung Soal		60,000,000	APBDKOTA			
01.30.	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan		Kecamatan Pancung Soal		10,000,000	APBDKOTA			
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
02.07.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Kecamatan Pancung Soal		5,000,000	APBDKOTA			
02.09.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Kecamatan Pancung Soal		90,000,000	APBDKOTA			
02.21.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas		Kecamatan Pancung Soal		10,000,000	APBDKOTA			
02.22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Kecamatan Pancung Soal		10,000,000	APBDKOTA			
02.24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Kecamatan Pancung Soal		60,000,000	APBDKOTA			
02.28.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Kecamatan Pancung Soal		5,000,000	APBDKOTA			
03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
03.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta		Kecamatan Pancung		7,000,000	APBDKOTA			

Nama OPD : **KECAMATAN PANCUNG SOAL**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Perengkapannya		Soal						
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
05.01.	Pendidikan dan Pelatihan Formal		Kecamatan Pancung Soal		25,000,000	APBDKOTA			
15.	Program Keluarga Berencana								
15.05.	Pembinaan Keluarga Berencana		Kec. Pancung Soal		0	APBDKOTA			
16.	Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal								
16.12.	Fasilitasi Masalah Trantib dan Pertanahan		Kec. Pancung Soal		10,000,000	APBDKOTA			
16.12.	Monitoring dan Evaluasi Distribusi Beras Miskin		Kecamatan Pancung Soal		16,500,000	APBDKOTA			
17.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan								
17.06.	Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional		Kecamatan Pancung Soal		40,000,000	APBDKOTA			
17.84.	Fasilitasi Capaian Penerimaan PBB-P2		Kecamatan Pancung Soal		11,000,000	APBDKOTA			
18.	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa								
18.07.	Publikasi dan Promosi Daerah		Kec. Pancung Soal		25,000,000	APBDKOTA			
18.25.	Fasilitasi Penyelenggaraan PATEN		Kec. Pancung Soal		20,000,000	APBDKOTA			
19.	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari								
19.09.	Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Pengelolaan Pemerintahan Nagari		Kecamatan Pancung Soal		25,300,000	APBDKOTA			
21.	Program pendidikan politik masyarakat								
21.07.	Fasilitasi Penyelenggaran Pilwana		Kecamatan Pancung Soal		10,000,000	APBDKOTA			
21.09.	Penyelenggaran Musrenbang RKPD		Kec. Pancung Soal		0	APBDKOTA			
24.	Pemberdayaan lembaga sosial dan ekonomi masyarakat/nagari								
24.15.	Pembinaan PKK Kecamatan		Kec. Pancung Soal		50,000,000	APBDKOTA			
24.16.	Pembinaan Bulan Bakti Gotong Royong		Kec. Pancung Soal		8,000,000	APBDKOTA			
56.	Program Pembangunan Wilayah Kecamatan								
56.24.	Pembangunan Tugu dan Icon Kecamatan		Kecamatan Pancung Soal		40,000,000	APBDKOTA			
57.	Program Peningkatan IMTAQ								
57.03.	Fasilitasi Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)		Kec. Pancung Soal		10,000,000	APBDKOTA			
58.	Pemantapan Otonomi Daerah								
58.07.	Pembinaan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan (Pramuka, UKS, dan Festival Langkisau)		Kecamatan Pancung Soal		10,000,000	APBDKOTA			

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019

Nama OPD : **KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah honorarium pramu kantor yang dibayar	Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	100	20,000,000	APBDKOTA		100	
01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan rekening listrik dan air	Kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan	12	13,500,000	APBDKOTA		12	
01.07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah biaya honorarium pengelola keuangan	Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	12	84,150,000	APBDKOTA		12	
01.08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah honorium kebersihan kantor yang dibayar	Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	100	18,500,000	APBDKOTA		100	
01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pembelian alat tulis kantor	Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	100	9,000,000	APBDKOTA		100	
01.11.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	Kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan	100	14,000,000	APBDKOTA		100	
01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah sarana dan prasarana instalasi listrik dan penerangan kantor	Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	12	4,500,000	APBDKOTA		12	
01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah surat kabar dan Per-UU	Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	100	6,500,000	APBDKOTA		100	
01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan minum rapat dan tamu	Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	12	18,000,000	APBDKOTA		12	
01.18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	100	37,000,000	APBDKOTA		100	
01.19.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	100	62,000,000	APBDKOTA		100	
01.30.	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	Jumlah laporan perencanaan dan pelaporan yang dibuat	Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	100	8,000,000	APBDKOTA		100	
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
02.09.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan		25,000,000	APBDKOTA			
02.22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan		15,000,000	APBDKOTA			
02.24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan		50,000,000	APBDKOTA			
02.26.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan		30,000,000	APBDKOTA			
02.28.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan		10,000,000	APBDKOTA			
03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
03.05.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pakaian hari hari tertentu	kecamatan Basa	100	10,000,000	APBDKOTA		100	

Nama OPD : KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Ampek Balai Tapan						
15.	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan								
15.15.	Fasilitas Penyelesaian Permasalahan Trantibum		Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan		7,800,000	APBDKOTA			
16.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial								
16.12.	Monitoring dan Evaluasi Distribusi Beras Miskin		Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan		8,800,000	APBDKOTA			
17.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan								
17.06.	Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional		Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan		25,000,000	APBDKOTA			
17.84.	Fasilitasi Capaian Penerimaan PBB-P2		Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan		5,500,000	APBDKOTA			
18.	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa								
18.07.	Publikasi dan Promosi Daerah		Kec. BAB Tapan		15,000,000	APBDKOTA			
18.25.	Fasilitasi Penyelenggaraan PATEN		Kec. BAB Tapan		10,000,000	APBDKOTA			
19.	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari								
19.09.	Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Pengelolaan Pemerintahan Nagari		Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan		23,000,000	APBDKOTA			
21.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial								
21.01.	Penunjang Kegiatan MTQ Kecamatan		kecamatan Basa Ampek Balai Tapan		30,000,000	APBDKOTA			
21.05.	Pembinaan UKS Kecamatan		Kec. Basa Ampek Balai		10,000,000	APBDKOTA			
21.09.	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD		Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan		30,000,000	APBDKOTA			
24.	Pemberdayaan lembaga sosial dan ekonomi masyarakat/nagari								
24.15.	Pembinaan PKK Kecamatan		Kec. BAB Tapan		50,000,000	APBDKOTA			
24.16.	Pembinaan Bulan Bakti Gotong Royong		Kec. BAB Tapan		10,000,000	APBDKOTA			
24.17.	Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga		Kec. BAB Tapan		10,000,000	APBDKOTA			
26.	Program Penanganan Tanggap Darurat								
26.08.	Koordinasi Kebencanaan Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah kasus tanggap darurat yang ditangani	Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	100	15,000,000	APBDKOTA		100	
47.	Program Pemantapan Otonomi Daerah								
47.09.	Koordinasi dan Pembinaan Kewilayahan		Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan		10,000,000	APBDKOTA			
56.	Program Pembangunan Wilayah Kecamatan								
56.07.	Pembinaan Produk Unggulan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah produk unggulan yang dibina	Kec. BAB Tapan	100	20,000,000	APBDKOTA		100	
57.	Program Peningkatan IMTAQ								
57.02.	Peningkatan kegiatan keagamaan didikan subuh (wirid remaja)		Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan		11,000,000	APBDKOTA			

Nama OPD : KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
57.03.	Fasilitasi Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)		Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan		6,000,000	APBDKOTA			
57.20.	Safari Ramadhan		Kec. BAB Tapan		11,000,000	APBDKOTA			

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019

Nama OPD : **KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Honorarium Pramu Kantor	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	12 Bulan	11,000,000	APBDKOTA		12 Bulan	
01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan rekening listrik dan air	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	100%	20,000,000	APBDKOTA		100%	
01.07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah biaya honorarium pengelola administrasi	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	100%	56,500,000	APBDKOTA		100%	
01.08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Sarana Kebersihan	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	100%	38,800,000	APBDKOTA		100%	
01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	100%	29,500,000	APBDKOTA		100%	
01.11.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan		17,000,000	APBDKOTA			
01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik Penerangan bangunan	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	100%	3,400,000	APBDKOTA		100%	
01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Surat Kabar dan Buku Per-Uu	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	100%	3,750,000	APBDKOTA		100%	
01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Biaya Jamuan makan dan Minum	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	100%	22,500,000	APBDKOTA		100%	
01.18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Koordinasi dann Konsultasi yang diikuti luar daerah	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	100%	34,850,000	APBDKOTA		100%	
01.19.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti dalam Daerah	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	100%	48,500,000	APBDKOTA		100%	
01.30.	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	Jumlah Laporan perencanaan dan Pelaporan yang dibuat	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	100%	12,500,000	APBDKOTA		100%	
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
02.07.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung Kantor	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	100%	20,000,000	APBDKOTA		100%	

Nama OPD : **KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
02.09.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	100%	28,000,000	APBDKOTA		100%	
02.20.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah Pemeliharaan rumah dinas	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	100%	12,000,000	APBDKOTA		100%	
02.22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	jumlah pemeliharaan gedung Kantor	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	100%	7,000,000	APBDKOTA		100%	
02.24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah pemeliharaan kendaraan Dinas	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	100%	30,000,000	APBDKOTA		100%	
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
05.01.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan Formal	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	100%	37,500,000	APBDKOTA		100%	
17.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan								
17.06.	Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional	Jumlah pelaksanaan PBHN	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	100%	80,000,000	APBDKOTA		100%	
17.23.	Pembinaan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau	Jumlah ruang terbuka Hijau yang dimanfaatkan	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	100%	21,000,000	APBDKOTA		100%	
18.	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa								
18.07.	Publikasi dan Promosi Daerah		Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan		26,000,000	APBDKOTA			
18.25.	Fasilitasi Penyelenggaraan PATEN	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	100%	15,000,000	APBDKOTA		100%	
20.	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)								
20.12.	Penyuluhan Pencegahan Peredaran Penggunaan Minuman Keras, Narkoba dan PEKAT	JJumlah Sekolah yang dilakukan Penyuluhan	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	100%	30,000,000	APBDKOTA		100%	
21.	Program perencanaan pembangunan daerah								
21.09.	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah Musrenbang RKPD yang diselenggarakan di Tingkat Kecamatan	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	100%	12,000,000	APBDKOTA		100%	
47.	Program Pementapan Otonomi Daerah								
47.09.	Koordinasi dan Pembinaan Kewilayahan	Jumlah koordinasi dan pembinaan kewilayahan yang dilakukan	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	100%	8,500,000	APBDKOTA		100%	

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019

Nama OPD : **KECAMATAN LUNANG**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kec. Lunang		5,600,000	APBDKOTA			
01.07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Kec. Lunang		36,300,000	APBDKOTA			
01.08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Kec. Lunang		21,213,200	APBDKOTA			
01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Kec. Lunang		18,716,800	APBDKOTA			
01.11.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Kec. Lunang		8,281,400	APBDKOTA			
01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Kec. Lunang		1,500,000	APBDKOTA			
01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Kec. Lunang		1,200,000	APBDKOTA			
01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman		Kec. Lunang		13,000,000	APBDKOTA			
01.18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah		Kec. Lunang		28,550,000	APBDKOTA			
01.19.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah		Kec. Lunang		145,000,000	APBDKOTA			
01.23.	Penyediaan Jasa Publikasi		Kec. Lunang		1,000,000	APBDKOTA			
01.30.	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan		Kec. Lunang		30,000,000	APBDKOTA			
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
02.07.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Kec. Lunang		18,950,000	APBDKOTA			
02.09.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Kec. Lunang		17,000,000	APBDKOTA			
02.21.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas		Kec. Lunang		0	APBDKOTA			
02.22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Kec. Lunang		45,000,000	APBDKOTA			
02.24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Kec. Lunang		29,450,000	APBDKOTA			
02.25.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas		Kec. Lunang		0	APBDKOTA			
02.27.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas		Kec. Lunang		0	APBDKOTA			
02.28.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Kec. Lunang		6,000,000	APBDKOTA			
03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
03.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		Kec. Lunang		10,500,000	APBDKOTA			

Nama OPD : **KECAMATAN LUNANG**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
05.01.	Pendidikan dan Pelatihan Formal		Kec. Lunang		15,000,000	APBDKOTA			
15.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya								
15.10.	Verifikasi Dan Validasi Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS/PSKS)		Kec. Lunang		10,000,000	APBDKOTA			
17.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan								
17.06.	Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional		Kec. Lunang		25,000,000	APBDKOTA			
17.84.	Fasilitasi Capaian Penerimaan PBB-P2		Kec. Lunang		10,000,000	APBDKOTA			
18.	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa								
18.07.	Publikasi dan Promosi Daerah		Kec. Lunang		21,540,000	APBDKOTA			
18.25.	Fasilitasi Penyelenggaraan PATEN		Kec. Lunang		6,000,000	APBDKOTA			
19.	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari								
19.04.	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Nagari		Kec. Lunang		25,000,000	APBDKOTA			
19.05.	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Pemerintahan Nagari		Kec. Lunang		40,000,000	APBDKOTA			
19.05.	Pembinaan dan Perbekalan LINMAS		Kec. Lunang		8,000,000	APBDKOTA			
21.	Program perencanaan pembangunan daerah								
21.09.	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD		Kec. Lunang		25,486,000	APBDKOTA			
24.	Pemberdayaan lembaga sosial dan ekonomi masyarakat/nagari								
24.15.	Pembinaan PKK Kecamatan		Kec. Lunang		25,000,000	APBDKOTA			
24.16.	Pembinaan Bulan Bakti Gotong Royong		Kec. Lunang		10,000,000	APBDKOTA			
47.	Program Pemantapan Otonomi Daerah								
47.09.	Koordinasi dan Pembinaan Kewilayahan		Kec. Lunang		10,000,000	APBDKOTA			
57.	Program Peningkatan IMTAQ								
57.18.	Penunjang Kegiatan MTQ		Kec. Lunang		50,000,000	APBDKOTA			

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019

Nama OPD : **KECAMATAN SILAUT**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kecamatan Silaut		3,600,000	APBDKOTA			
01.07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Kecamatan Silaut		61,800,000	APBDKOTA			
01.08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Kecamatan Silaut		40,787,200	APBDKOTA			
01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Kecamatan Silaut		11,590,200	APBDKOTA			
01.11.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Kecamatan Silaut		11,657,800	APBDKOTA			
01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Kecamatan Silaut		2,554,000	APBDKOTA			
01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Kecamatan Silaut		1,800,000	APBDKOTA			
01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman		Kecamatan Silaut		11,000,000	APBDKOTA			
01.18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah		-		36,450,000	APBDKOTA			
01.19.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah		-		86,280,000	APBDKOTA			
01.30.	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan		Kecamatan Silaut		13,480,000	APBDKOTA			
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
02.07.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Kecamatan Silaut		2,893,000	APBDKOTA			
02.09.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Kecamatan Silaut		12,500,000	APBDKOTA			
02.22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Kecamatan Silaut		17,939,000	APBDKOTA			
02.24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Kecamatan Silaut		54,889,000	APBDKOTA			
02.28.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Kecamatan Silaut		5,400,000	APBDKOTA			
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
05.01.	Pendidikan dan Pelatihan Formal		-		0	APBDKOTA			
15.	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan								
15.15.	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Trantibum		Kecamatan Silaut		5,967,000	APBDKOTA			
16.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial								
16.13.	Monitoring, Evaluasi, dan Kebijakan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)		Kecamatan Silaut		8,078,500	APBDKOTA			

Nama OPD : **KECAMATAN SILAUT**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun Perencanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
17.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan								
17.06.	Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional		Kecamatan Silaut		25,143,100	APBDKOTA			
17.84.	Fasilitasi Capaian Penerimaan PBB-P2		Kecamatan Silaut		8,361,300	APBDKOTA			
18.	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh								
18.02.	Koordinasi penetapan rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh		Kecamatan Silaut		22,184,000	APBDKOTA			
18.07.	Publikasi dan Promosi Daerah		Kec. Silaut		21,384,650	APBDKOTA			
18.25.	Fasilitasi Penyelenggaraan PATEN		Kec. Silaut		0	APBDKOTA			
19.	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari								
19.09.	Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Pengelolaan Pemerintahan Nagari		Kecamatan Silaut		8,835,000	APBDKOTA			
21.	Program perencanaan pembangunan daerah								
21.09.	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD		Kec. Silaut		9,079,900	APBDKOTA			
24.	Pemberdayaan lembaga sosial dan ekonomi masyarakat/nagari								
24.15.	Pembinaan PKK Kecamatan		Kec. Silaut		41,977,250	APBDKOTA			
24.16.	Pembinaan Bulan Bakti Gotong Royong		Kec. Silaut		2,734,000	APBDKOTA			
47.	Program Pemantapan Otonomi Daerah								
47.09.	Koordinasi dan Pembinaan Kewilayahan		Kecamatan Silaut		5,799,000	APBDKOTA			
56.	Program Pembangunan Wilayah Kecamatan								
56.07.	Pembinaan Produk Unggulan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat		Kecamatan Silaut		10,363,000	APBDKOTA			
57.	Program Peningkatan IMTAQ								
57.03.	Fasilitasi Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)		Kecamatan Silaut		0	APBDKOTA			
57.13.	Persiapan dan Penyelenggaraan MTQ		Kecamatan Silaut		34,402,800	APBDKOTA			
57.17.	Lembaga Didikan Shubuh		Kecamatan Silaut		7,800,000	APBDKOTA			
57.20.	Safari Ramadhan		Kec. Silaut		10,000,000	APBDKOTA			